



RPJPD

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH 2025 - 2045

**“Bangka Selatan sebagai Gerbang Ekonomi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Maju dan Berkelanjutan 2045”**



BUPATIBANGKASELATAN

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa rencana pembangunan jangka panjang daerah mempunyai peran dan fungsi penting dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan daerah secara bertahap guna mempercepat perwujudan masyarakat adil dan makmur;
- b. bahwa untuk menjamin agar penyelenggaraan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan efektif, efisien, konsisten dan berkelanjutan perlu disusun dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat Visi, Misi, dan arah pembangunan daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
dan
BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun berpedoman pada RPJP Nasional.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RJPM Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
8. Pengendalian dan Evaluasi adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) RPJP Daerah Tahun 2025-2045 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJP Nasional dan RTRW.
- (2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi, dan program Kepala Daerah.

BAB III SISTEMATIKA RPJPD

Pasal 3

Sistematika penyusunan RPJP Daerah Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas 6 (enam) bab yaitu:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis;
- d. visi dan misi daerah;
- e. arah kebijakan dan sasaran pokok; dan
- f. penutup.

Pasal 4

RPJP Daerah Tahun 2025–2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

RPJP Daerah Tahun 2005–2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJP Daerah.
- (2) Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan konsistensi antara RPJP Daerah dengan RPJP Nasional, RTRW dan rencana pembangunan jangka panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (3) Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABV
KETENTUANPENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2012 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali

pada tanggal 31 Oktober 2024

Pjs. BUPATI BANGKA SELATAN,



Diundangkan di Toboali

pada tanggal 31 Oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANGKA SELATAN,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024 NOMOR
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG:(7.57/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Pembangunan Nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi.

Perencanaan pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Oleh karena itu untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan Daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan Daerah, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang.

Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Selatan adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi pemerintah dan seluruh aspek kehidupan masyarakat untuk melaksanakan tugas dalam mewujudkan tujuan pembangunan Daerah dengan mengarah pada pencapaian pembangunan nasional. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi.

RPJP Daerah Kabupaten Bangka Selatan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJM Daerah pada masing-masing tahapan dan periode RPJM Daerah sesuai dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJM Daerah tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan Daerah, yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program dan kegiatan Perangkat Daerah di Kabupaten Bangka Selatan.

Peraturan Daerah ini memuat visi bersama seluruh elemen masyarakat Kabupaten Bangka Selatan dalam jangka panjang pembangunan Daerah, yaitu “Bangka Selatan gerbang ekonomi Bangka Belitung yang berdaya saing dan berkelanjutan 2045”. Selanjutnya visi tersebut dijabarkan dalam misi, arah dan strategi pembangunan yang terurai dalam lampiran Peraturan Daerah ini sebagai bagian tak terpisahkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 3.

KATA PENGANTAR

Kabupaten Bangka Selatan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terbentuk berdasarkan UU 5/2003 dimana kehadirannya diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan peradaban bukan hanya skala regional namun juga skala nasional dan global.

Tentunya harapan tersebut tidak berlebihan mengingat Kabupaten Bangka Selatan memiliki keunggulan kompetitif dan secara geografis menjadi pintu masuk aktivitas perekonomian di Bangka Belitung. Selanjutnya segala Upaya tersebut dituangkan dalam RPJPD Kabupaten Bangka Selatan 2025-2045.

Dokumen RPJPD Kabupaten Bangka Selatan 2025-2045 yang telah disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dilakukan secara partisipatif dengan mendapatkan masukan yang konstruktif dari seluruh entitas Pembangunan dan selanjutnya dilakukan penelaahan secara teknokratik guna mendapatkan rumusan permasalahan dan isu-isu strategis 20 (dua puluh) tahun kedepan baik megatrend isu global, nasional, regional maupun lokal.

Semoga dokumen ini dapat menjadi acuan seluruh elemen terlebih para penentu kebijakan Pembangunan untuk mewujudkan Visi Kabupaten Bangka Selatan, yaitu "Bangka Selatan sebagai Gerbang Ekonomi Bangka Belitung Yang Maju dan Berkelanjutan 2045".

Toboali, Oktober 2024

Pjs. BUPATI BANGKA SELATAN



Dr. Elfin Elyas, M.Si, CRGP, CGCAE, CFA



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum	I-3
1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Lainnya	I-6
1.4. Maksud dan Tujuan	I-10
1.5. Sistematika Penulisan	I-11
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-2
2.1.1. Karakteristik lokasi dan wilayah.....	II-2
2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi	II-2
2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografi.....	II-4
2.1.1.3. Kondisi Topografi	II-5
2.1.1.4. Kondisi Geologi	II-10
2.1.1.5. Kondisi Hidrologi	II-15
2.1.1.6. Klimatologi	II-21
2.1.1.7. Penggunaan Lahan	II-24
2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah.....	II-30
2.1.2.1. Rencana Kawasan Lindung.....	II-31
2.1.2.2. Rencana Kawasan Budidaya.....	II-32
2.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	II-55
2.1.3.1. Daya Dukung Lahan Terbangun.....	II-55
2.1.3.2. Daya Dukung Pangan.....	II-56
2.1.3.3. Daya Dukung Air Pemukiman.....	II-57



2.1.3.4. Daya Dukung Pangan Berbasis Grid.....	II-61
2.1.3.5. Daya Dukung Air Permukaan Berbasis Grid.....	II-63
2.1.4. Kondisi Lingkungan Hidup.....	II-64
2.1.4.1. Ruang Terbuka Hijau.....	II-64
2.1.4.2. Ketaatan Dokumen AMDAL/UPL/UKL.....	II-67
2.1.4.3. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).....	II-68
2.1.4.4. Indeks Keanekaragaman Hayati (IKH).....	II-69
2.1.5. Wilayah Rawan Bencana dan Perubahan Iklim.....	II-72
2.1.5.1. Wilayah Rawan Bencana.....	II-72
2.1.5.2. Perubahan Iklim.....	II-80
2.1.6. Aspek Demografi.....	II-84
2.1.6.1. Jumlah dan Struktur Umur Penduduk.....	II-84
2.1.6.2. Dinamika Penduduk.....	II-85
2.1.6.3. Distribusi/Persebaran Penduduk.....	II-87
2.1.6.4. Rasio Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk.....	II-88
2.1.6.5. Rasio ketergantungan.....	II-89
2.2. Aspek Kesejahteraan Sosial dan Budaya.....	II-90
2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi.....	II-90
2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB.....	II-91
2.2.1.2. Laju Inflasi.....	II-92
2.2.1.3. Indeks Gini.....	II-95
2.2.1.4. Indeks Ketimpangan Williamson.....	II-96
2.2.1.5. Tipologi Klassen.....	II-97
2.2.1.6. Persentase Penduduk Miskin.....	II-98
2.2.1.7. Kemiskinan Ekstrim.....	II-103
2.2.1.8. Tingkat Pengangguran Terbuka.....	II-104
2.2.1.9. Indeks Pembangunan Manusia.....	II-106
2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya.....	II-109
2.2.2.1. Indeks Pembangunan Gender.....	II-109
2.2.2.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (Sumbangan dalam Pendapatan Kerja).....	II-114
2.2.2.3. Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan.....	II-114
2.2.2.4. Indeks Kabupaten Layak Anak (KLA).....	II-116
2.2.2.5. Rata-Rata Lama Sekolah.....	II-117
2.2.2.6. Harapan Lama Sekolah.....	II-119



2.2.2.7. Angka Partisipasi Murni.....	II-120
2.2.2.8. Angka Partisipasi Kasar.....	II-122
2.2.2.9. Capaian Literasi dan Numerasi	II-124
2.2.2.10. Persentase Satuan Pendidikan Dalam Kompetensi Minimum	II-125
2.2.2.11. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).....	II-132
2.2.2.12. Angka Harapan Hidup (AHH).....	II-134
2.2.2.13. Infant Mortality Rate (IMR) Per 1000 Kelahiran Hidup...	II-137
2.2.2.14. Persentase Balita Gizi Buruk	II-139
2.2.2.15. Prevalensi Balita Bergizi Buruk	II-142
2.2.2.16. Stunting.....	II-144
2.2.2.17. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	II-146
2.2.2.18. Kesenian dan Kebudayaan	II-148
2.2.2.19. Perkembangan Cabang Olahraga.....	II-140
2.2.2.20. Jumlah Even/Kegiatan Festival Seni Dan Budaya.....	II-152
2.2.2.21. Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan.....	II-155
2.3. Aspek Daya Saing Daerah	II-158
2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah.....	II-158
2.3.1.1. PDRB Perkapita	II-158
2.3.1.2. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita.....	II-166
2.3.1.3. Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Perkapita.....	II-169
2.3.1.4. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	II-169
2.3.1.5. Ketahanan Pangan Daerah	II-173
2.3.1.6. Pertumbuhan Sektor Produksi Perkebunan	II-181
2.3.1.7. Pertumbuhan Sektor Kelautan dan Perikanan.....	II-183
2.3.1.8. Pertumbuhan Sektor Pariwisata.....	II-186
2.3.1.9. Pertumbuhan Sektor Perdagangan.....	II-190
2.3.1.10. Pertumbuhan Sektor Perindustrian.....	II-191
2.3.1.11. Analisis Sektor Unggulan di Kabupaten Bangka Selatan .	II-193
2.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia	II-198
2.3.2.1. Angkatan Partisipasi Tenaga Kerja.....	II-198
2.3.2.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	II-199
2.3.2.3. Rasio Penduduk yang Bekerja	II-200
2.3.2.4. Rasio Guru/Murid.....	II-200



2.3.2.5. Persentase Guru Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	II-201
2.3.2.6. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk.....	II-203
2.3.2.7. Rasio Tenaga Medis.....	II-205
2.3.2.8. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)	II-209
2.3.2.9. Rasio Linmas Per 1000 Penduduk	II-210
2.3.2.10. Organisasi Kepemudaan	II-213
2.3.3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur.....	II-214
2.3.3.1. Ketersediaan Gedung Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah	II-214
2.3.3.2. Peningkatan Perpustakaan.....	II-217
2.3.3.3. Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu).....	II-218
2.3.3.4. Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk.....	II-221
2.3.3.5. Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap.....	II-222
2.3.3.6. Persentase Jembatan	II-226
2.3.3.7. Persentase Drainase Permukiman Kondisi Baik	II-227
2.3.3.8. Rasio Jaringan Irigasi.....	II-228
2.3.3.9. Persentase Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak.....	II-229
2.3.3.10. Persentase Kawasan Kumuh	II-230
2.3.3.11. Persentase Rumah Layak Huni.....	II-233
2.3.3.12. Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang.....	II-234
2.3.3.13. Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabang.....	II-235
2.3.3.14. Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran.....	II-235
2.3.3.15. Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel.....	II-236
2.3.3.16. Sarana Gedung Olahraga.....	II-237
2.3.3.17. Tingkat Kecukupan Sarana dan Prasarana Perhubungan	II-238
2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi.....	II-239
2.3.4.1. Pengembangan Investasi dan Penanaman Modal.....	II-239
2.3.4.2. Rata-rata Lama Proses Perizinan	II-241
2.3.4.3. Jumlah Peraturan Daerah Mendukung Iklim Usaha.....	II-244
2.3.4.4. Angka Kriminalitas.....	II-245
2.3.4.5. Persentase Penegakan Perda	II-248
2.4. Aspek Pelayanan Umum	II-250
2.4.1. Indikator Penunjang kinerja Pemerintah.....	II-250
2.4.2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	II-252
2.4.3. Kajian Penelitian dan Pengembangan.....	II-253
2.4.4. Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah.....	II-255



2.4.5. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.....	II-273
2.4.6. Indikator Kinerja Statistik.....	II-274
2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025	II-276
2.5.1. Penjabaran dan Analisis Capaian Indikator Makro Pembangunan	II-276
2.5.2. Capaian Standar Pelayanan Minimal	II-283
2.5.2.1. Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan ..	II-283
2.5.2.2. Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan ...	II-284
2.5.2.3. Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum	II-289
2.5.2.4. Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	II-290
2.5.2.5. Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	II-291
2.5.2.6. Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial.....	II-293
2.5.3. Evaluasi Capaian Sustainable Development Goals atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGS/TPB).....	II-295
2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	II-347
2.6.1. Analisis Proyeksi Kependudukan per Lima Tahun dari Tahun 2025 -2045	II-347
2.6.1.1. Perkembangan Jumlah Penduduk.....	II-347
2.6.1.2. Distribusi Penduduk.....	II-350
2.6.1.3. Bonus Demografi dan Usia Ketergantungan	II-351
2.6.2. Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana per Lima Tahun dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.....	II-353
2.6.2.1. Analisis Sarana Pelayanan Umum Wilayah	II-353
2.6.2.2. Analisis Sarana Perumahan	II-353
2.6.2.3. Analisis Sarana Pendidikan.....	II-356
2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah	II-403
2.7.1. Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan.....	II-404
2.7.2. Pengembangan Kawasan Strategis	II-406
2.7.2.1. Rencana Pengembangan Kawasan Strategis.....	II-406
2.7.2.2. Tujuan Pengembangan Kawasan Strategis.....	II-418
2.7.2.3. Arah Pengembangan Kawasan Strategis	II-419
2.7.3. Arah Pengembangan Kawasan Pedesaan	II-420



BAB III	PERMASALAHAN ISU - ISU STRATEGIS DAERAH	III-1
	3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah	III-1
	3.2. Penelahaan Isu Global, Nasional dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Berpengaruh terhadap Kabupaten Bangka Selatan	III-18
	3.2.1. Isu Global dan Dinamika Internasional	III-18
	3.2.2. Isu Global Presidensi G 20	III-18
	3.2.3. Isu Strategis dan Tantangan Pembangunan Nasional 20 Tahun Kedepan	III-23
	3.2.4. Isu Strategis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	III-25
	3.2.5. Isu Strategis Kabupaten Bangka Selatan.....	III-26
BAB IV	VISI DAN MISI DAERAH	IV-1
	4.1 Visi	IV-1
	4.1.1. Visi Indonesia Emas 2045 dan Babel BERTUAH 2045.....	IV-1
	4.1.2. Visi Bangka Selatan 2045	IV-3
	4.2 Misi	IV-11
	4.2.1. Misi (Agenda) Pembangunan Nasional 2045 dan Misi (Agenda) Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2045	IV-11
	4.2.2. Misi (Agenda) Pembangunan Kabupaten Bangka Selatan 2045	IV-13
BAB V	ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH	V-1
	5.1 Arah Kebijakan Pembangunan	V-1
	5.2 Sasaran Pokok Pembangunan	V-12
	5.2.1. Transformasi Sosial.....	V-12
	5.2.1.1. Kesehatan Untuk Semua	V-13
	5.2.1.2. Pendidikan Berkualitas Yang Merata.....	V-14
	5.2.1.3. Perlindungan Sosial yang Adaptif	V-15
	5.2.2. Transformasi Ekonomi	V-17
	5.2.2.1. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi.....	V-18
	5.2.2.2. Penerapan Ekonomi Hijau.....	V-21
	5.2.2.3. Tansformasi Digital.....	V-21
	5.2.2.4. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	V-21
	5.2.2.5. Perkotaan dan Perdesaaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi.....	V-21
	5.2.3. Transformasi Tata Kelola.....	V-23



5.2.3.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif..	V-24
5.2.4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan.....	V.25
5.2.4.1. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh dan Demokrasi Substansial	V-25
5.2.4.2. Stabilitas Ekonomi Makro	V-26
5.2.5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi.....	V-27
5.2.5.1. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju.....	V-28
5.2.5.2. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif	V-29
5.2.5.3. Lingkungan Hidup Berkualitas.....	V-29
5.2.5.4. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	V-29
5.2.5.5. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	V-31
BAB VI PENUTUP	VI-1
6.1. Pelaksanaan	VI-1
6.2. Pembiayaan	IV-2
6.3. Proses Pelaksanaan Manajemen Risiko.....	IV-3
LAMPIRAN I	1
LAMPIRAN II	2



DAFTAR GAMBAR

BAB I

Gambar 1.1	Megatren Dunia 2045	I-1
Gambar 1.2	Sinkronisasi Antar Dokumen Perencanaan	I-7
Gambar 1.3	Hubungan RPJPD dengan RPJMD	I-8

BAB II

Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Bangka Selatan.....	II-2
Gambar 2.2	Alur Laut Kepulauan Indonesia	II-4
Gambar 2.3.	Peta Topografi Kabupaten Bangka Selatan	II-6
Gambar 2.4	Peta Geologi Kabupaten Bangka Selatan	II-14
Gambar 2.5	Peta Hidrologi Kabupaten Bangka Selatan	II-15
Gambar 2.6	Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Bangka Selatan	II-19
Gambar 2.7	Peta Curah Hujan Kabupaten Bangka Selatan	II-22
Gambar 2.8	Peta Tutupan Lahan Kabupaten Bangka Selatan	II-25
Gambar 2.9	Peta Kawasan Hutan Kabupaten Bangka Selatan	II-30
Gambar 2.10	Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Bangka Selatan	II-33
Gambar 2.11	Ilustrasi Arah Peruntukan Ruang dan Potensi Ekonomi per-Kecamatan di Kabupaten Bangka Selatan.....	II-34
Gambar 2.12	Peta Deleniasi PPN Lada Putih Kabupaten Bangka Selatan	II-37
Gambar 2.13	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Bangka Selatan.....	II-39
Gambar 2.14	Sebaran DTW dan SDW Kabupaten Kabupaten Bangka Selatan	II-51
Gambar 2.15	Peta Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK) Bangka Selatan.....	II-52
Gambar 2.16	Peta Daya Dukung Pangan di Kabupaten Bangka Selatan.....	II-62
Gambar 2.17	Peta Daya Dukung Air di Kabupaten Bangka Selatan	II-64
Gambar 2.18	Peta Rawan Bencana Kabupaten Bangka Selatan.....	II-79
Gambar 2.19	Peningkatan Suhu Bumi	II-81
Gambar 2.20	Tren Kenaikan Tinggi Muka Laut.....	II-81
Gambar 2.21	Grafik Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011-2023.....	II-86
Gambar 2.22	Peta Sebaran Penduduk Per Kecamatan	II-88
Gambar 2.23	Laju Perekonomian Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2013-2023	II-91



Gambar 2.24	Laju Inflasi Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2013-2023.....	II-94
Gambar 2.25	Gini Ratio Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2015-2023	II-95
Gambar 2.26	Grafik Penduduk Miskin Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014-2023	II-99
Gambar 2.27	Grafik Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keperahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Bangka Selatan, 2014-2023	II-101
Gambar 2.28	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014-2023.....	II-105
Gambar 2.29	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bangka Selatan, 2014 -2023	II-107
Gambar 2.30	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016-2023.....	II-110
Gambar 2.31	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017-2023.....	II-111
Gambar 2.32	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2018-2023.....	II-113
Gambar 2.33	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014-2023.....	II-118
Gambar 2.34	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016-2023.....	II-121
Gambar 2.35	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016-2023.....	II-123
Gambar 2.36	Grafik Angka Harapan Hidup Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014 -2023	II-135
Gambar 2.37	Grafik Jumlah Balita Gizi Buruk Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2013 -2023	II-142
Gambar 2.38	Persentase Balita Bergizi Buruk dan Bergizi Kurang Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2013-2023.....	II-144
Gambar 2.39	Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2013-2023	II-159
Gambar 2.40	Grafik Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016-2023	II-166
Gambar 2.41	Grafik Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017 -2023	II-168
Gambar 2.42	Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2013 -2023	II-175



Gambar 2.43	Persentase Kecukupan Pangan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2013-2023.....	II-177
Gambar 2.44	Pertumbuhan Produksi Padi Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016-2023	II-180
Gambar 2.45	Grafik Produktivitas Komoditi Unggulan Perkebunan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2013-2023.....	II-183
Gambar 2.46	Pertumbuhan Sektor Perikanan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2018-2023	II-184
Gambar 2.47	Perkembangan PDRB ADHK Pariwisata Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016-2023.....	II-187
Gambar 2.48	Grafik Kunjungan Wisatawan Ke Daya Tarik Wisata (DTW) Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2013-2023	II-189
Gambar 2.49	Laju Sektor Perdagangan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016-2023	II-191
Gambar 2.50	Laju Sektor Perindustrian Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016-2023	II-192
Gambar 2.51	Persentase Guru Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017-2023.....	II-202
Gambar 2.52	Skala Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016-2023.....	II-252
Gambar 2.53	Capaian Indikator Makro Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Selatan pada Akhir Periode RPJPD Tahun 2005-2022	II-276
Gambar 2.54	Grafik Capaian Indikator Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional pada Akhir Periode RPJPD Tahun 2005-2022	II-277
Gambar 2.55	Sustainable Development Goals (SDGs)	II-296
Gambar 2.56	Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025-2045.....	II-349
Gambar 2.57	Grafik Penambahan Kebutuhan Sarana Pendidikan Kabupaten Bangka Selatan.....	II-361
Gambar 2.58	Neraca Air Eksisting WS Bangka Tahun 2020	II-386
Gambar 2.59	Sebaran Pusat-Pusat Pertumbuhan Di Wilayah Kabupaten Bangka Selatan.....	II-404
Gambar 2.60	Gambar Peta KTPN Batu Betumpang	II-408
Gambar 2.61	Peta Kawasan Industri Sadai	II-411
Gambar 2.62	Gambar Peta Daerah Pariwisata Nasional Bangka Belitung	II-412
Gambar 2.63	Peta Rencana Kawasan Strategis.....	II-418

**BAB III**

Gambar 3.1	Grafik Tren COVID-19 Global: Tingkat Kasus Positif	III-19
Gambar 3.2	Grafik Tingkat Kemiskinan Ekstrem di Tingkat Global (1820—2015) .	III-20
Gambar 3.3	Grafik Tren Partisipasi Tenaga Kerja dalam Lapangan Kerja secara Global (1990-2020)	III-21
Gambar 3.4	Grafik Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Pertanian (1995 -2015).....	III-22

BAB IV

Gambar 4.1	Visi Indonesia Emas 2045	IV-2
Gambar 4.2	Konsep Perumusan Visi RPJPD Kabupaten Bangka Selatan	IV-3
Gambar 4.3	Keterkaitan Isu Strategis dan Visi RPJPD Kabupaten Bangka Selatan ..	IV-4
Gambar 4.4	Visi RPJPD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2045	IV-5
Gambar 4.5	Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025-2045	IV-7
Gambar 4.6	Delapan Misi (Agenda) Pembangunan Nasional Tahun 2025-2045.....	IV-12

BAB V

Gambar 5.1	Periodisasi RPJPD Kabupaten Bangka Selatan 2025-2045.....	V-1
Gambar 5.2	Tahapan Transformasi Sosial	V-13
Gambar 5.3	Tahapan Transformasi Ekonomi.....	V-18
Gambar 5.4	Tahapan Transformasi Tata Kelola	V-24
Gambar 5.5	Tahapan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	V-28



DAFTAR TABEL

BAB I

BAB II

Tabel 2.1	Luas Wilayah Kecamatan Jumlah Desa/Kelurahan Kabupaten Bangka Selatan	II-3
Tabel 2.2	Jumlah Kelurahan, Desa dan Dusun/Lingkungan Per Kecamatan	II-3
Tabel 2.3	Sebaran Ketinggian Kabupaten Bangka Selatan	II-8
Tabel 2.4	Sebaran Kemiringan Lahan Kabupaten Bangka Selatan	II-9
Tabel 2.5	Sebaran Jenis Geologi Kabupaten Bangka Selatan	II-12
Tabel 2.6	Sebaran Jenis Tanah Kabupaten Bangka Selatan	II-13
Tabel 2.7	Daftar Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Bangka Selatan	II-16
Tabel 2.8	Nama dan Klasifikasi Sungai Per Kecamatan Kabupaten Bangka Selatan..	II-17
Tabel 2.9	Sebaran CAT Kabupaten Bangka Selatan	II-20
Tabel 2.10	Tekanan Udara, Suhu Udara, Kelembaban Udara dan Penyinaran Matahari Rata-rata menurut Bulan Kabupaten Bangka Selatan	II-21
Tabel 2.11	Kualitas Udara di Kabupaten Bangka Selatan	II-23
Tabel 2.12	Penggunaan Lahan Kabupaten Bangka Selatan	II-26
Tabel 2.13	Luas Kawasan Perkebunan Kabupaten Bangka Selatan	II-36
Tabel 2.14	Luas Kawasan Tanaman Pangan Kabupaten Bangka Selatan	II-38
Tabel 2.15	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kab. Bangka Selatan (LP2B)	II-39
Tabel 2.16	Kebutuhan Konsumsi Beras Kabupaten Bangka Selatan	II-41
Tabel 2.17	Luas Rencana Kawasan Hortikultura	II-42
Tabel 2.18	Luas Kawasan Perikanan Budidaya Kabupaten Bangka Selatan	II-42
Tabel 2.19	Luas Rencana Kawasan Pertambangan Mineral Logam	II-43
Tabel 2.20	Potensi Destinasi Tujuan Wisata (DTW) dan Sumber Daya Wisata (SDW) Kabupaten Bangka Selatan	II-46
Tabel 2.21	Luas Kawasan Permukiman Perkotaan Kabupaten Bangka Selatan	II-53
Tabel 2.22	Luas Kawasan Permukiman Pedesaan Kabupaten Bangka Selatan	II-53
Tabel 2.23	Luas Rencana Kawasan Transportasi	II-55
Tabel 2.24	Identifikasi dan Sub Kelas Kemampuan Lahan	II-56
Tabel 2.25	Perhitungan Daya Dukung Pangan Beras Kabupaten Bangka Selatan	II-57
Tabel 2.26	Koefisien Limpasan Air menurut Penggunaan Lahan.....	II-58
Tabel 2.27	Koefisien Limpasan Air Berdasarkan Penggunaan Lahan di Bangka Selatan	II-59
Tabel 2.28	Kebutuhan Air Non Domestik (DAnd)	II-60



Tabel 2.29	Status Daya Dukung Pangan di Kabupaten Bangka Selatan	II-61
Tabel 2.30	Status Daya Dukung Air di Kabupaten Bangka Selatan	II-63
Tabel 2.31	Total Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023	II-65
Tabel 2.32	Total Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Ibu Kota Di Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023	II-66
Tabel 2.33	Persentase Ketaatan Dokumen AMDAL/ULP-UKL Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2023	II-67
Tabel 2.34	Capaian IKLH Kabupaten Bangka Selatan dari Tahun 2015-2023	II-69
Tabel 2.35	Indeks Risiko Bencana (IRB) dan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021-2023.....	II-77
Tabel 2.36	Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Bangka Selatan dari Tahun 2018 -2023.....	II-78
Tabel 2.37	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023.....	II-84
Tabel 2.38	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016-2023	II-86
Tabel 2.39	Jumlah Penduduk Kabupaten Bangka Selatan Menurut Kecamatan Tahun 2016-2023	II-87
Tabel 2.40	Rasio Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2012-2023	II-88
Tabel 2.41	Rasio Ketergantungan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014-2023	II-89
Tabel 2.42	Laju Inflasi Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2013-2023.....	II-93
Tabel 2.43	Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2015-2023	II-96
Tabel 2.44	Indeks Williamson Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2019-2023	II-97
Tabel 2.45	Tipologi Klassen Per Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023.....	II-98
Tabel 2.46	Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2023.....	II-99
Tabel 2.47	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Bangka Selatan, 2014-2023.....	II-100
Tabel 2.48	Penduduk Miskin Per Kecamatan Kabupaten Bangka Selatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tahun 2021 dan 2022	II-102



Tabel 2.49	Jumlah Individu dan Keluarga Kemiskinan Ekstrem Permuktahiran Per Kecamatan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 dan 2022	II-103
Tabel 2.50	Jumlah Individu dan Keluarga Kemiskinan Ekstrem Permuktahiran Per Desil Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 dan 2022	II-104
Tabel 2.51	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2023	II-105
Tabel 2.52	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2023	II-106
Tabel 2.53	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023	II-112
Tabel 2.54	Persentase Sumbangan Perempuan Dalam Pendapatan Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2023	II-114
Tabel 2.55	Kasus Kekerasan Pada Perempuan dan Anak Di Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2022	II-115
Tabel 2.56	Hasil Evaluasi Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2018-2023	II-116
Tabel 2.57	Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014-2023....	II-117
Tabel 2.58	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014-2023	II-119
Tabel 2.59	Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 -2023.....	II-120
Tabel 2.60	Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 -2023.....	II-122
Tabel 2.61	Capaian Literasi dan Numerasi Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023 dan 2024	II-124
Tabel 2.62	Persentase Satuan Pendidikan Dalam Kompetensi Minimum Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023	II-125
Tabel 2.63	Jumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Di Kabupaten Bangka Selatan.....	II-133
Tabel 2.64	Angka Harapan Hidup Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014-2023	II-135
Tabel 2.65	Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2023	II-136
Tabel 2.66	Infant Mortality Rate (IMR) Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2013-2023	II-137
Tabel 2.67	Balita Gizi buruk Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2013-2023	II-139
Tabel 2.68	Data Hasil E-PPGBM Anak Umur 0-59 Bulan Berstatus Gizi Balita Di Wilayah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2013-2023.....	II-143



Tabel 2.69	Jumlah Stunting di Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023.....	II-145
Tabel 2.70	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Yang Tertangani Per Kecamatan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2019-2023	II-147
Tabel 2.71	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2013-2023.....	II-148
Tabel 2.72	Grup Kesenian Aktif Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023	II-148
Tabel 2.73	Organisasi Olahraga Aktif Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023	II-150
Tabel 2.74	Jumlah Event/Kegiatan Festival Seni dan Budaya Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014-2023.....	II-152
Tabel 2.75	Data Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023.....	II-155
Tabel 2.76	Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2013-2023.....	II-159
Tabel 2.77	PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014-2023.....	II-161
Tabel 2.78	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014-2023	II-162
Tabel 2.79	PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014-2023.....	II-164
Tabel 2.80	Distribusi Sektor Dalam PDRB ADHB Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014-2023	II-165
Tabel 2.81	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016-2023.....	II-167
Tabel 2.82	Pengeluaran Per kapita Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017-2023.....	II-168
Tabel 2.83	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022-2023.....	II-169
Tabel 2.84	Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2013 -2023.....	II-170
Tabel 2.85	Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023	II-173
Tabel 2.86	Jenis-Jenis Tanaman Ketahanan Pangan Di Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023.....	II-174
Tabel 2.87	Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2013-2023	II-175
Tabel 2.88	Persentase Kecukupan Pangan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2013-2023.....	II-177



Tabel 2.89	Jumlah Ketersediaan Pangan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2023	II-178
Tabel 2.90	Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 -2023.....	II-179
Tabel 2.91	Produktivitas Tanaman Padi Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 -2023	II-180
Tabel 2.92	Produksi, Luas Tanaman Menghasilkan dan Produktivitas Komoditi Unggulan Perkebunan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2013-2023	II-182
Tabel 2.93	Produksi dan Pertumbuhan Sektor Perikanan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2018-2023.....	II-184
Tabel 2.94	Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya Per Kecamatan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022 dan 2023	II-185
Tabel 2.95	Kunjungan Wisatawan Ke Daya Tarik Wisata (DTW) Kabupaten Bangka Selatan 2013-2023	II-188
Tabel 2.96	Objek Wisata Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023	II-190
Tabel 2.97	Perhitungan Location Quotient (LQ) Berdasarkan Lapangan Usaha Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023	II-194
Tabel 2.98	Klasifikasi Tipologi Klassen	II-195
Tabel 2.99	Perhitungan Analisis Tipologi Klassen Berdasarkan Lapangan Usaha Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023	II-196
Tabel 2.100	Analisa Shift Share Kabupaten Bangka Selatan	II-198
Tabel 2.101	Perkembangan Indikator Kinerja Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2019-2022	II-199
Tabel 2.102	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Bangka Selatan tahun 2019 -2023.....	II-199
Tabel 2.103	Perkembangan Rasio Penduduk yang Bekerja Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2019-2023	II-200
Tabel 2.104	Rasio Guru/Murid Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017-2023.....	II-200
Tabel 2.105	Persentase Guru Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017-2023	II-201
Tabel 2.106	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2013 -2022.....	II-203
Tabel 2.107	Jumlah Dokter Per Kecamatan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2013 -2023.....	II-204
Tabel 2.108	Rasio Tenaga Medis Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2013-2023	II-206



Tabel 2.109	Jumlah Tenaga Medis Per Kecamatan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014-2023	II-207
Tabel 2.110	Rasio Penduduk Lulusan D-IV/S1, S2 dan S3 Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014-2023	II-209
Tabel 2.111	Rasio Linmas Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023	II-211
Tabel 2.112	Jumlah Anggota Linmas Menurut Desa/Kelurahan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023	II-211
Tabel 2.113	Organisasi Pemuda Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023	II-213
Tabel 2.114	Atlet Berprestasi Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023	II-214
Tabel 2.115	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017-2023	II-215
Tabel 2.116	Jumlah SD/MI Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022-2023	II-216
Tabel 2.117	Jumlah SMP/MTS Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022-2023	II-216
Tabel 2.118	Jumlah Perpustakaan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023	II-217
Tabel 2.119	Jumlah Kunjungan Perpustakaan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2023	II-218
Tabel 2.120	Jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu) Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2013-2023	II-219
Tabel 2.121	Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu) Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2013-2023	II-220
Tabel 2.122	Rasio Rumah Sakit Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2013-2023	II-221
Tabel 2.123	Pembangunan Jalan Baru Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2015-2023	II-222
Tabel 2.124	Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Mantap Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016-2022	II-224
Tabel 2.125	Kondisi Jalan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023	II-225
Tabel 2.126	Jenis Permukaan Jalan Kabupaten Bangka Selatan Per Kecamatan Tahun 2023	II-226
Tabel 2.127	Kondisi Jembatan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021-2023	II-227
Tabel 2.128	Cakupan Drainase Permukiman Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016-2023	II-227
Tabel 2.129	Panjang Jaringan Drainase Permukiman per Kecamatan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023	II-228
Tabel 2.130	Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016-2023	II-228
Tabel 2.131	Rasio Jaringan Irigasi per Daerah Irigasi (DI) tahun 2023	II-229



Tabel 2.132	Persentase Rumah Berakses Sanitasi Layak Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023	II-230
Tabel 2.133	Penetapan Kawasan Kumuh Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023	II-230
Tabel 2.134	Persentase Rumah Layak Huni Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 -2023.....	II-233
Tabel 2.135	Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023	II-235
Tabel 2.136	Jumlah Restoran/Rumah Makan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2013 -2023.....	II-236
Tabel 2.137	Jumlah Hotel/Penginapan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2013-2023	II-237
Tabel 2.138	Gedung Olahraga Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023	II-237
Tabel 2.139	Tingkat Kecukupan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017-2023.....	II-238
Tabel 2.140	Sarana dan Prasarana Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023	II-239
Tabel 2.141	Nilai Investasi PMA/PMDN Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016-2023	II-239
Tabel 2.142	Jumlah Investor PMA/PMDN Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 -2023.....	II-240
Tabel 2.143	Rata-rata Lama Proses Perizinan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2013 -2023.....	II-242
Tabel 2.144	Jenis Peizinan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023	II-242
Tabel 2.145	Perkembangan Angka Kriminalitas Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2013 -2023.....	II-245
Tabel 2.146	Data Kriminalitas Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2019-2023	II-247
Tabel 2.147	Penyelesaian Pelanggaran Perda Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2019 -2023.....	II-249
Tabel 2.148	Indikator Fungsi Penunjang Lainnya Kabupaten Bangka Selatan 2013 -2023.....	II-250
Tabel 2.149	Skala Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Bangka Selatan 2016-2023	II-253
Tabel 2.150	Daftar Kajian dan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2018-2023.....	II-253
Tabel 2.151	Data Inovasi Kabupaten Bangka Selatan	II-256
Tabel 2.152	ndeks Inovasi Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021-2023	II-273
Tabel 2.153	Indeks SPBE Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2018-2023	II-273



Tabel 2.154	Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023	II-274
Tabel 2.155	Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2013-2022	II-275
Tabel 2.156	Indeks Pembangunan Statistik Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022 dan 2023	II-276
Tabel 2.157	Capaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2005-2022	II-278
Tabel 2.158	Persentase Capaian SPM Pendidikan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2023	II-283
Tabel 2.159	Persentase Capaian SPM Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2023	II-286
Tabel 2.160	Persentase Capaian SPM Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2023	II-290
Tabel 2.161	Persentase Capaian SPM Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2023	II-291
Tabel 2.162	Persentase Capaian SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2023	II-292
Tabel 2.163	Persentase Capaian SPM Sosial Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2023	II-294
Tabel 2.164	Capaian SDG's/TPB Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021-2022	II-297
Tabel 2.165	Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025-2045	II-348
Tabel 2.166	Proyeksi Persebaran Penduduk Per Kecamatan Kabupaten Bangka Selatan 2025-2045	II-350
Tabel 2.167	Proyeksi Perbandingan Usia Produktif dan Usia Ketergantungan Di Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025-2045	II-351
Tabel 2.168	Proyeksi Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025-2045	II-352
Tabel 2.169	Proyeksi Kebutuhan Rumah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025	II-354
Tabel 2.170	Proyeksi Kebutuhan Rumah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2030	II-354
Tabel 2.171	Proyeksi Kebutuhan Rumah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2035	II-355
Tabel 2.172	Proyeksi Kebutuhan Rumah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2040	II-355
Tabel 2.173	Proyeksi Kebutuhan Rumah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2045	II-356



Tabel 2.174	Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025	II-357
Tabel 2.175	Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2030	II-357
Tabel 2.176	Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2035	II-358
Tabel 2.177	Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2040	II-359
Tabel 2.178	Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2045	II-359
Tabel 2.179	Analisis Perbandingan Kebutuhan Sarana Pendidikan Kabupaten Bangka Selatan.....	II-360
Tabel 2.180	Tingkat Pelayanan Sarana Pendidikan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022	II-362
Tabel 2.181	Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025	II-364
Tabel 2.182	Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2030	II-364
Tabel 2.183	Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2035	II-365
Tabel 2.184	Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2040	II-366
Tabel 2.185	Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2045	II-367
Tabel 2.186	Rencana Penambahan Kebutuhan Sarana Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan.....	II-367
Tabel 2.187	Tingkat Pelayanan Sarana Kesehatan di Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022	II-369
Tabel 2.188	Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Domestik Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025-2045.....	II-371
Tabel 2.189	Proyeksi Kebutuhan Sarana Perdagangan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2030.....	II-372
Tabel 2.190	Proyeksi Kebutuhan Sarana Perdagangan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2035.....	II-373



Tabel 2.191	Proyeksi Kebutuhan Sarana Perdagangan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2040	II-374
Tabel 2.192	Proyeksi Kebutuhan Sarana Perdagangan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2045	II-375
Tabel 2.193	Proyeksi Kebutuhan Sarana Peribadatan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2045	II-376
Tabel 2.194	Jumlah Kebutuhan Prasarana Energi Kelistrikan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025	II-378
Tabel 2.195	Jumlah Kebutuhan Prasarana Energi Kelistrikan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2030	II-378
Tabel 2.196	Jumlah Kebutuhan Prasarana Energi Kelistrikan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2035	II-379
Tabel 2.197	Jumlah Kebutuhan Prasarana Energi Kelistrikan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2040	II-380
Tabel 2.198	Jumlah Kebutuhan Prasarana Energi Kelistrikan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2045	II-380
Tabel 2.199	Jumlah Kebutuhan Prasarana Telekomunikasi Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2045	II-382
Tabel 2.200	Jumlah Kebutuhan Telepon (SST) Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2045	II-382
Tabel 2.201	Data Teknis Bendung Kabupaten Bangka Selatan	II-384
Tabel 2.202	Ketersediaan Air Terpasang Kabupaten Bangka Selatan	II-384
Tabel 2.203	Kebutuhan Air Irigasi (m ³ /dtk)	II-385
Tabel 2.204	Rincian Daerah Irigasi Maupun Daerah Irigasi Rawa yang Berada Kabupaten Bangka Selatan.....	II-386
Tabel 2.205	Data Potensi Kolong Konservasi Kabupaten Bangka Selatan	II-387
Tabel 2.206	Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Domestik Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025-2045.....	II-393
Tabel 2.207	Total Kebutuhan Debit Air Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025-2045	II-395
Tabel 2.208	Cakupan Layanan Air Limbah Domestik Kabupaten Bangka Selatan untuk Klasifikasi Perkotaan.....	II-396
Tabel 2.209	Cakupan Layanan Air Limbah Domestik Kabupaten Bangka Selatan untuk Klasifikasi Pedesaan	II-397
Tabel 2.210	Cakupan Layanan Air Limbah Domestik Kabupaten Bangka Selatan untuk Klasifikasi Pedesaan	II-398



Tabel 2.211	Proyeksi Produksi Air Limbah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023 -2045.....	II-399
Tabel 2.212	Banyaknya Armada Pengangkutan Sampah dan Kapasitasnya Menurut Jenis Angkutan Kabupaten Bangka Selatan.....	II-402
Tabel 2.213	Proyeksi Kebutuhan Prasarana Persampahan Kabupaten Bangka Selatan	II-403
Tabel 2.214	Cakupan Desa dalam Kawasan Batu Betumpang	II-408
Tabel 2.215	Dasar Pertimbangan Rencana Berdasarkan Fungsi Pusat KTPN Sebagai Simpul Kegiatan Agroindustri	II-409
Tabel 2.216	KTA dan DTW RIDPN	II-413
Tabel 2.217	Kawasan Strategis Kabupaten.....	II-417

BAB III

Tabel 3.1	Permasalahan Pembangunan Menurut Bidang Urusan di Kabupaten Bangka Selatan.....	III-2
-----------	--	-------

BAB IV

Tabel 4.1	Penyelarasan Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Bangka Selatan 2025-2045 dengan RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2045.....	IV-9
-----------	---	------

BAB V

Tabel 5.1	Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025-2045.....	V-5
Tabel 5.2	Indikator Capaian Transformasi Sosial RPJPD Kabupaten Bangka Selatan 2025-2045	V-16
Tabel 5.3	Indikator Capaian Transformasi Ekonomi RPJPD Kabupaten Bangka Selatan 2025-2045.....	V-22
Tabel 5.4	Indikator Capaian Transformasi Tata Kelola RPJPD Kabupaten Bangka Selatan 2025-2045	V-25
Tabel 5.5	Indikator Capaian Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan RPJPD Kabupaten Bangka Selatan 2025-2045.....	V-27
Tabel 5.6	Indikator Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi RPJPD Kabupaten Bangka Selatan 2025-2045	V-31
Tabel 5.7	Perumusan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Bangka Selatan 2025-2045	V-33
Tabel 5.8	Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Bangka Selatan 2025-2045	V-54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinamika global berkembang semakin cepat yang menciptakan kompleksitas tantangan baik di masa kini maupun masa depan. Kompleksitas tantangan tersebut akan berpengaruh dalam mencapai sasaran Visi Indonesia Emas 2045. Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional harus juga menyikapi berbagai dinamika global dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Salah satu tantangan terbesar global yang harus dipersiapkan dalam kurun waktu 20 tahun mendatang adalah isu megatrend dunia. Kelangkaan dan persaingan dalam mengakses sumber daya alam (utamanya energi, air, dan pangan) menjadi tantangan dalam memenuhi kebutuhan manusia di masa depan. Kelangkaan ini juga dipengaruhi oleh tiga krisis global (*The Triple Planetary Crisis*) yaitu perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan kehilangan keanekaragaman hayati. Krisis global tersebut menjadi urgensi untuk mengarahkan praktik pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan dan sirkular seperti ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon.



Gambar 1.1
Megatren Dunia 2045

Sumber: Ranhir RPJPN 2025-2045

Salah satu isu megatren yang sangat berpengaruh dalam perkembangan ekonomi dan sosial serta memberikan tantangan peningkatan kebutuhan hidup masyarakat adalah isu demografi global. Pada tahun 2045, Indonesia akan mengalami bonus demografi dengan potensi angkatan kerja produktif yang tinggi dengan ketersediaan sumber daya yang semakin terbatas.



Berdasarkan kajian BPS (2023), bahwa proyeksi jumlah penduduk tahun 2045 di Kabupaten Bangka Selatan mencapai 248.329 jiwa. Komposisi penduduk angkatan kerja (usia 15-64 tahun) mencapai 66,95 % dari jumlah penduduk dengan rasio ketergantungan sebesar 49,36% pada tahun 2045. Tingginya jumlah penduduk usia muda memberikan tantangan pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan (Bappenas, 2023). Tantangan bonus demografi tersebut tidak hanya menjadi ancaman namun juga dapat menjadi potensi atau modal dasar pembangunan di masa depan. Komposisi jumlah usia kerja dan produktif yang tinggi akan menjadi motor penggerak pembangunan jika dipersiapkan dengan baik melalui peningkatan kompetensi dan penyiapan infrastruktur pendidikan dan lapangan pekerjaan yang layak bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Bangka Selatan sehingga diperlukan rencana pembangunan jangka panjang dengan memperhatikan berbagai tantangan dan dinamika global, modal dasar pembangunan yang disesuaikan dengan karakteristik daerah (kondisi geografis, potensi SDA, SDM & kondisi sosial budaya masyarakat) serta selaras dengan arah kebijakan RPJPN.

Pemerintah Daerah menyadari bahwa pembangunan yang berkelanjutan merupakan kunci untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang. Oleh karena itu, komitmen ini diimplementasikan secara konsisten dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Dalam dokumen RPJPD, Pemda menetapkan visi pembangunan daerah yang berfokus pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial.

Pemerintah Daerah berkomitmen untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap aspek kebijakan dan program pembangunan daerah. Hal ini mencakup pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana, pengurangan kesenjangan sosial, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan. Pemda juga berupaya untuk memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana alam dengan mempromosikan penggunaan energi terbarukan dan praktik-praktik pembangunan yang adaptif.

Dalam pelaksanaan RPJPD, Pemda mengedepankan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil, untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, diharapkan pembangunan di daerah tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga mampu memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Nasional, Rencana Jangka Panjang Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional (RPJPN). Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 263 ayat (2) Rencana Jangka Panjang Daerah merupakan



penjabaran visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka Panjang untuk 20 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RPJPD merupakan Pedoman dalam penyusunan RPJMD yang dilakukan dengan cara menyelaraskan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.

Sistem perencanaan pembangunan seperti yang diamanahkan dalam Undang-Undang 25 tahun 2004 bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan melalui perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang terpadu, transparan, akuntabel, dan demokratis. Esensi pelaksanaan pembangunan Kabupaten merupakan suatu upaya penyelenggaraan pembangunan di daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dalam tata pemerintahan Kabupaten Bangka Selatan. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan suatu konsekuensi logis atas kebutuhan produk dokumen perencanaan yang harus diacu dalam penyusunan rencana dan strategi pembangunan daerah yang lebih terperinci seperti Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Proses penyusunan RPJMD harus dilakukan melalui proses partisipatif, yang membawa konsekuensi pentingnya setiap tahapan proses dapat dilakukan evaluasi dan dikritisi oleh semua pemangku kepentingan.

RPJPD sebagai suatu dokumen rencana sangat penting untuk arah pembangunan daerah, oleh sebab itu pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas produk dan proses penyusunan dokumen, yang diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan reviu berkala atas implementasinya. Penyusunan RPJPD telah dilakukan melalui pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, dan proses *bottom-up* serta *top-down*. Dengan demikian RPJPD disusun sesuai kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, akuntabel, dan konsisten dengan dokumen perencanaan lainnya yang relevan.

1.2. Dasar Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025-2045 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43550);



2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4725);



10. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 87

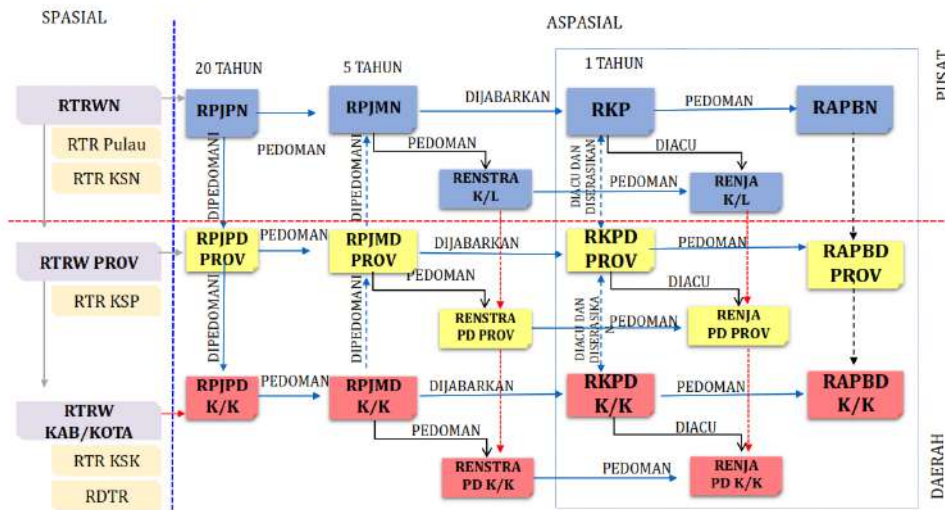


- Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja pemerintah Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 – 2034);
 26. **Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor Tahun tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2045;**
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014-2034 Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014 Nomor 6);

1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Lainnya

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Selatan, dirumuskan secara holistik dan disinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; serta dengan kebijakan pembangunan wilayah yang termuat pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangka Selatan

dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota yang berbatasan dan/atau yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Bangka Selatan.



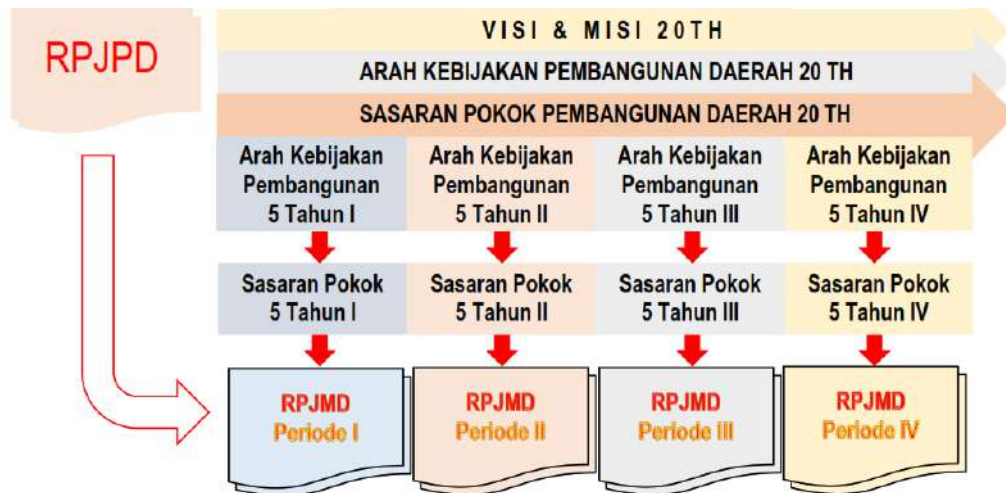
Gambar 1.2.
Sinkronisasi Antar Dokumen Perencanaan

Secara substansi, RPJPD Kabupaten Bangka Selatan berpedoman dan disinkronkan dengan RPJPN dan RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Visi, Misi dan Arah Kebijakan Pembangunan jangka panjang. Sedangkan dengan RTRWN, RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan RTRW Kabupaten Bangka Selatan serta RTRW kota/kabupaten lain, RPJPD berpedoman pada:

1. Substansi tujuan penataan ruang wilayah;
2. Rencana struktur ruang, yang memuat rencana pembangunan perwilayahan dan pembangunan jaringan infrastruktur kabupaten;
3. Rencana pola ruang wilayah, yang memuat penetapan kawasan lindung dan kawasan budidaya ; serta
4. Pelibatan masyarakat dalam penataan ruang kota.

Dokumen perencanaan pembangunan yang terkait dengan dokumen RPJPD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025-2045 antara lain:

1. RPJPD Kabupaten Bangka Selatan 2025-2045 mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. RPJPD Kabupaten Bangka Selatan 2025-2045 berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Selatan.



Gambar 1.3.
Hubungan RPJPD dengan RPJMD

Sejalan dengan Undang-Undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka penyusunan RPJPD perlu memenuhi prinsip-prinsip teknokratis (strategis), demokratis dan partisipatif, politis, perencanaan *bottom-up* dan perencanaan *top-down*. RPJPD ini merupakan wujud konkrit dari hasil ke empat prinsip tersebut. Keempat pinsip penyusunan RPJPD tersebut memiliki pemahaman sebagai berikut:

a. Prinsip Teknokratis (Strategis)

Penyusunan dokumen RPJPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis ke masa depan. Kualitas dokumen RPJPD sangat ditentukan oleh seberapa jauh RPJPD dapat mengemukakan secara jelas dan sistematis proses pemikiran strategis tersebut. Perencanaan strategis erat kaitannya dengan proses merumuskan tantangan dan peluang pembangunan Kabupaten Bangka Selatan pada masa depan; menetapkan kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam masa dua puluh tahun ke depan; bagaimana mencapainya dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Alur pemikiran strategis (*strategic thinking process*) pada dasarnya mencakup elemen-elemen sebagai berikut:

1. Rumusan isu dan permasalahan pembangunan masa kini yang jelas
2. Kejelasan status kinerja pembangunan daerah masa kini
3. Rumusan visi, misi, dan agenda pembangunan daerah
4. Rumusan tujuan pembangunan yang memenuhi kriteria sederhana, terukur, mudah dicapai, realistis, dan dicapai dalam jangka waktu tertentu.
5. Rumusan arah kebijakan untuk masing-masing misi beserta agenda pembangunannya



6. Instrumen, metodologi dan pendekatan yang tepat digunakan untuk mendukung proses perencanaan

b. Prinsip Partisipatif

Kemampuan untuk memahami peluang dan ancaman dan memperkirakan apa yang akan terjadi masa depan akan sangat bergantung kepada sejauh mana proses penyusunan RPJPD ini mengikutsertakan *stakeholder* dalam pengambilan keputusan. Ini bermakna bahwa proses penyusunan RPJPD perlu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat (*stakeholder*) dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan:

1. Pelibatan *stakeholders* yang relevan untuk dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan perencanaan, yakni pada tahapan perumusan dan penetapan visi, misi pembangunan melalui kegiatan forum diskusi terbatas dan forum seminar seperti telah diuraikan di atas.
2. Kesetaraan antara pemerintah, masyarakat maupun lembaga non pemerintah dalam pengambilan keputusan
3. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan, yang ditunjukkan pada proses partisipasi *stakeholders* di forum-forum diskusi terbatas
4. Keterwakilan yang memadai dari seluruh elemen masyarakat, terutama kaum perempuan dan kelompok marginal serta lembaga penelitian/perguruan tinggi
5. Pelibatan *stakeholders* dalam penyusunan RPJPD akan menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap RPJPD
6. Konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan seperti perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan alternatif skenario perjalanan pembangunan daerah, perumusan visi, misi, dan arah/kebijakan pembangunan jangka panjang.
7. Dalam forum diskusi terbatas/FGD telah ditetapkan kesepakatan mengenai pernyataan visi Kabupaten Bangka Selatan.

c. Pendekatan Politis

Dimaksudkan bahwa penyusunan RPJPD Kabupaten Bangka Selatan melibatkan proses konsultasi dengan elemen politis, dalam hal ini dengan DPRD Kabupaten Bangka Selatan. Keterlibatan DPRD dalam penyusunan RPJPD melalui:

1. Keterlibatan DPRD dalam proses penyusunan RPJPD, dalam proses penyusunan Rancangan Akhir ini mulai dilibatkan pada tahapan forum diskusi terbatas/FGD, Seminar Sosialisasi dan pementapan Visi, Misi dan Arah Pembangunan dalam penyusunan RPJPD



- Kabupaten Bangka Selatan 2025-2045 dan Musrenbang RPJPD Kabupaten Bangka Selatan 2025-2045.
2. Pokok-pokok pikiran DPRD dalam proses penyusunan RPJPD Kabupaten Bangka Selatan 2025-2045.
 3. Reviu dan evaluasi dari DPRD terhadap rancangan RPJPD Kabupaten Bangka Selatan 2025-2045.
 4. Reviu, saran, dan masukan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap rancangan RPJPD Kabupaten Bangka Selatan 2025-2045.
 5. Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Bangka Selatan 2025-2045.
 6. Pengesahan RPJPD Kabupaten Bangka Selatan sebagai Peraturan Daerah.

d. Perencanaan *Bottom-Up*

Dimaksudkan bahwa proses penyusunan RPJPD perlu memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui :

1. Penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk mengetahui harapan masyarakat atas masa depan pembangunan daerahnya.
2. Hasil proses musrenbang RPJPD dan kesepakatan dengan masyarakat tentang arah pembangunan daerah.

e. Perencanaan *Top-Down*

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyatakan bahwa proses penyusunan RPJPD perlu bersinergi dengan rencana strategis lainnya, antara lain:

1. RPJP Nasional
2. RPJPD dan RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3. RTRW Kabupaten Bangka Selatan
4. RPJPD dan RTRW kabupaten/kota lainnya

1.4. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Selatan yakni sebagai berikut:

1. Tersedianya dokumen perencanaan yang menjadi pedoman dan dasar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk setiap jangka waktu 20 tahunan;



2. Tersedianya dokumen perencanaan yang menjadi dasar dan landasan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahunan;
3. Tersedia arah pembangunan jangka panjang daerah yang dapat menjadi pedoman dan acuan bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, dan lainnya) dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah dengan visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok Pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya didalam satu pola sikap dan pola tindak.

Adapun Tujuan yang ingin dicapai dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025-2045 adalah untuk:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, dan
5. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika Dokumen RPJPD Kabupaten Bangka Selatan 2025 - 2045, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab Pendahuluan ini berisi tentang pengantar penyusunan RPJPD Kabupaten Bangka Selatan yang menguraikan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RPJPD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Pada Bab ini menjelaskan secara singkat gambaran umum kondisi Kabupaten Bangka Selatan yang terbagi dalam aspek geografis dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum serta aspek daya saing daerah. Pada bab ini juga dijabarkan hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2005-2025, trend demografi dan kebutuhan sarana prasarana hingga Tahun 2045. Disamping itu juga,



menjelaskan gambaran pusat-pusat pengembangan wilayah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bangka Selatan.

BAB III Permasalahan & Isu Strategis Daerah

Bab ini menjelaskan hasil olahan data kinerja dan informasi pembangunan lainnya untuk memahami permasalahan daerah paling utama dan strategis yang akan dipecahkan hingga akhir masa periode pembangunan jangka Panjang disertai isu-isu pembangunan terkini beserta analisis terhadap amanat dokumen atau tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi (nasional).

Bab IV Visi dan Misi Daerah

Bab ini menjelaskan dan menjabarkan visi dan misi daerah yang merupakan kondisi dan upaya daerah yang ingin diwujudkan hingga Tahun 2045.

BAB V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah

Memuat tentang Arah Kebijakan pembangunan jangka panjang untuk menjelaskan pentahapan capaian pembangunan dilakukan pada tiap lima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah. Selain itu dijelaskan sasaran pokok yang memuat arah pembangunan, arah kebijakan transformasi dan indikator utama pembangunan daerah.

Bab VI Penutup



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bangka Selatan adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berdiri pada tanggal 27 Januari 2003 dan kemudian disahkan berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 pada tanggal 25 Februari 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan pusat Pemerintahan di Toboali. Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan tidak semata-mata karena kebutuhan pengembangan wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tetapi juga karena keinginan masyarakat didalamnya, serta upaya untuk mempercepat pembangunan daerah dan terciptanya pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.

Pada awal berdirinya, Kabupaten Bangka Selatan memiliki luas daerah lebih kurang 3.607,08 km² atau 360.708 Ha dengan wilayah administrasi 5 Kecamatan, 3 Kelurahan dan 45 Desa. Untuk kepentingan akselerasi pembangunan daerah, pada tahun 2006 beberapa wilayah administrasi mengalami peningkatan status sehingga wilayah administrasi menjadi 7 Kecamatan, 3 Kelurahan, 50 Desa dan 163 dusun dan pada tahun 2012 menjadi 8 Kecamatan, 3 Kelurahan, 50 Desa dan 163 dusun melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 2 tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Kepulauan Pongok yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Lepar.

Sejak dibentuk pada tahun 2003 sampai dengan sekarang, telah dilaksanakan beberapa kali pelantikan Kepala Daerah untuk memimpin roda Pemerintahan dengan pelantikan Pejabat Bupati Bangka Selatan yang pertama yaitu Bapak Drs. Zikri Kisai pada tanggal 24 Mei 2003 dan pada tahun 2005 Kabupaten Bangka Selatan resmi memiliki Bupati dan Wakil Bupati pertama dengan periode jabatan 2006 s.d 2010 yaitu Bapak Drs. H. Justiar Noer, ST. MM sebagai Bupati dan Bapak H. Jamro H. Jalil sebagai Wakil Bupati, pada periode selanjutnya tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Bangka Selatan di Pimpin oleh Bapak H. Jamro H. Jalil sebagai Bupati dan Nursamsu H. Alias sebagai Wakil Bupati, kemudian pada periode 2016 s.d 2020 Kabupaten Bangka Selatan di Pimpin oleh Bapak Drs. H. Justiar Noer, ST. MM sebagai Bupati dan Bapak H. Riza Herdavid, ST., M.Tr.IP sebagai Wakil Bupati dan pada periode 2021 s.d sekarang, Kabupaten Bangka Selatan di Pimpin oleh Bapak Bupati H. Riza Herdavid, ST., M.Tr.IP dan Wakil Bupati Ibu Debby Vita Dewi, SE untuk masa periode 2021- 2026.



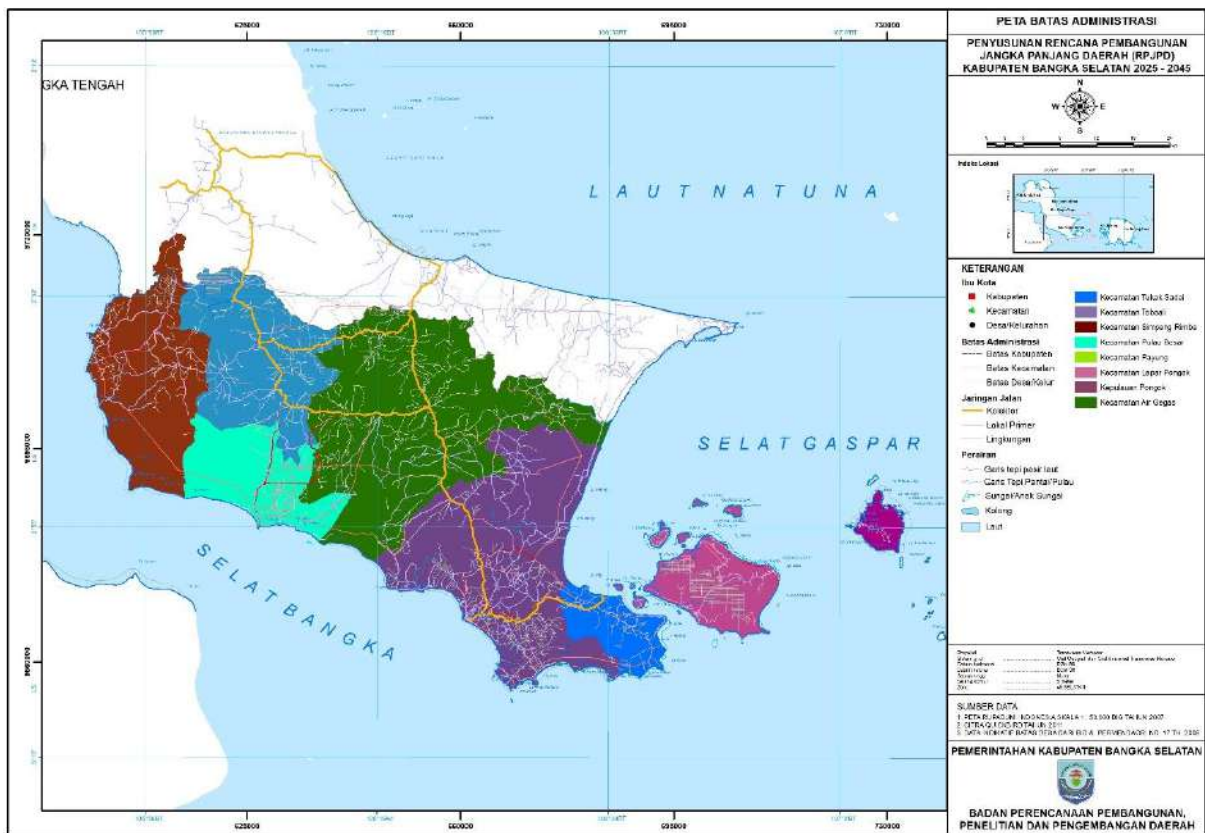
2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan demografi menjadi unsur utama dalam perencanaan pembangunan suatu wilayah begitu pula halnya dengan Kabupaten Bangka Selatan. Data dan informasi esensial yang dikaji menjadi penentu arah, kebijakan dan strategi perencanaan yang tepat bagi perkembangan dan kemajuan Kabupaten Bangka Selatan namun tetap memperhatikan keselarasan dalam pengelolaan alam dan aspek kependudukan.

2.1.1. Karakteristik lokasi dan wilayah

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Bangka Kabupaten Bangka Selatan merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabupaten Bangka Selatan merupakan Kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Bangka yang terletak di bagian Selatan Pulau Bangka dengan luas wilayah 359.728,60 Ha. Secara geografis Kabupaten Bangka Selatan terletak pada 2° 26' 27" sampai 3° 5' 56" Lintang Selatan dan 107° 14' 31" sampai 105° 53' 09" Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Bangka Selatan memiliki luas lebih kurang 3.607,08 Km2 atau 360.708 Ha.



Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Bangka Selatan
 Sumber : Data Batas Administrasi Dokumen RTRW Kab. Bangka Selatan 2023-2043



Secara administratif wilayah Kabupaten Bangka Selatan berbatasan langsung dengan daratan wilayah Kabupaten/Kota lainnya di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan batas-batas administrasi wilayah sebagai berikut :

- sebelah barat berbatasan dengan Selat Bangka dan Laut Jawa;
- sebelah timur berbatasan dengan Selat Gaspar;
- sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa; dan
- sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sungai Selan dan Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah.

Secara administratif wilayah Kabupaten Bangka Selatan berbatasan langsung dengan daratan Wilayah Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu dengan wilayah Kabupaten Bangka Tengah. Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari 8 Kecamatan, 3 Kelurahan dan 50 Desa serta didukung 163 dusun/lingkungan. Delapan Kecamatan yaitu Kecamatan Simpang Rimba, Payung, Airgegas, Toboali, Lepar, Pulau Besar, Tukak Sadai dan Kepulauan Pongok, pembagian wilayah administratif Kabupaten Bangka Selatan dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kecamatan Jumlah Desa/Kelurahan Kabupaten Bangka Selatan

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah Desa/kel	Jumlah Desa/kel	Presentasi (persen)
1	Payung	48.398,91	9	9	13,45
2	Pulau Besar	29.973,41	5	5	8,33
3	Simpang Rimba	50.305,45	7	7	13,98
4	Toboali	84.659,77	11	11	23,53
5	Tukak Sadai	14.580,76	5	5	4,05
6	Airgegas	103.777,84	6	6	28,85
7	Lepar	23.174,08	4	4	6,44
8	Kepulauan Pongok	4.858,38	2	2	1,35
Jumlah		359.728,60	135	49	100,00

Sumber: Badan Informasi Geospasial, 2023

Tabel 2.2
Jumlah Kelurahan, Desa dan Dusun/Lingkungan Per Kecamatan

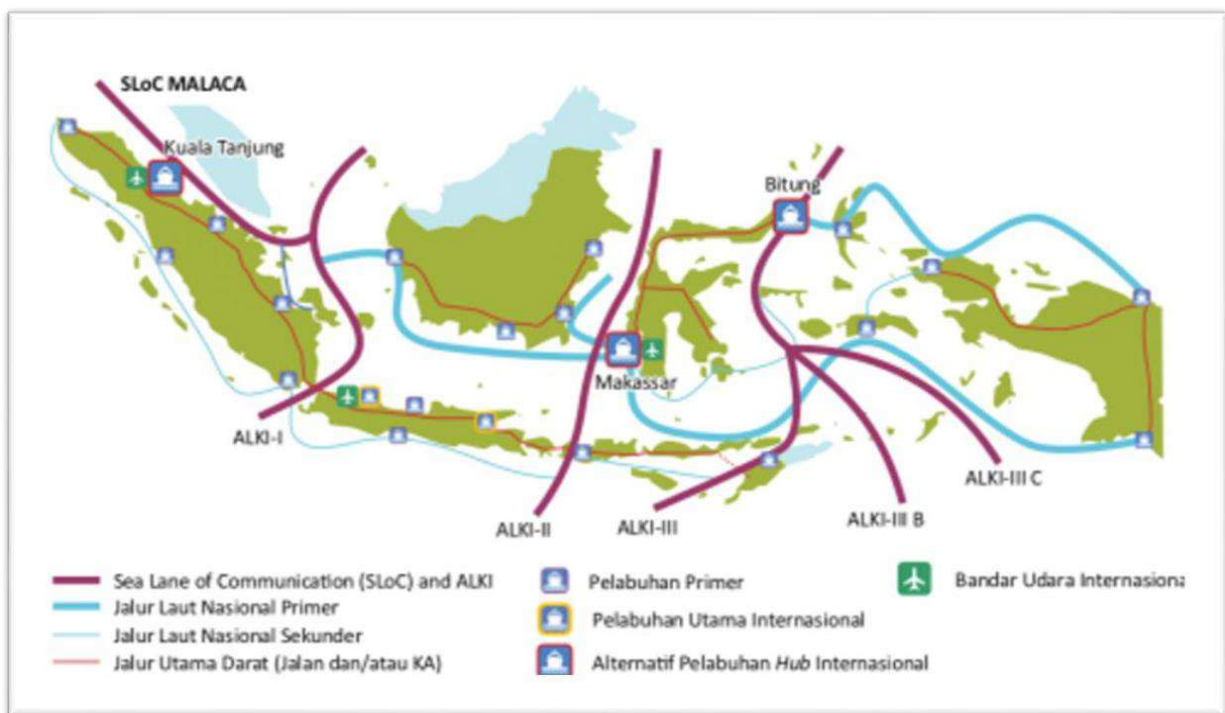
No	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Jumlah	Dusun	Lingkungan	RT
1	Payung	-	9	9	31	-	20
2	Pulau Besar	-	5	5	19	-	69
3	Simpang Rimba	-	7	7	32	-	115

No	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Jumlah	Dusun	Lingkungan	RT
4	Toboali	3	8	11	38	17	281
5	Tukak Sadai	-	5	5	14	-	55
6	Airgegas	-	10	10	46	-	181
7	Lepar	-	4	4	12	-	37
8	Kepulauan Pongok	-	2	2	12	-	18

Sumber: *Bangka Selatan dalam Angka 2024, Diolah*

2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografi

Kabupaten Bangka Selatan berada diujung paling selatan Pulau Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki keunggulan geografis strategis karena memiliki perairan laut yang berada dekat dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI I) sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar di bawah ini.



Gambar 2.2
Alur Laut Kepulauan Indonesia

Sumber : *Lampiran Peraturan Pemerintah RI nomor 37 Tahun 2002 tentang Alur Laut Kepulauan Indonesia*

Berdasarkan Undang-undang nomor 6 Tahun 1996, alur laut kepulauan adalah alur laut yang dilalui oleh kapal atau pesawat udara asing di atas alur laut tersebut, untuk melaksanakan pelayaran dan penerbangan dengan cara normal semata-mata untuk transit yang terus menerus, langsung dan secepat mungkin serta tidak terhalang melalui atau diatas perairan kepulauan dan laut teritorial yang berdampingan antara satu bagian laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif



Indonesia dan bagian laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia lainnya.

ALKI I yang melintasi perairan laut Kabupaten Bangka Selatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 37 Tahun 2002 tentang Alur Laut Kepulauan Indonesia merupakan bagian dari jalur pelayaran yang melintasi Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Laut Jawa, Selat Sunda, Samudra Hindia. Hal ini secara tidak langsung menjadikan Kabupaten Bangka Selatan terhubung dengan sejumlah simpul penting diantaranya ibukota Jakarta, sekaligus membuka konektivitas dengan Pulau Kalimantan, Jawa, Sumatera dan kawasan di Kepulauan Riau bahkan memiliki peluang besar untuk mengembangkan outlet untuk ekspor maupun pembukaan jalur pelayaran akses ke pusat pasar dan kawasan Perdagangan internasional yang potensial.

2.1.1.3. Kondisi Topografi

Kabupaten Bangka Selatan didominasi dengan kontur wilayah yang datar dan bergelombang, sebagian kecil lainnya merupakan wilayah berbukit. Untuk kondisi topografi secara keseluruhan wilayah Kabupaten Bangka yaitu 51 persen wilayah berombak dan bergelombang, 25 persen wilayah rawa dan bencah/datar, 20 persen wilayah lembah/datar sampai berombak, 4 persen wilayah berbukit seperti Bukit Paku, Permis dan lain-lain,

Pulau Bangka secara fisiografi merupakan bagian dari Zona Kepulauan Paparan Sunda. Bentuk struktural dengan arah barat laut-tenggara secara umum merupakan bentuk busur kepulauan dari bagian barat Malaysia yang menerus ke Kepulauan Riau sampai ke Kepulauan Bangka-Belitung (Bemmelen, 1949). Adanya proses erosi dan naiknya muka air laut pada awal Kuartar menyebabkan Paparan Sunda terpisah menjadi beberapa kepulauan dan lembah sungai. Pulau Bangka secara umum berbentuk huruf S terbalik (*inverted S-shaped*). Daerah ini memiliki kondisi morfologi yang hampir rata (*penepain*) dengan luas sekitar 80 persen, selebihnya merupakan perbukitan rendah membulat (*low rounded hill*) dengan elevasi sekitar 50 meter dan lembah-lembah yang luas dan datar. Puncak tertinggi di Gunung Maras dengan ketinggian 692 meter. Dataran hampir rata (*penepain*) didominasi oleh batuan metasedimen dan aluvium sedangkan daerah perbukitan didominasi oleh granit.

Pola kelurusan morfologi di Pulau Bangka tidak terlepas dari kontrol struktur post-Trias yang memotong unsur struktur sebelumnya dan eksistensi pluton-pluton granit. Pluton-pluton granit ini di Kepulauan Bangka Belitung selalu berhubungan dengan struktur antiklin. Hal ini juga berlaku di Pulau Bangka dimana struktur lipatan yang terjadi selalu berhubungan dengan Pluton Granit, dengan arah kelurusan barat laut-tenggara pada Jura Atas. Gugusan pluton Granit yang memanjang dari Malaya Peninsula terus ke tenggara sampai ke Kepulauan Bangka-Belitung merupakan batuan sumber dari endapan timah placer yang lebih dikenal dengan Mandala Metallogenik Timah Asia Tenggara (Katili, 1966). sebagaimana ditunjukkan dipeta pada Gambar

dibawah ini.



Gambar 2.3

Peta Topografi Kabupaten Bangka Selatan

Sumber: Data Kemiringan Lereng Dokumen RTRW Kab. Bangka Selatan 2023-2043

Kabupaten Bangka Selatan secara fisiografi dapat dibedakan menjadi 6 wilayah fisiografi yaitu :

- Fisiografi perbukitan granit, mempunyai bentuk morfologi perbukitan dengan kemiringan lereng 7° - 15° sampai lebih dari 15° , terletak pada bagian utara Kabupaten Bangka Selatan di Bukit Nangka, Bukit Batang, Bukit Murup, Bukit Burang, Bukit Mudung, Gunung Gebang, Gunung Neneh, Gunung Berah, Bukit Terubuk Manawar, Bukit Keledang, dan Bukit Tebas. Pada bagian selatan Kabupaten Bangka Selatan terletak di Bukit Gunung, Gunung Toboali, Gunung Muntai, Gunung Namak dan Daerah Tanjung Baginda serta Tanjung Ru. Sedangkan di Pulau Lepar terdapat di Bukit Modiuk serta sekitar Tanjung Merun dan Tanjung Labu.
- Fisiografi dataran rendah aluvium sungai, mempunyai bentuk morfologi pedataran dengan kemiringan lereng 0° - 2° , terletak pada dataran sungai-sungai utama yang memiliki tingkat erosi lateral yang tinggi dengan morfologi pedataran. Daerah dengan fisiografi ini terutama terdapat di Sungai Kepoh mulai dari hulu di Tabau, Airgegas sampai bertemu dengan Air Resungriga di tenggara Brunuk, Sungai Ulin mulai dari hulu di Tuwik sampai bagian barat Kerunding, Sungai Bangka Ujung mulai dari hulu di bagian barat Pinang sampai bagian barat Kelubi, Air Pelawan mulai dari hulu di bagian timur Jelutung sampai bagian timur Malumut.



- c) Fisiografi dataran rendah pesisir aluvium rawa, mempunyai bentuk morfologi pedataran dengan kemiringan lereng 0° - 2° , terletak pada dataran rendah sekitar pantai di bagian utara Kabupaten Bangka Selatan di Bangka Kota bagian barat, bagian timur Kabupaten Bangka Selatan di sebelah selatan yang berbatasan dengan laut dari Desa Gudang, Desa Batu Betumpang dan Desa Serdang. Daerah di bagian timur Kabupaten Bangka Selatan hampir seluruhnya termasuk dalam fisiografi dataran rendah pesisir aluvium sungai yang meliputi bagian timur dari Desa Kepoh. Di Pulau Lepar daerah dengan fisiografi ini terletak di bagian utara dan timur.
- d) Fisiografi dataran sedimen, terletak di bagian selatan Kabupaten Bangka Selatan di daerah Lesat dengan bentuk morfologi pedataran landai dengan kemiringan lereng 2° - 7° .
- e) Fisiografi dataran metamorf, terletak di bagian utara Kabupaten Bangka Selatan di bagian selatan Kindeng dengan bentuk morfologi pedataran landai dengan kemiringan lereng antara 2° - 7° .
- f) Fisiografi dataran metasedimen, terletak menyebar merata pada setiap daerah dengan bentuk morfologi pedataran landai dengan kemiringan lereng 2° - 7° .

Secara umum kondisi topografis di Kabupaten Bangka Selatan ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga tipe kemiring yaitu :

1. Dataran dengan kemiringan 0° - 2° terletak pada dataran rendah sekitar pantai di bagian utara Kabupaten Bangka Selatan yaitu Bangka Kota bagian barat, bagian timur Kabupaten Bangka Selatan disebelah selatan yang berbatasan dengan laut dari Desa Gudang, Desa Batu Betumpang dan Desa Serdang. Selain itu, daerah dengan 0° - 2° juga terdapat pada dataran sungai-sungai utama yang memiliki tingkat erosi lateral yang tinggi dengan morfologi pedataran. Terutama terdapat di tenggara Brunuk, Sungai Ulin mulai dari hulu di Tuwik sampai bagian barat Kerunding, Sungai Bangkaujung mulai dari hulu dibagian barat Pinang sampai bagian barat Kelubi, Air Pelawan mulai dari hulu di bagian timur Jelutung sampai bagian timur Malumut.
2. Sebagian besar dataran dengan kemiringan 2° - 7° tersebar merata pada setiap daerah di Kabupaten Bangka Selatan terutama terletak dibagian utara dan selatan Kabupaten Bangka Selatan.
3. Daerah dengan kemiringan 7° - 15° merupakan daerah daerah dengan morfologi perbukitan terletak pada bagian utara Kabupaten Bangka Selatan di Bukit Nangka, Bukit Batang, Bukit Murup, Bukit Burang, Bukit Mudung, Bukit Gebang, Gunung Gebang, Gunung Neneh, Bukit Gunung Berah, Bukit Terubuk Manawar, Bukit Keledang dan Bukit Tebas. Pada bagian selatan Kabupaten Bangka Selatan terletak di Bukit Gunung, Gunung Toboali, Gunung Muntai, Gunung Namak dan Daerah Tanjung Baginda serta Tanjung Ru. Sedangkan di Pulau Lepar terdapat di Bukit modiuk serta sekitar tanjung Merun dan Tanjung Labu.

Tabel 2.3
Sebaran Ketinggian Kabupaten Bangka Selatan

No	Kecamatan	Ketinggian	Luas (Ha)	Persen
1	Airgegas	0 - 100 mdpl	102.294,00	28,39
		100 - 200 mdpl	1.188,70	0,33
		200 - 450 mdpl	286,02	0,08
2	Kepulauan Pongok	0 - 100 mdpl	4.852,60	1,35
		100 - 200 mdpl	11,85	0,00
3	Lepar	0 - 100 mdpl	23.186,10	6,44
		100 - 200 mdpl	85,58	0,02
4	Payung	0 - 100 mdpl	48.219,80	13,38
		100 - 200 mdpl	159,58	0,04
5	Pulau Besar	0 - 100 mdpl	30.097,20	8,35
6	Simpang Rimba	0 - 100 mdpl	48.907,80	13,57
		100 - 200 mdpl	820,57	0,23
		200 - 450 mdpl	793,14	0,22
7	Toboali	0 - 100 mdpl	84.257,50	23,38
		100 - 200 mdpl	431,84	0,12
		200 - 450 mdpl	114,54	0,03
8	Tukak Sadai	0 - 100 mdpl	14.572,50	4,04
		100 - 200 mdpl	28,59	0,01
			359.728,60	100

Sumber: Hasil Analisa DEM, Tahun 2022

Kemiringan/kelerengan suatu lahan berkaitan dengan kepekaan tanah terhadap erosi tanah, Semakin tinggi/terjal lerengnya maka tanah semakin peka terhadap erosi. Bila dilihat dari kemiringan tanahnya, wilayah Kabupaten Bangka Selatan dapat dibedakan dalam 6 (enam) kelompok, yaitu sebagai berikut :

1. 0-3 persen, sebagian besar tersebar di wilayah Timur membentang dari bagian Barat hingga Timur, mulai dari Selatan (pantai) ke Utara (pedalaman) dengan luas 250.460 Ha (67,16 persen dari luas total daratan)
2. 3-8 persen, sebagian besar tersebar di wilayah bagian Tengah, membentang dari bagian Barat hingga Timur, dengan luas 44.830 Ha (12,02 persen dari luas total daratan).
3. 8-15 persen, sebagian besar tersebar di wilayah bagian Tengah, membentang dari bagian Barat hingga Timur, dengan luas 31.600 Ha (8,47 persen dari luas total daratan)
4. 15-25 persen, sebagian besar tersebar di wilayah bagian Tengah, membentang dari bagian Barat hingga Timur, dengan luas 21.805 Ha (5,85 persen dari luas total daratan)



5. 25-40 persen, sebagian besar tersebar di wilayah bagian Tengah dan Utara, membentang dari bagian Barat hingga Timur, dengan luas 10.690 Ha (2,87 persen dari luas total daratan)
6. 40 persen, sebagian besar tersebar di wilayah bagian Tengah dan Utara, membentang dari bagian Barat hingga Timur, dengan luas 13.545 Ha (3,63 persen dari luas total daratan)

Terlihat bahwa wilayah Kabupaten Bangka Selatan didominasi oleh kelas lereng 0-3 persen yaitu sebesar 77,80 persen dari luas total wilayah daratan. Kelas lereng tersebut selain potensial untuk tanaman pangan lahan basah (padi sawah) berpotensi juga untuk perikanan tambak bagi wilayah yang ada di sepanjang pantai.

Tabel 2.4
Sebaran Kemiringan Lahan Kabupaten Bangka Selatan

No	Kecamatan	Kemiringan Lereng	Luas (Ha)	Persen
1	Airgegas	>45 persen	135,25	0,04
		0 - 8 persen	100.694,00	27,95
		15 - 25 persen	486,76	0,14
		25 - 45 persen	1.281,28	0,36
		8 - 15 persen	1.171,17	0,33
2	Kepulauan Pongok	0 - 8 persen	4.438,86	1,23
		15 - 25 persen	175,84	0,05
		25 - 45 persen	17,70	0,00
		8 - 15 persen	232,06	0,06
3	Lepar	0 - 8 persen	22.289,60	6,19
		15 - 25 persen	365,34	0,10
		25 - 45 persen	274,95	0,08
		8 - 15 persen	341,87	0,09
4	Payung	0 - 8 persen	46.695,90	12,96
		15 - 25 persen	443,17	0,12
		25 - 45 persen	172,43	0,05
		8 - 15 persen	1.067,82	0,30
5	Pulau Besar	0 - 8 persen	29.741,90	8,25
		15 - 25 persen	63,20	0,02
		8 - 15 persen	292,09	0,08
6	Simpang Rimba	>45 persen	148,33	0,04
		0 - 8 persen	47.419,00	13,16
		15 - 25 persen	355,42	0,10
		25 - 45 persen	1.788,92	0,50
		8 - 15 persen	809,81	0,22



No	Kecamatan	Kemiringan Lereng	Luas (Ha)	Persen
7	Toboali	>45 persen	23,15	0,01
		0 - 8 persen	83.314,50	23,12
		15 - 25 persen	299,02	0,08
		25 - 45 persen	587,27	0,16
		8 - 15 persen	579,96	0,16
8	Tukak Sadai	0 - 8 persen	14.288,10	3,97
		15 - 25 persen	141,32	0,04
		25 - 45 persen	14,62	0,00
		8 - 15 persen	157,03	0,04

Sumber: Hasil Analisa DEM, Tahun 2022

2.1.1.4. Kondisi Geologi

Proses dan kondisi geologi sangat mempengaruhi terbentuknya potensi sumberdaya bahan galian di suatu tempat/daerah. Proses geologi tersebut diantaranya berupa intrusi magma, tektonik, pelipatan, pelapukan, pengayaan (leaching), erosi dan pengendapan. Berdasarkan keadaan geologisnya Pulau Bangka dan wilayah sekitarnya berada pada Paparan Sunda atau bagian tepi dari kerak benua (craton) Asia. Oleh karena itu, batuan dasar penyusun daerah ini selain batuan malihan adalah batuan inti benua yang berupa batuan beku asam atau bersifat granitik.

Dilihat dari posisi waktu terbentuknya batuan beku granitik tersebut merupakan bagian dari busur magmatik yang terbentuk pada umur Trias hingga Jura (230 s/d 135 juta tahun lalu). Kondisi geologi wilayah Kabupaten Bangka Selatan telah digambarkan oleh U. Margono, dkk (1995) dalam Peta Geologi Lembar Bangka Selatan, Sumatra, skala 1 : 250.000 yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi.

2.1.1.4.1. Stratigrafi Regional Lembar Bangka Selatan

Uraian stratigrafi untuk daerah Bangka Selatan dari yang termuda ke yang tertua adalah sebagai berikut :

1. Aluvium (Qa): Terdiri atas lumpur, lempung, pasir, kerikil dan kerakal yang terdapat sebagai endapan sungai, rawa dan pantai.
2. Endapan Rawa (Qs): Terdiri atas lumpur, lanau dan pasir.
3. Pasir Kuarsa (Qak): pasir kuarsa dengan warna putih, berbutir kasar-sedang, lepas, subrounded-rounded. Satuan ini tersingkap di sepanjang pantai timur Pulau Sumatera di sekitar Tanjung Jati.
4. Formasi Ranggam (TQr): formasi ini terdiri atas perselingan batupasir, batulempung dan konglomerat. Batupasir berwarna putih kotor, berbutir halus-kasar, subrounded-rounded, mudah diremas, berlapis baik; struktur sedimen berupa silang silur, paralel laminasi dan



graded bedding; setempat ditemukan lensa-lensa batubara dengan tebal 0,5 meter dan mengandung pasir timah sekunder yang tercampur dengan batupasir kuarsa. Batulempung mengandung sisa-sisa tumbuhan dan lensa gambut. Konglomerat berfragmen pecahan granit, kuarsa dan batuan malihan. Dalam batupasir ditemukan fosil moluska terdiri atas *Turitella terebra* (Limonaceous), *Olivia tricincta* (Mart), *Cypraea sonderava* (Mart), *Arca cornea* (Reeva), *Tapes minosa* (Phil) dan *Venus squamosa* (Lam). Sedangkan fosil foraminifera bentonik antara lain *Celanthus craticulatus*, *Amonia* sp., *Calcarina* sp., *Brizalina* sp., *Quinqueloculina* sp. dan *Triloculina* sp. Berdasarkan kandungan fosil-fosil tersebut diatas formasi ini diduga berumur Miosen Akhir-Plistosen Awal dan terendapkan di lingkungan fluvial. Tebal formasi ini diperkirakan 150 meter dan menindih tak selaras di atas formasi-formasi yang lebih tua.

5. Granit Klabat (TRJkg): terdiri atas granit biotit, granodiorit dan gneissic granit. Granit biotit berwarna kelabu, tekstur porfiritik dengan butiran kristal berukuran sedang-kasar, fenokris feldspar panjangnya mencapai 4 cm dan memperlihatkan struktur foliasi. Granodiorit berwarna putih kotor, berbintik hitam. Gneissic granit berwarna kelabu dan berfoliasi. Nama satuan ini berasal dari lokasi tipenya di Teluk Klabat, Bangka Utara. Pentarikhan dari 5 contoh granit berdasarkan metode K-Ar dan Rb-Sr masing-masing menunjukkan umur 201 +1jt (Graha, 1990) dan 213 +4jt, 217 +15jt, 225 +9jt dan 223 +16jt (Cobbing, 1992). Berdasarkan perian tersebut umur satuan granit ini adalah Trias Akhir-Jura Awal dan menerobos Formasi Tanjung Genting dan Kompleks Pemali.
6. Formasi Tanjung Genting (TRt): terdiri atas perselingan batupasir dan batulempung. Batupasir berwarna kelabu kecoklatan, berbutir halus-sedang, sortasi baik, keras dan tebal lapisan 2-60 cm. Struktur sedimen berupa cross bedding dan ripple mark. Setempat ditemukan lensa batugamping setebal 1,5 meter. Batulempung berwarna kelabu kecoklatan, berlapis baik dengan tebal 15 meter, setempat dijumpai lensa batupasir halus. Dalam lensa batugamping Osberger menemukan fosil *Montlivaultia molukkana* (J. Wanner), *Peronidella* (G. Wilkens), *Entrochus* sp. dan *Encrinus* sp. yang menunjukkan umur Trias. Berdasarkan kandungan fosil-fosil tersebut formasi ini diduga berumur Trias Awal dan terendapkan di lingkungan laut dangkal. Kontak dengan granit ditemukan di utara Lembar Bangka Selatan. Formasi Tanjung Genting terendapkan tidak selaras di atas batuan malihan.
7. Kompleks Malihan Pemali (CPp): terdiri atas phyllite, sekis dan kuarsit. Phyllite berwarna kelabu kecoklatan, foliasi dan mengandung urat kuarsa. Sekis berwarna kelabu kehijauan, foliasi, terkekarkan, setempat rekahannya terisi kuarsa atau oksida besi, berselingan dengan kuarsit. Kuarsit berwarna putih kotor sampai kecoklatan, keras, tersusun atas kuarsa dan feldspar, halus-sedang, per lapisannya mencapai 1 cm. Umur satuan ini tidak diketahui

dengan pasti, tetapi kedudukannya ditindih tidak selaras oleh Formasi Tanjung Genting, maka umurnya diduga Perm atau Karbon.

2.1.1.4.2. Struktur Geologi dan Tektonika Lembar Bangka Selatan

Struktur geologi yang teramati di lembar Bangka Selatan adalah kelurusan, lipatan dan sesar. Kelurusan terutama pada granit dengan arah beragam. Lipatan terdapat pada satuan batupasir dan batulempung formasi Tanjung Genting dan formasi Ranggalang dengan kemiringan antara 18-75 derajat. Sumbu lipatan diduga berarah TL-BD. Dua jenis sesar yang berkembang adalah sesar mendatar dan sesar normal. Sesar mendatar berarah TL-BD, sedangkan sesar normal berarah BL-TG.

Kegiatan tektonik ditafsirkan berlangsung sejak Perm yang ditandai dengan terbentuknya Kompleks Malihan Pemali. Pada Trias Awal terjadi penurunan dan pengendapan formasi Tanjung Genting dalam lingkungan laut dangkal. Kemudian pada Trias Akhir-Jura Akhir terjadi pengangkatan dan diikuti penerobosan Granit Klabat. Mulai Miosen Tengah-Pliosen Awal pengendapan berlangsung dengan terbentuknya formasi Ranggalang di lingkungan fluvial. Selanjutnya pengangkatan dan pengendapan aluvial di sungai, rawa dan pantai berlangsung pada Holosen.

Tabel 2.5
Sebaran Jenis Geologi Kabupaten Bangka Selatan

No	Kecamatan	Jenis Geologi	Luas (Ha)	Persen
1	Airgegas	Alluvium	28.893,29	8,02
		Klabat Granite	35.225,45	9,78
		Pemali Complex	1.823,14	0,51
		Ranggalang Formation	546,63	0,15
		Tanjunggenting Formation	37.280,32	10,35
2	Kepulauan Pongok	Alluvium	4.864,45	1,35
3	Lepar	Alluvium	2.011,12	0,56
		Klabat Granite	9.757,65	2,71
		Tanjunggenting Formation	11.502,96	3,19
4	Payung	Alluvium	5.393,76	1,50
		Klabat Granite	5.418,53	1,50
		Tanjunggenting Formation	37.567,09	10,43
5	Pulau Besar	Alluvium	21.152,58	5,87
		Klabat Granite	4.143,21	1,15
		Tanjunggenting Formation	4.801,39	1,33
6	Simpang Rimba	Alluvium	18.619,80	5,17
		Klabat Granite	7.264,40	2,02
		Tanjunggenting Formation	24.637,29	6,84
7	Toboali	Alluvium	38.073,36	10,57
		Klabat Granite	11.960,99	3,32
		Ranggalang Formation	1.429,54	0,40
		Tanjunggenting Formation	33.339,99	9,25
8	Tukak Sadai	Alluvium	417,82	0,12



No	Kecamatan	Jenis Geologi	Luas (Ha)	Persen
		Klabat Granite	4.585,55	1,27
		Tanjunggenting Formation	9.597,69	2,66
			359.728,60	100

Sumber: Badan Geologi Bandung, Tahun 2022

2.1.1.4.3. Keadaan Tanah

Keadaan tanah di daerah Kabupaten Bangka Selatan mempunyai pH rata-rata di bawah 5, didalamnya mengandung mineral biji timah dan bahan galian lainnya seperti: Pasir Kwarsa, Kaolin, Batu Gunung dan lain-lain. Bentuk dan keadaan tanah adalah sebagai berikut :

1. 4 persen berbukit seperti Bukit Paku, Permis dan lain-lain. Jenis tanah perbukitan tersebut adalah Komplek Podsolik Coklat Kekuning-Bangka Selatan dan Litosol berasal dari Batu Plutonik Masam.
2. 51 persen berombak dan bergelombang, tanahnya berjenis Asosiasi Podsolik Coklat Kekuning-Bangka Selatan dengan bahan induk Komplek Batu pasir Kwarsit dan Batuan Plutonik Masam.
3. 20 persen lembah/datar sampai berombak, jenis tanahnya asosiasi Podsolik berasal dari Komplek Batu Pasir dan Kwarsit.
4. 25 persen rawa dan bencah/datar dengan jenis tanahnya Asosiasi Alluvial Hedromotif dan Glei Humus serta Regosol Kelabu Muda berasal dari endapan pasir dan tanah liat.

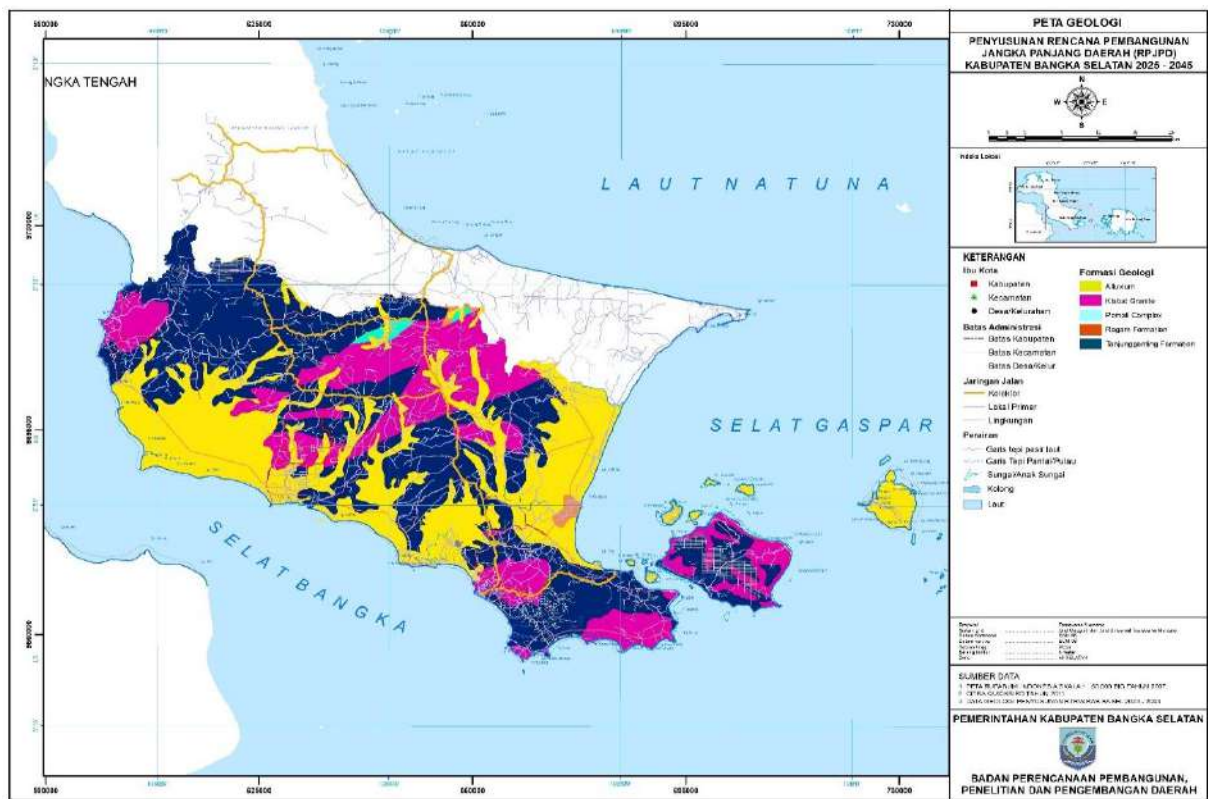
Tabel 2.6
Sebaran Jenis Tanah Kabupaten Bangka Selatan

No	Kecamatan	Jenis Tanah	Luas (Ha)	Persen
1	Airgegas	Asosiasi Dystrudepts Haplohumults	3.691,09	1,03
		Asosiasi Endoaquepts Dystrudepts	10.502,46	2,93
		Asosiasi Hapludox Kandiudults	85.386,10	23,81
		Asosiasi Hedraquepts Sulfaquepts	2.107,02	0,59
		Asosiasi Udipsamments Endoaquepts	2.042,03	0,57
2	Kepulauan Pongok	Asosiasi Hapludox Kandiudults	2.440,99	0,68
		Asosiasi Udipsamments Endoaquepts	2.263,41	0,63
3	Lepar	Asosiasi Endoaquepts Dystrudepts	5.839,81	1,63
		Asosiasi Hedraquepts Sulfaquepts	11.792,00	3,29
		Asosiasi Udipsamments Endoaquepts	4.796,95	1,34
4	Payung	Asosiasi Endoaquepts Dystrudepts	4.926,87	1,37
		Asosiasi Hapludox Kandiudults	43.452,50	12,12
5	Pulau Besar	Asosiasi Endoaquepts Dystrudepts	4.303,02	1,20
		Asosiasi Hapludox Kandiudults	17.118,42	4,77
		Asosiasi Hedraquepts Sulfaquepts	7.002,19	1,95
		Asosiasi Udipsamments Endoaquepts	1.030,13	0,29
6	Simpang Rimba	Asosiasi Endoaquepts Dystrudepts	8.370,14	2,33
		Asosiasi Hapludox Kandiudults	27.940,80	7,79
		Asosiasi Hapludox Sulfaquepts	3,27	0,00
		Asosiasi Hapludults Dystrudepts	3.350,95	0,93
		Asosiasi Hedraquepts Sulfaquepts	6.984,63	1,95



No	Kecamatan	Jenis Tanah	Luas (Ha)	Persen
7	Toboali	Asosiasi Udipsamments Endoaquents	4.123,25	1,15
		Asosiasi Dystrudepts Haplohumults	1.750,73	0,49
		Asosiasi Dystrudepts Hapludults	3.166,26	0,88
		Asosiasi Endoaquepts Dystrudepts	19.546,02	5,45
		Asosiasi Haplohemists Sulfihemists	1.896,49	0,53
		Asosiasi Hapludox Kandiudults	46.457,99	12,96
		Asosiasi Hedraquents Sulfaquents	1.579,28	0,44
8	Tukak Sadai	Asosiasi Udipsamments Endoaquents	10.195,20	2,84
		Asosiasi Endoaquepts Dystrudepts	464,23	0,13
		Asosiasi Hapludox Kandiudults	11.051,20	3,08
		Asosiasi Udipsamments Endoaquents	3.025,49	0,84
			359.728,60	

Sumber: Dinas Pertanian, Tahun 2022



Gambar 2.4

Peta Geologi Kabupaten Bangka Selatan

Sumber : Data Geologi Dokumen RTRW Kab. Bangka Selatan 2023-2043

Struktur yang terdapat di Kabupaten Bangka Selatan berupa kelurusan, lipatan dan sesar. Kelurusan terutama pada granit dengan arah yang beragam. Lipatan terdapat pada satuan batu pasir dan batu lempung Formasi Tanjung Genting dan Formasi Ranggung. Sedangkan sesar yang berkembang di daerah ini berupa sesar mendatar dan sesar normal. Sesar mendatar berarah timur laut-barat daya, sesar normal berarah barat laut-tenggara. Batuan ini menerobos batuan Komplek Malihan Pemali yang diperkirakan sebagai batuan dasar didaerah tersebut, yang membentuk kontak struktur, pada lapisan kontak struktur membentuk sedimen hasil

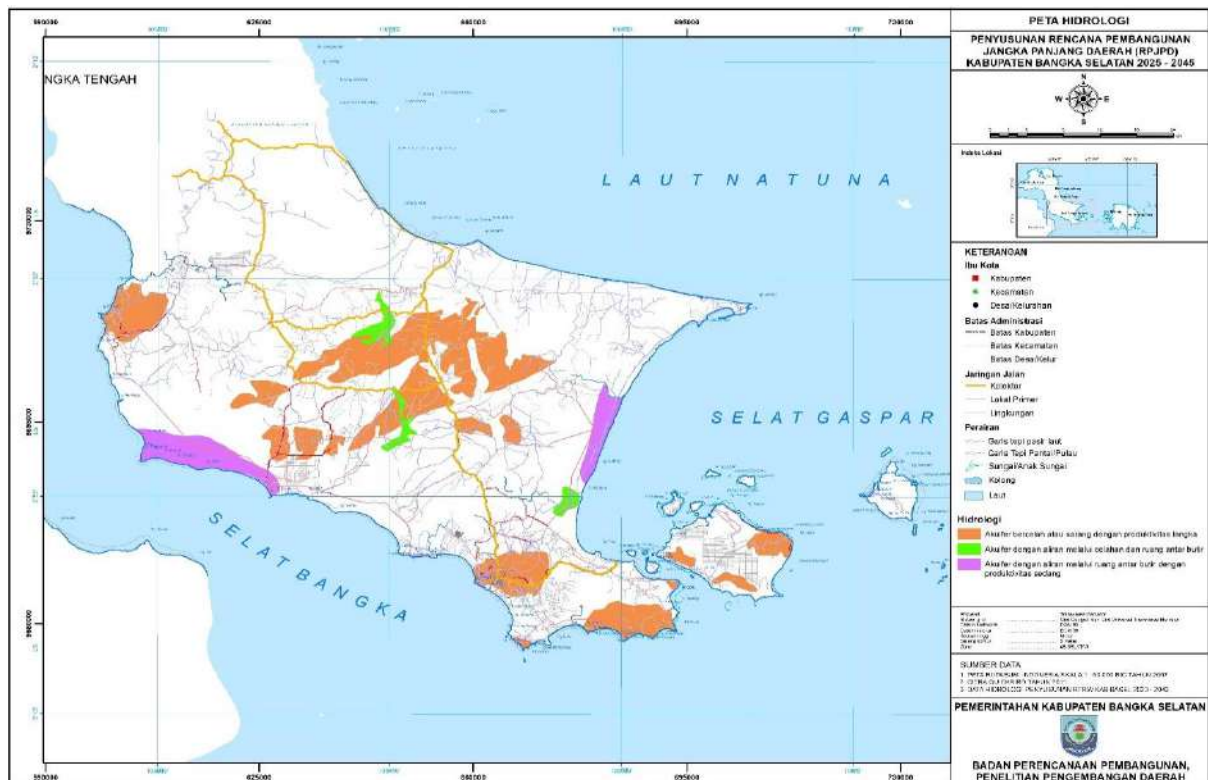


rombakan dan pelapukan. Perombakan dan pelapukan batuan granit akan lebih efektif terjadi di alam apabila ditunjang oleh adanya pengaruh struktur sesar atau kekar di daerah tersebut.

Sebagaimana kajian ilmiah yang dilakukan oleh Pusat Survei Geologi-Badan Geologi (Padmawidjaja. 2013:108), hal yang disebutkan diatas adalah sebenarnya yang mendasari Kabupaten Bangka Selatan menjadi salah satu penghasil timah di Pulau Bangka. Kandungan timah tersebut ditemukan dalam jebakan-jebakan endapan eluvial yang terendapkan dialiran sungai purba (*Paleochannel*). Endapan timah merupakan hasil pelapukan rombakan yang terjebak di daerah sedimen berasal dari hasil pelapukan rombakan batuan granit yang telah mengalami proses kimiawi sehingga terjadi pengkonsentrasian bijih-bijih timah dan terendapkan dalam aliran-aliran sungai purba.

2.1.1.5. Kondisi Hidrologi

Berdasarkan Keputusan Presiden nomor 12 Tahun 2012, tentang Penetapan Wilayah Sungai, menetapkan Wilayah Sungai Bangka (WS : 01.44.A3) merupakan wilayah sungai strategis nasional. Wilayah administrasi yang termasuk dalam Pulau Bangka meliputi Kota Pangkalpinang; Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Selatan.



Gambar 2.5
Peta Hidrologi Kabupaten Bangka Selatan
 Sumber : Data Hidrologi Dokumen RTRW Kab. Bangka Selatan 2023-2043



2.1.1.5.1. Daerah Aliran Sungai

Daerah aliran sungai yang berada di Kabupaten Bangka Selatan sebanyak 24 (dua puluh empat) DAS, 16 (enam belas) DAS berada pada wilayah administrasi Kabupaten Bangka Selatan, 7 (tujuh) DAS merupakan DAS Lintas Kabupaten yang bermuara di Selat Karimata, dan 1 (satu) DAS Lintas Kabupaten yang bermuara di Selat Bangka. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Daftar Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Bangka Selatan

No	Kode DAS	Nama DAS	Keterangan
1	031	DAS Kurau	Lintas Kabupaten
2	032	DAS Bara	Lintas Kabupaten
3	033	DAS Kulur	Lintas Kabupaten
4	034	DAS Kayuara	Lintas Kabupaten
5	036	DAS Berbak	Lintas Kabupaten
6	037	DAS Terusan sekanak	Lintas Kabupaten
7	038	DAS Kepoh	Kabupaten Bangka Selatan
8	039	DAS Bantel	Kabupaten Bangka Selatan
9	040	DAS Toboali	Kabupaten Bangka Selatan
10	041	DAS Tungkal	Kabupaten Bangka Selatan
11	042	DAS Ulim	Kabupaten Bangka Selatan
12	043	DAS Betara	Kabupaten Bangka Selatan
13	044	DAS Balar	Kabupaten Bangka Selatan
14	045	DAS Bangka Kota	Lintas Kabupaten
15	046	DAS Selan	Lintas Kabupaten
16	055	DAS Kliung	Kabupaten Bangka Selatan
17	056	DAS Pengokanak	Kabupaten Bangka Selatan
18	057	DAS Kampak	Kabupaten Bangka Selatan
19	058	DAS Elang	Kabupaten Bangka Selatan
20	059	DAS Rabuh	Kabupaten Bangka Selatan
21	060	DAS Burung	Kabupaten Bangka Selatan
22	061	DAS Senior	Kabupaten Bangka Selatan
23	062	DAS Kelapan	Kabupaten Bangka Selatan
24	063	DAS Lepar	Kabupaten Bangka Selatan

Sumber : Keputusan Presiden RI nomor 12 Tahun 2012



Sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presiden RI nomor 12 Tahun 2012, Pasal 3; DAS yang berada pada pulau atau pulau-pulau kecil (kepulauan) yang belum memiliki nama dan tidak tercantum dalam daftar, keberadaannya termasuk bagian dari wilayah sungai yang didasarkan pada batas Wilayah Sungai. Dalam Pasal 4 disebutkan bahwa Pengelolaan sumber daya air untuk pulau-pulau kecil yang tidak tercantum pada peta menjadi satu kesatuan pengelolaan dengan sumber daya air pada Wilayah Sungai yang berada pada wilayah administrasi yang bersangkutan. Lebih lanjut pada Pasal 6 disebutkan bahwa Penetapan Wilayah Sungai dapat ditinjau kembali apabila ada perubahan fisik dan/atau non fisik di Wilayah Sungai yang bersangkutan yang mengakibatkan perubahan Wilayah Sungai dan/atau perubahan kelompok Wilayah Sungai.

Kabupaten Bangka Selatan dilalui oleh beberapa sungai besar dan anak-anak sungai yang membelah wilayah Kabupaten menjadi beberapa wilayah DAS (Daerah Aliran Sungai). Wilayah DAS yang terdapat di Kabupaten Bangka Selatan ini adalah :

- 1) DAS Bantel, terletak sebagian besar di Kelurahan Toboali dan di Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali. DAS ini berupa hutan non mangrove seluas 5.940 Ha dan lahan terbuka 2.293 ha.
- 2) DAS Kepoh, terletak bagian timur Kabupaten Bangka Selatan. DAS ini terdiri dari 9.455 ha hutan non mangrove, 5.454 ha lahan terbuka, 509 ha lahan terbuka recharge area (area imbuhan), 26 ha kolong recharge area.
- 3) DAS Nyirih, terletak di bagian timur wilayah Kabupaten Bangka Selatan yang terdiri dari hutan non mangrove 42.040 ha, lahan terbuka 9.023 ha, lahan terbuka *recharge area* 1.641 ha.
- 4) DAS Kurau, terletak di bagian utara wilayah Kabupaten Bangka Selatan, DAS ini terdiri dari kawasan hutan non mangrove 23.224 ha, areal terbuka 10.217 ha lahan terbuka recharge area 3.110 ha dan kolong recharge area 285 ha.
- 5) DAS Bangka Kota, terletak di sebelah barat wilayah Kabupaten Bangka Selatan, wilayah DAS ini hanya sebagian kecil saja yang masuk kedalam wilayah administrasi Kabupaten Bangka Selatan. DAS ini terdiri dari Hutan non mangrove 24.935 ha, lahan terbuka recharge area 320 ha dan kolong recharge area 38 ha.

Untuk lebih jelasnya nama dan klasifikasi sungai di Kabupaten Bangka Selatan dapat dilihat pada Tabel dan Gambar sebagai berikut :

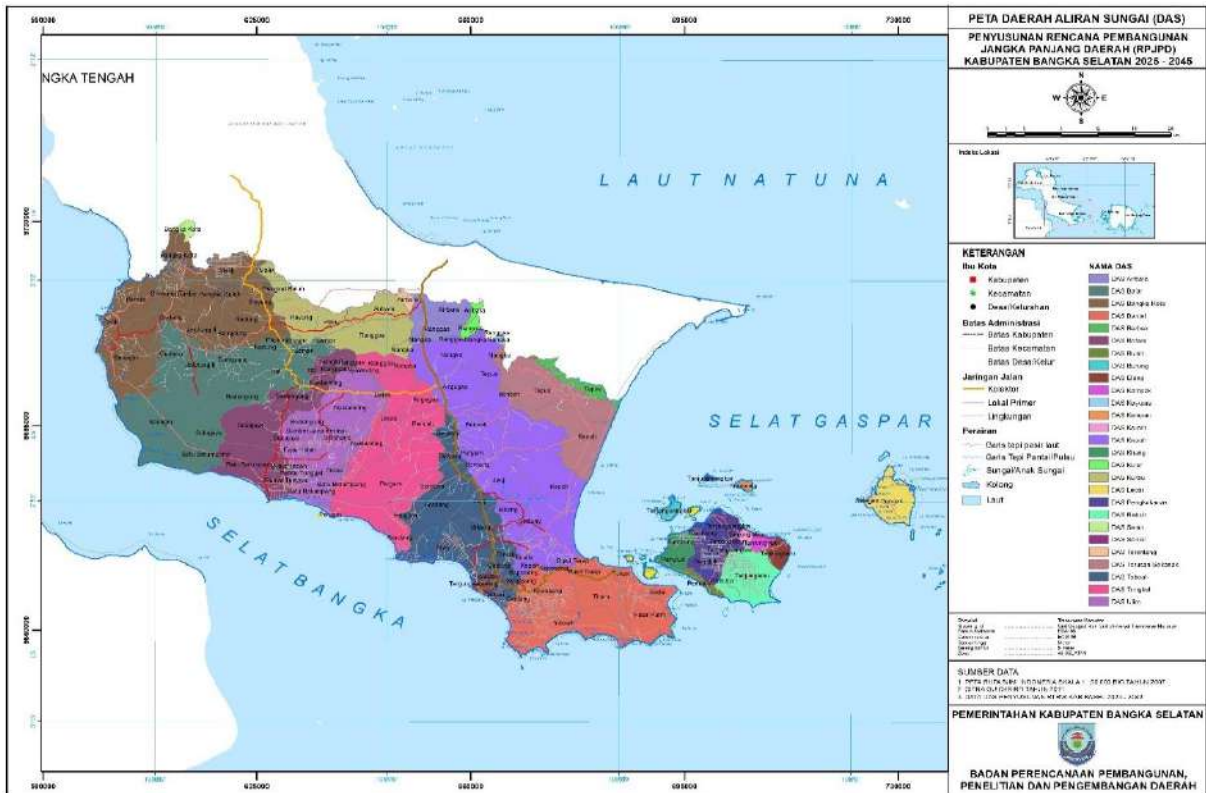
Tabel 2.8
Nama dan Klasifikasi Sungai Per Kecamatan Kabupaten Bangka Selatan

No	Kecamatan	Sungai Utama	Sungai Sekunder	Sungai Tersier
1	Toboali	Sungai Bantel	Sungai Gosong	Air Keladang
			Sungai Kepuh	Air Jelemu



No	Kecamatan	Sungai Utama	Sungai Sekunder	Sungai Tersier
			Sungai Serdang	Air Tarum Besar
			Sungai Bikang	Air Medang
			Sungai Keriak	Air Tanggar
				Air Lesung Ringga
				Air Kalen
				Air Duren
				Air Kuning
				Air Pumpung
2	Airgegas	Sungai Kepoh	Sungai Nyirih	Air Kambing
			Sungai Lillin	Air Ketutu
			Sungai Bedug	Air Dekat
			Sungai Garut	Air Sabut
				Air Pinang
				Air Nyireh
				Air Kemis
				Air Batang
				Air Jering
				Air Sabut
				Air Rajung
				Air Pering
				Air Lesungringa
				Air Regas
	Air Nudur			
	Air Jelemu			
	Air Pinang			
3	Payung	Sungai Kurau	Sungai Jambu	Air Idik
			Sungai Ulir	Air Pelawan
			Sungai Bakanjung	Air Parungkep
			Sungai Pangkalbulih	Air Baru
				Air Palas
				Air Kurau
				Air Pering
4	Simpang Rimba	Sungai BangkaKota	Sungai Babuair	Air Rinduk
			Sungai Kabal	Air Upang
			Sungai Kambuh	Air Pemancingan
			S. Sembilang Besar	Air Aras
			S. Sembilang Kecil	Air Bunut
			Sungai Balar	
			Sungai Tambak	
			Sungai Londong	

Sumber: RTRW Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023-2043



Gambar 2.6

Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Bangka Selatan

Sumber : Data Daerah Aliran Sungai (DAS) Dokumen RTRW Kab. Bangka Selatan 2023-2043

2.1.1.5.2. Air Tanah

Kabupaten Bangka Selatan mempunyai 3 jenis sistem akuifer berdasarkan kriteria komposisi litologi batuan dan kelulusan air serta kriteria keterdapatan air tanah dan produktifitas akuifernya yaitu :

1. Akuifer dengan aliran melalui ruang antar butir.
2. Akuifer dengan produktifitas sedang.
3. Akuifer dengan keterusan rendah sampai sedang mempunyai kedalaman muka air tanah beragam, umumnya kurang dari 2 meter, dengan debit sumur kurang dari 5 liter/detik. umumnya bersifat asam (PH <6,5). Di daerah pantai bersifat payau atau asin diakibatkan pengaruh intrusi air laut sehingga tidak dapat dipakai untuk air minum ataupun irigasi.
4. Akuifer dengan produktifitas terbatas, pada wilayah ini umumnya akuifer tidak menerus, tipis dan rendah keterusannya. Kedalaman muka air tanah kurang dari 3 meter, dengan debit sumur kurang dari 5 liter/detik. Umumnya bersifat asam (PH <6,5). Sebagian di daerah pantai, air tanah bersifat payau/asin akibat pengaruh intrusi air laut.
5. Akuifer dengan melalui celahan dan ruang antar butir.



6. Akuifer dengan keterusan sangat beragam, kedalaman muka air tanah beragam umumnya kurang dari 3 meter. Debit sumur kurang dari 5 liter/detik dengan PH bersifat asam ($<6,5$). Sebaran akuifer ini meliputi wilayah setempat produktif di sekitar Lesat.
7. Akuifer bercelah atau sarang dengan produktifitas kecil.
8. Akuifer produktifitas kecil setempat berarti.
9. Pada akuifer ini umumnya mempunyai keterusan rendah, setempat pada yang lemah dapat dijumpai mata air dengan debit kecil (<2 liter/detik). Air tanah dangkal dengan jumlah terbatas dapat diperoleh di daerah lembah perbukitan, zona pelapukan dan rekahan batuan padu. Meliputi daerah morfologi perbukitan yang disusun batuan sedimen padu, batuan metamorf dan batuan beku, air tanah umumnya bersifat asam ($PH<6,5$).

2.1.1.5.3. Air Tanah Langka

Pada daerah ini air tanah langka dan sulit dijumpai kecuali pada zona rekahan batuan yang pada umumnya muncul sebagai mata air. Penyebarannya meliputi daerah morfologi perbukitan yang disusun batuan sedimen padu, batuan metamorf dan batuan beku, air tanah umumnya bersifat asam ($PH<6,5$).

Daerah yang mempunyai ketersediaan air yang cukup terdapat pada daerah satuan aluvium, akan tetapi secara kualitatif tidak semua air pada aluvium layak diminum. Hanya pada aluvium sungai dan pantai yang dapat diminum. Daerah permukiman yang berkembang pada satuan alluvium antara lain seperti Serdang, Airgegas, Delas, Pangkalan Buluh, Batu Betumpang, Bangka Kota, Kumbang. Kota-Kota dan permukiman berkembang pada Formasi Tanjung Genting dengan litologi batupasir antara lain Toboali, Tukak, Gadung, Bikang, Air Bara, Pasu, Nyelanding, Bedengung, Payung, Malik, Ranggung, Jelutung, Gudang, Penutuk, Tanjung Sangkar dan Tanjung Labu.

Tabel 2.9
Sebaran CAT Kabupaten Bangka Selatan

No	Kecamatan	Nama CAT	Luas (Ha)	Persen
1	Airgegas	CAT Koba	103.769,00	36,57
2	Pulau Besar	CAT Batubetumpang	30.097,20	10,61
3	Simpang Rimba	CAT Pangkal Raya	50.521,50	17,80
4	Toboali	CAT Batu Besar	84.803,90	29,88
5	Tukak Sadai	CAT Batu Besar	14.601,10	5,14
	Jumlah		359.728,60	

Sumber: DPU Pengairan Kabupaten Bangka Selatan, 2022

Ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan air minum masyarakat serta kebutuhan air bagi lahan pertanian dan perkebunan serta kebutuhan air bersih diseluruh kawasan strategis di Kabupaten Bangka Selatan mutlak untuk dipenuhi dan dikelola secara optimal. Pencemaran dan pendangkalan sungai di Kabupaten Bangka Selatan menjadi permasalahan tersendiri terhadap kualitas dan kuantitas air baku yang sebagian besar disebabkan karena aktivitas pertambangan timah yang tidak ramah lingkungan. Kondisi DAS di Kabupaten Bangka Selatan saat ini sebagian besar dalam kondisi rusak dan rusak berat.

Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air tidak akan berhasil mencapai kinerja yang efektif tanpa partisipasi aktif masyarakat maupun pelaku usaha dan ekonomi lainnya, baik sebagai bagian dari sumber pencemar maupun pihak yang berhak atas kualitas air yang baik.

2.1.1.6. Klimatologi

Kabupaten Bangka Selatan beriklim Tropis Tipe A dengan variasi curah hujan antara 43,6 hingga 356,2 mm tiap bulan untuk tahun 2011 dengan curah hujan terendah pada bulan Agustus. Suhu rata-rata daerah Kabupaten Bangka Selatan berdasarkan data dari Badan Meteorologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Pangkalpinang menunjukkan variasi antara 23,30 Celcius hingga 32,30Celcius. Sedangkan kelembaban udara bervariasi antara 52 hingga 96 persen pada tahun 2011. Sementara, intensitas penyinaran matahari pada tahun 2016 rata-rata bervariasi antara 24,5 hingga 89,0 persen dan tekanan udara antara 1008,5 hingga 1010,2 mb.

Tabel 2.10

**Tekanan Udara, Suhu Udara, Kelembaban Udara
dan Penyinaran Matahari Rata-rata menurut Bulan Kabupaten Bangka Selatan**

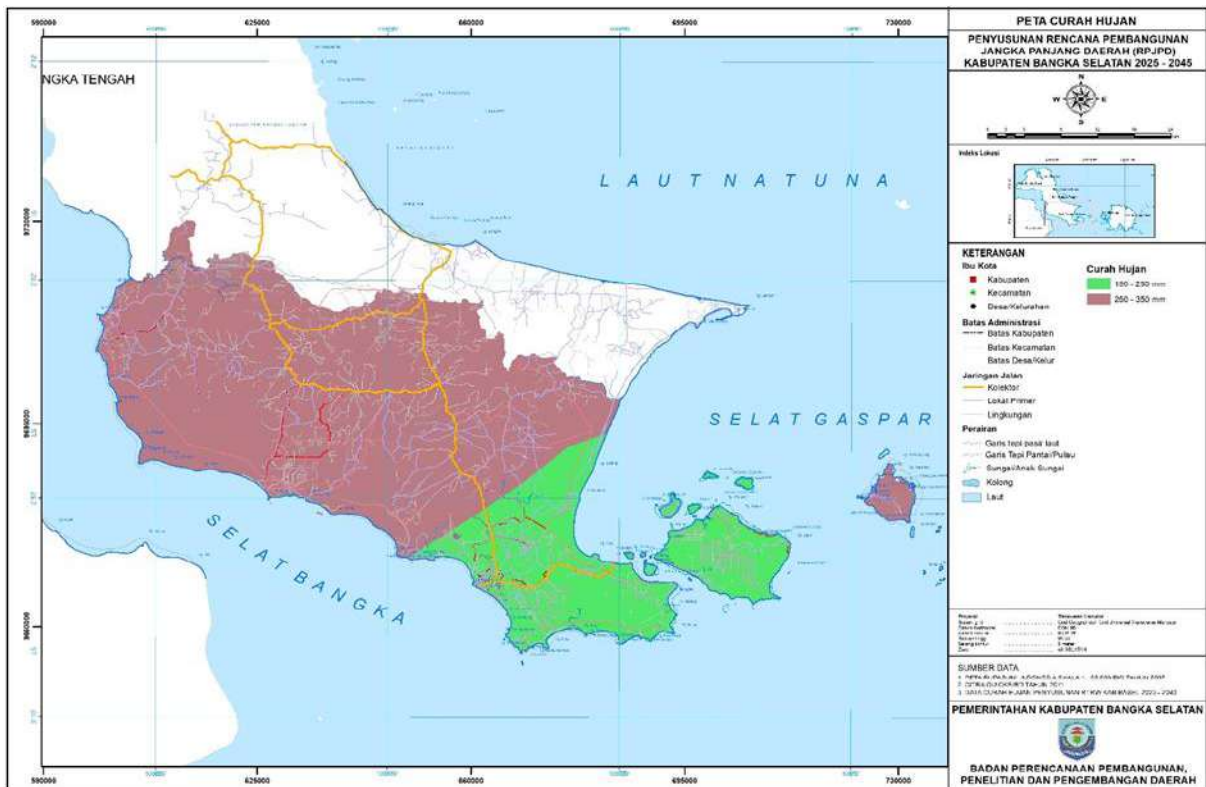
Bulan	Tekanan Udara Rata-Rata (mb)	Suhu Udara (derajat celcius)			Kelembaban Udara (persen)	Penyinaran Matahari (persen)
		Min	Mak	Rata-Rata		
Januari	1008,5	29,9	23,6	26,0	84,0	33,8
Februari	1008,9	30,4	23,3	26,2	83,0	53,0
Maret	1008,7	30,5	23,4	26,1	85,0	35,3
April	1009,2	30,8	23,7	26,6	85,0	43,1
Mei	1009,1	31,5	24,2	27,2	84,0	59,7
Juni	1009,3	31,2	24,4	27,3	80,0	59,5
Juli	1009,5	30,9	24,2	27,2	78,0	71,9
Agustus	1009,8	31,6	24,4	27,7	74,0	89,0
September	1010,2	32,3	24,5	28,1	73,0	82,8
Oktober	1009,2	31,4	24,2	27,1	81,0	59,5



Bulan	Tekanan Udara Rata-Rata (mb)	Suhu Udara (derajat celcius)			Kelembaban Udara (persen)	Penyinaran Matahari (persen)
		Min	Mak	Rata-Rata		
November	1009,0	31,0	23,9	26,7	84,0	47,5
Desember	1009,4	29,9	23,8	26,1	87,0	24,5
Total	1009,2	31,0	24,0	26,9	81,5	55,0

Sumber : Badan Meteorologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Pangkalpinang

Berdasarkan data curah hujan diatas nilai rata-rata curah hujan per hari sebesar 12,22 Mm/Hari.



Gambar 2.7
Peta Curah Hujan Kabupaten Bangka Selatan
Sumber: Data Curah Hujan Dokumen RTRW Kab. Bangka Selatan 2023-2043

Sedangkan untuk kualitas udara yang merupakan kebutuhan pokok manusia dan makhluk hidup lainnya untuk hidup. Udara yang kotor sering menimbulkan berbagai macam penyakit yang membahayakan manusia atau makhluk hidup lainnya sehingga kualitas udara seperti halnya air, seringkali menjadi tolak ukur kualitas kesehatan di suatu daerah. Berdasarkan dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 diketahui bahwa pemantauan kualitas udara di Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.11
Kualitas Udara di Kabupaten Bangka Selatan

Lokasi Pemantauan	Parameter						
	SO ₂	CO	NO ₂	O ₃	HC	TSP	PM ₁₀
Industri	90,10	1832,31	10,44	40,20	101,40	114,04	73,40
Pemukiman	91,30	2404,91	12,04	42,40	93,40	110,42	71,60
Roadside	76,80	2633,95	10,17	36,20	70,30	122,92	71,40

Sumber: Buku Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Kualitas udara di Kabupaten Bangka Selatan jika dilihat berdasarkan parameter, terbagi menjadi 6 parameter, meliputi :

1. Parameter TSP

Berdasarkan hasil pemantauan terhadap TSP kualitas udara di Kabupaten Bangka Selatan pada kawasan industri masih dibawah baku mutu sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 41 Tahun 1999 yaitu 230 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$. Kadar TSP di Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 2015 yaitu sebesar 114,04 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$.

2. Parameter PM₁₀

PM₁₀ merupakan salah satu pencemar udara primer. Menurut WHO, besarnya ukuran partikulat debu yang dapat masuk ke dalam saluran pernapasan manusia adalah yang berukuran 0,1 μm sampai dengan kurang dari 10 μm dan berada sebagai suspended particulate matter yang dikenal dengan nama PM₁₀. Konsentrasi PM₁₀ di Kabupaten Bangka Selatan pada kawasan industri yaitu 73,40 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ konsentrasi masih berada di bawah baku mutu Peraturan Pemerintah nomor 41 Tahun 1999 (Baku mutu udara ambien 150 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$).

3. Parameter SO₂

Gas SO₂ (sulfur dioksida), merupakan gas polutan yang banyak dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil yang mengandung unsur belerang seperti minyak, gas, batubara, maupun kokas. Disamping SO₂, pembakaran ini juga menghasilkan gas SO₃, yang secara bersama-sama dengan gas SO₂ lebih dikenal sebagai gas SO_x (sulfur oksida). Konsentrasi SO₂ di Kabupaten Bangka Selatan pada kawasan industry yaitu 90,10 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ masih dibawah baku mutu sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 1999 (Kadar Maksimal untuk parameter SO₂ 365 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$).

4. Parameter Karbon Monoksida (CO)

Karbon monoksida (CO) dihasilkan dari pembakaran yang tidak sempurna dari bahan bakar yang mengandung karbon dan oleh pembakaran pada tekanan dan suhu tinggi yang terjadi pada mesin. Karbon monoksida dapat juga dihasilkan. Konsentrasi CO di Kabupaten Bangka Selatan pada kawasan industri di kisaran 2771-1832 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$. Parameter CO ini masih



berada dibawah baku mutu udara ambien (BMUA untuk parameter CO sesuai Peraturan Pemerintah nomor 41 Tahun 1999 sebesar $10000\mu\text{g}/\text{Nm}^3$).

5. Parameter Ozon (O_3)

Ozon telah menjadi suatu isu aktual karena kaitannya dengan satu efek global pencemaran udara yaitu penipisan lapisan Ozon di atmosfer atas bumi. Ozon merupakan salah satu pencemar udara yang terus meningkat konsentrasinya. Ozon pada konsentrasi 0,3 ppm dapat berakibat iritasi terhadap hidung dan tenggorokan. Kontak dengan ozon pada konsentrasi 1,0-3,0 ppm selama 2 jam mengakibatkan pusing berat dan kehilangan koordinasi pada beberapa orang yang sensitif. Konsentrasi O_3 di Kabupaten Bangka Selatan pada kawasan industri sebesar $40,20\mu\text{g}/\text{Nm}^3$.

6. Parameter Nitrogen (NO_2)

Nitrogen oksida sering disebut dengan NO_x karena oksida nitrogen mempunyai 2 bentuk yang sifatnya berbeda, yakni gas NO_2 dan gas NO . Sifat gas NO_2 adalah berwarna dan berbau, sedangkan gas NO tidak berwarna dan tidak berbau. Warna gas NO_2 adalah merah kecoklatan dan berbau tajam menyengat hidung. Kadar NO_x diudara daerah perkotaan yang berpenduduk padat akan lebih tinggi dari daerah Pedesaan yang berpenduduk sedikit. Hal ini disebabkan karena berbagai macam kegiatan yang menunjang kehidupan manusia akan menambah kadar NO_x di udara, seperti transportasi, generator pembangkit listrik, pembuangan sampah dan lain-lain. Kadar NO_x di Kabupaten Bangka Selatan pada kawasan industri melewati batas baku mutu yaitu 10,44 ppm dimana batas baku mutunya yaitu 0,5 ppm.

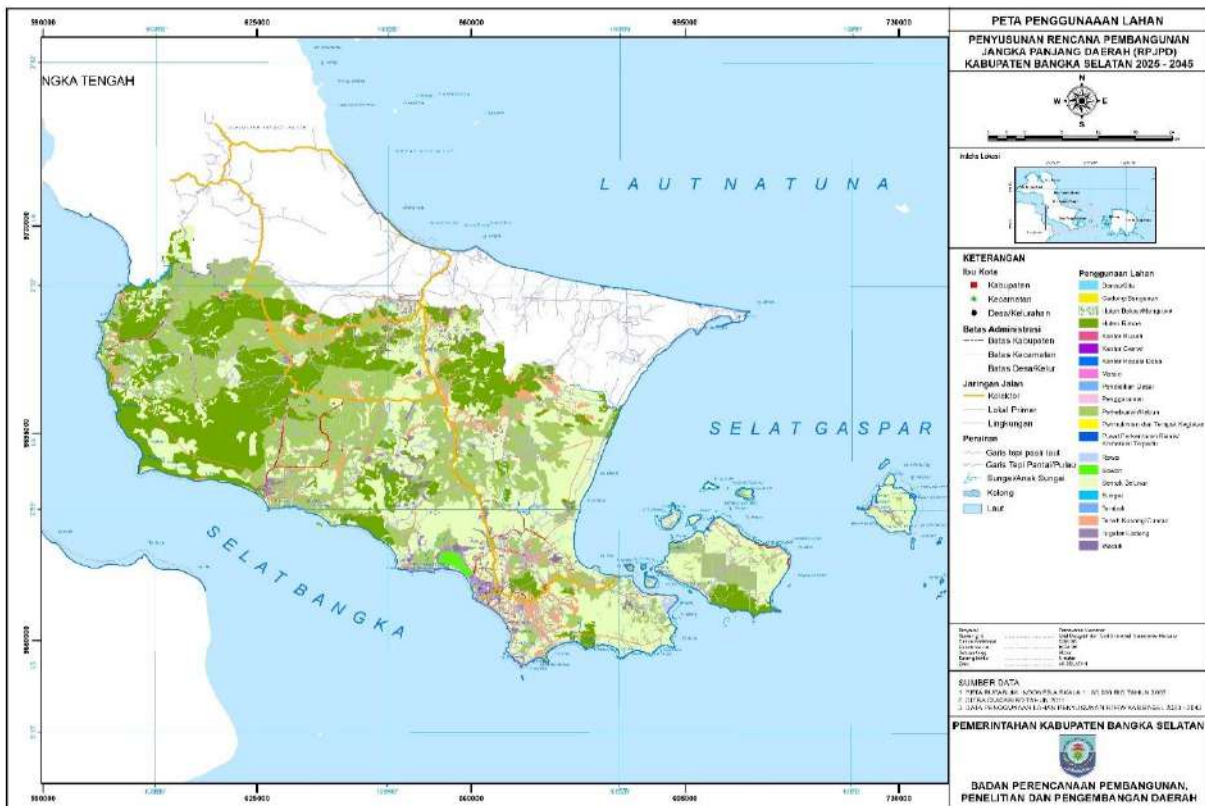
2.1.1.7. Penggunaan Lahan

Pola pemanfaatan lahan di Kabupaten Bangka Selatan pada umumnya masih berupa lahan semak belukar dan hutan. Lahan untuk pertanian tanaman pangan sebarannya merata di setiap Kecamatan baik pertanian lahan kering dan lahan basah dengan menggunakan irigasi dari kolong-kolong dan sungai-sungai kecil yang banyak terdapat di Kabupaten Bangka Selatan. Di Kabupaten Bangka Selatan terdapat dua lokasi kawasan transmigrasi, yaitu UPT Rias di Kecamatan Toboali dan UPT Kurau II di Kecamatan Pulau Besar. Untuk pemanfaatan lahan untuk perkebunan, sebaran utamanya terdapat diwilayah Kecamatan Pulau Besar, Payung, Airgegas dan Lepar. Areal perkebunan ini berupa kebun kelapa sawit dan kebun campuran yang pengelolaannya diusahakan oleh rakyat dan swasta. Untuk kawasan perkebunan lada sebaran areal tanamnya terbesar berada di Kecamatan Simpang Rimba, Airgegas dan Kecamatan Payung.

Pemanfaatan ruang untuk kegiatan permukiman terutama berada disekitar pusat Kota Kecamatan dan poros jalan-jalan utama terutama pada ruas jalan yang menghubungkan Kota



dan Tobaoli dengan bangunan berpola linier dan bersifat tidak kontinyu mengikuti pola jaringan jalan. Peta Tutupan Lahan Kabupaten Bangka Selatan dapat dilihat pada Gambar berikut :



Gambar 2.8
Peta Tutupan Lahan Kabupaten Bangka Selatan

Sumber : Data Penggunaan Lahan Peta Dasar Dokumen RTRW Kab. Bangka Selatan 2023-2043.

Untuk kawasan pertambangan terdapat kawasan penggalian tambang timah yang diusahakan oleh PT. Timah dan kontraktor swasta yang merupakan mitra usaha di wilayah Kuasa Pertambangan (KP) di bawah kendali PT. Timah. Hampir 80 persen dari total produksi perusahaan berasal dari penambangan didarat mulai dari Tambang Skala Kecil berkapasitas 20 m³/jam sampai dengan Tambang Besar berkapasitas 100 m³/jam. Untuk jenis pemanfaatan lahan jenis hutan, terutama hutan lebat dan hutan rawa (mangrove) terdapat di bagian selatan dan timur Kabupaten Bangka Selatan, sebarannya terutama di Kecamatan Toboali, Payung dan Simpang Rimba. Untuk jenis hutan rawa terdapat disepanjang pesisir pantai terutama dibagian timur dan selatan wilayah Kabupaten Bangka Selatan. Luas kawasan hutan menurut penetapannya (SK 6614) terdiri dari hutan produksi tetap seluas 103.951,85 Ha, KTW (3.146,39 Ha), APL (226.886,39) dan hutan lindung seluas 25.740 Ha. Untuk lebih jelasnya lihat pada Tabel dan Gambar berikut ini :



Tabel 2.12
Penggunaan Lahan Kabupaten Bangka Selatan

No	Kecamatan	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
1	Airgegas	Danau/Situ	93,01
		Hutan Rimba	26.213,20
		Perkebunan/Kebun	31.014,10
		Permukiman dan Tempat Kegiatan	264,26
		Sawah	5,66
		Semak Belukar	36.479,50
		Sungai	0,21
		Tanah Kosong/Gundul	5.896,81
		Tegalan/Ladang	3.662,47
		Waduk	139,54
		Total	103.768,77
2	Kepulauan Pongok	Gedung/Bangunan	0,39
		Perkebunan/Kebun	253,93
		Permukiman dan Tempat Kegiatan	45,83
		Rawa	3,57
		Sawah	14,02
		Semak Belukar	4.475,74
		Tanah Kosong/Gundul	16,85
		Tegalan/Ladang	54,12
Total	4.864,45		
3	Lepar	Hutan Bakau/Mangrove	233,35
		Hutan Rimba	2.932,70
		Kantor Camat	0,11
		Pendidikan Dasar	0,17
		Perkebunan/Kebun	6.232,11
		Permukiman dan Tempat Kegiatan	62,75
		Rawa	77,38
		Semak Belukar	13.426,70
		Tanah Kosong/Gundul	267,16
		Tegalan/Ladang	39,28
		Total	23.271,71
4	Payung	Gedung/Bangunan	0,48
		Hutan Rimba	21.753,00
		Perkebunan/Kebun	19.792,00
		Permukiman dan Tempat Kegiatan	212,69
		Semak Belukar	4.562,08
		Sungai	32,46
		Tanah Kosong/Gundul	1.619,07



No	Kecamatan	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
		Tegalan/Ladang	395,26
		Waduk	12,36
		Total	48.379,40
5	Pulau Besar	Hutan Rimba	11.877,10
		Penggaraman	19,89
		Perkebunan/Kebun	11.042,50
		Permukiman dan Tempat Kegiatan	73,7
		Rawa	103,23
		Sawah	2,7
		Semak Belukar	6.284,45
		Tanah Kosong/Gundul	212,65
		Tegalan/Ladang	480,94
		Total	30.097,16
		6	Simpang Rimba
Perkebunan/Kebun	14.240,40		
Permukiman dan Tempat Kegiatan	208,11		
Semak Belukar	12.211,90		
Sungai	232,32		
Tanah Kosong/Gundul	709,19		
Waduk	0,28		
Total	50.521,40		
7	Toboali	Gedung/Bangunan	0,07
		Hutan Rimba	4.191,12
		Kantor Bupati	0,17
		Masjid	0,24
		Penggaraman	14,58
		Perkebunan/Kebun	20.998,50
		Permukiman dan Tempat Kegiatan	513,63
		Pusat Perkantoran Bisnis/ Komersial Terpadu	22,72
		Rawa	279,39
		Sawah	1.169,57
		Semak Belukar	47.421,10
		Sungai	107,45
		Tanah Kosong/Gundul	6.469,71
		Tegalan/Ladang	3.223,14
		Waduk	392,53
Total	84.803,91		
8	Tukak Sadai	Gedung/Bangunan	0,48
		Hutan Rimba	6,04
		Kantor Camat	0,12



No	Kecamatan	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
		Kantor Kepala Desa	0,07
		Perkebunan/Kebun	3.334,41
		Permukiman dan Tempat Kegiatan	87,08
		Rawa	449,02
		Semak Belukar	10.415,70
		Tambak	7,8
		Tanah Kosong/Gundul	88,79
		Waduk	211,55
		Total	14.601,06

Sumber : Hasil Digitasi SPOT16, Tahun 2022

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang berupa hutan yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum mengenai status kawasan hutan letak batas dan luas suatu wilayah tertentu yang sudah ditunjuk menjadi kawasan hutan tetap.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan nomor : SK.797/Menhut-VII/2009 tanggal 12 Juli 2009 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pemerintah telah menetapkan 13 (tiga belas) KPH. Salah satunya dari KPH tersebut adalah KPHP Unit VIII Muntai Palas yang terletak di Kabupaten Bangka Selatan. Sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor : SK.798/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012, luas wilayah KPH Muntai Palas adalah 78.999,43 Hektar. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan dan Kehutanan nomor : SK.8093/MENLHKPKTL/KUH/PLA.2/11/2018 Tanggal 23 November 2018 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan tahun 2017, luasan tersebut mengalami perubahan menjadi 78.171,26 Hektar, yang terdiri atas Hutan Lindung (HL) seluas 15.765,62 Hektar dan Hutan Produksi (HP) seluas 62.405,64 Hektar yang terletak di wilayah Kabupaten Bangka Selatan.

Kondisi Kawasan Hutan di Wilayah KPHP Unit VIII pada UPTD KPHP Muntai Palas cukup memprihatinkan yang ditandai dengan luasan lahan kritis yang terus bertambah. Berdasarkan Data Lahan Kritis Tahun 2019, luasan kawasan hutan KPHP Unit VIII pada UPTD KPHP Muntai Palas dengan kategori sangat kritis seluas ± 190,93 Ha, kategori kritis seluas 3.726,69 Ha, potensial kritis seluas 33.727,01 Ha dan kategori agak kritis seluas ± 33.492,78 Ha. Selain itu, masih banyaknya kawasan hutan yang belum dikelola dan/atau dimanfaatkan menyebabkan terjadinya *open access* sehingga dapat menimbulkan kerawanan dan/atau potensi gangguan kerusakan hutan. Potensi gangguan dalam kerusakan hutan yang sering terjadi seperti penambangan liar (illegal minning), pembukaan lahan melalui pembakaran kawasan hutan,



penebangan liar (illegal logging) dan sebagainya. Hal tersebut biasanya dilakukan oleh masyarakat yang belum mengetahui dan/atau memahami kawasan hutan diharapkan dapat diperbaiki dengan adanya keberadaan KPHP Unit VIII pada UPTD KPHP Muntai Palas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.98/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Tata Cara Penyusunan, Penilaian dan Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan KPHL dan KPHP, salah satu kegiatan penting dan strategis dalam rangka operasionalisasi penyelenggaraan pengelolaan hutan di KPHP Unit VIII pada UPTD KPHP Muntai Palas adalah penyusunan rencana pengelolaan hutan. Rencana pengelolaan hutan pada KPH yang memuat rencana I-3 kegiatan yang akan dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun yang disebut sebagai Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP).

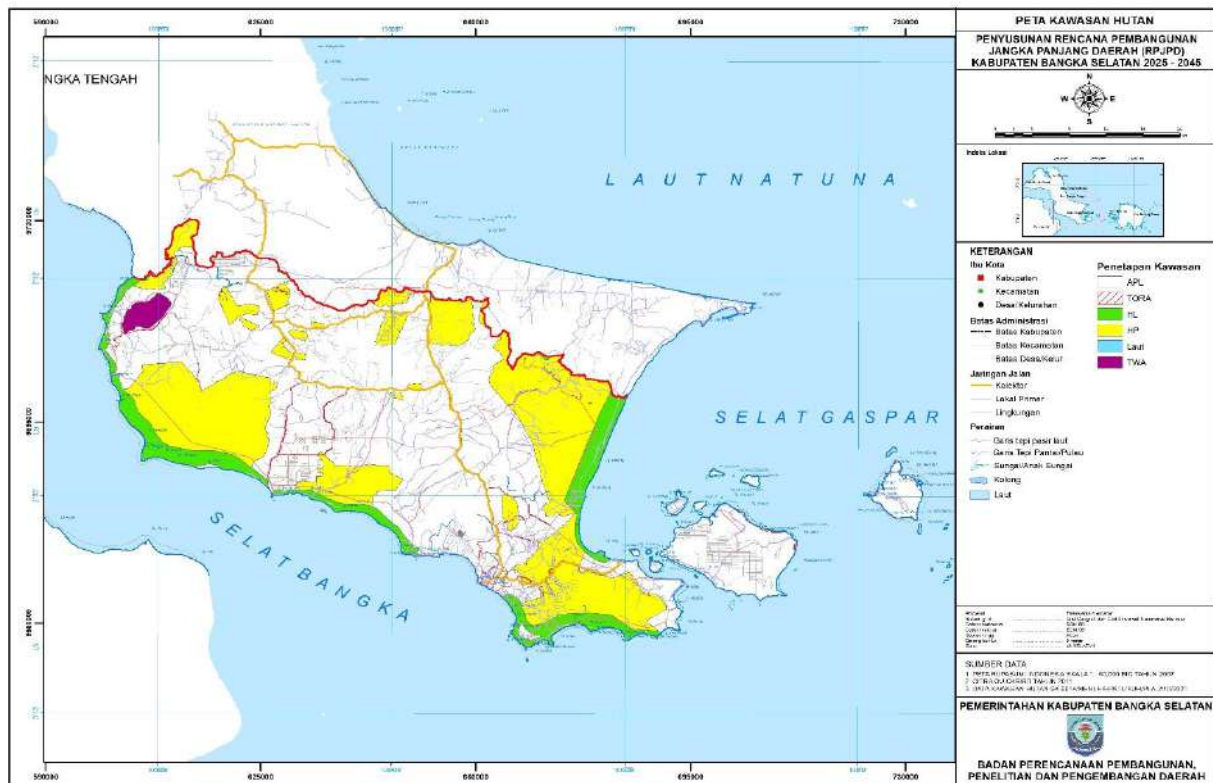
Hasil dari menumpang susunkan peta wilayah KPH sesuai peta lampiran Keputusan Menteri Kehutanan nomor : SK.764/Menhut-II/2012 tanggal 26 Desember 2012 dengan Peta Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai Keputusan Menteri Kehutanan nomor : 357/Kpts-II/2004 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta Keputusan Menteri Kehutanan nomor : SK.798/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan, luas KPHP Unit VIII pada UPTD KPHP Muntai Palas adalah 78.999,43 Hektar. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan dan Kehutanan nomor : SK.8093/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 Tanggal 23 November 2018 Tentang Peta Perkembangan Penguatan Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan tahun 2017, luasan tersebut mengalami perubahan menjadi 78.171,26 Hektar.

Berdasarkan fungsi kawasan hutan, Wilayah kelola KPHP Unit VIII pada UPTD KPHP Muntai Palas merupakan Hutan Lindung (HL) seluas \pm 15.765,62 Ha dan Hutan Produksi seluas \pm 62.405,64 Ha. Sesuai ketentuan yang berlaku, wilayah kerja KPH merupakan kawasan hutan produksi dan hutan lindung.

Dalam rencana pengelolaan hutan, sesuai ketentuan Peraturan Dirjen Planologi Kehutanan nomor P.5/VII-WP3H/2012, berdasarkan analisis biofisik, kawasan KPHP Unit VIII pada UPTD KPHP Muntai Palas dibagi ke dalam Blok pada fungsi Hutan Lindung (HL) terdiri dari Blok Inti (849,63 Ha) dan Blok Pemanfaatan (14.915,98 Ha). Sedangkan fungsi Hutan Produksi Tetap (HP) terdiri dari Blok Pemanfaatan HHK-HT (24.301,85 ha), Blok Pemanfaatan Kawasan/Jasling/HHBK (26.066,00 Ha), Blok Pemberdayaan Masyarakat (12.024,22 ha) dan Blok perlindungan (13,55 ha). Berdasarkan hasil analisis, wilayah kerja KPHP Unit VIII pada UPTD KPHP Muntai Palas seluas \pm 78.171,26 Ha setelah dikurangi Blok HL-Inti seluas \pm 849,63 Ha, Blok HL-Pemanfaatan (IUPHHK-HTI) seluas \pm 837,64 Ha, Blok HL-Pemanfaatan (HKm Pokdarwis Tanjung Labun) seluas \pm 65,49 Ha, Blok HP-Pemanfaatan HHK-HT (IUPHHK-HTI)

seluas ± 24.301,77 Ha serta Penggunaan Kawasan (IPPKH) seluas ± 314,03 Ha, Blok-HP Perlindungan seluas ± 13,55 Ha, dan Blok HP-Pemberdayaan Masyarakat (HKm Pokdarwis Bukit Gebang) seluas ± 20,61 Ha, maka luas Wilayah Tertentu pada KPMP Unit VIII pada UPTD KPMP Muntai Palas seluas ± 51.964,98 Ha, dengan rincian pembagian blok :

1. HL Blok Pemanfaatan seluas + 14.012,84 ha;
2. HP Blok Pemberdayaan Masyarakat seluas + 12.003,60 ha; dan
3. HP Blok Pemanfaatan Kawasan/Jasling/HHBK seluas + 25.948,45 ha.



Gambar 2.9

Peta Kawasan Hutan Kabupaten Bangka Selatan

Sumber : SK. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor :
SK.6614/MENLHK/PLA.2/10/2023

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Mengacu pada klasifikasi Arahan Peruntukan Ruang pada Rencana pola ruang Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023-2043 terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan Lindung adalah wilayah yang harus dilindungi dan memiliki fungsi perlindungan yang harus dipertahankan guna menghindari berbagai efek negatif yang mungkin muncul, sedangkan Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Berdasarkan karakter dan kondisi geografi, sebaran penggunaan lahan yang telah disampaikan pada sub bab sebelumnya dan potensi



sumber daya alam yang ada di Kabupaten Bangka Selatan, dapat diidentifikasi potensi-potensi yang dapat dikembangkan diantaranya adalah industri, kepariwisataan, perikanan, perkebunan, pertanian pangan dan kawasan strategis Kabupaten. Rencana pola ruang wilayah Kabupaten berfungsi sebagai berikut :

- 1) Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah Kabupaten;
- 2) Mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;
- 3) Sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk dua puluh tahun; dan
- 4) Sebagai dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang pada wilayah Kabupaten.

Dalam pengembangannya, rencana pola ruang wilayah Kabupaten Bangka Selatan yang merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah Kabupaten Bangka Selatan meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Adapun rencana pola ruang wilayah Kabupaten Bangka Selatan dirumuskan dengan kriteria :

- 1) Berdasarkan pada strategi penataan ruang wilayah Kabupaten;
- 2) Mempertimbangkan alokasi ruang wilayah Kabupaten dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi dan pelestarian lingkungan;
- 3) Mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah Kabupaten;
- 4) Mengacu rencana pola ruang wilayah nasional (RTRW nasional dan rencana rincinya), rencana pola ruang wilayah provinsi, serta memperhatikan rencana pola ruang wilayah Kabupaten/Kota yang berbatasan;
- 5) Dapat ditransformasikan ke dalam penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk 20 (dua puluh) tahun; dan
- 6) Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Memperhatikan rencana pola ruang wilayah Kabupaten/Kota yang berbatasan.
- 8) Memperhatikan kondisi eksisting dan arah pengembangan Kabupaten Bangka Selatan berdasarkan hasil analisis daya dukung Kawasan.

2.1.2.1. Rencana Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah kawasan yang dibatasi pemanfaatannya hanya untuk kegiatan-kegiatan tertentu dengan maksud untuk pelestarian lingkungan, melindungi kawasan dari kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan, mencegah terjadinya kerusakan ekosistem, memperkecil dampak kerusakan lingkungan, dan mencegah kemungkinan-kemungkinan lain yang bersifat negatif terhadap tatanan kehidupan manusia, flora dan fauna.



Kawasan lindung Kabupaten Bangka Selatan adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah Kabupaten, yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah Kabupaten. Kawasan lindung di Kabupaten Bangka Selatan antara lain badan air, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan konservasi, kawasan lindung geologi dan kawasan ekosistem mangrove. Informasi lebih rinci mengenai Kawasan lindung di Kabupaten Bangka Selatan di rencanakan seluas 36.900,95 Hektar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada sub bab dibawah ini.

Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Pada konsep pengembangan kawasan lindung di Kabupaten Bangka Selatan, terdapat 6 klasifikasi yaitu :

1. Badan Air;
2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya: Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Lindung Gambut;
3. Kawasan Perlindungan Setempat meliputi: Sempadan Pantai, Sempadan Sungai dan Kawasan Sekitar Danau atau Waduk atau kolong;
4. Kawasan konservasi: Suaka Pulau Kecil dan Taman Wisata Alam;
5. Kawasan Lindung Geologi: Kawasan Keunikan Bentang Alam;
6. Kawasan Ekosistem Mangrove.

2.1.2.2 Rencana Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya Kabupaten adalah kawasan di wilayah Kabupaten yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Dalam perencanaan kawasan budidaya di wilayah Kabupaten Bangka Selatan diterapkan azas harmonisasi yaitu menciptakan keseimbangan antara fungsi ekologis kawasan dengan manfaat fungsi ekonomis kawasan dalam arti melakukan eksplorasi kawasan dalam memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, dan budaya namun tetap memperhatikan daya dukung lahan sehingga ekosistem alami tetap terjaga.

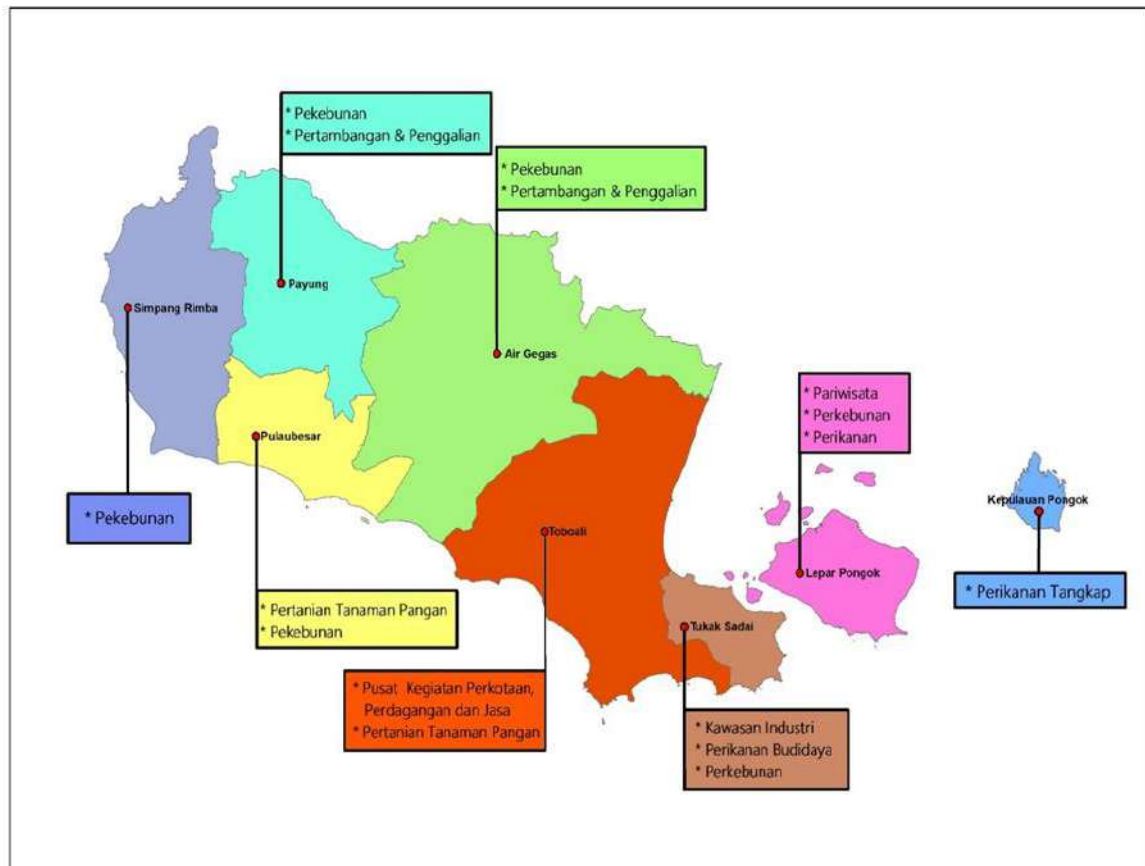
Kawasan budidaya di Kabupaten Bangka Selatan seluas 322.748,20 hektar yang terdiri atas kawasan hutan produksi, kawasan perkebunan rakyat, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan pertambangan dan energi, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, kawasan transportasi. Pada konsep pengembangan kawasan budidaya di Kabupaten Bangka Selatan, terdapat 9 klasifikasi yaitu :



1. Kawasan Hutan Produksi;
2. Kawasan Perkebunan Rakyat;
3. Kawasan Pertanian meliputi: Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Holtikultura;
4. Kawasan Perikanan;
5. Kawasan Pertambangan dan Energi;
6. Kawasan Peruntukan Industri;
7. Kawasan Peruntukan Pariwisata;
8. Kawasan Peruntukan Permukiman meliputi kawasan permukiman Pedesaan dan kawasan permukiman perkotaan;
9. Kawasan Transportasi;
10. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.



Gambar 2.10
Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Bangka Selatan
Sumber : Data Rencana Pola Ruang Dokumen RTRW Kab. Bangka Selatan 2023-2043



Gambar 2.11
Ilustrasi Arah Peruntukan Ruang dan Potensi Ekonomi per-Kecamatan di Kabupaten Bangka Selatan

Sumber : Data Pola Ruang Dokumen RTRW Kab. Bangka Selatan 2023-2043 dan Data BSDA

2.1.2.2.1 Kawasan Hutan Produksi

Hutan Produksi adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan. Berdasarkan Kepmen LHK nomor SK.6614/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 dan luasan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Tahun 2020, dimana kawasan hutan produksi yang terdapat di Kabupaten Bangka Selatan berupa kawasan hutan produksi tetap. Kawasan hutan produksi dikembangkan untuk meningkatkan fungsi lingkungan, sosial, dan ekonomi, meningkatkan pelestarian sumberdaya hutan, meningkatkan pembangunan lintas sektor dan subsektor, serta kegiatan ekonomi sekitarnya, dan meningkatkan pendapatan masyarakat di daerah setempat. Adapun rencana kawasan hutan produksi tetap berdasarkan SK Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup di Kabupaten Bangka Selatan luas Kawasan hutan produksi tetap direncanakan seluas 103.975,62 hektar.

Arahan rencana kawasan hutan produksi tetap meliputi :

- 1) Penetapan kawasan hutan produksi tetap;
- 2) Rehabilitasi dan revitalisasi kawasan hutan produksi tetap;



- 3) Pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan kawasan hutan produksi tetap;
- 4) Pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran pada kawasan hutan produksi tetap;
- 5) Melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan hutan produksi tetap; dan
- 6) Peningkatan partisipasi masyarakat melalui pengembangan kawasan hutan produksi tetap bersama masyarakat.

2.1.2.2.2 Kawasan Perkebunan Rakyat

Kawasan perkebunan rakyat adalah hutan rakyat yaitu hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 hektar, penutupan tajuk tanaman berkayu atau jenis lainnya lebih dari 50 persen atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 tanaman tiap hektar. Perkebunan rakyat diselenggarakan atau dikelola oleh rakyat/pekebun yang dikelompokkan dalam usaha kecil tanaman perkebunan rakyat dan usaha rumah tangga perkebunan rakyat.

Perkebunan rakyat memiliki peran yang penting dan strategis dalam pembangunan daerah, terutama dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, menyediakan lapangan kerja, menambah penerimaan daerah, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing, serta mengoptimalkan sumber daya lahan yang tersedia.

Fungsi perlindungan perkebunan rakyat, meliputi aspek:

- 1) Ekonomi, yaitu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan rakyat serta kontribusinya terhadap pendapatan nasional yang berdampak pada penguatan struktur ekonomi daerah;
- 2) Ekologi, yaitu mempertahankan dan meningkatkan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen dan penyangga kawasan lindung; dan
- 3) Sosial budaya, yaitu sebagai perekat dan pemersatu kehidupan bermasyarakat.

Peruntukan lahan untuk Kawasan perkebunan rakyat meliputi :

- 1) Diselenggarakan atau dikelola oleh rakyat/pekebun ;
- 2) Memiliki keragaman vegetasi tinggi;
- 3) Dengan sistem agroforestri, agrosilvopastural, silvofpastoral, dan sistem budidaya ramah lingkungan lainnya;
- 4) Tutupan hijau didominasi tanaman berkayu atau jenis lainnya;
- 5) Bukan merupakan perkebunan monokultur (satu jenis tanaman pada suatu kawasan); dan/atau
- 6) Mempertimbangkan perlindungan badan air yang kemungkinan mempengaruhi kegiatan usaha perkebunan rakyat.



Arahan rencana kawasan perkebunan rakyat meliputi:

- 1) Penetapan kawasan perkebunan rakyat;
- 2) Peningkatan produksi tanaman perkebunan;
- 3) Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran hasil perkebunan;
- 4) Perluasan pangsa pasar.

2.1.2.2.3 Kawasan Pertanian

Kawasan pertanian kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Kawasan pertanian dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan perusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial. Tujuan penetapan kawasan pertanian adalah untuk menghasilkan bahan pangan, palawija, tanaman keras, hasil peternakan, dan hasil perikanan, sebagai daerah resapan air hujan untuk kawasan sekitarnya, dan membantu penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

2.1.2.2.3.1 Perkebunan

Kawasan perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan, baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan. Kawasan perkebunan di Kabupaten Bangka Selatan direncanakan seluas 159.449,31 hektar yang tersebar di semua Kecamatan yang ada Kabupaten Bangka Selatan.

Rincian luasan kawasan perkebunan di Kabupaten Bangka Selatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.13
Luas Kawasan Perkebunan Kabupaten Bangka Selatan

No	Kecamatan	Luas (Ha)
1	Airgegas	63.021,53
2	Kepulauan Pongok	2.187,53
3	Lepar	16.553,06
4	Payung	33.210,64
5	Pulau Besar	2.255,06
6	Simpang Rimba	18.449,22
7	Toboali	22.661,43
8	Tukak Sadai	1.110,83
Jumlah		159.449,31

Sumber : Laporan Akhir Revisi RTRW Kabupaten Bangka Selatan, 2022



Arahan konsep rencana kawasan perkebunan meliputi :

- 1) Inventarisasi dan penetapan pertanian perkebunan;
- 2) Pengembangan pemasaran hasil perkebunan;
- 3) Pembinaan pelaku dan kelembagaan bidang perkebunan.

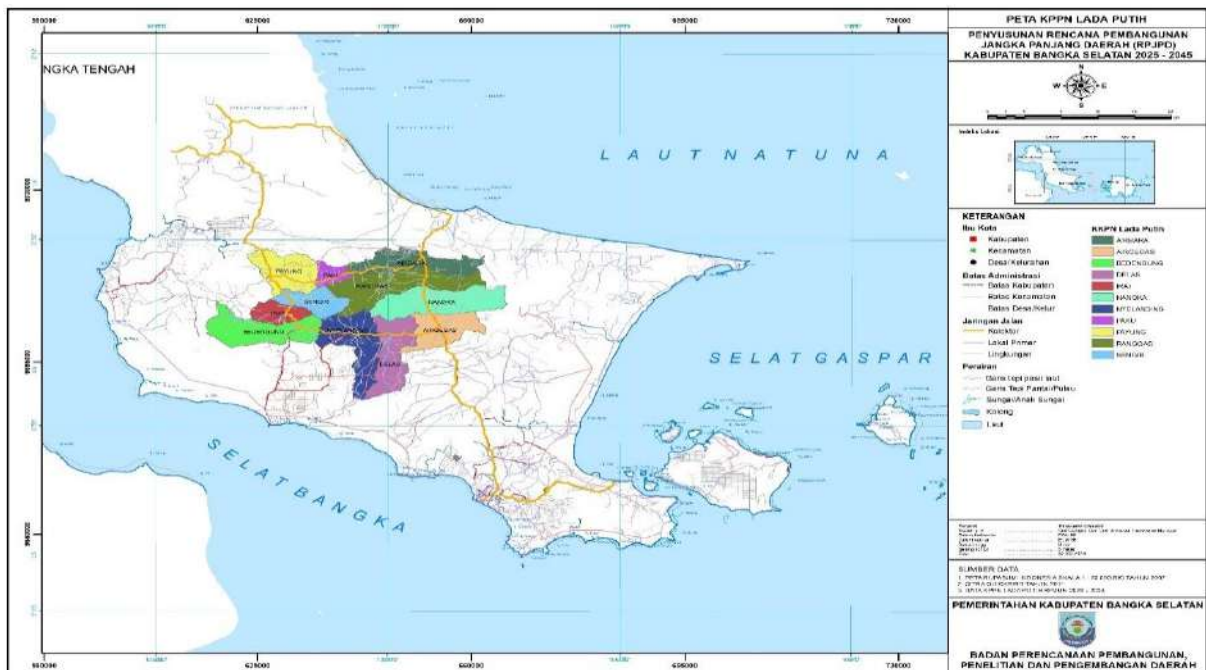
Kawasan perkebunan merupakan kawasan peruntukan bagi tanaman tahunan/perkebunan yang menghasilkan bahan pangan dan bahan baku industri. Kawasan yang sesuai untuk tanaman tahunan/perkebunan mempertimbangkan faktor-faktor :

- a. Kedalaman efektif lapisan tanah atas > 30 cm;
- b. Ketinggian < 2000 m;
- c. Kelerenghan 40 persen.

Kebijakan pengembangan kawasan perkebunan di Kabupaten Bangka Selatan adalah sebagai berikut :

- a. Pengembangan kawasan-kawasan potensial untuk tanaman perkebunan;
- b. Peremajaan dan perluasan areal tanaman perkebunan;
- c. Pengembangan wilayah-wilayah sentra produksi tanaman perkebunan sesuai dengan potensi/kesesuaian lahannya secara optimal.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014-2034, peruntukan perkebunan di Kabupaten Bangka Selatan diarahkan untuk pengembangan komoditi kelapa sawit, karet dan lada. Kawasan perkebunan di Kabupaten Bangka Selatan akan dikembangkan seluas kurang lebih 180.000 ha.



Gambar 2.12
Peta Deleniasi PPN Lada Putih Kabupaten Bangka Selatan
 Sumber : Data Deliniasi KPPN Lada Putih dalam RPJMN 2020-2024

Sedangkan untuk kawasan perkebunan lada putih, Kabupaten Bangka Selatan memiliki Kawasan Pedesaan Prioritas Nasional (KPPN) Lada Putih di 11 Desa di Kecamatan Airgegas dan Payung dengan deleniaasi kawasan seperti ditunjukkan pada gambar diatas.

2.1.2.2.3.2 Pertanian Tanaman Pangan

Kawasan Tanaman Pangan merupakan kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan. Kawasan tanaman pangan di Kabupaten Bangka Selatan ditetapkan dalam Lahan Baku Sawah seluas 13.399,15 hektar yang tersebar di semua Kecamatan yang ada Kabupaten Bangka Selatan terkecuali Kecamatan Tukak Sadai.

Luasan Kawasan tanaman pangan berdasarkan Laporan Akhir Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Selatan 2023-2043 adalah sebesar 14.012,08 Hektar dan rinciannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.14
Luas Kawasan Tanaman Pangan Kabupaten Bangka Selatan

No	Kecamatan	Luas (Ha)
Lahan KP2B		
1	Airgegas	2.047,78
2	Lepar	113,63
3	Payung	1.052,29
4	Pulau Besar	3.551,76
5	Simpang Rimba	961,22
6	Toboali	5.421,98
	Jumlah	13.148,66
Lahan non KP2B		
1	Kepulauan Pongok	159,79
2	Lepar	621,50
3	Payung	82,13
	Jumlah	863,42
	Jumlah Total	14.012,08

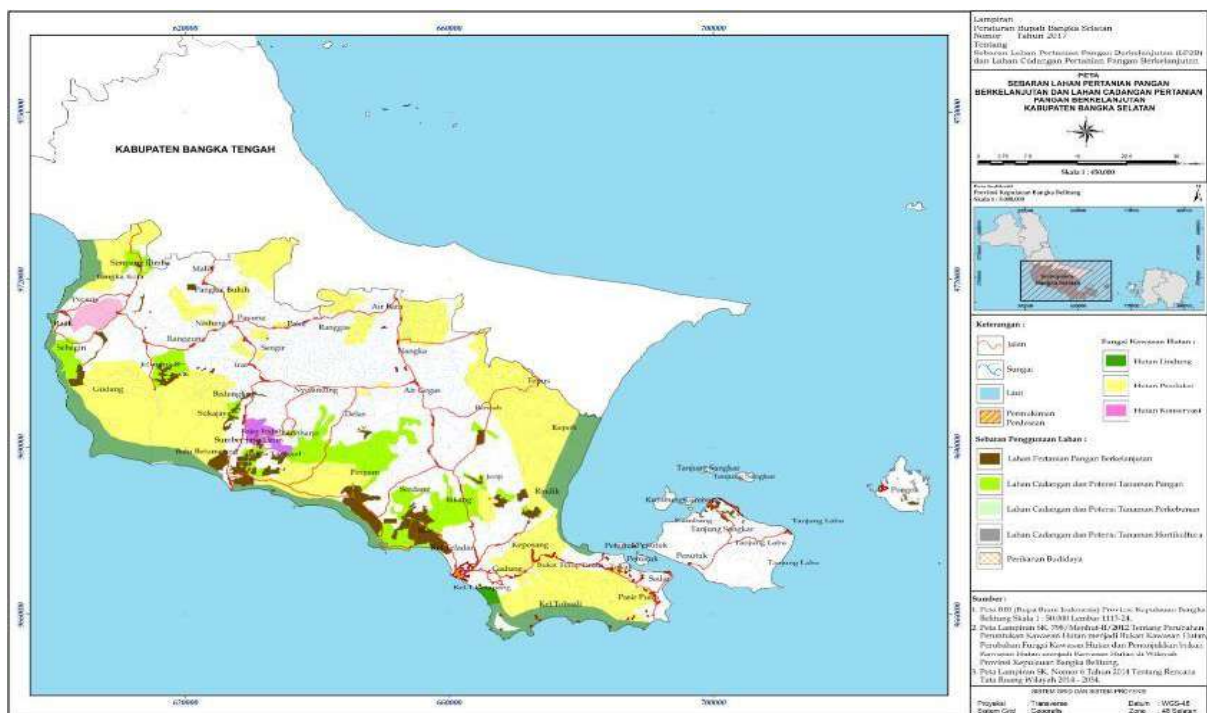
Sumber : Laporan Akhir Revisi RTRW Kabupaten Bangka Selatan, 2023

Arahan konsep rencana kawasan tanaman pangan meliputi:

- Inventarisasi dan penetapan pertanian tanaman pangan;
- Peningkatan produksi tanaman pangan;
- Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran hasil pertanian tanaman pangan;
- Pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertanian tanaman pangan;
- Pembinaan pelaku dan kelembagaan bidang pertanian tanaman pangan.



Berdasarkan Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014-2034 serta Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, bahwa kawasan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Bangka Selatan ditetapkan dengan luas 35.000 (tiga puluh lima ribu) Hektar, terdiri dari Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 15.869,34 (lima belas ribu delapan ratus enam puluh Sembilan koma tiga puluh empat) Hektar dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 19.130,66 (sembilan belas ribu seratus tiga puluh koma enam puluh enam) Hektar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut :



Gambar 2.13

Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Bangka Selatan

Sumber : Lampiran Perda Kabupaten Bangka Selatan nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Bangka Selatan.

Tabel 2.15

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Bangka Selatan (LP2B)

No	Kecamatan	Luas (Ha)
1	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	15.869,34
2	Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	19.130,66
Jumlah Total		35.000

Sumber : Perda Kabupaten Bangka Selatan nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Bangka Selatan



Berdasarkan tabel di atas bahwa pertanian pangan di Kabupaten Bangka Selatan masih sangat mungkin untuk ditingkatkan produktivitasnya karena dari keseluruhan luas baku lahan LP2B sampai tahun 2023 baru dimanfaatkan sebesar 46,28 persen. Peningkatan lahan tanam tentu harus diimbangi dengan sarana prasarana pendukung pertanian yang memadai.

Untuk melihat bagaimana ketersediaan dan kebutuhan beras di Kabupaten Bangka Selatan sampai dengan akhir tahun perencanaan dengan analisis menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan data sekunder dari data BPS Kabupaten Bangka Selatan. Data yang dibutuhkan dalam analisis ini adalah data jumlah penduduk, luas lahan sawah yang direncanakan, produktivitas (ton/ha) lahan sawah, nilai standar kebutuhan konsumsi beras oleh BPS, dan nilai konversi gabah ke beras. Untuk indikator ketersediaan beras, menggunakan persamaan yang terlampir pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/&/2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi. Persamaan yang digunakan ialah sebagai berikut :

Ketersediaan beras dapat dihitung melalui rumus di bawah ini.

$$R_{net} = L \times P \times (1 - (S + F + W)) \times C$$

R_{net} : Produksi Netto beras (ton/tahun)

L : Luas Lahan tanaman pangan

P : Produktivitas ton/ha (asumsi rata-rata 3,88 ton/ha)

S : Benih (0,9 persen)

F : Pakan (0,44 persen)

W : Tercecer (5,4 persen)

C : Konversi Padi ke beras (62,74 persen)

Asumsi yang digunakan adalah seluruh luas lahan tanaman pangan di Kabupaten Bangka Selatan digunakan seluruhnya untuk menanam padi dengan asumsi produktivitas tanaman padi sebesar 3,88 ton/ha. Berdasarkan hasil analisis, dimana ketersediaan pangan di Kabupaten Bangka Selatan 30.419,28 ton/ha.

Rumus perhitungan kebutuhan konsumsi beras yaitu :

$$KB = JP \text{ Kab} \times C \times M$$

KB : Kebutuhan beras

JP Kab : Jumlah penduduk yang direncanakan

C : Rata-rata konsumsi beras per orang per minggu (1,571 kg)

M : Jumlah Minggu dalam setahun (52,143 minggu)

Sedangkan hasil perhitungan analisis kebutuhan konsumsi beras di Kabupaten Bangka Selatan sampai dengan akhir tahun perencanaan sebesar 24.637,61 ton/tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.16
Kebutuhan Konsumsi Beras Kabupaten Bangka Selatan

No	Tahun	Kebutuhan Konsumsi Beras
1	2025	17.448,73
2	2030	19.020,53
3	2035	20.733,91
4	2040	22.601,63
5	2045	24.637,61

Sumber : Hasil Analisis, 2024

Apabila ketersediaan beras lebih besar dari kebutuhan konsumsi beras, maka wilayah tersebut dikatakan surplus beras, sedangkan apabila ketersediaan beras lebih kecil dari kebutuhan konsumsi beras, maka dikatakan defisit beras. Berdasarkan hasil analisis tersebut diatas diketahui bahwa, Kabupaten Bangka Selatan mengalami surplus beras sebesar 10.455,08 ton/ha. Oleh karenanya Kabupaten Bangka Selatan saat ini tidak perlu menambah luas lahan tanaman pangan dikarenakan luas lahan yang ada saat ini sudah sangat mencukupi bahkan terjadi surplus. Sehingga disarankan untuk meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana tanaman pangan serta produktifitas tanam tanaman pangan.

2.1.2.2.3.3 Hortikultura

Kawasan hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari. Kawasan hortikultura di Kabupaten Bangka Selatan direncanakan seluas 8.462,35 hektar yang tersebar di semua Kecamatan yang ada Kabupaten Bangka Selatan terkecuali Kecamatan Tukak Sadai.

Arahan rencana kawasan hortikultura meliputi:

- 1) Inventarisasi dan penetapan pertanian hortikultura
- 2) Pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertanian hortikultura
- 3) Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran hasil pertanian hortikultura
- 4) Pembinaan pelaku dan kelembagaan bidang pertanian hortikultura di Kabupaten Bangka Selatan

Rincian luasan kawasan hortikultura di Kabupaten Bangka Selatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.17
Luas Rencana Kawasan Hortikultura

No	Kecamatan	Luas (Ha)
1	Airgegas	987,02
2	Lepar	498,69
3	Payung	528,15
4	Pulau Besar	2666,17
5	Simpang Rimba	918,90
6	Toboali	2863,42
7	Airgegas	987,02
Jumlah		8.462,35

Sumber : Laporan Akhir Revisi RTRW Kabupaten Bangka Selatan, 2023

2.1.2.2.4. Kawasan Perikanan

Kawasan perikanan adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Termasuk di dalamnya kawasan pengelolaan ekosistem pesisir. Kawasan perikanan di Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari kawasan perikanan budi daya yang direncanakan seluas 1.282,70 hektar yang tersebar di 4 (empat) Kecamatan yang ada Kabupaten Bangka Selatan.

Rincian luas kawasan perikanan di Kabupaten Bangka Selatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.18
Luas Kawasan Perikanan Budidaya Kabupaten Bangka Selatan

No	Kecamatan	Luas (Ha)
1	Lepar	262,72
2	Simpang Rimba	65,67
3	Toboali	120,93
4	Tukak Sadai	833,39
Jumlah		1.282,70

Sumber : Laporan Akhir Revisi RTRW Kabupaten Bangka Selatan, 2023

Arahan konsep rencana kawasan perikanan meliputi :

- Inventarisasi dan penetapan kawasan peruntukan perikanan
- Pengembangan budidaya perikanan air tawar, air payau dan perikanan laut
- Pengembangan dan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana budi daya perikanan
- Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana Pelabuhan perikanan
- Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produk perikanan

Pengembangan perikanan budidaya di kawasan perairan laut Kabupaten Bangka Selatan sesuai dengan kondisi eksisting dan potensinya adalah berupa pengembangan budidaya laut



berupa keramba. Berdasarkan kondisi eksisting pemanfaatan ruang wilayah dari masing-masing usaha budidaya, maka upaya yang dilakukan ditujukan untuk mengoptimalkan potensi ruang wilayah yang ada sehingga kegiatan perikanan budidaya yang dilakukan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan ekonomi masyarakat. Pengembangan kawasan budidaya perikanan akan dikembangkan di perairan laut Kecamatan Lepar dan Kecamatan Toboali dengan luas 17.374,44 ha. Komoditas yang dikembangkan dalam budidaya ikan umumnya didominasi oleh ikan karang (coral reef fish) seperti ikan kerapu macan, ikan kerapu bebek, ikan kerapu lumpur, ikan kakap putih, ikan napoleon, ikan sunu (lodi), ikan baronang dan sebagainya. Masih banyak jenis ikan karang yang bisa dibudidayakan, namun dibatasi oleh kendala ketersediaan benih. Golongan ikan pelagi seperti ikan ekor kuning, tongkol, tenggiri dan tuna masih belum dibudidayakan, juga ikan demersal seperti ikan sebelah. Ikan tersebut diproduksi masih melalui kegiatan penangkapan.

2.1.2.2.5 Kawasan Pertambangan dan Energi

Kawasan pertambangan dan energi adalah kawasan pada permukaan tanah dan/atau dibawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi dan/atau kegiatan operasi produksi pertambangan mineral dan batubara serta kawasan panas bumi dan kawasan pembangkitan tenaga listrik. Kawasan pertambangan dan energi di Kabupaten Bangka Selatan merupakan kawasan pertambangan mineral logam. Dimana berdasarkan Keputusan Menteri ESDM nomor 116.K/MB.01/MEM.B/2022 dan Keputusan Menteri ESDM nomor 46.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimana luasan total yang direncanakan sebesar 7.466,03 hektar.

Adapun arahan rencana kawasan pertambangan mineral logam meliputi:

- a) Penetapan kawasan pertambangan;
- b) Rehabilitasi lahan pasca tambang;
- c) Penataan dan penelitian potensi zona pertambangan; dan
- d) Pengawasan dan pengendalian terhadap penambangan liar.

Rincian luasan kawasan pertambangan mineral logam di Kabupaten Bangka Selatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.19
Luas Rencana Kawasan Pertambangan Mineral Logam

No	Kecamatan	Luas (Ha)
1	Airgegas	4.395,96
2	Lepar	25,13
3	Payung	1.599,97
4	Pulau Besar	4,55
5	Simpang Rimba	52,68



No	Kecamatan	Luas (Ha)
6	Toboali	1.378,88
7	Tukak Sadai	8,86
Jumlah		7.466,03

Sumber : Laporan Akhir Revisi RTRW Kabupaten Bangka Selatan, 2023

2.1.2.2.6. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kawasan Peruntukkan Industri merupakan zona pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang, yang diatur melalui PP nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri.

Tujuan penetapan Kawasan peruntukan industri adalah :

- 1) Mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan industri;
- 2) Meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan; dan
- 3) Meningkatkan daya saing investasi dan daya saing industri serta memberikan kepastian lokasi dalam menyediakan fasilitas bersama.

Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Bangka direncanakan seluas 1.899,82 hektar merupakan Kawasan Industri Sadai (KIS) yang terdapat di Kecamatan Tukak Sadai.

Arahan rencana kawasan peruntukan industri meliputi :

- a) Penetapan kawasan peruntukan industri;
- b) Peningkatan dan pengembangan infrastruktur pendukung kawasan industri;
- c) Pengembangan kawasan budidaya industri kecil dan menengah;
- d) Mengembangkan sistem pemasaran terpadu dengan pola kerjasama dengan berbagai perusahaan baik dalam skala lokal, regional maupun internasional;
- e) Pembinaan dan pelatihan pelaku industri kecil dan menengah;
- f) Pengelolaan daerah resapan air disekitar wilayah industri, serta menanam jenis vegetasi dengan fungsi penyerapan carbon yang tinggi;
- g) Peningkatan vegetasi pada zona buffer kawasan industri sebagai penyerap karbon;
- h) Optimalisasi lahan pekarangan atau urban farming untuk meningkatkan produksi bahan pangan;
- i) Pemasangan alat pemantau kualitas udara disekitar wilayah industri yang menghasilkan gas emisi buang;
- j) Memberikan regulasi yang tegas terkait pembuatan sumur resapan di wilayah peruntukan industri dengan jumlah yang direkomendasikan 1 sumur resapan setiap 100 meter persegi lusan kawasan peruntukan industri;



- k) Menetapkan kebijakan tata ruang dan pengelolaan lahan yang mendukung pelestarian tanah; dan
- l) Penyediaan sebagian lahan di kawasan peruntukan industri untuk dijadikan kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

2.1.2.2.7. Kawasan Pariwisata

Kawasan pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya. Kriteria kawasan pariwisata meliputi kawasan wisata yang dikembangkan di tempat berlangsungnya atraksi budaya, prosesi upacara adat, dan sekitarnya yang ditujukan untuk mengakomodasi wisata dengan minat khusus (*tengeran/landmark*, cagar budaya) kawasan wisata di tempat objek alam (gunung, sawah, pantai, laut, teluk, lembah) dan kawasan di sekitarnya yang ditujukan untuk mengakomodasi wisata minat alam yang memiliki kecenderungan mendapatkan sesuatu dan pengalaman baru yang bermanfaat dari objek wisata alam yang dikunjungi. Adapaun potensi Objek Destinasi Tujuan Wisata (ODTW) di Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari wisata alam, wisata bahari, wisata budaya, wisata tirta, wisata sejarah dan wisata agro yang tersebar di beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka Selatan.

Kawasan pariwisata di Kabupaten Bangka direncanakan seluas 919,70 hektar yang tersebar di 7 (tujuh) Kecamatan yang ada Kabupaten Bangka Selatan.

Arahan konsep rencana kawasan pariwisata meliputi :

- 1) Penetapan kawasan pariwisata;
- 2) Penataan dan pemantapan kawasan wisata;
- 3) Pengembangan prasarana dan sarana pendukung pariwisata;
- 4) Mengembangkan dan memperkenalkan sistem promosi pariwisata daerah.

Harapan Kabupaten Bangka Selatan adalah berkembangnya obyek-obyek pariwisata di Kabupaten Bangka Selatan dan meningkatnya pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya serta semakin berkembangnya penerapan nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan seni dan budaya masyarakat Kabupaten Bangka Selatan yang terwujud dalam setiap aspek kebijakan pembangunan. Jenis potensi pariwisata yang dimiliki oleh Kabupaten Bangka Selatan terbagi dalam beberapa spesifikasi wisata, baik alam maupun buatan dan pantai yang tersebar di 8 (Delapan) Kecamatan, yaitu :

- 1) Wisata Alam;
- 2) Wisata Bahari;
- 3) Wisata Budaya;
- 4) Wisata Tirta;
- 5) Wisata Sejarah;



6) Wisata Agro.

Tabel 2.20
Potensi Destinasi Tujuan Wisata (DTW) dan Sumber Daya Wisata (SDW)
Kabupaten Bangka Selatan

NO	NAMA	JENIS	LOKASI
A. KECAMATAN SIMPANG RIMBA			
1	Pantai Batu Bedaun	DTW Alam	Jl. Laut Cina, Rajik Titik Koordinat : -2.5879766017495403, 105.89372623666888
2	Pantai Sebagian	DTW Alam	Jl. Desa Sebagian, Sebagian Titik Koordinat : -2.6066474535223665, 105.93283816725891
3	Perkebunan Lada	SDW Alam	Desa Sebagian
4	Pantai Tanjung Karak	DTW Alam	Desa Simpang Rimba
5	Pantai Pekapur	DTW Alam	Desa Permis
6	Air Panas Permis	DTW Alam	Desa Permis
7	Gunung Permisan	DTW Alam	TWA Gunung Permisan, Sebagian
8	Bukit Nenek	DTW Alam	Desa Permis
9	Pura Bali	DTW Budaya	Dusun C III, Desa Simpang Rimba
10	Makam Karang Panjang	DTW Budaya	Desa Bangka Kota
11	Kompleks Pemakaman Jatisari	DTW Budaya	Desa Bangka Kota Titik Koordinat : -2.5179368296151035, 106.04477518507905
12	Makam Ratu Bagus	DTW Budaya	Desa Gudang
13	Tradisi Ketupat Gong	DTW Budaya	Desa Gudang
14	Rambut Batin Tikal	DTW Budaya	Desa Gudang
15	Ritual Rebo Kasan	DTW Budaya	(semua Desa)
16	Perkebunan Durian	SDW Alam	Desa Gudang
17	Sedekah Durian	SDW Budaya	Desa Gudang
18	Sirkuit <i>motorcross</i>	SDW Buatan	Desa Gudang
B. KECAMATAN PAYUNG			
1	Hutan Pelawan Nadung	DTW Alam	Desa Nadung
2	Budidaya Madu Pelawan	SDW Budaya	Desa Nadung
3	Pembuatan Teh Pelawan	SDW Budaya	Desa Nadung
4	Perkebunan Lada	SDW Alam	Desa Nadung
5	Kuliner Bongkol	SDW Budaya	Desa Pangkal Buluh
6	Ritual Sikok Silawang	DTW Budaya	Desa Irat
7	Tradisi Nganggung	DTW Budaya	Desa Irat Titik Koordinat : -2.671525, 106.169485
8	Makam Krio Panting	DTW Budaya	Desa Payung Titik Koordinat : -2.611356, 106.134571
9	Kerajinan Sokok Resam	SDW Budaya	Desa Sengir
10	Kuliner Jiba Bubur	SDW Budaya	-
C. KECAMATAN PULAU BESAR			
1	Pantai Batu Betumpang	DTW Alam	Desa Batu Betumpang Titik Koordinat : 627144;9682562



NO	NAMA	JENIS	LOKASI
2	Mercusuar Willem III	DTW Budaya	Desa Batu Betumpang Titik Koordinat : -2.877004, 106.143894
3	<i>Food Estate</i>	SDW Alam	Desa Batu Betumpang
4	Makam Ahmad H	SDW Budaya	Desa Batu Betumpang
5	Perkebunan Salak	SDW Alam	Desa Panca Tunggal Titik Koordinat : 2,82579° S, 106,19628° E
6	Peternakan Sapi	SDW Alam	Desa Panca Tunggal
7	Kuliner Dodol Talas Beneng	SDW Budaya	Desa Panca Tunggal Titik Koordinat : 2,82696° S, 106,18581° E
8	Ritual Ngarak Pusaka	SDW Budaya	-
9	Ngarak Ketupat Lepas	SDW Budaya	-
10	Situs Kampung Paris	SDW Budaya	-
11	Umbul Air Bulan	SDW Alam	Desa Fajar Indah Titik Koordinat : 2,79612° S, 106,19505° E
12	Bendungan Bidadari	DTW Alam	Desa Fajar Indah Titik Koordinat : 2,78550° S, 106,18654° E
13	Agrowisata pertanian sawah	SDW Alam	
D. KECAMATAN AIRGEGAS			
1	Bukit Gebang	DTW Alam	Desa Nangka
2	Perkebunan Durian	SDW Alam	Desa Nangka
3	Kuliner Bolu Kuci	DTW Budaya	Desa Nangka
4	Bukit Lumut	DTW Alam	-
5	Hutan Pelawan	DTW Alam	-
6	Danau Aek Tawas	DTW Alam	Airbara Titik Koordinat : -2.55668807252495, 106.3626638175619
7	Perkebunan Lada	SDW Alam	-
8	Air Panas Nyelanding	DTW Alam	Desa Nyelanding Titik Koordinat : 641514;9701439
9	Ritual Hikok Helawang	DTW Budaya	Desa Nyelanding
10	Tradisi Nganggung	DTW Budaya	Desa Nyelanding
11	Desa Wisata Nyelanding	DTW Budaya	Desa Nyelanding
12	Sirkuit Motorcross	DTW Buatan	Desa Nyelanding
13	Tradisi Telok Serujo	DTW Budaya	-
14	Anyaman Rotan	SDW Budaya	Desa Delas
15	Air Terjun Gunung Pading	DTW Alam	Dusun Bukit Bebulu, Desa Tepus
16	Kerajinan Sokok Resam	SDW Budaya	Desa Tepus
17	Peninggalan Sejarah Pergam	DTW Budaya	Desa Pergam
18	Baju Kalima	DTW Budaya	-
19	Gong Macan	DTW Budaya	Desa Pergam
20	Batu Balai	DTW Alam	Desa Ranggung
E. KECAMATAN TOBOALI			
1	Pantai Batu Perahu	DTW Alam	Tj. Ketapang, Kec. Toboali
2	Pantai Batu Kapur	DTW Alam	Jl. Alising Kampung Baru, Tj. Ketapang Titik Koordinat : 660423;9667312
3	Pantai Batu Kodok	DTW Alam	Tj. Ketapang



NO	NAMA	JENIS	LOKASI
4	Pantai Nek Aji	DTW Alam	Jl. Jend. Sudirman, Tj. Ketapang
5	Pantai Kelisut	DTW Alam	Tj. Ketapang
6	Batu Belimbing	DTW Alam	Tj. Ketapang, Toboali,
7	Benteng Toboali	DTW Budaya	Tj. Ketapang
8	Klenteng Dewi Sin Mu	DTW Budaya	Jl. R.A. Kartini, Tj. Ketapang
9	Wisma Samudera	SDW Budaya	Jl. Jend. Sudirman, Tj. Ketapang
10	Desa Wisata Tanjung Ketapang	DTW Budaya	Tj Ketapang
11	Mercusuar Pulau Dapur	DTW Budaya	Tj. Ketapang
12	Kuliner Terasi Belacan	DTW Budaya	Kelurahan Toboali
13	Kuliner Kue Papan	DTW Budaya	Kelurahan Toboali
14	Pantai Kubu	DTW Alam	Kelurahan Toboali
15	Pantai Gunung Namak	DTW Alam	Kelurahan Toboali
16	Pantai Tanjung Kelayang	DTW Alam	Kelurahan Toboali
17	Makam Keramat Bahar	DTW Budaya	Jl. Bahar, Toboali, Kec. Toboali
18	Pantai Tanjung Timur	DTW Alam	-
19	Pantai Tanjung Labun	DTW Alam	Jl. Raya Limus, Serdang, Kec. Toboali
20	Perkebunan Jeruk	SDW Alam	Desa Serdang
21	Upacara Adat Kawin Massal	DTW Budaya	Desa Serdang
22	Pantai Batu Ampar	DTW Alam	Desa Gusung
23	Pantai Tanjung Zibur	DTW Alam	Desa Gusung, Rias
24	Pantai Tanjung Bugis	DTW Alam	-
25	Bukit Gadung	DTW Alam	Desa Gadung
26	Gedung Nasional Suhaili Toho	SDW Budaya	Desa Gadung
27	Sungai Jeriji (<i>Little Amazon</i>)	SDW Alam	Desa Jeriji
28	Perkebunan Lada	SDW Alam	Desa Jeriji
29	Anyaman Daun Purun	SDW Budaya	Desa Jeriji
30	Perkebunan Nanas	SDW Alam	Desa Bikang
31	Klenteng Dewa Kuantu	DTW Budaya	Teladan, Kec. Toboali
32	Bukit Muntai	DTW Alam	Desa Keposang
33	Ritual Rebut	DTW Budaya	-
34	Atraksi Barongsai	DTW Budaya	-
F. KECAMATAN TUKAK SADAI			
1	Pantai Tanjung Kerasak	DTW Alam	Desa Pasir Putih
2	Desa Wisata Pasir Putih	DTW Budaya	Desa Pasir Putih
3	Pantai Tanjung Kemirai	DTW Alam	Jl. Pariwisata Pantai Tanjung Kemirai, Pasir Putih
4	Pantai Puding Besar	DTW Alam	Jl. Raya Sadai, Bukit Terap
5	Pantai Tanjung Pao	DTW Alam	Jalan Dusun Burak, Bukit Terap
6	Hutan Mangrove	DTW Alam	Desa Tukak
7	Ritual Lawa Suji	DTW Budaya	Desa Sadai
G. KECAMATAN LEPAR			
1	Pulau Kelapan	DTW Alam	Desa Kumbang Titik Koordinat : 2°50'59.000" LS 106°50'31.000" BT
2	Pantai Tanjung Tiris	DTW Alam	Desa Kumbang

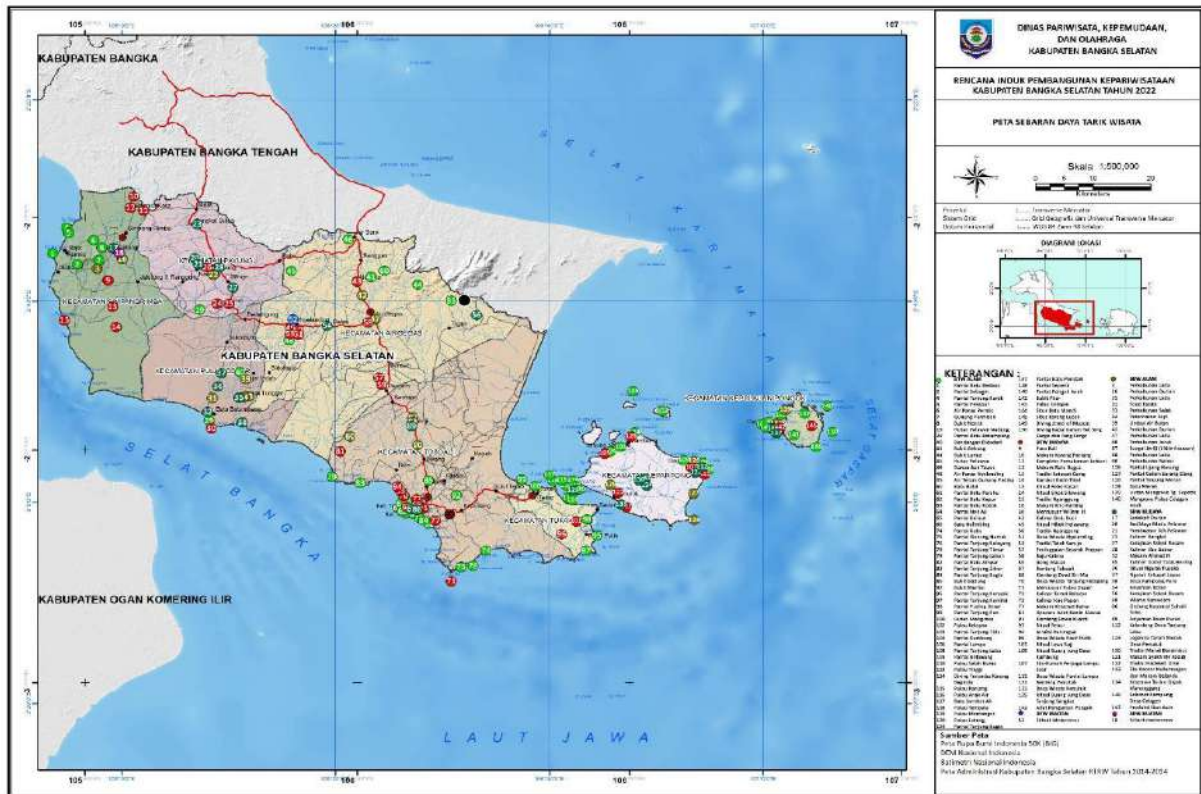


NO	NAMA	JENIS	LOKASI
3	Pantai Kumbang	DTW Alam	Desa Kumbang
4	Ritual Buang Jung Desa Kumbang	DTW Budaya	Desa Kumbang
5	Pantai Lampu	DTW Alam	Desa Tanjung Labu Titik Koordinat : -2.9489442209938237, 106.90973651363498
6	Eks-Rumah Penjaga Lampu Suar	DTW Budaya	Desa Tanjung Labu
7	Pantai Tanjung Labu	DTW Alam	Desa Tanjung Labu
8	Pantai Belawang	DTW Alam	Desa Tanjung Labu Titik Koordinat : -2.9289891812825646, 106.89001057305545
9	Pulau Salah Nama	DTW Alam	-
10	Desa Wisata Pantai Lampu	DTW Budaya	Desa Tanjung Labu Titik Koordinat : 2°56'56.7"S 106°54'33.0"E
11	Kelenteng Desa Tanjung Labu	SDW Budaya	Desa Tanjung Labu
12	Pulau Tinggi	DTW Alam	Desa Penutuk Titik Koordinat :-2.9925689143124705, 106.69839896768015
13	<i>Diving</i> Terumbu Karang Baginda	DTW Alam	Pulau Tinggi, Desa Penutuk
14	Pulau Panjang	DTW Alam	Desa Penutuk Titik Koordinat : -2.965667867916133, 106.69116653245628
15	Pulau Anak Air	DTW Alam	Desa Penutuk
16	Batu Sumber Air	DTW Alam	Desa Penutuk
17	Pulau Tempala	DTW Alam	Desa Penutuk
18	Pulau Mentangor	DTW Alam	Desa Penutuk Titik Koordinat : 2°58'24.000" LS 106°41'46.000" BT
19	Pulau Lutung	DTW Alam	Desa Penutuk Titik Koordinat : 2°58'0.000" LS 106°42'16.000" BT
20	Benteng Penutuk	DTW Budaya	Desa Penutuk Titik Koordinat : -3.0047416738562176, 106.78230683461292
21	Desa Wisata Penutuk	DTW Budaya	Desa Penutuk Titik Koordinat : 2°59'34.5"S 106°46'34.5"E
22	Legenda Tanah Merah Desa Penutuk	SDW Budaya	Desa Penutuk
23	Pantai Tanjung Bugis	DTW Alam	Desa Tanjung Sangkar
24	Ritual Buang Jung Desa Tanjung Sangkar	DTW Budaya	Desa Tanjung Sangkar
25	Pantai Ujung Gusung	SDW Alam	Desa Kumbang
26	Pantai Gelam Sarang Elang	SDW Alam	-
27	Pantai Tanjung Merun	SDW Alam	-
28	Batu Merah	SDW Alam	-



NO	NAMA	JENIS	LOKASI
29	Tradisi Mandi Bersimbur	SDW Budaya	-
30	Makam Syekh KH Rosidi	SDW Budaya	-
31	Tradisi Hadekeh Ume	SDW Budaya	-
32	Eks-Kantor Kademangan dan Makam Belanda	SDW Budaya	-
33	Kesenian Tarian Gajah Manunggang	SDW Budaya	-
34	Pulau Seniur	DTW Alam	-
H. KECAMATAN KEPULAUAN PONGOK			
1	Pantai Batu Tambun	DTW Alam	Pulau Pongok, Desa Pongok Titik Koordinat : -2.8533902962105615, 107.06683629245134
2	Pantai Batu Pendam	DTW Alam	Desa Pongok
3	Pantai Sepetik	DTW Alam	Desa Pongok
4	Hutan Mangrove Tg. Sepetik	SDW Alam	Desa Pongok
5	Pantai Pongok Anak	DTW Alam	Desa Pongok
6	Bukit Pilar	DTW Alam	Desa Pongok
7	Adat Penganten Pongok	DTW Budaya	Kecamatan Kepulauan Pongok
8	Pulau Celagen	DTW Alam	Desa Celagen Titik Koordinat : -2.8728601445011464, 107.01467728317323
9	Situs Batu Mandi	DTW Alam	Desa Celagen Titik Koordinat : 25°2'304 LU 107°00'276" BT
10	Situs Karang Lucan	DTW Alam	Desa Celagen Titik Koordinat : 25°2'304 LU 107°00'276" BT
11	Selamat Kampung Desa Celagen	SDW Budaya	Desa Celagen
12	Produksi Ikan Asin	SDW Budaya	Desa Celagen
13	Mangrove Pulau Celagen Anak	SDW Alam	Pulau Celagen Anak, Desa Celagen
14	<i>Diving</i> Jewel of Muscat	DTW Alam	Situs Batu Mandi; Situs Karang Lucan Desa Celagen
15	<i>Diving</i> Kapal Karam Tek Sing Cargo dan Tang Cargo	DTW Alam	Selat Gaspar

Sumber : Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022



Gambar 2.14
Sebaran DTW dan SDW Kabupaten Kabupaten Bangka Selatan

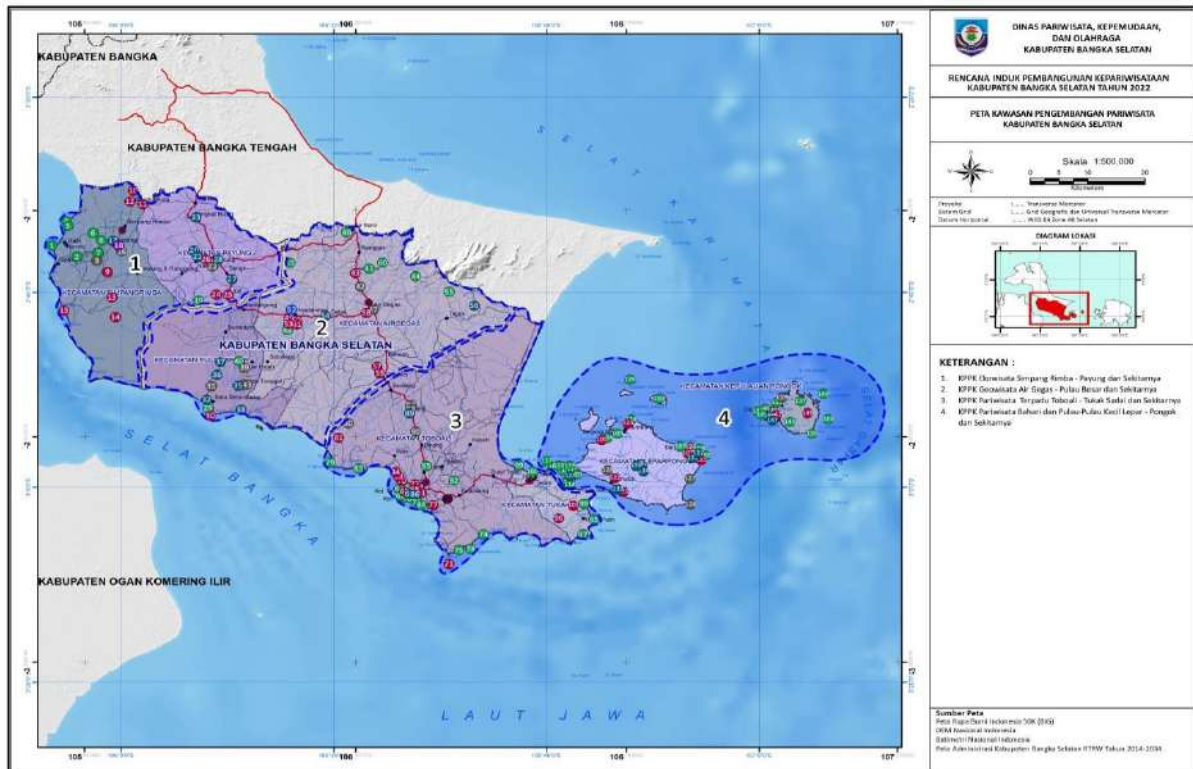
Sumber : Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022

Berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022, Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK) Bangka Selatan ditentukan dengan mengacu pada kriteria berikut ini :

- a. merupakan lokasi keberadaan potensi pariwisata yang merupakan keunggulan dan kekhasan Kabupaten Bangka Selatan, yaitu daya tarik wisata berbasis sejarah, bahari, budaya, dan keragaman geologi;
- b. beberapa daya tarik wisata sudah menjadi tujuan kunjungan wisatawan nusantara dari luar Kabupaten Bangka Selatan;
- c. pengembangannya akan dapat menggerakkan perekonomian lokal dan menyebarkan perkembangan pariwisata ke kawasan sekitarnya.

Berdasarkan kriteria tersebut, KPPK Bangka Selatan terdiri dari empat kawasan, yaitu:

- a. KPPK Ekowisata Simpang Rimba-Payung dan sekitarnya;
- b. KPPK Geowisata Airgegas-Pulau Besar dan sekitarnya;
- c. KPPK Rekreasi Edukatif Toboali-Tukak Sadai dan sekitarnya; dan
- d. KPPK Pariwisata Sejarah Bahari Lepar-Pongok dan sekitarnya.



Gambar 2.15

Peta Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK) Bangka Selatan

Sumber : Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022

2.1.2.2.9. Kawasan Permukiman

Kawasan Permukiman adalah kawasan yang merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan Perkotaan maupun Pedesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Arahan rencana kawasan permukiman meliputi :

- 1) Penetapan Kawasan Permukiman Perkotaan dan Pedesaan
- 2) Penataan kawasan perumahan
- 3) Pengendalian kawasan perumahan di kawasan lindung
- 4) Penataan fasilitas umum dan fasilitas sosial
- 5) Pengembangan tempat evakuasi bencana
- 6) Pemasangan rambu-rambu (signage) jalur evakuasi bencana dan papan informasi bencana
- 7) Pengembangan kawasan infrastruktur perkotaan
- 8) Pengembangan kawasan ruang terbuka non hijau
- 9) Pengembangan sarana dan prasarana Kawasan permukiman



Informasi lebih rinci mengenai kawasan permukiman dapat dilihat pada sub bab dibawah ini yang terdiri atas :

(1) Permukiman Perkotaan

Kawasan permukiman perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan perkotaan.

Kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Bangka Selatan direncanakan seluas 15.010,85 hektar yang tersebar di 6 (enam) Kecamatan yang ada Kabupaten Bangka Selatan. Rincian luasan kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Bangka Selatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.21
Luas Kawasan Permukiman Perkotaan Kabupaten Bangka Selatan

No	Kecamatan	Luas (Ha)
1	Airgegas	1.505,31
2	Payung	1.473,73
3	Pulau Besar	2.481,07
4	Simpang Rimba	2.129,46
5	Toboali	5.879,98
6	Tukak Sadai	1.541,31
Jumlah		15.010,85

Sumber : Laporan Akhir Revisi RTRW Kabupaten Bangka Selatan, 2023

(2) Permukiman Pedesaan

Kawasan permukiman pedesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan pedesaan.

Kawasan permukiman pedesaan di Kabupaten Bangka Selatan direncanakan seluas 8.626,08 hektar yang tersebar di setiap kecamatan yang ada Kabupaten Bangka Selatan. Rincian luasan kawasan permukiman pedesaan di Kabupaten Bangka Selatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.22
Luas Kawasan Permukiman Pedesaan Kabupaten Bangka Selatan

No	Kecamatan	Luas (Ha)
1	Airgegas	1.942,69
2	Kepulauan Pongok	330,49
3	Lepar	728,61
4	Payung	1.447,63
5	Pulau Besar	757,95



No	Kecamatan	Luas (Ha)
6	Simpang Rimba	866,31
7	Toboali	2.358,96
8	Tukak Sadai	193,43
Jumlah		8.626,08

Sumber : Laporan Akhir RTRW Kabupaten Bangka Selatan, 2023

2.1.2.2.10. Kawasan Transportasi

Kawasan transportasi adalah kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut. Kawasan transportasi yang ada di Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari dua jenis yaitu Pelabuhan Pengumpul (PP) dan Pelabuhan Pengumpan Lokal (PL). Pelabuhan Pengumpul (PP) merupakan pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi. Sedangkan Pelabuhan Pengumpan Lokal (PL) merupakan pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam Kabupaten/Kota.

Arahan rencana kawasan untuk Pelabuhan Pengumpul (PP) dan Pelabuhan Pengumpan Lokal (PL) disusun dengan memperhatikan :

- 1) Peningkatan dan pengembangan fasilitas sarana dan prasarana keselamatan dan keamanan pelayaran pelabuhan.
- 2) Ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut.
- 3) Pembatasan pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Pengawasan dan pemantauan secara rutin pelarangan kegiatan di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut.

Arahan rencana untuk alur pelayaran disusun dengan memperhatikan :

- 1) Pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran dibatasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 2) Pemanfaatan ruang pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di sekitar badan air di sepanjang alur pelayaran dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran.



Adapun rencana kawasan transportasi di Kabupaten Bangka Selatan direncanakan seluas 23,33 hektar yang tersebar di 5 (lima) Kecamatan yang ada Kabupaten Bangka Selatan. Rincian luasan kawasan transportasi di Kabupaten Bangka Selatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.23
Luas Rencana Kawasan Transportasi

No	Kecamatan	Luas (Ha)
1	Kepulauan Pongok	0,21
2	Lepar	4,42
3	Pulau Besar	6,26
4	Toboali	1,17
5	Tukak Sadai	11,29
Jumlah		23,33

Sumber : Laporan Akhir RTRW Kabupaten Bangka Selatan, 2023

2.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

Kapasitas daya tampung lingkungan hidup dapat diidentifikasi dari aspek kemampuan lahan dan daya tampung air dalam bentuk sebaran kualitas air. Daya dukung lingkungan hidup meliputi daya dukung pangan, air, dan lahan. Daya dukung lahan dijelaskan dalam daya dukung lahan terbangun dan fungsi lindung.

2.1.3.1. Daya Dukung Lahan Terbangun

Daya dukung lahan untuk lahan terbangun dihitung dengan pertimbangan koefisien luas lahan terbangun, luas wilayah, dan luas lahan terbangun. Perhitungan mengacu rumus berikut.

$$DDLB = \frac{\alpha * Lw}{LTb}, \text{ dengan } LTb = LB + LTp$$

Keterangan :

DDLB : Daya dukung lahan untuk bangunan

Lw : Luas wilayah (Ha)

α : Koefisien luas lahan terbangun, maksimal 70 persen untuk lahan perkotaan sesuai Undang-Undang Penataan Ruang No.26 Tahun 2007. Berdasarkan angka tersebut, 30 persen wajib digunakan sebagai ruang terbuka hijau (RTH).

LTb : Luas lahan terbangun (Ha)

LB : Luas lahan bangunan (Ha)

LTp : Luas lahan untuk infrastruktur seperti jalan, sungai, drainase, dan lainnya (Ha), dapat diasumsikan 20 persen dari luas bangunan.

Hasil perhitungan kemudian diklasifikasikan sebagai berikut.



- DDLB <1 : Daya dukung lahan terbangun terlampaui atau buruk;
 DDLB 1-3 : Daya dukung lahan terbangun bersyarat atau sedang;
 DDLB >3 : Daya dukung lahan terbangun baik.

Tabel 2.24
Identifikasi dan Sub Kelas Kemampuan Lahan

Perhitungan DDLB Kabupaten Bangka		
Komponen	Nilai	Satuan
Luas Wilayah Kabupaten Bangka	359.729,51	Ha
Luas Lahan Bangunan (LB)	3.736,98	Ha
Luas Lahan untuk Infrastruktur/LTp (20 persen dari LB)	747,396	Ha
Luas Lahan Terbangun (LTb)	4.484,376	Ha

Sumber: Hasil Analisis, 2023

$$\text{DDL} = \frac{\alpha \cdot Lw}{LTb} = \frac{70 \text{ persen} \times 359.729,51}{4.484,376} = 56,1$$

Berdasarkan hasil perhitungan, Kabupaten Bangka Selatan secara keseluruhan memiliki daya dukung lahan terbangun sebesar. Jika dikaitkan dengan klasifikasi DDLB, daya dukung lahan terbangun di Kabupaten Bangka Selatan termasuk kategori baik (>3). Hasil tersebut menunjukkan bahwa ruang ruang untuk pengembangan aktivitas atau kegiatan pembangunan masih dapat dilakukan karena nilai daya dukung yang masih dalam kategori baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kawasan terbangun belum terlalu banyak, terfokus dalam jenis penggunaan lahan permukiman, sehingga masih banyak area yang dapat dimaksimalkan sebagai lokasi pembangunan dan pengembangan.

2.1.3.2. Daya Dukung Pangan

Daya dukung pangan dapat dianalisis berdasarkan produksi pangan pokok dan jumlah konsumsi beras. Produksi pangan pokok di Kabupaten Bangka Selatan diperoleh dari perbandingan produksi beras dengan kebutuhan beras untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Indeks Daya Dukung Lahan untuk Pangan (DDL) dihitung dengan rumus berikut :

$$\text{Indeks Daya Dukung Lahan untuk Pangan (DDL)} = \frac{\text{Jumlah Produksi Beras per Tahun}}{\text{Jumlah Konsumsi Beras per Tahun}} \times 100 \text{ persen}$$

Konsumsi beras berdasarkan data penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional terkait konsumsi beras per kapita tahun 2021 oleh adalah sebesar 114 kg/orang/tahun. Daya dukung



pangan dihitung berdasarkan rasio perbandingan kebutuhan beras terhadap produksi beras. Angka tersebut dinyatakan dalam indeks Daya Dukung Lahan untuk Pangan (DDL). Berikut hasil perhitungan daya dukung pangan di Kabupaten Bangka Selatan.

Tabel 2.25
Perhitungan Daya Dukung Pangan Beras Kabupaten Bangka Selatan

Uraian	2021	2022
Jumlah produksi beras (ton)	24.478,53	21.224,18
Penduduk Kabupaten Bangka (jiwa)	200.051	202.263
Angka konsumsi beras (kg/kapita/tahun)	114	114
Jumlah beras dikonsumsi (ton)	22.805,8	23.057,9
Daya Dukung Pangan	1,07	0,92
Surplus Beras (ton)	1.672,73	- 1.833,9

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Daya dukung pangan di Kabupaten Bangka ditinjau dari komoditas beras menunjukkan terjadi surplus beras pada tahun 2021 yaitu sebesar 1.672,73 ton, kemudian pada tahun 2022 disebabkan naiknya jumlah penduduk dan menurunnya produksi beras terjadi defisit beras sebesar 1.833,9 ha. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa produksi beras terjadi penurunan daya dukung pangan di Kabupaten Bangka Selatan dari tahun 2021 1,07 menjadi 0,92 pada tahun 2022.

2.1.3.3. Daya Dukung Air Permukaan

Daya dukung air dapat ditinjau berdasarkan angka ketersediaan air (*supply*) dan kebutuhan air (*demand*). Ketersediaan air dapat dihitung melalui pendekatan limpasan air dan kebutuhan air dihitung berdasarkan total kebutuhan air domestik dan non domestik. Perhitungan dilakukan dengan rumus berikut.

$$DDA = SA/DA$$

DDA: Daya Dukung Air

SA : Ketersediaan Air

DA : Kebutuhan Air

2.1.3.3.1. Ketersediaan Air

Ketersediaan air dihitung menggunakan metode koefisien limpasan, dengan formula berikut.

$$C = \sum(C_i \times A_i) / \sum A_i$$

$$R = \sum R_i / m$$

$$SA = 10 \times C \times R \times A$$



Keterangan :

SA : Ketersediaan air (m^3 /tahun)

C : Koefisien limpasan tertimbang

Ci : Koefisien limpasan penggunaan lahan i sesuai tabel berikut :

Tabel 2.26
Koefisien Limpasan Air menurut Penggunaan Lahan

No	Deskripsi Permukaan	Ci
1	Kota, jalan aspal, atap genteng	0,7 – 0,9
2	Kawasan industri	0,5 – 0,9
3	Permukiman multi-unit, pertokoan	0,6 – 0,7
4	Kompleks perumahan	0,4 – 0,6
5	Vila	0,3 – 0,5
6	Taman, pemakaman	0,1 – 0,3
7	Pekarangan tanah berat:	
	a. >7 persen	0,25 – 0,35
	b. 2-7 persen	0,18 – 0,22
	c. <2 persen	0,13 – 0,17
8	Pekarangan tanah ringan	
	a. >7 persen	0,15 – 0,2
	b. 2-7 persen	0,10 – 0,15
	c. <2 persen	0,05 – 0,10
9	Lahan berat	0,40
10	Padang rumput	0,35
11	Lahan budidaya pertanian	0,30
12	Hutan produksi	0,18

Sumber: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009

Ai : Luas penggunaan lahan I (ha)

R : Rata-rata curah hujan tahunan wilayah (mm/tahun)

Ri : Curah hujan tahunan pada stasiun i

m : Jumlah stasiun pengamatan curah hujan

A : Luas wilayah (Ha)

10 : Faktor konversi dari mm.ha menjadi m^3



Tabel 2.27
Koefisien Limpasan Air Berdasarkan Penggunaan Lahan di Bangka Selatan

Jenis Penggunaan Lahan	Luas (ha) (Ai)	Koef Limpasan (Ci)	(Ci x Ai)
Tempat Kegiatan	160	0,7	112
Sungai	277,56	0	0
Tegalan/Ladang	278,5	0,35	97,475
Tambak	1.335,37	0	0
Kolam	3.062,18	0	0
Permukiman	3.576,98	0,7	2503,886
Semak Belukar	7.755,75	0,35	2714,5125
Sawah	15.883,08	0,3	4764,924
Pertambangan	18.876,34	0,5	9438,17
Perkebunan	19.418,74	0,18	3495,3732
Hutan	38.813,83	0,18	6986,4894
Rawa	52.519,99	0	0
Kebun Campuran	197.771,20	0,35	69219,92
Jumlah	359.729,51		99332,75

Sumber: Hasil Analisis, 2023

$$C = \frac{\sum(C_i \times A_i)}{\sum A_i}$$

$$= 99.332,75 / 359.729,51$$

$$= 0,27$$

$$R = \frac{\sum R_i}{m}$$

$$= 225,7 \text{ mm/tahun}$$

$$A = 359.729,51 \text{ ha}$$

$$SA = 10 \times C \times R \times A$$

$$= 10 \times 0,27 \times 225,7 \times 359.729,51$$

$$= 452.805.281,4 \text{ m}^3/\text{tahun}$$

2.1.3.3.2. Kebutuhan Air

Kebutuhan air dihitung dengan menjumlahkan kebutuhan air domestik dan kebutuhan air non domestik. Formula yang digunakan sebagai berikut.

$$DA = Dad + Dand$$

Keterangan:

DA : Kebutuhan air total

Dad : Kebutuhan air domestik (m³/tahun)

DAnd : Kebutuhan air non domestik (m^3 /tahun)

1. Kebutuhan Air Domestik (Dad)

Kebutuhan air domestik dibedakan berdasarkan karakteristik wilayah. Area perkotaan dengan klasifikasi Kota kecil memiliki kebutuhan air sebesar 120 liter/hari/kapita, sedangkan Kota sedang-besar sebesar 150 liter/hari/kapita. Berdasarkan pedoman penyusunan Rencana Tata Ruang, Kawasan perkotaan berdasarkan jumlah penduduk dibedakan menjadi berikut :

- Kota Kecil, jumlah penduduk 10.000 – 100.000 jiwa
- Kota Sedang, jumlah penduduk 100.000 – 500.000 jiwa
- Kota Besar, jumlah penduduk 500.000 – 1.000.000 jiwa
- Kota Metropolitan, jumlah penduduk 1.000.000 – 8.000.000 jiwa

Asumsi rata-rata kebutuhan air minimal 120 liter/hari/kapita, maka total kebutuhan air domestik Kabupaten Bangka Selatan sebanyak 24.271.560 liter/hari/kapita atau 8.640.675,3 m^3 /tahun.

2. Kebutuhan Air Non Domestik (DAnd)

Kebutuhan air non domestik dapat ditinjau dari kebutuhan air untuk pertanian dan industri. Kebutuhan air mengacu angka berikut :

- Kebutuhan air untuk lahan padi : 1 liter/detik/hektar
- Kebutuhan air untuk lahan kering lainnya : 0,3 liter/detik/hektar
- Kebutuhan air untuk industri : 500 liter/hari/karyawan

Tabel 2.28
Kebutuhan Air Non Domestik (DAnd)

Uraian	Jumlah Penduduk	Satuan	Kebutuhan Air (L/hari/org)	L/hari/orang	M ³ /tahun
Jumlah Penduduk	202.263	jiwa	120	24.271.560	8.640.675,3
Uraian	Luas Lahan	Satuan	Kebutuhan Air (L/detik/Ha)	L/detik/Ha	M ³ /tahun
Sawah	15.883,08	Ha	1	15.883,08	5.654,3
Perkebunan	19.418,74	Ha	0,3	5.825,6	2.073,9
Pertanian Lahan Kering	8.034,25	Ha	0,3	2.410,2	858
Pertanian Lahan Kering Campur Semak	197.771,20	Ha	0,3	59.331,36	21.121,9
Uraian	Tenaga	Satuan	Kebutuhan Air	L/hari/orang	M ³ /tahun



	Kerja		(L/hari/org)		
Industri	99093	Orang	500	49.546.500	17.638.554
Total					26.308.937,40

Sumber: Hasil Analisis, 2023

$$DDA = SA/DA$$

Keterangan:

DDA < 1 : Daya dukung air terlampaui atau buruk

DDA 1 – 3 : Daya dukung air bersyarat atau sedang

DDA > 3 : Daya dukung air aman atau baik

Perhitungan DDA Kabupaten Bangka :

$$\begin{aligned} \text{Daya Dukung Air (DDA)} &= \text{Ketersediaan Air (SA)} / \text{Kebutuhan Air (DA)} \\ &= 218.535.367,5 / 26.308.109,14 \\ &= 8,3 \end{aligned}$$

Nilai Daya Dukung Air (DDA) Kabupaten Bangka berdasarkan hasil perhitungan adalah 8,3 Angka tersebut berarti daya dukung air di Kabupaten Bangka Selatan termasuk kategori Daya dukung air aman atau baik. Berdasarkan hasil tersebut, pemenuhan kebutuhan air permukaan di Kabupaten Bangka Selatan dapat dipenuhi sendiri tanpa harus menggunakan sumber lain dari wilayah lain.

2.1.3.4. Daya Dukung Pangan Berbasis Grid

Status daya dukung pangan diperlukan untuk memberikan gambaran tentang kapasitas wilayah tersebut untuk menyediakan kebutuhan pangan bagi penduduk Kabupaten Bangka Selatan. Selain itu, Informasi ini memungkinkan kita untuk menilai tingkat ketahanan pangan di Bangka Selatan. Dengan demikian, Status daya dukung pangan menjadi dasar bagi perencanaan pembangunan wilayah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Rincian data setiap Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.29
Status Daya Dukung Pangan di Kabupaten Bangka Selatan

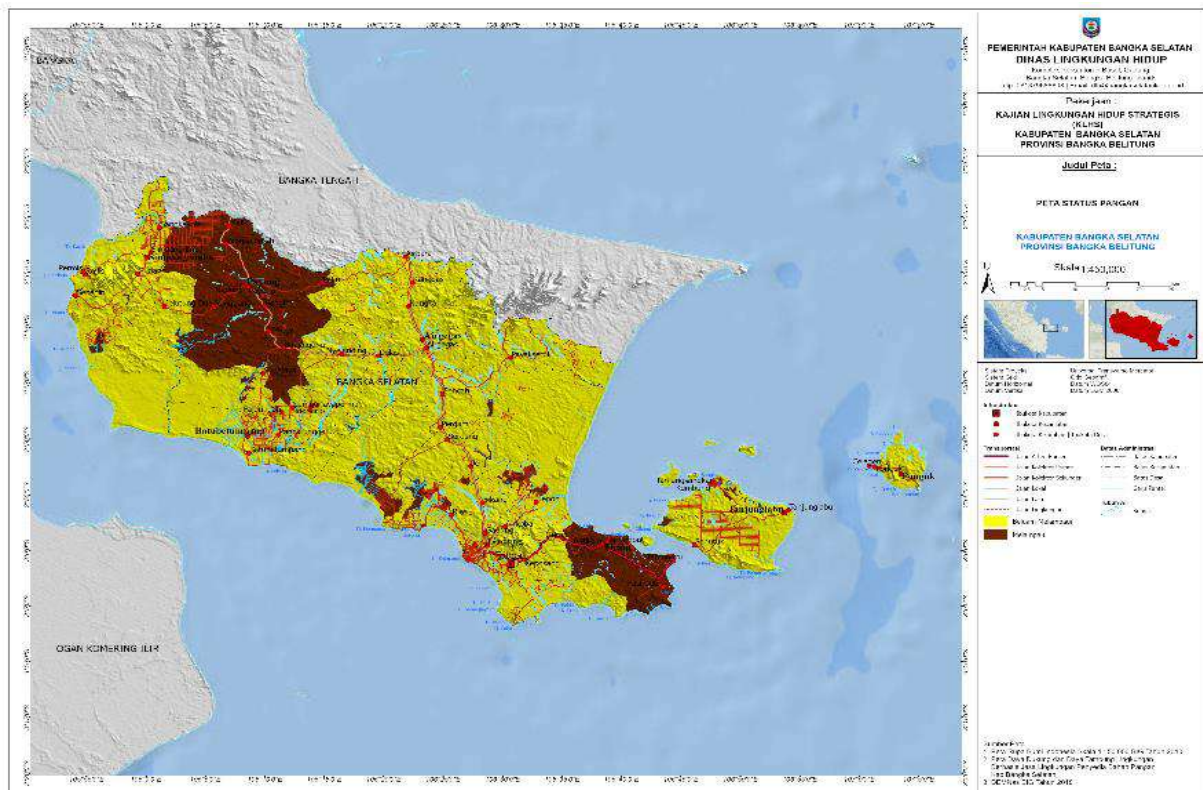
Kecamatan	Belum Melampaui		Melampaui		Total
	ha	persen	ha	persen	
Airgegas	96.927,359	97,67	2.435,248	2,33	98,570.03
Kepulauan Pongok	4.675,854	98,70	61,632	1,30	4,748.31
Lepar	22.175,714	97,04	675,877	2,96	22,638.70
Payung	0	0	48.711,718	100,00	39,153.25
Pulaubesar	29.392,488	97,45	769,911	2,55	32,796.20



Kecamatan	Belum Melampaui		Melampaui		Total
	ha	persen	ha	persen	
Simpang Rimba	49.311,916	97,39	1.321,230	2,61	64,303.53
Toboali	79.475,047	93,39	5.625,597	6,61	76,926.22
Tukak Sadai	0	0	14.583,780	100,00	21,571.76
Total	286.958,379	79,46	74.184,996	20,54	360,708.00

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan data yang tertera pada tabel di atas, terlihat bahwa dari total 8 Kecamatan, terdapat dua Kecamatan, yaitu Payung dan Tukak Sadai, yang menunjukkan bahwa daya dukung pangan mereka telah mencapai 100 persen, yang berarti telah melampaui kapasitas. Toboali, satu Kecamatan lainnya, menunjukkan nilai sekitar 7 persen, yang telah melampaui, sementara 93 persen masih berada di bawah kapasitas maksimal. Lima Kecamatan lainnya memiliki nilai antara 97-98 persen, menandakan bahwa sebagian besar wilayah ini masih berada di bawah kapasitas penuhnya.



Gambar 2.16
Peta Daya Dukung Pangan di Kabupaten Bangka Selatan
 Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Bangka Selatan 2025 -2045, 2024

Visualisasi dari data pada tabel diatas dapat dilihat dalam peta distribusi daya dukung pangan, yang memperlihatkan perbandingan antara wilayah yang sudah melampaui kapasitas dengan yang masih berada di bawahnya. Status ini dapat memberikan dasar untuk perencanaan pembangunan dan manajemen sumber daya pangan di masing-masing Kecamatan.

2.1.3.5. Daya Dukung Air Permukaan berbasis Grid

Mengetahui data daya dukung air pada suatu daerah sangat penting karena memiliki dampak besar pada keberlanjutan dan keberlangsungan kehidupan manusia. Contohnya seperti data daya dukung air membantu merencanakan dan mengelola sumber air yang memadai untuk kebutuhan konsumsi manusia, sistem irigasi, sistem tanggap darurat bencana, dan mencegah eksploitasi berlebihan. Rincian data di Bangka Selatan dapat dilihat pada tabel berikut :

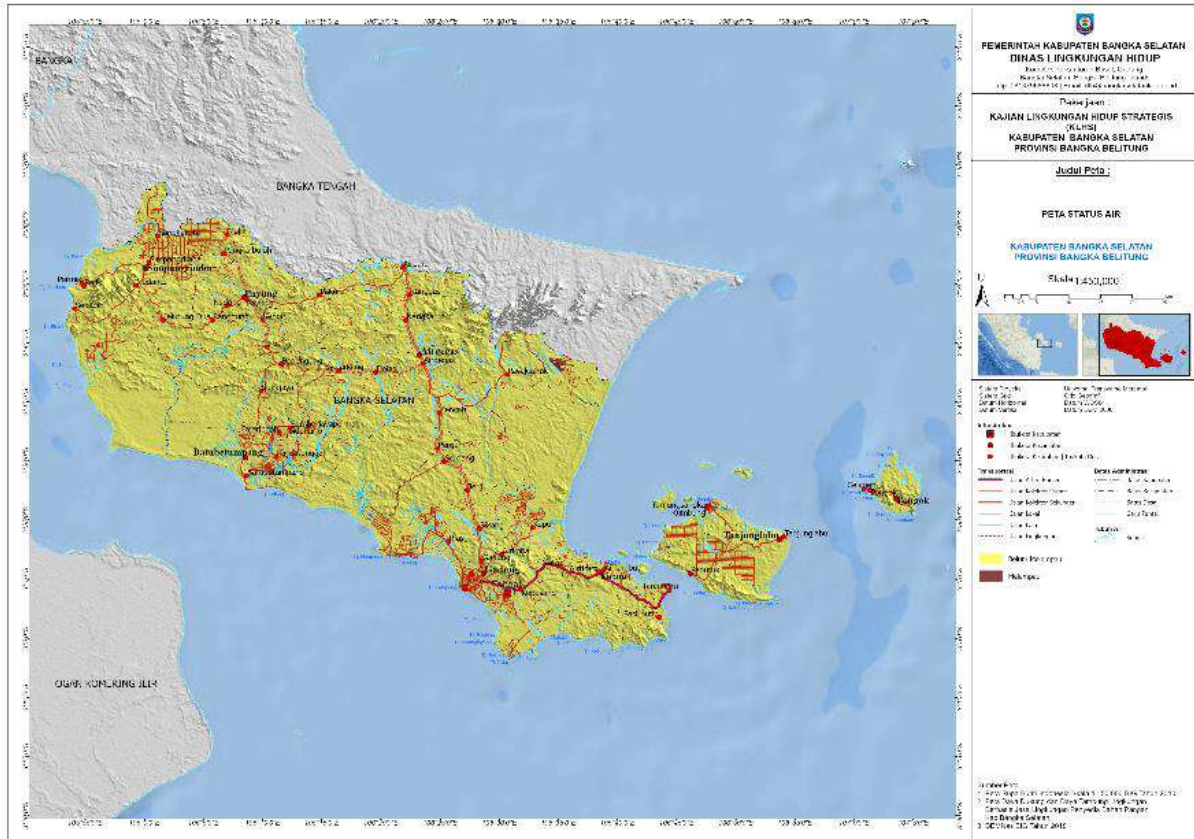
Tabel 2.30
Status Daya Dukung Air di Kabupaten Bangka Selatan

Kecamatan	Belum Melampaui		Melampaui		Total
	Ha	persen	Ha	persen	
Airgegas	104.076,08	99,73	286,53	0,27	98,570.03
Kepulauan Pongok	4.737,49	100,00		-	4,748.31
Lepar	22.851,59	100,00		-	22,638.70
Payung	48.711,72	100,00		-	39,153.25
Pulaubesar	30.162,40	100,00		-	32,796.20
Simpang Rimba	50.633,15	100,00		-	64,303.53
Toboali	85.100,64	100,00		-	76,926.22
Tukak Sadai	14.583,78	100,00		-	21,571.76
Total	360.856.85	99,92	286,53	0,08	360,708.00

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Dari 8 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka Selatan, sebanyak 7 Kecamatan menghadapi tantangan serius terkait daya dukung air, dengan nilai mencapai 100 persen yang belum melampaui. Keadaan ini mengindikasikan bahwa ketujuh Kecamatan tersebut mengalami defisit air dan membutuhkan manajemen sumber daya air yang lebih cermat serta berkelanjutan. Di sisi lain, Kecamatan Airgegas mencatatkan persentase sebesar 0,3 persen, atau sekitar 286 hektar, yang telah melampaui batas

daya dukung air. Angka ini menjadi fokus perhatian karena lebih dari 100.000 hektar di Kecamatan tersebut masih menunjukkan status daya dukung air yang belum melampaui. Maka dari itu strategi pengelolaan air yang bijak dan langkah-langkah konservasi perlu dipertimbangkan untuk mengatasi tantangan daya dukung air di Bangka Selatan. Secara visualisasi, persebaran status daya dukung air dapat dilihat pada gambar peta berikut :



Gambar 2.17

Peta Daya Dukung Air di Kabupaten Bangka Selatan

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Bangka Selatan 2025 -2045, 2024

2.1.4. Kondisi Lingkungan Hidup

2.1.4.1. Ruang Terbuka Hijau

Persentase ruang terbuka hijau minimal adalah 30 persen dari luas daratan. Untuk Kabupaten Bangka Selatan, RTH yang *existing* masih melebihi 30 persen, yaitu sebesar 45 persen. Akan tetapi RTH tersebut perlu penataan dan pengelolaan. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam (Undang-undang Penataan Ruang nomor 26 Tahun 2007 pasal 29 ayat 1).

Tabel 2.31
Total Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023

No	Jenis RTH Publik	Jumlah RTH	Luas RTH (m2)
1	Taman Kota	6	1.629.394.750
2	Hutan Kota	1	8.498.540
3	Jalur Hijau di Jalan	1	1.343.900
4	Sempadan Sungai	1	759.020
5	Sempadan Pantai	1	1.814.360
6	Tempat Pemakaman Umum	1	299.290
7	Sempadan Rel Kereta Api	0	0
8	Jalur Hijau Jaringan Listrik Tegangan Tinggi	0	0
9	Pengamanan Sumber Air Baku/Mata Air	1	6.331.730
Total RTH Publik Kabupaten/Kota 2023 (m2)		12	1.648.441.590
Luas RTH Publik Kab/Kota 2023 (Km2)			1.648,4400
Luas Wilayah Ibu Kota Kabupaten Tahun 2023 (Km2)			3.607,08
Persentase RTH Kab/Kota Tahun 2023 (persen)			45,70

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Selatan, 2024

Berdasarkan tabel diatas diketahui dari total luas wilayah Kabupaten Bangka Selatan yaitu 3.607,08 km², dengan total Ruang terbuka Hijau Kabupaten 1.648,44 km² atau 45,70 persen dari total luas wilayah Kabupaten Bangka Selatan. Adapun jenis Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari taman Kota yaitu seluas 1.629,39 km², hutan Kota dengan luas 8,49 km², jalur hijau di jalan dengan luas 1,34 km², sempadan sungai dengan luas 0,75 km², sempadan pantai dengan luas 1,81 km², tempat pemakaman umum dengan luas 0,29 km².

Selain gambaran Ruang Terbuka Kabupaten Bangka Selatan tahun 2023 secara keseluruhan, akan disajikan juga persentase Ruang Terbuka Hijau untuk Ibu Kota Kabupaten Bangka Selatan yaitu Toboali dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.32
Total Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Ibu Kota
Di Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023

No	Jenis RTH Publik	Jumlah RTH	Luas RTH (m2)
1	Taman Kota	1	162.910
2	Hutan Kota	1	8.498.540
3	Jalur Hijau di Jalan	1	1.343.900
4	Sempadan Sungai	1	759.020
5	Sempadan Pantai	1	1.814.360
6	Tempat Pemakaman Umum	1	299.290
7	Sempadan Rel Kereta Api	0	0
8	Jalur Hijau Jaringan Listrik Tegangan Tinggi	0	0
9	Pengamanan Sumber Air Baku/Mata Air	1	6.331.730
Total RTH Publik Kabupaten/Kota 2023 (m2)		7	19.209.750,00
Luas RTH Publik Kab/Kota 2023 (Km2)			19,21
Luas Wilayah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023 (Km2)			98,42
Persentase RTH Kab. Bangka Selatan Tahun 2023 (persen)			19,52

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Selatan, 2024

Proporsi ruang terbuka hijau publik seluas minimal 20 persen yang disediakan oleh pemerintah daerah dimaksudkan agar proporsi ruang terbuka hijau minimal dapat lebih dijamin pencapaiannya sehingga memungkinkan pemanfaatannya secara luas oleh masyarakat. Sedangkan, proporsi 30 persen merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem Kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem iklim, maupun sistem ekologis lain, yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika Kota (Undang-undang Penataan Ruang nomor 26 Tahun 2007 pasal 29 ayat 2). Untuk lebih meningkatkan fungsi dan proporsi ruang terbuka hijau di Kota, Pemerintah, masyarakat dan swasta didorong untuk menanam tumbuhan diatas bangunan gedung miliknya

Ruang terbuka hijau khusus Ibu Kota Kabupaten Bangka Selatan yakni Toboali memiliki persentase 19,52 persen dengan total luas wilayah RTH 19,21 km², yang berlokasi di Kelurahan

Toboali, Kelurahan Teladan, Kelurahan Tanjung Ketapang dan Desa Gadung. Dengan hasil capaian persentase RTH Kabupaten ini dapat disimpulkan Pemerintah perlu peningkatan lebih giat lagi untuk memenuhi 20 persen porsi ruang terbuka hijau publik, upaya Pemerintah dalam mengoptimalkan kebijakan pengelolaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Bangka Selatan dengan berbagai stakeholders seperti dinas yang berwenang, swasta, pengguna taman dan media massa perlu lebih intens lagi, agar fungsi ruang terbuka hijau sebagai fungsi ekologi, fungsi sosial dan fungsi ekonomi dapat terwujud.

2.1.4.2. Ketaatan Dokumen AMDAL/UPL/UKL

AMDAL merupakan kajian dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, dibuat pada tahap perencanaan, dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Hal-hal yang dikaji dalam proses AMDAL adalah aspek fisik-kimia, ekologi, sosial ekonomi, sosial-budaya, dan kesehatan masyarakat sebagai pelengkap studi kelayakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Agar pelaksanaan AMDAL berjalan efektif dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan, pengawasannya dikaitkan dengan mekanisme perijinan. Peraturan Pemerintah tentang AMDAL secara jelas menegaskan bahwa AMDAL adalah salah satu syarat perijinan, dimana para pengambil keputusan wajib mempertimbangkan hasil studi AMDAL sebelum memberikan ijin usaha/kegiatan. AMDAL digunakan untuk mengambil keputusan tentang penyelenggaraan/pemberian ijin usaha dan/atau kegiatan.

Berikut adalah pengawasan terhadap dokumen AMDAL/ULP-UKL Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2023 :

Tabel 2.33
Persentase Ketaatan Dokumen AMDAL/ULP-UKL
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2023

Tahun	Jumlah Perusahaan Yang Diawasi	Ketaatan terhadap dokumen AMDAL/ULP-UKL		
		Taat	Tidak Taat	persen Ketaatan
2020	15	14	1	93,33
2021	25	19	6	76,00
2022	30	24	6	80,00
2023	35	28	7	80,00

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Selatan, 2024

Ketaatan terhadap Dokumen AMDAL/UPL-UKL merupakan kewajiban untuk dijalankan oleh badan usaha atau pelaksanaan kegiatan sehingga setiap tahunnya. Kinerja ketaatan terhadap dokumen lingkungan hidup merupakan indikator yang sangat tergantung pada komitmen pihak lain, dan secara interen, indikator ini diketahui melalui kegiatan pengawasan.



Pada tahun 2020 dimana hanya terdapat 15 badan usaha (perusahaan) yang diawasi. Berdasarkan data bidang PPLH dari 15 badan usaha yang diawasi, terdapat 14 badan usaha yang dikategorikan taat dan 1 badan usaha yang tidak taat. Adapun 14 badan usaha ini hanya terdapat 9 perusahaan yang sudah beroperasi sedangkan 5 badan usaha lainnya belum beroperasi.

Sedangkan pada tahun 2021 terdapat peningkatan jumlah perusahaan yang diawasi dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2020 terdapat 14 perusahaan yang diawasi. Sedangkan pada tahun 2021 Berdasarkan data bidang PPLH terdapat 25 badan usaha yang diawasi, dengan rincian terdapat 19 badan usaha yang dikategorikan taat dan 6 badan usaha yang tidak taat.

Dan untuk tahun 2022 terdapat peningkatan jumlah perusahaan yang diawasi di tahun 2021 terdapat 25 perusahaan (badan usaha yang diawasi). Sedangkan pada tahun 2022 terdapat 30 badan usaha yang diawasi, dengan rincian terdapat 25 badan usaha yang dikategorikan taat dan 6 badan usaha yang tidak taat. Sedangkan pada tahun 2023 terdapat 35 badan usaha yang diawasi, dengan rincian terdapat 28 badan usaha yang dikategorikan taat dan 7 badan usaha yang tidak taat dan semua perusahaan telah beroperasi dengan baik.

2.1.4.3. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai indikator pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia merupakan perpaduan antara konsep indeks kualitas lingkungan dan konsep *Environmental Performance Index* (EPI). IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup. Selain itu sebagai bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), yang diukur berdasarkan parameter-parameter pH, TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan NO₃-N. Indeks Kualitas Udara (IKU) yang diukur berdasarkan parameter SO₂ dan NO₂, dan Indeks tutupan lahan yang diukur berdasarkan luas tutupan hutan.

Indeks Kualitas lingkungan Hidup (IKLH) adalah suatu kebijakan yang diambil untuk mengetahui kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah. IKLH adalah salah satu cara untuk mereduksi banyaknya data dan informasi mengenai kualitas lingkungan hidup, hal ini sebagai tindak lanjut dalam upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan Menurut Peraturan Kementerian LHK nomor 27 Tahun 2022 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu



wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) ditetapkan secara nasional sebagai indikator untuk menilai ketercapaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup tingkat nasional. Demikian halnya dengan IKLH yang ditetapkan oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota juga menggambarkan kondisi pengelolaan lingkungan hidup di daerah. Selain itu itu, IKLH dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perhitungan IKLH dilakukan jika semua komponen indeks (IKA, IKU, IKL dan IKAL) telah dihitung dan diketahui nilainya. Komponen indeks yang harus dihitung dan diketahui nilainya untuk perhitungan IKLH berdasarkan level wilayah yaitu IKLH Kabupaten/Kota meliputi IKA, IKU, dan IKL.

IKLH dihitung dengan melakukan penjumlahan dari semua komponen indeks (IKA, IKU, IKL dan IKAL) yang dikalikan masing-masing bobot dengan menggunakan rumus perhitungan :

$$\text{IKLH Kabupaten/ Kota} \quad \text{IKLH} = (0.376 \times \text{IKA}) + (0.405 \times \text{IKU}) + (0.219 \times \text{IKL})$$

1. menghitung komponen indeks di Kabupaten/Kota, yang meliputi IKA, IKU, dan IKL;
2. menghitung IKLH dengan melakukan penjumlahan dari semua komponen indeks (IKA, IKU, dan IKL) yang dikalikan masing-masing bobot dengan menggunakan rumus perhitungan IKLH Kabupaten/Kota.

Adapun capaian IKLH Kabupaten Bangka Selatan dari Tahun 2016-2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.34
Capaian IKLH Kabupaten Bangka Selatan dari Tahun 2016-2023

KOMPONEN INDEKS	TAHUN							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
IKA	43,34	53,63	67,05	68,34	68,30	60,67	54,76	55,71
IKU	81,08	93,2	92,8	82,55	93,00	89,35	89,44	89,7
IKL	64,07	64,07	64,07	64,07	64,07	41,73	41,74	36,86
IKLH	62,95	69,68	73,59	70,90	74,02	68,14	65,95	65,36

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Selatan, 2024

2.1.4.4. Indeks Keanekaragaman Hayati (IKH)

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi *Convention On Biological Diversity* melalui Undang-undang nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention On Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati)



sebagai bentuk komitmen terhadap pengelolaan keanekaragaman hayati global. Sejak tahun 1993, Pemerintah Indonesia telah menyusun rencana aksi pengelolaan keanekaragaman hayati, yang diperbaharui menjadi Strategi dan Rencana Aksi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Indonesia/*Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2003-2020*, dan disesuaikan dengan Target Aichi menjadi IBSAP 2015-2020. Dokumen IBSAP 2025-2045 menjadi pedoman pengelolaan keanekaragaman hayati selama 20 tahun ke depan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Dokumen IBSAP juga menjadi alat diplomasi Indonesia dalam pengelolaan keanekaragaman hayati di tingkat global. Dokumen IBSAP dapat dievaluasi dan diperbaharui setiap lima tahun untuk memastikan relevansinya sesuai dengan perubahan kondisi keanekaragaman hayati di Indonesia. Implementasi IBSAP 2025-2045 didukung oleh kaidah pelaksanaan yang terdiri atas kerangka kelembagaan; kerangka regulasi; kerangka pendanaan; kerangka pemantauan; evaluasi dan pelaporan; serta kerangka komunikasi, edukasi dan penyadaran publik. Dokumen IBSAP 2025-2045 dilengkapi dengan dokumen pendamping lain, meliputi status keanekaragaman hayati di 7 (tujuh) ekoregion; pedoman monitoring, evaluasi dan pelaporan IBSAP 2025-2045; pedoman komunikasi dan *outreach* IBSAP 2025-2045; kerangka dan instrumen pendanaan IBSAP 2025-2045/ *Biodiversity Financial Plan*; serta pedoman Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (IPK)

Dokumen IBSAP 2025-2045 terintegrasi dengan RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 sesuai dengan mandat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan keanekaragaman hayati dalam pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional dan daerah. Untuk mendukung pengarusutamaan keanekaragaman hayati, telah dirumuskan Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati menjadi salah satu indikator utama pembangunan di tingkat nasional dan daerah

Demi mewujudkan pengelolaan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan, dokumen IBSAP 2025-2045 memuat visi “Hidup selaras dengan alam untuk keberlangsungan seluruh bentuk kehidupan di Indonesia”. Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang dilakukan adalah “Pengelolaan keanekaragaman hayati melalui perlindungan, pemanfaatan berkelanjutan, pengayaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penguatan sumber daya dan tata kelola”. Selain itu, dalam implementasi IBSAP terdapat 5 (lima) prinsip pengelolaan keanekaragaman hayati, yaitu 1) berkedaulatan; 2) berkeadilan; 3) kehati-hatian; 4) sistematis dan terukur; dan 5) partisipatif.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, terdapat 3 (tiga) tujuan, 13 strategi, 20 target nasional, dan 95 kelompok aksi dalam IBSAP 2025-2045, 3 (tiga) tujuan tersebut yaitu :

1. Tujuan 1 (satu) adalah memperkuat integrasi dan ketahanan ekosistem dalam pengelolaan keanekaragaman hayati, mengurangi risiko kepunahan spesies, dan menjaga keanekaragaman genetik. Pengelolaan keanekaragaman hayati Indonesia harus dilakukan



- secara holistik/menyeluruh baik pada tingkat ekosistem, spesies dan genetik. Arah pengelolaan dimulai dari perencanaan tata ruang yang terintegrasi darat dan laut serta mempertimbangkan pelestarian keanekaragaman hayati, pemulihan ekosistem, hingga aksi pengurangan ancaman kehilangan keanekaragaman ekosistem, spesies dan genetik. Tujuan 1 (satu) dicapai dengan meliputi 6 (enam) strategi, 7 (tujuh) target nasional, dan 38 kelompok aksi. Tujuh target nasional tersebut, antara lain: 1) integrasi ekosistem; 2) restorasi, rehabilitasi dan reklamasi; 3) perlindungan ekosistem; 4) perlindungan spesies dan genetik; 5) penurunan jenis asing invasif; 6) pengurangan pencemaran; dan 7) pengurangan risiko dan ketahanan iklim.
2. Tujuan 2 (dua) adalah mengoptimalkan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati bagi masyarakat dan generasi yang akan datang. Manfaat keanekaragaman hayati mencakup penguatan ketahanan pangan, penyediaan bahan material, farmasi, riset, pelestarian budaya dan fungsi esensial lainnya. Hal tersebut menjadikan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan berkelanjutan. Keanekaragaman hayati juga memiliki peran krusial dalam memastikan sistem penyangga kehidupan bagi masyarakat dan generasi yang akan datang. Peran kunci dalam menyediakan berbagai manfaat bagi manusia dan menjaga keseimbangan ekosistem perlu dilestarikan dengan langkah-langkah yang strategis dan terarah. Tujuan 2 (dua) dicapai melalui pelaksanaan 4 (empat) strategi, 5 (lima) target nasional dan 25 kelompok aksi. Lima target nasional tersebut meliputi: 1) pengelolaan pemanfaatan sumber daya hutan berkelanjutan; 2) budidaya berkelanjutan; 3) nilai jasa lingkungan; 4) ketersediaan dan akses ruang terbuka hijau dan biru; dan 5) pemanfaatan dan pembagian keuntungan sumber daya genetik
 3. Tujuan 3 (tiga) adalah memperkuat tata kelola atau *means of implementation* (MOI) keanekaragaman hayati, melalui pengayaan ilmu pengetahuan dan teknologi; peningkatan kapasitas sumber daya manusia; penguatan finansial; serta penguatan regulasi dan penegakan hukum. Faktor penting dalam implementasi adalah kondisi pemungkin (*enabling condition*) bagi strategi dan rencana aksi agar terlaksana dengan baik, antara lain ketersediaan sumber daya finansial, pengayaan dan penguatan ilmu pengetahuan melalui riset dan inovasi, serta perluasan jaringan distribusi data, informasi, dan pengetahuan secara terbuka dan tersebar merata. Hal tersebut diperkuat dengan jejaring kemitraan para pihak secara kolaboratif untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan keanekaragaman hayati Indonesia. Implementasi pengelolaan keanekaragaman hayati menjadi tanggung jawab bersama, sehingga diperlukan keterbukaan dari perencanaan hingga pelaksanaan, terutama dalam perumusan strategi dan aksi pengelolaan. Tujuan 3 (tiga) dicapai melalui 3 (tiga) strategi, 8 (delapan) target nasional dan 32 kelompok aksi. Untuk mencapai tujuan ini, 8 (delapan) target nasional yang mendukung adalah: 1) pengayaan ilmu pengetahuan dan



teknologi; 2) pengelolaan keamanan hayati; 3) integrasi data; 4) pengarusutamaan keanekaragaman hayati; 5) partisipasi masyarakat; 6) keterlibatan swasta; 7) daya dukung finansial; dan 8) reformasi insentif.

Kabupaten Bangka Selatan akan Mengimplementasikan 3 (tiga) tujuan, 13 strategi, 20 target nasional, dan 95 kelompok aksi dalam IBSAP 2025-2045 ke dalam Visi dan Misi sebagai Prioritas untuk membangun Indeks Keanekaragaman Hayati (IKH) di Kabupaten Bangka Selatan.

2.1.5. Wilayah Rawan Bencana dan Perubahan Iklim

2.1.5.1. Wilayah Rawan Bencana

Salah satu indikator pendukung pembangunan daerah adalah Indeks Resiko Bencana (IRB) dan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang digunakan untuk mengukur dan memetakan risiko bencana di berbagai wilayah di Indonesia. Indeks ini disusun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan diperbarui secara berkala untuk mencerminkan dinamika indikator kerawanan yang ada. IRB mengkategorikan risiko bencana menjadi tiga tingkat: rendah, sedang, dan tinggi. Kategori ini membantu pemerintah daerah dan pihak terkait dalam menyusun kebijakan, perencanaan pembangunan, dan langkah-langkah mitigasi bencana.

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Terbitnya Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur penanggulangan bencana menjadi urusan wajib daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah. Upaya mengurangi indeks risiko bencana akan mampu dilaksanakan di daerah dengan implementasikan fase perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasinya. Kewenangan dari pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan terkait dengan kebencanaan dapat dilaksanakan secara lintas sektor, melalui pelaksanaan rencana kerja masing-masing Perangkat Daerah dan penganggaran daerah yang disusun berdasarkan koordinasi Bappeda di tataran daerah. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam program kegiatan lintas sektor ini diharapkan dapat berlangsung lebih baik dengan adanya instrumen kebijakan ini.

Di Kabupaten Bangka Selatan memiliki potensi bencana namun tidak semua potensi bencana tersebut dapat mengakibatkan dampak bagi masyarakat berdasarkan data yang didapat di Kabupaten Bangka Selatan yaitu :

1. Banjir di Kabupaten Bangka Selatan disebabkan oleh kondisi geomorfologisnya yang relatif datar dan beberapa daerahnya termasuk area rawa dan pesisir pantai, sehingga kecepatan aliran air menjadi lambat dan menimbulkan genangan disekitar dataran banjir. Bentuk dan Kondisi Jalan yang landai sedikit bergelombang akibat kondisi tanah yang cukup lemah



dengan posisi jalan yang berada diatas aliran sungai yang mengalir disisi kiri dan kanan menyebabkan adanya aliran air yang membentuk jaringan sungai berupa retakan dipemukaan jalan dan adanya pegerakan jalan kesisi air yang mengalir, serta adanya genangan air maupun banjir dikala volume air laut ataupun air sungai naik menyebabkan beberapa kawasan di Kabupaten Bangka Selatan cukup sering mengalami penurunan kualitas jalan, serta lingkungan. Sehingga pengurangan risiko bencana dapat dilakukan melalui :

- a. Membangun daerah resapan berupa lubang peresapan (biopori) atau kolam retensi penampung air untuk mengembalikan sejumlah fungsi lahan yang saat ini peruntukkannya sebagai Gedung;
- b. Pembangunan/pemanfaatan waduk untuk mengatur aliran air;
- c. Pembangunan kolam retensi yang nantinya air dapat dimanfaatkan untuk aktivitas sehari hari maupun untuk kegiatan pertanian;
- d. Peningkatan vegetasi penutup untuk memperlambat aliran air permukaan surface run-off;
- e. Pembangunan sistem drainase, dapat berupa alur sungai baru atau sistem drainase pipa untuk mengurangi beban sungai;
- f. Membangun daerah resapan berupa lubang peresapan (biopori) atau kolam retensi penampung air untuk mengembalikan sejumlah fungsi lahan;
- g. Saluran drainase air hujan di Kawasan dengan aktivitas tinggi untuk meningkatkan kapasitas pembuangan air berlebih;
- h. Pemecah gelombang dan dinding laut sepanjang pantai untuk mencegah air laut masuk dan keluar dari bantaran banjir;
- i. Penanaman vegetasi untuk mempercepat proses infiltras ketika terjadi genangan;
- j. Perencanaan tata ruang yang selaras dengan pengelolaan guna lahan di daerah aliran sungai, salah satunya adalah melalui regulasi berbagai pihak, termasuk elemen masyarakat sebagai subjek dan pemerintah sebagai regulator sekaligus eksekutor yang tentunya disertai dengan penanggulangan banjir (mitigasi structural yang baik);
- k. Literasi kebencanaan di sekolah dan masyarakat dapat berupa edukasi kelompok maupun bentuk pelatihan. Dengan edukasi kebencanaan yang efektif maka pengetahuan dan pemahaman masyarakat dapat lebih baik, sehingga coping capacity dapat meningkat dan risiko bencana dapat dikurangi;
- l. Mendeteksi dan memprediksi yang dilakukan oleh instansi berwenang untuk membantu proses evakuasi;



- m. Pengelolaan kawasan sempadan sungai harus memperhatikan kondisi sosial-kultural masyarakat lokal agar terhindar dari konflik dan pengelolaan dapat tercapai secara optimal;
 - n. Peningkatan sistem komunikasi dan kearifan lokal dalam masyarakat melalui kegiatan rutin masyarakat seperti kerja bakti, karang taruna, maupun membentuk kelompok Destana (Desa Tangguh Bencana);
 - o. Pembuatan jalur evakuasi yang ditandai dengan petunjuk arah untuk mempermudah proses evakuasi, menentukan titik kumpul/titik tempat evakuasi yang aman dari bencana yang dapat dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan masyarakat;
 - p. Perbaikan kualitas bahan pembuatan jalan atau pembuatan jembatan sebagai upaya agar aliran sungai yang berada dibawah jalan tidak lagi mengubah bentuk dari jalan yang telah ada ataupun menyebabkan pergeseran jalan.
2. Gelombang tinggi di Kabupaten Bangka Selatan disebabkan Kabupaten Bangka Selatan merupakan wilayah kepulauan yang jika dilihat dari administrasi wilayah banyak ditemukan permukiman yang berbatasan langsung dengan laut, seperti Kecamatan Lepar dan Kecamatan Kepulauan Pongok, yang merupakan salah satu Kecamatan yang berada di luar area daratan Kabupaten Bangka Selatan. Selain dengan posisi wilayah yang merupakan wilayah kepulauan, gelombang tinggi ini disebabkan juga dari pengaruh angin laut, yang mana beberapa wilayah dikategorikan termasuk jangkauan gelombang tinggi dikarenakan tidak ada pembatas ketika jika terjadi angin besar dan gelombang tinggi seringkali terjadi, meski tidak dalam kategori rawan tsunami. Adapun pengurangan risiko bencana dapat dilakukan melalui :
- a. Penyediaan Alarm rawan bencana alam ataupun tsunami sebagai alternatif peringatan bencana alam bagi masyarakat sekitar;
 - b. Pemecah gelombang dan dinding laut sepanjang pantai untuk mencegah air laut masuk dan keluar;
 - c. Penanaman mangrove untuk menjadi pembatas secara tidak langsung untuk mencegah terjadi bencana alam gelombang tinggi;
 - d. Perencanaan tata ruang yang selaras dengan pengelolaan guna lahan di daerah aliran sungai, salah satunya adalah melalui regulasi berbagai pihak, termasuk elemen masyarakat sebagai subjek dan pemerintah sebagai regulator sekaligus eksekutor yang tentunya disertai dengan penanggulangan gelombang tinggi (mitigasi struktural yang baik);
 - e. Literasi kebencanaan di sekolah dan masyarakat dapat berupa edukasi kelompok maupun bentuk pelatihan. Dengan edukasi kebencanaan yang efektif maka pengetahuan



- dan pemahaman masyarakat dapat lebih baik, sehingga *carrying capacity* dapat meningkat dan risiko bencana dapat dikurangi;
- f. Mendeteksi dan memprediksi yang dilakukan oleh instansi berwenang untuk membantu proses evakuasi;
 - g. Pengelolaan kawasan sempadan sungai harus memperhatikan kondisi sosial-kultural masyarakat lokal agar terhindar dari konflik dan pengelolaan dapat tercapai secara optimal;
 - h. Peningkatan sistem komunikasi dan kearifan lokal dalam masyarakat melalui kegiatan rutin masyarakat seperti kerja bakti, karang taruna, maupun membentuk kelompok Destana (Desa Tangguh Bencana);
 - i. Pembuatan jalur evakuasi yang ditandai dengan petunjuk arah untuk mempermudah proses evakuasi, menentukan titik kumpul/titik tempat evakuasi yang aman dari bencana yang dapat dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan masyarakat;
 - j. Perbaikan kualitas bahan pembuatan jalan atau pembuatan jembatan sebagai upaya agar aliran sungai yang berada dibawah jalan tidak lagi mengubah bentuk dari jalan yang telah ada ataupun menyebabkan pergeseran jalan.
3. Angin Puting Beliung atau sering dibilang Badai Topan di Kabupaten Bangka Selatan disebabkan Kabupaten Bangka Selatan merupakan wilayah Kepulauan yang jika dilihat dari administrasi wilayah banyak ditemukan permukiman yang berbatasan langsung dengan laut, seperti Kecamatan Lepar dan Kecamatan Kepulauan Pongok. Badai ataupun angin puting beliung ini seringkali terjadi pada musim-musim tertentu dan menyebabkan beberapa rumah yang khususnya berada di Kawasan Kepulauan dan pesisir pantai rusak akibat badai tersebut. Adapun pengurangan risiko bencana dapat dilakukan melalui :
- a. Penyediaan Alarm Badai alam ataupun tsunami sebagai alternatif peringatan bencana alam bagi masyarakat sekitar;
 - b. Penanaman mangrove untuk menjadi pembatas secara tidak langsung untuk mencegah terjadi bencana alam gelombang tinggi;
 - c. Perencanaan tata ruang yang selaras dengan pengelolaan guna lahan di daerah aliran sungai, salah satunya adalah melalui regulasi berbagai pihak, termasuk elemen masyarakat sebagai subjek dan pemerintah sebagai regulator sekaligus eksekutor yang tentunya disertai dengan penanggulangan gelombang tinggi (mitigasi struktural yang baik);
 - d. Literasi kebencanaan di sekolah dan masyarakat dapat berupa edukasi kelompok maupun bentuk pelatihan. Dengan edukasi kebencanaan yang efektif maka pengetahuan dan pemahaman masyarakat dapat lebih baik, sehingga *carrying capacity* dapat meningkat dan risiko bencana dapat dikurangi;



- e. Mendeteksi dan memprediksi yang dilakukan oleh instansi berwenang untuk membantu proses evakuasi;
 - f. Pengelolaan Kawasan sempadan sungai harus memperhatikan kondisi social-kultural masyarakat lokal agar terhindar dari konflik dan pengelolaan dapat tercapai secara optimal;
 - g. Peningkatan system komunikasi dan kearifan lokal dalam masyarakat melalui kegiatan rutin masyarakat seperti kerja bakti, karang taruna, maupun membentuk kelompok Destana (Desa Tangguh Bencana);
 - h. Pembuatan jalur evakuasi yang ditandai dengan petunjuk arah untuk mempermudah proses evakuasi, menentukan titik kumpul/titik tempat evakuasi yang aman dari bencana yang dapat dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan masyarakat;
 - i. Perbaikan kualitas bahan pembuatan jalan atau pembuatan jembatan sebagai upaya agar aliran sungai yang berada dibawah jalan tidak lagi mengubah bentuk dari jalan yang telah ada ataupun menyebabkan pergeseran jalan.
4. Lahan kritis di Kabupaten Bangka Selatan terjadi dikarenakan banyaknya aktivitas penambangan yang tidak sesuai dengan kajian lingkungan hidup, banyak tambang timah ilegal maupun legal sama-sama merusak lingkungan, terutama pada kondisi saat ini yang semakin parah terjadinya lahan kritis di Kabupaten Bangka Selatan, hal ini dikarenakan banyaknya kolong-kolong timah yang tidak bisa dipergunakan lagi pemanfaatannya sebagaimana mestinya, serta air yang adapun tidak bisa digunakan secepatnya misalnya dalam kategori penyediaan air bersih. Adapun pengurangan risiko bencana dapat dilakukan melalui :
- a. Pemanfaatan lahan bekas tambang timah untuk diolah menjadi lokasi pariwisata;
 - b. Dilakukan kajian tentang kondisi tanah serta pengukurran gundukan tanah guna meminimalisir berapa luas dan tingginya volume tanah yang dikeluarkan dari proses penambangan;
 - c. Perencanaan tata ruang yang selaras dengan pengelolaan guna lahan di daerah aliran sungai, salah satunya adalah melalui regulasi berbagai pihak, termasuk elemen masyarakat sebagai subjek dan pemerintah sebagai regulator sekaligus eksekutor yang tentunya disertai dengan penanggulangan lahan kritis (mitigasi struktural yang baik);
 - d. Literasi kebencanaan di sekolah dan masyarakat dapat berupa edukasi kelompok maupun bentuk pelatihan. Dengan edukasi kebencanaan yang efektif maka pengetahuan dan pemahaman masyarakat dapat lebih baik, sehingga coping capacity dapat meningkat dan risiko bencana dapat dikurangi;
 - e. Mendeteksi dan memprediksi yang dilakukan oleh instansi berwenang untuk membantu proses evakuasi;



- f. Pengelolaan Kawasan hutan dan area lainnya harus memperhatikan kondisi social-kultural masyarakat local agar terhindar dari konflik dan pengelolaan dapat tercapai secara optimal;
- g. Mengurangi terjadi alih fungsi lahan untuk area hutan, sungai dan laut untuk meminimalisir resiko bencana alam lebih lanjut;
- h. Peningkatan sistem komunikasi dan kearifan lokal dalam masyarakat melalui kegiatan rutin masyarakat seperti kerja bakti, karang taruna, maupun membentuk kelompok Destana (Desa Tangguh Bencana);
- i. Pembuatan jalur evakuasi yang ditandai dengan petunjuk arah untuk mempermudah proses evakuasi, menentukan titik kumpul/titik tempat evakuasi yang aman dari bencana yang dapat dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan masyarakat;
- j. Perbaikan kualitas bahan pembuatan jalan atau pembuatan jembatan sebagai upaya agar aliran sungai yang berada dibawah jalan tidak lagi mengubah bentuk dari jalan yang telah ada ataupun menyebabkan pergeseran jalan.

Untuk Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Bangka Selatan bersifat fluktuatif, di tahun 2021 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Bangka Selatan sebesar 180,40, sedangkan pada tahun 2022 menjadi 179,12 dan di tahun 2023 sebesar 179,37. Dalam rentang 2021 sampai 2023 Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Bangka Selatan dengan kategori kerawanan tinggi, sedangkan Indeks Ketahanan Daerah di tahun 2021 Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Bangka Selatan sebesar 0,29, sedangkan pada tahun 2022 menjadi 0,33 dan di tahun 2023 sebesar 0,32. Berikut Indeks Risiko Bencana (IRB) dan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021-2023 :

Tabel 2.35
Indeks Risiko Bencana (IRB) dan Indeks Ketahanan Daerah (IKD)
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021-2023

No.	Daerah Kerawanan	Indikator	Tahun		
			2021	2022	2023
1	Kepulauan Bangka Belitung	IRB	160,98	158,52	155,61
		IKD	-	0,32	0,38
2	Pangkalpinang	IRB	120,40	120,40	144,48
		IKD	0,27	0,28	0,39
3	Bangka	IRB	168,40	168,40	160,48
		IKD	0,28	0,29	0,38
4	Bangka Barat	IRB	180,40	180,40	163,61
		IKD	0,31	0,32	0,47



No.	Daerah Kerawanan	Indikator	Tahun		
			2021	2022	2023
5	Bangka Tengah	IRB	144,40	144,40	144,40
		IKD	0,30	0,31	0,31
6	Bangka Selatan	IRB	180,40	179,12	179,37
		IKD	0,29	0,33	0,32
7	Belitung	IRB	164,44	148,48	158,53
		IKD	0,34	0,49	0,47
8	Belitung Timur	IRB	168,40	168,40	168,40
		IKD	0,27	0,28	0,31

Sumber : BNPB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2024

Di Kabupaten Bangka Selatan dari tahun 2018-2023 telah terjadi 63 kali kejadian bencana alam. Dari mulai Cuaca Ekstrim (Angin Kencang, Angin Puting Beliung, Tersambar Petir), Banjir (Air Meluap dan Banjir Rob), Tanah Lonsor (Pohon Tumbang) dan Kebakaran (Kebakaran Hutan dan Lahan). Kejadian bencana Alam di Kabupaten Bangka Selatan selama lima Tahun terakhir bisa dilihat dari tabel dibawah ini :

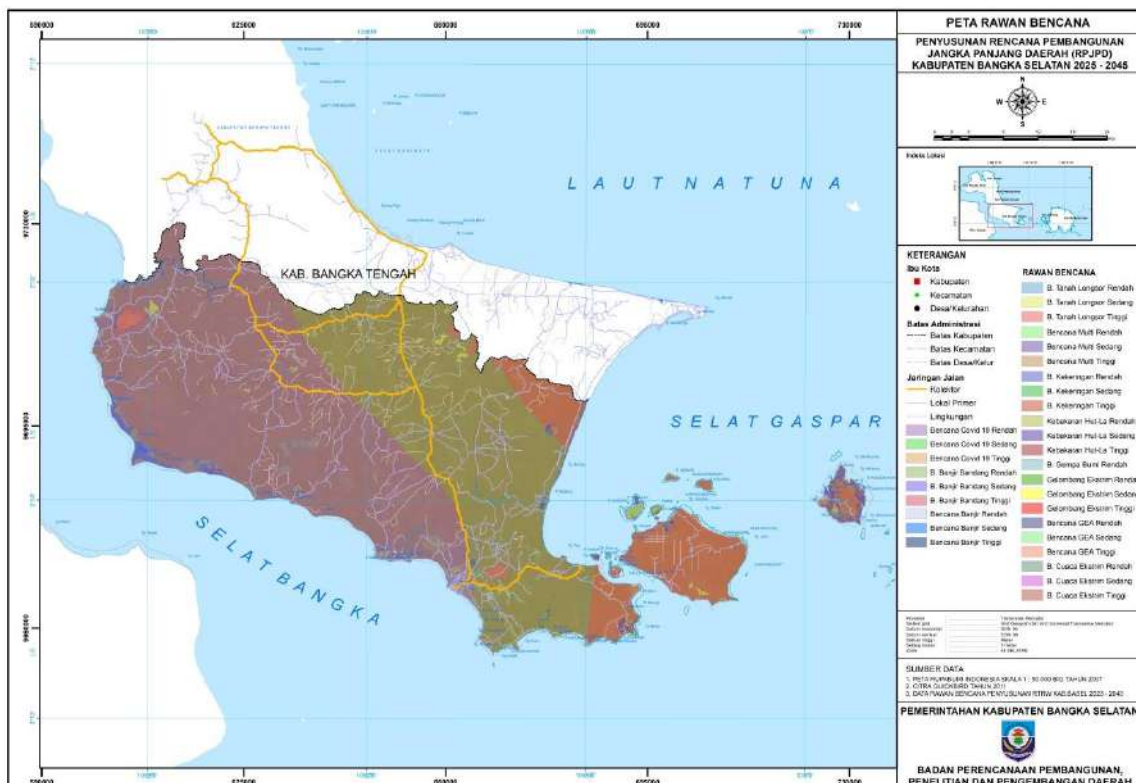
Tabel. 2.36
Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Bangka Selatan dari Tahun 2018-2023

No.	Tahun	Kejadian Bencana	Daerah (Desa/Kelurahan)	Jumlah Kejadian
1	2018	1. Cuaca Ekstrim (Angin Kencang, Puting Beliung dan Tersambar Petir) 2. Banjir (Air Meluap)	1. Desa Rajik, Desa Serdang, Desa Keposang, Desa Gadung, Desa Sadai dan Desa Bangka Kota. Desa Sukajaya dan Kelurahan Teladan 2. Desa Delas	12
2	2019	1. Cuaca Ekstrim (Angin Puting Beliung) 2. Tanah Longsor (Pohon Tumbang)	1. Desa Paku, Desa Sadai, Desa Kepoh, Desa Nangka, Kelurahan Teladan, Desa Airgegas, 2. Desa Sadai	8
3	2020	1. Angin Puting Beliung 2. Tersambar Petir	1. Desa Rias, Desa Irat, Kelurahan Toboali, Kelurahan Teladan, Kelurahan Tanjung Ketapang 2. Kelurahan Teladan	7
4	2021	1. Cuaca Ekstrim (Angin Puting Beliung, Angin Kencang dan Tersambar Petir)	1. Kelurahan Teladan, Desa Pergam, Desa Malik, Kelurahan Tanjung Ketapang, Desa Delas, Desa Sidoharjo, Desa Tepus.	9



No.	Tahun	Kejadian Bencana	Daerah (Desa/Kelurahan)	Jumlah Kejadian
		2. Banjir (Air Meluap dan Banjir Rob)	Desa Gadung. Dan Desa Jelutung II 2. Kelurahan Tanjung Ketapang. Desa Rajik, Desa Permis, Desa Sebagin	
5	2022	1. Cuaca Ekstrim (Angin Puting Beliung dan Tersambar Petir) 2. Banjir (Banjir Rob)	1. Desa Penutuk, Desa Nangka, Desa Delas, Desa Airgegas, Desa Pasir Putih, Desa Ranggas, Desa Nangka. Desa Sidoharjo 2. Desa Rajik, Desa Sebagin	10
6	2023	1. Cuaca Ekstrim (Angin Puting Beliung, Angin Kencang, dan Tersambar Petir) 2. Kebakaran (Kebakaran Hutan dan Lahan)	1. Desa Rias, Desa Jeriji, Desa Kepoh, Kel Tanjung Ketapang, Kelurahan Teladan. Desa Tukak, Desa Permis. Desa Sidoharjo, Desa Nangka 2. Desa Paku, Desa Sengir, Desa Irat	17

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Selatan, 2024



Gambar 2.18

Peta Rawan Bencana Kabupaten Bangka Selatan

Sumber : Peta Rawan Bencana Kabupaten Bangka Selatan by Inarisk BNPB, 2024



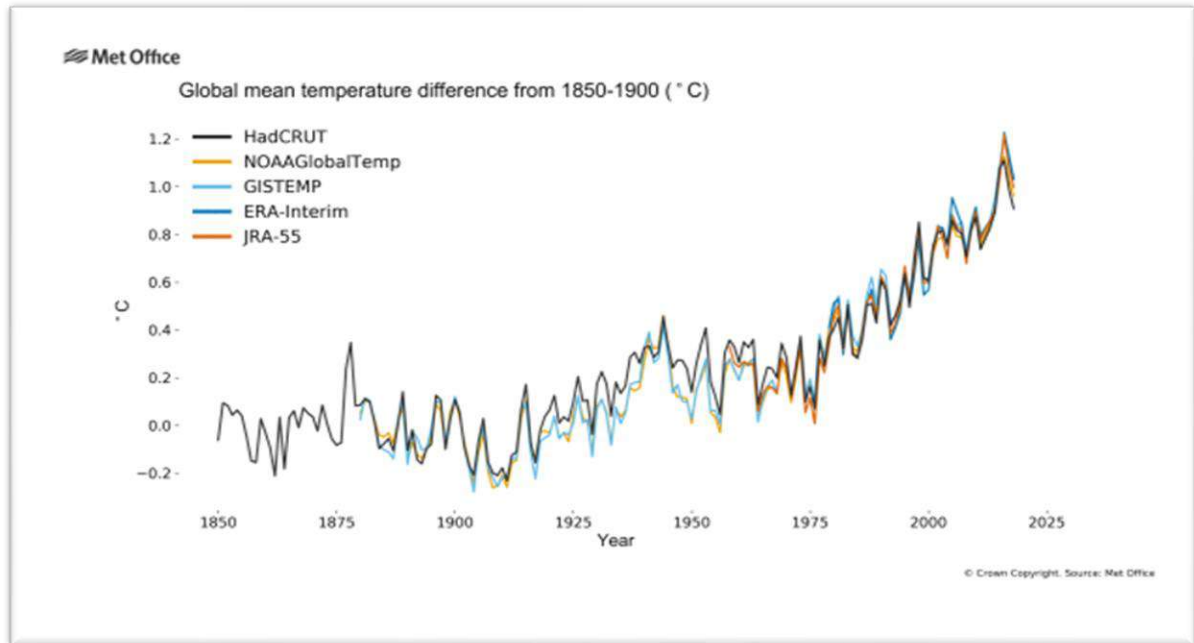
Dari tabel dan gambar tersebut kita bisa melihat bahwa pada tahun 2018 terjadi banyak sekali kejadian bencana alam sebanyak 12 kali, sedangkan yang paling sedikit pada tahun 2020 sebanyak 7 kali kejadian, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan melakukan koordinasi dengan membuat Tim Penanggulangan Bencana Kabupaten Bangka Selatan antara Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Satuan Polisi Pamong Praja dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah untuk menanggulangi kejadian bencana alam ini.

2.1.5.2. Perubahan Iklim

Fenomena perubahan iklim dirasa semakin mengkhawatirkan dan dapat memicu dampak yang lebih luas. Hal itu terlihat dari berbagai peristiwa bencana alam yang disebabkan oleh faktor iklim di berbagai belahan dunia. Menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika, perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan, langsung atau tidak langsung, oleh aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global serta perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan. Perubahan iklim dipicu oleh terjadinya pemanasan global yaitu naiknya suhu di permukaan bumi. Gas rumah kaca (GRK) merupakan faktor utama terjadinya kenaikan suhu di permukaan bumi. Banyak ahli iklim dan pakar dari lembaga-lembaga terkait di dunia yang telah memaparkan kajian mereka untuk memberikan bukti bahwa perubahan iklim benar terjadi, seperti dikutip dari laman www.climate4life.info diantaranya adalah :

1. Tren Peningkatan Suhu Global

NOAA (*National Oceanic and Atmospheric Administration*) menyebutkan pemanasan global merupakan salah satu bentuk perubahan iklim yang ditandai oleh meningkatnya suhu bumi. Dari hasil pengamatan semenjak tahun 1890 sampai dengan 2018 suhu bumi selalu mengalami peningkatan dari waktu ke waktu (seperti terlihat pada gambar). Berdasarkan kajian yang ada, para ilmuwan memproyeksi bahwa suhu global akan terus meningkat dalam beberapa dekade mendatang. Kenaikan suhu global sebagian besar disebabkan oleh gas rumah kaca yang dihasilkan oleh aktivitas manusia. WMO atau *World Meteorological Organization* menyebutkan selama empat tahun terakhir yaitu 2015, 2016, 2017, dan 2018 suhu rata bumi selalu mencapai rekor terpanas baru. Hal yang sama terjadi juga di Indonesia khususnya kondisi iklim 2018.



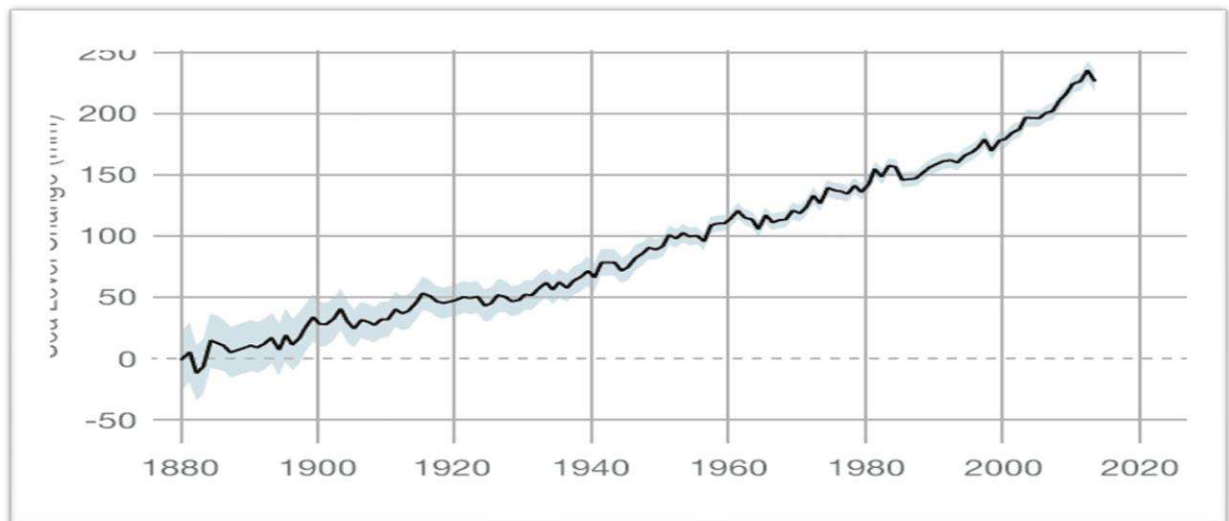
Gambar 2.19
Peningkatan Suhu Bumi

Sumber : National Oceanic and Atmospheric Administration

2. Naiknya Suhu Lautan

Studi yang dilakukan NASA menyebutkan sebagaimana sifat air, lautan juga menyerap panas dari atmosfer. Dampaknya suhu lautan telah meningkat sekitar 0.2 °C dalam kurun waktu 30 tahun terakhir.

3. Kenaikan Tinggi Muka Laut



Gambar 2.20
Tren Kenaikan Tinggi Muka Laut

Sumber: National Aeronautics and Space Administration



Dari gambar grafik tersebut memberikan gambaran terjadinya perubahan iklim kenaikan tinggi muka laut. Kajian R. S Nerem menyebutkan bahwa tinggi muka laut global naik sekitar 20 cm pada abad terakhir.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, merupakan Provinsi yang dianugrahi dengan kekayaan tambang timahnya. Dari zaman penjajahan Belanda, timah di Provinsi ini telah ditambang hingga saat ini pun penambangan timah tetap berlangsung secara masif. Tentunya, penambangan memberikan dampak yang buruk bagi keberlangsungan sebuah ekosistem dan sekaligus penghilangan terhadap keanekaragaman hayati. Regulasi telah banyak dikeluarkan, namun belum berpihak pada kelestarian ekosistem. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki berbagai macam ekosistem, baik itu ekosistem teresterial, ekosistem air tawar, ekosistem estuari, maupun ekosistem laut. Dalam rangka untuk memitigasi kerusakan ekosistem dan kehilangan keanekaragaman hayati, maka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui DLHK menjalankan suatu kegiatan inventarisasi kawasan ekosistem esensial. Luas wilayah Kabupaten Bangka Selatan seluas 359.728,60 ha. Sedangkan luas kawasan hutan menurut nomor 6614/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 di wilayah Kabupaten Bangka Selatan seluas 132.838,97 ha. Yang terdiri dari Hutan Lindung 25.740,72 ha, Hutan Produksi 103.951,85 ha, Taman Wisata Alam 3.146,39 ha. Keberadaan Kawasan Ekosistem Esensial di luar Kawasan Suaka Alam dan atau Kawasan Pelestarian Alam, memiliki nilai penting secara ekologis mampu menunjang kelangsungan kehidupan melalui upaya konservasi keanekaragaman hayati untuk kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia yang ditetapkan sebagai kawasan yang dilindungi.

Beberapa kriteria Kawasan Ekosistem Esensial adalah Ekosistem Lahan Basah, Koridor Hidupan Liar, Areal Bernilai Konservasi Tinggi dan Taman Kehati. Lahan basah memiliki nilai ekonomi sangat penting bagi penduduk yang tinggal di sekitarnya melalui produksi sumber daya alam hayati seperti ikan, padi, tanaman obat, kayu hutan, serta sebagai sarana transportasi. Dari aspek ekologi, lahan basah berfungsi sebagai pelestari sistem tata air sehingga dapat mencegah banjir, erosi, dan intrusi air laut, pencemaran, dan berperan sebagai pengendali iklim global, serta sebagai habitat flora dan fauna yang penting bagi kekayaan keanekaragaman plasma nutfah dunia. Selain hal tersebut di atas, ekosistem lahan basah juga memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi sarana wisata alam. Keberadaan ekosistem tersebut menjadi unik dan khas karena memiliki nilai keanekaragaman hayati yang tinggi, namun berada di luar sistem kawasan konservasi, baik Kawasan Suaka Alam ataupun Kawasan Pelestarian Alam. Namun ekosistem tersebut juga menghadapi tekanan yang sangat tinggi dengan berbagai kompleksitas dalam pengelolaan, sehingga perlu didorong upaya konservasinya. Indonesia memiliki sekitar 47 jenis ekosistem alami khas yang mencakup interaksi antara lingkungan fisik, biologis dan manusia yang merupakan komponen hayati dan nir-hayati (Cherret, 1989). Ekosistem



terrestrial dengan keragaman jenis flora dan fauna tinggi serta khas atau endemik ternyata tidak hanya terdapat di kawasan lindung tetapi juga ditemukan di kawasan budidaya, untuk itu perlu segera dilakukan penetapan suatu habitat sebagai ekosistem esensial terestrial. Ekosistem esensial terestrial perlu dikelola secara bersama antara instansi terkait dalam hal ini Kementerian Kehutanan, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kota dan Kabupaten serta masyarakat lokal untuk memetakan dan membatasi kawasan secara bersama dilanjutkan dengan melakukan perencanaan pengelolaan. Kegiatan pengelolaan kawasan tersebut selanjutnya didasarkan pada *ecopopulism* dimana masyarakat lokal diberdayakan untuk mengembangkan kegiatannya tanpa merusak ekosistem dan komponen-komponennya. Pemberdayaan masyarakat nelayan dan pesisir tidak semata pada ekonomi, tetapi juga penguatan posisi politik mereka melalui penjaminan hak-hak agar mampu mengartikulasikan dan mempertahankan kepentingannya dalam setiap kontestasi. Hal ini tentunya menjadi modal dasar yang sangat luar biasa, bagaimana Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan menjadikan Kawasan Ekosistem Esensial ini menjadi benteng utama pembangunan pariwisata berkelanjutan (*Sustainable Tourism Development*).

Kabupaten Bangka Selatan yang merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terbentuk pada tahun 2003 terbagi menjadi 8 (delapan) Kecamatan dan memiliki total keseluruhan sebanyak 59 pulau. Oleh sebab itu secara geografis Kabupaten Bangka Selatan kaya akan sumber daya kelautan dan perikanan serta pesisir. Hal ini memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi perekonomian masyarakat dan daerah. Eksploitasi atau pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Bangka Selatan harus dapat diminimalisir dampak negatifnya sehingga tidak menimbulkan kerugian terhadap kondisi perairan dan tanpa mengabaikan kondisi daya dukung lingkungan serta ekosistem yang ada. Tindakan konservasi merupakan langkah yang tepat dan selaras dengan konsep tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Kabupaten Bangka Selatan memiliki berbagai macam ekosistem, baik itu ekosistem terestrial, ekosistem air tawar, ekosistem estuari, maupun ekosistem laut. Dalam rangka untuk upaya pengendalian perubahan iklim dilakukan melalui aksi mitigasi untuk menghindari kerusakan ekosistem dan kehilangan keanekaragaman hayati, maka Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan melalui Keputusan Bupati Bangka Selatan telah menetapkan hampir sebagian besar pulau-pulau kecil yang ada di Kecamatan Lepar dan Kecamatan Kepulauan Pongok dengan luasan kurang lebih 23.000 hektar menjadi Kawasan Ekosistem Esensial Lahan Basah Mangrove, sekaligus juga telah menetapkan pengelola Kawasan Ekosistem Esensial yang terdiri dari unsur-unsur instansi Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa dan kelompok atau komunitas masyarakat dengan konsep pemberdayaan. Kawasan Ekosistem Esensial memberikan peluang kerjasama Pemerintah, swasta dan masyarakat untuk mengidentifikasi apa peluang-peluang produksi untuk peningkatan ekonomi, dan peluang untuk

menjaga lingkungan. Partisipasi pelaku usaha dan dukungan organisasi internasional dalam mewujudkan Kawasan Ekosistem Esensial menjadi salah satu upaya mencapai target *green growth* yang diinginkan Pemerintah. Kawasan Ekosistem Esensial ini berpotensi untuk membangun dari sisi ekosistem dan ekonomi masyarakat. Kawasan Ekosistem Esensial perlu memasukkan kriteria nilai stok karbon tinggi dan mengadopsi metodologinya. Selain itu, membangun Kawasan Ekosistem Esensial dan rencana aksi tematik yang disepakati, dan mengidentifikasi sumber pendanaan untuk implementasi rencana aksi tersebut.

2.1.6. Aspek Demografi

Kondisi demografi suatu daerah secara umum tercermin melalui Jumlah Penduduk dan Struktur Umur Penduduk, Dinamika dan Laju Pertumbuhan Penduduk, serta Distribusi atau Sebaran Penduduk.

2.1.6.1. Jumlah dan Struktur Umur Penduduk

Pada tahun 2023 Kabupaten Bangka Selatan berdasarkan Data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan memiliki jumlah penduduk 210.344 jiwa, dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 108.392 jiwa dan perempuan berjumlah 101.942 jiwa. Berdasarkan struktur umur dapat dilihat pada berikut :

Tabel 2.37
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0-4	8.468	8.060	16.528
5-9	8.154	7.854	16.008
10 -14	8.739	8.263	17.002
15-19	9.370	8.662	18.032
20-24	9.426	8.819	18.245
25-29	9.312	8.842	18.154
30-34	9.371	8.994	18.365
35-39	9.201	8.743	17.944
40-44	8.310	7.817	16.127
45-49	7.419	7.002	14.421
50-54	6.402	5.909	12.311



Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
55-59	5.220	4.731	9.951
60-64	3.917	3.411	7.328
65-69	2.455	2.202	4.657
70-74	1.405	1.350	2.755
75 +	1.223	1.283	2.506
Jumlah	108.392	101.942	210.334

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan, 2024

Dari tabel diatas dapat kita lihat pada tahun 2023 jumlah total penduduk laki-laki lebih banyak dari perempuan, bila menghitung dari usia produktif dari 15-64 tahun jumlah penduduk laki-laki sebanyak 77.948 orang dan 72.930 orang perempuan atau secara total terdapat 150.878 orang di Kabupaten Bangka Selatan dalam usia produktif yang mampu menghasilkan barang maupun jasa dalam proses produksi.

2.1.6.2. Dinamika Penduduk

Dinamika penduduk adalah pertumbuhan jumlah penduduk yang merupakan keseimbangan antara penyebab adanya pengurangan penduduk dan juga penambahan penduduk. Salah satu faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk adalah faktor kelahiran. Rata-rata jumlah anak per keluarga merupakan tolak ukur untuk mengetahui angka kelahiran.

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) mencerminkan tingkat pertumbuhan penduduk Kabupaten Bangka Selatan. Berkenaan dengan angka pertumbuhan penduduk, kriteria laju pertumbuhan penduduk dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu :

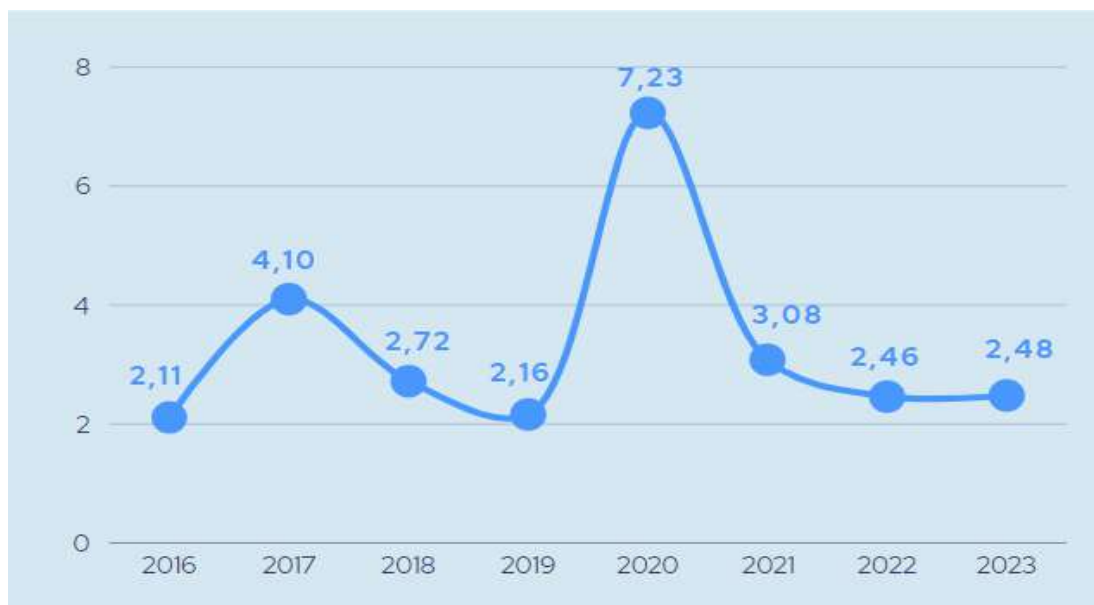
1. Laju pertumbuhan cepat, apabila angka pertumbuhan penduduk mencapai lebih dari 2 persen setiap tahunnya;
2. Laju pertumbuhan sedang, apabila angka pertumbuhan penduduk berkisar antara 1-2 persen setiap tahunnya;
3. Laju pertumbuhan lambat, apabila angka pertumbuhan penduduk kurang dari 1 persen setiaptahunnya.

Pencapaian Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 2023 lebih tinggi dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2022. Adapun Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Bangka Selatan selama 8 (delapan) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini :

Tabel 2.38
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016-2023

No.	Tahun	Jumlah	Laju Pertumbuhan Penduduk
1	2016	165.912	2,11
2	2017	172.707	4,10
3	2018	177.402	2,72
4	2019	181.233	2,16
5	2020	194.342	7,23
6	2021	200.325	3,08
7	2022	205.253	2,46
8	2023	210.344	2,48

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan, 2024



Gambar 2.21
Grafik Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016-2023
 Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan, 2024

Dengan pencapaian LPP sebesar 2,48 persen maka tingkat pengendalian kuantitas penduduk Bangka Selatan pada tahun 2023 termasuk dalam kategori cepat. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Bangka Selatan selama 8 (delapan) tahun terakhir bersifat fluktuatif. Kebijakan Pemerintah daerah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk dengan

adanya program Keluarga Berencana (KB) belum berjalan dengan baik. Jika dilihat pada tahun 2019 pertumbuhan penduduk Kabupaten Bangka Selatan di angka 2,59 persen atau dalam kriteria LPP tinggi, di tahun 2020 terjadi lonjakan Pertumbuhan Penduduk sebesar 7,23 persen namun senantiasa mengalami penurunan sampai dengan tahun 2022 diangka 2,46 persen atau namun masih dalam kriteria LPP cepat. Sedangkan pada tahun 2023 mengalami kenaikan kembali diangka 2,48 persen atau tetap dalam LPP kriteria cepat.

2.1.6.3. Distribusi/Persebaran Penduduk

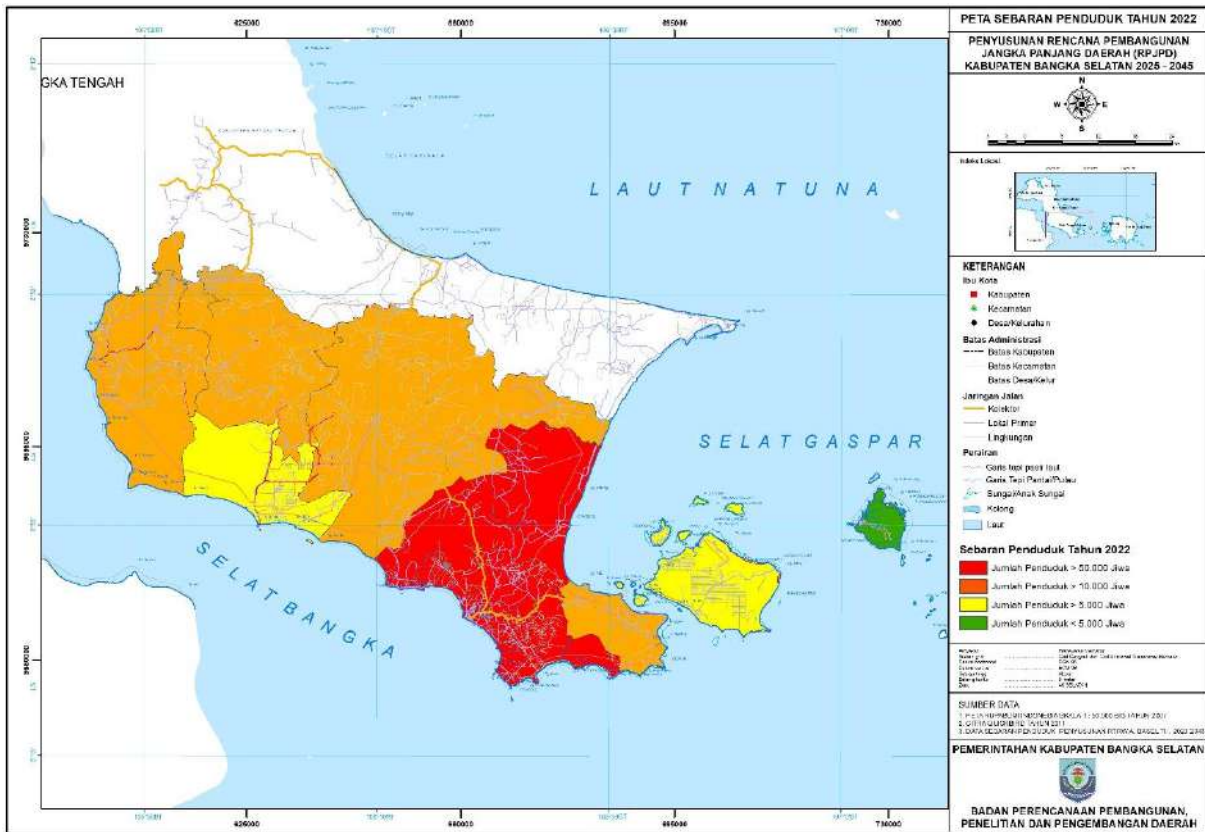
Penduduk Kabupaten Bangka Selatan tersebar di 8 (delapan) wilayah Kecamatan yang terdiri dari 50 (lima puluh) Desa dan 3 (tiga) Kelurahan. Adapun persebaran penduduk di Wilayah Kabupaten Bangka Selatan berdasarkan Kecamatan lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.39
Jumlah Penduduk Kabupaten Bangka Selatan
Menurut Kecamatan Tahun 2016-2023

No.	Tahun	Payung	Pulau Besar	Simpang Rimba	Toboali	Tukak Sadai	Airgegas	Lepar	Kep. Pongok	Jumlah
1	2016	18.884	8.215	19.310	62.882	10.424	34.979	6.474	4.744	165.912
2	2017	19.146	8.755	19.540	66.612	10.984	36.261	6.659	4.750	172.707
3	2018	19.328	8.533	20.295	68.355	11.325	37.655	7.155	4.756	177.402
4	2019	19.658	8.699	21.092	70.519	11.621	38.162	7.527	3.955	181.233
5	2020	20.595	9.317	23.128	75.859	12.595	40.835	7.833	4.180	194.342
6	2021	20.993	9.591	24.048	78.366	13.012	42.084	7.990	4.241	200.325
7	2022	21.331	9.799	24.857	80.702	13.384	42.888	8.089	4.203	205.253
8	2023	21.704	10.025	25.920	82.938	13.707	43.644	8.144	4.262	210.344

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan, 2024

Persebaran penduduk berdasarkan Kecamatan pada tahun 2023, jumlah penduduk yang paling banyak berada di wilayah Kecamatan Toboali sebagai ibu Kota Kabupaten Bangka Selatan yaitu sebanyak 82.938 jiwa dengan luas wilayah 1.460,34 km², diikuti Kecamatan Aigegas dengan jumlah penduduk 43.644 jiwa, Kecamatan Simpang Rimba sebanyak 25.920 jiwa, Kecamatan Payung berjumlah 21.704 jiwa, Kecamatan Tukak Sadai berjumlah 13.707 jiwa, diikuti Kecamatan Pulau Besar sebanyak 10.025 jiwa, Kecamatan Lepar sebanyak 8.144 jiwa dan jumlah penduduk paling sedikit berada di wilayah Kecamatan Kepulauan Pongok dengan jumlah penduduk sebanyak 4.262 jiwa dengan luas wilayah 89,67 km². Berikut peta sebaran penduduk per Kecamatan :



Gambar 2.22
Peta Sebaran Penduduk Per Kecamatan
 Sumber : Data Sebaran Penduduk Dokumen RTRW Kab. Bangka Selatan 2023-2043

2.1.6.4. Rasio Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk

Rasio jenis kelamin dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah penduduk pria dan jumlah penduduk wanita pada suatu daerah dan pada waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk pria per 100 wanita. Sedangkan kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk rata-rata yang menempati wilayah seluas 1 km², berikut Rasio Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Bangka Selatan dari Tahun 2012-2023 :

Tabel 2.40
Rasio Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2012-2023

Tahun	Luas Wilayah	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km)	Rasio Jenis Kelamin
2012	3.607,08	50	107,55
2013	3.607,08	51	107,78
2014	3.607,08	53	107,80
2015	3.607,08	54	108,01
2016	3.607,08	55	108,04



Tahun	Luas Wilayah	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km)	Rasio Jenis Kelamin
2017	3.607,08	56	108,19
2018	3.607,08	57	108,17
2019	3.607,08	58	108,37
2020	3.607,08	59	108,19
2021	3.607,08	55	107,00
2022	3.607,08	55	107,00
2023	3.607,08	56	106,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan, 2024

2.1.6.5. Rasio ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Yang termasuk penduduk usia produktif adalah penduduk yang berusia 15-64 tahun, sedangkan yang dikategorikan sebagai penduduk usia non produktif adalah penduduk berusia dibawah 15 tahun (karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya) dan penduduk berusia diatas 65 tahun (karena umunya sudah melewati masa pensiun).

Tabel 2.41
Rasio Ketergantungan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014-2023

TAHUN	URAIAN	JUMLAH PENDUDUK USIA				RASIO KETERGANTUNGAN(persen)
		PENDUDUK USIA KETERGANTUNGAN		USIA PRODUKTIF		
		<15 tahun	>64 tahun	JUMLAH	15-64 tahun	
2014	Laki-laki	23.184	2.953	26.137	58.377	44,77
	Perempuan	21.791	2.419	24.210	54.789	44,19
	Jumlah (L+P)	44.975	5.372	50.347	113.166	44,49
2015	Laki-laki	26.606	2.815	29.421	55.000	53,49
	Perempuan	25.039	2.152	27.191	52.462	51,83
	Jumlah (L+P)	51.645	4.967	56.612	107.462	52,68
2016	Laki-laki	24.500	3.107	27.607	57.801	47,76
	Perempuan	22.814	2.489	25.303	54.580	46,36
	Jumlah (L+P)	47.314	5.596	52.910	112.381	47,08
2017	Laki-laki	25.708	2.943	28.651	59.986	47,76
	Perempuan	23.911	2.526	26.437	56.910	46,45
	Jumlah (L+P)	49.619	5.469	55.088	116.896	47,13
2018	Laki-laki	24.117	3.354	27.471	63.412	43,32
	Perempuan	22.465	2.754	25.219	60.556	41,65
	Jumlah (L+P)	46.582	6.108	52.690	123.968	42,50
2019	Laki-laki	24.292	3.737	28.029	65.220	42,98
	Perempuan	22.707	3.141	25.848	62.136	41,60

TAHUN	URAIAN	JUMLAH PENDUDUK USIA				RASIO KETERGANTUNGAN (persen)
		PENDUDUK USIA KETERGANTUNGAN		USIA PRODUKTIF		
		<15 tahun	>64 tahun	JUMLAH	15-64 tahun	
	Jumlah (L+P)	46.999	6.878	53.877	127.356	42,30
2020	Laki-laki	27.363	3.567	30.930	69.118	44,75
	Perempuan	25.405	3.223	28.628	65.666	43,60
	Jumlah (L+P)	52.768	6.790	59.558	134.784	44,19
2021	Laki-laki	28.199	3.805	32.004	71.065	45,03
	Perempuan	26.142	3.542	29.684	67.752	43,92
	Jumlah (L+P)	54.341	7.347	61.688	138.637	44,50
2022	Laki-laki	26.372	5.370	31.742	74.504	46,60
	Perempuan	24.506	5.008	29.514	70.601	41,80
	Jumlah (L+P)	50.878	10.378	61.256	145.105	42,20
2023	Laki-laki	28.576	5.241	33.817	74.560	45,40
	Perempuan	26.549	3.865	30.414	71.553	42,50
	Jumlah (L+P)	55.125	9.106	64.231	146.113	43,96

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan, 2024

Rasio Ketergantungan atau *Dependency Ratio* (DR) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *Dependency Ratio* menunjukkan semakin tingginya beban Sumber yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *Dependency Ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Pada tahun 2023, angka *Dependency Ratio* untuk Kabupaten Bangka Selatan adalah sebesar 43,96 persen yang artinya bahwa dari 100 penduduk usia produktif menanggung sebanyak 44 orang penduduk usia non produktif, angka *Dependency Ratio* pada tahun 2023 menunjukkan kenaikan dari tahun sebelumnya, yang berarti bahwa meningkatnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi di tahun 2023. Selain itu bahwa angka *Dependency Ratio* laki-laki lebih tinggi dibandingkan angka *Dependency Ratio* perempuan, yang berarti bahwa beban tanggungan penduduk perempuan usia produktif lebih rendah dibandingkan laki-laki.

2.2. Aspek Kesejahteraan Sosial dan Budaya

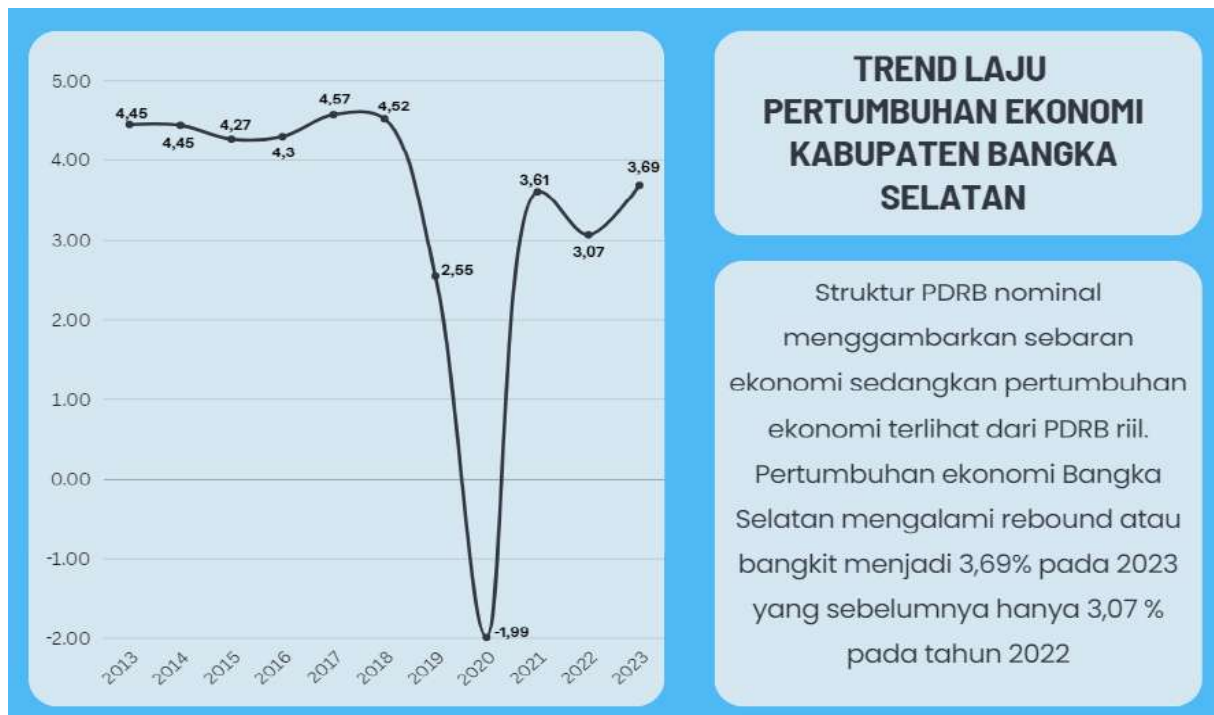
2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

Adapun untuk menghitung capaian indikator kinerja daerah Kabupaten Bangka Selatan Sesuai RPJMD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021-2026 dan RPJPD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025-2045 dengan Kesejahteraan ekonomi dianalisa berdasarkan capaian indikator Laju Pertumbuhan PDRB, Laju Inflasi, Indeks Gini/Indeks Ketimpangan Pendapatan,

Indeks Ketimpangan Williamson, Tipologi Klasen, Persentase Penduduk Miskin, Kemiskinan Ekstrem, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia.

2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB

Pembangunan ekonomi diarahkan pada pembangunan inklusif, yang menitikberatkan pada pertumbuhan tanpa disparitas antar wilayah dan ketidaksetaraan sosial. Konsep pertumbuhan dalam pembangunan inklusif mengacu pada suatu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan juga strategi untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dan sosial dengan menyediakan kesempatan bagi orang/kelompok yang terpinggirkan dan rentan untuk berkontribusi pada proses pembangunan. Dengan demikian peluang ekonomi yang dihasilkan harus dapat dinikmati atau terdistribusi ke semua lapisan masyarakat termasuk kaum miskin termarjinalkan.



Gambar 2.23
Laju Perekonomian Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2013-2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan, 2024

Selama kurun waktu tahun 2013-2023, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Selatan cenderung menurun. Pertumbuhan ekonomi provinsi/kabupaten/kota diukur dari pertumbuhan pada pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional diukur dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang juga dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang



dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Pertumbuhan yang positif menggambarkan bahwa perekonomian mengalami kemajuan dibandingkan tahun sebelumnya, sebaliknya pertumbuhan yang negatif menggambarkan bahwa perekonomian mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Jika dilihat dari laju perekonomiann Kabupaten Bangka Selatan berdasarkan gambar grafik tersebut, terlihat bahwa dari tahun 2013-2018 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Selatan mengalami perlambatan. Pada tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu pada tahun 2019 dari 2,55 menjadi -1,99 pada tahun 2020. Kondisi ini biasa disebut sebagai perlambatan dalam pertumbuhan ekonomi. Penurunan ini disebabkan oleh lesunya perekonomian sebagai akibat dari memburuknya perekonomian global sehingga terjadi penurunan permintaan beberapa komoditas lokal seperti lada, karet dan kelapa sawit serta melemahnya keadaan perekonomian daerah sebagai efek yang ditimbulkan karena keadaan daerah yang kurang stabil pada masa pandemi *covid-19*. Namun pada tahun 2021, laju pertumbuhan ekonomi kembali menggeliat sehingga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Laju PDRB pada tahun 2022 sebesar 3,07 persen. Untuk tahun 2023 Laju PDRB sebesar 3,69 persen.

2.2.1.2. Laju Inflasi

Angka inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Perkembangan harga barang dan jasa ini berdampak langsung terhadap tingkat daya beli dan biaya hidup masyarakat, perubahan nilai aset dan kewajiban serta nilai kontrak/transaksi bisnis. Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi yang merupakan indikator pergerakan antara permintaan dan penawaran di pasar riil juga terkait erat dengan perubahan tingkat suku bunga, produktivitas ekonomi, nilai tukar rupiah dengan valuta asing, indeksasi anggaran dan parameter ekonomi makro lain. Oleh karena itu, masyarakat, pelaku bisnis, kalangan perbankan dan Pemerintah sangat berkepentingan terhadap perkembangan inflasi.

Inflasi diperlukan untuk mendorong perekonomian menjadi lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung, dan mengadakan investasi. Akan tetapi, tingkat inflasi yang berfluktuasi tinggi mengakibatkan besarnya ketidakpastian nilai uang, tingkat produksi, distribusi dan arah perkembangan ekonomi sehingga dapat menimbulkan ekspektasi yang keliru yang dapat mengganggu stabilitas perekonomian secara keseluruhan. Sebaliknya, inflasi yang terlalu rendah juga tidak menguntungkan perekonomian karena menggambarkan rendahnya daya beli dan permintaan masyarakat akan barang dan jasa yang pada gilirannya dapat memperlambat pertumbuhan



ekonomi. Dalam teori kuantitas, inflasi terjadi karena adanya kelebihan permintaan sehingga uang yang beredar di masyarakat bertambah banyak. Selain itu, naik turunnya tingkat inflasi tidak terlepas dari faktor-faktor lain, seperti tata niaga dan kelancaran arus lalu lintas barang serta kebijakan Pemerintah.

Sumber inflasi dibedakan menjadi dua yakni inflasi terjadi karena naiknya permintaan (*demand pull inflation*) dan inflasi yang disebabkan kenaikan biaya produksi (*cost push inflation*). Dilihat dari asal terjadinya, inflasi dapat berasal dari luar negeri, terutama untuk negara-negara yang menganut sistem ekonomi terbuka dan pasar bebas, meningkatnya harga barang-barang impor dari luar negeri meningkatkan harga-harga barang di dalam negeri.

Angka inflasi antara lain dapat digunakan sebagai berikut :

1. Indeksasi upah dan tunjangan gaji pegawai (*Wage-Indexation*);
2. Penyesuaian Nilai Kontrak (*Contractual Payment*);
3. Eskalasi Nilai Proyek (*Project Escalation*);
4. Penentuan Target Inflasi (*Inflation Targeting*);
5. Indeksasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (*Budget Indexation*);
6. Sebagai pembagi Produk Domestik Bruto (PDB), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (*Gross Domestik Produk (GDP) Deflator*);
7. Sebagai proxy perubahan biaya hidup (*Proxy of Cost of Living*);
8. Penyusunan Program/ Kegiatan Pemantauan dan Pengendalian Inflasi.

Laju inflasi di Kabupaten Bangka Selatan menggambarkan indeks harga konsumen yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Tingkat inflasi di Kabupaten Bangka Selatan dalam beberapa tahun terakhir relatif tidak konsisten, atau dengan kata lain cenderung mengalami penurunan dalam kurun waktu tahun 2013-2022, sedangkan dari tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan tidak melakukan penghitungan laju inflasi sehingga laju inflasi berpatokan dengan Kota Pangkalpinang sebagai Kota penghitungan laju inflasi terdekat dari Kabupaten Bangka Selatan. Adapun laju inflasi Kabupaten Bangka Selatan selama tahun 2013-2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

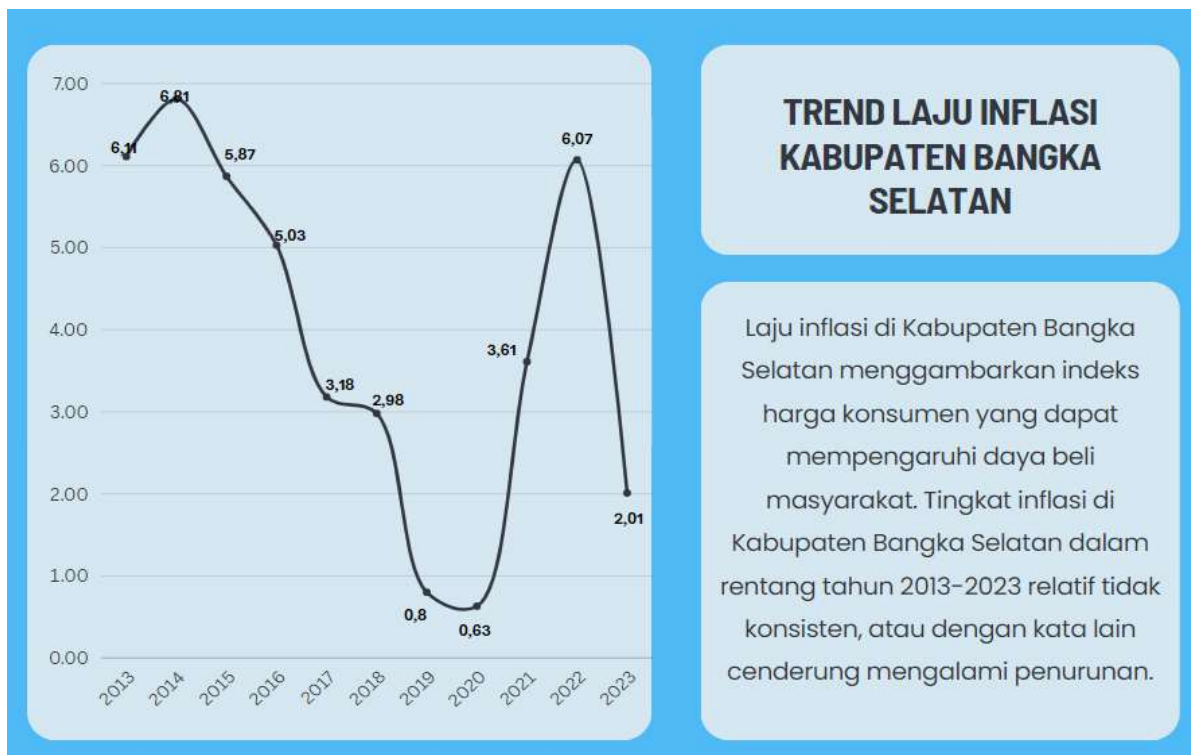
Tabel 2.42
Laju Inflasi Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2013-2023

No.	Tahun	Laju Inflasi
1	2013	6,11
2	2014	6,81
3	2015	5,87
4	2016	5,03
5	2017	3,18
6	2018	2,98

No.	Tahun	Laju Inflasi
7	2019	0,80
8	2020	0,63
9	2021	3,61
10	2022	6,07
11	2023	2,01

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan, 2024

Pada tahun 2016, laju inflasi Kabupaten Bangka Selatan sebesar 5,03 persen, kemudian laju inflasi Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 2017 sebesar 3,18 persen, sedangkan laju inflasi Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 2018 sebesar 2,98 persen. Selanjutnya pada tahun 2019, laju inflasi Kabupaten Bangka Selatan sebesar 0,80 persen atau menurun sebesar 2,18 persen dibandingkan tahun 2018. Dan pada tahun 2020 berada pada inflasi 0,63 persen, sedangkan untuk tahun 2021 laju inflasi sebesar 3,6 persen atau naik 2,97 persen. Sedangkan pada tahun 2022 laju inflasi Kabupaten Bangka Selatan kembali naik menjadi 6,07 persen atau naik 2,46 persen dibandingkan pada tahun 2021. Dan tahun 2023 laju inflasi Kabupaten Bangka Selatan mengalami penurunan menjadi 2,01 persen atau turun 4,06 persen dari tahun sebelumnya.



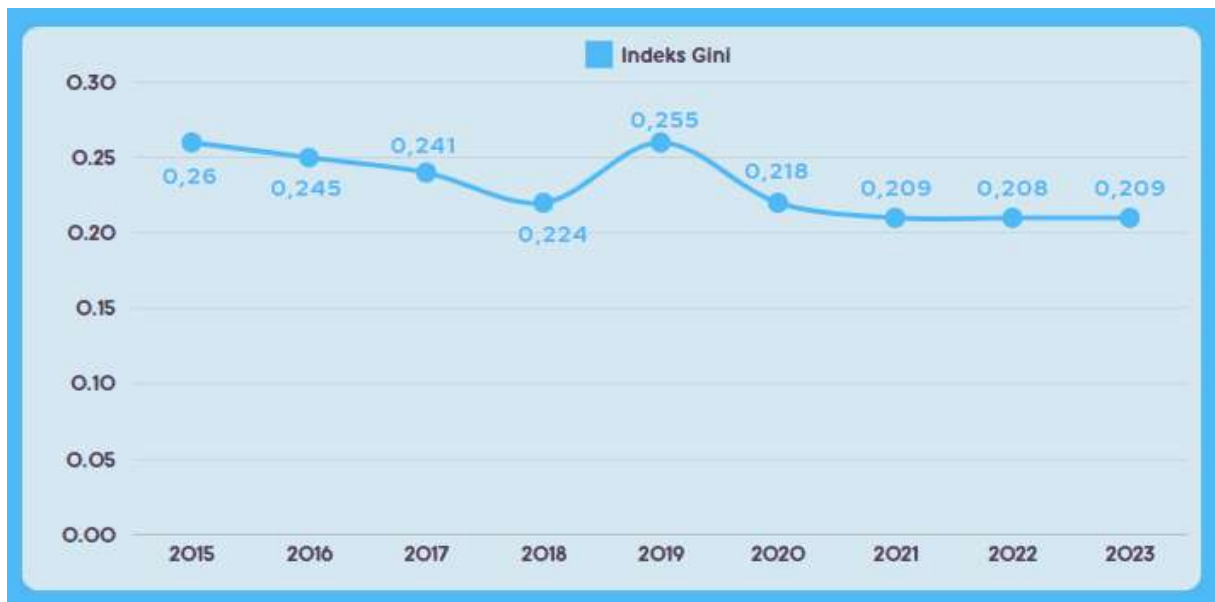
Gambar 2.24
Laju Inflasi Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2013-2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan, 2024

2.2.1.3. Indeks Gini

Penilaian kinerja ekonomi daerah tidak hanya dilihat dari sejauh mana tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk, akan tetapi pemerataan distribusi pendapatan daerah harus menjadi fokus utama dalam melihat tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Ketimpangan distribusi pendapatan antar penduduk yang tinggi dapat menimbulkan masalah- masalah sosial di masyarakat.

Aspek pemerataan pendapatan merupakan salah satu permasalahan yang harus menjadi perhatian dalam pembangunan daerah. Ketimpangan dalam menikmati hasil pembangunan dapat memicu permasalahan sosial di masyarakat. Distribusi pendapatan suatu daerah dapat menentukan bagaimana pendapatan daerah yang tinggi mampu menciptakan perubahan-perubahan dan perbaikan terhadap kondisi sosial masyarakat. Namun apabila distribusi pendapatan tersebut tersebar tidak merata maka kemakmuran hanya akan dinikmati oleh sekelompok golongan tertentu saja sehingga rentan menciptakan kerawanan sosial.



Gambar 2.25
Gini Ratio Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2015-2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan, 2024

Koefisien gini (*gini ratio*) merupakan salah satu ukuran yang sering digunakan untuk menilai tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh di masyarakat. Nilai *gini ratio* berkisar antara dari 0 sampai dengan 1, klasifikasi ketimpangan berdasarkan *gini ratio* dibagi menjadi 3 bagian, *gini ratio* antara 0,5 atau lebih termasuk ke dalam ketimpangan tinggi, nilai *gini ratio* antara 0,40-0,50 termasuk kategori ketimpangan sedang, dan nilai *gini ratio* kurang dari 0,40 termasuk ketimpangan rendah.

Tabel 2.43
Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2015-2023

No.	Tahun	Indeks Gini
1	2015	0,260
2	2016	0,245
3	2017	0,241
4	2018	0,224
5	2019	0,255
6	2020	0,218
7	2021	0,209
8	2022	0,208
9	2023	0,209

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan, 2024

Hasil pengukuran dan penghitungan berdasarkan data Susenas diperoleh hasil bahwa angka Indeks Gini Kabupaten Bangka Selatan mengalami perkembangan yang fluktuatif. Indeks Gini Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 2015 yaitu 0,260. Pada tahun 2016 menurun 0,015 poin menjadi 0,245, sedangkan di tahun 2017 kembali menurun 0,004 poin diangka 0,241. pada tahun 2018 menurun sebanyak 0,017 poin sehingga berada diangka 0,224. Selanjutnya pada tahun 2019 meningkat menjadi 0,255 atau sebesar 0,031 poin dan pada tahun 2020 berada pada angka 0,218 atau mengalami penurunan 0,037 poin jika dibandingkan dengan tahun 2019 namun tidak signifikan, sedangkan untuk tahun 2021 mengalami penurunan 0,009 poin diangka 0,209. untuk di tahun 2022 mengalami penurunan 0,001 poin diangka 0,208. Dan di tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,001 poin menjadi 0,209.

Nilai Indeks Gini Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2013-2023 tersebut berada dibawah angka 0,4. Nilai Indeks Gini yang masih dibawah angka 0,4 menggambarkan bahwa sebenarnya tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Bangka Selatan secara keseluruhan termasuk kategori “ketimpangan rendah” atau dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Bangka Selatan secara keseluruhan cukup merata.

2.2.1.4. Indeks Ketimpangan Williamson

Ketimpangan atau kesenjangan pembangunan antar wilayah di Kabupaten Bangka Selatan masih merupakan tantangan yang harus diselesaikan dalam pembangunan daerah ke depan. Hal ini didasari pada analisis tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah dengan menggunakan metode Indeks Williamson selama 5 (lima) tahun terakhir di Kabupaten Bangka Selatan. Adapun Indeks Williamson tersebut dapat dilihat berdasarkan tabel di bawah ini :



Tabel 2.44
Indeks Williamson Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2019-2023

TAHUN	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Williamson	0,889	0,677	0,625	0,892	0,651

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Bangka Selatan, 2024 (data diolah)

Jika ketimpangan Williamson mendekati 0 maka ketimpangan distribusi pendapatan adalah rendah atau pertumbuhan ekonomi antara daerah merata. Jika ketimpangan Williamson mendekati 1 maka ketimpangan distribusi pendapatan antar daerah adalah tinggi atau pertumbuhan ekonomi antara daerah tidak merata. Berdasarkan data maka kesenjangan antar wilayah di Kabupaten Bangka Selatan cukup rendah. Hal ini diindikasikan dengan rata-rata Indeks Williamson sebesar 0,747 dari tahun 2019-2023.

2.2.1.5. Tipologi Klassen

Analisis kesenjangan wilayah yang dilakukan dapat diperkuat dengan melakukan analisis Tipologi Klassen. Analisis ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing Kecamatan di Kabupaten Bangka Selatan. Berdasarkan Tipologi Klassen Kecamatan dibedakan menjadi empat klasifikasi, yaitu : daerah cepat-maju dan cepat-tumbuh (*high growth and high income*), daerah maju tapi tertekan (*high income but low growth*), daerah berkembang cepat (*high growth but low income*), dan daerah relatif tertinggal (*low growth and low income*). Kriteria yang digunakan untuk membagi daerah Kecamatan dalam analisis ini adalah sebagai berikut :

- Daerah cepat maju dan cepat tumbuh, yaitu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan yang lebih tinggi dibanding rata-rata Kabupaten.
- Daerah maju tapi tertekan, yaitu daerah yang memiliki pendapatan perkapita lebih tinggi, tetapi tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah dibanding dengan rata-rata Kabupaten.
- Daerah berkembang adalah yaitu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi, tetapi tingkat pendapatan perkapita lebih rendah dibanding rata-rata Kabupaten.
- Daerah relatif tertinggal yaitu adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan dan pendapatan perkapita yang lebih rendah dibanding dengan rata-rata Kabupaten

Ada beberapa indikator dalam penghitungan Tipologi Klasen, yaitu PDRB per Kapita Kabupaten dan Kecamatan serta Laju Pertumbuhan Perekonomian/PDRB Kabupaten Bangka Selatan, di tahun 2023 PDRB Per Kapita Kabupaten Bangka Selatan sebesar Rp. 54.064.000,- dan Laju Pertumbuhan PDRB sebesar 3,69 persen. Adapun hasil analisis Tipologi Klassen Per



Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.45
Tipologi Klassen Per Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023

Kecamatan	PDRB Per Kapita (Juta Rp)	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kecamatan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten	Kuadran	Keterangan
Payung	52.964	5,60	3,69	II	Daerah Maju
Pulau Besar	54.858	6,17	3,69	I	Daerah Cepat Maju
Simpang Rimba	58.693	8,22	3,69	I	Daerah Cepat Maju
Toboali	54.475	6,66	3,69	I	Daerah Cepat Maju
Tukak Sadai	55.059	6,29	3,69	I	Daerah Cepat Maju
Airgegas	53.530	5,61	3,69	II	Daerah Maju
Lepar	43.661	4,49	3,69	II	Daerah Maju
Kep. Pongok	43.791	5,24	3,69	II	Daerah Maju

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Bangka Selatan, 2024 (data diolah)

Berdasarkan analisis Tipologi Klassen yang dilakukan, dari 8 (delapan) wilayah Kecamatan yang termasuk Kuadran I yaitu Kecamatan Toboali, Simpang Rimba, Tukak Sadai dan Pulau Besar, Kecamatan ini termasuk Daerah cepat maju dan cepat tumbuh, yaitu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan yang lebih tinggi dibanding rata-rata Kabupaten, kemudian yang termasuk kategori Kuadran II yaitu Kecamatan Airgegas, Lepar, Payung dan Kepulauan Pongok yang masuk klasifikasi Daerah maju tapi tertekan, yaitu daerah yang memiliki pendapatan perkapita lebih tinggi, tetapi tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah dibanding dengan rata-rata Kabupaten, Toboali, Airgegas, dan Payung. Sebagai Ibu Kota Kabupaten, Kota Toboali berada di kuadran I. Meskipun analisis Tipologi Klassen tersebut baru tersedia data untuk dianalisis pada tahun 2023, kondisi ini setidaknya menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan untuk lebih mengoptimalkan upaya pemerataan pertumbuhan ekonomi diseluruh Kecamatan setiap tahunnya.

2.2.1.6. Persentase Penduduk Miskin

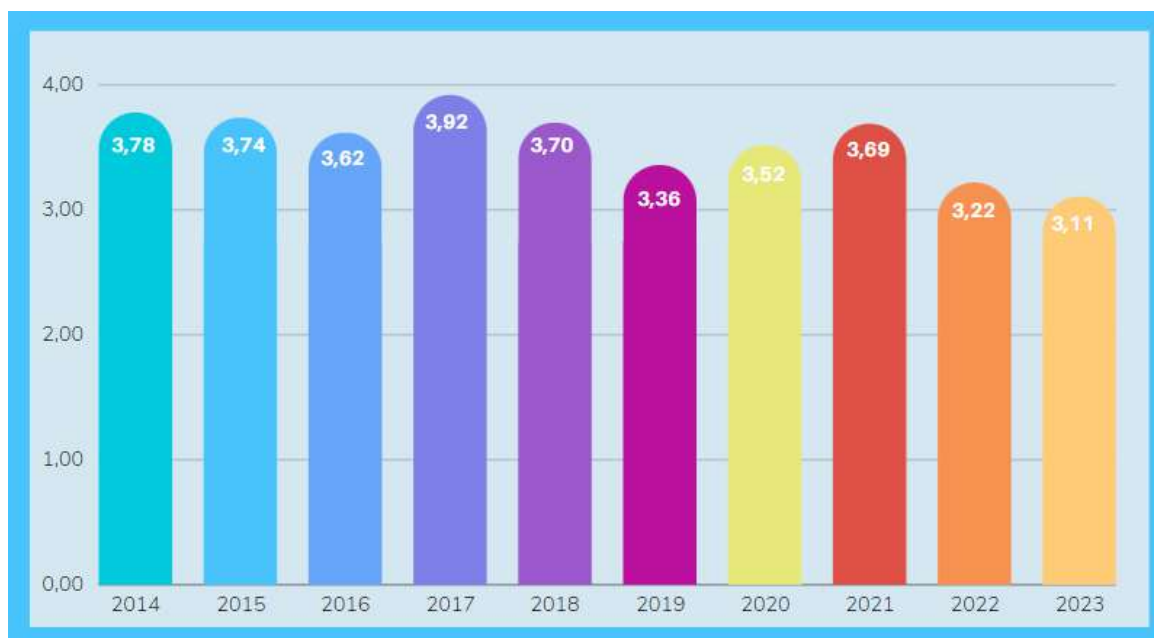
Salah satu masalah sosial serius di Indonesia yang disebabkan oleh faktor ekonomi adalah kemiskinan. Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan. Sedangkan

penduduk miskin adalah penduduk yang berada di bawah suatu batas atau disebut sebagai garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan nilai rupiah yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan hidup minimum makanan maupun kebutuhan hidup minimum non-makanan.

Tabel 2.46
Persentase Penduduk Miskin
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2023

No	Kab/Kota/Prov	Persentase Penduduk Miskin (Persen)									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kabupaten Bangka Barat	3,15	3,08	2,74	2,98	3,05	2,67	2,7	2,75	2,46	2,71
2	Kabupaten Bangka Selatan	3,87	3,74	3,62	3,92	3,7	3,36	3,52	3,69	3,22	3,11
3	Kota Pangkalpinang	4,04	4,97	5,02	4,8	4,95	4,25	4,36	4,76	4,55	4,27
4	Kabupaten Bangka	5,2	5,63	5,52	5,1	5,47	4,92	4,51	4,81	4,26	4,32
5	Kabupaten Bangka Tengah	5,27	5,67	5,64	6,07	5,81	5,02	4,85	5,13	4,86	5,29
6	Kabupaten Belitung	7,36	8,38	7,85	7,77	7,56	6,29	6,27	7,15	6,45	6,46
7	Kabupaten Belitung Timur	6,68	7,33	6,99	6,81	7,06	6,6	6,52	7,2	6,49	6,73
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		4,97	4,83	5,22	5,2	5,25	4,62	4,53	4,9	4,45	4,52

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan, 2024



Gambar 2.26
Grafik Penduduk Miskin Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014-2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan, 2024

Dari tabel dan grafik diatas diketahui bahwa penduduk miskin di Kabupaten Bangka Selatan dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kurun



waktu tahun 2013-2022 konsisten berada pada posisi paling rendah kedua setelah Kabupaten Bangka Barat. Selain itu penduduk miskin Kabupaten Bangka Selatan lebih rendah ataupun lebih baik dari pada rata-rata persentase penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara keseluruhan. Tren persentase penduduk miskin Kabupaten Bangka Selatan dengan tahun awal tahun 2014 pada angka 3,87 persen dan pada akhir tahun 2023 berada pada angka 3,11 persen menunjukkan kecenderungan menurun. Namun jika dibandingkan setiap tahun angka kemiskinan Kabupaten Bangka Selatan fluktuatif. Pada tahun 2014 menurun menjadi 3,87 persen. Pada tahun 2015 menurun menjadi 3,74 persen. Pada tahun 2016 menurun menjadi 3,62 persen. Pada tahun 2017 meningkat menjadi 3,92 persen. Pada tahun 2018 menurun menjadi 3,70 persen dan kembali menurun menjadi 3,36 persen ditahun 2019. Selanjutnya untuk 2 (dua) tahun berikutnya mengalami kenaikan jumlah penduduk miskin tahun 2020 meningkat menjadi 3,52 persen. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 3,69 persen. Dan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 3,22 persen. Sedangkan untuk tahun 2023 penurunan kembali menjadi 3,11 persen.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah menyangkut seberapa besar jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan (tingkat kedalaman) yang disebut sebagai P1 dan keragaman pengeluaran antar penduduk miskin (P2). Bila dilihat perkembangannya selama periode 2013-2022, jumlah penduduk miskin, garis kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Bangka Selatan berfluktuatif dan cenderung naik apabila dibandingkan antara tahun awal 2013 dengan tahun akhir tahun 2022.

Tabel 2.47
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahahan Kemiskinan (P2)
Kabupaten Bangka Selatan, 2014-2023

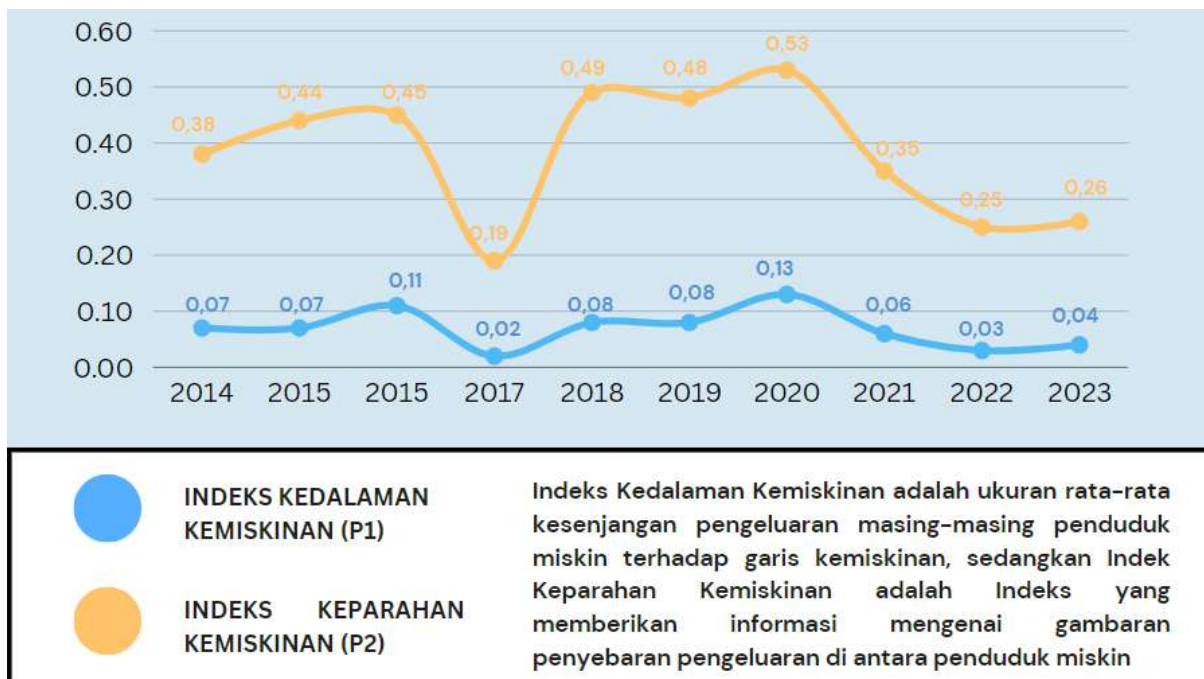
Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (000)	Persentase Penduduk Miskin (persen)	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahahan Kemiskinan (P2)
2014	7,39	3,87	364.504	0,38	0,07
2015	7,22	3,74	374.778	0,44	0,07
2016	7,11	3,62	415.359	0,45	0,11
2017	7,88	3,92	462.716	0,19	0,02
2018	7,58	3,7	483.823	0,49	0,08
2019	7,02	3,36	523.155	0,48	0,08
2020	7,49	3,52	561.617	0,53	0,13
2021	7,72	3,69	581.970	0,35	0,06



Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (000)	Persentase Penduduk Miskin (persen)	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
2022	6,81	3,22	621.629	0,25	0,03
2023	6,66	3,11	669.016	0,26	0,04

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan, 2024

Berdasarkan tabel diatas, selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2023 garis kemiskinan mengalami peningkatan, dari Rp. 364.504,- per kapita per bulan pada tahun 2014 meningkat menjadi Rp. 669.016,- per kapita per bulan pada tahun 2023. Sementara itu, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,01 poin menjadi 0,26 dibanding tahun 2022 yang sebesar 0,25. Demikian halnya dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami kenaikan yakni sebesar 0,01 poin yang semula tahun 2022 sebesar 0,03 menjadi 0,04 pada tahun 2023. Kenaikan kedua indeks yakni P1 dan P2 memberikan indikasi bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung menjauhi garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin bisa semakin melebar.



Gambar 2.27
Grafik Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Bangka Selatan, 2014-2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan, 2024

Adapun data masyarakat miskin menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Selatan disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.48
Penduduk Miskin Per Kecamatan Kabupaten Bangka Selatan
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tahun 2022 dan 2023

NO	KECAMATAN	2022				2023			
		RUMAH TANGGA		KEPALA KELUARGA		RUMAH TANGGA		KEPALA KELUARGA	
		JUMLAH (RT)	persen	JUMLAH (RT)	persen	JUMLAH (KK)	persen	JUMLAH (KK)	persen
1	Toboali	12.804	35,88	5.269	35,88	12.054	36,22	5.268	38,91
2	Airgegas	6.770	18,97	2.742	18,67	6.137	18,44	2.726	18,84
3	Payung	4.235	11,86	1.731	11,78	4.027	12,10	1.691	11,70
4	Pulau Besar	2.620	7,34	1.107	7,53	2.503	7,52	1.076	7,44
5	Tukak Sadai	2.723	7,63	1.094	7,45	2.865	8,61	1.166	8,06
6	Simpang Rimba	2.836	7,94	1.273	8,66	2.532	7,60	1.209	8,35
7	Kepulauan Pongok	2.049	5,74	730	4,97	1.613	4,85	615	4,35
8	Lepar	1.644	4,60	737	5,01	1.544	4,65	711	4,91
Kabupaten Bangka Selatan		35.681	100	14.683	100	33.275	100	14.462	100

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Selatan, 2023

Berdasarkan data pada tabel diatas, pada tahun 2022 Kecamatan Toboali merupakan wilayah dengan jumlah rumah tangga dan kepala keluarga miskin terbesar yaitu sebanyak 12.804 rumah tangga atau 35,88 persen dari jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten Bangka Selatan dan dengan jumlah kepala keluarga miskin sebanyak 5.269 kepala keluarga atau 35,88 persen dari total kepala keluarga miskin di Kabupaten Bangka Selatan. Kecamatan Toboali merupakan Kecamatan dengan jumlah Desa dan penduduk terbanyak yang merupakan kawasan Ibu Kota Kabupaten yang terdapat kawasan pemukiman kumuh. Sementara Kecamatan dengan rumah tangga dan kepala keluarga miskin paling sedikit adalah Kecamatan Lepar dengan jumlah 1.644 rumah tangga miskin atau sebesar 4,60 persen dari total rumah tangga miskin Kabupaten dan 737 kepala keluarga miskin atau 5,01 persen dari total kepala keluarga miskin Kabupaten Bangka Selatan

Sedangkan pada tahun 2023 Kecamatan Toboali tetap merupakan wilayah dengan jumlah rumah tangga dan kepala keluarga miskin terbesar yaitu sebanyak 12.054 rumah tangga atau 36,22 persen dari jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten Bangka Selatan dan dengan jumlah kepala keluarga miskin sebanyak 5.268 kepala keluarga atau 38,91 persen dari total kepala keluarga miskin di Kabupaten Bangka Selatan. Kecamatan Toboali merupakan Kecamatan dengan jumlah Desa dan penduduk terbanyak yang merupakan kawasan Ibu Kota Kabupaten yang terdapat kawasan pemukiman kumuh. Sementara Kecamatan dengan rumah tangga dan kepala keluarga miskin paling sedikit adalah Kecamatan Lepar dengan jumlah 1.544 rumah tangga miskin atau sebesar 4,65 persen dari total rumah tangga miskin Kabupaten dan 711 kepala keluarga miskin atau 4,91 persen dari total kepala keluarga miskin Kabupaten Bangka Selatan.



2.2.1.7. Kemiskinan Ekstrem

Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) adalah kumpulan informasi dan data keluarga serta individu anggota keluarga hasil pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia (Pendataan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional/PK-BKKBN 2022) disetiap wilayah pemutakhiran (RT/Dusun/RW) dan setiap tingkatan wilayah administrasi (Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat) yang tersimpan dalam file elektronik dan sudah divalidasi NIK oleh Dukcapil serta memiliki status kesejahteraan (Desil). Kementerian, Pemerintah Daerah, dan Lembaga lain yang menjalankan program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial dapat menggunakan data dari Data P3KE.

Berikut Jumlah Individu dan Keluarga yang termasuk dalam Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Bangka Selatan permuktahiran tahun 2021 dan 2022 :

Tabel 2.49
Jumlah Individu dan Keluarga Kemiskinan Ekstrem Permuktahiran
Per Kecamatan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 dan 2022

NO	KECAMATAN	TAHUN			
		BASIC 2021		PERMUKTAHIRAN 2022	
		INDIVIDU	KELUARGA	INDIVIDU	KELUARGA
1	Toboali	25.943	6.228	29.390	7.120
2	Airgegas	17.449	4.365	19.317	4.890
3	Payung	8.663	2.142	9.474	2.355
4	Simpang Rimba	13.047	3.164	15.464	3.802
5	Tukak Sadai	6.354	1.523	8.084	1.986
6	Pulau Besar	4.887	1.226	5.115	1.303
7	Lepar	3.150	799	3.806	975
8	Kepulauan Pongok	1.849	420	2.092	480
Kabupaten Bangka Selatan		81.342	19.867	92.742	22.911

Sumber : Kementerian Koordinator PMK Republik Indonesia, 2023

Perbandingan jumlah Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Bangka Selatan dari basic data tahun 2021 dan permuktahiran tahun 2022 terus mengalami peningkatan baik secara Individu maupun Keluarga, ini menandakan makin meningkatnya tingkat kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bangka Selatan. Pada pemuktahiran tahun 2021 Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Bangka Selatan untuk Individu sebanyak 81.342 Orang dan Keluarga 19.867 KK mengalami kenaikan pada tahun 2022 Individu sebanyak 92.742 Orang dan Keluarga 22.911 KK. Sedangkan



untuk tahun 2023 belum ada permuktahiran lagi.

Selain Kategori Individu dan Keluarga, Kemiskinan Ekstrim juga di bagi berdasarkan Desil, yaitu suatu istilah yang menunjukkan pembagian data menjadi 10 bagian sama besar. Sebelum menentukan desil, data harus diurutkan terlebih dahulu, untuk data P3KE terdapat 4 Desil yang terbawah yaitu Desil 1 sampai 4 yang menjadi pedoman dasar dalam pembagian jumlah Individu maupun Keluarga, berikut jumlah individu dan keluarga per Desil di Kabupaten Bangka Selatan :

Tabel 2.50
Jumlah Individu dan Keluarga Kemiskinan Ekstrim Permuktahiran
Per Desil Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 dan 2022

NO	PER DESIL	TAHUN			
		BASIC 2021		PERMUKTAHIRAN 2022	
		INDIVIDU	KELUARGA	INDIVIDU	KELUARGA
1	DESIL 1	8.599	1.673	10.500	2.083
2	DESIL 2	11.396	2.520	13.514	3.051
3	DESIL 3	24.982	6.001	27.988	6.803
4	DESIL 4	36.365	9.673	40.740	10.974
JUMLAH		81.342	19.867	92.742	22.911

Sumber : Kementerian Koordinator PMK Republik Indonesia, 2023

Untuk jumlah Desil Kemiskinan Ekstrim di Kabupaten Bangka Selatan dari basic data tahun 2021 untuk desil Individu terdapat 8.599 Orang di Desil 1, sedangkan 11.396 Orang di Desil 2, untuk Desil 3 sebanyak 24.982 Orang, dan 36.365 Orang untuk Desil 4. Kemudian untuk desil Keluarga terdapat 1.673 Keluarga di Desil 1, sedangkan 2.520 Keluarga di Desil 2, untuk Desil 3 sebanyak 6.001 Keluarga, dan 9.673 Keluarga untuk Desil 4.

Sedangkan untuk jumlah Desil Kemiskinan Ekstrim di Kabupaten Bangka Selatan pada data Pemuktahiran tahun 2022 untuk desil Individu terdapat 10.500 Orang di Desil 1, sedangkan 13.514 Orang di Desil 2, untuk Desil 3 sebanyak 27.988 Orang, dan 40.740 Orang untuk Desil 4. Kemudian untuk desil Keluarga terdapat 2.083 Keluarga di Desil 1, sedangkan 3.051 Keluarga di Desil 2, untuk Desil 3 sebanyak 6.803 Keluarga, dan 10.974 Keluarga untuk Desil 4.

2.2.1.8. Tingkat Pengangguran Terbuka

Indikator utama ketenagakerjaan yang sering digunakan sebagai indikator keberhasilan dalam menangani masalah ketenagakerjaan khususnya pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) atau angka pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka atau angka pengangguran merupakan perbandingan antara jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja.



Analisa capaian fokus kesejahteraan sosial untuk indikator kinerja bidang ketenagakerjaan dapat dilihat dari realisasi angka pengangguran Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014-2023 berikut :

Tabel 2.51
Tingkat Pengangguran Terbuka
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2023

No	Kab/Kota/Prov	Tingkat Pengangguran Terbuka									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kabupaten Bangka	8,36	8,87	n/a	4,29	4,12	3,8	5,42	5,97	5,39	5,03
2	Kabupaten Belitung	3,03	4,57	n/a	2,57	2,93	2,9	4,82	3,51	4,30	4,14
3	Kabupaten Bangka Barat	1,21	5,92	n/a	4,23	3,11	2,85	4,12	3,83	4,86	4,77
4	Kabupaten Bangka Tengah	5,64	6,58	n/a	3,38	3,93	4,39	5,59	4,95	3,99	3,88
5	Kabupaten Bangka Selatan	3,26	2,01	n/a	2,74	4,35	3,87	5,42	5,29	5,09	4,84
6	Kabupaten Belitung Timur	2,61	2,55	n/a	2,62	1,5	1,71	3,93	3,78	2,50	2,41
7	Kota Pangkalpinang	8,84	10,29	n/a	5,8	4,7	5,01	6,93	6,81	5,90	5,76
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		5,14	6,29	2,6	3,78	3,65	3,62	5,25	5,03	4,77	4,56

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2024



Gambar 2.28
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014-2023
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2024

Jika dilihat dari sisi tenaga kerja di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2014-2023, Pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2023 Kota Pangkalpinang masih menduduki



peringkat teratas dengan angka pengangguran tertinggi, sedangkan dengan angka pengangguran terendah di dominasi oleh Kabupaten Belitung Timur.

Dari data tabel tersebut, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bangka Selatan dari tahun 2014-2023 mengalami peningkatan, di tahun 2014 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bangka Selatan sebesar 3,26 persen sedangkan pada tahun 2023 sebesar 4,84 persen, jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bangka Belitung dengan rata-rata disetiap Kabupaten/Kota terdapat penurunan angka pengangguran yang cukup signifikan kecuali untuk Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung yang angka penganggurannya meningkat. Dari data tingkat pengangguran terbuka tahun 2023 Kabupaten Bangka Selatan menempati urutan ke-3 dari 7 Kabupaten/Kota dan diatas TPT Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2.2.1.9. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran yang dapat menjelaskan tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh suatu daerah. Berikut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014-2023 :

Tabel 2.52
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2023

No	Kab/Kota/Prov	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kabupaten Bangka	69,79	70,03	70,43	71,09	71,80	72,39	73,06	73,13	73,62	74,34
2	Kabupaten Belitung	69,56	70,29	70,81	70,93	71,70	72,46	72,97	73,01	73,83	74,49
3	Kabupaten Bangka Barat	66,43	67,23	67,6	67,94	68,68	69,05	69,75	70,28	70,79	71,13
4	Kabupaten Bangka Tengah	68,09	68,66	68,76	68,99	69,52	70,33	71,11	71,55	72,06	72,36
5	Kabupaten Bangka Selatan	63,54	63,89	64,57	65,02	65,98	66,54	68,10	68,24	69,12	69,67
6	Kabupaten Belitung Timur	68,1	68,83	69,3	69,57	70,22	70,84	71,40	71,91	72,76	73,31
7	Kota Pangkalpinang	76,28	76,61	76,73	76,86	77,43	77,97	78,76	79,12	79,77	80,45
	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	68,27	69,05	69,55	69,99	70,67	71,30	71,47	72,74	72,96	73,50

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2024



Gambar 2.29
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bangka Selatan, 2014-2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan, 2024

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bangka Selatan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2023 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bangka Selatan dengan capaian 62,96 persen, selanjutnya pada tahun 2014 meningkat menjadi 63,54 persen. pada tahun 2015 meningkat menjadi 63,89 persen. pada tahun 2016 meningkat menjadi 64,57 persen. pada tahun 2017 meningkat menjadi 65,02 persen. pada tahun 2018 meningkat menjadi 65,98 persen. Demikian halnya juga pada tahun 2019 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bangka Selatan adalah sebesar 66,54 persen. Sedangkan untuk tahun 2020 terjadi perubahan metode perhitungan dengan menggunakan metode long form yaitu pembaharuan data penduduk dengan pertanyaan yang lebih detail kepada seluruh responden. Variabel yang detail diharapkan bisa mencerminkan kondisi riil di masyarakat dan merupakan bagian dari Sensus Penduduk tahun 2020 sehingga pada tahun 2023 mulai menggunakan hasil metode penghitungan IPM berdasarkan long form yang dihitung sejak tahun 2020 sehingga nilai IPM mengalami peningkatan dan perubahan, untuk tahun 2020 sebesar 68,10 persen, sedangkan pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan sebesar 68,24 persen, kemudian ditahun 2022 sebesar 69,12 persen dan di tahun 2023 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bangka Selatan dengan capaian 69,67 persen.



Perbandingan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bangka Selatan dengan rata-rata Provinsi dan Kabupaten/Kota lainnya dari tahun 2014-2023, selama periode tersebut IPM Kabupaten Bangka Selatan selalu pada peringkat terbawah atau ke-7 (tujuh) dan dengan capaian tertinggi adalah Kota Pangkalpinang. Namun jika dilihat dari tren tahunan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bangka Selatan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir selalu meningkat dan mengalami peningkatan terbesar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, peningkatan tersebut menandakan bahwa pencapaian pembangunan manusia di Kabupaten Bangka Selatan semakin membaik dari tahun ke tahun.

Sementara itu Indeks Modal Manusia (IMM) mulai dijadikan tolak ukur dalam mengitung kemajuan yang cepat menuju dunia ketika semua anak-anak tiba di sekolah dengan gizi yang baik dan siap untuk belajar, dapat berharap untuk mencapai pembelajaran nyata di ruang kelas, dan dapat memasuki pasar kerja sebagai orang dewasa yang sehat, terampil, dan produktif. Indeks Modal Manusia dapat diartikan mengukur kontribusi kesehatan dan pendidikan terhadap produktivitas pekerja. Skor indeks akhir berkisar dari 0 hingga 1 dan mengukur produktivitas sebagai pekerja masa depan dari anak yang lahir hari ini relatif terhadap patokan kesehatan penuh dan pendidikan lengkap. Indeks Modal Manusia adalah pendekatan yang dilakukan oleh World Bank (*Human Capital Index*). Indeks modal manusia dapat diukur melalui beberapa komponen utama :

1. Probabilitas bertahan hidup (*survival*) hingga usia 5 tahun: Probabilitas bahwa seorang anak yang baru lahir akan bertahan hingga usia 5 tahun. Data dihitung dari angka kematian balita.
2. Pendidikan: Akses pendidikan diukur melalui harapan lama sekolah. Kualitas pendidikan diukur melalui *harmonized test scores*. Data akses dan kualitas pendidikan ditransformasikan menjadi pengukuran *Learning-Adjusted Years of Schooling* menggunakan metrik konversi.
3. Kesehatan: Mencakup berbagai indikator kesehatan, termasuk stunting, yang merupakan kondisi di mana pertumbuhan anak terhambat karena malnutrisi kronis. 2 proksi yang digunakan adalah (1) *adult survival rate* yang didefinisikan sebagai proporsi penduduk usia 15 tahun yang hidup hingga 60 tahun; dan (2) prevalensi *stunting*.

Komponen-komponen tersebut dapat dihitung dengan pendekatan sebagai berikut :

- 1) *Survival*: dihitung dari angka kematian balita (SUPAS dan LF SP).
- 2) Pendidikan: Akses pendidikan tetap diukur melalui harapan lama sekolah, namun untuk kualitas pendidikan, *harmonized test scores* diukur melalui proksi hasil asesmen pendidikan yang dilaksanakan di tingkat nasional dan daerah. Data akses dan kualitas pendidikan ditransformasikan menjadi pengukuran *Learning-Adjusted Years of Schooling* menggunakan metrik konversi.



- 3) Kesehatan: dihitung dari data *adult survival rate* (SUPAS dan LF SP) yang diagregasi pada usia 15-60 dan prevalensi *stunting* (SSGI dan SKI)
- 4) Konversi ketiga komponen menjadi Indeks Modal Manusia dilakukan menggunakan pendekatan yang dilakukan World Bank.

Indeks Modal Manusia secara Nasional pada tahun 2023 terealisasi sebesar 0,53. sedangkan target dari Indikator Utama Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Negara (RPJPN) Tahun 2025-2045 di tahun 2025 sebesar 0,56 dan 2045 sebesar 0,73. Sedangkan di Kabupaten Bangka Selatan untuk penghitungan Indeks Modal Manusia belum terukur namun sudah mulai dilakukan penghitungan sebagai bagian dari Indikator Utama Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025-2045 dengan target sebesar 0,50 ditahun 2025 dan 0,65 di tahun 2045.

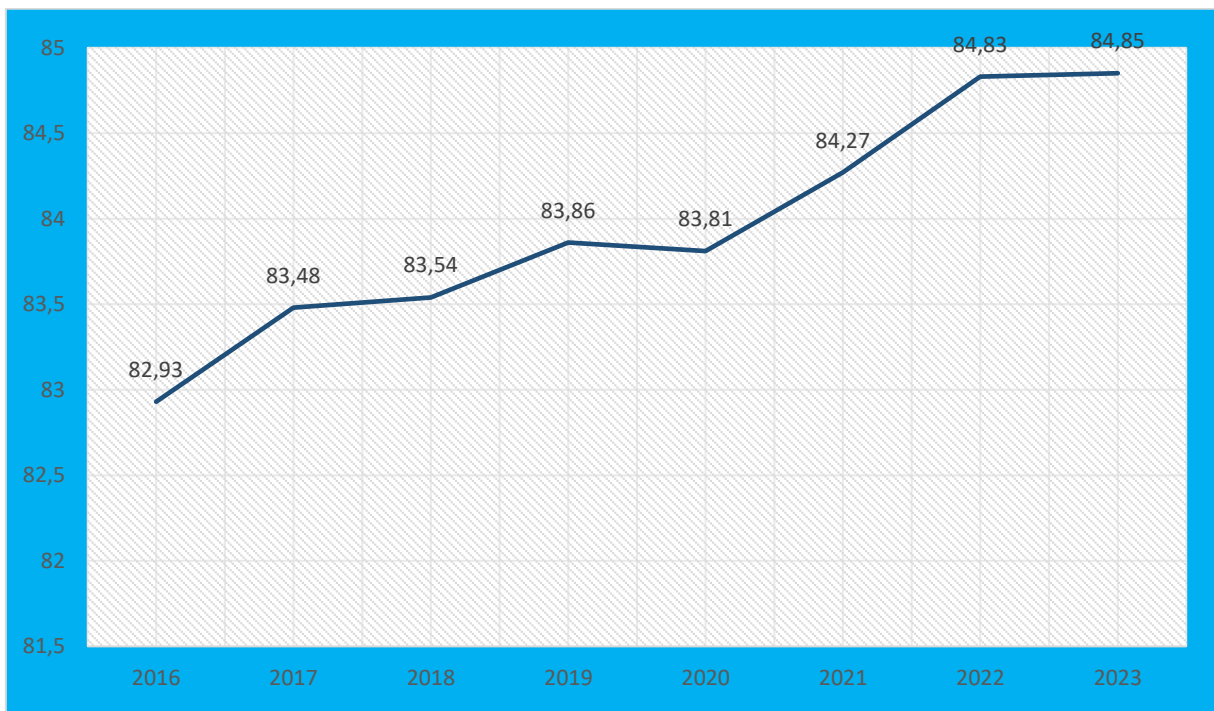
2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya

Analisis indikator kinerja daerah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial budaya di Kabupaten Bangka Selatan, difokuskan pada bidang sosial dan kebudayaan. Adapun hasil analisis fokus kesejahteraan sosial budaya berdasarkan indikatornya disajikan sebagai berikut :

2.2.2.1. Indeks Pembangunan Gender

Dalam mengevaluasi hasil pembangunan yang berperspektif gender digunakan beberapa indikator diantaranya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan Indeks Ketimpangan Gender (IKG). IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG. Komponen penghitungan IPG adalah Angka harapan hidup, harapan pendidikan , dan indeks distribusi pendapatan Variabel untuk menyusun indikator ini diperoleh juga dari Sakernas, SUPAS dan Sensus Penduduk. Nilai IPG berkisar antara 0-100 persen. Bila nilai IPG semakin tinggi maka semakin tinggi kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

Perkembangan nilai Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Bangka Selatan selama 8 (delapan) tahun terakhir dapat dilihat sebagai berikut :



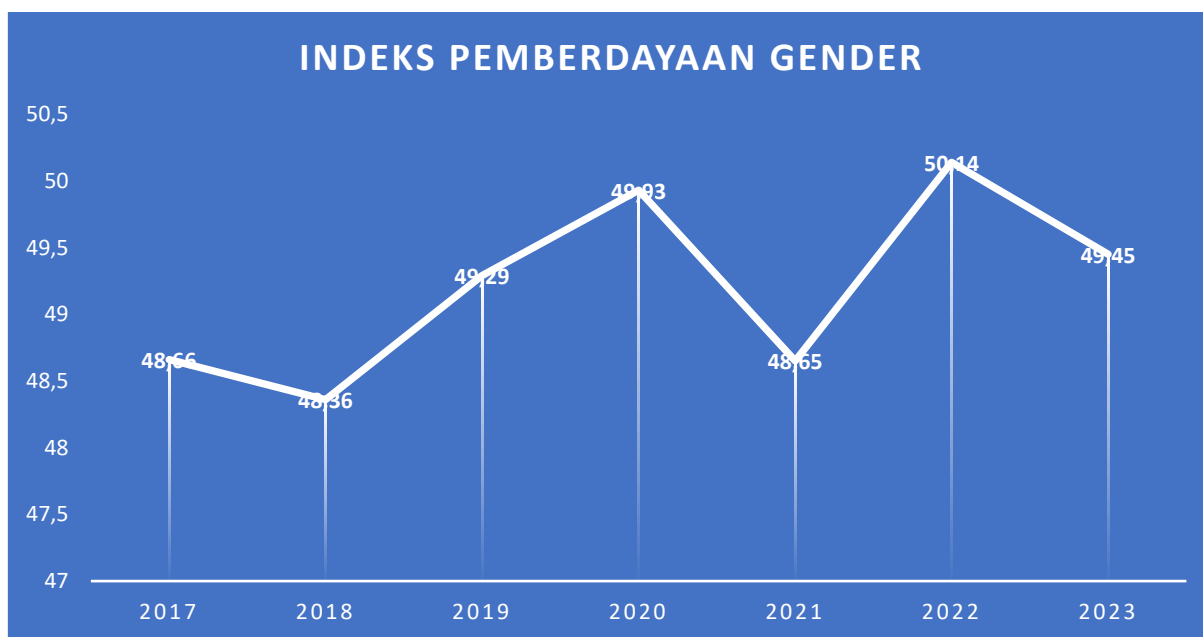
Gambar 2.30
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016-2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan, 2024

IPG merupakan perbandingan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) laki-laki dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan yang dilihat dari kualitas dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dimensi pendidikan menggunakan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, dimensi kesehatan menggunakan umur harapan hidup, serta dimensi ekonomi menggunakan pengeluaran per kapita disesuaikan.

Pada Tahun 2023, realisasi IPG Kabupaten Bangka Selatan sebesar 84,85 persen atau meningkat sebesar 0,02 persen dari tahun sebelumnya. Dalam 7 (tujuh) tahun terakhir IPG Kabupaten Bangka Selatan mengalami peningkatan disetiap Tahunnya. Adapun IPG pada tahun 2016 sebesar 82,93 persen, kemudian tahun 2017 sebesar 83,48 persen, setelah itu pada tahun 2018 sebesar 83,54 persen, di tahun 2019 sebesar 83,86 persen, kemudian pada tahun 2020 sebesar 83,81 persen, selanjutnya pada tahun 2021 terjadi perubahan metode perhitungan dengan menggunakan metode long form yaitu pembaharuan data penduduk dengan pertanyaan yang lebih detail kepada seluruh responden. Variabel yang detail diharapkan bisa mencerminkan kondisi riil di masyarakat dan merupakan bagian dari Sensus Penduduk tahun 2020 sehingga pada tahun 2023 mulai menggunakan hasil metode penghitungan IPG berdasarkan long form yang dihitung sejak tahun 2020, sehingga nilai IPG pada tahun 2021 dari 84,31 menurun menjadi 84,27 persen, dan seterusnya IPG pada tahun 2022 sebesar 84,83 persen. selanjutnya untuk tahun 2023 sebesar 84,85 persen

Selanjutnya, Indeks Pemberdayaan Gender atau IDG digunakan untuk mengukur partisipasi aktif perempuan dibidang ekonomi, politik dan manajerial. Tiga indikator yang digunakan yaitu persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, keterlibatan perempuan diparlemen, dan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajerial, professional, administrasi, dan teknisi. Adapun Indeks Pembangunan Gender (IDG) Kabupaten Bangka Selatan Tahun tahun 2017 dengan IDG 48,66 menurun ditahun 2018 menjadi 48,46, kemudian meningkat menjadi 49,29 dan 49,93 di tahun 2019 dan 2020, Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017-2023 disajikan sebagai berikut :



Gambar 2.31
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017-2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2024

Dari tabel diatas, pada ditahun 2021 mengalami penurunan menjadi 48,65. Hal ini dikarenakan pada tahun 2021 banyak perempuan yang tidak bekerja lagi akibat terdampak pandemi covid 19 dan disertai meningkatnya tambang timah baik Tambang Konvensional maupun Tambang Inkonvensional dengan harga jual yang terbilang tinggi dan yang sanggup kerja disektor itu sebagian besar laki-laki. sedangkan pada tahun 2022 kembali meningkat 1,49 persen menjadi 50,14 persen. Sedangkan untuk tahun 2023 Namun terjadi penurunan sebesar 0,69 persen menjadi 49,45 persen. Selanjutnya gambar berikut adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) diwilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini dimaksud untuk mengetahui capaian IDG Kabupaten Bangka Selatan dibandingkan dengan IDG Kabupaten/Kota lainnya diwilayah Provinsi Kepulauan Belitung dan Provinsi Kepulauan Belitung.



Tabel 2.53
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023

No	Provinsi / Kabupaten / Kota	IDG
1	Kep. Bangka Belitung	58,22
2	Bangka	61,19
3	Belitung	53,47
4	Bangka Barat	64,15
5	Bangka Tengah	63,29
6	Bangka Selatan	49,45
7	Belitung Timur	54,92
8	Kota Pangkalpinang	65,10
9	Indonesia	76,90

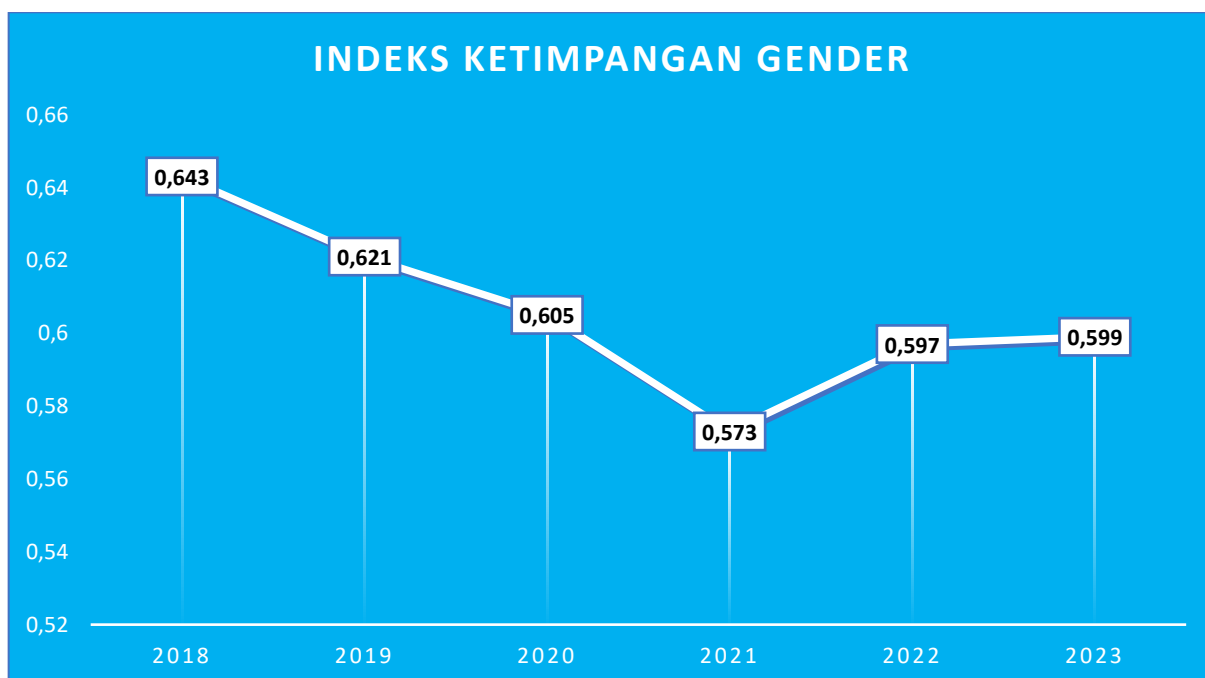
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023

Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 2023 telah mengalami penurunan dan tetap menempati posisi terakhir atau terendah dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu IDG Kabupaten Bangka Selatan berada dibawah capaian rata-rata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional. Perbedaan karakteristik penduduk, kondisi sosial budaya, ekonomi dan implementasi kebijakan pada setiap daerah termasuk Kabupaten/Kota dapat menjadi unsur lain yang turut mempengaruhi capaian IDG Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung demikian halnya dengan Kabupaten Bangka Selatan. Penguatan pendidikan politik bagi perempuan dan kebijakan-kebijakan terkait dengan pembangunan politik perempuan di Kabupaten Bangka Selatan masih perlu ditingkatkan. Selain di bidang politik, persamaan penghargaan atas upah pekerja perempuan harus dilakukan melalui intervensi kebijakan yang kongkrit. Partisipasi pendidikan pada perempuan di Kabupaten Bangka Selatan harus menjadi prioritas sehingga Angka Harapan Sekolah (AHS) pada perempuan dapat terwujud melalui peningkatan yang signifikan pada tingkat partisipasi sekolah perempuan. Dengan demikian, peluang perempuan lebih diperhitungkan sebagai tenaga profesional akan semakin terbuka lebar di Kabupaten Bangka Selatan.

Selain Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender, indikator mencapai kondisi ideal yang diharapkan adalah kelompok penduduk laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama dalam pembangunan, memegang kendali atas sumber daya pembangunan, serta menerima manfaat dari pembangunan yang setara dan adil.

Untuk mengukur bentuk ketimpangan tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data melakukan perhitungan Indeks Ketimpangan Gender (IKG). Indeks Ketimpangan Gender menggambarkan kerugian/kegagalan dari pencapaian pembangunan manusia akibat adanya ketidaksetaraan gender yang diukur dari aspek kesehatan, pembedayaan, serta akses dalam pasar tenaga kerja. Dalam menghitung IKG terdapat lima indikator penilaian yang dilakukan :

1. Indikator pertama adalah faktor risiko kematian Ibu, mencakup perbaikan proporsi persalinan tidak di fasilitas kesehatan;
2. Indikator Kedua, menurunnya fertilitas remaja, proporsi wanita berusia 15-49 tahun yang saat melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun;
3. Indikator Ketiga, taraf pendidikan yang mengalami peningkatan signifikan. Indeks persentase penduduk usia 25 tahun ke atas yang berpendidikan minimal SMA, dari gender perempuan maupun laki-laki;
4. Indikator Keempat, indikator parlemen atau persentase keterwakilan perempuan di parlemen naik dari sebesar 20,5 pada 2019 menjadi 21,1 poin pada 2020.;
5. Indikator Kelima, adanya penurunan gap kesempatan kerja antara laki-laki dan perempuan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan.



Gambar 2.32

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2018-2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2024

Dari tahun 2018 sampai 2021 Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Bangka Selatan terus menurun yang artinya kesenjangan antar laki-laki dan perempuan semakin menurun dan membaik, dari tahun 2018 sebesar 0,643 menjadi 0,621 di tahun 2019, kemudian di tahun 2020



turun kembali menjadi 0,605 dan di tahun 2021 menjadi 0,573, sedangkan di tahun 2022 terjadi kenaikan Indeks Ketimpangan Gender menjadi 0,597 dan di tahun 2023 naik kembali menjadi 0,599.

2.2.2.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (Sumbangan Pendapatan Kerja)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan ukuran yang dapat menggambarkan tingginya jumlah perempuan yang bekerja. TPAK adalah proporsi penduduk angkatan kerja, yaitu mereka yang bekerja dan menganggur terhadap penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020-2023 sebagai berikut :

Tabel 2.54
Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2023

Provinsi /Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023
Kepulauan Bangka Belitung	26,89	26,79	26,92	27,10
Bangka	25,35	25,46	24,90	25,28
Belitung	23,42	23,49	23,23	23,24
Bangka Barat	26,75	26,63	27,11	27,36
Bangka Tengah	22,39	22,62	22,48	22,44
Bangka Selatan	22,18	21,79	22,24	22,16
Belitung Timur	27,14	26,92	26,90	27,48
Kota Pangkalpinang	29,89	29,83	30,36	30,18

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023

Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menandakan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Bangka Selatan paling rendah dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya, ini mengindikasikan peran perempuan dalam sumbangan dalam pendapatan belum begitu besar dimana laki-laki sebagai pencari nafkah/pendapatan masih mendominasi.

2.2.2.3. Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan persoalan yang wajib diselesaikan oleh Pemerintah. Kerap kali, korban kekerasan tidak menyuarkan apa yang mereka alami, baik itu kekerasan secara fisik, mental, maupun seksual. Banyak di antara korban yang kesulitan melapor atau tak berani untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami.

Pada tahun 2021 di Kabupaten Bangka Selatan terjadi 12 kasus kekerasan yang terjadi pada anak perempuan dan anak. Kekerasan pada anak terdiri dari 9 kasus dan kekerasan pada



perempuan terdiri dari 3 kasus. Angka kasus kekerasan pada perempuan dan anak tertinggi terjadi Kecamatan Toboali dengan total 7 kasus kekerasan pada anak, dan 2 kasus kekerasan pada perempuan selanjutnya Kecamatan Simpang Rimba dengan 2 kasus kekerasan pada anak dan 1 kasus kekerasan pada perempuan. Sementara untuk 6 Kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Bangka Selatan tidak ditemui kasus kekerasan pada anak ataupun perempuan.

Sedangkan Pada tahun 2022 di Kabupaten Bangka Selatan terjadi 11 kasus kekerasan yang terjadi pada anak perempuan dan anak. Kekerasan pada anak terdiri dari 8 kasus dan kekerasan pada perempuan terdiri dari 3 kasus. Angka kasus kekerasan pada perempuan dan anak tertinggi terjadi Kecamatan Toboali dengan total 4 kasus kekerasan pada anak, dan 2 kasus kekerasan pada perempuan selanjutnya Kecamatan Simpang Rimba dengan 1 kasus kekerasan pada anak. Setelah itu untuk kasus kekerasan pada perempuan terjadi juga di 4 Kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Airgegas, Payung, Lepar dan Kepulauan Pongok yang berjumlah 1 kasus. Kemudian pada tahun 2023 di Kabupaten Bangka Selatan terjadi 16 kasus kekerasan yang terjadi pada anak dan perempuan. Kekerasan pada anak terdiri dari 9 kasus dan kekerasan pada perempuan terdiri dari 7 kasus. Angka kasus kekerasan pada perempuan dan anak tertinggi terjadi Kecamatan Toboali dengan total 8 kasus kekerasan pada anak dan 7 kasus kekerasan pada perempuan selanjutnya terdapat 1 kasus kekerasan pada anak yang terjadi di Kecamatan Airgegas.

Berikut tabel yang menampilkan jumlah kasus kekerasan pada anak dan perempuan di Kabupaten Bangka Selatan :

Tabel 2.55
Kasus Kekerasan Pada Perempuan dan Anak
Di Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2023

No	Kecamatan	Jumlah Kasus Kekerasan							
		2020		2021		2022		2023	
		Perempuan	Anak	Perempuan	Anak	Perempuan	Anak	Perempuan	Anak
1	Toboali	-	10	2	7	2	4	7	8
2	Airgegas	2	2	-	-	-	1	-	1
3	Payung	-	-	-	-	-	1	-	-
4	Pulau Besar	-	1	-	-	-	-	-	-
5	Simpang Rimba	2	5	1	2	1	-	-	-
6	Tukak Sadai	2	1	-	-	-	-	-	-
7	Lepar	-	1	-	-	-	1	-	-
8	Kep. Pongok	1	-	-	-	-	1	-	-
JUMLAH		7	20	3	7	3	8	7	9

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Selatan, 2024

2.2.2.4. Indeks Kabupaten Layak Anak (KLA)

Kabupaten Layak Anak merupakan Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak. Tujuan dari program Kabupaten Layak Anak adalah untuk membangun inisiatif Pemerintah Kabupaten yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan dalam bentuk: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak-hak anak, pada suatu wilayah Kabupaten/Kota. Pentingnya implementasi program Kabupaten Layak Anak dikarenakan anak merupakan modal dan investasi sumber daya manusia di masa yang akan datang, sekaligus sebagai generasi penerus Bangsa, anak harus berkualitas agar tidak menjadi beban pembangunan serta koordinasi dan kemitraan antar pemangku kepentingan terkait pemenuhan hak-hak anak harus diperkuat agar terintegrasi, holistik dan berkelanjutan. Berikut hasil evaluasi penerapan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bangka Selatan :

Tabel 2.56
Hasil Evaluasi Kabupaten Layak Anak
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2019-2022

No	Indikator	2019		2020		2021		2022		2023	
		Nilai Maksimal	Nilai PM	Nilai Maksimal	Nilai PM	Nilai Maksimal	Nilai PM	Nilai Maksimal	Nilai PM	Nilai Maksimal	Nilai PM
1	Kelembagaan	100	78,00	100	0	100	83,00	150	145	164	159
2	Klaster I : Hak Sipil dan Kebebasan	125	76,50	125	0	125	42,50	115	109	115	111
3	Klaster II : Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	180	76,50	180	0	180	43,20	170	147	156	137
4	Klaster III : Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	150	51,85	150	0	150	75,00	150	111,5	150	138,50
5	Klaster IV : Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	130	58,00	130	0	130	72,80	110	92	110	95
6	Klaster V : Perlindungan Khusus	215	99,35	215	0	215	81,70	205	19,25	205	205
7	Kecamatan / Desa / Kelurahan Layak Anak	100	76,02	100	0	100	95,00	100	89,35	100	98,30
Total		1000	516,22	1000	0	1000	493,2	1000	891,1	1000	943,8

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Selatan, 2024



Penilaian mandiri dilakukan langsung oleh masing-masing Kabupaten/Kota melalui website yang diberikan secara resmi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan akses dari masing-masing Kabupaten/Kota dan penilaian dilakukan secara bertahap sampai ke tingkat pusat. Secara penilaian Indeks Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 2019 dengan nilai 516,22. Selanjutnya pada tahun 2020 adalah 0, hal ini dikarenakan pada tahun 2020 tidak dilaksanakannya penilaian untuk Kabupaten Layak Anak oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penilaian kembali dilaksanakan pada tahun 2021 dengan nilai 493,2, angka ini tidak mencapai ambang batas untuk masuk pada kategori pratama dan terakhir pada tahun 2022 dengan nilai 891,1 dengan kategori madya menjadi sebuah prestasi yang perlu diaspirasi oleh semua pihak dikarenakan dengan masuknya Kabupaten Bangka Selatan dalam kategori madya membuat Provinsi masuk menjadi Provinsi Layak Anak. Selanjutnya pada tahun 2023 Kabupaten Bangka Selatan meraih kategori madya juga dengan nilai 943,8 dengan nilai tinggi dari tahun sebelumnya.

2.2.2.5. Rata-Rata Lama Sekolah

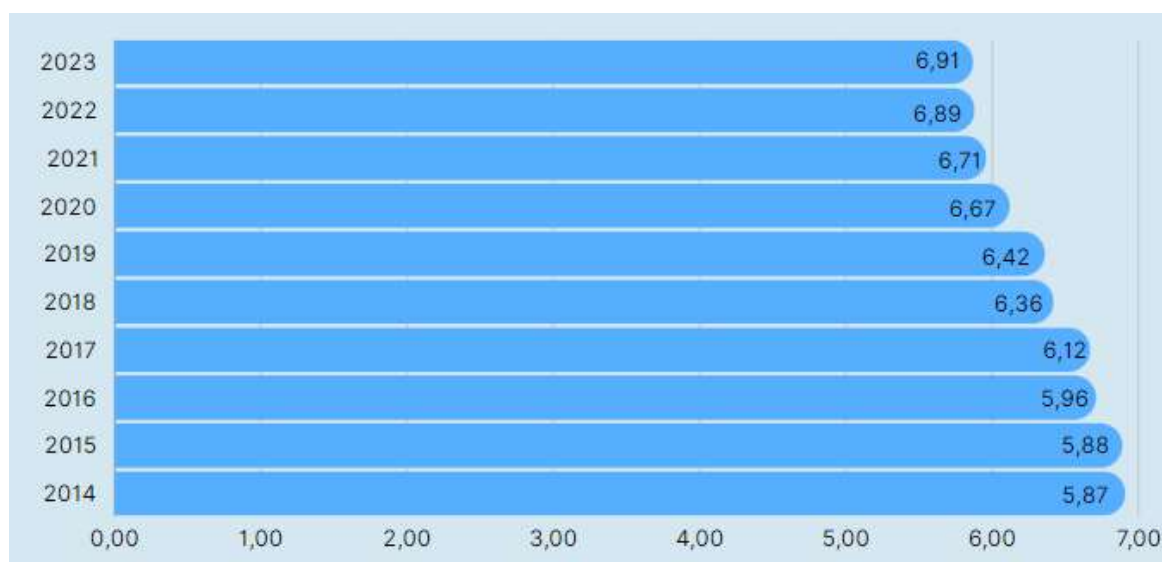
Lamanya bersekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu dimana melalui angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) mencerminkan rata-rata lamanya penduduk menempuh jenjang pendidikan formal. Penduduk yang tamat Sekolah Dasar (SD) diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun dan tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Banyak faktor yang jadi penyebab dari rendahnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS), antara lain persepsi masyarakat tentang pendidikan yang dianggap belum menjanjikan, serta mahal biaya pendidikan menjadi kendala selanjutnya. Pada grafik berikut akan menggambarkan bahwa Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014-2023 terus meningkat setiap tahunnya :

Tabel 2.57
Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014-2023

No.	Tahun	Rata-rata Lama Sekolah
1	2014	5,87
2	2015	5,88
3	2016	5,96
4	2017	6,12
5	2018	6,36
6	2019	6,42

No.	Tahun	Rata-rata Lama Sekolah
7	2020	6,67
8	2021	6,71
9	2022	6,89
10	2023	6,91

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan, 2024



Gambar 2.33

Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014-2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan, 2024

Pada tahun 2014 Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Bangka Selatan adalah 5,87 tahun, selanjutnya di tahun 2015 menjadi 5,88 tahun, sedangkan di tahun 2016 menjadi 5,96 tahun dan untuk tahun 2017 di angka 6,12 tahun yang selanjutnya meningkat pada tahun 2018 yaitu menjadi 6,36 tahun. Pada tahun 2019 Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Bangka Selatan terus meningkat menjadi 6,42 tahun, selanjutnya pada tahun 2020 kembali meningkat menjadi 6,67 tahun. Demikian halnya juga pada tahun 2021 Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Bangka Selatan meningkat menjadi 6,71 tahun. pada tahun 2022 Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Bangka Selatan yaitu 6,89 tahun.

Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Bangka Selatan yaitu 6,91 tahun pada tahun 2023 bermakna bahwa secara rata-rata, penduduk Kabupaten Bangka Selatan baru menyelesaikan pendidikan setingkat kelas 6 Sekolah Dasar (SD) atau sederajat dan belum mencapai kelas 1 Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat. Kondisi ini disebabkan tingkat pendidikan penduduk di masa lalu yang memang rendah dan belum banyaknya ketersediaan lapangan pekerjaan formal di Kabupaten Bangka Selatan yang mensyaratkan pendidikan yang tinggi. Disamping itu, penduduk Kabupaten Bangka Selatan yang



berpendidikan tinggi juga cenderung untuk bekerja dan berdomisili diluar Kabupaten Bangka Selatan. Fenomena ini tentunya tidak akan mendongkrak Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Bangka Selatan Bangka Selatan secara signifikan.

2.2.2.6. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. HLS Indonesia pada tahun 2014 sebesar 12,07 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2013 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,07 tahun atau setara dengan Diploma I.

Adapun Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Bangka Selatan selama 10 tahun terakhir ini mengalami peningkatan, sejak tahun 2014 sebesar 10,86 tahun dan pada tahun 2023 sebesar 11,59 tahun.

Tabel 2.58
Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014-2023

No.	Tahun	Harapan Lama Sekolah
1	2014	10,86
2	2015	10,88
3	2016	11,25
4	2017	11,34
5	2018	11,35
6	2019	11,36
7	2020	11,37
8	2021	11,38
9	2022	11,43
10	2023	11,59

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan, 2024

Berdasarkan tabel tersebut, tercatat peningkatan kualitas pendidikan masyarakat di Kabupaten Bangka Selatan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, dari 2014 sampai dengan tahun 2023, Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Bangka Selatan meningkat sebesar 0,73 tahun, dari 10,86 tahun pada tahun 2013 meningkat menjadi 11,59 tahun pada tahun 2023, dengan kata lain semakin meningkatnya kesadaran masyarakat Kabupaten Bangka Selatan terhadap pentingnya bersekolah dan diharapkan juga peran serta semua pihak baik itu Pemerintah,



Swasta dan seluruh *stakeholder* untuk mendukung Pendidikan di Kabupaten Bangka Selatan dari segi Kualitas dan Kuantitas agar masyarakat menjadi cerdas dan meningkatkan Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Bangka Selatan.

2.2.2.7. Angka Partisipasi Murni

Angka partisipasi murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok usia jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Kegunaan atau tujuan pengukuran Angka partisipasi murni (APM) adalah untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Adapun jenjang pendidikan menurut kelompok usia sekolah adalah :

SD/MI	= 7-12 tahun
SMP/MTs	= 13-15 tahun
SMA/MA/SMK	= 16-18 tahun

Tabel dan gambar berikut menggambarkan bahwa perkembangan Angka partisipasi murni (APM) Sekolah Dasar (SD)/ sederajat dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/sederajat Kabupaten Bangka Selatan selama 8 (delapan) tahun terakhir dengan perkembangannya yang fluktuatif :

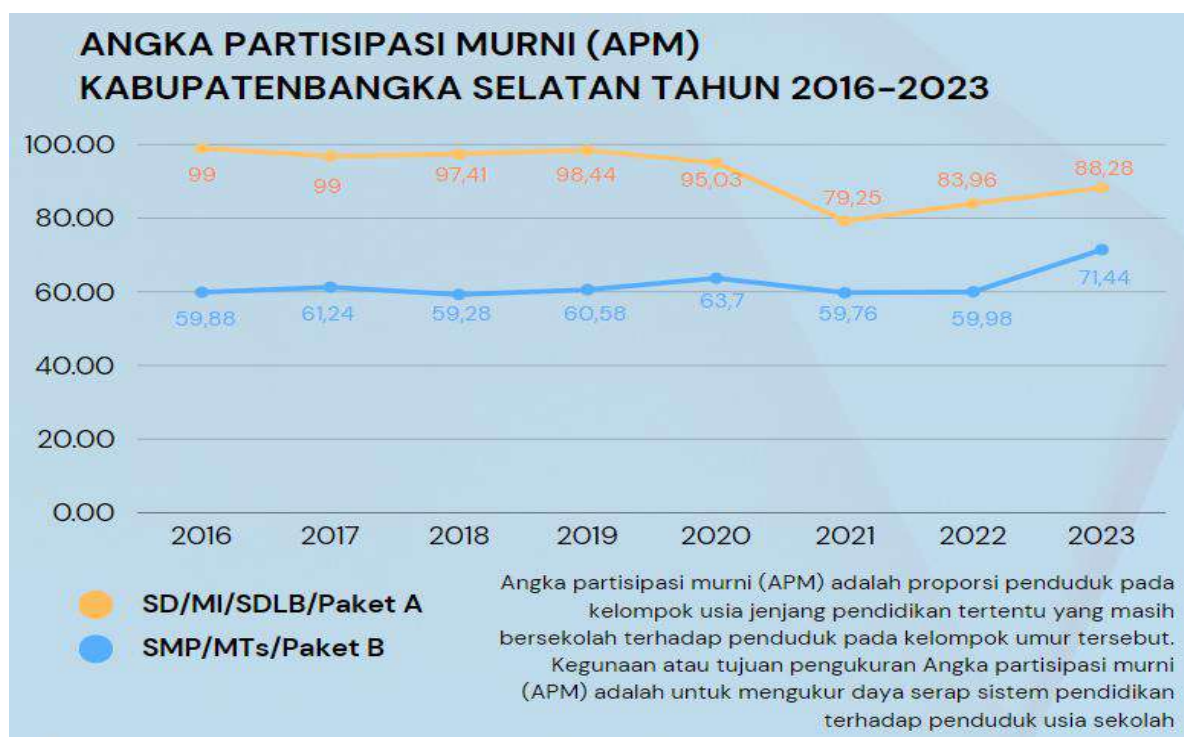
Tabel 2.59
Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016-2023

No	Tahun	SD/MI/SDLB/Paket A	SMP/MTs/Paket B
1	2016	99,00	59,88
2	2017	96,80	61,24
3	2018	97,41	59,28
4	2019	98,44	60,58
5	2020	95,03	63,70
6	2021	79,25	59,76
7	2022	83,96	59,98
8	2023	88,28	71,44

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Selatan, 2024

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/sederajat diperoleh dari jumlah siswa usia 7-12 tahun pada jenjang SD/MI/Paket A dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun dikali seratus persen. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 sebesar 99,00 persen, pada tahun 2017 menurun menjadi 96,80 persen, pada tahun 2018 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/sederajat Kabupaten Bangka Selatan berada pada angka 97,41 persen yang

selanjutnya pada tahun 2019 meningkat yaitu sebesar 1,03 persen sehingga Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ sederajat pada tahun tersebut adalah 98,44 persen. Selanjutnya pada tahun 2020 terjadi penurunan yaitu menjadi 95,03 persen atau menurun sebesar 3,41 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2020 masih terdapat kurang dari 5 persen penduduk usia sekolah SD/ sederajat yaitu usia 7-12 tahun yang belum bersekolah tepat waktu. Selanjutnya pada tahun 2021 terjadi penurunan yaitu menjadi 79,25 persen atau menurun sebesar 15,78 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2021 masih terdapat kurang dari 21 persen penduduk usia sekolah SD/ sederajat yaitu usia 7-12 tahun yang belum bersekolah tepat waktu. kemudian pada tahun 2022 terdapat peningkatan 4,71 persen dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar 83,96 persen. Untuk di tahun 2023 terdapat peningkatan kembali 4,32 persen dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar 88,28 persen. Yang menunjukkan kurang 11,04 persen dari penduduk usia sekolah SD/ sederajat yaitu usia 7-12 tahun yang belum bersekolah tepat waktu.



Gambar 2.34
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016-2023

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Selatan, 2024

Untuk Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ sederajat merupakan angka yang diperoleh dari jumlah siswa usia 13-15 tahun pada jenjang SMP/ sederajat dibagi jumlah penduduk usia 13-15 tahun dikali 100 persen. Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ sederajat Kabupaten Bangka Selatan fluktuatif dari tahun 2016-2023. Angka Partisipasi Murni (APM)



SMP/ sederajat pada tahun 2016 adalah 59,88 persen, kemudian pada tahun 2017 adalah 61,24 persen, selanjutnya pada tahun 2018 adalah 59,28 persen. Sedangkan pada tahun 2019 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ sederajat Kabupaten Bangka Selatan meningkat menjadi 60,58 persen atau naik sebesar 1,30 persen. Selanjutnya peningkatan sebesar 3,12 persen terjadi pada tahun 2020 sehingga Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ sederajat Kabupaten Bangka Selatan pada tahun tersebut adalah 63,70 persen. Namun pada tahun 2021 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ sederajat Kabupaten Bangka Selatan kembali menurun menjadi 59,76 persen atau sebesar 3,94 persen. Sedangkan pada tahun 2022 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ sederajat Kabupaten Bangka Selatan kembali meningkat menjadi 59,98 persen atau sebesar 0,22 persen, di tahun 2023 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ sederajat Kabupaten Bangka Selatan terjadi peningkatan yang signifikan menjadi 71,44 persen atau sebesar 11,46 persen

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ sederajat pada tahun 2023 menunjukkan bahwa masih terdapat kurang lebih 28,56 persen penduduk Kabupaten Bangka Selatan usia sekolah SMP/ sederajat yaitu usia 13-15 tahun yang belum bersekolah SMP/ sederajat tepat waktu. Dapat disimpulkan bahwa jika dibandingkan dengan tahun awal 2016, Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ sederajat Kabupaten Bangka Selatan terjadi peningkatan sebesar 11,56 persen diakhir tahun 2023.

2.2.2.8. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan angka yang menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Angka Partisipasi Kasar (APK) dihitung dari rasio jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia tertentu yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Adapun perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016-2023 baik tingkat TK/PAUD/ sederajat, tingkat SD/ Sederajat maupun tingkat SMP/ sederajat disajikan dalam tabel gambar berikut :

Tabel 2.60
Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016-2023

No	Tahun	TK/Sederajat	SD/MI/Sederajat	SMP/MTs/Sederajat
1	2016	94,89	112,00	78,00
2	2017	95,58	110,42	79,21
3	2018	37,92	110,37	79,07
4	2019	36,87	112,66	84,72
5	2020	33,18	106,82	85,67
6	2021	32,18	97,39	83,74
7	2022	59,81	99,94	83,80
8	2023	60,40	98,11	96,72

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Selatan, 2024

PERKEMBANGAN ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2016-2023



Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan angka yang menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Angka Partisipasi Kasar (APK) dihitung dari rasio jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia tertentu yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.

Gambar 2.35
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016-2023
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Selatan, 2024

APK TK/ sederajat Kabupaten Bangka Selatan dari tahun 2016-2021 terjadi penurunan namun pada tahun 2022 dan 2023 terjadi kenaikan kembali, yaitu pada tahun 2016 APK TK yaitu 94,89 persen. Naik menjadi 95,58 persen di tahun 2017, Selanjutnya terjadi penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2018 menurun sebesar 57,66 persen sehingga menjadi 37,92 persen, penurunan terus berlanjut pada tahun 2019 dengan realisasi 36,87 persen dan pada tahun 2020 menjadi 33,18 persen. Selanjutnya pada tahun 2021 menurun menjadi 32,18 persen. Hal ini dikarenakan dampak dari pandemi *covid-19* yang terjadi sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang sehingga Kabupaten Bangka Selatan menerapkan pola sekolah dari rumah atau daring. Namun pada tahun 2022 terjadi kenaikan yang signifikan sebesar 59,81 dari tahun 2021 atau mengalami kenaikan 27,63 persen. Hal ini merupakan tren positif pasca Covid-19 berlalu. Sedangkan pada tahun 2023 terjadi kenaikan menjadi 60,40 atau mengalami kenaikan 0,59 persen.

Selanjutnya dilihat secara umum untuk APK SD/ Sederajat maupun APK SMP/ sederajat Kabupaten Bangka Selatan mengalami tren naik dan turun disetiap tahunnya dari tahun 2016-



2023. APK pada jenjang SD/Sederajat selalu berada diatas 100 persen kecuali pada dua tahun terakhir ditahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2016 sebesar 112,00 persen, di tahun 2017 sebesar 110,42 persen, di tahun 2018 sebesar 110,37 persen pada tahun 2019 meningkat menjadi 112,66 persen. Selanjutnya pada tahun 2020 terjadi penurunan menjadi 106,82 persen, pada tahun 2021 menurun Kembali menjadi 97,39 persen dan Kembali naik menjadi 99,94 persen pada tahun 2022. Namun turun kembali menjadi 98,11 persen pada tahun 2023. Hal ini dikarenakan sebagian siswa SD/ sederajat ada yang berusia di bawah 7 tahun atau lebih dari 12 tahun.

Sementara itu, APK pada jenjang SMP/ sederajat Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 2016 adalah 78,00 persen, di tahun 2017 adalah 79,21 persen, di tahun 2018 adalah 79,07 persen. Pada tahun 2019 meningkat menjadi 84,72 persen dan terus meningkat menjadi 85,67 pada tahun 2020 persen. Namun menurun pada tahun 2021 menjadi 83,74 persen. Adapun APK pada jenjang SMP/ sederajat Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 2022 meningkat kembali menjadi 83,80 persen. Sedangkan pada tahun 2023 APK pada jenjang SMP/ sederajat Kabupaten Bangka Selatan meningkat secara signifikan menjadi 96,72 persen. Jika APK jenjang SMP/ sederajat Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu dapat dikatakan bahwa terjadi peningkatan sebesar 12,92 persen selama 8 (delapan) tahun.

2.2.2.9. Capaian Literasi dan Numerasi

Literasi dan numerasi merupakan satu indikator dalam peningkatan aspek kesejahteraan sosial budaya. Literasi dan numerasi adalah kompetensi yang sifatnya general dan mendasar. Kemampuan berpikir, berbahasa serta penghitungan diperlukan dalam berbagai konteks, baik personal, sosial, maupun profesional. Dengan mengukur kompetensi yang bersifat mendasar, pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa guru diharapkan berinovasi mengembangkan kompetensi siswa melalui berbagai pelajaran melalui pengajaran yang berpusat pada siswa. Berikut Capaian Literasi dan Numerasi Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023 dan 2024 :

Tabel 2.61
Capaian Literasi dan Numerasi Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023 dan 2024

No.	Satuan Sekolah	Indikator	Tahun	
			2023	2024
1	Sekolah Dasar Sederajat	Literasi	71,95	74,79
		Numerasi	56,81	63,78
2	Sekolah Menengah Pertama Sederajat	Literasi	66,53	68,25
		Numerasi	48,82	60,71

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Selatan, 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat capaian Literasi dan Numerasi di tingkat SD Sederajat di tahun 2023 untuk Literasi sebesar 71,95 persen dan Numerasi sebesar 56,81 persen, kemudian di tahun 2024 mengalami peningkatan Literasi menjadi 74,79 persen dan Numerasi menjadi 63,78 persen, sedangkan untuk SMP Sederajat di tahun 2023 Literasi diangka 66,53 persen dan Numerasi sebesar 48,82 persen, kemudian di tahun 2024 untuk Literasi sebesar 68,25 persen dan Numerasi diangka 60,71 persen.

2.2.2.10. Persentase Satuan Pendidikan Dalam Kompetensi Minimum

Fokus asesmen adalah kompetensi berpikir, sehingga hasil pengukuran tidak sekadar mencerminkan prestasi akademik pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika saja. Literasi dan numerasi justru bisa dan seharusnya memang dikembangkan melalui berbagai mata pelajaran, termasuk IPA, IPS, kewarganegaraan, agama, seni, dan seterusnya. Pesan ini penting dipahami oleh guru, sekolah, dan siswa untuk meminimalkan risiko penyempitan kurikulum pada pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika.

Asesmen Kompetensi Minimum akan dilakukan pada siswa yang duduk di pertengahan jenjang sekolah, seperti kelas 4 untuk SD, kelas 8 untuk SMP, dan kelas 11 untuk SMA. Dengan dilakukan pada tengah jenjang, hasil asesmen bisa dimanfaatkan sekolah untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa. Dengan dilakukan sejak jenjang SD, hasilnya dapat menjadi deteksi dini bagi permasalahan mutu pendidikan nasional.

Adapun untuk siswa SD, perlu diketahui bahwa saat ini pun tidak ada UN pada jenjang SD. Dengan demikian, penghentian UN tidak berdampak pada siswa SD. Seperti yang dipaparkan pada poin sebelumnya, sebagian siswa SD akan mengikuti asesmen kompetensi baru. Namun asesmen baru ini dirancang agar tidak memiliki konsekuensi bagi siswa. Karena itu, asesmen baru tidak menjadi beban tambahan bagi siswa SD. Berikut Persentase Satuan Pendidikan Dalam Kompetensi Minimum di Kabupaten Bangka Selatan tahun 2023 :

Tabel 2.62
Persentase Satuan Pendidikan Dalam Kompetensi Minimum
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023

No.	Nama Satuan Pendidikan	Status Satuan Pendidikan	A.1 Kemampuan literasi				A.2 Kemampuan numerasi			
			Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Kabupaten	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Kabupaten
1	SD NEGERI 5 TOBOALI	Negeri	Baik	Naik	13,34	Peringkat menengah atas (21-40 persen)	Baik	Naik	40,00	Peringkat menengah atas (21-40 persen)
2	SD NEGERI 1 KEP. PONGOK	Negeri	Sedang	Turun	3,33	Peringkat menengah bawah (61-80 persen)	Baik	Tidak Berubah	0	Peringkat menengah atas (21-40 persen)
3	SD NEGERI 5 PAYUNG	Negeri	Sedang	Turun	26,67	Peringkat bawah (81-100 persen)	Sedang	Turun	33,33	Peringkat menengah bawah (61-80 persen)



No.	Nama Satuan Pendidikan	Status Satuan Pendidikan	A.1 Kemampuan literasi				A.2 Kemampuan numerasi			
			Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Kabupaten	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Kabupaten
4	SD NEGERI 5 AIRGEGAS	Negeri	Sedang	Tidak Berubah	0	Peringkat menengah bawah (61-80 persen)	Kurang	Naik	10,00	Peringkat bawah (81-100 persen)
5	SD NEGERI 5 SIMPANG RIMBA	Negeri	Baik	Naik	14,62	Peringkat menengah (41-60 persen)	Sedang	Naik	20,00	Peringkat menengah (41-60 persen)
6	SD NEGERI 6 SIMPANG RIMBA	Negeri	Sedang	Turun	13,33	Peringkat menengah bawah (61-80 persen)	Kurang	Turun	16,66	Peringkat bawah (81-100 persen)
7	SD NEGERI 6 PAYUNG	Negeri	Sedang	Turun	19,48	Peringkat menengah bawah (61-80 persen)	Sedang	Turun	14,83	Peringkat menengah bawah (61-80 persen)
8	SD NEGERI 6 AIRGEGAS	Negeri	Baik	Naik	23,34	Peringkat menengah atas (21-40 persen)	Baik	Naik	56,67	Peringkat atas (1-20 persen)
9	SD NEGERI 2 KEP. PONGOK	Negeri	Sedang	Turun	46,67	Peringkat bawah (81-100 persen)	Baik	Turun	3,59	Peringkat menengah atas (21-40 persen)
10	SD NEGERI 6 TOBOALI	Negeri	Baik	Naik	3,33	Peringkat atas (1-20 persen)	Sedang	Tidak Berubah	0	Peringkat menengah (41-60 persen)
11	SD NEGERI 3 KEP. PONGOK	Negeri	Baik	Naik	12,08	Peringkat atas (1-20 persen)	Baik	Naik	50,00	Peringkat atas (1-20 persen)
12	SD NEGERI 7 PAYUNG	Negeri	Baik	Turun	13,34	Peringkat menengah atas (21-40 persen)	Baik	Turun	3,33	Peringkat atas (1-20 persen)
13	SD NEGERI 4 TOBOALI	Negeri	Baik	Naik	16,67	Peringkat menengah atas (21-40 persen)	Sedang	Naik	6,67	Peringkat menengah (41-60 persen)
14	SD NEGERI 4 AIRGEGAS	Negeri	Sedang	Turun	10,00	Peringkat bawah (81-100 persen)	Sedang	Naik	10,00	Peringkat menengah bawah (61-80 persen)
15	SD NEGERI 4 PAYUNG	Negeri	Baik	Turun	3,34	Peringkat menengah (41-60 persen)	Sedang	Naik	26,67	Peringkat menengah (41-60 persen)
16	SD NEGERI 3 SIMPANG RIMBA	Negeri	Baik	Turun	13,34	Peringkat menengah (41-60 persen)	Sedang	Turun	6,67	Peringkat menengah (41-60 persen)
17	SD NEGERI 3 PAYUNG	Negeri	Baik	Turun	2,97	Peringkat menengah (41-60 persen)	Baik	Naik	22,03	Peringkat menengah atas (21-40 persen)
18	SD NEGERI 3 LEPAR	Negeri	Baik	Turun	3,33	Peringkat menengah (41-60 persen)	Sedang	Turun	10,00	Peringkat menengah (41-60 persen)
19	SD NEGERI 3 AIRGEGAS	Negeri	Baik	Naik	46,67	Peringkat atas (1-20 persen)	Baik	Naik	66,67	Peringkat atas (1-20 persen)
20	SD NEGERI 3 TOBOALI	Negeri	Baik	Turun	3,34	Peringkat menengah (41-60 persen)	Sedang	Tidak Berubah	0	Peringkat menengah (41-60 persen)
21	SD NEGERI 4 TUKAK SADAI	Negeri	Baik	Naik	33,34	Peringkat menengah atas (21-40 persen)	Baik	Naik	43,34	Peringkat atas (1-20 persen)
22	SD NEGERI 1 TUKAK SADAI	Negeri	Sedang	Turun	10,00	Peringkat menengah bawah (61-80 persen)	Baik	Naik	10,00	Peringkat menengah atas (21-40 persen)
23	SD NEGERI 2 TUKAK SADAI	Negeri	Sedang	Naik	33,33	Peringkat menengah bawah (61-80 persen)	Baik	Naik	56,66	Peringkat menengah atas (21-40 persen)
24	SD NEGERI 3 TUKAK SADAI	Negeri	Baik	Naik	3,33	Peringkat menengah (41-60 persen)	Sedang	Naik	13,33	Peringkat menengah (41-60 persen)
25	SD NEGERI 4 SIMPANG RIMBA	Negeri	Baik	Naik	26,67	Peringkat atas (1-20 persen)	Baik	Naik	26,67	Peringkat atas (1-20 persen)
26	SD NEGERI 4 LEPAR	Negeri	Kurang	Turun	29,23	Peringkat bawah (81-100 persen)	Sedang	Naik	6,15	Peringkat menengah bawah (61-80 persen)



No.	Nama Satuan Pendidikan	Status Satuan Pendidikan	A.1 Kemampuan literasi				A.2 Kemampuan numerasi			
			Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Kabupaten	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Kabupaten
27	SD NEGERI 29 TOBOALI	Negeri	Sedang	Turun	18,15	Peringkat bawah (81-100 persen)	Kurang	Turun	9,63	Peringkat bawah (81-100 persen)
28	SD NEGERI 7 AIRGEGAS	Negeri	Baik	Naik	36,66	Peringkat atas (1-20 persen)	Baik	Naik	43,34	Peringkat menengah atas (21-40 persen)
29	SMP PGRI 2 TOBOALI	Swasta	Baik	Naik	15,68	Peringkat menengah atas (21-40 persen)	Baik	Tidak Tersedia (Satdik tidak mengikuti AN tahun lalu)	Tidak Tersedia (Satdik tidak mengikuti AN tahun lalu)	Peringkat menengah atas (21-40 persen)
30	SMP YPK TOBOALI	Swasta	Baik	Turun	1,79	Peringkat atas (1-20 persen)	Sedang	Naik	23,81	Peringkat menengah bawah (61-80 persen)
31	SMP NEGERI 1 AIRGEGAS	Negeri	Sedang	Naik	28,88	Peringkat menengah (41-60 persen)	Sedang	Naik	15,56	Peringkat menengah bawah (61-80 persen)
32	SMP NEGERI 1 LEPAR	Negeri	Sedang	Turun	25,29	Peringkat bawah (81-100 persen)	Kurang	Turun	12,07	Peringkat bawah (81-100 persen)
33	SMP NEGERI 1 PAYUNG	Negeri	Baik	Naik	6,67	Peringkat atas (1-20 persen)	Baik	Naik	22,23	Peringkat atas (1-20 persen)
34	SMP NEGERI 1 SIMPANG RIMBA	Negeri	Sedang	Turun	22,23	Peringkat menengah (41-60 persen)	Sedang	Naik	22,22	Peringkat menengah atas (21-40 persen)
35	SMP NEGERI 1 TOBOALI	Negeri	Baik	Turun	2,23	Peringkat atas (1-20 persen)	Baik	Naik	42,22	Peringkat atas (1-20 persen)
36	SMP NEGERI 2 AIRGEGAS	Negeri	Baik	Naik	2,22	Peringkat atas (1-20 persen)	Baik	Naik	6,66	Peringkat menengah atas (21-40 persen)
37	SMP NEGERI 1 PULAU BESAR	Negeri	Sedang	Naik	11,11	Peringkat menengah bawah (61-80 persen)	Sedang	Naik	15,55	Peringkat menengah bawah (61-80 persen)
38	SD NEGERI 7 SIMPANG RIMBA	Negeri	Baik	Tidak Berubah	0	Peringkat menengah atas (21-40 persen)	Sedang	Turun	30,00	Peringkat menengah bawah (61-80 persen)
39	SD NEGERI 7 TOBOALI	Negeri	Baik	Turun	3,33	Peringkat menengah (41-60 persen)	Sedang	Tidak Berubah	0	Peringkat menengah bawah (61-80 persen)
40	SD NEGERI 8 AIRGEGAS	Negeri	Baik	Turun	3,34	Peringkat menengah atas (21-40 persen)	Baik	Naik	10,00	Peringkat menengah atas (21-40 persen)
41	SD NEGERI 8 SIMPANG RIMBA	Negeri	Baik	Naik	13,33	Peringkat menengah atas (21-40 persen)	Sedang	Tidak Berubah	0	Peringkat menengah (41-60 persen)
42	SD NEGERI 8 PAYUNG	Negeri	Baik	Naik	10,71	Peringkat menengah atas (21-40 persen)	Sedang	Tidak Berubah	0	Peringkat menengah bawah (61-80 persen)
43	SD NEGERI 8 TOBOALI	Negeri	Sedang	Turun	33,33	Peringkat bawah (81-100 persen)	Sedang	Turun	33,33	Peringkat menengah bawah (61-80 persen)
44	SD NEGERI 9 AIRGEGAS	Negeri	Baik	Naik	30,47	Peringkat menengah (41-60 persen)	Sedang	Turun	4,29	Peringkat menengah bawah (61-80 persen)
45	SD NEGERI 9 PAYUNG	Negeri	Baik	Turun	1,01	Peringkat atas (1-20 persen)	Baik	Naik	0,51	Peringkat menengah atas (21-40 persen)
46	SD NEGERI 9 SIMPANG RIMBA	Negeri	Baik	Naik	23,33	Peringkat menengah atas (21-40 persen)	Sedang	Naik	13,33	Peringkat menengah (41-60 persen)
47	SD NEGERI 9 TOBOALI	Negeri	Baik	Naik	3,33	Peringkat menengah (41-60 persen)	Baik	Naik	16,67	Peringkat menengah atas (21-40 persen)
48	SMP NEGERI 2 TOBOALI	Negeri	Baik	Tidak Berubah	0	Peringkat menengah atas (21-40 persen)	Baik	Naik	26,67	Peringkat atas (1-20 persen)
49	SD NEGERI 28 TOBOALI	Negeri	Baik	Naik	23,34	Peringkat menengah atas (21-40 persen)	Sedang	Naik	13,33	Peringkat menengah (41-60 persen)



No.	Nama Satuan Pendidikan	Status Satuan Pendidikan	A.1 Kemampuan literasi				A.2 Kemampuan numerasi			
			Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Kabupaten	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Kabupaten
50	SD NEGERI 1 SIMPANG RIMBA	Negeri	Sedang	Turun	10,00	Peringkat menengah bawah (61-80 persen)	Sedang	Turun	6,66	Peringkat menengah bawah (61-80 persen)
51	SD NEGERI 1 LEPAR	Negeri	Baik	Naik	10,00	Peringkat atas (1-20 persen)	Baik	Naik	13,34	Peringkat atas (1-20 persen)
52	SD NEGERI 1 TOBOALI	Negeri	Baik	Naik	8,67	Peringkat atas (1-20 persen)	Baik	Naik	8,67	Peringkat menengah atas (21-40 persen)
53	SD NEGERI 10 PAYUNG	Negeri	Sedang	Tidak Berubah	0	Peringkat menengah bawah (61-80 persen)	Kurang	Turun	40,00	Peringkat bawah (81-100 persen)
54	SD NEGERI 10 AIRGEGAS	Negeri	Sedang	Turun	10,00	Peringkat bawah (81-100 persen)	Kurang	Turun	23,33	Peringkat bawah (81-100 persen)
55	SD NEGERI 10 SIMPANG RIMBA	Negeri	Baik	Turun	16,92	Peringkat menengah (41-60 persen)	Sedang	Turun	22,31	Peringkat menengah (41-60 persen)
56	SD NEGERI 10 TOBOALI	Negeri	Sedang	Turun	30,00	Peringkat menengah bawah (61-80 persen)	Sedang	Turun	23,33	Peringkat menengah bawah (61-80 persen)
57	SD NEGERI 11 AIRGEGAS	Negeri	Sedang	Turun	3,33	Peringkat menengah bawah (61-80 persen)	Sedang	Naik	16,67	Peringkat menengah bawah (61-80 persen)
58	SD NEGERI 11 SIMPANG RIMBA	Negeri	Baik	Naik	36,67	Peringkat menengah (41-60 persen)	Sedang	Naik	26,67	Peringkat menengah (41-60 persen)
59	SD NEGERI 6 PULAU BESAR	Negeri	Baik	Naik	23,53	Peringkat atas (1-20 persen)	Baik	Naik	35,29	Peringkat atas (1-20 persen)
60	SD NEGERI 11 TOBOALI	Negeri	Kurang	Turun	34,53	Peringkat bawah (81-100 persen)	Kurang	Turun	12,62	Peringkat bawah (81-100 persen)
61	SD NEGERI 1 PAYUNG	Negeri	Baik	Naik	16,84	Peringkat menengah atas (21-40 persen)	Baik	Naik	10,60	Peringkat menengah atas (21-40 persen)
62	SD NEGERI 1 AIRGEGAS	Negeri	Baik	Naik	40,00	Peringkat atas (1-20 persen)	Baik	Naik	36,67	Peringkat atas (1-20 persen)
63	SD KARYA	Swasta	Baik	Naik	10,00	Peringkat atas (1-20 persen)	Baik	Naik	3,33	Peringkat menengah atas (21-40 persen)
64	SD NEGERI 12 AIRGEGAS	Negeri	Sedang	Turun	16,67	Peringkat bawah (81-100 persen)	Sedang	Tidak Berubah	0	Peringkat menengah bawah (61-80 persen)
65	SD NEGERI 27 TOBOALI	Negeri	Sedang	Naik	10,00	Peringkat menengah bawah (61-80 persen)	Kurang	Turun	23,33	Peringkat bawah (81-100 persen)
66	SD NEGERI 2 AIRGEGAS	Negeri	Baik	Tidak Berubah	0	Peringkat atas (1-20 persen)	Baik	Turun	3,34	Peringkat atas (1-20 persen)
67	SD NEGERI 2 PAYUNG	Negeri	Baik	Turun	10,00	Peringkat menengah atas (21-40 persen)	Baik	Turun	6,66	Peringkat atas (1-20 persen)
68	SD NEGERI 2 LEPAR	Negeri	Baik	Naik	16,66	Peringkat atas (1-20 persen)	Baik	Naik	30,00	Peringkat atas (1-20 persen)
69	SD NEGERI 2 TOBOALI	Negeri	Baik	Turun	6,67	Peringkat menengah (41-60 persen)	Sedang	Turun	6,66	Peringkat menengah bawah (61-80 persen)
70	SD NEGERI 20 TOBOALI	Negeri	Sedang	Turun	13,33	Peringkat menengah bawah (61-80 persen)	Sedang	Turun	3,34	Peringkat bawah (81-100 persen)
71	SD NEGERI 21 TOBOALI	Negeri	Kurang	Turun	32,30	Peringkat bawah (81-100 persen)	Kurang	Turun	19,08	Peringkat bawah (81-100 persen)
72	SD NEGERI 22 TOBOALI	Negeri	Baik	Naik	71,43	Peringkat atas (1-20 persen)	Baik	Naik	65,57	Peringkat atas (1-20 persen)
73	SD NEGERI 23 TOBOALI	Negeri	Sedang	Naik	23,75	Peringkat bawah (81-100 persen)	Sedang	Naik	23,50	Peringkat bawah (81-100 persen)
74	SD NEGERI 24 TOBOALI	Negeri	Baik	Naik	70,00	Peringkat atas (1-20 persen)	Baik	Naik	56,67	Peringkat menengah atas (21-40)



No.	Nama Satuan Pendidikan	Status Satuan Pendidikan	A.1 Kemampuan literasi				A.2 Kemampuan numerasi			
			Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Kabupaten	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Kabupaten
75	SD NEGERI 25 TOBOALI	Negeri	Sedang	Naik	20,00	Peringkat menengah bawah (61-80 persen)	Sedang	Naik	30,00	Peringkat menengah bawah (61-80 persen)
76	SD NEGERI 26 TOBOALI	Negeri	Baik	Naik	69,23	Peringkat atas (1-20 persen)	Baik	Naik	58,74	Peringkat menengah atas (21-40 persen)
77	SD NEGERI 2 SIMPANG RIMBA	Negeri	Baik	Naik	4,10	Peringkat menengah (41-60 persen)	Sedang	Turun	1,54	Peringkat menengah (41-60 persen)
78	SD NEGERI 19 TOBOALI	Negeri	Sedang	Naik	16,67	Peringkat menengah bawah (61-80 persen)	Sedang	Naik	16,66	Peringkat bawah (81-100 persen)
79	SD NEGERI 18 TOBOALI	Negeri	Sedang	Naik	20,00	Peringkat menengah bawah (61-80 persen)	Kurang	Turun	10,00	Peringkat bawah (81-100 persen)
80	SD NEGERI 7 PULAU BESAR	Negeri	Baik	Naik	2,02	Peringkat menengah atas (21-40 persen)	Baik	Naik	11,11	Peringkat atas (1-20 persen)
81	SD NEGERI 12 TOBOALI	Negeri	Sedang	Turun	10,00	Peringkat menengah bawah (61-80 persen)	Sedang	Turun	3,33	Peringkat menengah bawah (61-80 persen)
82	SD NEGERI 1 PULAU BESAR	Negeri	Baik	Turun	11,85	Peringkat menengah atas (21-40 persen)	Baik	Naik	0,37	Peringkat menengah atas (21-40 persen)
83	SD NEGERI 13 TOBOALI	Negeri	Baik	Turun	3,33	Peringkat menengah (41-60 persen)	Sedang	Turun	3,33	Peringkat menengah (41-60 persen)
84	SD NEGERI 2 PULAU BESAR	Negeri	Baik	Naik	23,67	Peringkat menengah atas (21-40 persen)	Baik	Naik	50,41	Peringkat atas (1-20 persen)
85	SD NEGERI 14 TOBOALI	Negeri	Baik	Naik	10,00	Peringkat menengah (41-60 persen)	Baik	Naik	43,33	Peringkat atas (1-20 persen)
86	SD NEGERI 3 PULAU BESAR	Negeri	Baik	Naik	13,33	Peringkat menengah atas (21-40 persen)	Sedang	Turun	15,56	Peringkat menengah bawah (61-80 persen)
87	SD NEGERI 15 TOBOALI	Negeri	Sedang	Turun	30,00	Peringkat bawah (81-100 persen)	Sedang	Turun	20,00	Peringkat bawah (81-100 persen)
88	SD NEGERI 16 TOBOALI	Negeri	Baik	Naik	10,00	Peringkat menengah (41-60 persen)	Baik	Naik	50,00	Peringkat menengah atas (21-40 persen)
89	SD NEGERI 4 PULAU BESAR	Negeri	Baik	Naik	11,11	Peringkat menengah (41-60 persen)	Baik	Naik	40,74	Peringkat menengah atas (21-40 persen)
90	SD NEGERI 17 TOBOALI	Negeri	Baik	Naik	9,77	Peringkat atas (1-20 persen)	Sedang	Turun	6,67	Peringkat menengah (41-60 persen)
91	SD NEGERI 5 PULAU BESAR	Negeri	Baik	Naik	22,14	Peringkat menengah atas (21-40 persen)	Sedang	Naik	9,29	Peringkat menengah (41-60 persen)
92	SMP NEGERI 1 KEP. PONGOK	Negeri	Sedang	Naik	4,45	Peringkat bawah (81-100 persen)	Sedang	Naik	15,56	Peringkat menengah bawah (61-80 persen)
93	SMP NEGERI 2 SIMPANG RIMBA	Negeri	Sedang	Turun	4,45	Peringkat menengah (41-60 persen)	Sedang	Naik	17,77	Peringkat menengah atas (21-40 persen)
94	SMP NEGERI 2 LEPAR	Negeri	Sedang	Naik	13,33	Peringkat menengah (41-60 persen)	Sedang	Naik	22,22	Peringkat menengah (41-60 persen)
95	SMP NEGERI 2 PAYUNG	Negeri	Baik	Turun	8,89	Peringkat menengah atas (21-40 persen)	Sedang	Naik	2,22	Peringkat menengah atas (21-40 persen)
96	SMP NEGERI 4 AIRGEGAS	Negeri	Baik	Naik	20,00	Peringkat menengah atas (21-40 persen)	Sedang	Naik	20,00	Peringkat menengah (41-60 persen)
97	SMP NEGERI 1	Negeri	Baik	Naik	25,02	Peringkat	Sedang	Naik	40,00	Peringkat



No.	Nama Satuan Pendidikan	Status Satuan Pendidikan	A.1 Kemampuan literasi				A.2 Kemampuan numerasi			
			Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Kabupaten	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Kabupaten
	TUKAK SADAI					menengah atas (21-40 persen)				menengah (41-60 persen)
98	SMP NEGERI 3 TOBOALI	Negeri	Sedang	Turun	11,11	Peringkat menengah (41-60 persen)	Sedang	Tidak Berubah	0	Peringkat bawah (81-100 persen)
99	SMP NEGERI 3 AIRGEGAS	Negeri	Baik	Turun	11,11	Peringkat menengah (41-60 persen)	Sedang	Naik	26,66	Peringkat menengah (41-60 persen)
100	SMP NEGERI 3 LEPAR	Negeri	Sedang	Naik	0,63	Peringkat bawah (81-100 persen)	Sedang	Turun	10,39	Peringkat bawah (81-100 persen)
101	SMP NEGERI 4 TOBOALI	Negeri	Kurang	Turun	15,55	Peringkat bawah (81-100 persen)	Kurang	Naik	6,67	Peringkat bawah (81-100 persen)
102	SMP NEGERI 5 TOBOALI	Negeri	Baik	Naik	13,33	Peringkat menengah (41-60 persen)	Sedang	Naik	22,22	Peringkat menengah (41-60 persen)
103	SMP NEGERI 6 TOBOALI	Negeri	Baik	Naik	6,67	Peringkat menengah atas (21-40 persen)	Sedang	Naik	20,00	Peringkat menengah atas (21-40 persen)
104	SMP NEGERI 7 TOBOALI	Negeri	Sedang	Naik	15,76	Peringkat menengah bawah (61-80 persen)	Kurang	Naik	10,00	Peringkat bawah (81-100 persen)
105	SMP NEGERI 3 SIMPANG RIMBA	Negeri	Sedang	Turun	20,00	Peringkat bawah (81-100 persen)	Sedang	Naik	13,34	Peringkat menengah bawah (61-80 persen)
106	SD NEGERI 11 PAYUNG	Negeri	Baik	Naik	10,00	Peringkat atas (1-20 persen)	Baik	Naik	12,22	Peringkat menengah atas (21-40 persen)
107	SMP NEGERI 5 AIRGEGAS	Negeri	Baik	Naik	17,78	Peringkat atas (1-20 persen)	Baik	Naik	37,77	Peringkat atas (1-20 persen)
108	SMP NEGERI 3 PAYUNG	Negeri	Baik	Turun	1,11	Peringkat atas (1-20 persen)	Baik	Naik	20,56	Peringkat atas (1-20 persen)
109	SMP NEGERI 4 PAYUNG	Negeri	Sedang	Turun	4,44	Peringkat menengah bawah (61-80 persen)	Sedang	Naik	4,45	Peringkat menengah bawah (61-80 persen)
110	SMP NEGERI 8 TOBOALI	Negeri	Sedang	Turun	16,42	Peringkat menengah bawah (61-80 persen)	Sedang	Naik	4,45	Peringkat menengah bawah (61-80 persen)
111	SMP NEGERI 2 TUKAK SADAI	Negeri	Baik	Naik	20,00	Peringkat menengah atas (21-40 persen)	Baik	Naik	55,55	Peringkat atas (1-20 persen)
112	SMP DARUL ISTIQOMAH	Swasta	Sedang	Turun	20,00	Peringkat menengah bawah (61-80 persen)	Sedang	Naik	2,22	Peringkat menengah (41-60 persen)
113	SD NEGERI 5 LEPAR	Negeri	Baik	Naik	1,56	Peringkat atas (1-20 persen)	Baik	Naik	10,53	Peringkat atas (1-20 persen)
114	SD NEGERI 5 TUKAK SADAI	Negeri	Baik	Tidak Berubah	0	Peringkat atas (1-20 persen)	Baik	Naik	14,74	Peringkat atas (1-20 persen)
115	SD NEGERI 30 TOBOALI	Negeri	Sedang	Turun	38,82	Peringkat bawah (81-100 persen)	Kurang	Turun	42,35	Peringkat bawah (81-100 persen)
116	SD NEGERI 14 AIRGEGAS	Negeri	Baik	Turun	6,66	Peringkat menengah atas (21-40 persen)	Sedang	Turun	40,00	Peringkat menengah bawah (61-80 persen)
117	SD NEGERI 15 AIRGEGAS	Negeri	Sedang	Turun	26,31	Peringkat menengah bawah (61-80 persen)	Sedang	Naik	10,53	Peringkat menengah (41-60 persen)
118	SD NEGERI 13 AIRGEGAS	Negeri	Kurang	Turun	45,70	Peringkat bawah (81-100 persen)	Sedang	Turun	24,44	Peringkat menengah bawah (61-80 persen)
119	SD NEGERI 12 PAYUNG	Negeri	Sedang	Turun	10,31	Peringkat bawah (81-100 persen)	Sedang	Naik	29,40	Peringkat menengah (41-60 persen)
120	SMP NEGERI 6 SATU ATAP AIRGEGAS	Negeri	Baik	Naik	38,65	Peringkat atas (1-20 persen)	Baik	Naik	73,95	Peringkat atas (1-20 persen)
121	SMP NEGERI 2 PULAU BESAR	Negeri	Sedang	Naik	4,45	Peringkat menengah	Sedang	Naik	24,45	Peringkat menengah



No.	Nama Satuan Pendidikan	Status Satuan Pendidikan	A.1 Kemampuan literasi				A.2 Kemampuan numerasi			
			Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Kabupaten	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Kabupaten
						(41-60 persen)				atas (21-40 persen)
122	SDIT Alam Cahaya	Swasta	Baik	Naik	6,70	Peringkat menengah atas (21-40 persen)	Baik	Naik	15,37	Peringkat menengah atas (21-40 persen)
123	SD MUHAMMADIYAH TOBOALI	Swasta	Baik	Turun	3,33	Peringkat menengah (41-60 persen)	Sedang	Turun	6,67	Peringkat menengah (41-60 persen)
124	SMAS Darul Istiqomah	Swasta	Sedang	Turun	14,29	Peringkat menengah bawah (61-80 persen)	Baik	Naik	38,10	Peringkat menengah atas (21-40 persen)
125	SD NEGERI 31 TOBOALI	Negeri	Kurang	Turun	45,00	Peringkat bawah (81-100 persen)	Kurang	Turun	10,00	Peringkat bawah (81-100 persen)
126	SD NEGERI 16 AIRGEGAS	Negeri	Sedang	Turun	32,48	Peringkat bawah (81-100 persen)	Kurang	Turun	43,59	Peringkat bawah (81-100 persen)
127	SMP MUHAMMADIYAH TOBOALI	Swasta	Sedang	Turun	6,67	Peringkat menengah bawah (61-80 persen)	Sedang	Naik	4,44	Peringkat menengah bawah (61-80 persen)
128	SMP NEGERI 5 PAYUNG	Negeri	Baik	Tidak Berubah	0	Peringkat menengah atas (21-40 persen)	Sedang	Naik	6,67	Peringkat menengah atas (21-40 persen)
129	SMP IT PONDOK TAHFIDZ QURAN	Swasta	Baik	Naik	31,11	Peringkat menengah atas (21-40 persen)	Sedang	Naik	13,34	Peringkat menengah (41-60 persen)
130	SMP NU TOBOALI	Swasta	Sedang	Turun	16,60	Peringkat menengah bawah (61-80 persen)	Kurang	Turun	11,11	Peringkat bawah (81-100 persen)
131	SD NEGERI 32 TOBOALI	Negeri	Baik	Naik	21,43	Peringkat menengah bawah (61-80 persen)	Sedang	Naik	17,86	Peringkat bawah (81-100 persen)
132	SD NEGERI 13 PAYUNG	Negeri	Baik	Turun	10,63	Peringkat menengah (41-60 persen)	Baik	Turun	1,93	Peringkat atas (1-20 persen)
133	SD NEGERI 12 SIMPANG RIMBA	Negeri	Sedang	Tidak Tersedia (Satdik tidak mengikuti AN tahun lalu)	Tidak Tersedia (Satdik tidak mengikuti AN tahun lalu)	Peringkat menengah bawah (61-80 persen)	Sedang	Tidak Tersedia (Satdik tidak mengikuti AN tahun lalu)	Tidak Tersedia (Satdik tidak mengikuti AN tahun lalu)	Peringkat menengah bawah (61-80 persen)
134	SMP QURAN CAHAYA	Swasta	Sedang	Naik	5,23	Peringkat menengah (41-60 persen)	Sedang	Naik	21,54	Peringkat menengah (41-60 persen)
135	PKBM GEMAR	Swasta	Capaian Tidak Tersedia	Tidak Tersedia (partisipasi Satdik mengikuti AN tidak memadai)	Tidak Tersedia (partisipasi Satdik mengikuti AN tidak memadai)	Tidak Tersedia (partisipasi Satdik mengikuti AN tidak memadai)	Capaian Tidak Tersedia	Tidak Tersedia (partisipasi Satdik mengikuti AN tidak memadai)	Tidak Tersedia (partisipasi Satdik mengikuti AN tidak memadai)	Tidak Tersedia (partisipasi Satdik mengikuti AN tidak memadai)
136	PKBM GEMAR	Swasta	Capaian Tidak Tersedia	Tidak Tersedia (partisipasi Satdik mengikuti AN tidak memadai)	Tidak Tersedia (partisipasi Satdik mengikuti AN tidak memadai)	Tidak Tersedia (partisipasi Satdik mengikuti AN tidak memadai)	Capaian Tidak Tersedia	Tidak Tersedia (partisipasi Satdik mengikuti AN tidak memadai)	Tidak Tersedia (partisipasi Satdik mengikuti AN tidak memadai)	Tidak Tersedia (partisipasi Satdik mengikuti AN tidak memadai)
137	PKBM MAJU LANCAR	Swasta	Kurang	Tidak Tersedia (Satdik tidak mengikuti AN tahun lalu)	Tidak Tersedia (Satdik tidak mengikuti AN tahun lalu)	Peringkat bawah (81-100 persen)	Kurang	Turun	20,00	Peringkat bawah (81-100 persen)
138	PKBM MAJU LANCAR	Swasta	Kurang	Naik	21,41	Peringkat bawah (81-100 persen)	Kurang	Naik	25,41	Peringkat bawah (81-100 persen)
139	PKBM MANDIRI	Swasta	Sedang	Naik	3,33	Peringkat menengah bawah (61-80 persen)	Sedang	Naik	10,40	Peringkat bawah (81-100 persen)
140	PKBM MANDIRI	Swasta	Sedang	Naik	17,78	Peringkat menengah bawah (61-80 persen)	Sedang	Naik	15,55	Peringkat bawah (81-100 persen)
141	PKBM MANDIRI	Swasta	Capaian Tidak Tersedia	Tidak Tersedia (Satdik tidak mengikuti AN)	Tidak Tersedia (Satdik tidak mengikuti AN)	Tidak Tersedia (Satdik tidak mengikuti AN)	Capaian Tidak Tersedia	Tidak Tersedia (Satdik tidak mengikuti AN)	Tidak Tersedia (Satdik tidak mengikuti AN)	Tidak Tersedia (Satdik tidak mengikuti AN)



No.	Nama Satuan Pendidikan	Status Satuan Pendidikan	A.1 Kemampuan literasi				A.2 Kemampuan numerasi			
			Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Kabupaten	Label Capaian	Perubahan dari Tahun Lalu	Perubahan Nilai	Peringkat di Kabupaten
142	PKBM DARUL HIKMAH	Swasta	Capaian Tidak Tersedia	Tidak Tersedia (Satdik tidak mengikuti AN)	Tidak Tersedia (Satdik tidak mengikuti AN)	Tidak Tersedia (Satdik tidak mengikuti AN)	Capaian Tidak Tersedia	Tidak Tersedia (Satdik tidak mengikuti AN)	Tidak Tersedia (Satdik tidak mengikuti AN)	Tidak Tersedia (Satdik tidak mengikuti AN)
143	PKBM DARUL HIKMAH	Swasta	Capaian Tidak Tersedia	Tidak Tersedia (Satdik tidak mengikuti AN)	Tidak Tersedia (Satdik tidak mengikuti AN)	Tidak Tersedia (Satdik tidak mengikuti AN)	Capaian Tidak Tersedia	Tidak Tersedia (Satdik tidak mengikuti AN)	Tidak Tersedia (Satdik tidak mengikuti AN)	Tidak Tersedia (Satdik tidak mengikuti AN)
144	PKBM ISTIQOMAH	Swasta	Sedang	Tidak Tersedia (Satdik tidak mengikuti AN tahun lalu)	Tidak Tersedia (Satdik tidak mengikuti AN tahun lalu)	Peringkat bawah (81-100 persen)	Kurang	Turun	20,00	Peringkat bawah (81-100 persen)
145	PKBM ISTIQOMAH	Swasta	Kurang	Naik	4,76	Peringkat bawah (81-100 persen)	Kurang	Turun	14,29	Peringkat bawah (81-100 persen)
146	SPNF SKB BANGKA SELATAN	Negeri	Kurang	Naik	10,19	Peringkat bawah (81-100 persen)	Kurang	Naik	11,11	Peringkat bawah (81-100 persen)
147	SPNF SKB BANGKA SELATAN	Negeri	Baik	Naik	33,33	Peringkat atas (1-20 persen)	Baik	Naik	33,33	Peringkat atas (1-20 persen)
148	PKBM BHINEKA TUNGGAL IKA	Swasta	Sedang	Naik	60,91	Peringkat menengah atas (21-40 persen)	Sedang	Naik	36,36	Peringkat menengah bawah (61-80 persen)
149	PKBM BHINEKA TUNGGAL IKA	Swasta	Capaian Tidak Tersedia	Tidak Tersedia (Satdik tidak mengikuti AN)	Tidak Tersedia (Satdik tidak mengikuti AN)	Tidak Tersedia (Satdik tidak mengikuti AN)	Capaian Tidak Tersedia	Tidak Tersedia (Satdik tidak mengikuti AN)	Tidak Tersedia (Satdik tidak mengikuti AN)	Tidak Tersedia (Satdik tidak mengikuti AN)
150	PKBM MAJU BERSAMA	Swasta	Kurang	Naik	4,17	Peringkat bawah (81-100 persen)	Baik	Naik	57,20	Peringkat atas (1-20 persen)
151	PKBM MAJU BERSAMA	Swasta	Kurang	Turun	15,88	Peringkat bawah (81-100 persen)	Sedang	Naik	18,25	Peringkat menengah (41-60 persen)
152	PKBM DARUS SYAFAAH	Swasta	Sedang	Naik	44,45	Peringkat menengah atas (21-40 persen)	Baik	Naik	47,22	Peringkat menengah atas (21-40 persen)
153	PKBM DARUS SYAFAAH	Swasta	Capaian Tidak Tersedia	Tidak Tersedia (partisipasi Satdik mengikuti AN tidak memadai)	Tidak Tersedia (partisipasi Satdik mengikuti AN tidak memadai)	Tidak Tersedia (partisipasi Satdik mengikuti AN tidak memadai)	Capaian Tidak Tersedia	Tidak Tersedia (partisipasi Satdik mengikuti AN tidak memadai)	Tidak Tersedia (partisipasi Satdik mengikuti AN tidak memadai)	Tidak Tersedia (partisipasi Satdik mengikuti AN tidak memadai)
154	PKBM DARUS SYAFAAH	Swasta	Capaian Tidak Tersedia	Tidak Tersedia (Satdik tidak mengikuti AN tahun lalu)	Tidak Tersedia (Satdik tidak mengikuti AN tahun lalu)	Tidak Tersedia (partisipasi Satdik mengikuti AN tahun lalu tidak memadai)	Capaian Tidak Tersedia	Tidak Tersedia (Satdik tidak mengikuti AN tahun lalu)	Tidak Tersedia (Satdik tidak mengikuti AN tahun lalu)	Tidak Tersedia (partisipasi Satdik mengikuti AN tidak memadai)
155	PKBM PONGOK BERKAH	Swasta	Capaian Tidak Tersedia	Tidak Tersedia (Satdik tidak mengikuti AN)	Tidak Tersedia (Satdik tidak mengikuti AN)	Tidak Tersedia (Satdik tidak mengikuti AN)	Capaian Tidak Tersedia	Tidak Tersedia (Satdik tidak mengikuti AN)	Tidak Tersedia (Satdik tidak mengikuti AN)	Tidak Tersedia (Satdik tidak mengikuti AN)
156	PKBM PONGOK BERKAH	Swasta	Capaian Tidak Tersedia	Tidak Tersedia (Satdik tidak mengikuti AN)	Tidak Tersedia (Satdik tidak mengikuti AN)	Tidak Tersedia (Satdik tidak mengikuti AN)	Capaian Tidak Tersedia	Tidak Tersedia (Satdik tidak mengikuti AN)	Tidak Tersedia (Satdik tidak mengikuti AN)	Tidak Tersedia (Satdik tidak mengikuti AN)

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Selatan, 2024

2.2.2.11. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat disingkat PKBM, adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk masyarakat yang bergerak dalam bidang pendidikan Non Formal. PKBM ini masih berada di bawah pengawasan dan bimbingan dari Dinas Pendidikan Nasional. Sebagai salah satu satuan pendidikan non formal, PKBM diharapkan dapat menjadi wadah bagi kegiatan masyarakat untuk lebih meningkatkan potensi diri dan keterampilan.



PKBM ini bisa berupa tingkat Desa ataupun Kecamatan dan untuk mendirikan PKBM bisa dari unsur apapun oleh siapapun yang tentunya telah memenuhi syarat-syarat kelembagaan. Melalui kerjasama pemerintah dan masyarakat, PKBM dibentuk dengan tujuan membuka kesempatan seluas luasnya bagi masyarakat kurang mampu untuk meningkatkan pengetahuan, sikap mental dan keterampilan. Ketiga unsur ini akan membentuk masyarakat yang mampu bersaing dan mencari nafkah secara mandiri. Cakupan kegiatan PKBM yang sering dilakukan :

- Kejar Paket A Setara SD/MI
- Kejar Paket B Setara SMP/MTs
- Kejar Paket C Setara SMA/MA
- PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)
- KBU (Kelompok Belajar Usaha)
- KUPP (Kelompok Usaha Pemuda Produktif)
- Pemberdayaan Perempuan
- Keaksaraan Fungsional Dasar Dewasa
- Taman Bacaan Masyarakat (Perpustakaan)
- Kursus-kursus

Jumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kabupaten Bangka Selatan tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.63
Jumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Di Kabupaten Bangka Selatan

No.	Nama PKBM	Status	Akreditasi	Alamat	Kecamatan
1	SPNF SKB Bangka Selatan	Negeri	B	Komplek Perkantoran Terpadu Kab. Basel	Toboali
2	PKBM Gemar	Swasta	C	Jl. Raya Desa Rias	Toboali
3	PKBM Istiqomah	Swasta	C	Desa Kaposang	Toboali
4	PKBM Maju Lancar	Swasta	C	Jl. Ki Hajar Dewantara Desa Rias	Toboali
5	PKBM Mandiri	Swasta	B	Desa Serdang	Toboali
6	PKBM Darus Syafaah	Swasta	C	Jl. Melati Sidoharjo	Airgegas
7	PKBM Maju Bersama	Swasta	C	Desa Payung	Payung
8	PKBM Tunas Bangsa	Swasta	C	Jl. Raya Desa SJP	Pulau Besar
9	PKBM Bhineka Tunggal Ika	Swasta	C	Jl. Raya Batin Tikal	Simpang Rimba



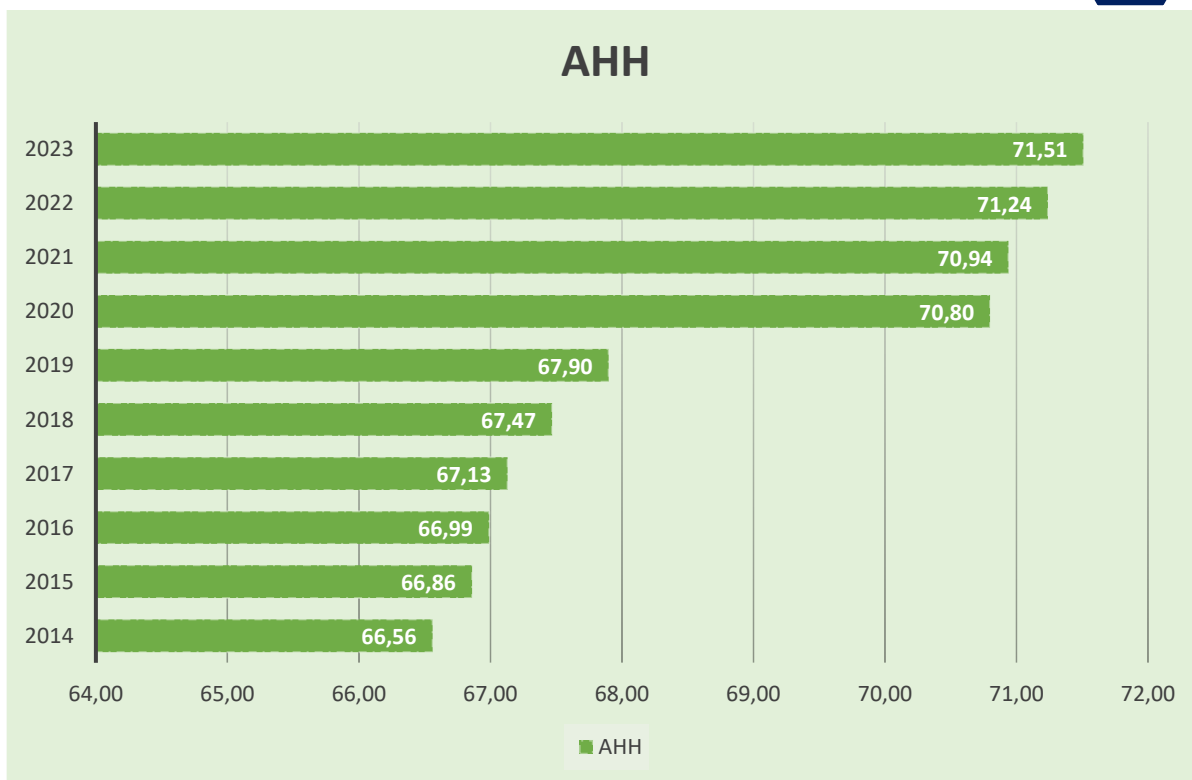
No.	Nama PKBM	Status	Akreditasi	Alamat	Kecamatan
10	PKBM Pongok Berkah	Swasta	C	Jl. Dusun Air Sagu	Kep. Pongok

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Selatan, 2024

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Bangka Selatan di tahun 2023 berjumlah 10 (sepuluh) Lembaga, 1 (satu) lembaga berstatus Negeri yang berlokasi di Komplek Perkantoran Terpadu Gunung Namak Toboali, 9 (sembilan) Lembaga lainnya berstatus Swasta, terdapat 2 (dua) Lembaga terakreditasi B dan terdapat 8 (delapan) Lembaga lainnya terakreditasi C, terdapat 5 (lima) Lembaga terletak di Kecamatan Toboali dan 5 (lima) Lembaga lainnya tersebar di 5 (lima) Kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Airgegas, Payung, Pulau Besar, Simpang Rimba dan Kepulauan Pongok.

2.2.2.12. Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup merupakan rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x , pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka harapan hidup pada dasarnya merupakan gambaran kondisi suatu wilayah secara garis besar. Semakin tingginya angka harapan hidup di suatu wilayah, menandakan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Selain itu, Angka Harapan Hidup merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai derajat kesehatan penduduk yang berbeda penilaiannya per wilayah tergantung dari kualitas hidup yang mampu dicapai penduduk. Berikut gambar dan tabel Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014-2023 :



Gambar 2.36
Grafik Angka Harapan Hidup
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014-2023
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan, 2024

Tabel 2.64
Angka Harapan Hidup Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014-2023

No.	Tahun	Angka Harapan Hidup
1	2014	66,56
2	2015	66,86
3	2016	66,99
4	2017	67,13
5	2018	67,47
6	2019	67,90
7	2020	70,80
8	2021	70,94
9	2022	71,24
10	2023	71,51

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan, 2024

Berdasarkan tabel tersebut, tercatat peningkatan kualitas kesehatan penduduk di Kabupaten Bangka Selatan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2023 dengan kata lain semakin meningkatnya derajat kesehatan



penduduk Kabupaten Bangka Selatan. Peningkatan Angka Harapan Hidup Kabupaten Bangka Selatan ini selain menandakan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Dikarenakan juga adanya perubahan metode perhitungan dengan menggunakan Metode long form yaitu pembaharuan data penduduk dengan pertanyaan yang lebih detail kepada seluruh responden. Variabel yang detail diharapkan bisa mencerminkan kondisi riil di masyarakat dan merupakan bagian dari Sensus Penduduk tahun 2020 sehingga pada tahun 2023 mulai menggunakan hasil metode penghitungan berdasarkan long form yang dihitung sejak tahun 2020.

Peningkatan angka harapan hidup dari tahun 2014 sampai tahun 2023 sebesar 4,95 persen, di tahun 2013 sebesar 66,56 persen menjadi 71,51 persen di tahun 2023. Semakin meningkatnya angka harapan hidup di Kabupaten Bangka Selatan harus di pertahankan dan di tingkatkan lagi dengan membiasakan budaya Perilaku/Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Bangka Selatan.

Tabel 2.65
Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota
Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2023

No	Kab/Kota/Prov	Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kabupaten Bangka	70,47	70,48	70,52	70,56	70,73	70,99	72,47	72,56	72,80	73,03
2	Kabupaten Belitung	70,22	70,32	69,52	70,44	70,64	70,94	72,03	72,05	72,27	72,52
3	Kabupaten Bangka Barat	69,46	69,47	70,38	69,56	69,73	69,99	71,54	71,55	71,72	71,91
4	Kabupaten Bangka Tengah	69,98	70,28	66,99	70,49	70,78	71,16	72,83	72,96	73,26	73,54
5	Kabupaten Bangka Selatan	66,56	66,86	66,99	67,13	67,47	67,90	70,80	70,94	71,24	71,51
6	Kabupaten Belitung Timur	71,03	71,23	71,30	71,37	71,59	71,90	73,11	73,17	73,36	73,57
7	Kota Pangkalpinang	72,31	72,51	72,57	72,64	72,86	73,17	74,43	74,53	74,76	75,01
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		69,72	69,88	69,92	69,95	70,18	70,50	73,39	73,47	73,68	73,90

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2024

Berdasarkan tabel diatas, Kabupaten Bangka Selatan selama 10 (tahun) tahun terakhir dari 2014-2023 menempati urutan terakhir pencapaian Usia Harapan Hidup dibandingkan seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini harus menjadi perhatian serius seluruh stakeholder dan Pemerintah Kabupaten untuk memperbaiki pencapaian Usia Harapan Hidup.

2.2.2.13. *Infant Mortality Rate (IMR) Per 1000 Kelahiran Hidup*

Angka Kematian Bayi (AKB) atau *Infant Mortality Rate (IMR)* merupakan indikator yang lazim digunakan untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat, sehingga program-program kesehatan banyak yang menitikberatkan pada upaya penurunan AKB, dimana AKB merujuk pada jumlah bayi yang meninggal antara fase kelahiran hingga bayi umur < 1 tahun per 1.000 kelahiran hidup. Berikut gambaran Angka Kematian Bayi (AKB) atau *Infant Mortality Rate (IMR)* Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2013-2023 :

Tabel 2.66
Infant Mortality Rate (IMR) Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2013-2023

TAHUN	URAIAN	KECAMATAN								KAB. BANGKA SELATAN	IMR
		TOBOALI	AIRGEGAS	TUKAK SADAI	PAYUNG	PULAU BESAR	SIMPANG RIMBA	LEPAR	KEP. PONGOK		
2013	Jumlah Kematian Bayi	5	6	4	7	1	6	0	0	29	7,77
	Jumlah Kelahiran hidup	1.405	816	217	408	179	469	148	92	3.734	
2014	Jumlah Kematian Bayi	1	0	0	1	0	1	0	0	3	0,79
	Jumlah Kelahiran hidup	1.398	815	253	429	153	509	74	169	3.800	
2015	Jumlah Kematian Bayi	9	1	0	5	1	4	2	1	23	6,28
	Jumlah Kelahiran hidup	1.439	740	223	412	171	450	157	68	3.660	
2016	Jumlah Kematian Bayi	3	2	2	5	3	3	1	2	21	5,85
	Jumlah Kelahiran hidup	1.408	716	229	415	148	458	134	81	3.589	
2017	Jumlah Kematian Bayi	3	0	0	2	1	0	0	0	6	1,81
	Jumlah Kelahiran hidup	1.295	688	210	345	127	417	156	78	3.316	
2018	Jumlah Kematian Bayi	8	2	0	2	1	6	3	2	24	7,43
	Jumlah Kelahiran hidup	1.227	622	226	338	159	435	136	88	3.231	
2019	Jumlah Kematian Bayi	11	5	1	3	2	6	1	1	30	9,19
	Jumlah Kelahiran hidup	1.242	660	249	322	144	458	130	59	3.264	
2020	Jumlah Kematian Bayi	14	4	2	2	1	3	2	1	29	8,86
	Jumlah Kelahiran hidup	1.315	620	201	311	148	478	133	68	3.274	



TAHUN	URAIAN	KECAMATAN								KAB. BANGKA SELATAN	IMR
		TOBOALI	AIRGEGAS	TUKAK SADAI	PAYUNG	PULAU BESAR	SIMPANG RIMBA	LEPAR	KEP. PONGOK		
2021	Jumlah Kematian Bayi	4	3	0	1	1	3	1	2	15	5,05
	Jumlah Kelahiran hidup	1.216	572	160	304	141	400	110	68	2.971	
2022	Jumlah Kematian Bayi	10	0	2	3	1	1	1	0	18	6,41
	Jumlah Kelahiran hidup	1.077	548	164	290	128	416	111	73	2.807	
2023	Jumlah Kematian Bayi	10	5	3	2	1	4	2	2	29	10,10
	Jumlah Kelahiran hidup	1.174	525	181	281	148	397	103	62	2.871	

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Bangka Selatan, 2024

Angka Kematian Bayi Kabupaten Bangka Selatan dari tahun 2018 yaitu 1,24 persen dan mengalami kenaikan pada tahun 2019 yaitu sebesar 2,45 persen. Selanjutnya pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 0,92 persen dimana terdapat 2 bayi yang meninggal di Kecamatan Toboali dari 1.315 bayi yang lahir hidup dan terdapat 1 bayi yang meninggal di Kecamatan Lepar dari 1.315 bayi yang lahir hidup. Sehingga persentase kematian bayi per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Bangka Selatan diperoleh dari hasil perbandingan jumlah kematian bayi sebanyak 3 bayi dari total 3.274 bayi yang lahir hidup. Selanjutnya pada tahun 2021 angka kematian bayi meningkat drastis dari 0,92 persen menjadi 4,04 persen dimana angka tertinggi ada pada Kecamatan Toboali yaitu 4 kematian bayi dari 1.216 jumlah kelahiran hidup. Sehingga persentase kematian bayi per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Bangka Selatan diperoleh dari hasil perbandingan jumlah kematian bayi sebanyak 12 bayi dari total 2.971 bayi yang lahir hidup. Sementara untuk data terbaru pada tahun 2022 angka kematian bayi meningkat drastis dari 4,04 persen menjadi 6,41 persen dimana angka tertinggi ada pada Kecamatan Toboali yaitu 10 kematian bayi dari 1.077 jumlah kelahiran hidup. Sehingga persentase kematian bayi per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Bangka Selatan diperoleh dari hasil perbandingan jumlah kematian bayi sebanyak 18 bayi dari total 2.807 bayi yang lahir hidup dan pada tahun 2023 angka kematian bayi kembali meningkat dari 6,41 persen menjadi 10,10 persen dimana angka tertinggi ada pada Kecamatan Toboali yaitu 10 kematian bayi dari 1.174 jumlah kelahiran hidup. Sehingga persentase kematian bayi per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Bangka Selatan diperoleh dari hasil perbandingan jumlah kematian bayi sebanyak 29 bayi dari total 2.871 bayi yang lahir hidup.

2.2.2.14. Persentase Balita Gizi Buruk

Balita gizi buruk atau malnutrisi adalah kondisi ketika anak tidak menerima nutrisi, mineral, dan kalori yang cukup untuk membantu perkembangan organ vital. Gizi buruk akan berdampak pada pertumbuhan dan kesehatan anak. Beberapa faktor yang bisa menjadi penyebab balita gizi buruk :

- 1) Kurang ASI: Air susu ibu bagi anak yang baru lahir sangat penting karena mengandung nutrisi penting. Kurangnya ASI berisiko menyebabkan bayi gizi buruk.
- 2) Kurang makan: Kurangnya asupan makanan bisa memicu kekurangan nutrisi yang penting hingga berujung pada gizi buruk.
- 3) Gangguan pencernaan: Beberapa anak mungkin mengalami gangguan pencernaan, seperti penyakit Crohn's, yang membatasi kemampuan tubuh untuk menyerap nutrisi meski mengonsumsi makanan sehat.
- 4) Makan tidak teratur: Makan secara tidak teratur bisa memicu masalah pencernaan dan malnutrisi.
- 5) Kurang aktivitas: Pencernaan tidak akan berjalan lancar jika anak kurang beraktivitas hingga memicu malnutrisi.
- 6) Fasilitas layanan dasar buruk: Sejumlah layanan dasar, misalnya sanitasi, yang buruk juga bisa memicu masalah gizi.

Berikut gambaran Balita Gizi Buruk di Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2013-2023 :

Tabel 2.67
Balita Gizi buruk Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2013-2023

TAHUN	URAIAN	KECAMATAN								KAB. BANGKA SELATAN
		TOBOALI	AIRGEGAS	TUKAK SADAI	PAYUNG	PULAU BESAR	SIMPANG RIMBA	LEPAR	KEP. PONGOK	
2013	Jumlah Balita GiziBuruk	4	0	0	1	1	4	0	0	10
	Jumlah Balita	7.358	2.079	1.138	1.016	929	1.171	804	527	19.542
	persen Balita Gizi Buruk	0,05	-	-	0,09	0,11	0,34	-	-	0,05
2014	Jumlah Balita GiziBuruk	4	0	0	0	0	1	0	0	5
	Jumlah Balita	7.734	4.486	1.176	2.184	913	2.547	840	566	20.446
	persen Balita Gizi Buruk	0,05	-	-	-	-	0,04	-	-	0,02
2015	Jumlah Balita GiziBuruk	4	1	2	0	2	0	1	0	10
	Jumlah Balita	6.649	3.783	1.033	1.836	750	2.148	689	400	17.288
	persen Balita Gizi Buruk	0,06	0,03	0,19	-	0,27	-	0,14	-	0,06
2016	Jumlah Balita GiziBuruk	2	0	0	1	0	0	3	1	7



TAHUN	URAIAN	KECAMATAN								KAB. BANGKA SELATAN
		TOBOALI	AIRGEGAS	TUKAK SADAI	PAYUNG	PULAU BESAR	SIMPANG RIMBA	LEPAR	KEP. PONGOK	
	Jumlah Balita	7.179	4.140	1.129	1.979	832	2.280	723	399	18.661
	persen Balita Gizi Buruk	0,03	-	-	0,05	-	-	0,41	0,25	0,04
2017	Jumlah Balita Gizi Buruk	5	0	1	0	1	3	0	0	10
	Jumlah Balita	6.845	3.796	1.106	2.053	865	2.123	717	407	17.912
	persen Balita Gizi Buruk	0,07	-	0,09	-	0,12	0,14	-	-	0,06
2018	Jumlah Balita Gizi Buruk	5	3	-	-	-	-	3	-	11
	Jumlah Balita	6.989	3.333	1.200	1.819	808	1.820	646	362	16.977
	persen Balita Gizi Buruk	0,07	0,09	-	-	-	-	0,46	-	0,06
2019	Jumlah Balita Gizi Buruk	3	5	3	1	-	5	2	4	23
	Jumlah Balita	6.683	3.210	1.140	1.639	748	1.828	637	327	16.212
	persen Balita Gizi Buruk	0,04	0,16	0,26	0,06	-	0,27	0,31	1,22	0,14
2020	Jumlah Balita Gizi Buruk	3	5	8	5	-	1	3	-	25
	Jumlah Balita	6.682	3.154	1.208	1.576	710	2.008	681	312	16.331
	persen Balita Gizi Buruk	0,04	0,16	0,66	0,32	-	0,05	0,44	-	0,15
2021	Jumlah Balita Gizi Buruk	7	7	4	12	-	2	3	1	36
	Jumlah Balita	6.547	3.267	1.193	1.511	779	2.129	652	324	16.402
	persen Balita Gizi Buruk	0,11	0,21	0,34	0,79	-	0,09	0,46	0,31	0,22
2022	Jumlah Balita Gizi Buruk	10	1	5	2	-	4	-	3	25
	Jumlah Balita	6.264	3.173	1.134	1.454	742	2.128	607	313	15.815
	persen Balita Gizi Buruk	0,16	0,03	0,44	0,14	-	0,19	-	0,96	0,16
2023	Jumlah Balita Gizi Buruk	10	5	2	2	0	0	1	1	21
	Jumlah Balita	5.892	3.005	1.017	1.421	713	2.016	538	282	14.884
	persen Balita Gizi Buruk	0,17	0,17	0,20	0,14	0	0	0,19	0,35	0,14

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangka Selatan, 2024

Dari tabel diatas diketahui hampir setiap tahunnya selama 11 (sebelas) tahun terakhir masih ditemukannya kasus balita gizi buruk di Kabupaten Bangka Selatan. Jumlah balita gizi buruk setiap tahunnya semakin bertambah, pada tahun 2013 ditemukan 10 balita bergizi buruk pada tahun 2014 ditemukan 5 balita bergizi buruk pada tahun 2015 ditemukan 10 balita bergizi buruk pada tahun 2016 ditemukan 7 balita bergizi buruk pada tahun 2017 ditemukan 10 balita bergizi buruk, pada tahun 2018 semakin bertambah yaitu terdapat 11 balita dan pada tahun 2019 semakin banyak ditemukannya 23 balita gizi buruk.

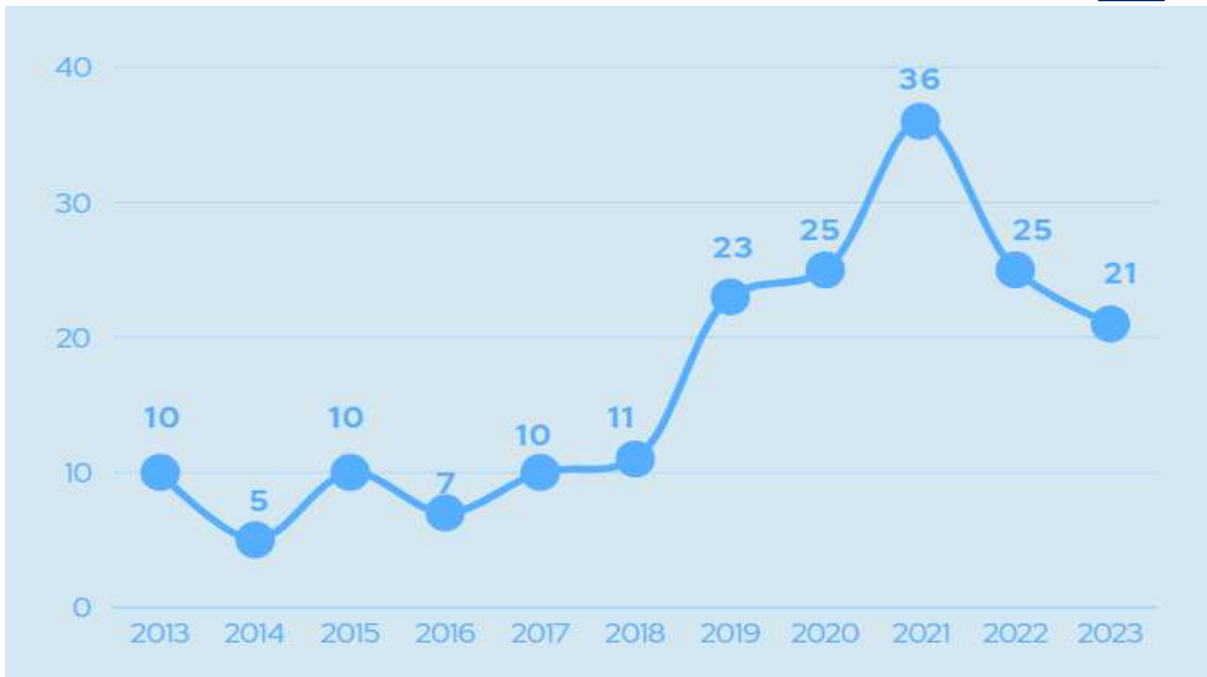
Pada tahun 2020 di Kabupaten Bangka Selatan dengan jumlah balita sebanyak 16.331



balita terdapat 25 balita dengan status gizi buruk atau sebesar 0,15 persen yang menyebar di 6 (enam) Kecamatan. Pada Kecamatan Toboali terdapat 3 (tiga) balita gizi buruk dari jumlah 6.682 balita atau sebesar 0,04 persen. Kecamatan Airgegas ditemukan 5 (lima) balita dari 3.154 balita atau sebesar 0,16 persen, Kecamatan Tukak Sadai sebanyak 8 (delapan) balita dari total 1.208 balita atau sebesar 0,66 persen, Kecamatan Payung sebanyak 5 (lima) balita dari 1.576 balita 681 balita atau sebesar 0,44 persen, pada Kecamatan Simpang Rimba terdapat 1 (satu) balita gizi buruk dari 2.008 balita dan pada Kecamatan Lepar sebanyak 3 (tiga) balita dari 681 balita.

Pada tahun 2021 Kabupaten Bangka Selatan mengalami peningkatan yang sangat besar jumlah balita bergizi buruk dari tahun 2020 yang semula 25 balita menjadi 36 balita bergizi buruk dari 16.402 balita atau dengan persentase 0,22 persen yang menyebar di 7 Kecamatan. Pada Kecamatan Toboali terdapat 7 balita gizi buruk dari 6.547 balita atau 0,11 persen. Kecamatan Airgegas terdapat 7 balita gizi buruk dari 3.267 balita atau 0,21 persen. Kecamatan Tukak Sadai terdapat 4 balita gizi buruk dari 1.193 balita atau 0,34 persen. Kecamatan Payung terdapat 12 balita gizi buruk dari 1.511 balita atau 0,79 persen. Kecamatan Simpang Rimba terdapat 2 balita gizi buruk dari 2.129 balita atau 0,09 persen. Kecamatan Lepar terdapat 3 balita gizi buruk dari 652 balita atau 0,46 persen. Kecamatan Kepulauan Pongok terdapat 1 balita gizi buruk dari 324 balita atau 0,31 persen.

Pada tahun 2022 Kabupaten Bangka Selatan mengalami penurunan jumlah balita bergizi buruk dari tahun 2021 yang semula 36 balita menjadi 25 balita bergizi buruk dari 15.815 balita atau dengan persentase 0,16 persen yang menyebar di 6 Kecamatan. Pada Kecamatan Toboali terdapat 10 balita gizi buruk dari 6.264 balita atau 0,16 persen. Kecamatan Airgegas terdapat 1 balita gizi buruk dari 3.173 balita atau 0,03 persen. Kecamatan Tukak Sadai terdapat 5 balita gizi buruk dari 1.134 balita atau 0,44 persen. Kecamatan Payung terdapat 2 balita gizi buruk dari 1.454 balita atau 0,14 persen. Kecamatan Simpang Rimba terdapat 4 balita gizi buruk dari 2.128 balita atau 0,19 persen. dan Kecamatan Kepulauan Pongok terdapat 3 balita gizi buruk dari 313 balita atau 0,96 persen.



Gambar 2.37

Grafik Jumlah Balita Gizi Buruk Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2013-2023

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangka Selatan, 2024

Untuk tahun 2023 Kabupaten Bangka Selatan mengalami penurunan jumlah balita bergizi buruk dari tahun 2022 yang semula 25 balita menjadi 21 balita bergizi buruk dari 14.884 balita atau dengan persentase 0,14 persen yang menyebar di 6 Kecamatan. Pada Kecamatan Toboali terdapat 10 balita gizi buruk dari 5.892 balita atau 0,17 persen. Kecamatan Airgegas terdapat 5 balita gizi buruk dari 3.005 balita atau 0,17 persen. Kecamatan Tukak Sadai terdapat 2 balita gizi buruk dari 1.017 balita atau 0,20 persen. Kecamatan Payung terdapat 2 balita gizi buruk dari 1.421 balita atau 0,14 persen. Kecamatan Lepar terdapat 1 balita gizi buruk dari 538 balita atau 0,19 persen. dan Kecamatan Kepulauan Pongok terdapat 1 balita gizi buruk dari 282 balita atau 0,35 persen.

2.2.2.15. Prevalensi Balita Bergizi Buruk

Prevalensi balita kekurangan gizi merupakan kurang gizi tingkat berat disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dari makanan sehari-hari yang terjadi dalam waktu yang cukup lama. Gizi buruk diketahui dengan cara pengukuran berat badan menurut tinggi badan dan/atau umur dibandingkan standar dengan atau tanpa tanda-tanda klinis. Cara perhitungan *underweight* adalah gizi buruk dan gizi kurang dihitung dari berat badan dibagi dengan umur (BB/U). Berikut adalah standart dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor : 1995/MENKES/SK/XII/2010 : l Batas gizi buruk pada balita adalah < -3.0 SD baku WHO. l Batas gizi kurang pada balita yaitu antara < -2.0 SD Pengukuran ini dilakukan untuk mengukur besarnya penduduk yang mempunyai konsumsi energi yang sangat rendah sehingga



memerlukan prioritas didalam upaya perbaikan pangan dan gizi. Pembangunan berkelanjutan memerlukan usaha konkrit untuk mengurangi kemiskinan serta mencari solusi menghilangkan kelaparan dan kekurangan gizi.

Tabel 2.68
Data Hasil E-PPGBM Anak Umur 0-59 Bulan Berstatus Gizi Balita
Di Wilayah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2013-2023

No	Tahun	Jumlah Balita (0-59 Bulan) Yang Di Ukur / Ditimbang (Pengukuran Antropometri)	Prevalensi Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita			
			Gizi Kurang (BB/TB)		Gizi Buruk (BB/TB)	
			Jumlah	persen	Jumlah	persen
1	2013	19.542	185	0,95	10	0,05
2	2014	20.446	212	1,04	5	0,02
3	2015	17.288	177	1,02	10	0,06
4	2016	18.661	192	1,03	7	0,04
5	2017	17.912	183	1,02	10	0,06
6	2018	16.977	198	1,17	11	0,06
7	2019	16.212	102	0,63	23	0,14
8	2020	16.331	126	0,77	25	0,15
9	2021	16.402	75	0,46	36	0,22
10	2022	15.815	198	1,25	25	0,16
11	2023	14.884	124	0,83	21	0,14

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangka Selatan, 2024

Dari tabel diatas menunjukkan Prevalensi Gizi Kurang dan Gizi Buruk Balita (0-59 Bulan) dari tahun 2013 sampai 2022 bervariasi, pada tahun 2013 jumlah Balita bergizi kurang (BB/TB) sebanyak 185 Balita dari 9.542 Balita dengan persentase 0,95 persen dan jumlah Balita gizi buruk (BB/TB) sebanyak 10 Balita dengan persentase 0,05 persen, selanjutnya pada tahun 2014 jumlah Balita gizi kurang (BB/TB) sebanyak 212 Balita dari 20.446 Balita dengan persentase 1,04 persen dan jumlah Balita gizi buruk (BB/TB) sebanyak 5 Balita dengan persentase 0,02 persen, kemudian pada tahun 2015 jumlah Balita gizi kurang (BB/TB) sebanyak 177 Balita dari 17.288 Balita dengan persentase 1,02 persen dan jumlah Balita gizi buruk (BB/TB) sebanyak 10 Balita dengan persentase 0,06 persen, sedangkan pada tahun 2016 jumlah Balita gizi kurang (BB/TB) sebanyak 192 Balita dari 18.661 Balita dengan persentase 1,03 persen dan jumlah Balita gizi buruk (BB/TB) sebanyak 7 Balita dengan persentase 0,04 persen dan pada tahun 2017 jumlah Balita gizi kurang (BB/TB) sebanyak 183 Balita dari 17.912 Balita dengan persentase 1,02 persen dan jumlah Balita gizi buruk (BB/TB) sebanyak 10 Balita dengan persentase 0,06 persen.



Gambar 2.38
Persentase Balita Bergizi Buruk dan Bergizi Kurang
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2013-2023

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangka Selatan, 2024

Selanjutnya pada tahun 2018 jumlah Balita bergizi kurang (BB/TB) sebanyak 198 Balita dari 16.977 Balita dengan persentase 1,17 persen dan jumlah Balita gizi buruk (BB/TB) sebanyak 11 Balita dengan persentase 0,06 persen, selanjutnya pada tahun 2019 jumlah Balita gizi kurang (BB/TB) sebanyak 102 Balita dari 16.212 Balita dengan persentase 0,63 persen dan jumlah Balita gizi buruk (BB/TB) sebanyak 25 Balita dengan persentase 0,15 persen, kemudian pada tahun 2020 jumlah Balita gizi kurang (BB/TB) sebanyak 126 Balita dari 16.331 Balita dengan persentase 0,77 persen dan jumlah Balita gizi buruk (BB/TB) sebanyak 25 Balita dengan persentase 0,15 persen, sedangkan pada tahun 2021 jumlah Balita gizi kurang (BB/TB) sebanyak 75 Balita dari 16.402 Balita dengan persentase 0,46 persen dan jumlah Balita gizi buruk (BB/TB) sebanyak 36 Balita dengan persentase 0,22 persen dan pada tahun 2022 jumlah Balita gizi kurang (BB/TB) sebanyak 198 Balita dari 15.815 Balita dengan persentase 1,25 persen dan jumlah Balita gizi buruk (BB/TB) sebanyak 25 Balita dengan persentase 0,16 persen. Kemudian untuk tahun 2023 jumlah Balita gizi kurang (BB/TB) sebanyak 124 Balita dari 14.884 Balita dengan persentase 0,83 persen dan jumlah Balita gizi buruk (BB/TB) sebanyak 21 Balita dengan persentase 0,14 persen.

2.2.2.16. Stunting

Stunting adalah permasalahan gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam rentang yang cukup waktu lama, umumnya hal ini karena asupan makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Permasalahan stunting terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru akan terlihat ketika anak sudah menginjak usia dua tahun. menurut UNICEF, stunting



didefinisikan sebagai persentase anak-anak usia 0 sampai 59 bulan, dengan tinggi badan di bawah minus (stunting sedang dan berat) dan minus tiga (stunting kronis), hal ini diukur dengan menggunakan standar pertumbuhan anak yang dikeluarkan oleh WHO.

Selain mengalami pertumbuhan terhambat, stunting juga kerap kali dikaitkan dengan penyebab perkembangan otak yang tidak maksimal. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan mental dan belajar tidak maksimal, serta prestasi belajar yang buruk. Selain itu, efek jangka panjang yang disebabkan oleh stunting dan kondisi lain terkait kurang gizi, acap kali dianggap sebagai salah satu faktor risiko diabetes, hipertensi, obesitas dan kematian akibat infeksi. Berikut Jumlah Stunting di Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023 :

Tabel 2.69
Jumlah Stunting di Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	JUMLAH KELUARGA	JUMLAH KELUARGA BERESIKO STUNTING	JUMLAH BALITA	JUMLAH BALITA SANGAT PENDEK	JUMLAH BALITA PENDEK
1	Payung	Bedengung	454	282	165	0	9
		Irat	274	38	90	1	5
		Sengir	273	46	81	1	0
		Payung	882	315	380	0	9
		Nadung	333	41	99	0	7
		Ranggung	683	104	209	2	7
		Pangkalbuluh	521	114	178	2	4
		Malik	269	34	81	2	2
		Paku	478	73	171	3	1
2	Pulau Besar	Batu Betumpang	570	196	198	2	15
		Panca Tunggal	255	122	122	3	9
		Fajar Indah	416	147	200	3	8
		Sukajaya	214	105	80	3	0
		Sumber Jaya Permai	346	96	142	1	3
3	Simpang Rimba	Jelutung II	955	322	385	0	6
		Gudang	399	92	130	1	4
		Sebagin	452	210	195	0	1
		Rajik	895	355	474	0	7
		Simpang Rimba	451	93	180	1	8
		Bangka Kota	768	138	337	1	10
		Permis	843	210	427	0	1
4	Toboali	Rias	1535	353	710	17	42
		Teladan	2524	567	1229	0	0
		Tanjung Ketapang	1700	315	947	1	3
		Toboali	0	0	1360	1	2
		Kaposang	1030	384	435	1	2



NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	JUMLAH KELUARGA	JUMLAH KELUARGA BERESIKO STUNTING	JUMLAH BALITA	JUMLAH BALITA SANGAT PENDEK	JUMLAH BALITA PENDEK
		Gadung	1608	335	672	1	3
		Bikang	323	55	124	1	2
		Jeriji	507	127	140	0	0
		Serdang	843	291	315	7	23
		Rindik	346	83	131	0	0
		Kepoh	464	210	201	0	1
5	Tukak Sadai	Sadai	453	171	262	0	2
		Pasir Putih	795	248	380	2	9
		Tukak	226	132	111	0	2
		Tiram	429	133	183	0	3
		Bukit Terap	486	218	198	2	3
6	Airgegas	Pergam	428	174	162	0	4
		Bencah	1363	226	499	0	1
		Tepus	765	310	296	1	4
		Airgegas	989	131	445	0	2
		Delas	908	318	366	1	3
		Sidoharjo	722	54	327	2	1
		Nyelanding	1056	144	330	0	1
		Nangka	571	82	232	0	0
		Ranggas	784	115	300	1	5
		Airbara	784	111	266	0	3
7	Lepar	Penutuk	575	149	219	0	0
		Tanjung Labu	367	134	136	1	0
		Tanjung Sangkar	463	71	193	0	1
		Kumbung	121	60	59	1	0
8	Kepulauan Pongok	Celagen	237	139	99	1	11
		Pongok	477	168	214	2	13
TOTAL			34.610	9.141	15.865	69	262

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangka Selatan, 2024

Dari tabel diatas, Desa Rias memiliki Jumlah Balita Sangat Pendek paling banyak berjumlah 17 Balita, kemudian Desa Serdang sebanyak 7 Balita dan selanjutnya terdapat 3 Balita Sangat Pendek yang terdapat di 4 Desa, yaitu Desa Paku, Panca Tunggal, Sukajaya dan Fajar Indah. Di tahun 2023 terdapat 5 Lokasi Khusus yang dijadikan percontohan untuk penurunan Stunting di Kabupaten Bangka Selatan.

2.2.2.17. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar penyandang



masalah kesejahteraan sosial yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan oleh kepada Daerah. Adapun indikator capaian urusan sosial di Kabupaten Bangka Selatan dapat dilihat dari persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani di Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2019-2023 sebagai berikut :

Tabel 2.70
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Yang Tertangani Per Kecamatan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2019-2023

No	Kecamatan	PMKS Penerima Layanan dan Bantuan Sosial									
		2019		2020		2021		2022		2023	
		Jumlah PMKS (orang)	Jumlah PMKS Tertangani (orang)	Jumlah PMKS (orang)	Jumlah PMKS Tertangani (orang)	Jumlah PMKS (orang)	Jumlah PMKS Tertangani (orang)	Jumlah PMKS (orang)	Jumlah PMKS Tertangani (orang)	Jumlah PMKS (orang)	Jumlah PMKS Tertangani (orang)
1	Toboali	1.214	1.214	1.470	1.470	132	132	100	100	470	470
2	Airgegas	797	797	1.060	1.060	43	43	9	9	30	30
3	Payung	582	582	546	546	4	4	18	18	57	57
4	Simpang Rimba	521	521	447	447	30	30	8	8	19	19
5	Tukak Sadai	324	324	429	429	5	5	15	15	40	40
6	Pulau Besar	383	383	433	433	6	6	15	15	12	12
7	Lepar	346	346	236	236	247	247	16	16	3	3
8	Kepulauan Pongok	464	464	459	459	488	488	-	-	9	9
Kabupaten Bangka Selatan (orang)		5.003	5.003	4.516	4.516	5.120	5.120	187	187	640	640

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Selatan, 2024

Selanjutnya, panti asuhan atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) merupakan lembaga yang memiliki misi sosial yakni membentuk perkembangan anak-anak yang tidak memiliki keluarga ataupun yang tidak tinggal bersama dengan keluarga. Peran pengasuh dalam lembaga ini sangat vital dan penting sebagai figur substitusi atau pengganti peran orang tua dalam mengasuh, menjaga dan memberikan bimbingan kepada anak agar anak menjadi manusia dewasa yang berguna dan bertanggung jawab atas dirinya dan terhadap keluarga, masyarakat, Bangsa dan Negara dikemudian hari. Mengingat makna penting peran dan fungsi panti/lembaga kesejahteraan sosial anak atau lembaga pengasuhan anak maka visi misi dan seluruh aktivitas yang dilakukan oleh panti atau lembaga kesejahteraan sosial anak seharusnya mendasarkan diri pada pemenuhan hak-hak anak sebagaimana tertuang dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak serta berbagai jenis peraturan Negara yang mengatur upaya perlindungan terhadap anak. Berikut data Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Kabupaten Bangka Selatan :

Tabel 2.71
Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2013-2023

No.	Tahun	Nama dan Alamat LKSA					
		Tarbiyatul Mubtadiin Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali	Darul Istiqomah Desa Airgegas Kecamatan Airgega	Darus Syafa'ah Desa Sidoharjo Kecamatan Airgegas	An Najah Desa Rias Kecamatan Toboali	Nurul Quran Desa Sidoharjo Kecamatan Airgegas	Muhammadiyah Jl. Jenderal Sudirman Toboali
1	2013	AKTIF	AKTIF	AKTIF	AKTIF	-	-
2	2014	AKTIF	AKTIF	AKTIF	AKTIF	-	-
3	2015	AKTIF	AKTIF	AKTIF	AKTIF	-	-
4	2016	AKTIF	AKTIF	AKTIF	AKTIF	-	-
5	2017	AKTIF	AKTIF	AKTIF	AKTIF	AKTIF	-
6	2018	AKTIF	AKTIF	AKTIF	AKTIF	AKTIF	-
7	2019	AKTIF	AKTIF	AKTIF	AKTIF	AKTIF	AKTIF
8	2020	AKTIF	VAKUM	AKTIF	AKTIF	AKTIF	AKTIF
9	2021	AKTIF	VAKUM	AKTIF	AKTIF	AKTIF	AKTIF
10	2022	AKTIF	VAKUM	AKTIF	AKTIF	AKTIF	AKTIF
11	2023	AKTIF	VAKUM	AKTIF	AKTIF	AKTIF	AKTIF

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Selatan, 2024

Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang ada di Kabupaten Bangka Selatan Tahun dari tahun 2013-2016 ada 4 (empat) LKSA dengan status aktif, dan di tahun 2017 dan 2018 adalah sebanyak 5 (lima) LKSA dengan status aktif yaitu 5 (lima) LKSA yang berada di Kelurahan Tanjung Ketapang, Desa Airgegas, Desa Sidoharjo dan Desa Rias. Sedangkan pada tahun 2019 ada 6 (enam) LKSA dengan status aktif dan di tahun 2020 s.d 2023 terdapat 6 (enam) LKSA dengan status 1 LKSA vakum yaitu Darul Istiqomah yang berada di Desa Airgegas.

2.2.2.18. Kesenian dan Kebudayaan

Pada bidang kebudayaan dapat dilihat dari indikator Jumlah grup kesenian dan jumlah gedung kesenian (gedung). Adapun sampai dengan tahun 2023 belum tersedia gedung kesenian di Kabupaten Bangka Selatan. Selanjutnya, berikut ini disajikan grup kesenian aktif di Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023 :

Tabel 2.72
Grup Kesenian Aktif Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Grup kesenian Aktif	Nama Grup Kesenian
1.	Toboali	19	Dhama Habangka
			Habang Kreasi
			Ekstotika Habang
			SMKN 1 Toboali



No	Kecamatan	Jumlah Grup kesenian Aktif	Nama Grup Kesenian
			Sadewa
			Jemari
			Dincak Melayu
			Surya Selatan
			Tiara Selatan
			Kemilau Art
			Habang Etnik
			Mata Air Dancer
			SMKS Yapentob
			Sandayana Nusantara
			Deni Warisan Vankangin
			Turonggo Kresno (kuda Lumping)
			Turonggo Seto (Kuda Lumping)
			Tharuna Bhakti (Kuda Lumping)
			Turonggo Joyo (Kuda Lumping)
2.	Airgegas	5	Ranggas Bedaun
			Humpit Beduri
			Hilau Nusantara
			Daarul Istiqomah Art & Show
			Turonggo Mekar Budoyo (kuda lumping)
3.	Payung	7	Daun Simpurn
			Pelawan Pupor
			Bambusa
			Pusako Payung
			Pucuk Idat
			Hadroh Raudhotun Sibyan
			Angsa Putih
4.	Pulau Besar	6	Robana Hayatul
			Langen Tri Sedy Manunggal (kuda lumping)
			Kuda Birawa (kuda lumping)
			Tunas Budaya (kuda lumping)
			Turonggo Setto (kuda lumping)
			Tresno Budoyo (kuda lumping)
5.	Simpang Rimba	3	Rumah Pelangi
			Kencana
			Wijoyo Putro (kuda lumping)
6.	Tukak Sadai	1	Toronggo Sakti (Kuda Lumping)
Kab. Bangka Selatan		41	

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Selatan, 2024

Jumlah grup kesenian aktif di Kabupaten Bangka Selatan sebanyak 41 (empat puluh satu) grup menyebar di 6 (enam) Kecamatan yaitu Kecamatan Toboali, Airgegas, Payung, Pulau



Besar Simpang Rimba dan Tukak Sadai. Grup kesenian aktif di Kecamatan Toboali berjumlah 19 grup, Kecamatan Airgegas 5 grup, Payung 7 grup, Pulau Besar 6 grup, Simpang Rimba 3 grup dan Tukak Sadai 1 grup.

2.2.2.19. Perkembangan Cabang Olahraga

Perkembangan aspek kesejahteraan sosial budaya Kabupaten Bangka Selatan bisa dilihat pada fokus seni budaya dan olahraga bidang kepemudaan dan olahraga yaitu perkembangan jumlah organisasi olahraga aktif, adapun jumlah organisasi olahraga yang aktif di Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.73
Organisasi Olahraga Aktif Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023

No	Jenis Olahraga	Jumlah Klub/ Organisasi Olahraga Aktif	Kecamatan
1	Karate	2	Toboali
2	Futsal	22	1. Toboali
			2. Airgegas
			3. Lepar
			4. Payung
			5. Tukak Sadai
			6. Kepulauan
3	Bola Voli	35	1. Toboali
			2. Payung
			3. Airgegas
			4. Tukak Sadai
			5. Simpang Rimba
			6. Lepar
4	Sepak Bola	20	1. Tukak Sadai
			2. Toboali
5	Basket	2	Toboali
6	Pencak Silat	12	1. Toboali
			2. Airgegas
			3. Payung
			4. Pulau Besar
			5. Simpang Rimba
			6. Tukak Sadai
			7. Lepar
7	Panjat Tebing	8	1. Toboali
			2. Airgegas
			3. Tukak Sadai
8	Atletik	7	1. Toboali
			2. Payung



No	Jenis Olahraga	Jumlah Klub/ Organisasi Olahraga Aktif	Kecamatan	
			No	Kecamatan
			3.	Airgegas
			4.	Tukak Sadai
			5.	Simpang Rimba
			6.	Pulau Besar
			7.	Lepar
9	Taekwondo	4	1.	Toboali
			2.	Airgegas
10	Kick Boxing	2	Toboali	
11	Gulat	2	Toboali	
12	Tenis Meja	2	1.	Toboali
			2.	Payung
13	Tenis	6	Toboali	
14	Selam	1	Toboali	
15	Biliar	3	Toboali	
16	Bulutangkis	6	1.	Toboali
			2.	Airgegas
			3.	Payung
			4.	Tukak Sadai
17	Panahan	5	Toboali	
18	Sepak Takraw	3	1.	Toboali
			2.	Payung
			3.	Simpang Rimba
19	Barongsai	2	Toboali	
20	Drumband	10	1.	Toboali
			2.	Airgegas
			3.	Tukak Sadai
21	Sepeda Sport	4	Toboali	
22	Renang	3	1.	Toboali
			2.	Payung
			3.	Simpang Rimba
23	Menembak	3	1.	Toboali
			2.	Airgegas
24	Catur	8	1.	Toboali
			2.	Payung
			3.	Airgegas
			4.	Tukak Sadai
			5.	Simpang Rimba
			6.	Pulau Besar
			7.	Lepar
			8.	Kepulauan Pongok
Jumlah		172	Kabupaten Bangka Selatan	

Sumber : Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Selatan, 2024

Data yang bersumber dari Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Selatan menggambarkan pada tahun 2023 terdapat 172 (seratus tujuh puluh dua) klub/organisasi olahraga aktif dari 24 jenis olahraga yaitu karate, futsal, bola volly, sepak bola, basket, pencak silat, panjat tebing, atletik, taekwondo, kick boxing, gulat, tenis meja, tenis, selam, biliar, bulu tangkis, panahan, sepak takraw, barongsai, drumband, sepeda sport, renang, menembak dan catur yang tersebar di 8 (delapan) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bangka Selatan.

2.2.2.20. Jumlah Even/Kegiatan Festival Seni Dan Budaya

Kebijakan penyelenggaraan urusan wajib kebudayaan di Kabupaten Bangka Selatan dititikberatkan pada pengembangan seni dan budaya sebagai daya tarik wisata. Adapaun event/kegiatan festival seni dan budaya Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014-2023 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.74
Jumlah Event/Kegiatan Festival Seni dan Budaya
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014-2023

No	Nama Event	Tahun Penyelenggaraan										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Ngarak Pusaka Kampung dan Kirab Sedekah Bumi				√	√	√					√
2	Festival Ketupat Gong				√	√	√			√		
3	Perayaan Cap Go Meh	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√
4	Ngarak Serujo Kue Badak				√	√	√					
5	Festival Kreo Panting				√	√						√
6	Festival Telok Serujo			√	√	√	√			√		√
7	Festival Bahari				√	√	√			√		
8	Perayaan Ceng Beng	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
9	Sadai Culture Back to Nature							√		√		
10	Tradisi Kawin Heredek (Kawin Massal)	√	√	√	√	√	√			√		√



No	Nama Event	Tahun Penyelenggaraan									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
11	Festival Peh Cun	√	√		√	√	√			√	√
12	Ritual Adat Buang Jung				√	√	√				
13	Toboali <i>City On Fire Season</i>			√	√	√	√				
14	Festival Junjung Besaoh	√	√	√	√						
15	Sembahyang Rebut	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
16	Hikok Helawang	√	√	√	√	√				√	√
17	Tradisi Lawa Suji					√					
18	Festival Batin Tikal				√	√					
19	Festival Reog				√						
20	Festival Kepulauan Pongok					√					
21	Festival Toboali Tempo Doeloe					√					
22	Peringatan HUT Bangka Selatan	√	√	√	√	√				√	√
23	Jambore Vespa									√	
24	Launching Stay In basel									√	
25	Stand Up Comedy Toboali									√	
26	Toboali Nobar World Cup									√	
27	Pemilihan Bujang Dayang Bangka Selatan	√	√	√	√	√				√	√
28	Street Parade Marching Band									√	
29	Isra Mi'raj	√	√	√	√	√				√	√
30	Sedekah Ruah	√	√	√	√	√				√	√
31	Nyelanding Grass Track	√	√	√	√	√				√	√



No	Nama Event	Tahun Penyelenggaraan									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
32	Sedekah Tahun Baru Islam	√	√	√	√	√				√	√
33	Pesta Sambut Tahun Baru Islam	√	√	√	√	√				√	√
34	Pameran Kriyanusa (Perwakilan Dekranasda Kabupaten Bangka Selatan)										√
35	Pemilihan Bujang Dayang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung										√
36	Pemilihan Duta Wisata Indonesia Tingkat Nasional										√
37	Kemilau Pesona Bangka Selatan										√
38	UMKM Fair										√
39	Habang Creative Week										√
40	Lomba Creasi Instagram Reels										√
41	Turnamen Bola Voli Putra Airpanas Open Bupati Basel Cup 2023										√
42	Next Gear Grandfinal Series										√
43	Festival Pesona UMKM 2023										√
44	Funcamp Labun Beach New Year 2024										√
45	Bupati Cup Bola Voli										√
46	Perayaan Maulid Nabi										√



No	Nama Event	Tahun Penyelenggaraan									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Muhammad SAW										
	Jumlah	14	14	15	24	25	13	3	3	22	29

Sumber : Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Selatan, 2024

Dalam rangka meningkatkan daya tarik wisata dan melestarikan budaya yang ada di Kabupaten Bangka Selatan, setiap tahunnya diadakan even/kegiatan budaya. Jumlah even/kegiatan budaya yang diselenggarakan setiap tahunnya ada yang sama dan ada juga yang berbeda dikarenakan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan tingkat urgensinya. Pada tahun 2014 sampai dengan 2015 diadakan 14 even/kegiatan budaya setiap tahunnya, kemudian ditahun 2016 diadakan 15 kegiatan, untuk tahun 2017 diadakan 24 kegiatan dan 25 kegiatan pada tahun 2018. di tahun 2019 kegiatan yang diselenggarakan lebih sedikit yaitu hanya dilaksanakan 13 kegiatan dan begitu pula pada tahun 2020 hanya sebanyak 3 kegiatan budaya, hal ini dikarenakan adanya pandemi *covid-19* yang melanda sejak tahun 2019 dan adanya kebijakan *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi tersebut.

Pada tahun 2021 juga sama dengan tahun sebelumnya hanya diadakan 3 kegiatan saja karena masih ada himbauan dari pemerintah untuk tidak melakukan kerumunan mengingat dampak pandemi covid-19 masih dirasakan masyarakat. Sedangkan di tahun 2022 diadakan 22 even/kegiatan budaya. begitu juga pada tahun 2023 telah diadakan 29 kegiatan seni dan budaya di Kabupaten Bangka Selatan.

2.2.2.21. Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan

Benda, situs dan cagar budaya yang dilestarikan oleh Kabupaten Bangka Selatan adalah yang telah teregister di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia maupun yang sudah dipelihara oleh juru pelihara. Benda, situs dan cagar budaya tersebut tersebar di wilayah Kabupaten Bangka Selatan, berupa bangunan, benda, struktur dan makam. Adapun status pemeliharaan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.75
Data Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Nama Cagar Budaya	Tindakan Pelestarian				Jenis	Lokasi
			Register Tim Pendaftaran CB	verifikasi Register Nasional	Juru Pelihara	Kajian Ilmiah		
1	Toboali	Benteng Toboali	√	√	√	Kajian Kerusakan (DPKPO), Studi Teknis Kelayakan	Bangunan	Kel. Tanjung Ketapang



No	Kecamatan	Nama Cagar Budaya	Tindakan Pelestarian				Jenis	Lokasi
			Register Tim Pendaftaran CB	verifikasi Register Nasional	Juru Pelihara	Kajian Ilmiah		
						(BPCB Jambi)		
2	Payung	Meriam Polsek Toboali 1	√	√	√		Kel. Tanjung Ketapang	
3		Meriam Polsek Toboali 2	√	√	√		Kel. Tanjung Ketapang	
4		Meriam Polsek Toboali 3	√	√	√		Kel. Tanjung Ketapang	
5		Wisma Samudra	√	√	√	Kajian Teknis (BPCB Jambi)	Kel. Tanjung Ketapang	
6		Rumah Dinas Lama 01	√	√	√		Kel. Tanjung Ketapang	
7		Kelenteng Dwi Sinmu	√	√	√		Kel. Tanjung Ketapang	
8		Gedung Nasional	√	√	√		Kel. Toboali	
9		Mercusuar Pulau Dapur	√	√	√		Kel. Tanjung Ketapang	
10		Makam Kelekak Baher	√		√		Kel. Tanjung Ketapang	
11		Guci Naga Gusung	√		√		Desa Gusung	
12		Rumah Masyarakat 01	√		√		Kel. Tanjung Ketapang	
13		Rumah Masyarakat 02	√		√		Kel. Tanjung Ketapang	
14		Rumah Masyarakat 03	√		√		Kel. Tanjung Ketapang	
15		Gudang Mesin Pulau Dapur	√				Kel. Tanjung Ketapang	
16		Struktur Bangunan 1 Pulau Dapur	√				Kel. Tanjung Ketapang	
17		Struktur Bangunan 2 Pulau Dapur	√				Kel. Tanjung Ketapang	
18		Struktur Bangunan 3 Pulau Dapur	√				Kel. Tanjung Ketapang	
19		Airgegas	Keris Pergem 01	√		√		Desa Pergam
20			Keris Pergem 02	√		√		Desa Pergam
21			Stempel Kuno Pergem	√		√		Desa Pergam
22			Pedang Pergem	√		√		Desa Pergam
23			Gong Macan Geram Pergam 01	√		√		Desa Pergam
24			Gong Macan Geram Pergam 02	√		√		Desa Pergam
25			Meriam Tangan Pergem01	√				Desa Pergam
26			Meriam Tangan Pergem02	√				Desa Pergam
27			Makam Kakek Seberang	√				Desa Pergam
28		Payung	Makam Kreo Panting	√				Desa Payung
29			Brankas Belanda	√				Desa Payung
30			Meriam Masjid	√		√		Desa Pangkal



No	Kecamatan	Nama Cagar Budaya	Tindakan Pelestarian				Jenis	Lokasi
			Register Tim Pendaftaran CB	verifikasi Register Nasional	Juru Pelihara	Kajian Ilmiah		
							Buluh	
31		Pedang Kreo Panting	√		√		Benda	Desa Paku
32		Tombak Besi	√		√		Benda	Desa Paku
33		Makam Jati Sari	√		√		Bangunan	Desa Malik
34		Makam Nisan Tralaya	√		√		Struktur	Desa Malik
35		Mercusuar Pulau Besar	√	√	√		Bangunan	Desa Batu Betumpang
36		Guci Pulau Besar 01	√		√		Benda	Desa Batu Betumpang
37		Guci Pulau Besar 02	√		√		Benda	Desa Batu Betumpang
38		Sumur Tua Pulau Besar	√				Bangunan	Desa Batu Betumpang
39		Pillbox Pulau Besar	√				Bangunan	Desa Batu Betumpang
40		Gazebo Pulau Besar	√				Bangunan	Desa Batu Betumpang
41		Ruang Mesin Pulau Besar	√				Bangunan	Desa Batu Betumpang
42		Penjara Pulau Besar	√				Bangunan	Desa Batu Betumpang
43		Dapur Umum Pulau Besar	√				Bangunan	Desa Batu Betumpang
44		Makam Habib Ahmad BinSyeh Ali Musawa	X	x	x		Bangunan	Desa Batu Betumpang
45		Makam Karang Panjang	√				Bangunan	Desa Bangka Kota
46		Makam Akek TanorDarah Puteh	√	√	√		Bangunan	Desa Malik
47		Rambut Batin Tikal	√	√	√		Benda	Desa Gudang
48		Makam Ratu Bagus	√	√	√		Bangunan	Desa Bangka Kota
49		Meriam Penutuk 01	√	√	√		Benda	Desa Penutuk
50		Meriam Penutuk 02	√	√	√		Benda	Desa Penutuk
51		Meriam Penutuk 03	√	√	√		Benda	Desa Penutuk
52		Meriam Penutuk 04	√	√	√		Benda	Desa Penutuk
53		Meriam Penutuk 05	√	√	√		Benda	Desa Penutuk
54		Meriam Tanjung Labu 01	√	√	√		Benda	Desa Tanjung Labu
55		Meriam Tanjung Labu 02	√	√	√		Benda	Desa Tanjung Labu
56		Meriam Tanjung Labu 03	√	√	√		Benda	Desa Tanjung Labu
57		Meriam Tanjung Labu 04	√	√	√		Benda	Desa Tanjung Labu
58		Makam Belanja TanjungLabu	√				Bangunan	Desa Tanjung Labu
59		Rumah Lampu TanjungLabu	√				Bangunan	Desa Tanjung Labu
60		Benteng Penutuk	√		√		Benteng	Desa Penutuk
61		Artepak Besi Penutuk 1	√		√		Benda	Desa Penutuk



No	Kecamatan	Nama Cagar Budaya	Tindakan Pelestarian				Jenis	Lokasi
			Register Tim Pendaftaran CB	verifikasi Register Nasional	Juru Pelihara	Kajian Ilmiah		
62		Artepak Besi Penutuk 2	√		√		Benda	Desa Penutuk
63		Makam Syekh Ayib Abbas	√		√		Makam	Desa Penutuk
64		Makam Haji Abu Hasan/Makam Melayu	√				Makam	Desa Tanjung Labu
65		Bangunan 1 Mercusuar Tanjung Labu	√				Bangunan	Desa Tanjung Labu
66		Bangunan 2 Mercusuar Tanjung Labu	√				Bangunan	Desa Tanjung Labu
67		Struktur Bangunan 3 Mercusuar Tanjung Labu	√				Struktur	Desa Tanjung Labu
68		Struktur Bangunan 4 Mercusuar Tanjung Labu	√				Struktur	Desa Tanjung Labu

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Selatan, 2024

Benda, situs dan cagar budaya tersebut tersebar di wilayah Kabupaten Bangka Selatan, berupa bangunan, benda, struktur dan makam. Dari total 69 cagar budaya yang dimiliki oleh Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 2021 terdapat 1 cagar budaya yaitu rumah dinas lama 02 yang terletak di Kelurahan Tanjung Ketapang Toboali mengalami rusak parah dan dihilangkan dari daftar Cagar Budaya sehingga pada tahun 2022 dan 2023 berjumlah 68 cagar budaya. Dengan demikian persentase Benda, situs dan cagar budaya yang dilestarikan sampai dengan tahun 2023 adalah sebesar 98,55 persen.

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

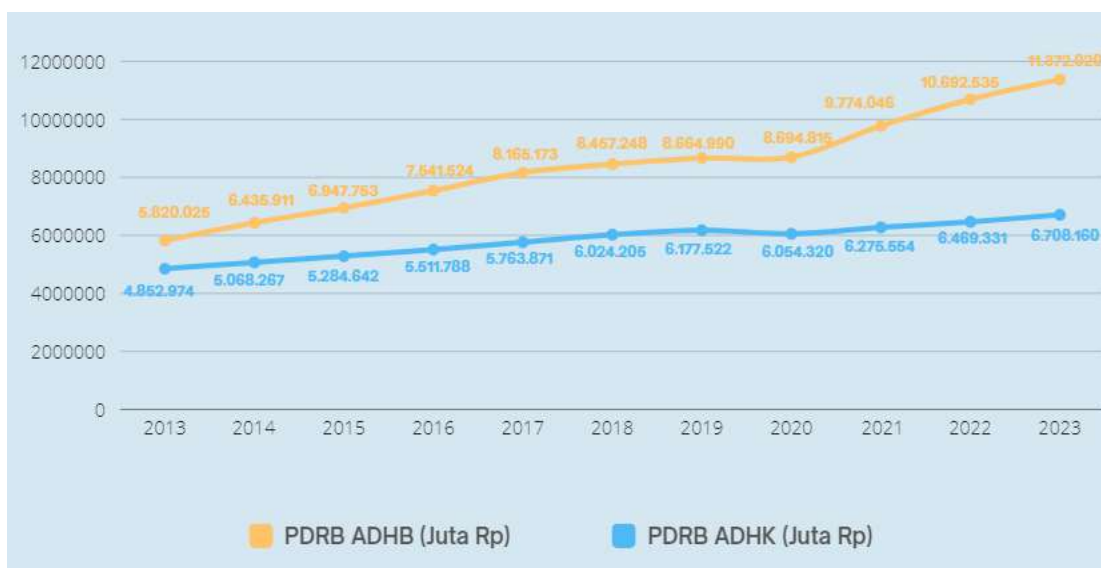
2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

2.3.1.1. PDRB Perkapita

Pengukuran kinerja pembangunan ekonomi daerah salah satunya dapat diukur dengan menggunakan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) bertujuan untuk membantu dalam menentukan kebijakan daerah atau perencanaan, evaluasi terhadap hasil pembangunan dan memberikan informasi yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian daerah. Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggunakan dua jenis harga yaitu harga berlaku dan harga konstan. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada periode saat ini, sementara PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar dan sampai saat ini masih menggunakan tahun dasar 2010. Adapun pertumbuhan Produk Domestik Regional



Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2013-2023 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :



Gambar 2.39
Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2013-2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan, 2024

Tabel 2.76
Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2013-2023

TAHUN	PDRB ADHB (Juta Rp)	PDRB ADHK (Juta Rp)
2013	5.820.025	4.852.974
2014	6.435.911	5.068.267
2015	6.947.753	5.284.642
2016	7.541.524	5.511.788
2017	8.165.173	5.763.871
2018	8.457.248	6.024.205
2019	8.664.990	6.177.522
2020	8.694.815	6.054.320
2021	9.774.046	6.275.554
2022	10.692.535	6.469.331
2023	11.372.020	6.708.160

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan, 2024

Berdasarkan perkembangannya, pada pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2013-2023 menunjukkan tren positif kecuali di tahun 2020, pertumbuhan PDRB ADHK di tahun 2013 sebesar 4,85 triliun Rupiah, di tahun 2014 sebesar 5,08 triliun Rupiah, di tahun 2015 sebesar 5,27 triliun Rupiah, di tahun 2016 sebesar



5,51 triliun rupiah, pada tahun 2017 sebesar 5,76 triliun rupiah, di tahun 2018 sebesar 6,02 triliun rupiah, di tahun 2019 meningkat kembali menjadi 6,17 triliun rupiah dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi menjadi 6,05 triliun rupiah, sedangkan pada tahun 2021 terjadi peningkatan yaitu 6,27 triliun rupiah. Untuk tahun 2022 kembali meningkat 6,47 triliun rupiah dan pada tahun 2023 kembali meningkat 6,70 triliun Rupiah.

Selanjutnya pada pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2013-2022 selalu menunjukkan tren positif. di tahun 2013 sebesar 5,82 triliun rupiah, di tahun 2014 sebesar 6,43 triliun rupiah, di tahun 2015 sebesar 7,10 triliun rupiah, di tahun 2016 sebesar 7,54 triliun rupiah. Pada tahun 2017 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB Kabupaten Bangka Selatan adalah sebesar 8,16 triliun rupiah, tahun 2017 meningkat menjadi 8,16 triliun Rupiah, tahun 2018 menjadi 8,46 triliun rupiah, kembali meningkat pada tahun 2019 menjadi 8,67 triliun rupiah, pada tahun 2020 sebesar 8,69 triliun rupiah dan pada tahun 2021 meningkat cukup tinggi menjadi 9,78 triliun rupiah. Sedangkan pada tahun 2022 kembali meningkat menjadi 10,69 triliun rupiah. Untuk tahun 2023 kembali meningkat menjadi 11,37 triliun rupiah.

Dari sebelumnya terlihat bahwa Perkembangan perekonomian Kabupaten Bangka Selatan dari tahun 2014-2023 dilihat dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK bersifat fluktuatif, Jika dilihat dari laju perekonomian Kabupaten Bangka Selatan berdasarkan gambar diatas, terlihat bahwa tahun 2014 dan 2015 mengalami penurunan, meningkat kembali di tahun 2016 dan 2017. Selanjutnya selama tiga tahun terakhir tahun 2018-2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Selatan mengalami penurunan kembali. Pada tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Selatan mengalami penurunan yang cukup Signifikan yaitu pada tahun 2019 dari 2,55 menjadi -1,99 pada tahun 2020. Kondisi ini biasa disebut sebagai perlambatan dalam pertumbuhan ekonomi. Penurunan ini disebabkan oleh lesunya perekonomian sebagai akibat dari memburuknya perekonomian global sehingga terjadi penurunan permintaan beberapa komoditas lokal seperti lada, karet dan kelapa sawit serta melemahnya keadaan perekonomian daerah sebagai efek yang ditimbulkan karena keadaan daerah yang kurang stabil pada masa pandemi *covid-19*. Selanjutnya pada tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Selatan sudah mulai membaik dengan pertumbuhan di angka 3,61 persen, sedangkan pada tahun 2022 sedikit mengalami penurunan diangka 3,07 persen. hal ini membuktikan bahwa kondisi ekonomi di Kabupaten Bangka Selatan yang ditopang oleh sektor primer seperti pertanian, perikanan dan pariwisata mulai menunjukkan geliat ekonomi yang positif. Kemudian di tahun 2023 peningkatan positif laju pertumbuhan sektor perekonomian kembali terjadi dikarenakan mulai berjalannya program-program Pemerintah disektor UMKM, Koperasi dan Pariwisata di Kabupaten Bangka Selatan semakin membaik.



Tabel 2.77
PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014-2023

No	Kategori Lapangan Usaha	PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.849.614	1.979.828	2.059.350	2.061.136	2.196.006	2.281.902	2.449,18	2.503,75	2.585,85	2.678,18
B	Pertambangan dan Penggalian	1.500.673	1.489.598	1.493.955	1.569.113	1.528.588	1.508.248	1.223,39	1.321,95	1.303,80	1.324,34
C	Industri Pengolahan	173.963	194.315	220.340	243.248	270.177	263.940	280,64	294,02	315,89	331,25
D	Pengadaan Listrik, Gas	2.538	2.777	3.015	3.206	3.399	3.826	4,11	4,34	4,32	4,46
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	709	843	913	1.008	978	1.017	1,00	1,03	1,06	1,07
F	Konstruksi	346.256	360.731	392.156	431.058	468.108	490.034	478,02	494,03	489,38	518,45
G	Perdagangan Besar dan Eceran; dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	485.553	502.321	537.183	596.132	624.488	638.268	591,8	622,1	688,42	699,63
H	Transportasi dan Pergudangan	35.106	37.251	39.630	42.867	46.175	48.046	43,24	47,22	52,14	56,64
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	83.459	88.681	95.884	104.624	110.705	121.524	120,69	132,57	146,78	160,36
J	Informasi dan Komunikasi	27.273	28.911	31.449	34.208	36.597	41.959	48,18	52,2	57,32	62,53
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	23.687	25.698	27.292	28.040	29.877	30.876	29,75	31,81	33,98	38,42
L	Real Estate	154.435	157.770	164.256	174.244	189.108	193.133	194,83	202,99	213,31	221,18
M	Jasa Perusahaan	6.431	6.612	6.680	7.195	7.822	7.984	7,12	7,34	8,05	8,30
N	Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	232.174	251.020	268.230	285.838	314.460	334.436	324,42	339,97	341,28	355,05
O	Jasa Pendidikan	103.678	112.332	122.263	128.679	140.865	149.681	148,58	152,22	157,01	171,69
P	Rasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	27.855	30.010	31.570	34.416	36.463	39.973	40,39	45,8	46,76	50,73
Q	Jasa lainnya	14.856	15.936	17.622	18.859	20.389	22.675	21,17	22,2	23,92	25,88
PDRB ADHK		5.068.266	5.284.641	5.511.788	5.763.871	6.024.205	6.177.522	6.054.320	6.275.550	6.469.331	6.708.160
		5068 (Triliun)	5285 (Triliun)	5,511 (Triliun)	5,763 (Triliun)	6,024 (Triliun)	6,177 (Triliun)	6,054 (Triliun)	6,275 (Triliun)	6,469 (Triliun)	6,708 (Triliun)

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan, 2024



Dari sebelumnya terlihat bahwa Perkembangan perekonomian Kabupaten Bangka Selatan dari tahun 2014 sampai dengan 2018 mengalami peningkatan, kemudian di tahun 2019 dilihat dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK mengalami kenaikan, namun tahun 2020 menunjukkan penurunan dibandingkan dengan tahun 2019. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK Kabupaten Bangka Selatan atas dasar harga berlaku tahun 2020 sebesar 6,054 triliun Rupiah turun sebesar 0,123 triliun Rupiah dibandingkan dengan tahun 2019. Namun di tahun 2021 kembali meningkat sebesar 0,221 triliun Rupiah menjadi 6,275 triliun Rupiah dan pada tahun 2022 terjadi peningkatan kembali sebesar 0,194 triliun Rupiah menjadi 6,469 triliun Rupiah. Kemudian pada tahun 2023 terjadi kenaikan sebesar 0,239 triliun Rupiah menjadi 670 triliun Rupiah.

Tabel 2.78
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014-2023

No	Kategori Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,87	7,04	4,02	0,09	6,54	3,91	9,43	0,18	3,16	3,97
B	Pertambangan dan Penggalan	4,75	-0,74	0,29	5,03	-2,58	-1,33	-18,93	8,06	-1,26	0,87
C	Industri Pengolahan	-0,36	11,70	13,39	10,40	11,07	-2,31	6,33	4,77	7,41	4,72
D	Pengadaan Listrik, Gas	15,54	9,43	8,55	6,33	6,02	12,57	7,33	5,58	-0,30	3,27
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11,37	18,97	8,17	10,44	-2,98	4,02	-2,02	3,17	3,86	0,36
F	Konstruksi	4,82	4,18	8,71	9,92	8,60	4,68	-2,45	3,35	-0,92	5,94
G	Perdagangan Besar dan Eceran; dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,15	3,45	6,94	10,97	4,76	2,21	-7,28	5,12	10,67	1,54
H	Transportasi dan Pergudangan	6,71	6,11	6,39	8,17	7,72	4,05	-10,00	9,20	10,28	8,62
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,67	6,26	8,12	9,12	5,81	9,77	-0,69	9,85	10,72	9,25
J	Informasi dan Komunikasi	6,87	6,01	8,78	8,77	6,98	14,65	14,82	8,36	9,94	9,08
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,73	8,49	6,20	2,75	6,54	3,34	-3,64	6,91	6,83	13,08
L	Real Estate	6,99	2,16	4,11	6,08	8,53	2,13	0,88	4,19	5,08	3,69
M	Jasa Perusahaan	5,90	2,81	1,04	7,69	8,71	2,06	-10,84	3,17	9,75	2,94
N	Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	7,75	8,12	6,86	6,56	10,01	6,35	-2,99	4,79	0,39	4,12
O	Jasa Pendidikan	7,92	8,35	8,84	5,25	9,47	6,26	-0,73	2,45	3,14	9,35
P	Rasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,56	7,74	5,20	9,02	5,95	9,63	1,05	13,38	2,11	8,48
Q	Jasa lainnya	6,67	7,26	10,58	7,02	8,11	11,21	-4,29	2,28	7,78	8,17
	PDRB ADHK	4,44	4,27	4,30	4,57	4,52	2,55	-1,99	3,61	3,07	3,69

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan, 2024



Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bangka Selatan dari tahun 2014-2023 sangat fluktuatif, ditahun 2014 sebesar 4,44 persen, selanjutnya di tahun 2015 sebesar 4,27 persen, setelah itu di tahun 2016 sebesar 4,30 persen, dan di tahun 2017 sebesar 4,57 persen. Kemudian Pada tahun 2018, dari 17 kategori lapangan usaha yang menyusun perekonomian Kabupaten Bangka Selatan, 15 kategori mengalami pertumbuhan positif. Sementara itu ada sebanyak 2 kategori lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif yaitu pertambangan dan penggalian serta pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang. Begitu juga pada tahun 2019, dari 17 kategori lapangan usaha yang menyusun perekonomian Kabupaten Bangka Selatan, 15 kategori mengalami pertumbuhan positif. Sementara itu ada sebanyak 2 kategori lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif yaitu pertambangan dan penggalian dan lapangan usaha industri pengolahan. Sedangkan pada tahun 2020, hanya kategori pertanian, kehutanan dan perikanan serta pengadaan listrik dan gas yang mengalami peningkatan pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun 5 kategori lapangan usaha yang pertumbuhannya paling tinggi berturut-turut adalah kategori pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 9,43 persen, pengadaan listrik dan gas sebesar 7,33 persen, industri pengolahan sebesar 6,33 persen, jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 1,05 persen dan real estate sebesar 0,88 persen.

Pada tahun 2021, dari 17 kategori lapangan usaha yang menyusun perekonomian Kabupaten Bangka Selatan, seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif, rata-rata mengalami peningkatan laju pertumbuhan dari tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2022, dari 17 kategori lapangan usaha yang menyusun perekonomian Kabupaten Bangka Selatan, hanya 14 kategori mengalami pertumbuhan positif, terdapat 3 kategori lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif yaitu pertambangan dan penggalian sebesar -1,26 persen, pengadaan listrik dan gas sebesar -0,30 persen serta konstruksi sebesar -0,92 persen. Untuk tahun 2023, semua 17 kategori lapangan usaha yang menyusun perekonomian Kabupaten Bangka Selatan mengalami pertumbuhan positif hal ini menandakan keberhasilan Pemerintah Daerah maupun Pusat dalam melaksanakan program peningkatan perekonomian pembangunan daerah.

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha. Adapun sektor-sektor lapangan usaha yang menggerakkan perekonomian Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014-2023 berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB disajikan sebagai berikut :



Tabel 2.79
PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014-2023

No	Kategori Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.397.482,6	2.686.771	2.982.177	3.009,99	2.998,26	3.100,54	3.630,26	3.933,61	4.313,49	4.739,16
B	Pertambangan dan Penggalian	1.801.006	1.748.485	1.735.903	1.939,96	1.914,14	1.771,55	1.281,00	1.753,39	1.853,31	1.734,05
C	Industri Pengolahan	222.190	259.726	299.223	344,13	386,71	393,21	432,11	499,33	586,81	628,55
D	Pengadaan Listrik, Gas	3.166	3.743	4.544	5,33	5,75	6,64	7,22	7,62	7,71	7,99
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	911	1.169	1.317	1,51	1,59	1,66	1,72	1,82	1,90	1,98
F	Konstruksi	445.185	491.497	552.360	648,98	739,80	809,53	791,80	837,40	876,85	959,32
G	Perdagangan Besar dan Eceran; dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	612.021	673.418	769.558	899,96	970,18	1.020,34	961,76	1.038,71	1.232,62	1.315,54
H	Transportasi dan Pergudangan	46.100	53.810	56.786	63,05	69,12	77,08	71,31	80,45	94,67	112,59
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	112.517	128.862	146.821	163,67	180,27	203,52	215,16	240,99	274,95	305,55
J	Informasi dan Komunikasi	30.343	33.584	37.004	41,23	47,46	54,64	62,21	68,35	76,01	83,91
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	30.483	34.445	37.518	40,13	44,04	46,24	44,71	49,77	57,41	65,72
L	Real Estate	215.302	231.313	250.950	274,37	304,39	319,26	325,02	342,20	370,24	393,14
M	Jasa Perusahaan	8.544	9.369	9.900	11,12	12,90	14,11	13,26	13,98	16,08	17,28
N	Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	323.385	371.862	409.600	452,47	489,13	524,09	528,93	555,48	558,49	593,99
O	Jasa Pendidikan	134.521	158.884	180.780	194,13	211,85	229,05	234,19	246,24	258,62	287,64
P	Rasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	33.500	38.767	41.620	46,71	50,28	57,24	58,49	68,87	72,32	79,81
Q	Jasa lainnya	19.248	22.048	25.463	28,36	31,31	36,21	35,60	36,75	40,99	45,80
PDRB ADHK		6.435.910	6.947.753	7.541.524	8.165.173	8.457.248	8.664.990	8.694.815	9.774.050	10.692.535	11.372.020
		6,436 (Triliun)	6,948 (Triliun)	7,541 (Triliun)	8,165 (Triliun)	8,457 (Triliun)	8,665 (Triliun)	8,694 (Triliun)	9,774 (Triliun)	10,693 (Triliun)	11,372 (Triliun)

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan, 2024



Tabel 2.80
Distribusi Sektor Dalam PDRB ADHB
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014-2023

No	Kategori Lapangan Usaha	Distribusi Sektor dalam PDRB ADHB									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	37,25	38,67	39,54	36,86	35,45	35,78	41,75	40,25	40,34	41,67
B	Pertambangan dan Penggalian	27,98	25,17	23,02	23,76	22,63	20,44	14,73	17,94	17,33	15,25
C	Industri Pengolahan	3,45	3,74	3,97	4,21	4,57	4,54	4,97	5,11	5,49	5,53
D	Pengadaan Listrik, Gas	0,05	0,05	0,06	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
F	Konstruksi	6,92	7,07	7,32	7,95	8,75	9,34	9,11	8,57	8,20	8,44
G	Perdagangan Besar dan Eceran; dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,51	9,69	10,20	11,02	11,47	11,78	11,06	10,63	11,53	11,57
H	Transportasi dan Pergudangan	0,72	0,77	0,75	0,77	0,82	0,89	0,82	0,82	0,89	0,99
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,75	1,85	1,95	2,00	2,13	2,35	2,48	2,46	2,57	2,69
J	Informasi dan Komunikasi	0,47	0,48	0,49	0,51	0,56	0,63	0,72	0,70	0,71	0,74
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,47	0,50	0,50	0,49	0,52	0,53	0,52	0,51	0,54	0,58
L	Real Estate	3,35	3,33	3,33	3,36	3,60	3,69	3,74	3,50	3,46	3,46
M	Jasa Perusahaan	0,13	0,13	0,13	0,14	0,15	0,16	0,15	0,14	0,15	0,15
N	Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	5,02	5,35	5,43	5,54	5,78	6,05	6,08	5,68	5,22	5,22
O	Jasa Pendidikan	2,09	2,29	2,40	2,38	2,51	2,64	2,69	2,52	2,42	2,53
P	Rasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,52	0,56	0,55	0,57	0,60	0,66	0,67	0,70	0,68	0,70
Q	Jasa lainnya	0,30	0,32	0,34	0,35	0,37	0,42	0,41	0,38	0,38	0,40
PDRB ADHB		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan, 2024

Selama 10 (sepuluh) tahun terakhir (2014-2023) struktur perekonomian Kabupaten Bangka Selatan didominasi oleh 6 (enam) kategori lapangan usaha, diantaranya :

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan;
2. Pertambangan dan Penggalian;
3. Perdagangan Besar dan Eceran; dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor;
4. Konstruksi;
5. Industri Pengolahan; dan
6. Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib.

Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Bangka Selatan. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB ADHB Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 2022 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yaitu sebesar 4.313,49 (juta rupiah) atau mencapai 40,34 persen

(angka ini meningkat dari 40,25 persen ditahun 2021). Selanjutnya lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 1.853,31 (juta rupiah) atau 17,33 persen (menurun dari 17,94 persen ditahun 2021). Kemudian lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 1.232,62 (juta rupiah) atau 11,53 persen (meningkat dari 10,63 persen di tahun 2021),disusul oleh lapangan usaha Konstruksi sebesar 876,85 (juta rupiah) atau 8,20 persen (menurun dari 8,57 persen ditahun 2021). Berikutnya lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 586,81 (juta rupiah) atau 5,49 persen (turun dari 5,11 persen ditahun 2021). lapangan usaha Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 558,49 (juta rupiah) atau 5,22 persen (turun dari 5,68 persen ditahun 2021). Peranan ekonomi lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih mendominasi dan cenderung naik atau trennya positif pada tahun 2022 dan 2023 sehingga merupakan sektor yang paling diandalkan ketika sektor lainnya mengalami perlambatan. Demikian halnya dengan beberapa sektor lainnya ada yang cenderung meningkat dan ada juga yang mengalami penurunan.

2.3.1.2. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Data pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi seluruh rumah tangga selama setahun di Kabupaten Bangka Selatan dibagi dengan jumlah penduduk Kabupaten Bangka Selatan. Adapun Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016-2023 sebagai berikut :



Gambar 2.40

Grafik Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016-2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan, 2024



Tabel 2.81
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016-2023

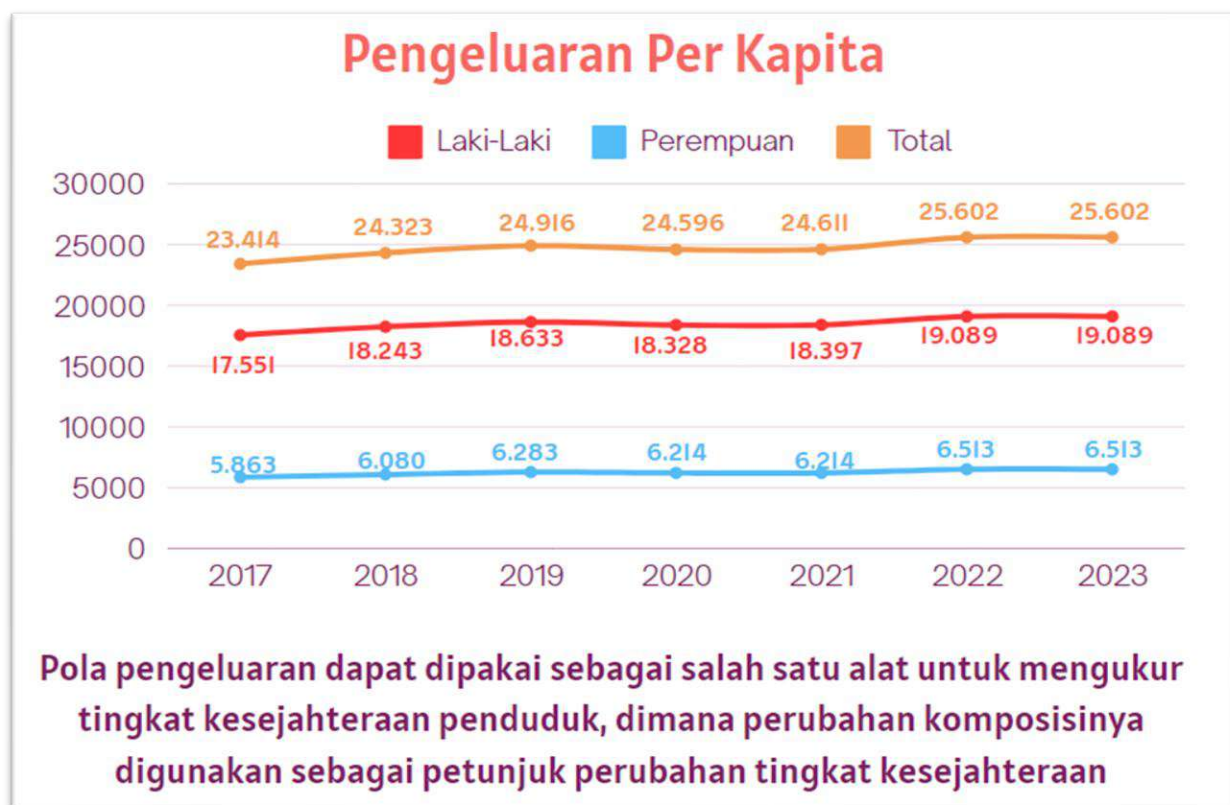
Tahun	Rata-rata Konsumsi Rumah Tangga Perkapita/Tahun (Ribu Rupiah)
2016	24.317
2017	26.041
2018	27.835
2019	29.562
2020	31.418
2021	32.070
2022	34.345
2023	32.391

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan (PDRB Pengeluaran), 2024

Secara nominal, setiap rumah tangga di Kabupaten Bangka Selatan selama periode tahun 2016-2021 mengalami peningkatan pengeluaran setiap tahunnya. Pada tahun 2016 setiap penduduk mengeluarkan dana sekitar 24.317 juta rupiah untuk membiayai konsumsi baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan. Pengeluaran ini terus meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 32.391 juta rupiah untuk setiap penduduk pada tahun 2023.

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita di dukung juga oleh daya beli masyarakat, dimana hal tersebut adalah kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Daya beli menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. Selanjutnya, semakin rendah daya beli suatu masyarakat berkaitan erat dengan perekonomian pada saat itu yang sedang memburuk yang berarti semakin rendah kemampuan masyarakat membeli suatu barang atau jasa. Kemampuan daya beli masyarakat dapat diketahui melalui pengukuran rata-rata pengeluaran perkapita riil yang disesuaikan.

Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan. Berikut gambaran kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017-2023 yang dilihat dari pengeluaran per kapita :



Gambar 2.41
Grafik Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017-2023
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan, 2024

Tabel 2.82
Pengeluaran Per kapita Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017-2023

No.	Tahun	Pengeluaran Perkapita (juta rupiah)		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	2017	17.551	5.863	10.999
2	2018	18.243	6.080	11.573
3	2019	18.633	6.283	11.910
4	2020	18.382	6.214	11.757
5	2021	18.397	6.214	11.768
6	2022	19.089	6.513	12.341
7	2023	19.089	6.513	12.627

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan, 2024

Berdasarkan tabel pengeluaran perkapita penduduk Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017-2023, pengeluaran perkapita penduduk Kabupaten Bangka Selatan mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 yaitu masing-masing pada tahun 2017 sebesar 10,99 Miliar Rupiah, tahun 2018 sebesar 11,57 Miliar Rupiah dan pada tahun 2019 sebesar 11,91 Miliar Rupiah, sedangkan pada tahun 2020 menurun menjadi 11,75 Miliar Rupiah. Sedangkan pada tahun 2021 meningkat 11,76 Miliar atau sebesar 110 juta Rupiah dibandingkan

tahun 2020. Selanjutnya di tahun 2022 kembali meningkat menjadi 12,34 Miliar Rupiah atau sebesar 580 juta Rupiah dibandingkan tahun 2021. Dan di tahun 2023 kembali meningkat menjadi 12,62 Miliar Rupiah atau sebesar 286 juta Rupiah dibandingkan tahun 2022. Dari keseluruhan tahun 2017-2023 diketahui bahwa pendapatan perkapita jenis kelamin laki-laki lebih tinggi daripada perempuan.

2.3.1.3. Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Perkapita

Pada pengeluaran perkapita dikategorikan dalam kelompok makanan dan non-makanan. Pada pengeluaran non-makanan bahwa semakin besar proporsi pengeluaran non-makanan, maka semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Namun sebaliknya, semakin kecil proporsi pengeluaran non-makanan, merefleksikan tingkat kesejahteraan masyarakatnya yang semakin menurun.

Tabel 2.83
Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022-2023

No	Kelompok Komoditas	Tahun			
		2022		2023	
		Rp	persen	Rp	persen
A	Makanan	863.853	57,22	829.233	55,73
B	Bukan Makanan	645.837	42,78	658.730	44,27
1	Perumahan dan fasilitas rumah tangga	335.619	51,97	349.496	53,03
2	Aneka akomodasi dan jasa	121.383	18,79	123.830	18,00
3	Pakaian, alas kaki dan tutup kepala	45.863	7,10	42.204	6,41
4	Barang tahan lama	90.161	13,96	65.775	9,99
5	Pajak, Pungutan dan Asuransi	37.161	5,83	46.118	7,00
6	Keperluan Pesta dan Upacara	15.183	2,35	31.307	4,75
TOTAL		1.509.690	100	1.487.963	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan, 2024

Tabel tersebut menggambarkan bahwa terdapat peningkatan konsumsi non pangan/bukan makanan penduduk Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 2022-2023. Pada tahun 2022 sebesar 645.837 rupiah/bulan atau 42,78 persen dan di tahun 2023 sebesar 658.730 rupiah/bulan atau 44,27 persen.

2.3.1.4. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) juga memiliki peran yang sangat penting dalam rangka mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat karena koperasi dan UMKM menempati bagian terbesar dari seluruh aktifitas ekonomi masyarakat Indonesia. Dalam hal ini pemberdayaan koperasi dan UMKM merupakan bagian integral dari pembangunan ekonomi nasional, terutama dalam rangka mengurangi kemiskinan dan penciptaan lapangan



kerja. Sering dikatakan bahwa koperasi merupakan soko guru perekonomian bangsa. Perkembangan koperasi harus dipertahankan karena dapat membantu perekonomian bangsa dan daerah. Perkembangan ekonomi Indonesia yang fluktuatif memberikan dampak ke banyak sektor. Suatu koperasi dikatakan aktif jika secara kelembagaan dan usaha telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Melalui tabel berikut ini akan disajikan mengenai perkembangan koperasi di Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2013-2023 :

Tabel 2.84
Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2013-2023

Tahun	Uraian	Kecamatan								Kab. Bangka Selatan
		Toboali	Airgegas	Payung	Simpang Rimba	Lepar	Tukak sadai	Pulau besar	Kep. Pongok	
2013	Jumlah Koperasi	33	9	5	8	0	4	5	3	67
	Jumlah Koperasi Aktif	33	9	4	8	0	4	5	3	66
	persen Koperasi Aktif	100	100	80	100	0	100	100	100	98,51
2014	Jumlah Koperasi	34	9	5	9	1	4	7	3	72
	Jumlah Koperasi Aktif	34	2	4	9	1	4	7	3	64
	persen Koperasi Aktif	100	22,22	80	100	100	100	100	100	88,89
2015	Jumlah Koperasi	35	11	7	9	1	4	10	4	81
	Jumlah Koperasi Aktif	17	4	6	3	0	3	5	2	40
	persen Koperasi Aktif	48,57	36,36	85,71	33,33	0	75	50	50	49,38
2016	Jumlah Koperasi	47	11	7	9	2	7	11	5	99
	Jumlah Koperasi Aktif	39	10	7	9	0	4	7	3	79
	persen Koperasi Aktif	82,98	90,91	100	100	0	57,14	63,64	60,00	79,80
2017	Jumlah Koperasi	38	10	7	9	3	5	11	3	86



Tahun	Uraian	Kecamatan								Kab. Bangka Selatan
		Toboali	Airgegas	Payung	Simpang Rimba	Lepar	Tukak sadai	Pulau besar	Kep. Pongok	
	Jumlah Koperasi Aktif	38	9	7	8	1	3	8	3	77
	persen Koperasi Aktif	100	90	100	88,89	33,33	60	72,73	100	89,53
2018	Jumlah Koperasi	38	11	7	9	2	5	10	4	86
	Jumlah Koperasi Aktif	31	11	6	6	1	4	6	3	68
	persen Koperasi Aktif	81,58	100	85,71	66,67	50	80	60	75	79,07
2019	Jumlah Koperasi	38	11	7	9	3	5	10	4	87
	Jumlah Koperasi Aktif	31	11	6	6	2	4	6	3	69
	persen Koperasi Aktif	81,58	100	85,71	66,67	66,67	80	60	75	79,31
2020	Jumlah Koperasi	40	11	8	10	10	5	5	4	93
	Jumlah Koperasi Aktif	26	5	7	4	6	4	4	2	58
	persen Koperasi Aktif	65	45,45	87,5	40	60	80	80	50	62,37
2021	Jumlah Koperasi	41	10	8	10	5	5	10	2	91
	Jumlah Koperasi Aktif	25	5	7	4	4	4	6	2	62
	persen Koperasi Aktif	60,97	50	87,50	40	80	80	60	50	68,13
2022	Jumlah Koperasi	41	11	9	10	5	5	10	4	99
	Jumlah Koperasi Aktif	22	4	8	4	3	4	5	2	56
	persen Koperasi Aktif	53,66	36,36	88,89	40	60	80	50	50	56,57
2023	Jumlah Koperasi	43	11	10	10	5	5	10	4	102



Tahun	Uraian	Kecamatan								Kab. Bangka Selatan
		Toboali	Airgegas	Payung	Simpang Rimba	Lepar	Tukak sadai	Pulau besar	Kep. Pongok	
	Jumlah Koperasi Aktif	24	4	9	4	3	4	5	2	59
	persen Koperasi Aktif	55,81	33,36	90	40	60	80	50	50	57,84

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Selatan, 2024

Perkembangan jumlah koperasi dan koperasi aktif di Kabupaten Bangka Selatan sangat fluktuatif selama 11 (sebelas) tahun terakhir yaitu tahun 2013-2023. Di tahun 2013 dari jumlah koperasi sebanyak 67 (enam puluh tujuh) yang merupakan koperasi aktif adalah sejumlah 66 (enam puluh enam) koperasi atau 98,51 persen. Pada tahun 2014 dari jumlah koperasi sebanyak 72 (tujuh puluh dua) yang merupakan koperasi aktif adalah sejumlah 64 (enam puluh empat) koperasi atau 88,89 persen. Pada tahun 2015 dari jumlah operasi sebanyak 81 (delapan puluh satu) yang merupakan koperasi aktif adalah sejumlah 40 (empat puluh) koperasi atau 49,38 persen. Pada tahun 2016 dari jumlah koperasi sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) yang merupakan koperasi aktif adalah sejumlah 79 (tujuh puluh sembilan) koperasi atau 79,80 persen. Pada tahun 2017 dari jumlah koperasi sebanyak 86 (delapan puluh enam) yang merupakan koperasi aktif adalah sejumlah 77 (tujuh puluh tujuh) koperasi atau 89,53 persen. Pada tahun 2018 dari jumlah operasi sebanyak 86 (delapan puluh enam) yang merupakan koperasi aktif adalah sejumlah 68 (enam puluh delapan) koperasi atau 79,07 persen. Selanjutnya jumlah koperasi dan koperasi aktif menunjukkan kenaikan pada tahun 2019 dengan koperasi aktif adalah sejumlah 69 (enam puluh sembilan) koperasi atau 79,31 persen, Pada tahun 2020 jumlah koperasi kembali meningkat menjadi 93 (sembilan puluh tiga) koperasi, namun yang aktif hanya sejumlah 58 (lima puluh delapan) koperasi atau 62,37 persen. Pada tahun 2021 jumlah koperasi aktif mengalami penurunan menjadi 91 koperasi, namun terjadi peningkatan pada koperasi aktif menjadi 62 koperasi dengan persentase 68,13 persen, dan Pada tahun 2022 jumlah koperasi kembali meningkat menjadi 99 (sembilan puluh sembilan) koperasi, namun yang aktif hanya sejumlah 56 (lima puluh enam) koperasi atau 56,57 persen tahun 2023 dari jumlah operasi sebanyak 102 (seratus dua) yang merupakan Koperasi aktif adalah sejumlah 59 (lima puluh sembilan) Koperasi atau 57,84 persen.

Selanjutnya program pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu instrument untuk menaikkan daya beli masyarakat. Pengembangan UMKM menjadi sangat strategis dalam menggerakkan perekonomian daerah, mengingat kegiatan usahanya mencakup hampir semua lapangan usaha sehingga kontribusi UMKM menjadi sangat besar bagi peningkatan pendapatan masyarakat. Pada tahun 2023 terdapat 248 usaha mikro yang

diberikan dukungan di Kabupaten Bangka Selatan kemudian 440 usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan, selanjutnya terdapat 45.933 usaha mikro yang belum memiliki standar dan sertifikasi produk, selanjutnya ada 49.231 Wirausaha Yang Ada/Usaha Mikro Yang Ada, 249 usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran dan terakhir ada 45.932 usaha mikro yang belum diberikan dukungan fasilitas pemasaran, berikut rincian Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023 :

Tabel 2.85
Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023

NO	KECAMATAN	JUMLAH USAHA MIKRO YANG DIBERIKAN DUKUNGAN FASILITASI STANDARISASI DAN SERTIFIKASI	JUMLAH USAHA MIKRO YANG DIBERIKAN DUKUNGAN FASILITASI PELATIHAN	JUMLAH USAHA MIKRO YANG BELUM MEMILIKI STANDAR DAN SERTIFIKASI PRODUK	JUMLAH WIRAUSAHA YANG ADA / USAHA MIKRO YANG ADA	JUMLAH USAHA MIKRO YANG DIBERIKAN DUKUNGAN FASILITAS PEMASARAN	JUMLAH USAHA MIKRO YANG BELUM DIBERIKAN DUKUNGAN FASILITAS PEMASARAN
1	Toboali	180	382	19.134	19.314	238	19.076
2	Airgegas	8	3	10.131	10.139	6	10.133
3	Payung	12	0	5.183	5.195	5	5.190
4	Simpang Rimba	1	0	5.497	5.498	0	5.498
5	Pulau Besar	5	2	2.059	2.064	0	2.064
6	Tukak Sadai	15	48	2.841	2.856	0	2.856
7	Lepar	27	5	859	886	0	886
8	Kep. Pongok	0	0	229	229	0	229
Jumlah		248	440	45.933	49.231	249	45.932

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Selatan, 2024

2.3.1.5. Ketahanan Pangan Daerah

Kegiatan Ketahanan Pangan di Kabupaten Bangka Selatan memiliki Program kegiatan yang difokuskan pada Tanaman Pangan, yang bertujuan untuk pembangunan dan



pengembangan cadangan pangan yang diprioritaskan. Kegiatan tersebut dititik beratkan pada :

- a) Peningkatan mutu intensifikasi pemantapan pola tanam.
- b) Perluasan areal melalui pencetakan sawah baru dan pembukaan lahan kering.
- c) Pembinaan daerah transmigrasi (bantuan sarana produksi padi).
- d) Penyediaan benih/bibit unggul.
- e) Perlindungan tanaman dengan mengembangkan pengendalian hama dan penyakit secara terpadu.
- f) Menyebarkan teknologi tepat guna Pra dan Pasca Panen.

Tabel 2.86
Jenis-Jenis Tanaman Ketahanan Pangan
Di Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023

No.	Jenis Tanaman	Luas Panen (ha)	Produktivitas (ha)	Produksi (ton)
1	Padi Sawah	5 338,75	4,59	24 478,53
2	Padi Ladang	1 307,75	1,46	1 902,96
3	Jagung	166,96x	2,01	335,52
4	Kedelai	-	-	-
5	Kacang Tanah	15,25	2,11	32,20
6	Kacang Hijau	-	-	-
7	Ubi Kayu	431,90	12,73	5 498,61
8	Ubi Jalar	21,65	5,39	116,62
9	Talas	2,10	1,58	3,32

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan, 2024

Pada Tahun 2023, Luas panen padi sawah 5.338,75 ha dengan jumlah produksi sebesar 24.478,53 Ton, sedangkan untuk luas panen padi ladang 1.307,75 ha dan jumlah produksi 1.902,96 Ton.

2.3.1.5.1. Skor Pola Pangan Harapan

Salah satu parameter sederhana untuk menilai keberhasilan penyediaan pangan, tingkat diversifikasi/keanekaragaman pangan dan mutu gizi pangan adalah dengan pendekatan Pola Pangan Harapan (PPH). Dengan pendekatan PPH dapat dinilai mutu pangan penduduk berdasarkan skor pangan (*dietary score*). Semakin tinggi skor mutu pangan, menunjukkan situasi pangan yang semakin beragam dan komposisinya semakin baik/berimbang. Tujuan penyusunan PPH yaitu untuk menghasilkan suatu komposisi norma (standar) pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi penduduk, yang mempertimbangkan keseimbangan gizi (*nutrition*

balance) berdasarkan cita rasa (*palatability*), daya cerna (*digestibility*), daya terima masyarakat (*acceptability*), kuantitas dan kemampuan daya beli (*affordability*). Berikut gambaran Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2013-2023 :



Gambar 2.42

Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2013-2023

Sumber : Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangka Selatan, 2024

Tabel 2.87

Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2013-2023

No	Tahun	Skor Pola Pangan Harapan
1	2013	70,25
2	2014	84,30
3	2015	85,40
4	2016	88,80
5	2017	90,90
6	2018	80,20
7	2019	82,70
8	2020	96,90
9	2021	94,00
10	2022	86,90
11	2023	87,40

Sumber : Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangka Selatan, 2024



Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2013-2023 memiliki tren yang fluktuatif. Pada tahun 2013 Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Bangka Selatan adalah 70,25 persen kemudian di tahun 2014 meningkat menjadi 84,30 persen selanjutnya meningkat kembali di tahun 2015 menjadi 85,40 persen dan di tahun 2016 meningkat menjadi 88,80 persen yang selanjutnya pada tahun 2017 meningkat menjadi 90,90 persen, kemudian pada tahun 2018 terjadi penurunan skor sebesar 10,70 persen dari tahun sebelumnya menjadi 80,20 persen. Sementara pada tahun 2019 terjadi peningkatan skor sebesar 2,50 dari tahun sebelumnya menjadi 82,70 persen dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan skor sebesar 14,20 persen menjadi 96,90 persen. Selanjutnya pada tahun 2021 terjadi penurunan sebesar 2,90 persen sehingga Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Bangka Selatan menjadi 94,00 persen. Dan pada tahun 2022 terjadi penurunan sebesar 7,10 persen sehingga Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Bangka Selatan menjadi 86,90. Untuk tahun 2023 terjadi kenaikan sebesar 0,50 persen sehingga Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Bangka Selatan menjadi 87,40 persen.

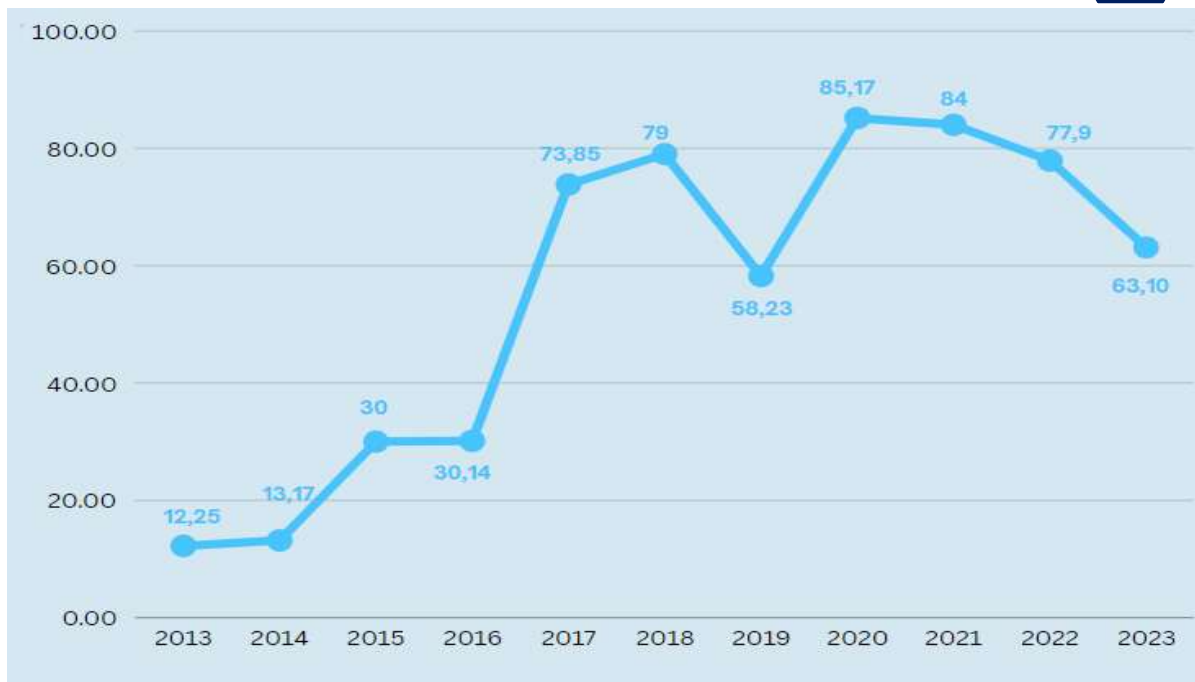
2.3.1.5.2. Penguatan Cadangan Pangan

Pembangunan ketahanan pangan merupakan prioritas pembangunan nasional yang difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan distribusi pangan, percepatan penganeekaragaman pangan dan pengawasan keamanan pangan segar. Ketahanan pangan dihasilkan oleh suatu sistem pangan yang terdiri atas 3 (tiga) subsistem yaitu :

- 1) Konsumsi pangan setiap individu yang memenuhi kecukupan gizi dan kaidah kesehatan;
- 2) Ketersediaan pangan dalam jumlah dan jenis yang cukup untuk seluruh penduduk;
- 3) Distribusi pangan yang lancar dan merata.

Di Kabupaten Bangka Selatan ketahanan pangan sudah diatur dalam peraturan-peraturan. Adapun peraturan yang mengatur tentang ketahanan pangan :

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi.
- 2) Peraturan Bupati Bangka Selatan nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Selatan nomor 17 tahun 2009 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka Selatan.
- 3) Peraturan Bupati Bangka Selatan nomor 19 tahun 2017 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.



Gambar 2.43

Persentase Kecukupan Pangan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2013-2023

Sumber : Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangka Selatan, 2024

Tabel 2.88

Persentase Kecukupan Pangan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2013-2023

No	Tahun	Persentase Kecukupan Pangan Daerah
1	2013	12,25
2	2014	13,17
3	2015	30,00
4	2016	30,14
5	2017	73,85
6	2018	79,00
7	2019	58,23
8	2020	85,17
9	2021	84,00
10	2022	77,90
11	2023	63,10

Sumber : Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangka Selatan, 2024

Berdasarkan tabel diatas, presentase kecukupan pangan daerah Kabupaten Bangka Selatan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2023 memiliki kecenderungan yang positif kecuali



di tahun 2019, 2022 dan 2023. Pada tahun 2013 persentase kecukupan pangan daerah Kabupaten Bangka Selatan adalah 12,25 persen, untuk tahun 2014 meningkat menjadi 13,17 persen, di tahun 2015 meningkat menjadi 30 persen, kemudian di tahun 2016 menjadi 30,14 persen, pada tahun 2018 meningkat menjadi 79,00 persen. Pada tahun 2019 presentase kecukupan pangan daerah menurun sebesar 20,77 persen menjadi 58,23 persen. Kemudian meningkat pada tahun 2020 sebesar 26,94 persen menjadi 85,17 persen dan menurun di tahun 2021 sebesar 1,17 persen menjadi 84,00 persen. Kemudian pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan sebesar 6,1 persen menjadi 77,90 persen. Selanjutnya pada tahun 2023 turun kembali sebesar 14,80 persen menjadi 63,10 persen.

2.3.1.5.3. Ketersediaan Pangan

Selain kecukupan Pangan yang perlu menjadi perhatian adalah ketersediaan pangan yang merupakan bagian prioritas yang difokuskan ketersediaan pangan yang akan didistribusikan.

Badan Pangan Nasional memiliki beberapa program yang didasari dari sasaran strategis yang telah ditentukan. Sasaran strategis pertama adalah terpenuhinya kebutuhan pangan secara optimal. Sasaran strategis ini diturunkan menjadi salah satu program yaitu ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Adapun strategi yang dilakukan untuk mencapai sasaran strategis pertama adalah :

1. Penguatan cadangan pangan nasional maupun daerah melalui Perum Bulog dan BUMN pangan;
2. Pengendalian impor dan ekspor pangan;
3. Penguatan infrastruktur memperpanjang umur simpan dan menjaga stok pangan;
4. Pemantauan dan pengendalian ketersediaan pangan di seluruh wilayah;

Berikut jumlah ketersediaan pangan daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2023 dalam ton :

Tabel 2.89
Jumlah Ketersediaan Pangan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2023

No	Tahun	Ketersediaan Pangan Daerah (Ton)
1	2020	21.169,50
2	2021	18.206,92
3	2022	14.647,66
4	2023	15.251,90

Sumber : Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangka Selatan, 2024



Berdasarkan tabel diatas, presentase ketersediaan pangan daerah Kabupaten Bangka Selatan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 bersifat fluktuatif. Pada tahun 2020 sebesar 21.169,50 Ton menurun menjadi 18.206,92 Ton di tahun 2021 atau sebesar 2.962,58 Ton. Kemudian pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan sebesar 3.559,26 Ton menjadi 14.674,66 Ton. Namun pada tahun 2023 kembali naik sebesar 604,24 Ton menjadi 15.251,90 Ton.

2.3.1.5.4. Produksi Tanaman Pangan

Kabupaten Bangka Selatan, berdasarkan distribusi PDRB menurut jenis lapangan usaha, masih mengandalkan sektor primer dalam memacu pertumbuhan ekonominya. Sektor primer yang maksud adalah kegiatan ekonomi yang masih mengandalkan potensi alam yang ada disuatu daerah. Lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang 41,67 persen untuk Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bangka Selatan ditahun 2023. Kontribusi ini menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 yang berkontribusi sebesar 40,34 persen. Sebagai lapangan usaha yang berkontribusi paling besar pada Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), Kabupaten Bangka Selatan dalam menentukan produk unggulan, menetapkan sektor tanaman pangan, sektor perkebunan, dan sektor kelautan dan perikanan menjadi komoditas unggulan Kabupaten. Adapun tanaman pangan di Kabupaten Bangka Selatan adalah terdiri dari padi, sayuran dan buah-buahan. Gambaran pertumbuhan produksi tanaman pangan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016-2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.90
Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016-2023

No	Tahun	Produksi Padi (ton)	Produksi Sayuran (ton)	Produksi Buah-buahan (ton)
1	2016	18.009,68	761,2	10.042,50
2	2017	19.274,32	820	10.095,00
3	2018	34.369,00	1.158,99	8.923,05
4	2019	12.883,77	1.201,50	9.054,00
5	2020	29.248,15	1.251,46	9.068,39
6	2021	26.381,49	293,89	2.947,63
7	2022	21.224,18	226,78	1.950,90
8	2023	22.099,72	3.458,41	3.352,73

Sumber : Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangka Selatan, 2024

Berdasarkan tabel diatas, pertumbuhan atau peningkatan produksi tanaman pangan yaitu padi, sayuran dan buah-buahan di Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016-2022 fluktuatif. Pada tahun 2016 produksi padi sebesar 18.009,68 ton, pada tahun 2017 produksi padi sebesar 19.274.32 ton dan pada tahun 2018 meningkat sebanyak 15.094,68 ton menjadi

34.369 ton, Selanjutnya pada tahun 2019 terjadi penurunan yaitu sebanyak 21.485,23 ton sehingga produksi padi pada tahun tersebut adalah 12.883,77 ton. Selanjutnya pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 16.364,38 ton sehingga produksi padi pada tahun 2020 sebanyak 29.248,15 ton. Kemudian pada tahun 2021 terjadi penurunan dengan produksi padi sebanyak 26.381,49 ton atau menurun sebanyak 2.866,66 ton. Dan di tahun 2022 terjadi penurunan kembali produksi padi sebanyak 21.224,18 ton atau menurun sebanyak 5.157,31 ton. Sedangkan pada tahun 2023 terjadi kenaikan kembali dengan produksi padi sebanyak 22.099,72 ton. Adapun produktivitas padi di Kabupaten Bangka Selatan juga mengalami pertumbuhan atau peningkatan yang fluktuatif yang dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.91
Produktivitas Tanaman Padi Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016-2023

No	Tahun	Produksi Padi(ton)	Luas Areal Panen(ha)	Produktivitas Padi(ton/ha)
1	2016	18.009,68	5.717,36	3,15
2	2017	19.274,32	5.930,56	3,25
3	2018	31.149,00	9.847,85	3,15
4	2019	16.659,20	4.367,38	3,69
5	2020	29.248,15	8.215,77	3,56
6	2021	26.381,49	6.646,50	3,97
7	2022	21.224,18	5.211,00	4,07
8	2023	22.099,72	5.091,00	4,34

Sumber : Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangka Selatan, 2024



Gambar 2.44
Pertumbuhan Produksi Padi Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016-2023

Sumber : Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangka Selatan, 2024



Produktivitas padi merupakan hasil per satuan atau satu lahan yang panen dari seluruh luas lahan yang dipanen, produktivitas diperoleh dari hasil pembagian antara total produksi padi dibagi luas areal panen. Tabel diatas menjelaskan bahwa produktivitas padi di Kabupaten Bangka Selatan selama 8 (delapan) tahun terakhir yaitu tahun 2016-2023 adalah antara 3,15-4,34 ton/ha. Produktivitas padi terendah adalah pada tahun 2016 dan 2018 yaitu 3,15 ton/ha dan produktivitas tertinggi terjadi pada tahun 2023 yaitu 4,34 ton/ha. Produktivitas padi pada tahun 2016 dan 2019 mengalami penurunan dikarenakan adanya penurunan luas areal panen yang disebabkan oleh :

1. Organisme Perusak Tanaman;
2. Bencana Kekeringan; dan
3. Banjir.

Selanjutnya untuk produksi sayuran tahun 2018 sampai 2020 mengalami tren positif setiap tahunnya atau terjadinya peningkatan. Dari tahun 2018 dengan produksi sebanyak 1.158,99 ton ditahun 2018. mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar 42,51 ton, terus meningkat sebesar 49,96 ton di tahun 2020 sebesar 1.251,46, namun pada tahun 2021 mengalami sebesar 957,57 ton dengan capaian produksi 293,89 ton. Pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan sebanyak 67,11 ton sehingga capaian produksi hanya 226,78 ton. Pada tahun 2023 kembali mengalami peningkatan secara signifikan sebanyak 3.231,63ton sehingga capaian produksi hanya 3.458,41 ton,

Pada produksi buah-buahan, tiap tahunnya mengalami tren yang fluktuatif. Pada tahun 2018 dengan produksi buah-buahan sebanyak 1.171,95 ton. Kemudian pada tahun 2019 produksi buah-buahan di Kabupaten Bangka Selatan mengalami peningkatan sebesar 130,95 ton, sedangkan pada tahun 2020 sedikit meningkat sebanyak 14,39 ton menjadi 9.068,39 ton. Pada tahun 2021 terjadi penurunan yang sangat drastis yaitu sebanyak 6.120,76 ton dengan produksi di tahun tersebut adalah sebanyak 2.947,63 ton. Pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan sebesar 1.041,73 ton dengan capain produksi 1.905,90. Dan Pada tahun 2023 terjadi peningkatan produksi sebesar 1.401,83 ton dengan capaian produksi 3.352,73.

2.3.1.6. Pertumbuhan Sektor Produksi Perkebunan

Perkebunan di Kabupaten Bangka Selatan dibagi atas perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Produksi komoditas perkebunan rakyat terdiri dari lada, kelapa, cengkeh dan cokelat. Sedangkan perkebunan besar dikelola oleh perusahaan perkebunan swasta dengan tanaman utama kelapa sawit. Adapun komoditas unggulan Kabupaten Bangka Selatan di sektor perkebunan adalah lada, karet dan kelapa sawit. Perkembangan komoditas unggulan sektor perkebunan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2013-2023 sebagai berikut :



Tabel 2.92
Produksi, Luas Tanaman Menghasilkan dan Produktivitas Komoditi Unggulan
Perkebunan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2013-2023

No.	Tahun	Lada			Karet			Kelapa Sawit		
		Produksi (ton)	Luas Tanaman Menghasilkan (TM) (ha)	Produktivitas (ton/ha)	Produksi (ton)	Luas Tanaman Menghasilkan (TM) (ha)	Produktivitas (ton/ha)	Produksi (ton)	Luas Tanaman Menghasilkan (TM) (ha)	Produktivitas (ton/ha)
1	2013	15.286,00	11.004,80	1,39	12.861,73	10.547,00	1,22	18.731,00	9.567,00	1,96
2	2014	17.227,00	11.883,80	1,45	13.727,86	10.964,00	1,25	19.077,00	9.893,00	2,21
3	2015	15.711,33	12.172,80	1,25	9.228,21	11.420,00	0,81	22.264,85	9.906,00	2,25
4	2016	16.269,00	11.053,00	1,47	11.977,00	11.742,16	1,02	31.441,89	10.658,27	2,95
5	2017	17.009,30	13.595,00	1,25	12.896,62	12.520,99	1,03	30.431,84	10.350,97	2,94
6	2018	14.859,48	12.498,00	1,19	11.897,52	13.458,00	0,88	39.429,38	12.798,50	3,08
7	2019	15.224,32	12.579,50	1,21	11.576,41	13.340,50	0,87	39.315,00	12.750,50	3,08
8	2020	15.257,81	12.616,00	1,21	11.517,59	13.509,50	0,85	40.366,09	13.313,00	3,03
9	2021	14.590,59	12.535,00	1,16	11.541,64	13.452,00	0,86	44.435,09	14.661,00	3,03
10	2022	13.468,93	11.632,80	1,16	11.657,88	13.508,00	0,86	45.951,88	15.352,00	2,99
11	2023	8.226,49	8.840,00	0,93	9.470,20	12.431,50	0,76	47.479,47	16.460,50	2,88

Sumber : Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangka Selatan, 2024

Berdasarkan tabel tersebut, perkembangan produksi, luas areal panen dan produktivitas komoditas unggulan Kabupaten Bangka Selatan fluktuatif. Pada komoditi lada, produktivitasnya jika dibandingkan antara tahun 2013 s.d 2023 mengalami penurunan. Pada tahun 2013 dengan produktivitas komoditi lada adalah sebesar 1,39 ton/ha dengan produksi lada sebanyak 15.286,00 ton dan luas Tanaman Menghasilkan 11.004,80 ha. Sedangkan pada tahun 2023 produktivitas lada di Kabupaten Bangka Selatan adalah sebesar 0,93 ton/ha dengan produksi sebanyak 8.226,49 ton dan luas Tanaman Menghasilkan yaitu 8.840,00 ha. Produktivitas terendah terjadi pada tahun 2023 ini yaitu sebanyak 0,93 ton/ha, sedangkan produktivitas tertinggi yaitu pada tahun 2016 dengan besaran 1,47 ton/ha.

Produktivitas komoditi karet secara keseluruhan dibandingkan antara tahun 2013 dengan 2022 mengalami penurunan atau pertumbuhan negatif. Pada tahun 2013 dengan produksi sebanyak 12.861,73 ton dan luas Tanaman Menghasilkan 10.547,00 ha diperoleh produktivitas sebesar 1,22 ton/ha. Sedangkan pada tahun 2023, produktivitas komoditi karet adalah sebanyak 0,76 ton/ha yaitu dengan produksi sebanyak 9.470,20 ton dan luas Tanaman Menghasilkan 12.431,50 ha. Produktivitas terendah terjadi pada tahun 2023 sebanyak 0,76 ton/ha, sedangkan produktivitas tertinggi yaitu pada tahun 2014 dengan besaran 1,025 ton/ha.



Gambar 2.45
Grafik Produktivitas Komoditi Unggulan Perkebunan
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2013-2023

Sumber : Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangka Selatan, 2024

Selanjutnya, untuk komoditi kelapa sawit antara tahun 2013 dengan tahun 2023 mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 produksi kelapa sawit sebanyak 18.731,00 ton dan luas Tanaman Menghasilkan 9.567,00 ha sehingga produktivitasnya adalah 1,96 ton/ha. Kemudian pada tahun 2023 produktivitas kelapa sawit turun menjadi 2,88 ton/ha namun jumlah produksi yang meningkat dari tahun-tahun sebelumnya dengan produksi sebanyak 47.479,47 ton, hal ini dikarenakan luas tanaman menghasilkan meningkat secara signifikan yaitu 16.460,50 ha. Produktivitas kelapa sawit tertinggi yaitu pada tahun 2016 dengan produktivitas 3,08 ton/ha dan yang terendah adalah pada tahun ini yaitu sebesar 2,88 ton/ha. Adapun fluktuasi produksi sub sektor perkebunan antara lain disebabkan oleh :

- 1) Organisme pengganggu tanaman;
- 2) Alih fungsi lahan;
- 3) Tanaman rusak; dan
- 4) Tanaman belum menghasilkan.

2.3.1.7. Pertumbuhan Sektor Kelautan dan Perikanan

Sub Sektor perikanan, baik budidaya maupun perikanan laut/tangkap cukup dominan, potensial dan dapat diandalkan di Kabupaten Bangka Selatan. Hal ini dikarenakan mengingat wilayah Kabupaten Bangka Selatan dikelilingi dan berbatasan langsung dengan laut sehingga memiliki sumberdaya laut yang relatif besar dan potensial untuk dikembangkan, selain itu



merupakan mata pencaharian penduduk terbanyak kedua setelah pertanian. Hampir seluruh Kecamatan di Kabupaten Bangka Selatan berbatasan dengan laut kecuali Kecamatan Payung sehingga 7 (tujuh) dari 8 (delapan) Kecamatan di Kabupaten Bangka Selatan masing-masing berperan dalam produksi komoditi perikanan. Komoditi perikanan yang dihasilkan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi seperti ikan Kerapu, Kakap Merah, Udang, Cumi-cumi, Sirip Ikan Hiu dan lain-lain.

Gambaran pertumbuhan dan produksi sektor perikanan di Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2018-2023 sebagai berikut :



Gambar 2.46
Pertumbuhan Sektor Perikanan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2018-2023
 Sumber : Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangka Selatan, 2024

Tabel 2.93
Produksi dan Pertumbuhan Sektor Perikanan
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2018-2023

Jenis	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Perikanan Tangkap	Produksi (Ton)	38.559,00	38.680,90	39.184,00	40.252,26	40.700,33	42.437,76
	Pertumbuhan (Persen)	3,15	0,32	1,30	2,72	1,11	2,85
Perikanan Budidaya	Produksi (Ton)	183,419	286,957	826,948	1.231,470	2.078,80	1.291,68



Jenis	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Pertumbuhan (Persen)	3,06	56,45	188,18	48,91	6,88	-37,86
Pengolahan	Produksi (Ton)	3.855,00	3.972,00	3.991,00	3.994,00	4.101,00	5.226,40
	Pertumbuhan (Persen)	7,71	3,04	0,48	0,075	2,6	27,44
Komoditas Perikanan	Total Produksi (Ton)	42.597,42	42.939,86	44.001,95	45.477,83	46.880,13	48.955,84
	Pertumbuhan (Persen)	3,55	0,84	2,47	3,35	3,08	3,19

Sumber : Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangka Selatan, 2024

Dari tabel dan grafik tersebut, pada tahun 2023 perikanan tangkap mengalami kenaikan 2,85 persen dibandingkan dari tahun sebelumnya, jika dilihat dari keseluruhan produksi perikanan sebesar 86,69 persen dari total produksi perikanan disumbang oleh perikanan tangkap. Dengan persentase yang sangat besar ini dimungkinkan karena Kabupaten Bangka Selatan memiliki perairan laut yang berpotensi tinggi secara ekonomi. Selanjutnya pada tahun 2023 ini pertumbuhan Produksi perikanan budidaya mengalami penurunan yang sangat signifikan sebesar -37,86 persen, tren pertumbuhan negatif ini disebabkan banyaknya tambak-tambak pengelolaan udang vaname yang tutup dikarenakan anjloknya harga udang tersebut dipasaran, sehingga biaya operasional produksi lebih tinggi dari pada keuntungan yang didapatkan. Hal ini menjadi dampak negatif dalam pertumbuhan disektor perikanan budiya yang pada tahun 2020 tumbuh sangat signifikan sebesar 188,18 persen setelah sebelumnya ditahun 2019 dan 2021 tumbuh sebesar 56,45 persen dan 48,91 persen. Pertumbuhan total Sub Sektor perikanan tahun 2019 sebesar 0,84 persen, tahun 2020 sebesar 2,47 persen, tahun 2021 sebesar 3,35 persen, tahun 2022 sebesar 3,08 persen dan tahun 2023 sebesar 3,19 persen. Peningkatan pertumbuhan komoditas perikanan ditahun 2023 berbanding lurus dengan meningkatnya produksi perikanan tangkap yang masih menjadi komoditas utama untuk dilakukan dikalangan masyarakat nelayan dan pengusaha perikanan.

Selanjutnya data produksi perikanan per Kecamatan tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.94
Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya Per Kecamatan
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022 dan 2023

No	Kecamatan	Produksi			
		2022		2023	
		Perikanan Tangkap (Ton)	Perikanan Budidaya (Ton)	Perikanan Tangkap (Ton)	Perikanan Budidaya (ton)
1	Toboali	10.135,88	611,394	10.621,00	492,32



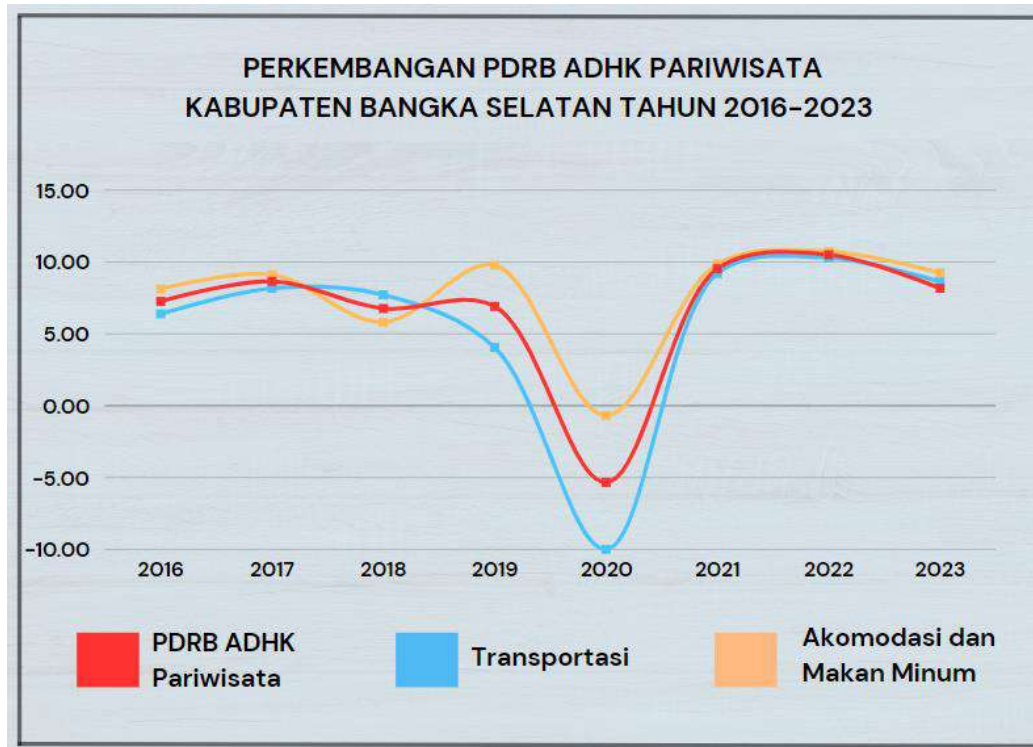
No	Kecamatan	Produksi			
		2022		2023	
		Perikanan Tangkap (Ton)	Perikanan Budidaya (Ton)	Perikanan Tangkap (Ton)	Perikanan Budidaya (ton)
2	Tukak Sadai	12.513,76	1.375,85	12.847,00	729,55
3	Payung	-	16,884	-	12,26
4	Simpang Rimba	197,97	24,386	325,61	23,65
5	Airgegas	100,72	8,046	159,77	4,86
6	Pulau Besar	143,43	6,462	180,38	12,32
7	Lepar	5.426,17	13,032	5.468,00	6,95
8	Kepulauan Pongok	12.182,40	22,740	12.836,00	9,77
Jumlah		40.700,33	2.078,80	42.437,76	1.291,68

Sumber : Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangka Selatan, 2024

Produksi perikanan budidaya pada tahun 2023 tetap tertinggi berada di Kecamatan Tukak Sadai walaupun terjadi lesunya produktivitas yaitu sebanyak 729,55 ton, kemudian diikuti oleh Kecamatan Toboali 492,32 ton, Simpang Rimba 23,65 ton, Pulau Besar 12,32 ton, Payung 12,26 ton, Kepulauan Pongok 9,77 ton Lepar 6,95 ton, dan Airgegas 4,86 ton. Sedangkan produksi perikanan tangkap tertinggi juga pada Kecamatan Tukak Sadai dengan jumlah produksi 12,847,00 ton, diikuti Kecamatan Kepulauan Pongok 12.836,00 ton, Toboali 10.621,00 ton, Lepar 5.468,00 ton, Simpang Rimba 325,61 ton, Pulau Besar 180,38 ton, dan Airgegas 159,77 ton sedangkan Kecamatan Payung tidak memiliki produksi perikanan tangkap.

2.3.1.8. Pertumbuhan Sektor Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal itu mampu memberikan efek mengurangi indeks kedalaman dan keparahan ekonomi serta memperlebar jarak antara garis indikator tingkat pendapatan masyarakat dengan ambang batas garis kemiskinan. Jika dilihat dari kacamata ekonomi makro, pariwisata memberikan dampak positif bagi perekonomian misalnya meningkatkan pendapatan daerah, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan objek dan daya tarik wisata di suatu daerah. Adapun perkembangan 8 (delapan) tahun terakhir Laju Pertumbuhan Sektor Pariwisata dihitung dari distribusi persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHB) menurut lapangan usaha pariwisata (transportasi, penyediaan akomodasi dan makan minum) dapat dilihat dari grafik berikut :



Gambar 2.47

Perkembangan PDRB ADHK Pariwisata Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016-2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan, 2024

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa dalam 8 (delapan) tahun terakhir laju pertumbuhan sektor pariwisata Kabupaten Bangka Selatan terus mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2017 dilihat dari lapangan usaha bidang transportasi mengalami peningkatan sebesar 1,78 persen dari 6,39 persen pada tahun 2016 menjadi 8,17 persen pada tahun 2017. Namun pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 0,45 persen menjadi 7,72 persen, kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 3,67 persen menjadi 4,05 persen. Selanjutnya Pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat drastis sebesar -14,05 persen dengan besaran (minus) -10 persen. Pada tahun 2021 terjadi tren positif naik kembali sebesar 19,2 persen menjadi 9,2 persen, kemudian pada tahun 2022 kembali naik sebesar 1,08 persen menjadi 10,28. Sedangkan untuk tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 1,66 persen menjadi 8,62 persen.

Untuk Akomodasi dan Makan Minum pada tahun 2016 diangka 8,12 persen, pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 9,12 persen dan untuk tahun 2018 mengalami penurunan 3,31 persen menjadi 5,81 persen sedangkan mengalami kenaikan kembali 3,96 persen menjadi 9,77 persen pada tahun 2019. Selanjutnya Pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat drastis sebesar -10,46 persen dengan besaran (minus) -0,69 persen. Pada tahun 2021 naik kembali sebesar 10,54 persen menjadi 9,85 persen, kemudian pada tahun 2022 kembali naik sebesar 0,87 persen menjadi 10,72. pada tahun 2023 mengalami penurunan



sebesar 1,47 persen menjadi 9,25 persen.

Sedangkan PDRB ADHK Pariwisata untuk tahun 2016 diangka 7,26 persen, pada tahun 2017 mengalami peningkatan 1,39 persen menjadi 8,65 persen dan untuk tahun 2018 mengalami penurunan 1,89 persen menjadi 6,76 persen, sedangkan mengalami kenaikan kembali 0,15 persen menjadi 6,91 persen pada tahun 2019. Selanjutnya Pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat drastis sebesar -12,25 persen dengan besaran (minus) -5,34 persen. Pada tahun 2021 naik kembali sebesar 14,87 persen menjadi 9,53 persen, kemudian pada tahun 2022 kembali naik sebesar 0,97 persen menjadi 10,5 persen. Dan pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 2,33 persen menjadi 8,17 persen. Berikut kunjungan wisatawan ke daya tarik wisata (DTW) Kabupaten Bangka Selatan dari tahun 2013-2023 :

Tabel 2.95
Kunjungan Wisatawan Ke Daya Tarik Wisata (DTW)
Kabupaten Bangka Selatan 2013-2023

No	Tahun	Jumlah Kunjungan (orang)	Kenaikan/Penurunan (persen)
1.	2013	13.978	-
2.	2014	15.460	10,60
3.	2015	15.480	0,12
4.	2016	16.922	9,03
5.	2017	616.121	3.540,94
6.	2018	617.735	0,26
7.	2019	302.646	-51,00
8.	2020	128.834	-57,40
9.	2021	129.118	0,22
10.	2022	162.945	20,76
11.	2023	166.602	2,4

Sumber : Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Selatan, 2024



Gambar 2.48
Grafik Kunjungan Wisatawan Ke Daya Tarik Wisata (DTW)
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2013-2023

Sumber : Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Selatan, 2024

Dari data yang disajikan pada tabel diatas menunjukkan tren angka peningkatan dan penurunan jumlah kunjungan wisatawan (orang) dari tahun 2013-2023. Dilihat dari data tersebut jumlah kunjungan wisatawan selama 11 (sebelas) tahun terakhir. Pada tahun 2013 jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bangka Selatan berjumlah 13.978 orang dan pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 10,60 persen menjadi 15.460 orang, setelah itu pada tahun 2015 kembali mengalami kenaikan sebesar 0,12 persen menjadi 15.480 orang, untuk tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 9,03 persen menjadi 16.922 orang, kemudian pada tahun 2017 mengalami kenaikan yang sangat signifikan sebesar 3.540,94 persen dari 16.922 orang di tahun 2016 menjadi 616.121 orang di tahun 2017, hal ini dikarenakan adanya event berskala Nasional yaitu Toboali City on Fire (TCoF) yang menjadi daya tarik wisatawan domestik maupun Internasional, event TCoF ini masuk agenda tahunan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dijadwalkan sampai tahun 2019, tercatat telah terlaksana 24 event pariwisata yang dilaksanakan di tahun 2017. Sedangkan di tahun 2018 kembali mengalami kenaikan sebesar 0,26 persen dibandingkan tahun 2017. Hal ini disebabkan pada tahun 2018 meningkatnya destinasi wisata yang terkelola dengan baik dan adanya objek-objek wisata baru di Kabupaten Bangka Selatan. Namun pada tahun 2019 Jumlah Kunjungan Wisatawan turun sebesar -51,00 persen. Banyak faktor yang mempengaruhi, salah satunya lonjakan tiket pesawat dan bagasi. Pada tahun 2020 terjadi penurunan jumlah kunjungan (orang) ke Kabupaten Bangka Selatan sebesar -57,40 persen, selain dampak wabah pandemi Covid-19, tidak adanya even-even

pariwisata dan budaya juga karena adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangka Selatan yang tidak tumbuh yang laju pertumbuhan ekonominya -1,99 persen. Selanjutnya pada tahun 2021 terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan menjadi sebanyak 129.118 orang atau peningkatan sebesar 0,22 persen, hal ini dikarenakan mulai membaiknya laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Selatan diangka 3,61 persen dan di tahun 2022 mengalami kenaikan kembali sebesar 20,76 persen menjadi 162.945 orang. sedangkan pada tahun 2023 terjadi peningkatan kembali jumlah kunjungan wisatawan walaupun tidak signifikan sebanyak 166.602 orang atau sebesar 2,4 persen.

Tabel 2.96
Objek Wisata Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023

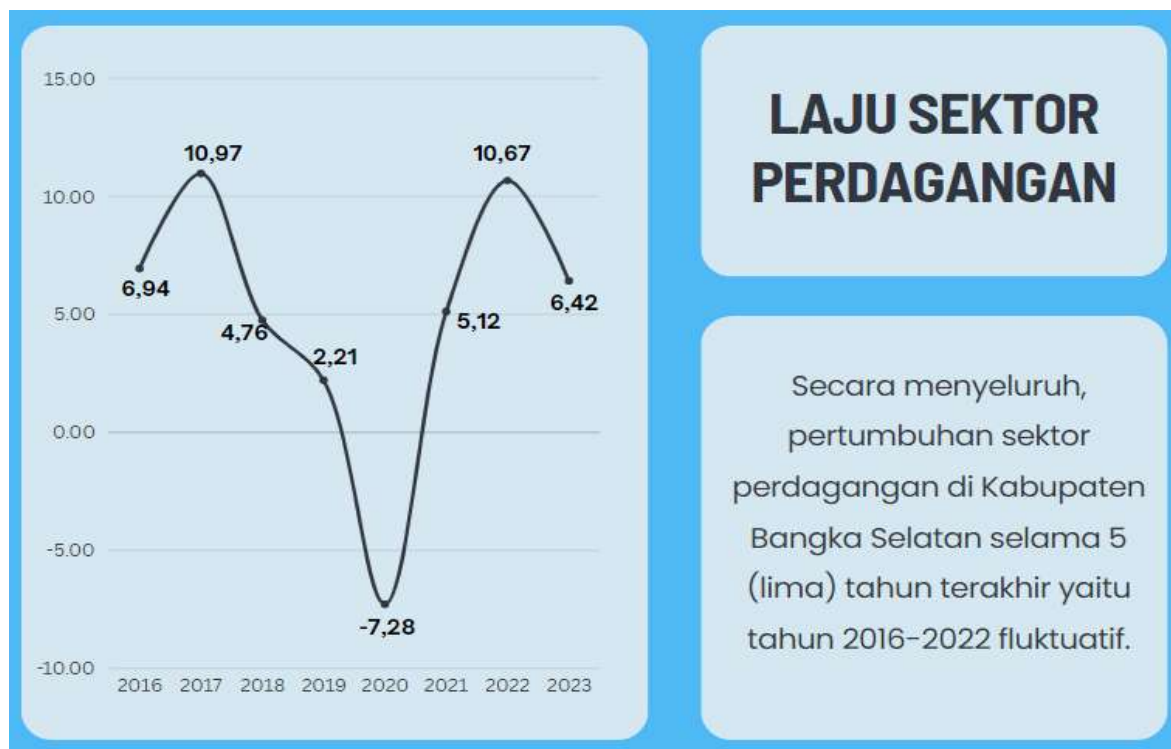
No	Kecamatan	Objek Wisata
1	Toboali	Pantai Batu Kapur, Pantai Kelisut, Pantai Batu Perahu, Pantai Batu Kodok, Pantai Tanjung Kelayang, Pantai Gunung Namak, Pantai Batu Ampar, Pantai Tanjung Timur, Pantai Tanjung Labun, Pantai Tanjung Bugis, Pantai Tanjung Zibur, Pantai Nek Aji, Batu Belimbing, Air Terjun Penyaber.
2	Airgegas	Bukit Lumut, Air Terjun Gunung Pading, Bukit Gebang, Hutan Pelawan Bencah, Air Panas Nyelanding, Aik Tawas.
3	Payung	Hutan Pelawan Nadung.
4	Simpang Rimba	Pantai Sebagian, Pantai Batu Bedaun, Bukit Nenek, Air Panas Permis, Bukit Permisan.
5	Lepar	Pantai Lampu, Terumbu Karang P. Kelapan, Pantai Belawang, Pantai Kumbang, Pantai Tanjung Bugis, Pantai Pulau Salah Nama, Keramba Apung Pulau Tinggi.
6	Tukak Sadai	Pantai Tanjung Kerasak, Pantai Tanjung Kemirai, Pantai Puding Besar, Hutan Mangrove, Pantai Tanjung Pao.
7	Pulau Besar	Pantai Batu Betumpang, Bendungan Bidadari.
8	Kepulauan Pongok	Pantai Batu Tambun Pongok, Pantai Pulau Celagen Pongok, Situs Batu Mandi, Terumbu Karang Pulau Salma.

Sumber : Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Selatan, 2024

2.3.1.9. Pertumbuhan Sektor Perdagangan

Perdagangan merupakan salah satu sektor prospektif yang cukup berpeluang untuk berkembang, tumbuh dan memberikan kontribusi yang positif bagi PDRB dan perekonomian di Kabupaten Bangka Selatan. Sektor prospektif adalah sektor yang memperlihatkan pertumbuhan, kontribusi terhadap PDRB, serta penyerapan terhadap tenaga kerja yang masih rendah, namun memiliki peluang untuk berkembang, baik dilihat dari karakteristik sektor yang bersangkutan maupun karena adanya dukungan kebijakan dari Pemerintah daerah. Perdagangan di Kabupaten Bangka Selatan mencakup kegiatan perdagangan barang-barang produk domestik yang diperdagangkan dalam wilayah Kabupaten Bangka Selatan. Kegiatan usaha perdagangan dilakukan oleh pedagang besar, pedagang menengah dan pedagang kecil. Adapun laju pertumbuhan sektor Perdagangan di Kabupaten Bangka Selatan selama 8

(delapan) tahun terakhir yang dilihat dari laju pertumbuhan PDRB ADHK lapangan usaha Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dapat dilihat sebagai berikut :



Gambar 2.49
Laju Sektor Perdagangan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016-2023
 Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan, 2024

Secara menyeluruh, pertumbuhan sektor Perdagangan di Kabupaten Bangka Selatan selama 8 (delapan) tahun terakhir yaitu tahun 2016-2023 fluktuatif. Pada tahun 2016 sektor Perdagangan dengan laju pertumbuhan 6,94 persen, kemudian pada tahun 2017 dengan laju pertumbuhan 10,97 persen dan pada tahun 2018 menurun menjadi 4,76 persen. Selanjutnya melambat pada tahun 2019 menurun menjadi 2,21 persen. Berikutnya pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan negatif hingga menjadi -7,28 persen. Penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya permintaan barang konsumsi rumah tangga serta kendaraan karena berkurangnya pendapatan masyarakat akibat pandemi *Covid-19*. Selanjutnya pada tahun 2021 laju sektor Perdagangan menunjukkan tren positif meningkat mencapai 5,12 persen. Hal ini disebabkan karena mulai membaiknya laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangka Selatan. Dan di tahun 2022 laju sektor Perdagangan kembali meningkat mencapai 10,67 persen. Namun pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 6,42 persen.

2.3.1.10. Pertumbuhan Sektor Perindustrian

Percepatan pertumbuhan ekonomi perlu terus diupayakan melalui pengembangan sektor-sektor ekonomi potensial di Kabupaten Bangka Selatan yang didasarkan pada sektor

unggulan daerah. Pengembangan sektor unggulan Kabupaten Bangka Selatan khususnya pada sektor-sektor industri kecil dan menengah dikembangkan dalam rangka mengisi pasar ASEAN. Adapun industri yang menjadi perhatian untuk di kembangkan pada Kabupaten Bangka Selatan berdasarkan potensi alam yang ada dan letak geografis, antara lain : industri agro (CPO, Kakao dan Karet), industri produk olahan ikan, industri makanan dan minuman, industri TPT, serta industri logam. Diharapkan sektor perindustrian dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih tinggi, dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas. Berikut laju pertumbuhan sektor perindustrian di Kabupaten Bangka Selatan selama 8 (delapan) tahun :



Gambar 2.50

Laju Sektor Perindustrian Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016-2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan, 2024

Pertumbuhan sektor industri di Kabupaten Bangka Selatan yang dilihat dari sektor industri pengolahan selama 8 (delapan) tahun terakhir yaitu tahun 2016-2023 juga fluktuatif. Pada tahun 2016 laju pertumbuhan sektor industri Kabupaten Bangka Selatan adalah 13,39 persen, kemudian pada tahun 2017 laju pertumbuhan sektor industri Kabupaten Bangka Selatan menurun menjadi 10,4 persen. Selanjutnya pada tahun 2018 meningkat kembali menjadi 11,07 persen, namun kembali mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2019 yaitu menjadi -2,31 persen. Berikutnya pada tahun 2020 kembali meningkat menjadi 6,33 persen. Kemudian pada tahun 2021 laju pertumbuhan sektor perindustrian mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 4,77 persen. Dan di tahun 2022 laju pertumbuhan sektor perindustrian mengalami kenaikan menjadi 7,41 persen. Namun pada tahun 2023 mengalami penurunan

menjadi 4,72 persen. Laju pertumbuhan sektor industri yang dilihat dari lapangan usaha industri pengolahan di Kabupaten Bangka Selatan tergolong tinggi dibandingkan lapangan usaha lainnya. Salah satu yang menyebabkan cukup tingginya pertumbuhan ekonomi di kategori ini adalah adanya pabrik industri tapioka yang beroperasi di Kabupaten Bangka Selatan pada akhir tahun 2007 sampai sekarang.

2.3.1.11. Analisis Sektor Unggulan di Kabupaten Bangka Selatan

2.3.1.11.1. Analisis Location Quotient (LQ)

Analisis *Location Quotient* (LQ) menunjukkan potensi dari tempat terkait dengan kekayaan yang ada di wilayah tersebut. LQ berguna untuk melihat spesialisasi kegiatan produksi suatu wilayah. Pada dasarnya, teknik ini menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan suatu sektor di daerah yang diselidiki dengan kemampuan sektor yang sama pada daerah yang lebih luas. Apabila hasil perhitungan rasio lebih besar dari 1 ($LQ > 1$) menunjukkan kegiatan ekspor atau basis dan jika $LQ = 1$ menunjukkan memiliki potensial yang sama dengan sektor sejenis di daerah tertentu, sehingga hanya cukup untuk melayani kebutuhan daerah sendiri. dan bila $LQ < 1$ menunjukkan bahwa wilayah tersebut tidak mampu untuk mencukupi kebutuhannya sendiri dan cenderung untuk import.

Adapun untuk perhitungan LQ, dapat menggunakan rumus di bawah ini:

$$LQ_i = \frac{v_i / v_t}{V_i / V_t}$$

LQ_i = nilai LQ sektor ke-i
 v_i = pendapatan (tenaga kerja) sektor ke-i di suatu wilayah
 v_t = pendapatan (tenaga kerja) seluruh sektor (total) di wilayah tsb.
 V_i = pendapatan (tenaga kerja) sektor ke-i di wilayah yang lebih luas
 V_t = pendapatan (tenaga kerja) seluruh sektor di wilayah yang lebih luas

Di Kabupaten Bangka Selatan terdapat beberapa sektor kategori lapangan usaha yang menjadi sektor unggulan, berikut Analisis *Location quotient* (LQ) berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2023 :



Tabel 2.97

Perhitungan *Location Quotient* (LQ) Berdasarkan Lapangan Usaha Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023

LAPANGAN USAHA		PDRB ADHB Tahun 2023				LQ		Sektor Basis	Sektor Non Basis	Multiplier Effect
		Kab. Basel	(%)	Prov. Babel	(%)	Nilai	B/NB			
A	Pertanian	4.739,16	41,67	20.006,09	19,49	2,14	B	2.522	2.217	0,88
B	Pertambangan & Penggalian	1.734,05	15,25	7.846,48	7,64	1,99	B	865	869	1,01
C	Industri Pengolahan	628,55	5,53	21.704,97	21,15	0,26	nB	-1.776	2.405	-1,35
D	Listrik & Gas	7,99	0,07	112,29	0,11	0,64	nB	-4	12	-2,79
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	1,98	0,02	19,38	0,02	0,92	nB	0	2	-12,84
F	Konstruksi	959,32	8,44	9.746,18	9,50	0,89	nB	-121	1.080	-8,96
G	Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor	1315,54	11,57	16.102,83	15,69	0,74	nB	-469	1.784	-3,81
H	Transportasi & Pergudangan	112,59	0,99	4.961,83	4,83	0,20	nB	-437	550	-1,26
I	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	305,55	2,69	3.281,89	3,20	0,84	nB	-58	364	-6,26
J	Informasi & Komunikasi	83,91	0,74	2.290,13	2,23	0,33	nB	-170	254	-1,49
K	Jasa Keuangan & Asuransi	65,72	0,58	2.074,37	2,02	0,29	nB	-164	230	-1,40
L	Real Estat	393,14	3,46	3.479,54	3,39	1,02	B	8	386	50,68
M,N	Jasa Perusahaan	17,28	0,15	305,66	0,30	0,51	nB	-17	34	-2,04
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial	593,99	5,22	5.408,44	5,27	0,99	nB	-5	599	-113,83
P	Jasa Pendidikan	287,64	2,53	2.987,66	2,91	0,87	nB	-43	331	-7,63
Q	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	79,81	0,70	1.416,43	1,38	0,51	nB	-77	157	-2,03
R,S,T,U	Jasa Lainnya	45,8	0,40	891,47	0,87	0,46	nB	-53	99	-1,86
TOTAL PDRB		11.372,02	100,00	102.635,64	100,00					

Sumber : BPS Kabupaten Bangka Selatan dan BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (diolah), 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat nilai Location quotient (LQ) pada tahun 2023 ini terdapat 3 (tiga) sektor unggulan yaitu :

1. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan nilai *Location Quotient* (LQ) sebesar 2,52;
2. Sektor Pertambangan dan Penggalian dengan nilai *Location Quotient* (LQ) sebesar 1,99; dan
3. Sektor Real Estate dengan nilai *Location Quotient* (LQ) sebesar 1,02.

Untuk sektor ekonomi lainnya yang memiliki angka kurang dari 1 (satu), dapat diartikan bahwa sektor–sektor tersebut merupakan sektor ekonomi non basis dan masih membutuhkan pengaruh dari daerah lainnya.

2.3.1.11.2. Analisis Tipologi Klassen

Analisis Tipologi Klassen merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengetahui bagaimana gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing suatu wilayah. Tipologi kelas pada dasarnya membagi wilayah berdasarkan indikator, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita daerah: (1) daerah cepat maju dan cepat tumbuh (*high growth and high income*), (2) daerah maju tapi tertekan (*high income but low growth*), (3) daerah berkembang cepat (*high growth but low income*) dan (4) daerah relatif tertinggal (*low growth but low income*).

Model Analisis Tipologi Klassen digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing sektor di Kabupaten Bangka Selatan.

Tabel 2.98
Klasifikasi Tipologi Klassen

Rata-rata Kontribusi (r) Rata-rata Pertumbuhan (y)	$y_i > y$	$y_i < y$
$r_i > r$	Kuadran I Daerah maju dan Cepat Tumbuh	Kuadran II Daerah maju tapi tertekan
$r_i < r$	Kuadran III Daerah potensial dan Masih dapat berkembang Cepat	Kuadran IV Daerah tertinggal

Hasil Analisis Tipologi Klassen dapat dilihat dari hasil perhitungan pada tabel :



Tabel 2.99
Perhitungan Analisis Tipologi Klassen Berdasarkan Lapangan Usaha Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023

LAPANGAN USAHA		Prov. Babel		Kab. Bangka Selatan		Keterangan	Kuadran
		Rata-rata Pertumbuhan	Rata-rata Kontribusi	Rata-rata Pertumbuhan	Rata-rata Kontribusi		
A	Pertanian	10,17	19,34 persen	11,24	39,90 persen	Sektor Maju dan Tumbuh Cepat	Kuadran I
B	Pertambangan & Penggalian	5,59	8,78 persen	2,13	17,19 persen	Sektor Maju Tapi Tertekan	Kuadran II
C	Industri Pengolahan	12,68	20,44 persen	12,53	5,13 persen	Sektor Tertinggal	Kuadran IV
D	Listrik & Gas	4,92	0,12 persen	4,73	0,08 persen	Sektor Tertinggal	Kuadran IV
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	6,69	0,02 persen	4,51	0,02 persen	Sektor Tertinggal	Kuadran IV
F	Konstruksi	3,36	9,77 persen	4,42	8,73 persen	Sektor Potensial atau Masih Dapat Berkembang Cepat	Kuadran III
G	Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor	8,17	15,47 persen	6,92	11,32 persen	Sektor Tertinggal	Kuadran IV
H	Transportasi & Pergudangan	9,92	4,18 persen	10,48	0,88 persen	Sektor Potensial atau Masih Dapat Berkembang Cepat	Kuadran III
I	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	10,11	3,04 persen	10,74	2,51 persen	Sektor Potensial atau Masih Dapat Berkembang Cepat	Kuadran III
J	Informasi & Komunikasi	11,73	2,09 persen	11,33	0,70 persen	Sektor Tertinggal	Kuadran IV
K	Jasa Keuangan & Asuransi	6,33	1,91 persen	9,46	0,53 persen	Sektor Potensial atau Masih Dapat Berkembang Cepat	Kuadran III
L	Real Estat	7,46	3,50 persen	5,37	3,57 persen	Sektor Maju Tapi Tertekan	Kuadran II
M,N	Jasa Perusahaan	5,49	0,29 persen	5,44	0,15 persen	Sektor Tertinggal	Kuadran IV
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial	1,73	5,85 persen	3,21	5,65 persen	Sektor Potensial atau Masih Dapat Berkembang Cepat	Kuadran III
P	Jasa Pendidikan	4,61	2,97 persen	5,91	2,56 persen	Sektor Potensial atau Masih Dapat Berkembang Cepat	Kuadran III
Q	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	7,94	1,38 persen	8,82	0,68 persen	Sektor Potensial atau Masih Dapat Berkembang Cepat	Kuadran III
R,S,T,U	Jasa Lainnya	4,31	0,86 persen	6,20	0,40 persen	Sektor Potensial atau Masih Dapat Berkembang Cepat	Kuadran III

Sumber : BPS Kabupaten Bangka Selatan dan BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (diolah), 2024



Berdasarkan hasil analisis tipologi kelas di atas sektor lapangan usaha pada PDRB Kabupaten Bangka Selatan lebih cenderung ke Kuadran IV akan tetapi ada 1 (satu) sektor yang maju dan tumbuh cepat yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masuk kedalam kategori kuadran I, dan ada juga sektor yang menjadi sektor potensial yang dapat berkembang cepat yaitu pada kuadran III yang terdapat 10 (sepuluh) sektor yang mana sektor tersebut adalah industri pengolahan, listrik dan gas, konstruksi, Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi & makan minum, jasa keuangan & asuransi, jasa perusahaan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan jasa lainnya. Selain itu, ada juga sektor maju tapi tertekan pada kuadran II yaitu sektor pertambangan dan penggalian.

2.3.1.11.3. Analisis Shift Share

Metode analisis *shift-share* merupakan salah satu metode analisis ekonomi yang digunakan untuk mengetahui pengembangan pada suatu wilayah, ditunjukkan berdasarkan kondisi struktur perekonomian, pergeseran sektor-sektor unggulan pada dua kurun waktu, dan mengetahui posisi sektor perekonomian suatu wilayah terhadap wilayah yang lebih luas.

Untuk menganalisa struktur perekonomian Kabupaten Bangka Selatan dan pergeserannya digunakan metode analisis *shift-share*. Dimana *shift-share analysis* merupakan salah satu teknik analisis untuk memahami pergeseran struktur aktivitas di suatu lokasi tertentu dibandingkan dengan wilayah yang lebih luas dalam dua titik waktu. Pemahaman struktur aktivitas dari hasil analisis *shift-share* menjelaskan kemampuan berkompetisi (*competitiveness*) aktivitas tertentu di suatu wilayah secara dinamis atau perubahan aktivitas dalam cakupan wilayah yang lebih besar. Sehingga dari analisis *shift-share* ini dapat diketahui seberapa cepat tingkat pertumbuhan sektor lapangan usaha tersebut dan apakah sektor lapangan usaha tersebut memiliki daya saing atau tidak di tingkat provinsi.

Analisis *shift-share* digunakan untuk membandingkan perbedaan laju pertumbuhan berbagai sektor di Kabupaten Bangka Selatan. Metode *shift-share* memperinci penyebab perubahan atas beberapa variabel.

Nilai Positif (+) : Menunjukkan pertumbuhan lapangan kerja sektor tersebut tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan lapangan kerja sektor tersebut secara nasional.

Nilai Negatif (-) : Menunjukkan pertumbuhan sektor tersebut tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan lapangan kerja sektor tersebut secara nasional.

Data yang digunakan untuk membandingkan dan menganalisis *shift-share* yaitu PDRB atas harga konstan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Bangka Selatan dari tahun 2021 sebagai tahun awal sampai tahun 2022 sebagai tahun akhir. Berikut

merupakan analisis *shift-share* pergeseran perekonomian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.100
Analisa Shift Share Kabupaten Bangka Selatan

No	Lapangan Usaha	Proporsional Share	Differential Share	Kuadran
1	Pertanian	-	+	III
2	Pertambangan & Penggalian	-	-	IV
3	Industri Pengolahan	+	+	I
4	Listrik & Gas	-	+	III
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	-	-	IV
6	Konstruksi	-	+	III
7	Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor	+	+	I
8	Transportasi & Pergudangan	+	-	II
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	+	+	I
10	Informasi & Komunikasi	+	+	I
11	Jasa Keuangan & Asuransi	+	+	I
12	Real Estat	+	-	II
13	Jasa Perusahaan	+	-	II
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial	-	+	III
15	Jasa Pendidikan	-	+	III
16	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	-	-	IV
17	Jasa Lainnya	+	-	II

Sumber : BPS Kabupaten Bangka Selatan (data diolah), 2024

Dari perhitungan *Proportional Share* dan *Differential Share* diatas, maka dapat diketahui bahwa sektor-sektor yang lebih cepat tumbuh yaitu industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi karena semua sektor tersebut berada di kuadran I. Artinya sektor tersebut tumbuh lebih cepat terhadap sektor yang sama di daerah lain dan memiliki keunggulan kompetitif sehingga akan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan mampu berdaya saing dengan daerah lain. Sedangkan untuk sektor yang berada di kuadran IV yaitu pertambangan dan penggalian, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, jasa kesehatan dan kegiatan sosial artinya sektor tersebut tumbuh lebih lemah dibandingkan dengan sektor yang sama di tingkat provinsi.

2.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia

2.3.2.1. Angkatan Partisipasi Tenaga Kerja

Permasalahan kemiskinan dan pengangguran merupakan isu penting sekaligus persoalan serius yang dapat mempengaruhi tingkat pendapatan regional dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak mencapai potensi maksimal.

Tabel 2.101
Perkembangan Indikator Kinerja Bidang Ketenagakerjaan
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2019-2022

Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023
Angkatan Kerja yang Bekerja	98,917	98,852	100,683	99,093	100,355
Angkatan Kerja	102,896	104,518	106,305	104,407	105,485

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan, 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat perkembangan indikator kinerja bidang ketenagakerjaan Kabupaten Bangka Selatan tahun 2019 s.d 2022 Seiring dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi regional akibat pandemi corona virus 19 dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, terjadi juga melambatnya pertumbuhan ekonomi global dan instabilitas kondisi geopolitik berbanding lurus dengan kondisi ketenagakerjaan regional. terjadi penurunan angkatan kerja yang bekerja, pada tahun 2019 dari 98,917 menurun menjadi 98,852 pada tahun 2020 namun pada tahun 2021 kembali meningkat menjadi 100,683. Dan di tahun 2022 turun kembali menjadi 99,093. Kemudian di tahun 2023 sebesar 100,355.

Sedangkan untuk angkatan kerja terus mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebanyak 102,896 menjadi 104,518 pada tahun 2020 dan kembali meningkat pada tahun 2021 sebesar 106,305. Dan di tahun 2022 sebesar 104,407. Sedangkan di tahun 2023 sebesar 105,485.

2.3.2.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Selain permasalahan pengangguran yang dapat menjadi persoalan serius yang dapat mempengaruhi tingkat pendapatan regional dan tingkat kemakmuran masyarakat, tingkat partisipasi angkatan kerja juga menjadi indikator utama dalam menentukan aspek kesejahteraan masyarakat, indikator partisipasi angkatan kerja bisa dilihat ditabel dibawah ini :

Tabel 2.102
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Bangka Selatan tahun 2019-2023

Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	68,12	68,86	68,96	69,17	66,93

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan, 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat perkembangan indikator kinerja bidang ketenagakerjaan Kabupaten Bangka Selatan tahun 2019 s.d 2021 tingkat partisipasi angkatan kerja terus mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebanyak 68,12 persen menjadi 68,86 persen pada tahun 2020 persen dan kembali meningkat pada tahun 2021 sebesar 68,96 persen. Untuk di tahun 2022 menjadi 69,17 persen dan di tahun 2023 menjadi 69,93 persen.

2.3.2.3. Rasio Penduduk yang Bekerja

Dari rasio penduduk yang bekerja dapat dilihat perkembangan indikator kinerja bidang ketenagakerjaan Kabupaten Bangka Selatan tahun 2019-2023 seiring dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi regional khususnya dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir sebagai akibat dari melambatnya pertumbuhan ekonomi global dan instabilitas kondisi geopolitik berbanding lurus dengan kondisi ketenagakerjaan regional. pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan menjadi 0,946 dari 0,961 di tahun 2019, namun pada tahun 2021 kembali meningkat menjadi 0,947. Dan di tahun 2022 kembali meningkat menjadi 0,949. Rasio Penduduk Yang Bekerja dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2.103
Perkembangan Rasio Penduduk yang Bekerja
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023
Rasio Penduduk yang Bekerja	0,961	0,946	0,947	0,949	0,951

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan, 2024

2.3.2.4. Rasio Guru/Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar di sebuah daerah yang dapat dibaca sebagai cerminan dari kemampuan suatu daerah dalam menyelenggarakan pendidikan, khususnya pendidikan dasar. Disamping itu, rasio guru terhadap murid juga dapat digunakan untuk mengukur tercapai atau tidaknya jumlah ideal murid untuk setiap guru agar dapat menjamin berlangsungnya proses belajar mengajar yang bermutu sesuai hasil yang diharapkan. Berikut rasio guru/murid Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017-2023:

Tabel 2.104
Rasio Guru/Murid Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017-2023

No	Jenjang pendidikan	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A	SD/MI/Sederajat							
1	Jumlah Siswa (orang)	23.553	24.183	24.117	25.183	24.790	25.325	24.698
2	Jumlah Guru (orang)	1.183	1.014	1.158	1.290	1.360	1.323	1.259
3	Rasio	1:20	1:24	1:21	1:19	1:18	1:19	1:20
B	SMP/MTS/Sederajat							
1	Jumlah Siswa (orang)	8.294	8.315	8.218	9.229	9.591	10.639	10.492
2	Jumlah Guru (orang)	501	449	493	678	709	729	700
3	Rasio	1:16	1:18	1:17	1:14	1:14	1:14	1:15

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Selatan, 2024

Perkembangan Rasio guru/murid baik SD/MI sederajat dan SMP/MTs sederajat di Kabupaten Bangka Selatan selama kurun waktu 2017-2023 bersifat dinamis tiap tahunnya. Pada tahun 2017 untuk sekolah SD/MI sederajat dengan rasio 1:20 memberikan gambaran setiap 1 guru mengajar anak sekitar 20 murid, sedangkan pada tingkat SMP/MTs sederajat dengan rasio 1:16 yang berarti bahwa setiap 1 guru mengajar anak sekitar 16 murid. Pada tahun 2023, untuk sekolah SD/MI sederajat tetap sama dengan rasio 1:20 memberikan gambaran bahwa setiap 1 guru mengajar anak sekitar 20 murid, sedangkan pada tingkat SMP/MTs sederajat dengan rasio 1:15 yang berarti bahwa setiap 1 guru mengajar sekitar 15 murid.

2.3.2.5. Persentase Guru Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Guru menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Agar kualitas pendidikan semakin baik, guru sebagai tenaga pendidik harus memiliki kualifikasi yang yang memenuhi. Berikut gambaran kualifikasi guru Kabupaten Bangka Selatan selama kurun waktu 2017-2023.

Tabel 2.105
Persentase Guru Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017-2023

No	Pendidikan Yang Ditamatkan	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A	SD/MI Sederajat							
1	Pendidikan <S1/D-IV (orang)	227	190	154	39	102	108	51
2	Pendidikan ≥S1/D-IV (orang)	988	1.160	1.100	1.172	1.258	1.215	1.208
3	Jumlah Guru (orang)	1.215	1.350	1.254	1.211	1.360	1.323	1.259
4	Persen	81,32	85,93	87,72	96,78	92,50	91,83	95,94
B	SMP/MTs Sederajat							
1	Pendidikan < S1/D-IV (orang)	57	73	60	18	67	67	34
2	Pendidikan ≥ S1/D-IV (orang)	513	574	490	534	644	662	662
3	Jumlah Guru (orang)	570	647	550	552	711	729	700
4	Persen	90,00	88,72	89,09	96,74	90,57	90,80	95,14

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Selatan, 2024

Standar kualifikasi akademik guru menurut Permendiknas nomor 16 Tahun 2007 mulai jenjang TK sampai SMA Sederajat adalah minimal harus menempuh Diploma IV atau S1 dari program yang telah ditempuh. Kondisi di Kabupaten Bangka Selatan adalah guru yang memenuhi standar kualifikasi akademik perlu ditingkatkan.

Guru yang memenuhi standar kualifikasi akademik S1/D-IV pada jenjang SD/MI sederajat semakin meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2017 sebesar 81,32 persen kemudian di tahun 2018 sebesar 85,93 persen selanjutnya di tahun 2019 sebesar 89,09 persen dan pada

tahun 2020 meningkat menjadi 96,98 persen, selanjutnya untuk tahun 2021 terjadi penurunan menjadi 92,50 persen. Dan untuk tahun 2022 terjadi penurunan menjadi 91,83 persen. Namun untuk tahun 2023 terjadi kenaikan kembali menjadi 95,94 persen.



Gambar 2.51
Persentase Guru Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016-2023

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Selatan, 2024

Sementara pada jenjang SMP/MTs sederajat, pada tahun 2016 adalah sebanyak 81,54 persen kemudian pada tahun 2017 adalah sebanyak 90,00 persen selanjutnya pada tahun 2018 adalah sebanyak 88,72 persen setelah itu meningkat pada tahun 2019 adalah sebanyak 89,09 persen dan meningkat kembali pada tahun 2020 menjadi 96,74 persen. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah guru yang memenuhi kualifikasi akademik di Kabupaten Bangka Selatan dan diharapkan mampu memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya pada tahun 2021 guru yang memenuhi standar kualifikasi S1/D-IV mengalami peningkatan secara jumlah dari 534 orang menjadi 644 orang, tetapi untuk guru yang pendidikannya dibawah atau <S1/D-IV meningkat dari jumlah 18 orang menjadi 67 orang. Hal inilah yang menyebabkan penurunan persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV menjadi 90,57 persen. Dan pada tahun 2022 guru yang memenuhi standar kualifikasi S1/D-IV mengalami peningkatan secara jumlah dari 534 orang menjadi 729 orang, tetapi untuk guru yang pendidikannya dibawah atau <S1/D-IV meningkat dari jumlah 18 orang menjadi 67 orang. Sehingga persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV meningkat menjadi 90,80 persen. Dan untuk tahun 2023 terjadi kenaikan kembali menjadi 95,94 persen.

2.3.2.6. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Pada tahun 2023 jumlah ketersediaan dokter di Kabupaten Bangka Selatan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 yang membuat rasio dokter menjadi menurun hal ini dapat diartikan semakin baiknya penyebaran dokter di Kabupaten Bangka Selatan dalam melayani masyarakat dan menjadi kemajuan dalam peningkatan kualitas kesehatan di Kabupaten Bangka Selatan. Rasio dokter spesialis pada tahun 2023 yaitu 1:7.137 menunjukkan satu orang dokter spesialis melayani 7.137 penduduk. Selanjutnya rasio dokter umum dari tahun 2013-2023 berfluktuatif, pada tahun 2023 rasio dokter umum yaitu 1:5.048 menunjukkan satu dokter umum melayani 5.048 penduduk. Selanjutnya untuk rasio dokter gigi pada tahun 2022 yaitu 1:14.784 menunjukkan satu dokter gigi melayani 14.784 penduduk.

Tabel 2.106
Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2013-2023

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK	RASIO DOKTER					
		DOKTER SPESIALIS		DOKTER UMUM		DOKTER GIGI	
		Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
2013	188.908	3	1:62.969	21	1:8.996	2	1:94.454
2014	194.686	4	1:48.671	27	1:7.210	7	1:27.812
2015	193.584	6	1:32.264	32	1:6.049	6	1:32.264
2016	165.291	10	1:16.529	27	1:6.122	5	1:33.059
2017	171.984	9	1:19.109	14	1:12.285	4	1:42.997
2018	168.341	5	1:33.668	51	1:3.301	10	1:16.834
2019	176.658	15	1:11.777	43	1:4.108	9	1:19.629
2020	181.961	18	1:10.109	38	1:4.788	10	1:18.196
2021	200.051	18	1:11.075	36	1:5.537	9	1:22.150
2022	201.948	20	1:10.097	39	1:5.178	11	1:18.359
2023	206.972	29	1:7.137	41	1:5.048	14	1:14.784

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangka Selatan, 2024

Sesuai Peraturan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten Kota Peduli Hak Asasi Manusia bahwa satu dokter spesialis idealnya melayani 16.000 penduduk dan satu dokter umum idealnya melayani 2.500 penduduk. Dengan demikian bahwa ketersediaan dokter umum di Kabupaten Bangka Selatan masih belum mencukupi, sementara ketersediaan dokter spesialis disesuaikan dengan bidang spesialisasinya.

Adapun Jumlah dokter paling banyak pada tahun 2023 di Kabupaten Bangka Selatan baik dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi terdapat di Kecamatan Toboali dan jumlah



dokter paling sedikit terdapat di Kecamatan Pulau Besar. Berikut rincian dokter per Kecamatan di Kabupaten Bangka Selatan selama kurun waktu 2014-2023.

Tabel 2.107
Jumlah Dokter Per Kecamatan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014-2023

KECAMATAN	TAHUN	JUMLAH DOKTER			
		DOKTER SPESIALIS	DOKTER UMUM	DOKTER GIGI	JUMLAH
TOBOALI	2014	4	16	2	22
	2015	6	14	2	22
	2016	10	13	1	24
	2017	9	26	1	36
	2018	5	36	5	46
	2019	15	34	4	53
	2020	14	23	4	41
	2021	12	19	3	34
	2022	12	22	4	38
	2023	16	22	6	44
	AIRGEGAS	2014	0	2	1
2015		0	2	0	2
2016		0	2	0	2
2017		0	2	0	2
2018		0	4	1	5
2019		0	3	1	4
2020		0	4	1	5
2021		0	4	1	5
2022		0	3	2	5
2023		0	4	2	6
PAYUNG		2014	0	2	1
	2015	0	3	1	4
	2016	0	2	1	3
	2017	0	1	1	2
	2018	0	2	1	3
	2019	0	1	1	2
	2020	4	6	2	12
	2021	6	6	1	13
	2022	8	7	1	16
	2023	13	8	2	23
	SIMPANG RIMBA	2014	0	1	0
2015		0	2	0	2
2016		0	3	0	3
2017		0	3	0	3
2018		0	3	0	3
2019		0	1	0	1
2020		0	1	0	1
2021		0	1	1	2
2022		0	2	1	3
2023		0	2	1	3
LEPAR		2014	0	1	1
	2015	0	2	0	2
	2016	0	2	0	2
	2017	0	1	0	1
	2018	0	2	0	2
	2019	0	2	1	3
	2020	0	1	1	2
	2021	0	1	1	2



KECAMATAN	TAHUN	JUMLAH DOKTER			
		DOKTER SPESIALIS	DOKTER UMUM	DOKTER GIGI	JUMLAH
	2022	0	1	1	2
	2023	0	1	1	2
KEP. PONGOK	2014	0	2	2	4
	2015	0	3	2	5
	2016	0	2	2	4
	2017	0	2	2	4
	2018	0	2	2	4
	2019	0	2	1	3
	2020	0	1	1	2
	2021	0	1	1	2
	2022	0	2	0	2
	2023	0	1	0	1
	TUKAK SADAI	2014	0	1	0
2015		0	1	0	1
2016		0	1	0	1
2017		0	1	0	1
2018		0	1	1	2
2019		0	0	1	1
2020		0	2	1	3
2021		0	2	1	3
2022		0	1	2	3
2023		0	2	2	4
PULAU BESAR	2014	0	2	0	2
	2015	0	1	1	2
	2016	0	2	1	3
	2017	0	1	0	1
	2018	0	1	0	1
	2019	0	0	0	0
	2020	0	1	0	1
	2021	0	1	0	1
	2022	0	1	0	1
	2023	0	1	0	1
KAB. BANGKA SELATAN	2014	4	27	7	38
	2015	6	28	6	40
	2016	10	27	5	42
	2017	9	37	4	50
	2018	5	51	10	66
	2019	15	43	9	67
	2020	18	38	10	66
	2021	18	36	9	63
	2022	20	39	11	70
	2023	29	41	14	84

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangka Selatan, 2024

2.3.2.7. Rasio Tenaga Medis

Rasio Tenaga Medis per jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dan cakupan pelayanan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada penduduk. Jumlah tenaga medis di Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2013-2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.108
Rasio Tenaga Medis Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2013-2023

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)	TENAGA MEDIS							
		PERAWAT		BIDAN		AHLI GIZI		APOTEKER	
		Jumlah (orang)	Rasio	Jumlah (orang)	Rasio	Jumlah (orang)	Rasio	Jumlah (orang)	Rasio
2013	188.908	292	1:647	91	1:2.076	17	1:11.112	9	1:20.990
2014	194.686	283	1:688	114	1:1.708	19	1:10.247	9	1:21.632
2015	193.584	286	1:677	144	1:1.344	20	1:9.679	10	1:19.358
2016	165.291	152	1:1.087	94	1:1.758	18	1:9.183	10	1:16.529
2017	171.984	173	1:994	136	1:1.265	17	1:10.117	8	1:20.661
2018	168.341	305	1:551	172	1:978	23	1:7.319	12	1:14.028
2019	176.658	295	1:598	201	1:878	30	1:5.887	16	1:11.041
2020	181.961	299	1:608	211	1:862	33	1:5.514	19	1:9.577
2021	199.355	321	1:621	210	1:949	33	1:6.041	18	1:11.075
2022	201.948	342	1:590	232	1:870	41	1:4.926	19	1:10.629
2023	206.972	347	1:596	217	1:954	42	1:4.928	21	1:9.856

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Bangka Selatan, 2024

Pada tahun 2023 rasio ketersediaan tenaga medis di Kabupaten Bangka Selatan menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2022. Rasio perawat 1:596 menunjukkan satu orang perawat melayani 596 penduduk. Selanjutnya rasio bidan 1:954 penduduk menunjukkan satu orang bidan melayani 954 penduduk, rasio ahli gizi 1:4.928 menunjukkan satu ahli gizi melayani 4.928 penduduk, dan rasio apoteker 1:9.856 menunjukkan satu orang apoteker melayani 9.856 penduduk.

Rasio tenaga Bidan per satuan penduduk adalah merupakan perbandingan ideal antara jumlah ketersediaan tenaga Bidan berbanding jumlah penduduk. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan, rasio idealnya adalah 1:1.000. Kabupaten Bangka Selatan dengan rasio bidan 1:954 pada tahun 2023 sudah memenuhi Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.

Rasio Perawat terhadap penduduk adalah merupakan perbandingan ideal antara jumlah ketersediaan tenaga Perawat berbanding jumlah penduduk. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan, rasio idealnya adalah 1:855. Rasio ketersediaan perawat di Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 2023 sudah memenuhi Standar Pelayanan Minimal Kesehatan dengan rasio 1:596.

Rasio tenaga medis Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 2023 menunjukkan bahwa rasio tenaga medis per satuan penduduk sudah memenuhi namun masih diperlukannya pemerataan tenaga medis. Pentingnya pemerataan tenaga medis sesuai dengan jumlah penduduk dilakukan agar tidak ada kesenjangan pelayanan kesehatan. Adapun jumlah tenaga medis per Kecamatan dapat dilihat dari tabel berikut :



Tabel 2.109

Jumlah Tenaga Medis Per Kecamatan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014-2023

KECAMATAN	TAHUN	TENAGA MEDIS (ORANG)			
		PERAWAT	BIDAN	APOTEKER	AHLI GIZI
TOBOALI	2014	171	54	9	10
	2015	175	55	10	11
	2016	56	53	10	10
	2017	40	28	8	17
	2018	164	63	9	9
	2019	178	84	9	15
	2020	150	75	10	16
	2021	163	74	9	15
	2022	172	91	10	18
2023	178	74	9	18	
AIRGEGAS	2014	29	14	0	2
	2015	27	20	0	2
	2016	23	14	0	2
	2017	32	24	0	3
	2018	39	30	2	2
	2019	38	39	2	5
	2020	40	40	2	2
	2021	39	38	2	2
	2022	47	39	2	5
2023	43	39	4	4	
PAYUNG	2014	22	10	0	2
	2015	25	12	0	2
	2016	20	13	0	2
	2017	28	15	0	1
	2018	25	20	0	2
	2019	17	11	1	1
	2020	47	25	3	2
	2021	49	30	4	2
	2022	51	30	4	5
2023	62	30	4	5	
SIMPANG RIMBA	2014	16	10	0	1
	2015	19	11	0	1
	2016	17	10	0	1
	2017	23	16	0	1
	2018	23	18	0	1
	2019	18	18	1	2
	2020	19	18	1	2
	2021	23	18	1	2
	2022	22	20	1	2
2023	15	19	1	2	
LEPAR	2014	6	7	0	1
	2015	5	14	0	1
	2016	5	8	0	0
	2017	11	14	0	0
	2018	15	14	0	2
	2019	8	9	0	0
	2020	8	10	0	1
	2021	8	12	0	1
	2022	12	13	0	2
2023	11	14	0	4	
KEP. PONGOK	2014	7	6	0	1
	2015	6	11	0	1
	2016	5	7	0	1



KECAMATAN	TAHUN	TENAGA MEDIS (ORANG)			
		PERAWAT	BIDAN	APOTEKER	AHLI GIZI
	2017	6	8	0	1
	2018	6	7	0	1
	2019	7	11	1	2
	2020	6	11	1	1
	2021	5	7	1	2
	2022	6	8	1	2
	2023	7	10	1	3
TUKAK SADAI	2014	19	8	0	2
	2015	22	11	0	1
	2016	19	10	0	1
	2017	24	14	0	0
	2018	25	14	1	2
	2019	23	15	1	2
	2020	23	17	1	2
	2021	25	18	1	2
	2022	23	18	1	2
	2023	21	15	1	2
PULAU BESAR	2014	8	5	0	0
	2015	7	8	0	1
	2016	7	6	0	1
	2017	9	17	0	1
	2018	8	6	0	1
	2019	6	14	1	2
	2020	6	15	1	2
	2021	9	13	0	2
	2022	9	13	0	2
	2023	10	16	1	3
KAB. BANGKA SELATAN	2014	283	114	9	19
	2015	286	144	10	20
	2016	152	94	10	18
	2017	173	136	10	17
	2018	305	172	12	23
	2019	295	201	16	30
	2020	299	211	19	33
	2021	321	210	18	33
	2022	342	232	19	41
	2023	347	217	21	42

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Bangka Selatan, 2024

Berdasarkan jumlahnya, pada tahun 2014 di Kabupaten Bangka Selatan tenaga medis yang tersebar di seluruh Kecamatan terdapat 283 jumlah perawat, 144 bidan, 9 Apoteker dan 19 Ahli Gizi. Kemudian pada tahun 2015 terdapat 286 jumlah perawat, 144 bidan, 10 Apoteker dan 20 Ahli Gizi. Untuk tahun 2016 terdapat 152 jumlah perawat, 94 bidan, 10 Apoteker dan 18 Ahli Gizi. Setelah itu di tahun 2017 terdapat 173 jumlah perawat, 136 bidan, 109 Apoteker dan 17 Ahli Gizi. pada tahun 2018 terdapat 305 jumlah perawat, 172 bidan, 12 Apoteker dan 23 Ahli Gizi. di tahun 2019 terdapat 295 jumlah perawat, 201 bidan, 16 Apoteker dan 30 Ahli Gizi. Kemudian di tahun 2020 terdapat 299 jumlah perawat, 211 bidan, 19 Apoteker dan 41 Ahli Gizi. Dan pada tahun 2021 terdapat 321 jumlah perawat, 210 bidan, 18 Apoteker dan 33 Ahli Gizi.

Sedangkan pada tahun 2022 ketersediaan tenaga medis baik perawat, bidan, apoteker maupun ahli gizi paling banyak terdapat di Kecamatan Toboali dikarenakan adanya Rumah Sakit Umum Daerah. Ketersediaan jumlah perawat paling sedikit terdapat di Kecamatan Kepulauan Pongok yaitu berjumlah 6 orang dan ketersediaan jumlah bidan paling sedikit terdapat di Kecamatan Kepulauan Pongok yaitu berjumlah 8 orang. Selanjutnya Kecamatan yang tidak tersedia apoteker adalah Kecamatan Lepar dan Kecamatan Pulau Besar, sementara untuk ketersediaan jumlah ahli gizi rata-rata paling sedikit 2 orang disetiap Kecamatan.

Untuk tahun 2023 ketersediaan tenaga medis baik perawat, bidan, apoteker maupun ahli gizi masih paling banyak terdapat di Kecamatan Toboali. Ketersediaan jumlah perawat paling sedikit terdapat di Kecamatan Kepulauan Pongok yaitu berjumlah 7 orang dan ketersediaan jumlah bidan paling sedikit terdapat di Kecamatan Kepulauan Pongok yaitu berjumlah 10 orang. Selanjutnya Kecamatan yang tidak tersedia apoteker adalah Kecamatan Lepar, sementara untuk ketersediaan jumlah ahli gizi paling sedikit di Kecamatan Tukak Sadai yang berjumlah 2 orang.

2.3.2.8. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)

Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah salah satunya ditentukan oleh tingkat pendidikan, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3. Berikut Rasio Penduduk Lulusan D-IV/S1, S2 dan S3 Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014-2023.

Tabel 2.110
Rasio Penduduk Lulusan D-IV/S1, S2 dan S3
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014-2023

Tahun	Uraian	Jumlah Lulusan D-IV/S1, S2 dan S3 (orang)	Jumlah Penduduk Usia 15+ (orang)	Rasio (persen)
2014	Laki-laki	1.112	61.330	1,81
	Perempuan	839	57.208	1,47
	Jumlah	1.951	118.538	1,65
2015	Laki-laki	1.157	57.815	2,00
	Perempuan	947	54.614	1,73
	Jumlah	2.104	112.429	1,87
2016	Laki-laki	1.419	85.408	1,66
	Perempuan	1.205	79.883	1,51
	Jumlah	2.624	165.291	1,59
2017	Laki-laki	1.533	88.637	1,73
	Perempuan	1.378	83.347	1,65
	Jumlah	2.911	171.984	1,69
2018	Laki-laki	1.639	90.883	1,80
	Perempuan	1.544	85.775	1,80



Tahun	Uraian	Jumlah Lulusan D-IV/S1, S2 dan S3 (orang)	Jumlah Penduduk Usia 15+ (orang)	Rasio (persen)
	Jumlah	3.183	176.658	1,80
2019	Laki-laki	1.783	93.249	1,91
	Perempuan	1.749	87.984	1,99
	Jumlah	3.532	181.233	1,95
2020	Laki-laki	1.951	100.048	1,95
	Perempuan	1.966	94.294	2,08
	Jumlah	3.917	194.342	2,02
2021	Laki-laki	2.122	72.586	2,92
	Perempuan	2.213	68.825	3,21
	Jumlah	4.335	141.411	3,06
2022	Laki-laki	2.311	79.279	2,92
	Perempuan	2.441	75.096	3,25
	Jumlah	4.752	154.375	3,07
2023	Laki-laki	2.503	79.801	3,13
	Perempuan	2.675	75.418	3,54
	Jumlah	5.178	155.219	3,33

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan, 2024

Rasio lulusan D-4/S1/S2/S3 penduduk Kabupaten Bangka Selatan selama tahun 2014-2023 berkisar antara angka 1,59-3,07 per satuan penduduk, dan angkanya menunjukkan adanya kecenderungan terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan jenis kelaminnya, pada tahun 2014 rasio lulusan D-4/S1/S2/S3 laki-laki yaitu 1,81 dan perempuan sebesar 1,47, untuk tahun 2015 rasio lulusan D-4/S1/S2/S3 laki-laki yaitu 2,00 dan perempuan sebesar 1,73, di tahun 2016 rasio lulusan D-4/S1/S2/S3 laki-laki yaitu 1,66 dan perempuan sebesar 1,51, sedangkan 2017 rasio lulusan D-4/S1/S2/S3 laki-laki yaitu 1,73 dan perempuan sebesar 1,65, kemudian pada tahun 2018 rasio lulusan D-4/S1/S2/S3 laki-laki dan perempuan sama yaitu 1,80. Sementara dari tahun 2019 sampai 2023 rasio lulusan D-4/S1/S2/S3 perempuan lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki, seperti pada tahun 2023 dimana rasio lulusan perempuan lebih tinggi sebesar 3,54 sedangkan rasio lulusan laki-laki sebesar 3,13 hal ini menandakan adanya peningkatan dan pemerataan gender pada bidang pendidikan di Kabupaten Bangka Selatan.

2.3.2.9. Rasio Linmas Per 1000 Penduduk

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat secara luas. Rasio jumlah Linmas menggambarkan kapasitas partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat guna terciptanya kondisi lingkungan yang kondusif. Rasio Linmas Per 10.000 Penduduk di Bangka Selatan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.111
Rasio Linmas Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023

Kecamatan	Jumlah Anggota Linmas	Jumlah Penduduk	Rasio per 1000 Penduduk
Toboali	55	82.938	0,66
Airgegas	50	43.644	1,15
Tukak Sadai	25	13.707	1,82
Payung	45	21.704	2,07
Pulau Besar	25	10.025	2,49
Simpang Rimba	35	25.920	1,35
Lepar	20	8.144	2,46
Kepulauan Pongok	10	4.262	2,35
Kabupaten Bangka Selatan	265	210.344	1,26

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan, 2024

Pada tahun 2023 rasio linmas Kabupaten Bangka Selatan adalah 1,26 per 1.000 penduduk, yang artinya 1 orang anggota linmas menangani 1.2600 penduduk. Jumlah anggota linmas terbanyak di Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 2023 terdapat di Kecamatan Toboali dengan jumlah 55 (lima puluh lima) orang dan paling sedikit terdapat di Kecamatan Kepulauan Pongok dengan jumlah 10 (sepuluh) orang. Jumlah linmas yang ada di Kabupaten Bangka Selatan berbanding lurus dengan jumlah Desa/Kelurahan yang ada di masing-masing Kecamatan. Secara rasio, yang paling tinggi adalah Kecamatan Lepar dengan rasio 2,46 dan yang paling rendah adalah Kecamatan Toboali dengan rasio 0,66.

Adapun rincian Jumlah Linmas Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023 untuk setiap Desa/Kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.112
Jumlah Anggota Linmas Menurut Desa/Kelurahan
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	JUMLAH	
			LAKI-LAKI (orang)	PEREMPUAN (orang)
1	TOBOALI	1. Kelurahan Teladan	5	-
		2. Kelurahan Tanjung Ketapang	5	-
		3. Kelurahan Toboali	5	-
		4. Desa Rias	5	-
		5. Desa Bikang	5	-
		6. Desa Rindik	5	-
		7. Desa Kepoh	5	-
		8. Desa Serdang	5	-
		9. Desa Keposang	5	-
		10. Desa Jeriji	5	-
		11. Desa Gadung	5	-



NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	JUMLAH	
			LAKI-LAKI (orang)	PEREMPUAN (orang)
JUMLAH			55	0
2	AIRGEGAS	1. Desa Pergam	5	-
		2. Desa Bencah	5	-
		3. Desa Airgegas	5	-
		4. Desa Nangka	5	-
		5. Desa Airbara	5	-
		6. Desa Delas	5	-
		7. Desa Nyelanding	5	-
		8. Desa Sidoharjo	5	-
		9. Ranggalas	5	-
		10. Desa Tepus	5	-
JUMLAH			50	0
3	TUKAK SADAI	1. Desa Pasir Putih	5	-
		2. Desa Sadai	5	-
		3. Desa Tukak	4	1
		4. Desa Tiram	5	-
		5. Desa Bukit Terap	5	-
JUMLAH			24	1
4	PAYUNG	1. Desa Sengir	5	-
		2. Desa Irat	5	-
		3. Desa Bedengung	5	-
		4. Desa Ranggalas	5	-
		5. Desa Nadung	5	-
		6. Desa Pangkal Buluh	5	-
		7. Desa Malik	5	-
		8. Desa Paku	5	-
		9. Desa Payung	5	-
JUMLAH			45	0
5	PULAU BESAR	1. Desa Batu Betumpang	5	-
		2. Desa Fajar Indah	5	-
		3. Desa Panca Tunggal	5	-
		4. Desa Suka Jaya	5	-
		5. Sumber Jaya Permai	5	-
JUMLAH			25	0
6	SIMPANGRIMBA	1. Desa Simpang Rimba	5	-
		2. Desa Gudang	5	-
		3. Desa Jelutung II	5	-
		4. Desa Bangka Kota	5	-
		5. Desa Permis	5	-
		6. Desa Rajik	5	-
		7. Desa Sebagian	5	-
JUMLAH			35	0
7	LEPAR	1. Desa Tanjung Labu	5	-
		2. Desa Tanjung Sangkar	5	-
		3. Desa Penutuk	5	-



NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	JUMLAH	
			LAKI-LAKI (orang)	PEREMPUAN (orang)
		4. Desa Kumbang	5	-
JUMLAH			20	-
8	KEP. PONGOK	1. Desa Pongok	5	-
		2. Desa Celagen	5	-
JUMLAH (ORANG)			10	0
KABUPATEN BANGKA SELATAN (ORANG)			264	1
			265	

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan, 2023

2.3.2.10. Organisasi Kepemudaan

Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan, yang berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pelayanan kepemudaan diarahkan untuk pertama menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan kedua meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pada tahun 2023 di Kabupaten Bangka Selatan terdapat 8 (delapan) organisasi pemuda aktif yang beranggota total anggota pemuda aktif sebanyak 11.727 orang. Organisasi kepemudaan tersebut antara lain Purna Paskibraka Indonesia yang beranggotakan 293 orang, Purna Prakarya Muda beranggota 25 orang, Pena Ar-Rahman beranggotakan 40 orang, Duta Basel *Academy*/Bujang Dayang Bangka Selatan beranggotakan 153 orang, Pramuka Bangka Selatan beranggotakan 10.345 orang dan KNPI Bangka Selatan beranggotakan 92 orang, Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) di Kabupaten Bangka Selatan beranggotakan 679 orang, Karang Taruna Kabupaten Bangka Selatan. Berikut adalah organisasi pemuda aktif di Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023 :

Tabel 2.113
Organisasi Pemuda Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023

No	Nama Organisasi	Jumlah Anggota Aktif (orang)
1	Purna Paskibraka Indonesia	293
2	Purna Prakarya Muda	25
3	Pena Ar-Rahman	40
4	Duta Basel <i>Academy</i> (Bujang Dayang Bangka Selatan)	153
5	Pramuka Bangka Selatan	10.345
6	KNPI Bangka Selatan	92
7	Osis	679

No	Nama Organisasi	Jumlah Anggota Aktif (orang)
8	Karang Taruna	100
Total		11.727

Sumber : Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Selatan, 2024

Adapun untuk atlet olahraga yang berprestasi tingkat daerah/tingkat Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023 terdiri dari atlet cabang olahraga bola voli sebanyak 12 Orang, atlet tenis meja sebanyak 3 Orang, atlet sepak takraw sebanyak 26 orang, atlet pencak silat sebanyak 23 orang, Tenis Lapangan sebanyak 6 orang, Tinju sebanyak 6 orang, Atletik 6 orang, Bulu Tangkis 11 orang, Karate-Do sebanyak 6 orang, Panahan sebanyak 15 orang, Biliar sebanyak 3 orang, Catur 15 orang, Panjat Tebing sebanyak 4 orang, Taekwondo sebanyak 14 orang, dan Wu Shu sebanyak 1 orang. Jumlah keseluruhan untuk atlet berprestasi tingkat daerah/tingkat Kabupaten Bangka Selatan sebanyak 135 orang atlet olahraga. Atlet berprestasi Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.114
Atlet Berprestasi Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023

No	Cabang Olahraga	Atlet Berprestasi
1	Bola Volly	12
2	Tenis Meja	3
3	Sepak Takraw	26
4	Pencak Silat	23
5	Tenis Lapangan	6
6	Tinju	6
7	Atletik	6
8	Bulu Tangkis	11
9	Karate-Do	6
10	Panahan	15
11	Biliar	3
12	Catur	15
13	Panjat Tebing	4
14	Taekwondo	14
15	Wu Shu	1
Total		135

Sumber : Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Selatan, 2024

2.3.3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur

2.3.3.1. Ketersediaan Gedung Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah tersedianya sekolah per 10.000 penduduk usia sekolah, rasio ini mengindikasikan kemampuan menampung semua penduduk usia sekolah.

Sesuai kewenangan Kabupaten dalam menuntaskan program wajib belajar 9 (sembilan) tahun, berikut disajikan rasio ketersediaan gedung sekolah dibandingkan penduduk usia sekolah SD sederajat dan SMP sederajat :

Tabel 2.115
Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017-2023

No	Jenjang Pendidikan	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A SD/MI/Sederajat								
1	Jumlah Sekolah	90	91	93	101	101	101	101
2	Jumlah Penduduk Usia 7-12 tahun (jiwa)	21.101	20.462	21.022	21.085	24.629	24.647	24.931
3	Rasio (per 10.000 penduduk)	42,65	44,47	44,24	47,90	41,00	40,97	40,51
B SMP/MTS/Sederajat								
1	Jumlah Sekolah	30	32	32	43	43	44	46
2	Jumlah Penduduk Usia 13-15 tahun (jiwa)	10.684	10.156	8.335	8.661	11.432	11.766	12.228
3	Rasio (per 10.000 penduduk)	28,08	31,51	38,39	49,65	37,61	37,39	37,61
C Pendidikan Dasar (SD/MI sederajat-SMP/MTs sederajat)								
1	Jumlah Sekolah	120	123	125	144	144	145	147
2	Jumlah Penduduk Usia 7-15 tahun (jiwa)	31.785	30.618	29.357	29.746	36.061	36.413	37.159
3	Rasio (per 10.000 penduduk)	37,75	40,17	42,58	48,41	39,93	39,82	39,55

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Selatan, 2024

Rasio ketersediaan SD sederajat dan SMP sederajat per 10.000 penduduk usia sekolah di Bangka Selatan dalam periode 7 (tujuh) tahun terakhir dari tahun 2017-2023 berfluktuatif namun menunjukkan peningkatan yang cukup baik pada tahun 2023. Rasio ketersediaan sekolah untuk pendidikan dasar wajib 9 (sembilan) tahun pada tahun 2017 tersedia 125 sekolah per 10.000 penduduk meningkat menjadi 144 sekolah per 10.000 penduduk pada tahun 2020 dan bertambah 145 sekolah pada tahun 2022. Dan 147 sekolah pada tahun 2023.

Adapun ketersediaan sekolah SD sederajat pada tahun 2017 dari 93 sekolah per 10.000 penduduk menjadi 101 sekolah per 10.000 penduduk pada tahun 2023 dan ketersediaan SMP sederajat dari 32 sekolah per 10.000 penduduk menjadi 46 sekolah per 10.000 penduduk, ini menunjukkan peningkatan rasio ketersediaan sekolah yang signifikan, namun adanya peningkatan rasio dengan penambahan sekolah mencerminkan adanya perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan dalam menyelenggarakan layanan pendidikan dasar melalui penyediaan dan peningkatan sarana belajar bagi anak usia sekolah.

Untuk mengetahui ketersediaan jumlah SD/MI sederajat per Kecamatan di Kabupaten

Bangka Selatan Tahun 2022-2023 disajikan berikut :

Tabel 2.116
Jumlah SD/MI Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022-2023

NO	KECAMATAN	JUMLAH SEKOLAH									
		2022					2023				
		SD		MI		JLH	SD		MI		JLH
		NEGERI	SWASTA	NEGERI	SWASTA		NEGERI	SWASTA	NEGERI	SWASTA	
1	TOBOALI	32	3	-	1	36	32	3	-	1	36
2	AIRGEGAS	16	-	-	-	16	16	-	-	1	17
3	TUKAK SADAI	5	-	-	1	6	5	-	-	1	6
4	PAYUNG	13	-	1	-	14	13	-	1	-	14
5	PULAU BESAR	7	-	-	1	8	7	-	-	1	8
6	SIMPANG RIMBA	12	-	-	-	12	12	-	-	-	12
7	LEPAR	5	-	-	1	6	5	-	-	-	5
8	KEPULAUAN PONGOK	3	-	-	-	3	3	-	-	-	3
KAB. BANGKA SELATAN		93	3	1	4	101	93	3	1	4	101

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Selatan, 2024

Berdasarkan tabel diatas, jumlah ketersediaan SD/MI sederajat terbanyak sampai dengan tahun 2022 berada di Kecamatan Toboali yang terdiri dari 32 SD Negeri, 3 SD swasta dan 1 sekolah MI swasta hal ini dikarenakan jumlah penduduk terbanyak terdapat pada Kecamatan Toboali sebagai IbuKota Kabupaten Bangka Selatan. Selanjutnya Jumlah SD sederajat paling sedikit berada di Kecamatan Kepulauan Pongok yaitu sebanyak 3 SD negeri, hal ini dikarenakan Kecamatan Kepulauan Pongok hanya terdiri dari 2 Desa dengan jumlah penduduk paling sedikit dibandingkan dengan Kecamatan lainnya.

Selanjutnya jumlah ketersediaan SMP/MTs sederajat di Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022-2023 dalam rangka menuntaskan program wajib belajar 9 (sembilan) tahun ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.117
Jumlah SMP/MTS Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022-2023

NO	KECAMATAN	2022					2023				
		SMP		MTs		JLH	SMP		MTs		JLH
		NEGERI	SWASTA	NEGERI	SWASTA		NEGERI	SWASTA	NEGERI	SWASTA	
1	TOBOALI	8	5	-	2	15	8	7	-	2	17
2	AIRGEGAS	6	1	-	1	8	6	1	-	1	8
3	TUKAK SADAI	2	-	-	1	3	2	-	-	1	3
4	PAYUNG	5	-	1	1	6	5	-	1	1	7
5	PULAU BESAR	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2
6	SIMPANG RIMBA	3	1	-	-	4	3	1	-	-	4
7	LEPAR	3	-	1	-	4	3	-	1	-	4
8	KEPULAUAN PONGOK	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1



NO	KECAMATAN	2022					2023				
		SMP		MTs		JLH	SMP		MTs		JLH
		NEGERI	SWASTA	NEGERI	SWASTA		NEGERI	SWASTA	NEGERI	SWASTA	
KAB. BANGKA SELATAN		30	7	2	5	43	30	9	2	5	46

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Selatan, 2024

Adapun berdasarkan tabel diatas, jumlah ketersediaan SMP/MTs sederajat terbanyak sampai dengan tahun 2023 berada di Kecamatan Toboali yang terdiri dari 8 SMP Negeri, 7 SMP swasta yang pada tahun 2023 bertambah 2 sekolah swasta dan 2 sekolah MTs swasta. Selanjutnya Jumlah SMP sederajat paling sedikit berada di Kecamatan Kepulauan Pongok yaitu sebanyak 1 SMP negeri dan tidak ada SMP swasta dan MTs baik negeri maupun swasta. Sedangkan pada Kecamatan lainnya yaitu Tukak Sadai, Payung, Pulau Besar dan Lepar tidak terdapat SMP swasta, untuk sekolah MTS negeri terdapat di 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Payung dan Lepar dengan masing-masing berjumlah 1 sekolah, sedangkan untuk MTS swasta terdapat di Kecamatan Airgegas, Tukak Sadai dan Payung dengan masing-masing berjumlah 1 sekolah.

2.3.3.2. Peningkatan Perpustakaan

Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka, yang bertujuan sebagai penunjang kelangsungan pendidikan dan meningkatkan mutu kehidupan masyarakat. Adapun ketersediaan perpustakaan di Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.118
Jumlah Perpustakaan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Perpustakaan				Total
		SD	SMP	Kelurahan/Desa	Daerah	
1	Toboali	36	13	4	1	55
2	Airgegas	15	8	2	-	25
3	Payung	13	4	4	-	21
4	Simpang Rimba	11	5	1	-	17
5	Pulau Besar	7	3	2	-	12
6	Tukak Sadai	6	2	3	-	10
7	Lepar	5	3	-	-	8
8	Kep. Pongok	3	1	1	-	5
	Kab. Bangka Selatan	96	39	17	1	153

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangka Selatan, 2024

Secara keseluruhan Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 2023 memiliki 153 Perpustakaan yang menyebar di 8 (delapan) Kecamatan yang terdiri dari Perpustakaan Sekolah, Kelurahan/Desa dan Perpustakaan Daerah. Perpustakaan terbanyak berada di Kecamatan Toboali yaitu sebanyak 55 Perpustakaan yang terdiri dari 36 Perpustakaan SD, 13 Perpustakaan SMP, 4 Perpustakaan Kelurahan/Desa dan 1 Perpustakaan Daerah. Sedangkan Kecamatan dengan Perpustakaan paling sedikit berada di Kecamatan Kepulauan Pongok dengan jumlah 5 Perpustakaan yang terdiri dari 3 Perpustakaan SD, 1 Perpustakaan SMP dan 1 Perpustakaan Desa. Adapun jumlah kunjungan perpustakaan di Kabupaten Bangka Selatan selama tahun 2020-2023 sebagai berikut :

Tabel 2.119
Jumlah Kunjungan Perpustakaan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2023

No	Tahun	Jenis Kunjungan Perpustakaan (orang)			Total
		Perpustakaan Umum	Perpustakaan Keliling	Perpustakaan Sekolah	
1	2020	4.376	1.768	4.033	10.177
2	2021	1.015	1.510	1.147	3.672
3	2022	1.911	2.386	17.956	22.253
4	2023	1.154	2.648	18.841	22.643

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangka Selatan, 2024

Jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun 2020 sebanyak 10.177 orang pengunjung, Adapun dengan rincian jumlah pengunjung perpustakaan umum pada tahun 2020 sebanyak 4.376 orang, pengunjung pada perpustakaan keliling sebanyak 1.768 orang dan 4.033 orang pengunjung pada perpustakaan sekolah. Kemudian pada tahun 2021 sebanyak 3.672 orang pengunjung, Adapun dengan rincian jumlah pengunjung perpustakaan umum pada tahun 2021 sebanyak 1.015 orang, pengunjung pada perpustakaan keliling sebanyak 1.510 orang dan 1.147 orang pengunjung pada perpustakaan sekolah. Selanjutnya pada tahun 2022 sebanyak 22.253 orang pengunjung, Adapun dengan rincian jumlah pengunjung perpustakaan umum pada tahun 2022 sebanyak 1.911 orang, pengunjung pada perpustakaan keliling sebanyak 2.386 orang dan 17.956 orang pengunjung pada perpustakaan sekolah. Dan untuk tahun 2023 sebanyak 157.244 orang. Adapun dengan rincian jumlah pengunjung Perpustakaan umum pada tahun 2023 sebanyak 1.154 orang, pengunjung pada Perpustakaan keliling sebanyak 2.648 orang dan 18.841 orang pengunjung pada Perpustakaan sekolah.

2.3.3.3. Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu)

Puskesmas dan pustu merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama saat ini dimana Puskesmas dan pustu menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediaannya, semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan.

Tabel 2.120
Jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu)
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2013-2023

No.	Tahun	Kecamatan									
		Toboali	Airgegas	Tukak Sadai	Payung	Pulau Besar	Simpang Rimba	Lepar	Kep. Pongok	Kab. Basel	
1	2013	Jumlah Puskesmas	2	1	1	1	1	1	1	1	9
		Jumlah Pustu	3	8	1	5	4	6	2	0	29
2	2014	Jumlah Puskesmas	2	1	1	1	1	1	1	1	9
		Jumlah Pustu	3	8	1	5	4	6	2	0	29
3	2015	Jumlah Puskesmas	2	1	1	1	1	1	1	1	9
		Jumlah Pustu	3	8	1	5	4	6	2	0	27
4	2016	Jumlah Puskesmas	2	1	1	1	1	1	1	1	9
		Jumlah Pustu	3	8	0	5	4	6	2	0	28
5	2017	Jumlah Puskesmas	2	1	1	1	1	1	1	1	9
		Jumlah Pustu	3	8	1	5	4	6	2	0	29
6	2018	Jumlah Puskesmas	2	2	1	1	1	1	1	1	10
		Jumlah Pustu	3	8	1	5	4	6	2	-	29
7	2019	Jumlah Puskesmas	2	2	1	1	1	1	1	1	10
		Jumlah Pustu	3	8	1	5	4	6	2	-	29
8	2020	Jumlah Puskesmas	2	2	1	1	1	1	1	1	10
		Jumlah Pustu	5	7	3	5	2	6	2	-	30
9	2021	Jumlah Puskesmas	2	2	1	1	1	1	1	1	10
		Jumlah Pustu	5	7	3	5	2	6	2	-	30
10	2022	Jumlah Puskesmas	2	2	1	1	1	1	1	1	10
		Jumlah Pustu	5	7	3	5	2	6	2	-	30
11	2023	Jumlah Puskesmas	2	2	1	1	1	1	1	1	10
		Jumlah Pustu	5	7	0	5	4	5	2	-	28

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangka Selatan, 2024

Berdasarkan tabel diatas, jumlah puskesmas di Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 2013 dan 2014 terdapat 9 Puskesmas dan 29 Pustu, sedangkan di tahun 2015 terdapat 9 Puskesmas dan 27 pustu hal ini dikarenakan terdapat 2 (dua) pustu yang butuh rehab berat karena tidak layak pakai, kemudian di tahun 2016 terdapat 9 puskesmas dan 28 pustu, penambahan pustu dikarenakan terdapat 1 (satu) pustu yang telah selesai di rehab dan di aktifkan kembali, di tahun 2017 terdapat 9 puskesmas dan 29 pustu. Selanjutnya pada tahun 2018 dan 2019 terdapat penambahan 1 puskesmas menjadi 10 puskesmas dan 29 pustu untuk

tahun 2020-2022 kembali bertambah menjadi 30 pusku. Pada tahun 2022 jumlah puskesmas terbanyak terdapat pada Kecamatan Toboali dan Kecamatan Airgegas sebanyak 2 puskesmas, sementara Kecamatan lainnya hanya tersedia 1 puskesmas. Selanjutnya pusku terbanyak terdapat pada Kecamatan Airgegas yaitu berjumlah 9 pusku, sementara Kecamatan Kepulauan Pongok tidak mempunyai pusku. Sedangkan untuk tahun 2023 terjadi penurunan jumlah Pusku menjadi 28 Pusku dikarenakan rusaknya 4 Pusku yang masing- masing 3 pusku yang ada di Kecamatan Tukak Sadai dan 1 pusku yang ada di Simpang Rimba, namun ada 2 pusku yang aktif kembali di Kecamatan Pulau Besar. Jumlah Puskesmas terbanyak terdapat pada Kecamatan Toboali dan Kecamatan Airgegas sebanyak 2 Puskesmas, sementara Kecamatan lainnya hanya tersedia 1 Puskesmas. Selanjutnya Pusku terbanyak terdapat pada Kecamatan Airgegas yaitu berjumlah 7 Pusku, sementara Kecamatan Kepulauan Pongok tidak mempunyai Pusku.

Berikut disajikan rasio puskesmas dan pusku Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2013-2023:

Tabel 2.121
Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pusku)
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2013-2023

No.	Tahun	Uraian				
		Jumlah Puskesmas	Jumlah Pusku	Jumlah Penduduk	Rasio Puskesmas	Rasio Pusku
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)
1	2013	9	29	188.908	1:20.990	1:6.514
2	2014	9	29	194.686	1:21.632	1:6.713
3	2015	9	27	193.584	1:21.509	1:7.170
4	2016	9	28	165.291	1:18.366	1:5.903
5	2017	9	29	171.984	1:19.109	1:5.930
6	2018	10	29	168.341	1:16.834	1:5.805
7	2019	10	29	176.658	1:17.666	1:6.092
8	2020	10	30	181.961	1:18.196	1:6.065
9	2021	10	30	199.355	1:19.935	1:6.645
10	2022	10	30	201.948	1:20.195	1:6.732
11	2023	10	28	206.972	1:20.697	1:7.392

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangka Selatan, 2024

Rasio Puskesmas dan Pusku di Kabupaten Bangka Selatan per satuan penduduk dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2023 bersifat dinamis dikarenakan penghitungan indikator jumlah penduduk Kabupaten Bangka Selatan sebagai indikator utama penghitungan rasio mengalami beberapa kali perubahan, pengambilan sumber data untuk mengetahui jumlah penduduk dari tahun 2013 s.d 2015 diambil dari data BPS Kabupaten Bangka Selatan, sedangkan dari tahun 2016 dan 2017 diambil dari data BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan terakhir dari tahun 2018 s.d 2022 bersumber dari data Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan. Namun di tahun 2023 ini kembali menggunakan data dari BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada tahun 2013, rasio puskesmas adalah 1:20.990 yang artinya 1 puskesmas melayani 20.990 penduduk dan pada tahun 2023 dengan rasio 1:20.697 yaitu 1 puskesmas melayani 20.697 penduduk. Demikian halnya dengan rasio pustu yang juga mengalami peningkatan rasio. Rasio pustu pada tahun 2013 adalah 1:6.514 yang artinya 1 pustu melayani 6.514 penduduk dan meningkat menjadi 1:7.392 yaitu 1 pustu melayani 7.392 penduduk pada tahun 2023. Sementara secara standarnya, rasio ideal untuk puskesmas per satuan penduduk adalah 1:16.000 dan rasio ideal untuk pustu per satuan penduduk adalah 1:1.500. Dengan demikian, rasio puskesmas di Kabupaten Bangka Selatan masuk kategori ideal, sedangkan untuk rasio pustu perlu dilakukan penambahan jumlah pustu agar rasionya menjadi ideal.

2.3.3.4. Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk

Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Rumah sakit memiliki peranan penting dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Berikut gambaran rasio Rumah Sakit per satuan penduduk di Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2013-2023 :

Tabel 2.122
Rasio Rumah Sakit Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2013-2023

No.	Tahun	Uraian		
		Jumlah Rumah Sakit	Jumlah Penduduk	Rasio
1	2013	1	188.908	1 : 188.908
2	2014	1	194.686	1 : 194.686
3	2015	1	193.584	1 : 193.584
4	2016	1	165.291	1 : 165.291
5	2017	1	171.984	1:171.984
6	2018	1	168.341	1:168.341
7	2019	2	176.658	1:88.329
8	2020	2	181.961	1:90.980
9	2021	2	199.355	1:99.677
10	2022	2	201.948	1:100.974
11	2023	2	206.972	1:103.486

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangka Selatan, 2024

Tabel diatas menggambarkan rasio rumah sakit per satuan penduduk di Kabupaten Bangka Selatan yang menunjukkan tingkat cakupan pelayanan kesehatan terhadap jumlah penduduk di wilayah pelayanannya. Sejak tahun 2013-2018 Kabupaten Bangka Selatan hanya memiliki 1 (satu) Rumah Sakit yaitu Rumah Sakit Umum Daerah yang berada di Desa Gadung

Kecamatan Toboali. Selanjutnya pada tahun 2019 terdapat penambahan 1 (satu) Rumah Sakit yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus yaitu Rumah Sakit Kriopanting yang berada di Desa Payung Kecamatan Payung.

Berdasarkan tabel di atas, rasio rumah sakit per satuan penduduk Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 2013 dengan rasio 1:188.908. pada tahun 2014 dengan rasio 1:194.686. pada tahun 2015 dengan rasio 1:193.584. pada tahun 2016 dengan rasio 1:165.291. pada tahun 2017 dengan rasio 1:171.984. pada tahun 2018 dengan rasio 1:168.341. Selanjutnya dengan adanya penambahan rumah sakit, rasio rumah sakit per satuan penduduk Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 2019 adalah 1:88.329 yang artinya 1 rumah sakit melayani 88.329 penduduk dan pada tahun 2020 yaitu dengan rasio 1:90.980 yang menunjukkan bahwa 1 rumah sakit melayani 90.980 penduduk. Selanjutnya pada tahun 2021 rasio rumah sakit menjadi 1:99.677 yang menunjukkan bahwa 1 rumah sakit melayani 99.677 penduduk, kemudian di tahun 2022 rasio rumah sakit menjadi 1:100.974 yang menunjukkan bahwa 1 rumah sakit melayani 100.974 penduduk. Sedangkan untuk tahun 2023 rasio rumah sakit menjadi 1:103.486 yang menunjukkan bahwa 1 rumah sakit melayani 103.486 penduduk

2.3.3.5. Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap

Pembangunan infrastruktur strategis di Kabupaten Bangka Selatan mutlak perlu dilakukan dengan perencanaan dan desain pendanaan dengan tahapan yang harus disusun matang. Beberapa konektivitas vital yang menghubungkan beberapa kawasan strategis Kabupaten Bangka Selatan telah direalisasikan melalui APBD Kabupaten Bangka Selatan semenjak tahun 2015 sampai dengan tahun 2023.

Tabel 2.123
Pembangunan Jalan Baru Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2015-2023

NO	NAMA RUAS	PANJANG PEMBANGUNAN JALAN BARU (KM)									KET
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Jalan Pemkab-Tanjung Kerasak (lebar 30m)	6	6	24	-	-	-	-	-	-	Standar jalan Kabupaten bukaan lebar jalan sepanjang 10-sampai 15 meter, sehingga jalan dengan lebar 30 meter maka realisasi akan dikonversi terhadap standar lebar jalan Kabupaten
		(12)	(12)	(48)							
2	Jalan Nyelanding-Paku sepanjang 7,6 Km	-	-	7,6	-	-	-	-	-	-	
3	Jalan Target-Bikang (lebar 15m)	-	-	-	10,6	-	1,172	-	-	-	
4	Jalan Trans Basel-Batu Betumpang (lebar 30m)	-	-	-	10,5	14,2	15	-	-	-	
						28,4	30				

NO	NAMA RUAS	PANJANG PEMBANGUNAN JALAN BARU (KM)									KET
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
5	Jalan Serai-Sidoharjo (lebar 10m)	-	-	-	-	-	4,65	-	-	-	Tahun 2023 Tidak terdapat Target Konektifitas Jalan
6	Jalan Nyelanding-Sidoharjo (lebar 7m)	-	-	-	-	-	-	9,95	-	-	
7	Jalan Rias-Gadung	-	-	-	-	-	-	-	6	-	
Panjang jalan baru per Tahun		6	6	55,6	21,1	28,4	35,82	9,95	6	-	
Akumulasi dengan tahun sebelumnya		6	12	67,6	88,7	117,1	152,92	162,87	168,87	168,87	
Target Panjang Jalan Baru *terbuka Km (total 145 km)		-	-	80	100	120	145	145	-	-	
Target Panjang Jalan Baru *terbukapersen		-	-	55	69	83	100	100	-	-	
persen Capaian		-	-	46,62	61,7	80,76	105,46	112,32	-	-	

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan, 2024

Pembangunan “Jalan Baru” dari Tahun 2015-2023 Kabupaten Bangka Selatan terealisasi sepanjang 168,87 Km dengan rincian pertambahannya sepanjang 55,6 km pada tahun 2017; 21,1 km pada tahun 2018; 24,4 km pada tahun 2019 dan 35,82 km pada tahun 2020. Selanjutnya pada tahun 2021 terealisasi sepanjang 9,95 km. Kemudian pada tahun 2022 terealisasi sepanjang 6 km. Namun untuk tahun 2023 tidak ada penambahan jalan baru yang dilakukan.

Peran dan fungsi jaringan jalan adalah sebagai sarana penghubung keluar dan masuk dari dan ke Kabupaten Bangka Selatan, serta Kecamatan hingga Desa. Jaringan jalan penting untuk meningkatkan kegiatan perekonomian di daerah dan memperlancar distribusi Perdagangan barang dan jasa angkutan darat, serta orang/penumpang. Mengingat pentingnya jalan ini, perlu diketahui proporsi panjang jalan dalam kondisi baik. Informasi mengenai proporsi panjang jalan dalam kondisi baik dapat digunakan untuk mengidentifikasi kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan.

Kondisi jaringan jalan dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) yaitu :

- 1) Jalan Kondisi Baik (B) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi baik menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan \leq 6persen), sehingga arus lalu-lintas dapat berjalan lancar sesuai dengan kecepatan *disign* dan tidak ada hambatan yang disebabkan oleh kondisi jalan;
- 2) Jalan Kondisi Sedang (S) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi sedang menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan 6-10 persen). Kerusakan yang ada belum menimbulkan gangguan terhadap kelancaran arus pergerakan lalu-lintas;

- 3) Kondisi Rusak (R) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi rusak menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan 10- 20 persen). Kerusakan yang ada sudah sangat menghambat kelancaran arus pergerakan lalu-lintas, sehingga kendaraan harus berjalan secara perlahan-lahan, mengurangi kecepatannya, kadang kala harus berhenti akibat adanya kerusakan atau hambatan pada permukaan perkerasan; dan
- 4) Kondisi Rusak Berat (RB) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi rusak berat menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan > 20 persen). Kerusakan yang ada sudah sangat parah dan nyaris tidak dapat lagi dilewati oleh kendaraan roda 4, atau hanya dapat dilewati dengan kecepatan sangat rendah.

Selanjutnya Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016-2023 menetapkan indikator persentase jalan Kabupaten dalam kondisi mantap sebagai salah satu capaian urusan pekerjaan umum. Yang dimaksud dengan indikator persentase panjang jalan Kabupaten dalam kondisi mantap adalah mencakup panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik dan sedang dibandingkan dengan panjang jalan Kabupaten secara keseluruhan. Dengan penetapan indikator ini diharapkan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dapat mengupayakan peningkatan kondisi jalan agar dapat digunakan dengan baik oleh masyarakat Kabupaten Bangka Selatan pada khususnya dan konektivitas antar wilayah. Hal ini dengan harapan jalan Kabupaten yang dalam kondisi rusak dan sedang dapat diperbaiki serta jalan Kabupaten dengan kondisi baik dapat dilakukan pemeliharaan untuk meningkatkan dan menjaga kondisi jalan di Kabupaten Bangka Selatan.

Berikut capaian panjang jalan kondisi mantap Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016-2023 :

Tabel 2.124
Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Mantap
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016-2023

No	Tahun	Uraian				
		Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik (Km)	Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi sedang (Km)	Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi Mantap (Km)	Panjang jalan Kabupaten sesuaiSK (Km)	Persentase Panjang jalan kondisi Mantap (persen)
1	2016	324,86	104,04	428,90	734,781	58,37
2	2017	311,568	92,301	403,87	633,97	63,70
3	2018	332,24	77,56	409,80	633,97	64,64
4	2019	353,18	53,14	406,32	633,97	64,09
5	2020	364,5	51,38	415,88	633,97	65,60

No	Tahun	Uraian				
		Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik (Km)	Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi sedang (Km)	Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi Mantap (Km)	Panjang jalan Kabupaten sesuaiSK (Km)	Persentase Panjang jalan kondisi Mantap (persen)
6	2021	401,058	84,537	485,60	633,97	76,60
7	2022	385,929	36,718	422,647	633,97	66,67
8	2023	417,96	27,70	445,66	633,97	70,03

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Selatan, 2024

Selanjutnya jaringan jalan di Kabupaten Bangka Selatan dirinci menurut status dan kondisi jalan per Kecamatan pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.125
Kondisi Jalan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Kondisi								Total Panjang Jalan (km)
		Baik*		Sedang*		Rusak * Ringan		Rusak * Berat		
		Panjang (km)	persen	Panjang (km)	persen	Panjang (km)	persen	Panjang (km)	persen	
1	Toboali	169,01	67,77	4,47	1,79	0,51	0,21	75,4	30,23	249.390
2	Airgegas	84,64	60,97	7,36	5,3	2,7	1,94	44,13	31,79	138.819
3	Payung	17,78	58,96	0,9	2,98	-	-	11,48	38,06	30.164
4	Simpang Rimba	60,17	79,56	4,6	6,08	0,3	0,4	10,56	13,96	75.629
5	Pulau Besar	26,15	52,86	9,17	18,54	6,31	12,75	7,84	15,85	49.462
6	Tukak Sadai	20,65	47,82	0,6	1,39	-	-	21,93	50,79	43.181
7	Lepar	34,46	95,39	0,1	0,28	-	-	1,56	4,33	36.125
8	Kep, Pongok	5,1	45,54	0,5	4,46	-	-	5,6	50	11.200
Kab. Bangka Selatan		417,96	63,61	27,7	5,10	9,82	1,91	178,5	29,38	633.970

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Selatan, 2024

Berdasarkan data diatas, pada tahun 2023 panjang jalan Kabupaten Bangka Selatan dalam Kondisi baik sepanjang 417,96 km dengan persentase 63,61 persen. Adapun jalan rusak ringan sepanjang 9,82 km atau 1,91 persen dan rusak berat sepanjang 178,5 km atau 29,38 persen dari total panjang jalan kewenangan Kabupaten sepanjang 633,970 km. Selanjutnya berdasarkan jenis permukaan jalan di Kabupaten Bangka Selatan yaitu 67,32 persen merupakan jalan dengan jenis permukaan aspal, sedangkan kerikil 11,93 persen, kemudian beton 17,44 persen dan 84,71 persen tanah.

Tabel 2.126

Jenis Permukaan Jalan Kabupaten Bangka Selatan Per Kecamatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Jalan Kabupaten SK Tahun Anggaran 2018					Jumlah
		Jenis Perkerasan					
		Aspal		Kerikil	Beton	Tanah	
		Aspal (Ac, Hrs, Atb)	Lapis Penetrasi / Latasir / Macadam	Telford / Kerikil / Urpil	Perkerasan Rigid / Beton	Tanah / Belum Tembus	
(Km)	(Km)	(Km)	(Km)	(Km)			
1	Toboali	172,25	0,13	1,03	32,06	43,91	249,39
2	Airgegas	88,27	-	0,8	29,26	20,5	138,82
3	Payung	18,68	-	-	3,78	7,7	30,16
4	Simpang Rimba	64,07	-	1	10,56	-	75,63
5	Pulau Besar	27,45	-	3,5	18,42	0,1	49,46
6	Tukak Sadai	21,35	-	-	10,74	11,1	43,18
7	Lepar	33,31	1,25	-	1,56	-	36,13
8	Kep. Pongok	-	-	5,6	4,2	1,4	11,2
TOTAL		425,38	1,38	11,93	110,58	84,71	633,97
Persentase		67,32		1,88	17,44	13,36	100,00

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Selatan, 2024

2.3.3.6. Persentase Jembatan

Selain jalan, jembatan merupakan infrastruktur utama dalam konektivitas antara beberapa daerah, Jembatan sebagai sarana transportasi mempunyai peranan yang sangat penting bagi kelancaran pergerakan lalu lintas. Dimana fungsi jembatan adalah menghubungkan rute atau lintasan transportasi yang terpisah baik oleh sungai, rawa, danau, selat, saluran, jalan raya, jalan kereta api dan perlintasan lainnya. Di Kabupaten Bangka Selatan terdapat 36 (tiga puluh enam) jembatan, pada tahun 2021 dari 36 jembatan yang ada terdapat 19 (sembilan belas) jembatan dalam kondisi sedang atau dalam persentase 57,78 persen dari seluruh total jembatan yang ada, 16 (enam belas) jembatan dalam kondisi rusak ringan atau dalam persentase 44,44 persen, sedangkan terdapat 1 (satu) jembatan dalam kondisi rusak berat atau 2,78 persen. sedangkan pada tahun 2022 dari 36 jembatan yang ada terdapat 1 (satu) jembatan dalam kondisi baik atau dalam persentase 2,78 persen dari seluruh total jembatan yang ada, kemudian ada 17 (tujuh belas) jembatan dalam kondisi sedang atau dalam persentase 47,22 persen, terdapat juga 17 (tujuh belas) jembatan dalam kondisi rusak ringan atau dalam persentase 47,22 persen, dan terdapat 1 (satu) jembatan dalam kondisi rusak berat atau 2,78 persen. Kemudian untuk tahun 2023 dari 36 jembatan yang ada terdapat 2 (dua) jembatan dalam kondisi baik atau dalam persentase 5,56 persen dari seluruh total jembatan yang ada, kemudian ada 17 (tujuh belas) jembatan dalam kondisi sedang atau dalam persentase 47,22

persen, terdapat juga 16 (enam belas) jembatan dalam kondisi rusak ringan atau dalam persentase 44,44 persen, dan terdapat 1 (satu) jembatan dalam kondisi rusak berat atau 2,78 persen. Berikut kondisi jembatan di Kabupaten Bangka Selatan tahun 2021-2023 :

Tabel 2.127
Kondisi Jembatan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021-2023

Kondisi	Tahun					
	2021		2022		2023	
	Jumlah Jembatan	persen	Jumlah Jembatan	persen	Jumlah Jembatan	persen
Baik	-	-	1	2,78	2	5,56
Sedang	19	52,78	17	47,22	18	47,22
Rusak Ringan	16	44,44	17	47,22	16	44,44
Rusak Berat	1	2,78	1	2,78	1	2,78
Runtuh	-	-	-	-	-	-
Jumlah	36	100	36	100	36	100

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Selatan, 2024

2.3.3.7. Persentase Drainase Permukiman Kondisi Baik

Cakupan Pelayanan Sistem Jaringan Drainase Permukiman didefinisikan dengan rumusan Luas Wilayah terlayani Drainase dibandingkan luas wilayah permukiman sesuai RTRW. Berdasarkan Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014-2034 alokasi wilayah permukiman sebesar 4.680,54 Ha, yang terdiri dari Permukiman perkotaan dengan luas kurang lebih 3.287,08 Hektar dan Permukiman Pedesaan yang tersebar di seluruh Kecamatan dengan luas kurang lebih 1.393,46 Hektar.

Tabel 2.128
Cakupan Drainase Permukiman Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016-2023

No	Tahun	Uraian			
		Panjang Drainase Permukiman (Km)	Permukiman yang dapat terlayani (Ha)	Luas Wilayah Permukiman Berdasarkan RTRW (Ha)	Cakupan Pelayanan Sistem Jaringan Drainase Permukiman (persen)
1	2016	110,966	2.245	4.680,54	47,96
2	2017	110,966	2.245	4.680,54	47,96
3	2018	113,012	2.286	4.680,54	49
4	2019	116,361	2.353	4.680,54	50,27
5	2020	116,361	2.353	4.680,54	50,27
6	2021	119,150	2.409	4.680,54	51,47
7	2022	123,549	2.498	4.680,54	53,37
8	2023	135,022	2.509	4.680,54	53,60

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Selatan, 2024

Adapun sampai dengan tahun 2023 panjang saluran drainase yang dimiliki oleh Kabupaten Bangka Selatan adalah sepanjang 135,022 km yang tersebar di delapan Kecamatan. Berikut disajikan panjang jaringan drainase Kabupaten Bangka Selatan per Kecamatan tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.129
Panjang Jaringan Drainase Permukiman per Kecamatan
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023

No.	KECAMATAN	PANJANG DRAINASE (m)
1	Toboali	47,510
2	Tukak Sadai	8,109
3	Lepar	6,707
4	Pongok	4,493
5	Airgegas	19,704
6	Pulau Besar	20,729
7	Simpang Rimba	15,308
8	Payung	12,462
KABUPATEN BANGKA SELATAN		135,022 (135,022 km)

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Selatan, 2024

2.3.3.8. Rasio Jaringan Irigasi

Rasio jaringan irigasi merupakan perbandingan antara panjang jaringan irigasi terbangun (Km) dengan total panjang jaringan rencana (Km) berdasarkan Detail Engeneering Design (DED) dari masing-masing Daerah Irigasi (DI) maupun Daerah Irigasi Rawa (DIR) kewenangan Kabupaten.

Tabel 2.130
Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016-2023

No	Tahun	Uraian		
		Panjang Jaringan Terbangun (Km)	Panjang Jaringan Rencana (Km)	Rasio Jaringan Irigasi
1	2016	9,46	93,470	0,101
2	2017	21,0022	150,192	0,140
3	2018	26,3022	154,562	0,170
4	2019	47,3492	172,901	0,274
5	2020	47,3492	172,901	0,274
6	2021	51,85	172,90	0,30
7	2022	52,945	173,387	0,305
8	2023	86,27	196,24	0,440

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Selatan, 2024

Berdasarkan tabel diatas, rasio jaringan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016-2023 terus meningkat. Pada tahun 2016 panjang jaringan yang terbangun sepanjang 93,470 km sehingga rasio panjang irigasi adalah 0,101. Selanjutnya sampai dengan tahun 2023 panjang jaringan terbangun sepanjang 86,27 km dengan rasio 0,440.

Penetapan Status Daerah Irigasi yang Pengelolaannya Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten terdapat 22 (dua puluh dua) Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan Kabupaten Bangka Selatan dengan luas potensial sebesar 7.185 Ha. Jaringan Irigasi yang tersedia pada setiap Daerah Irigasi dapat dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.131
Rasio Jaringan Irigasi per Daerah Irigasi (DI) tahun 2023

No	Nama D.I / D.I.R	Jenis Irigasi	Desa	Kecamatan	Luas Potensial (Ha)	Jaringan Tersedia (Km)	Kebutuhan Jaringan (Km)	Rasio Jaringan (Km/Km)
1	Bikang	Permukaan	Bikang	Toboali	731	14.042	14.042	1.00
2	Bencah	Permukaan	Bencah	Airgegas	425	2.17	25.551	0.08
3	Sidoarjo	Permukaan	Sidoarjo	Airgegas	525	0	8.728	0.00
4	Delas	Permukaan	Delas	Airgegas	144	0	0	0.00
5	Sebagin	Permukaan	Sebagin	Simpang Rimba	500	2.89	15.537	0.19
6	Gudang	Permukaan	Gudang	Simpang Rimba	475	4.08	4.370	0.93
7	Sukajaya	Permukaan	Sukajaya	Pulau Besar	177	1.9	5.970	0.32
8	Bedengung	Permukaan	Bedengung	Payung	750	0	0	0.00
9	Pangkal Buluh	Permukaan	Pangkal Buluh	Payung	100	0	0	0.00
10	Malik	Permukaan	Malik	Payung	70	0	1.02	0.00
11	Nadung	Permukaan	Nadung	Payung	250	0	0	0.00
12	Payung	Permukaan	Payung	Payung	270	0	3.73	0.00
13	Tanjung Labu	Permukaan	Tanjung Labu	Lepar	100	0	0	0.00
14	Tanjung Labu I	Permukaan	Tanjung Labu	Lepar	33	0	3.163	0.00
15	Tanjung Labu II	Permukaan	Tanjung Labu	Lepar	55	1.921	4.023	0.48
16	Penutuk	Permukaan	Penutuk	Lepar	261	0	6.889	0.00
17	Pongok	Permukaan	Pongok	Kep. Pongok	347	0.1	23.643	0.00
18	Kepoh	Rawa	Kepoh	Toboali	702	18.2	27.238	0.67
19	Gadung	Rawa	Gadung	Toboali	274	6.651	6.651	1.00
20	Irat	Rawa	Irat	Payung	323	0	0	0.00
21	Ranggung	Rawa	Ranggung	Payung	312	0	11.369	0.00
22	Tanjung Sangkar	Rawa	Tanjung Sangkar	Lepar	361	34.320	34.320	1.00
TOTAL					7.185	86.269	196.2436	0.440

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Selatan, 2024

2.3.3.9. Persentase Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak

Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan yaitu fasilitas tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu, dilengkapi dengan kloset leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Dalam sistem air limbah yang memadai, kepemilikan septik tank tidak termasuk pada sistem air limbah yang memadai

mengingat septik tank di Kabupaten Bangka Selatan belum seluruhnya dalam kondisi yang baik. Agar Septik tank dapat menjadi komponen sistem air limbah yang memadai makanya perlu perbaikan septik tank dan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) sebagai rantai pengelolaan air limbah dengan sistem yang memadai.

Adapun persentase rumah di Kabupaten Bangka Selatan berakses sanitasi layak pada tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.132
Persentase Rumah Berakses Sanitasi Layak
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Rumah (unit)	Jumlah Rumah Bersanitasi Layak (unit)	persen Rumah Bersanitasi Layak
1	Payung	5.976	5.004	83,73
2	Pulau Besar	2.777	2.555	92,01
3	Simpang Rimba	6.127	5.827	95,10
4	Toboali	20.705	18.463	89,17
5	Tukak Sadai	3.320	3.099	93,34
6	Airgegas	12.408	11.543	93,03
7	Lepar	2.426	1.965	81,00
8	Kepulauan Pongok	1.146	831	72,51
Kab.Bangka Selatan		54.885	49.287	89,80

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Selatan, 2024

Pada tahun 2023 persentase rumah berakses sanitasi layak di Kabupaten Bangka Selatan adalah sama seperti tahun 2022 sebesar 89,80 persen yaitu dari total 49.287 unit rumah di Kabupaten Bangka Selatan, sebanyak 49.287 unit rumah sudah bersanitasi layak.

2.3.3.10. Persentase Kawasan Kumuh

Kawasan permukiman kumuh ditetapkan dengan kriteria bahwa kawasan tersebut mempunyai layanan sanitasi buruk, infrastruktur dasar permukiman buruk seperti jalan dan drainase permukiman buruk. Luas kawasan permukiman kumuh di Bangka selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan nomor 188.45/19.D/DISPERKIM/2023 tanggal 5 Januari 2023, Berikut Kawasan Kumuh di Kabupaten Bangka Selatan :

Tabel 2.133
Penetapan Kawasan Kumuh Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	DUSUN/RT/RW	LUAS PERMUKIMAN KUMUH (HA)
1	Lepar	Penutuk	1. Dusun Laut RT. 001	2,01292
			2. Dusun Laut RT. 002	2,98228
			3. Dusun Laut RT. 002	5,32480



NO	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	DUSUN/RT/RW	LUAS PERMUKIMAN KUMUH (HA)
			Total Luas	10,32
		Tanjung Sangkar	1. Dusun 001 RT. 001	0,62000
			2. Dusun 001 RT. 001	0,68175
			3. Dusun 001 RT. 002	0,39000
			4. Dusun 001 RT. 002	2,90860
			5. Dusun 002 RT. 005	0,78000
			6. Dusun 002 RT. 005	0,42441
			7. Dusun 002 RT. 006	2,81517
			Total Luas	8,62
		Tanjung Labu	1. Dusun I RT. 002	2,88542
			2. Dusun I RT. 003	1,40387
			3. Dusun II RT. 004	1,58176
			4. Dusun II RT. 005	1,78323
			5. Dusun II RT. 006	2,22129
			6. Dusun III RT. 007	1,96749
			7. Dusun III RT. 008	1,25440
			8. Dusun III RT. 009	2,51638
			9. Dusun III RT. 010	2,11616
			Total Luas	17,73
2	Kepulauan Pongok	Pongok	1. Dusun Pantai RT. 001	0,870584
			2. Dusun Pantai RT. 002	1,477205
			3. Dusun Laut RT. 001	3,043568
			4. Dusun Air Sagu RT. 001	0,807504
			5. Dusun Air Krius RT. 001	0,683300
			6. Dusun Air Krius RT. 002	3,693077
			7. Dusun Baru RT. 001	0,954762
			Total Luas	11,53
		Celagen	1. Dusun Pada Idi RT. 001	0,768839
			2. Dusun Laut RT. 002	1,364540
			3. Dusun Baru RT. 003	2,274740
			4. Dusun Polewali RT. 004	0,440552
			5. Dusun Angin Mamiri RT. 005	1,901330
			Total Luas	6,75
3	Tukak Sadai	Sadai	1. Dusun Sadai RT. 003	0,672918
			2. Dusun Sadai RT. 004	0,308284
			3. Dusun Nipah Kuning RT. 001	0,673095
			4. Dusun Nipah Kuning RT. 004	0,345701
			Total Luas	2,00
4	Toboali	Kelurahan Tanjung Ketapang (Tanjung Ketapang)	1. RT. 001 RW. 003	1,306195
			2. RT. 002 RW. 003	0,415396
			3. RT. 003 RW. 003	0,591285
			4. RT. 004 RW. 003	0,612292



NO	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	DUSUN/RT/RW	LUAS PERMUKIMAN KUMUH (HA)
			5. RT. 005 RW. 003	0,518782
			6. RT. 006 RW. 003	0,406047
			Total Luas	3,85
		Kelurahan Tanjung Ketapang (Sukadamai)	1. RT. 001 RW. 001	0,65880
			2. RT. 002 RW. 001	1,37030
			3. RT. 003 RW. 001	1,10918
			4. RT. 004 RW. 001	1,58254
			5. RT. 005 RW. 001	1,51866
			6. RT. 001 RW. 007	1,55991
			7. RT. 002 RW. 007	1,41350
			8. RT. 003 RW. 007	1,21505
			9. RT. 004 RW. 007	0,96566
			10. RT. 005 RW. 007	1,68688
			11. RT. 001 RW. 002	0,46803
			12. RT. 002 RW. 002	0,56847
			13. RT. 002 RW. 002	0,70667
			14. RT. 004 RW. 002	1,15631
			Total Luas	15,98

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangka Selatan, 2024

Penetapan Kawasan Kumuh Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023 dengan luasan total 76,78 Hektar terdiri dari 8 kawasan yaitu :

- 1) Kawasan Desa Penutuk dengan luas 10,22 Ha
- 2) Kawasan Desa Tanjung Sangkar dengan luas 8,62 Ha
- 3) Kawasan Desa Tanjung Labu dengan luas 17,73 Ha
- 4) Kawasan Desa Pongok dengan luas 11,53 Ha
- 5) Kawasan Desa Celagen dengan luas 6,75 Ha
- 6) Kawasan Tukak Sadai dengan luas 2,00 Ha
- 7) Kawasan Kelurahan Tanjung Ketapang dengan luas 3,85 Ha
- 8) Kawasan Suka Damai dengan luas 15,98 Ha

Adapun permukiman kumuh di Kabupaten Bangka Selatan terdapat 2 lokasi yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung karena di atas 10 hektar. Dalam penanganan kawasan kumuh dapat diasumsikan sebagai berikut :

- a. Pembangunan sistem sanitasi (air limbah dan penanganan sampah) :
 - 1 SR melayani 1 rumah dengan jumlah 5 jiwa
 - 1 rumah diasumsikan dengan 200m² luas kawasan
- b. Pembangunan jalan permukiman :
 - 1 km diasumsikan menangani 6,25 Ha kawasan

c. Pembangunan drainase :

1 km diasumsikan menangani 6,25 Ha luas kawasan kumuh

d. Luas penanganan diasumsikan luas rata-rata komponen kumuh (sanitasi, jalan dan drainase)

Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman telah melakukan upaya-upaya dalam rangka penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Bangka Selatan dan sebagai dasar penyusunan Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bangka Selatan yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung Program Nasional Pengentasan Permukiman Kumuh, termasuk dalam hal Target Nasional Permukiman Tanpa Kumuh. Namun pada tahun 2023 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman tidak melakukan penanganan dikarenakan keterbatasan anggaran dan telah mengalokasikan anggaran penanganan kawasan kumuh sesuai SK Bupati Bangka Selatan yang terbaru akan dilaksanakan pada tahun 2024.

2.3.3.11. Persentase Rumah Layak Huni

Rumah yang layak huni harus memenuhi standar kesehatan agar penghuni tersebut terjamin kesehatannya. Konsep rumah layak huni dilihat dari beberapa indikator seperti, kualitas dari jenis atap, lantai, dan dinding dari rumah, yaitu rumah yang dimiliki dan ditempati adalah rumah yang memenuhi kondisi sebagai berikut :

- 1) Tidak permanen dan/atau rusak;
- 2) Atap bukan dibuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk seperti ijuk, dsb;
- 3) Dinding permanen, bukan papan, bambu atau sebagainya; dan
- 4) Lantai bukan tanah/semén dalam kondisi rusak.

Berikut data rumah layak huni Kabupaten Bangka Selatan tahun 2021-2023 :

Tabel 2.134
Persentase Rumah Layak Huni Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021-2023

No	Kecamatan	Tahun								
		2021			2022			2023		
		Jumlah Rumah (unit)	Jumlah Rumah Layak Huni (unit)	persen Rumah Layak Huni	Jumlah Rumah (unit)	Jumlah Rumah Layak Huni (unit)	persen Rumah Layak Huni	Jumlah Rumah (unit)	Jumlah Rumah Layak Huni (unit)	persen Rumah Layak Huni
1	Payung	8.653	8.431	97,43	8.653	8.473	97,92	8.653	8.490	98,11
2	Pulau Besar	3.277	2.896	88,37	3.277	2.941	89,75	3.277	2.958	90,26
3	Simpang Rimba	5.497	4.813	87,56	5.497	4.859	88,39	5.497	4.923	89,55
4	Toboali	22.163	21.354	96,35	22.163	21.437	96,72	22.163	21.449	96,77

No	Kecamatan	Tahun								
		2021			2022			2023		
		Jumlah Rumah (unit)	Jumlah Rumah Layak Huni (unit)	persen Rumah Layak Huni	Jumlah Rumah (unit)	Jumlah Rumah Layak Huni (unit)	persen Rumah Layak Huni	Jumlah Rumah (unit)	Jumlah Rumah Layak Huni (unit)	persen Rumah Layak Huni
5	Tukak Sadai	3.517	3.172	90,19	3.526	3.219	91,29	3.526	3.219	91,29
6	Airgegas	12.023	11.203	93,18	12.023	11.245	93,53	12.023	11.245	93,53
7	Lepar	2.794	2.114	75,66	2.794	2.135	76,41	2.794	2.135	76,41
8	Kep. Pongok	1.629	1.256	77,10	1.629	1.278	78,45	1.629	1.278	78,45
Kab. Bangka Selatan		59.553	55.239	92,76	59.562	55.587	93,33	59.562	55.697	93,51

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bangka Selatan, 2024

Berdasarkan tabel diatas, jumlah rumah layak huni di Kabupaten Bangka Selatan kurun waktu 3 (tiga) tahun 2021-2023 menunjukkan peningkatan, pada tahun 2021 juga adanya peningkatan rumah layak huni sebanyak 92,76 persen atau dengan jumlah 55.239 dari 59.553 rumah dan pada tahun 2022, jumlah rumah layak huni adalah sebanyak 55.587 unit rumah dari total 59.562 rumah yang ada di Kabupaten Bangka Selatan atau dengan persentase 93,33 persen. Dan pada tahun 2023, jumlah rumah layak huni adalah sebanyak 55.697 unit rumah dari total 59.562 rumah yang ada di Kabupaten Bangka Selatan atau dengan sebanyak 91,85 persen, sedangkan Hal ini menunjukan peningkatan rumah yang layak huni seiring dengan peningkatan jumlah rumah di Kabupaten Bangka selatan.

Dilihat dari persentasenya, jumlah rumah tidak layak huni dibandingkan dengan total rumah yang ada di Kecamatan pada tahun 2021, 2022 dan 2023 paling banyak terdapat di Kecamatan Lepar. Berbagai upaya telah dilakukan, hal yang menjadi penyebab tidak tercapainya target kinerja persentase rumah layak huni di Kabupaten Bangka Selatan antara lain adanya penyesuaian kriteria rumah layak huni, pada angka penyumbang rumah tidak layak huni terbesar berada pada rumah-rumah swadaya, akan tetapi kewenangan Kabupaten lebih kepada fasilitasi, kecuali terkait bencana alam dan kompensasi akibat pembangunan sedangkan untuk pendanaan konstruksi perumahan swadaya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi.

2.3.3.12. Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang

Peran perbankan dalam perkembangan perekonomian daerah cukup penting. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jumlah bank dan cabangnya adalah



jumlah kantor pusat, kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas. Semakin banyak jumlah kantor disuatu daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut mempunyai potensi ekonomi yang lebih tinggi.

Tabel 2.135
Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023

No	Nama Bank	Jumlah	Lokasi
1	Bank Rakyat Indonesia	4	Toboali, Payung, Tukak Sadai
2	Bank Sumsel Babel	4	Toboali, Bakuda, Payung, Tukak Sadai
3	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	1	Airgegas
4	Bank Central Asia	1	Toboali
5	Bank Negara Indonesia	1	Toboali
6	Bank Mandiri	1	Toboali
7	Bank Syariah Babel	3	Toboali, Payung, Tukak Sadai
Total		15	Kabupaten Bangka Selatan

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Selatan, 2024

Bank yang ada di Kabupaten Bangka Selatan sampai dengan tahun 2023 berjumlah 7 (tujuh) bank berikut cabangnya dengan total 15 (lima belas) unit. BRI, Bank Sumsel Babel dan Bank Syariah Babel dapat ditemukan di 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Toboali, Payung dan Tukak Sadai. BCA, BNI dan Bank Mandiri hanya terdapat di Toboali dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang hanya terdapat di Airgegas.

2.3.3.13. Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabang

Jumlah perusahaan asuransi yang ada di Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 2023 berjumlah 5 (lima) perusahaan yang semuanya berada di Kecamatan Toboali. Adapun perusahaan tersebut sebagai berikut :

- 1) BPJS Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan;
- 2) PT. Prudensial Life Assurance.
- 3) AXA Mandiri
- 4) BNI Life Insurance
- 5) BRI Life

2.3.3.14. Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran

Ketersediaan restoran pada suatu daerah menunjukkan tingkat daya tarik investasi suatu daerah. Sedangkan banyaknya restoran dan rumah makan menunjukkan perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya. Jumlah restoran/rumah makan di wilayah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2013-2023 adalah sebagai

berikut :

Tabel 2.136
Jumlah Restoran/Rumah Makan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2013-2023

No	Tahun	Jumlah Restoran/Rumah Makan di Kecamatan								Kab. Bangka Selatan
		Payung	Pulau Besar	Simpang Rimba	Toboali	Tukak Sadai	Airgegas	Lepar	Kep. Pongok	
1	2013	11	4	5	20	12	10	3	-	65
2	2014	11	4	5	20	12	10	3	-	65
3	2015	7	-	4	24	12	11	6	-	64
4	2016	7	-	5	29	12	10	6	-	69
5	2017	7	-	4	29	12	10	6	-	69
6	2018	7	-	4	30	12	9	7	-	69
7	2019	7	-	4	30	12	9	7	-	69
8	2020	7	-	4	30	12	9	7	-	69
9	2021	7	-	4	31	12	9	7	-	70
10	2022	7	-	4	32	12	9	7	-	71
11	2023	7	-	4	32	12	9	7	-	71

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan, 2024

Selama 10 (sepuluh) tahun terakhir perkembangan jumlah restoran dan rumah makan di Kabupaten Bangka Selatan tidak ada peningkatan yang berarti. Pada tahun 2013 jumlah rumah makan atau restoran sebanyak 65 (enam puluh lima) rumah makan, selanjutnya pada tahun 2022 dan 2023 terdapat 71 (tujuh puluh satu) rumah makan.

2.3.3.15. Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel

Jasa akomodasi merupakan salah satu penunjang keberhasilan pembangunan kepariwisataan. Menurut kelas akomodasi, di Kabupaten Bangka Selatan yang tersedia hanya kelas akomodasi melati 1, melati 2 dan melati 3. Pada tahun 2013 s.d 2022 hanya terdapat 1 (satu) penginapan melati 1 dengan kamar kurang dari 10 kamar kecuali pada tahun 2015 dimana standar kamar melati 1 yang sudah ada dinilai masih standar kamar melati 2, sedangkan pada tahun 2023 terdapat 2 (dua) penginapan melati 1 dengan kamar kurang dari 10 kamar, kemudian terdapat 3 (tiga) hotel atau penginapan melati 2 dengan jumlah kamar sebanyak 10-24 kamar, dan kamar melati 3 sebanyak 2 hotel atau penginapan dengan banyak kamar lebih dari 25 kamar. Berikut ketersediaan hotel/penginapan di Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2013-2023 :

Tabel 2.137
Jumlah Hotel/Penginapan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2013-2023

No	Tahun	Kelas Akomodasi			Total
		Melati 1 (Kamar <10)	Melati 2 (Kamar 10-24)	Melati 3 (Kamar >25)	
1	2013	1	3	1	5
2	2014	1	3	1	5
3	2015	-	4	1	5
4	2016	1	3	1	5
5	2017	1	3	1	5
6	2018	1	3	1	5
7	2019	1	4	1	6
8	2020	1	4	1	6
9	2021	1	3	2	6
10	2022	1	3	2	6
11	2023	2	3	2	7

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan, 2024

2.3.3.16. Sarana Gedung Olahraga

Selanjutnya jumlah gedung olahraga yang ada di Kabupaten Bangka Selatan adalah sebanyak 7 (tujuh) gedung olahraga, dimana 4 (empat) gedung olahraga berada di Kecamatan Toboali dan 2 (dua) gedung olahraga berada di Kecamatan Airgegas yaitu 1 (satu) di Desa Delas dan 1 (satu) di Desa Airgegas sedangkan 1 (satu) lagi berada di Kecamatan Payung Desa Malik, GOR tersebut bisa dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.138
Gedung Olahraga Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023

No	Nama	Lokasi	
		Desa	Kecamatan
1	GOR JUNJUNG BESA OH	Desa Gadung	Kecamatan Toboali
2	GOR ANGSANA	Kel. Toboali	Kecamatan Toboali
3	GOR KAPOSANG	Desa Kaposang	Kecamatan Toboali
4	GOR JFT	Kel. Teladan	Kecamatan Toboali
5	GOR DESA DELAS	Desa Delas	Kecamatan Airgegas
6	GOR DESA AIRGEGAS	Desa Airgegas	Kecamatan Airgegas
7	GOR DESA MALIK	Desa Malik	Kecamatan Payung

Sumber : Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Selatan, 2024

2.3.3.17. Tingkat Kecukupan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan berupaya mewujudkan keamanan, kenyamanan dan kelancaran bagi masyarakat dalam bertransportasi, mewujudkan manajemen transportasi yang profesional guna menciptakan penataan jaringan transportasi yang didukung dengan sarana dan prasarana serta fasilitas lalu lintas yang memadai, serta mewujudkan pemenuhan pendapatan asli daerah yang baik guna mendukung pembangunan daerah.

Tingkat kecukupan sarana prasarana perhubungan, dengan rumusan Jumlah Sarana Prasarana Perhubungan Berfungsi Baik dibandingkan jumlah kebutuhan sarana dan prasarana Perhubungan.

Tabel 2.139
Tingkat Kecukupan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017-2023

No	Tahun	Uraian		
		Jumlah Sarana Prasarana Perhubungan Berfungsi Baik (unit)	Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana Perhubungan (unit)	Tingkat kecukupan sarana prasarana perhubungan (persen)
1	2017	2.095,34	4.868,14	43
2	2018	2.862,34	4.868,14	58,8
3	2019	2.418,34	6.132,14	39,43
4	2020	3.032,34	6.132,14	49,45
5	2021	3054,34	6.132,14	49,81
6	2022	3092,34	6.132,14	50,43
7	2023	3.219,34	6.131,14	52,50

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan, 2024

Dari tabel diatas tingkat kecukupan sarana dan prasarana perhubungan dari tahun 2017 sebesar 43 persen, di tahun 2018 sebesar 58,8 persen sedangkan di tahun 2019 sebesar 39,43 persen, Penurunan realisasi dari Tahun 2018 ke tahun 2019, dikarenakan pada tahun 2019 dilakukan pendataan ulang terhadap kebutuhan dan ketersediaan sarana prasarana perhubungan. Di tahun 2020 sebesar 49,45 persen, di tahun 2021 sebesar 49,81 persen, kemudian di tahun 2022 sebesar 50,43 persen dan untuk tahun 2023 sebesar 52,50 persen. Sedangkan untuk realisasi pada tahun 2023, terdapat 17 Jenis Sarana dan Prasarana Perhubungan yang telah dimiliki untuk menunjang pelaksanaan fungsi pelayanan sektor perhubungan baik darat, Laut maupun udara, dengan rincian kebutuhan dan ketersediaan sebagai berikut :

Tabel 2.140
Sarana dan Prasarana Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023

No	Uraian Sarana Prasarana	Satuan	Jumlah Kebutuhan	Jumlah Saat ini	persen
1	Angkutan Bus Sekolah	Unit	50	15	30,0
2	Lampu Penerangan Jalan Umum	Unit	1.566	1487	94,95
3	Rambu lalu Lintas	Unit	1.862	898	48,22
4	Marka Jalan	Km	55,14	14,34	26,0
5	Halte	Unit	50	20	40,0
6	Guardrail	Batang	300	186	62,0
7	Deliniator	Unit	962	218	22,7
8	RPPJ	Buah	60	55	91,7
9	Paku Jalan	Titik	1.000	250	25,0
10	Pita Penggaduh	Titik	25	10	40,0
11	Cermin Tikung	Buah	50	44	88,0
12	Traffic Light	Titik	3	3	100,0
13	Warning Light	Titik	15	8	53,3
14	Pelabuhan Penyeberangan	Unit	4	2	50
15	Dermaga Ponton	Unit	2	2	100
16	SNNP (Tanda Pelabuhan)	Titik	121	7	5,78
17	Kapal	Unit	6	4	66,66
Total			6.131,14	3.219,34	52,50

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan, 2024

2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi

2.3.4.1. Pengembangan Investasi dan Penanaman Modal

Proses pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan perekonomian ditentukan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah faktor penanaman modal. Penanaman modal merupakan salah satu bidang Pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah. Penanaman modal dilihat dari sumbernya terbagi menjadi dua yaitu penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi salah satu sumber pembiayaan yang penting bagi wilayah yang sedang berkembang dan mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan. Berikut perkembangan realisasi investasi di Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016-2023 :

Tabel 2.141
Nilai Investasi PMA/PMDN Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016-2023

TAHUN	REALISASI INVESTASI Rp)		TOTAL (Rp)
	PMA	PMDN	
2016	567.961.662.761	11.874.700.000	579.836.362.761
2017	608.461.662.761	179.302.147.063	787.763.809.824
2018	660.461.662.761	242.869.947.063	903.331.609.824



TAHUN	REALISASI INVESTASI Rp)		TOTAL (Rp)
	PMA	PMDN	
2019	660.461.662.761	256.069.947.063	916.531.609.824
2020	660.461.662.761	293.918.947.063	954.380.609.824
2021	660.461.662.761	495.870.495.845	1.156.332.158.606
2022	382.609.048.268	1.025.984.143.448	1.408.593.191.716
2023	85.400.000.000	3.096.228.133.537	3.181.628.133.537

Sumber : Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bangka Selatan, 2024

Kondisi iklim investasi Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 menunjukkan kegairahan pelaku usaha dalam melakukan investasi, baik perluasan usaha yang telah ada maupun untuk investasi baru. Ini terlihat terjadi peningkatan realisasi nilai investasi PMDN dari tahun ke tahun. Jika dilihat dari nilai total investasi pertahunnya, di tahun 2016 nilai total investasi di Kabupaten Bangka Selatan sebesar Rp. 579.836.362.761,- terjadi peningkatan di tahun 2017 menjadi Rp. 787.763.809.824,- kemudian kembali meningkat di tahun 2018 menjadi Rp. 903.331.609.824,- selanjutnya di tahun 2019 kembali naik menjadi Rp. 916.531.609.824,- terus meningkat di tahun 2020 menjadi Rp. 954.380.609.824,- kembali meningkat di tahun 2021 menjadi Rp.1.156.332.158.606,- untuk tahun 2022 dan 2023 tren peningkatan terus berlanjut dimana tahun 2022 sebesar Rp. 1.408.593.191.716,- dan Rp. 3.181.628.133.537,- di tahun 2023. Jika dilihat dari tabel diatas menunjukan perkembangan penanaman modal dari realisasi investasi dari tahun 2016 sampai dengan akhir tahun 2023, dimana terjadi kenaikan Investasi yang signifikan dari tahun 2016 sebesar Rp. 579.836.362.761,- menjadi Rp. 3.181.628.133.537,- atau naik Rp. 2.601.791.770.776,- dengan persentase 448,71 persen diakhir tahun 2023.

Peningkatan penanaman modal di Kabupaten Bangka Selatan selama kurun waktu 8 (delapan) tahun tidak hanya dilihat dari peningkatan realisasi investasi saja, tetapi juga dilihat dari peningkatan jumlah Investor yang menanamkan modalnya. Selanjutnya jumlah investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016-2023 disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.142
Jumlah Investor PMA/PMDN Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016-2023

Tahun	Kategori Penanaman Modal		Total Investor
	PMA	PMDN	
2016	4	6	10
2017	5	14	19
2018	6	18	24
2019	6	22	28
2020	6	40	46
2021	6	89	95
2022	4	1.070	1.074



Tahun	Kategori Penanaman Modal		Total Investor
	PMA	PMDN	
2023	2	3.280	3.282

Sumber : Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bangka Selatan, 2024

Pada tahun 2016 total Investor yang menanamkan modalnya adalah sebanyak 10 (sepuluh) Investor, terjadi peningkatan di tahun 2017 menjadi 19 (sembilan belas) Investor, kemudian kembali meningkat di tahun 2018 menjadi 24 (dua puluh empat) Investor, selanjutnya di tahun 2019 kembali naik menjadi 28 (dua puluh delapan) Investor, terus meningkat di tahun 2020 menjadi 46 (empat puluh enam) Investor, kembali meningkat di tahun 2021 menjadi 95 (sembilan puluh lima) Investor, untuk tahun 2022 menjadi 1.074 (seribu tujuh puluh empat) Investor dan 2023 tren peningkatan terus berlanjut dimana tahun 2023 menjadi 3.282 (tiga ribu dua ratus delapan puluh dua) Investor. Peningkatan Investor terlihat sangat menjanjikan jika dilihat pada tahun 2016 total Investor yang menanamkan modalnya sebanyak 10 (sepuluh) Investor menjadi 3.282 (tiga ribu dua ratus delapan puluh dua) Investor pada tahun 2023, meningkat sangat signifikan mencapai 328,20 persen.

Jika dilihat dari kedua tabel diatas, terjadi kenaikan yang signifikan di tahun 2022 dan 2023 dari nilai investasi dan Investor yang berinvestasi di Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kabupaten Bangka Selatan, pada tahun 2022 nilai investasi mengalami kenaikan mencapai 106,91 persen dari tahun 2021 dan di tahun 2023 meningkat kembali mencapai 201,78 persen dibandingkan tahun 2022, hal ini dikarenakan meningkatnya Investor yang menanamkan modalnya mencapai 981 Investor atau naik sebesar 1.102,25 persen di tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 dan bertambah lagi di tahun 2023 sebanyak 2.210 Investor atau naik sebesar 206,54 persen Investor yang berinvestasi di berbagai bidang di Kabupaten Bangka Selatan, namun di bidang perikanan budidaya khususnya di sub sektor tambak udang vaname yang menjadi investasi terfavorit.

Hal ini merupakan pencapaian terbaik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah khususnya Bupati Bangka Selatan yang mampu menarik investor untuk berinvestasi di Kabupaten Bangka Selatan dengan menciptakan iklim kondusif dan bersahabat.

2.3.4.2. Rata-rata Lama Proses Perizinan

Penyelenggaraan Pemerintah daerah saat ini bukan lagi semata-mata menjadi tanggung jawab Pemerintah, melainkan seluruh aktor dalam sebuah wilayah atau daerah. Meski demikian, peran Pemerintah daerah masih dominan terkait dengan penyediaan pelayanan publik. Pada dasarnya pelayanan publik mencakup tiga aspek, yaitu pelayanan barang, jasa dan administratif. Perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik, begitu



halnya yang terkait dengan perizinan usaha. Proses perizinan, khususnya perizinan usaha secara langsung berpengaruh terhadap keinginan dan keputusan calon pengusaha atau investor untuk menanamkan modalnya. Adapun lama proses perizinan di Kabupaten Bangka Selatan sebagai berikut :

Tabel 2.143
Rata-rata Lama Proses Perizinan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2013-2023

No	Tahun	Rata-rata Lama Proses Perizinan
1	2013	1-3
2	2014	1-3
3	2015	1-3
4	2016	1-3
5	2017	1-3
6	2018	1-3
7	2019	1-4
8	2020	1-4
9	2021	1-4
10	2022	1-4
11	2023	1-3

Sumber : Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Bangka Selatan, 2024

Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (*goodgovernance*), berupaya meningkatkan kualitas aparatur Pemerintahan di semua sektor pelayanan publik, terutama dalam kegiatan pelayanan perizinan. Upaya untuk meminimalisir permasalahan perizinan yang berdampak buruk terhadap kurang optimalnya investasi di Kabupaten Bangka Selatan adalah dengan membentuk model Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T). Secara umum penyelesaian proses perizinan di Unit P2T Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Selatan memerlukan waktu 1 (satu) hari, hanya beberapa jenis perizinan yang memerlukan penyelesaian maksimal dalam 3 hari. Jenis-jenis perizinan di Kabupaten Bangka Selatan yang didelegasikan dan/atau dilimpahkan ke Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian, dan Perdagangan sesuai Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Dan/Atau Pelimpahan Wewenang Penerbitan Perizinan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

Tabel 2.144
Jenis Peizinan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023

NO.	JENIS PERIZINAN/NON PERIZINAN
1	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
2	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Minuman Beralkohol;



NO.	JENIS PERIZINAN/NON PERIZINAN
3	Tanda Daftar Industri (TDI);
4	Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
5	Tanda Daftar Gudang (TDG);
6	Izin Usaha Industri (IUI);
7	Izin Penyelenggaraan Reklame;
8	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
9	Izin Trayek;
10	Izin Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Izin Usaha Toko Swalayan);
11	Izin Penyelenggaraan Kepariwisata (Tanda Daftar Usaha Pariwisata);
12	Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL);
13	Izin Penyimpanan dan Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
14	Izin Penyelenggaraan Kesehatan Medik Dasar terdiri atas :
	a. Surat Izin Praktik Dokter Umum;
	b. Surat Izin Praktik Dokter Gigi;
	c. Surat Izin Praktik Apoteker;
	d. Surat Izin Praktik Bidan;
	e. Surat Izin Praktik Perawat;
	f. Surat Izin Praktik Fisioterapis;
	g. Surat Izin Praktik Berkelompok Dokter Umum;
	h. Surat Izin Praktik Berkelompok Dokter Gigi;
	i. Surat Izin Balai Pengobatan;
	j. Surat Izin Rumah Bersalin;
	k. Surat Izin Praktik Terapis Wicara; dan
	l. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi.
15	Izin Penyelenggaraan Kesehatan Medik Spesialistik terdiri atas:
	a. Surat Izin Praktik Dokter Spesialis;
	b. Surat Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis;
	c. Surat Izin Praktik Berkelompok Dokter Spesialis; dan
	d. Surat Izin Praktik Berkelompok Dokter Gigi Spesialis.
16	Izin Penyelenggaraan Kesehatan Penunjang Medik terdiri atas:
	a. Surat Izin Apotek;
	b. Surat Izin Pedagang Eceran Obat (Toko Obat);
	c. Surat Izin Optik;
	d. Surat Izin Klinik Fisioterapi;
	e. Surat Izin Tukang Gigi; dan
	f. Surat Izin Salon Kecantikan terdiri atas :
	1) Tipe A;
	2) Tipe B;
	3) Tipe C;
	4) Tipe D; dan
	5) Tipe E.
17	Izin Kerja Tenaga Kesehatan terdiri atas :



NO.	JENIS PERIZINAN/NON PERIZINAN
	a. Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian;
	b. Izin Kerja Perawat;
	c. Izin Kerja Terapis Gigi dan Mulut;
	d. Izin Kerja Refraksionis Optisien;
	e. Izin Kerja Radiografer;
	f. Izin Kerja Anastesi;
	g. Izin Kerja Tenaga Gizi;
	h. Izin Kerja Sanitarian; dan
	i. Izin Kerja Perekam Medis.
18	Izin Pendirian Rumah Sakit terdiri atas :
	a. Izin Pendirian Rumah Sakit Umum; dan
	b. Izin Pendirian Rumah Sakit Khusus.
19	Izin Operasional Pengobatan Tradisional (Batra) terdiri atas :
	a. Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional (STPT) terdiri atas:
	1) Batra Keterampilan;
	2) Batra Ramuan;
	3) Batra Pendekatan Agama; dan
	4) Batra Supra natural.
	b. Surat Izin Pengobatan Tradisional (SIPT); dan
	c. Biaya Pengawasan Pengobatan Batra
20	Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C dan D;
21	Izin Klinik;
22	Izin Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS);
23	Izin Laboratorium;
24	Izin Depot Air Minum Isi Ulang;
25	Izin Pangan Industri Rumah Tangga; dan
26	Izin Laik Higiene Sanitasi.

Sumber : Peraturan Bupati Bangka Selatan nomor 18 Tahun 2018 dan DPMPTPP Kab. Basel, 2024

2.3.4.3. Jumlah Peraturan Daerah Mendukung Iklim Usaha

Perkembangan investasi di daerah merupakan salah satu indikator kemajuan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Investasi yang dilakukan secara tepat dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Strategi dan kebijakan daerah dalam menciptakan iklim kondusif bagi investasi menjadi salah satu tujuan bagi investor luar daerah yang berkeinginan menanamkan modalnya di daerah. Dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, daerah membentuk Perda untuk dapat memberikan kemudahan dalam mengadakan investasi. Peraturan Daerah yang mengatur tentang penanaman modal akan memberikan jaminan kepastian hukum bagi para investor. Peraturan Daerah membuat investor yakin bahwa investasi dapat dilakukan dengan perlindungan hukum.

Adapun Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan yang mendukung Iklim Usaha sebagai berikut :



- 1) Peraturan Bupati Bangka Selatan nomor 63 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Selatan nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penanaman Modal; dan
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Investor Oleh Pemerintah Daerah.

2.3.4.4. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas atau *crime rate* adalah angka yang menunjukkan bahwa semakin tinggi angka kejahatan berarti semakin rendah tingkat keamanan di suatu wilayah. Angka kriminalitas merupakan salah satu indikator kinerja utama Kabupaten Bangka Selatan periode 2013-2023. Angka kriminalitas Kabupaten Bangka Selatan dalam rumusan penghitungan capaian indikator kinerja utama dihitung dari jumlah kasus kriminalitas yang tertangani selama satu tahun dibagi jumlah penduduk tahun dimaksud per 10.000 penduduk.

$$\left(\frac{\text{Jumlah Tindak Kriminal Tertangani 1 Tahun}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 10.000 \right)$$

Angka Kriminalitas di Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2013-2023 dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain, faktor ekonomi dan faktor sosial. Jumlah tindak kriminal yang tertangani dalam penghitungan indikator ini berasal dari data Kepolisian Resor Bangka Selatan. Selanjutnya jumlah penduduk yang digunakan dalam penghitungan angka kriminalitas Kabupaten Bangka Selatan adalah berasal dari rilis data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan. Perkembangan angka kriminalitas Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2013-2023 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.145
Perkembangan Angka Kriminalitas Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2013-2023

NO.	TAHUN	JUMLAH KRIMINALITAS YANG DITANGANI (KASUS)	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	ANGKA KRIMINALITAS
1	2013	212	185.514	11,43
2	2014	197	189.492	10,40
3	2015	183	193.583	9,45
4	2016	206	197.670	10,42
5	2017	167	201.782	8,28
6	2018	222	205.901	10,78



NO.	TAHUN	JUMLAH KRIMINALITAS YANG DITANGANI (KASUS)	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	ANGKA KRIMINALITAS
7	2019	191	209.973	9,10
8	2020	198	213.966	9,30
9	2021	148	200.051	7,39
10	2022	146	202.263	7,22
11	2023	137	210.344	6,51

Sumber : Kepolisian Resort Bangka Selatan dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan, 2024

Tabel diatas menjelaskan bahwa perkembangan tren Angka Kriminalitas Kabupaten Bangka Selatan dalam 11 (sebelas) tahun terakhir periode 2013-2023 cukup fluktuatif, pada tahun 2013 angka kriminalitas berada pada angka 11,43, kemudian pada tahun 2014 angka kriminalitas turun pada angka 10,40, setelah itu pada tahun 2015 angka kriminalitas kembali turun di angka 9,45, namun di tahun 2016 angka kriminalitas kembali naik pada angka 10,42, kemudian pada tahun 2017 angka kriminalitas kembali turun berada pada angka 8,28 bergerak naik kembali pada tahun 2018 dengan angka 10,78. Pada tahun selanjutnya angka kriminalitas Kabupaten Bangka Selatan yaitu tahun 2019 turun kembali menjadi 9,10 dan kembali meningkat pada tahun 2020 namun tidak signifikan yaitu dengan angka 9,30. Selanjutnya angka kriminalitas pada tahun 2021 bergerak turun dengan cukup signifikan pada angka 7,39. Kemudian pada tahun 2022 menurun menjadi 7,22. Dan untuk tahun 2023 menurun menjadi 6,51.

Berdasarkan analisa jika dilihat pada tahun 2013 dengan angka kriminalitas 11,43 dan dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yaitu dengan angka kriminalitas 6,51 dapat disimpulkan bahwa capaian angka kriminalitas Kabupaten Bangka Selatan mengalami penurunan, ini berarti kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat semakin baik selama 10 tahun terakhir. Penurunan angka kriminalitas ini adalah salah satu keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan bekerjasama dengan aparat hukum dalam mengupayakan dan menggalakkan tindakan preventif sehingga selanjutnya diharapkan sinergitas yang semakin baik sehingga tren angka kriminalitas semakin menurun yang berarti bahwa wilayah Kabupaten Bangka Selatan menjadi semakin aman kedepannya.

Berdasarkan data dari kepolisian Resor Bangka Selatan, angka kriminalitas di Bangka Selatan pada tahun 2018 sebanyak 222 kasus, kemudian pada tahun 2019 sebanyak 191 kasus meningkat pada tahun 2020 sebanyak 198 kasus, sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 148 kasus, sedangkan untuk tahun 2022 sebanyak 146 kasus yang didominasi oleh kejahatan konvensional 86 kasus, kejahatan transional narkoba 48 kasus dan Kejahatan terhadap Kekayaan Negara sebanyak 12 kasus, sedangkan Kejahatan Kontigensi tidak ada kasus. Dan untuk tahun 2023 sebanyak 137 kasus yang didominasi oleh kejahatan konvensional 80 kasus,



kejahatan transional narkoba 47 kasus dan Kejahatan terhadap Kekayaan Negara sebanyak 10 kasus, sedangkan Kejahatan Kontigensi tidak ada kasus.

Tabel 2.146
Data Kriminalitas Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2019-2023

No	Jenis Kejahatan	Tahun 2019 (Kasus)	Tahun 2020 (Kasus)	Tahun 2021 (Kasus)	Tahun 2022 (Kasus)	Tahun 2023 (Kasus)
A	Kejahatan Konvensional	131	124	82	86	80
1	Perkosaan	0	4	0	0	0
2	Cabul / UU Perlindungan Anak	0	1	1	3	4
3	Persetubuhan Anak Dibawah Umur	10	6	2	6	5
4	Perlindungan Anak	2	5	7	7	0
5	Pembunuhan	1	0	1	1	0
6	Tracfiking	12	9	0	0	0
7	Pengeroyokan	0	1	5	6	5
8	Anirat	3	0	1	0	1
9	Aniaya Yang Menyebabkan Mati	14	26	2	0	0
10	Penganiayaan	5	3	13	11	12
11	Curas	10	12	0	1	2
12	Curanmor	28	10	6	1	5
13	Curat	23	27	17	22	17
14	Pencurian	3	0	11	3	2
15	Penggelapan	0	1	2	0	2
16	Penipuan	1	2	0	6	1
17	Penipuan dan Penggelapan	7	6	0	0	5
18	Sajam	1	2	4	6	5
19	Kepemilikan Senjata Api (Senpi)	2	1	0	0	1
20	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	2	0	1	4	4
21	Pengerusakan	0	1	1	0	0
22	Miras	3	3	1	0	0
23	Judi	0	1	0	1	1
24	Perzinahan	1	0	0	0	0
25	Pemerasan dan Pengancaman	0	1	0	0	0
26	Pencemaran Nama Baik	0	1	0	1	0
27	UU ITE/ Informasi Elektronik	0	0	2	0	2
28	Kebakaran	0	1	1	0	0
29	UU Pornografi	1	0	0	0	0
30	Pemalsuan	1	0	0	0	0
31	Penadaha Hasil Curian	1	0	0	0	0



No	Jenis Kejahatan	Tahun 2019 (Kasus)	Tahun 2020 (Kasus)	Tahun 2021 (Kasus)	Tahun 2022 (Kasus)	Tahun 2023 (Kasus)
32	Pencurian Ringan	0	0	2	2	4
33	PercobaanPencabulan	0	0	0	0	0
34	Melarikan Gadis DibawahUmur	0	0	1	0	0
35	WabahPenyakitMenular	0	0	1	0	0
36	Penyerobotan Lahan	0	0	0	1	0
37	Penganiayaan Ringan	0	0	0	1	1
38	Mucikari / prostitusi online	0	0	0	1	1
39	Pangan dan Atau Perdagangan Minuman beralkohol Jenis Arak	0	0	0	2	0
B	Kejahatan Transnasional	52	57	58	48	47
1	Narkotika	52	57	58	48	47
C	Kejahatan terhadap Kekayaan Negara	16	34	9	12	10
1	Illegal Mining	8	17	9	9	9
2	Illegal Logging	6	14	0	0	0
3	Illegal Oil (BBM)	0	1	0	3	0
4	Korupsi	2	2	0	0	0
D	Kejahatan Kontigensi	0	0	0	0	0
JUMLAH		191	198	148	146	137

Sumber : Kepolisian Resort Bangka Selatan, 2024

2.3.4.5. Persentase Penegakan Peraturan Daerah

Dalam rangka menciptakan kondusifitas dan keteraturan terhadap kondisi perubahan wilayah yang terus berkembang kearah peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah daerah menetapkan peraturan daerah untuk pengaturan hal-hal agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Perubahan wilayah yang terus berkembang biasanya berbanding lurus dengan kemungkinan tidak tertibnya pelaksanaan peraturan di masyarakat, oleh karena itu perlu dilakukannya penegakan peraturan daerah. Dalam konteks penegakan Perda dan/atau Perkada, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kedudukan dan fungsi yang cukup penting sebagai salah satu perangkat dan aparatur Pemerintah daerah. Menurut ketentuan Pasal 255 ayat (1) Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah “Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat”. Pada prinsipnya penegakan Perda dan peraturan kepala daerah merupakan upaya yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja untuk menjamin dan memastikan Perda dan peraturan kepala daerah tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Apabila terjadi pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Satuan

Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk menyelesaikannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang membuat secara jelas kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja yaitu :

- 1) Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- 2) Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- 3) Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- 4) Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Penyelesaian pelanggaran Perda di Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2019-2023 secara keseluruhan adalah 100 persen dengan artian bahwa seluruh pelanggaran Perda yang terjadi di Kabupaten Bangka Selatan dapat diselesaikan atau ditegakkan. Adapun jenis pelanggaran Perda yang terjadi di Kabupaten Bangka Selatan antara lain adalah penertiban pelajar/gepeng, penertiban PEKAT, penertiban KAFE dan PSK, serta penertiban reklame. Sedangkan Perda yang dilanggar adalah terdiri dari :

- 1) Penertiban PKL Perda nomor 21 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum;
- 2) Perda nomor 27 Tahun 2007 tentang Pelarangan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
- 3) Perda nomor 7 Tahun 2008 tentang Pelarangan Pelacuran;
- 4) Perda nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembinaan PKL; dan
- 5) Perda nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Gambaran penyelesaian pelanggaran Perda Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.147
Penyelesaian Pelanggaran Perda Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2019-2023

NO	PERATURAN DAERAH/KEPUTUSAN KEPALA DAERAH	JENIS PELANGGARAN	2019		2020		2021		2022		2023	
			PELANGGARAN	PENEGAKAN	PELANGGARAN	PENEGAKAN	PELANGGARAN	PENEGAKAN	PELANGGARAN	PENEGAKAN		
1	Perda Nomor 21 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum	Penertiban Pelajar/ Gepeng	46	46	6	6	2	2	-	-	4	4
	Perda Nomor 27 Tahun 2007 tentang	Penertiban	32	32	-	-	-	-	-	-	-	-



NO	PERATURAN DAERAH/KEPUTUSAN KEPALA DAERAH	JENIS PELANGGARAN	2019		2020		2021		2022		2023	
			PELANGGARAN	PENEGAKAN	PELANGGARAN	PENEGAKAN	PELANGGARAN	PENEGAKAN	PELANGGARAN	PENEGAKAN	PELANGGARAN	PENEGAKAN
2	Pelarangan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol	PEKAT										
3	Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pelarangan Pelacuran	Penertiban KAFE dan PSK	22	22	2	2	4	4	6	5	6	5
4	Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	Penertiban Reklame	9	9	-	-	2	2	-	-	3	3
5	Perda Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembinaan PKL	Penertiban PKL	80	80	1	1	-	-	6	2	2	2
Jumlah			189	189	9	9	8	8	12	7	15	14

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan, 2024

2.4. Aspek Pelayanan Umum

2.4.1. Indikator Penunjang kinerja Pemerintah

Sebagai penyelenggara fungsi penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, beberapa indikator yang menjadi perhatian Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Selatan sebagai perangkat daerah dengan fungsi koordinasi perumusan kebijakan, secara garis besar ditetapkan 3 (tiga) indikator dengan realisasi kinerja Kabupaten Bangka Selatan tahun 2013-2023 sebagai berikut :

Tabel 2.148
Indikator Fungsi Penunjang Lainnya Kabupaten Bangka Selatan 2013-2023

No	Tahun	Indikator		
		Skala Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (skala kualitatif)	Nilai SAKIP Daerah (skala D-A)	Nilai (RB) Reformasi Birokrasi (skala D-A)
1	2013	1,6139 (Sedang)	n/a	n/a
2	2014	2,8094 (Tinggi)	n/a	n/a
3	2015	2,9861 (Tinggi)	42,13 (C)	44,45
4	2016	2,9861 (Tinggi)	42,88 (C)	54,8
5	2017	3,088 (Sangat Tinggi)	61,71 (B)	53,96 (CC)
6	2018	2,9701 (Tinggi)	63,07 (B)	56,84 (CC)
7	2019	3,6065 (Tinggi)	64,88 (B)	60,01 (B)
8	2020	Tidak Rilis	65,67 (B)	60,11 (B)



No	Tahun	Indikator		
		Skala Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (skala kualitatif)	Nilai SAKIP Daerah (skala D-A)	Nilai (RB) Reformasi Birokrasi (skala D-A)
9	2021	2,68 (Sedang)	63,98 (B)	61,19 (B)
10	2022	3,2397 (Sedang)	64,11 (B)	60,61 (B)
11	2023	Belum Rilis	64,67 (B)	64,53 (B)

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Selatan, 2024

Adapun untuk menilai kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja guna mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik, Kabupaten Bangka Selatan menetapkan indikator nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang dievaluasi oleh tim daerah dan Kementerian Dalam Negeri setiap tahunnya. Nilai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangka Selatan selama periode 2013-2019 cenderung meningkat. pada tahun 2013 yaitu 1,6139 dengan kategori Tinggi, di tahun 2014 yaitu 2,8094 dengan kategori Tinggi, di tahun 2015 yaitu 2,9861 dengan kategori Tinggi, di tahun 2016 yaitu 2,9861 dengan kategori Tinggi. Untuk tahun 2017 yaitu 3,088 dengan kategori Sangat Tinggi, selanjutnya pada tahun 2018 yaitu 2,9701 dengan kategori Tinggi, dan pada tahun 2019 dengan nilai 3,1606 atau kategori Sangat Tinggi, kemudian pada tahun 2020 dengan metode penilaian yang baru yaitu dengan nilai 3,6065 atau tinggi yang berdasarkan penilaian sementara oleh kemendagri, sedangkan pada tahun 2021 nilai LPPD dengan nilai 2,68 atau Sedang. Selanjutnya pada tahun 2022 dengan nilai 3,2397 atau sedang dan di tahun 2023 nilai LPPD belum dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri.

Selanjutnya untuk menilai akuntabilitas kinerja Kabupaten Bangka Selatan secara keseluruhan ditetapkan indikator nilai penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang setiap tahunnya dievaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RB) Republik Indonesia. Selama 2015-2022 nilai evaluasi SAKIP Kabupaten Bangka Selatan terjadi peningkatan. Pada tahun 2015 dengan nilai 42,13 atau kategori C, untuk tahun 2016 meningkat menjadi 42,88 atau kategori C, Pada tahun 2017 dengan nilai 61,71 atau kategori B, Pada tahun 2018 dengan nilai 63,07 atau kategori B, demikian halnya pada tahun 2019 meningkat menjadi 64,88 dengan kategori B, sedangkan pada tahun 2020 meningkat menjadi 65,67 atau kategori B, kemudian pada tahun 2021 menurun menjadi 63,98 atau kategori B, selanjutnya pada tahun 2022 kembali naik menjadi 64,11 atau kategori B, dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 64,67 atau kategori B.

Sedangkan untuk menilai Reformasi Birokrasi Kabupaten Bangka Selatan secara keseluruhan ditetapkan dari 2 (dua) indikator yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil evaluasi yang ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RB) Republik Indonesia. Selama 2015-2022 nilai Reformasi Birokrasi Kabupaten Bangka Selatan terus meningkat. Pada tahun 2015 dengan nilai 44,45 kemudian pada tahun 2016 dengan nilai 54,80 selanjutnya di tahun 2017 terdapat tambahan kategori dalam penilaian di tahun 2017 dengan nilai 53,96 dengan kategori CC, untuk tahun 2018 dengan nilai 56,84 atau kategori CC, demikian halnya pada tahun 2019 meningkat menjadi 60,01 dengan kategori B, sedangkan pada tahun 2020 meningkat menjadi 60,11 atau kategori B, kemudian pada tahun 2021 kembali meningkat menjadi 61,19 atau kategori B. Namun pada tahun 2022 nilai Reformasi Birokrasi Kabupaten Bangka Selatan menurun menjadi 60,61 dan tetap dengan kategori B. sedangkan pada tahun 2023 nilai Reformasi Birokrasi Kabupaten Bangka Selatan menurun menjadi 64,53 dan tetap dengan kategori B.

2.4.2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Melalui Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan kepada seluruh institusi Pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan survei kepuasan masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan. Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan.



Gambar 2.52

Skala Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016-2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2024

Tabel 2.149
Skala Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Bangka Selatan 2016-2023

No	Tahun	Skala Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kategori
1	2016	74,37	Baik
2	2017	87,20	Sangat Baik
3	2018	76,58	Baik
4	2019	80,70	Baik
5	2020	81,73	Baik
6	2021	85,06	Baik
7	2022	89,10	Sangat Baik
8	2023	85,07	Baik

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Selatan, 2024

Kabupaten Bangka Selatan melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah menyelenggarakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap tahunnya untuk mengetahui kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bangka Selatan. Adapun rata-rata Skala Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) selama 8 (delapan) tahun yaitu dari tahun 2016-2023 dengan kategori Baik dan dengan nilai fluakuatif. pada tahun 2016 dengan nilai 74,37 atau kategori baik, di tahun 2017 dengan nilai 87,20 atau kategori Sangat Baik, selanjutnya pada tahun 2018 dengan nilai 76,58 atau kategori Baik dan tahun 2019 dengan nilai 80,70 atau kategori baik serta pada tahun 2020 dengan nilai 81,73 atau kategori Baik. untuk tahun 2021 dengan nilai 85,06 dengan kategori baik. Dan di tahun 2022 dengan nilai 89,1 atau dalam kategori sangat baik. Untuk tahun 2023 dengan nilai 85,07 atau dalam kategori Baik.

2.4.3. Kajian Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan (Litbang) berperan penting dalam mendorong kemajuan suatu Daerah. Hasil litbang yang akurat dalam bentuk konsep, model, skenario, maupun pilihan kebijakan yang tepat dapat menjadi rekomendasi dalam mengatasi berbagai masalah yang timbul di suatu negara mulai dari perubahan iklim, krisis pangan dan energi hingga solusi dalam rangka meningkatkan produktivitas di berbagai sektor pembangunan.

Tabel 2.150
Daftar Kajian dan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2018-2023

Tahun	Kegiatan/Kajian	Keterangan
1	Riset Terapan Teknologi Mutu Air Laut dan Lingkungan Kawasan Pesisir Kab. Bangka Selatan	diimplementasikan
2	Riset dan Observasi Pengembangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Selatan	diimplementasikan
3	Pengembangan Komoditi Unggulan Perkebunan di	diimplementasikan



Tahun	Kegiatan/Kajian	Keterangan
2018	Kab.Bangka Selatan	
	4 Prospek dan Arah Pengembangan Tata Niaga Agribisnis di Kabupaten Bangka Selatan	-
	5 Studi Implementasi Pola Tata Ruang Desa di Kab. Bangka Selatan	diimplementasikan
	6 Riset dan Observasi Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kabupaten Bangka Selatan	diimplementasikan
	7 Riset Potensi Pengembangan Kawasan Hutan Mangrove di Kabupaten Bangka Selatan	diimplementasikan
	8 Studi Karakteristik Sosial Budaya Kabupaten Bangka Selatan	Informasi Sosial Budaya Pesisir
	9 Penyusunan Sistem Inovasi Daerah	diimplementasikan
2019	1 Master Plan dan DED Politeknik Kelautan Perikanan	-
	2 Forum Riset dan Inovasi Pembangunan Daerah	-
	3 Pengembangan Sistem Inovasi Daerah	diimplementasikan
	4 Penelitian Terapan untuk Mendukung Kebijakan Daerah	diimplementasikan
2020	1 Pengembangan Sistem Inovasi Daerah	diimplementasikan
	2 Penelitian Terapan untuk Mendukung Kebijakan Daerah	diimplementasikan
2021	1 Pengembangan Sistem Inovasi Daerah	diimplementasikan
	2 Penelitian Terapan untuk Mendukung Kebijakan Daerah	diimplementasikan
2022	1 Pengembangan Sistem Inovasi Daerah	diimplementasikan
	2 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	diimplementasikan
	3 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	diimplementasikan
2023	1 Penelitian Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi Inovasi (Penelitian dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) Kabupaten Bangka Selatan)	diimplementasikan
	2 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (Penelitian Preservasi Budaya Melalui Bahasa Melayu Bangka Selatan Sebagai Identitas Budaya Lokal Kabupaten Bangka Selatan)	diimplementasikan

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Bangka Selatan, 2024

Kegiatan penelitian dan pengembangan daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2018-2023 menghasilkan total 20 (dua puluh) laporan/dokumen. Dari kegiatan/kajian yang dilakukan pada tahun 2018 dari total 9 (sembilan) kegiatan/kajian sebanyak 7 (tujuh) kegiatan/kajian diimplementasikan. Sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 2 (dua) kegiatan/kajian yang diimplementasikan dari total 4 (empat) kegiatan/kajian. Dan 2 (dua) kegiatan/kajian yang dilakukan pada tahun 2020 seluruhnya diimplementasikan. Selanjutnya tahun 2021 ada 2 (dua) kegiatan/kajian yang dilakukan pada tahun 2022 seluruhnya diimplementasikan dan ada 3 (tiga) kegiatan/kajian pada tahun 2022 yang dilakukan. Untuk tahun 2023 ada 2 (dua) kegiatan/kajian yang dilakukan namun masih dalam proses diimplementasikan.



2.4.4. Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah

Pergeseran paradigma pembangunan dari yang bersifat sentralistik menjadi desentralisasi telah menetapkan daerah sebagai salah satu ujung tombak pembangunan nasional menuntut daerah untuk lebih kreatif dalam pembangunan dan pengembangan daerah. Dalam era global, pembangunan perlu lebih mengedepankan aspek pemanfaatan Iptek dan inovasi sebagai faktor pembentuk daya saing atau disebut dengan *innovation-driven development*. Pertumbuhan pembangunan perlu digerakkan oleh strategi yang tidak saja semakin efisien, namun mengedepankan inovasi dengan mendayagunakan IPTEK.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah menerbitkan Undang-undang nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang mengamanatkan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memperkuat daya dukung Iptek dalam meningkatkan daya saing dan kemandirian Bangsa menghadapi persaingan global. Kemudian sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa inovasi menjadi salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi menentukan tingginya daya saing suatu daerah/Negara.

Sebagai tindak lanjut regulasi tersebut di atas, pada tahun 2012 telah ditetapkan Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri nomor 03 Tahun 2012 dan nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Sementara sebagai pelaksana Undang-undang 23 Tahun 2014, terdapat Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk membangun dan memperkuat Sistem Inovasi Daerah (SIDa) sebagai landasan kinerja pembangunan berbasis inovasi. SIDa merupakan kerangka membangun sinergi antar pihak pemerintah daerah, swasta, perguruan tinggi, dan segenap pemangku kepentingan terkait dalam pendayagunaan Iptek dan inovasi dalam pembangunan daerah.

Pada tahun 2022 Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan masih menggunakan Peraturan Bupati Bangka Selatan nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dan Peraturan Bupati Bangka Selatan nomor 24 Tahun 2018 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah di Kabupaten Bangka Selatan, serta Instruksi Bupati Bangka Selatan nomor : 067/1/VI/2021 Tentang Pelaksanaan Gerakan *One Agency One Innovation* di Kabupaten Bangka Selatan. Penilaian inovasi daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022 sesuai penilaian Kementerian Dalam Negeri berada pada kategori inovatif dan merupakan peringkat ke 71 dengan skor 55,88 dalam skala Nasional.

Di tahun 2022 perlombaan inovasi daerah tidak dilaksanakan masih menggunakan inovasi daerah pada tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan keterbatasan tenaga ahli dan tim



penilai dan kebutuhan dana, namun telah telah diperlombakan kembali inovasi Daerah pada tahun 2023. Berikut tabel inovasi daerah dari tahun 2017 sampai dengan saat ini :

Tabel 2.151
Data Inovasi Kabupaten Bangka Selatan

NO	NAMA INOVASI	KATEGORI INOVASI	MULAI DILAKSANAKAN	UNIT PELAYANAN PUBLIK
Puskesmas Payung				
1	Satgas Oneting Oneresti (<i>Pemantauan Bayi Balita Potensi Stunting dan Pemantauan Ibu Hamil Resiko Tinggi</i>)	Pelayanan Kesehatan	2022	Puskesmas Payung
2	TB Online	Pelayanan Kesehatan	2022	Puskesmas Payung
3	Bidadari (<i>Bidan Dokter Aktif Pemeriksaan Payudara & Iva Test</i>)	Pelayanan Kesehatan	2022	Puskesmas Payung
Puskesmas Toboali				
4	Jumantuk (<i>Juru Pemantau Batuk</i>)	Pelayanan Kesehatan	2019	Puskesmas Toboali
5	Si Pendekar Damai (<i>Skrining Penyakit Tidak Menular Diabetes Militus dan Hipertensi</i>)	Pelayanan Kesehatan	2020	Puskesmas Toboali
6	Troli (<i>Taman Releksi Olahraga Lansia</i>)	Pelayanan Kesehatan	2020	Puskesmas Toboali
7	Gembala Sapi (<i>Gerakan Masyarakat Bersama Lansia Sehat, Aktif, Produktif, Mandiri</i>)	Pelayanan Kesehatan	2020	Puskesmas Toboali
8	Kulat Suket (<i>Kunjungan Lansia Terpadu dengan Pemeriksaan Status Kesehatan Terintegrasi</i>)	Pelayanan Publik	2022	Puskemas Toboali
9	Keladi Habang (<i>Kesehatan Layanan Anak dan Ibu Harapan Bangsa</i>)	Pelayanan Publik	2022	Puskemas Toboali
10	Bekelakar (<i>Belajar Keterampilan dan Latihan Kesehatan yang Benar</i>)	Pelayanan Publik	2022	Puskemas Toboali
11	Moge Untuk Nyuling (<i>Motor Gesit untuk Penyuluhan Keliling</i>)	Pelayanan Publik	2022	Puskemas Toboali
12	Gerakan 14 (<i>Gerakan 1 Ibu Hamil 4 Pendoron dan ANC Trimester1 Minimal 1 kali, Trimester 2 Minimal 2 Kali, Trimester 3 Minimal 3 Kali</i>)	Pelayanan Publik	2022	Puskemas Toboali
13	Si Duren Mas (<i>Sistem</i>)	Pelayanan Publik	2022	Puskemas Toboali



NO	NAMA INOVASI	KATEGORI INOVASI	MULAI DILAKSANAKAN	UNIT PELAYANAN PUBLIK
	<i>Informasi Dokumen Perencanaan Puskesmas)</i>			
14	Dataku (<i>Data Kepegawaian Umum</i>)	Pelayanan Publik	2022	Puskemas Toboali
15	Simple WA (<i>Sistem Mendaftar Pasien Lewat Watsapp (WA)</i>)	Pelayanan Publik	2022	Puskemas Toboali
Puskesmas Tiram				
16	Kunyit Ceria	Pelayanan Kesehatan	2018	Desa Tiram bekerjasama dengan Puskesmas Tiram
17	Makan Sabu Satu Jam (<i>Mari Gerakan Satu Bulan Satu Jamban</i>)	Pelayanan Publik	2020	Puskesmas Tiram
18	Madu Kuning (<i>Mari Ke Posyandu Untuk Atasi Stunting</i>)	Pelayanan Publik	2020	Puskesmas Tiram
19	Jumat Seru (<i>Jumat Senam Sehat Bersama Jamu</i>)	Pelayanan Publik	2020	Puskesmas Tiram
20	Peta Raja (<i>Penyuluh Kesehatan untuk Rawat Jalan</i>)	Pelayanan Publik	2020	Puskesmas Tiram
21	Betas (<i>Berantas TB Sampai Tuntas</i>)	Pelayanan Publik	2020	Puskesmas Tiram
22	Sigi dan Dini (<i>Sikat Gigi dan Deteksi Dini</i>) untuk Pencegahan Penyakit Mulut	Pelayanan Publik	2022	Puskesmas Tiram
23	Seruling (<i>Selusr Keliling</i>)	Pelayanan Publik	Belum di Laksanakan (dalam proses perencanaan)	Puskesmas Tiram
24	KPR Lansia (<i>Ketok Pintu Rumah Lansia</i>)	Pelayanan Publik	Belum di Laksanakan (dalam proses perencanaan)	Puskesmas Tiram
Puskesmas Simpang Rimba				
25	Posyandu Jelajah	Pelayanan Kesehatan	2017	Puskesmas Simpang Rimba
Puskesmas Batu Betumpang				
26	Pinter Akting (<i>Pencegahan dan Intervensi terpadu Aki, AKB dan Stunting</i>)	Pelayanan Kesehatan	2019	Puskesmas Batu Betumpang
27	Semanis Madu (<i>Facebook, Email, Handphone, tulis, Jumpa Dulu</i>)	Pelayanan Kesehatan	2019	Puskesmas Batu Betumpang
28	Gembok TB (<i>Gerakan Mencari Bersama dan Obati Kasus TB</i>)	Pelayanan Kesehatan	2019	Puskesmas Batu Betumpang
29	Gemar B'litas (<i>Gerakan Masyarakat Bugar Berkualitas</i>)	Pelayanan Kesehatan	Jul-18	Puskesmas Batu Betumpang
Puskesmas Airbara				



NO	NAMA INOVASI	KATEGORI INOVASI	MULAI DILAKSANAKAN	UNIT PELAYANAN PUBLIK
30	Tebar Senyum (<i>Tensimeter Bergerak, Solusi Nyaman Pantau Hepertensi Dengan Mudah</i>)	Pelayanan Kesehatan	2019	Puskesmas Airbara
Puskesmas Pongok				
31	BUMBER	Pelayanan Kesehatan	2019	Puskesmas Kepulauan Pongok
Puskesmas Rias				
32	Sari Berbusana (<i>Sehari Bersama sayur dan senam</i>)	Pelayanan Kesehatan	2019	Puskesmas Rias
33	Pakis Ber-PHBS (<i>Pagar Kesehatan Ber-PHBS</i>)	Pelayanan Kesehatan	2019	Puskesmas Rias
34	Saku Bepeka (<i>Satu Kunjungan beberapa Pelayanan Kesehatan</i>)	Pelayanan Kesehatan	2019	Puskesmas Rias
35	Gebbrak (<i>Gerakan RT Bersama Tenaga Kesehatan</i>)	Pelayanan Kesehatan	2019	Puskesmas Rias
36	Jaman (<i>Jam Antibiotik</i>)	Pelayanan Publik	2019	Puskemas Rias
37	BUKIT DIMENSI (<i>Buku Kontrol Penyakit Diabetes Melitus & Hipertensi</i>)	Pelayanan Publik	2021	Puskemas Rias
38	Besti Stunting (<i>Bersama Kita Bisa Tuntuaskan Stunting</i>)	Pelayanan Publik	2022	Puskemas Rias
Puskesmas Airgegas				
39	Simpatian Kring Bumil Hebat (<i>Satuan Tim Pengentasan Stunting dan Pemantauan Kondisi Ibu Hamil sampai Ibu dan Bayi Lahir</i>)	Pelayanan Kesehatan	2019	Puskesmas Airgegas
40	Posbiduan Langsingku Kesohor (<i>Pos Pembinaan terpadu dan Posyandu lansia yang terintegrasi Puskesmas Keliling, Akupresur dan Kesehatan Olahraga</i>)	Pelayanan Kesehatan	2019	Puskesmas Airgegas
41	Tebas TB (<i>Temukan dan Berantas Bersama Kasus TBC</i>)	Pelayanan Kesehatan	2019	Puskesmas Airgegas
42	Gemari Batik	Pelayanan Kesehatan	2019	Puskesmas Airgegas
43	Poles Cikar	Pelayanan Kesehatan	2019	Puskesmas Airgegas
RSUD Kabupaten Bangka Selatan				
44	Pelita (<i>Peduli Lansia Kita-Pelayanan Geriatri</i>)	Pelayanan Kesehatan	2019	RSUD
RS Pratama Kriopanting				
45	Akta Krio	Pelayanan	2020	RS Kreopanting



NO	NAMA INOVASI	KATEGORI INOVASI	MULAI DILAKSANAKAN	UNIT PELAYANAN PUBLIK
		Kesehatan		
46	Aida (<i>Ambulan Ibu dan Anak</i>)	Pelayanan Kesehatan	2020	RS Kreopanting
47	Mere Si Cikar (<i>Melalui Tele Rehabilitasi Cipatkan Lansia Aktif dan Produktif</i>)	Pelayanan Publik	2023	RS Kreopanting
Kecamatan Toboali				
48	G-SAPA (<i>Gerakan Sadar Pajak Bumi Bangunan</i>)	Pelayanan Publik Responsif Gender	2022	Kecamatan Toboali
49	Sipaduk WA (<i>Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan melalui WhatsApp</i>)	Pelayanan Publik Responsif Gender	Belum di Laksanakan (dalam proses perencanaan)	Kecamatan Toboali
Kecamatan Simpang Rimba				
50	Pantas (<i>Pelayanan Paten Tuntas</i>)	Pelayanan Publik	2019	Kecamatan Simpang Rimba
51	Prima (<i>Pelayanan Administrasi Melalui Wa</i>)	Pelayanan Publik	2019	Kecamatan Simpang Rimba
Kecamatan Airgegas				
52	Si HaTi MoBiLe (<i>Sistem Informasi Hantar Administrasi Tukar Tanpa Antri Mobile</i>)	Pelayanan Publik	2021	Kecamatan Airgegas
Kecamatan Payung				
53	Aplikasi Si-Paten/Pak Krio (<i>Pelayanan Administrasi Kependudukan Kecamatan Terintegrasi Secara Online</i>)	Pelayanan Publik Responsif Gender	2018	Kecamatan Payung
54	Adminduk Sehari Kecamatan	Pelayanan Publik Responsif Gender	2019	Kecamatan Payung
55	Rajutan Resam (<i>Cara Jitu Pembinaan dengan Verifikasi Surat Tanah ke Desa Masing-masing</i>)	Pelayanan Publik	2022	Kecamatan Payung
56	Si Pucuk Idat (<i>Sistem Pelayanan Urusan Cepat Untuk Legalisasi Dokumen Administrasi Tanah</i>)	Pelayanan Publik	2022	Kecamatan Payung
Dinas Lingkungan Hidup				
57	Terasi (<i>Teladan Rapi dan Bersih</i>)	Perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup	2017	Dinas Lingkungan Hidup
58	Buaya Kuta (<i>Budidaya Madu Kelulut Hutan Kota Bangka Selatan</i>)	Ketahanan Pangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesempatan Kerja	2020	Dinas Lingkungan Hidup
59	Mama Papa (<i>Mari Menabung Pakai</i>)	Perlindungan dan pelestarian	2022	Dinas Lingkungan Hidup



NO	NAMA INOVASI	KATEGORI INOVASI	MULAI DILAKSANAKAN	UNIT PELAYANAN PUBLIK
	Sampah)	lingkungan hidup		
60	Sepele (<i>Sistem Pelaporan Dokumen Lingkungan Berbasis Elektronik</i>)	Pelayanan Publik	2020	Dinas Lingkungan Hidup
Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusiain Daerah				
61	Si Lada (<i>Sistem Informasi Pelayanan Data</i>)	Pelayanan Publik	2017	BKPSDM
62	Si Disel (<i>Sistem Informasi Diklat Basel</i>)	Pelayanan Publik	2022	BKPSDM
63	Sigala (<i>Sistem Inovasi Gaji Berkala</i>)	Pelayanan Publik	2022	BKPSDM
64	Aplikasi DAPEHAL (<i>Aplikasi Data Pegawai Harian Lepas</i>)	Pelayanan Publik	2022	BKPSDM
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah				
65	Kopiah Resam (<i>Kolaborasi Perencanaan Terintegrasi Holistik, Tematik dan Spasial</i>)	Perencanaan	2019	BAPELITBANGDA
66	Gerubak Peradik (<i>Gerakan Konsumsi Beli Pakai Produk Daerah Hendirik</i>)	Pertumbuhan Ekonomi	2020	BAPELITBANGDA
67	Sistem Jaringan Infrastruktur dan Pemukiman Berbasis Spasial	Pelayanan Publik	2022	BAPELITBANGDA
68	Jari Manis (<i>Jaringan Infrastruktur Dan Media Informasi Spasial</i>)	Pelayanan Publik	2022	BAPELITBANGDA
Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan				
69	Pengembangan Kawasan Agrotechnopark Lada Di Airgegas	Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja	2019	Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan
70	Pembangunan Pabrik Es di Desa Pongok	Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja	2019	Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan
71	Pengembangan Kawasan Rumah pangan Lestari	Ketahanan Pangan	2019	Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan
72	Penyusunan Perhitungan Nilai Tukar Nelayan, Nilai Tukar Pembudidaya Ikan dan Nilai Tukar Petani untuk indikator kesejahteraan masyarakat petani dan nelayan kerjasama dengan UBB	Tata Kelola Pemerintahan	2020	Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan
73	Pengembangan <i>Integrated Coastal management</i> (ICM) kerja sama dengan Pusat Studi Kelautan dan Pesisir IPB Bogor	Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup	2020	Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan



NO	NAMA INOVASI	KATEGORI INOVASI	MULAI DILAKSANAKAN	UNIT PELAYANAN PUBLIK
74	Aksi Tali Intan	Pelayanan Publik	2021	Dinas Pertanian
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
75	Ayo Hekula Agik	Pelayanan Publik	2020	DINDIKBUD
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				
76	Silakso (<i>Sistem Informasi Penyelenggaraan Bagi Perpustakaan Desa dan Sekolah</i>)	Pelayanan Publik	2018	DPKAR
77	Silaksan (<i>Sistem Koleksi Antar Perpustakaan</i>)	Pelayanan Publik	2021	DPKAR
78	Armada (<i>Arsip Masuk Desa</i>)	Pelayanan Publik	2022	DPKAR
79	Puspa (<i>Perpustakaan Science Pengetahuan Alam</i>)	Pelayanan Publik	2022	DPKAR
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
80	Ngopi (Ngobrol Perihal Perizinan)	Pelayanan Publik	2022	DPMPTSP
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil				
81	Pekasem Teritip (<i>Pelaporan Kependudukan sampai Kecamatan Terhadap Kelahiran dan Kematian Penduduk</i>)	Pelayanan Publik	2020	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
82	Madu Pelawan (<i>mengurus Administrasi Kependudukan Melalui Pelayanan Warga Secara Online</i>)	Pelayanan Publik	2020	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
83	Natak Hekula	Pelayanan Publik	2020	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
84	Lampu Aik Bakung (<i>Layanan Adminduk Mendukung Program Unggulan "Ajak Bupati Kite Sambang Kampung"</i>)	Pelayanan Publik	2022	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
85	Sodakoh IKD (<i>Sosialisasi dan Pendaftaran Keliling Nempoh Identitas Kependudukan Digital</i>)	Pelayanan Publik	2022	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas Komunikasi dan Informatika				
86	Si-Datok Basel (<i>Sistem Data Sektoral Bangka Selatan</i>)	Tata Kelola Pemerintahan	2020	Dinas Komunikasi dan Informatika
Inspektorat Daerah				
87	Temu Peradek (<i>Sistem Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat Digital Elektronik</i>)	Tata Kelola Pemerintahan	2020	Inspektorat Daerah
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan				
88	Sistem Informasi Komoditi Bahan Pokok	Pertumbuhan Ekonomi Dan	2020	DPMPTSPRINDAG



NO	NAMA INOVASI	KATEGORI INOVASI	MULAI DILAKSANAKAN	UNIT PELAYANAN PUBLIK
		Kesempatan Kerja		
Sekolah				
89	PPDB Online SD	Pelayanan Publik	2022	SD N Payung

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Bangka Selatan, 2024

Perlombaan inovasi daerah tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 telah menempatkan Inovasi Mama Papah (Mari Menabung Pakai Sampah) dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Selatan dalam TOP FIVE Inovasi terbaik se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian pada tahun 2022 menempatkan inovasi Posbiduan Langsingku Kesohor (*Pos Pembinaan terpadu dan Posyandu lansia yang terintegrasi Puskesmas Keliling, Akupresur dan Kesehatan Olahraga*) dalam top 9 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1. Inovasi Posbiduan Langsingku Kesohor (*Pos Pembinaan terpadu dan Posyandu lansia yang terintegrasi Puskesmas Keliling, Akupresur dan Kesehatan Olahraga*)

Posbiduan Langsingku Kesohor merupakan suatu inovasi terpadu dalam memberikan pelayanan kesehatan secara langsung ke masyarakat. Adapun program yang terintegrasi tersebut yaitu Program Penyakit Tidak Menular Program Lansia, Program IVA Program Perawatan Kesehatan Masyarakat, dan Program GIF dengan terintegrasinya puskesmas keliling. Sebelum adanya inovasi Posbiduan Langsingku Kesohor sudah ada inovasi Salsabila Merindu (Saatnya Lansia Lebih Satukan Hati dan Meriahkan Posbindu) pada tahun 2018 guna meningkatkan capaian program PTM dan Lansia. Tetapi tidak membuahkan hasil dimana capaian program masih rendah dari target SPM masing-masing program sebesar 100 persen. Hasil perolehan data di tahun 2018 dari 3 kriteria pelayanan Posbindu PTM yaitu screening usia produktif (75,50 persen), pelayanan kesehatan hipertensi sesuai standar (86,60 persen), dan pelayanan kesehatan Diabetes Melitus sesuai standar (103,60 persen), sedangkan untuk capaian program Lansia memiliki 2 kategori yaitu Lansia <60 tahun sebesar 32,50 persen, dan lansia >60 tahun sebesar 35 persen. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa capaian program masih jauh dari target 100 persen maka dengan itu, pada tahun 2019 dibuat inovasi baru yaitu Posbiduan Langsing yang mana terintegrasi dengan program PTM, Program Lansia, dan Program IVA. Adapun capaian program yaitu screening usia produktif (95,30 persen), pelayanan kesehatan hipertensi sesuai standar (85,90 persen), dan pelayanan kesehatan Diabetes Melitus sesuai standar (107,10 persen), sedangkan untuk capaian program Lansia yaitu Lansia <60 tahun sebesar 70 persen, dan lansia >60 tahun sebesar 88,20 persen. Kemudian pada awal tahun 2020 dilakukan evaluasi program (evaluasi tahunan) pada lokmin bulan Januari 2020. Program-program yang kurang cakupannya seperti Kesehatan Olahraga, IVA dan



Puskesmas Keliling disimpulkan akan diintegrasikan bersama kegiatan posbiduan Langsing. Maka dibuatkan nama inovasi baru yaitu Posbiduan LangsingkuKesoHOR.

Adapun tujuan dari Posbiduan Langsingku KesoHOR yaitu melalui Puskesmas Keliling secara langsung datang ke Desa/Dusun melalui Posbindu Desa dan posyandu Lansia melakukan deteksi penyakit Diabetes Melitus dan Hipertensi memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat, membiasakan masyarakat untuk olahraga, melakukan pembinaan pada lansia produktif, dan pemeriksaan IVA sebagai deteksi dini kanker serviks. Cara kerja inovasi posbiduan langsingku kesohor adalah kerjasama antara lintas sektoral kepala Desa sewilayah UPT Puskesmas Airgegas dan Dokter, Perawat, Bidan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, dan Sanitarian dalam membantu pemeriksaan kesehatan dan memberikan penyuluhan kesehatan dan Permasalahan yang dihadapi adalah kendala jarak Puskesmas dari Desa/Dusun terutama bagi penderita dengan kondisi fisik lemah dan Lansia, minimnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan, para lansia yang kurang menggerakkan tubuh, banyaknya kasus penyakit kanker serviks yang tidak terdeteksi dini untuk datang memeriksakan diri ke Puskesmas dan banyak daerah dusun yang lebih memilih pengobatan sendiri.

Posbiduan Langsingku KesoHOR merupakan suatu inovasi dalam memberikan pelayanan kesehatan secara langsung ke masyarakat secara terpadu. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu diawali dengan senam sehat, penyuluhan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan. Posbiduan Langsingku KesoHOR yaitu salah satu upaya peningkatan angka kunjungan masyarakat ke Posbindu yang kurang. Setelah adanya puskesmas keliling, akupresur dan kesehatan olahraga dengan paket lengkap membuat masyarakat bisa antusias datang ke Posbindu. Hal ini menunjukkan suatu perubahan karena dapat mencapai target sasaran dalam menarik minat masyarakat untuk berkunjung memeriksakan kesehatan, peduli dengan kesehatan dan pola hidup sehat, deteksi dini kanker serviks, dan pelayanan bagi Lansia.

Posbiduan Langsingku KesoHOR telah dievaluasi oleh pihak intern puskesmas melalui rapat loka karya mini lintas program, yaitu meningkatkan capaian program UPT Puskesmas Airgegas. Dan tidak hanya itu evaluasi dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bahwa Pemegang program PTM UPT Puskesmas Airgegas mendapat penghargaan sebagai pemegang program capaian terbanyak selama tahun 2019 yaitu sebagai peringkat ke-II Se-Kabupaten Bangka Selatan dan penghargaan atas peran serta masyarakat secara aktif dalam kegiatan Deteksi Dini dan edukasi pencegahan Penyakit Tidak Menular di Posyandu Asoka Desa Bencah Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan dan penghargaan atas partisipasi inovasi "Posbiduan Langsingku KesoHOR" Top 9 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Kepulauan Bangka



Belitung.

Indikator evaluasi yang digunakan yaitu 12 indikator SPM bidang kesehatan yaitu jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib diperoleh oleh masyarakat dari Puskesmas antara lain adalah mencakup Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Pelayanan Kesehatan Balita, Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar, Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif, Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut, Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi, Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus, Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat, Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis dan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV.

- a) Deteksi penyakit Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan pada Tahun 2018 sebanyak 103,60 persen dan dengan adanya Posbiduan Langsingku Kesohor meningkat pada tahun 2019 sebanyak 107,10 persen dan tahun 2020 sebanyak 101,3 persen.
- b) Deteksi penyakit hipertensi bagi masyarakat sebanyak 85,90 persen pada tahun 2019, yang sebelumnya kalau hanya untuk memeriksakan hipertensi ke Puskesmas masyarakat merasa malas datang.
- c) Pemeriksaan IVA pada tahun 2019 sebanyak 70 persen, yang sebelumnya hanya 40 persen untuk memeriksakan secara mandiri ke Puskesmas pada Tahun 2018, dan pada tahun 2020 grafik pemeriksaan IVA menurun dikarenakan *covid-19* sehingga capaian IVA tahun 2020 sebanyak 31,49 persen.

- d) Pembinaan terhadap Lansia sebanyak 1.046

Pelayanan Posbiduan Langsingku Kesohor selama *covid-19* harus berhenti selama 3 bulan karena menghindari kerumunan, sehingga pelayanan posbindu dimulai bulan enam oleh karena itu untuk pelayanan posbindu harus mematuhi protokol kesehatan yang ada dengan memakai masker, sebelum masuk ke dalam gedung harus di screening kesehatan dengan di cek suhu, Cuci tangan pakai sabun dan menjaga jarak selama pelayanan posbindu, begitupun dengan petugas kesehatan harus memakai Alat Pelindung Diri (APD) selama pelayanan Posbindu demi mencegah penularan *covid-19*.

Sedangkan tahun 2022, Inovasi Mama Papah (Mari Menabung Pakai Sampah) dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Selatan dan Inovasi Yuk Krio (Yuk Konsultasi di Rumah Sakit mengenai Informasi Kesehatan Secara Online) dari Rumah Sakit Umum Kriopanting Kabupaten Bangka Selatan masuk dalam *TOP FIVE* Inovasi terbaik se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



2. Inovasi Mama Papah (*Mari Menabung Pakai Sampah*)

Inovasi Mama Papah (*Mari menabung Pakai Sampah*) dikembangkan sebagai branding Baru Dinas Lingkungan Hidup dalam peningkatan kapasitas Lingkungan hidup karena selama ini jika hanya menunggu kesadaran dari masyarakat tanpa didasari memberikan contoh maka tidak optimal untuk itu DLH Kabupaten Bangka Selatan mulai berbenah dengan membuka Bank Sampah DLH sebagai wadah untuk penampungan sampah bernilai jual, sehingga pihak nasabah bank sampah atau target sasaran seperti pegawai, masyarakat dan komunitas mulai memilah sampah dan menabung di Bank Sampah DLH yang dibuka setiap hari Jumat dan juga Melalui program DLH Masuk Desa untuk mendampingi langsung Masyarakat di Desa mengenai penanganan sampah.

10 truk belum cukup mampu mengatasi atau mengangkut sampah di Kabupaten Bangka Selatan khususnya Kota Toboali maka dari itu dengan bersinergi mempromosikan Mama Papah mengajak seluruh elemen untuk mulai aktif memilah sampah dan menjadikan sampah tersebut materi berupa uang yang disetor dengan rincian harga sesuai kriteria mulai dari 200 perak s.d 15.000 bahkan sampah dedaunan juga laku dijual untuk dijadikan bahan baku pembuatan pupuk organik/kompos Mama Papah menaungi beberapa kegiatan lain seperti DLH Masuk Desa, Harang Maggot, Beton Residu, Satgas Layanan Sampah, Kasek.id, serta kegiatan lain yang berdampak untuk pengurangan timbulan Sampah sebesar 30 persen dan 70 persen penanganan di tahun 2025. Bangka Selatan memiliki 8 Kecamatan dengan 6 Kecamatan wilayah daratan dan 2 wilayah di Kepulauan, dengan Jumlah Penduduk 202.391 jiwa menghasilkan sampah sebesar 32.901 ton/tahun yang hanya mampu diangkut dengan kapasitas 10 Truk/hari, sedangkan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) hanya ada 1 di Kabupaten Bangka Selatan yaitu TPA Junjung Besaoh. Keterbatasan Sarana dan Prasarana tersebut yang menyebabkan sulit nya Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan mengatasi permasalahan sampah khususnya di wilayah IbuKota Kabupaten yaitu Kota Toboali.

Banyak masyarakat, pemerintah Desa dan pihak lainnya berharap layanan pengangkutan sampah adanya peningkatan yang selama ini hanya jalan yang umum dilalui sedangkan gang- gang belum tersentuh layanan angkut sampah. Begitu juga pihak sekolah, pemilik usaha seperti warung makan, cafe , kedai dan lapak lapak jajanan belum tersentuh untuk saling bersinergi secara bersama-sama melakukan pengelolaan sampah. Adanya tuntutan dan keluhan masyarakat itulah Inovasi Mama Papah (*Mari Menabung Pakai Sampah*) digagas, diinisiasi dan diterapkan baik di internal Lingkungan Pemerintah Daerah, ke seluruh desa, sekolah dan masyarakat. Mama Papah merupakan pergantian dari Inovasi yang sama dengan sebelumnya yaitu Terasi (*Teladan Rapi dan Bersih*) yang kegiatan dan bentuknya sama seperti pengelolaan sampah, menabung sampah, produksi barang bernilai



dari sampah dll, hanya ada bentuk target, sasaran dan tujuan baru yang lebih terintegrasi berkelanjutan.

Inovasi Mama Papah bertujuan mengajak seluruh elemen untuk mulai peduli terhadap permasalahan sampah yang dimulai dari sesi Internal terlebih dahulu, sebelum Mengajak masyarakat untuk mengelola sampah maka pihak Dinas Lingkungan hidup terlebih dahulu memberi contoh, di dalam branding Mama Papah terdapat beberapa kegiatan yaitu :

1. Bank Sampah De El Ha
2. Harang Maggot
3. DLH Masuk Desa
4. Lomba Kebersihan Kantor setiap 3 bulan (Makasih Santri)
5. Donor Sampah (Sedekah Sampah bekerjasama dengan BAZNAS)
6. DLH Goes To School
7. Beton Residu
8. Sargas Layanan Sampah (Satgas dalam Pengaduan Permasalahan Sampah)
9. Kasek.id (aplikasi angkut dan tukar sampah dengan point)
10. Alar Keladi (Agenda Lapangan Rutin Kegiatan di Sekolah Adiwiyata)
11. Bos Timah (Buat Kompos Tiap Rumah)

Inovasi Mama Papah di DLH ini berhasil menyentuh menjadikan kebiasaan-kebiasaan baru Seluruh pegawai yang ada di Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dengan diadakan menabung sampah setiap hari Jumat pada pukul 08.00-11.00 WIB, telah berhasil mengumpulkan sebanyak kurang lebih 5 ton sampah terpilah atau bernilai periode mei 2022 samapai dengan juli 2023. Dan juga telah berhasil menarik minat pihak lainnya untuk ikut membangun Bank Sampah seperti Desa Rias, Desa Kepoh, Desa Tukak, SMP 5 Toboali, Inisiatif Mama Papah menarik munculnya Inovasi dan program program baru DLH serta meraih Kembali Piala Adipura tahun 2022 yang di Provinsi kepulauan Bangka Belitung hanya 2 Kabupaten yang meraih Adipura yaitu Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Selatan. Dengan hadirnya Inovasi Mama Papah membantu mengurangi sampah kurang lebih 0,5 ton / bulan dalam 1 bank sampah de el ha saja dan seandainya 1 Desa memiliki bank Sampah bisa berpotensi mengurangi 25-30 ton/bulan sampah yang bernilai ekonomis seperti plastik, botol, gelas, kertas, koran, kardus, dll. Tahun 2023 Kabupaten Bangka Selatan diamanahkan pembangunan bank sampah induk melalui dana DAK tahun 2023 sebanyak 850.000.000 dan sudah 80 persen proses pembangunan, yang akan menaungi seluruh Bank Sampah Unit yang ada di Bangka Selatan seterusnya.

Inovasi Mama Papah adalah branding Dinas Lingkungan Hidup bahwa perlunya berbenah untuk menyusun manajemen pengelolaan sampah terutama tingkat internal, agar



munculnya kegiatan kegiatan baru yang tidak hanya bersifat simbolis dan rutinitas. Mama Papah mengajak seluruh stakeholder untuk ikut dalam menabung sampah yang dilaksanakan oleh Dinas lingkungan hidup dengan membuka Bank Sampah DLH buka setiap hari jumat pukul 08.00-11.00, stakeholder yang terdiri dari Internal DLH, Seluruh Pegawai Pemerintah Daerah, Masyarakat sekitar serta pihak Desa (dengan program DLH Masuk Desa mendirikan 1 Desa 1 bank sampah). Untuk Pengelolaan Sampah Organik DLH membudidayakan Maggot dibekas Gudang Parkiran dan APBD 2023 dianggarkan sebesar 70.000.000 untuk rumah maggot karena dalam 1 kilogram maggot menghabiskan 3-5 kilogram sampah dalam sehari, Untuk Sampah Residu seperti plastic dan Styrofoam bekerjasama dengan SMK 1 Toboali Jurusan Bangunan memproduksi Pavingblok dan batako pada tahun 2021, pada 2022 akhir mulai dirancang aplikasi Pengangkutan sampah dan penukaran sampah bernilai oleh pihak pengepul dan masyarakat yaitu Kasek.Id dengan harapan bisa membantu diluar petugas kebersihan, Bangka Selatan memiliki 1 TPA, 1 TPST, 7 TPS 3R, 9 Bank Sampah. pada tahun 2022 Angka Penanganan Sampah menginjak di 21 persen dan pengurangan di 44.38 persen Dari target Jakstranas KLHK pada lampiran Perpres 97 tahun 2017.

Inovasi Mama Papah (Mari Menabung Pakai Sampah) awalnya bernama Terasi yang sudah diimplementasikan sejak 2019 dan inovasi ini sudah go to Internasional dengan ikut bergerak bersama gerakan *Word Cleanup Day*, mengikuti kontes di UGM, serta dalam kongres pemuda indonesia 2020, Mama Papah merupakan kegiatan menabung sampah melalui Bank Sampah DLH yang dibuka 1 minggu 1 kali setiap hari jumat agar tidak mengganggu aktivitas bekerja di lingkungan perkantoran, Bank sampah DLH ini sebagai manajemen induk untuk membentuk Bank Sampah Unit yang nantinya akan mulai dikembangkan 1 Desa 1 Bank sampah sehingga lebih mudah untuk mengurangi timbulan sampah dengan berpotensi 1 orang bisa mngumpulkan 5-10 kilo sampah bernilai/bulan. Inovasi ini bisa bergerak dimana saja baik di dunia pertanian seperti Pembibitan dengan media barang bekas sehingga menambah nilai jual, pembuatan produk biofilter yang menjangkau perputaran ekonomi hingga 10 kali lipat dari harga umum.

Pada tahun 2023 akan didirikan rumah maggot untuk penanganan sampah organik dan bank sampah induk untuk penanganan sampah anorganik serta menaungi seluruh bank sampah di Kabupaten Bangka Selatan dan juga platform Aplikasi KASEK.ID akan menjangkau sampai ke tingkat RT, RW, Sekolah dan UMKM bidang persampahan sehingga akan lebih menarik minat masyarakat dalam memilah sampah. Kelompok sasaran dari Mama Papah adalah Lingkungan perkantoran, seluruh siswa sekolah, seluruh Desa dan anak muda milenial. Dengan adanya sinergitas komunitas pada Tahun 2023 oleh pihak Bappelitbangda Kabupaten Bangka Selatan untuk menyiapkan 1 Dinas minimal 1



komunitas dalam konteks berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari setiap Dinas.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Selatan Hampir Setiap Bulan Meluncurkan Kegiatan-kegiatan dan program Baru untuk menangani permasalahan sampah semenjak berlangsung branding Mama Papah pada Bulan April 2022, dan meluncurkan DLH Masuk Desa pada Juni 2022 untuk mendampingi desa-desa yang sudah dibangun TPS 3R, Juli program Makasih Santri (mari kita bersihkan seputaran Kantor Sendiri), Agustus-September ada kegiatan aksi bersih sampah serentak sedunia, meluncurkan kegiatan budidaya maggot untuk sampah organik, mendirikan beberapa bank sampah unit (Bank Sampah Desa kecoh, Rias, Bangka Kota, Pulau Besar, SMP 5 Toboali dan Bank sampah di sekolah) Meluncurkan program Donor Sampah (yang diletakkan di sekolah, warung, lapangan olahraga, dan fasilitas umum), akhir tahun meluncurkan program Satgas Layanan sampah yang bisa membantu melayani 3-5 M3 sampah/hari dari setiap aduan masyarakat dan membersihkan lebih dari 20 Tumpukan Sampah liar, pada Februari 2023 bertepatan dengan Hari Peduli sampah Nasional DLH basel kembali meluncurkan program DLH Goes To School dengan Kegiatan antara lain (memberikan penyuluhan, memberikan reward, menyerahkan bantuan gerobak, keranjang sebanyak 7 Sekolah yang ada di Kota Toboali, Pada Maret 2023 kembali mengadakan Sosialisasi sekolah adiwiyata kepada 50 calon sekolah adiwiyata, sebelum Ramadhan meluncurkan program Gi Ngeruah (membersihkan Tumpukan sampah Liar) pada saat Ramadhan masih mengeluarkan inovasi seperti Ngabuburid (ngajak ibu Bupati Bersih Kubur dan Masjid) seluruh kegiatan tersebut berhasil membantu mengurangi penumpukan sampah dan berhasil mengubah 1 tempat tumpukan sampah yang luar biasa menjadi calon taman kebun.

Untuk meningkatkan kapasitas Mama Papah perlunya evaluasi dan monitoring yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun eksternal (DLHK Provinsi, BPPW Babel, Bappelitbangda, Bagian Organisasi, dan peserta Magang baik dari tingkat SMK Maupun Universitas dan juga pihak forum wartawan Indonesia hampir setiap bulan selalu mengevaluasi peningkatan program program dari Branding Mama Papah. sumber daya keuangan yang dipergunakan dalam Inovasi ini adalah patungan dari Rekan-rekan DLH Bangka Selatan dalam mengawali pembentukan Bank Sampah dengan membeli buku tabungan, Timbangan, spanduk dan banner. dan pada tahun 2023 dibangunnya Bank Sampah Induk melalui DAK Penugasan Lingkungan hidup berkisar di 850 jutaan, rumah maggot APBD sebesar 70.000.000 dan untuk pembangunan TPS 3R melalui APBN oleh BPPW Babel, sebesar 600 juta/unit yang dibangun sebanyak 4 unit di tahun 2021, 1 unit di tahun 2022.

Sumberdaya manusia meliputi Ide/Gagasan Pegawai DLH Kabupaten Bangka Selatan, di suport oleh Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Kajari Bangka Selatan. Kebijakan dan



pelaksanaan oleh DLH Bangka Selatan dengan melibatkan kurang lebih di atas 500 orang (pengurus bank sampah, pasukan kebersihan, peserta gotong royong pembersihan tumpukan sampah liar serta seluruh nasabah baik di bank sampah DLH maupun bank sampah yang ada di desa-desa) metode yang digunakan yaitu metode memberikan contoh atau tauladan terlebih dahulu dari pihak internal DLH baru kemudian mengajak pihak eksternal untuk mulai mengelola sampah serta menerapkan kolaborasi antar beberapa instansi terkait dan yang memberikan dampak berkembangnya inovasi Mama Papah seperti Baznas, sekolah, UMKM dan pihak-pihak organisasi perempuan seperti PKK, Persit, Dharma wanita dan Bhayangkari.

Ketika seluruh Pegawai DLH baik ASN, maupun Non ASN sudah mulai mau menabung dan memilah sampah serta menabung sampah akan dengan mudah untuk mentransferabilitas kegiatan ini kepada pihak lainnya, sehingga mulai berdatangan beberapa Pegawai dari Instansi Instansi lainnya untuk mau menabung sampah di Bank sampah De eL Ha Bangka Selatan, hal demikian lambat laun akan memberikan dampak positif terhadap pola perilaku terhadap pengelolaan sampah yang dimana sebelumnya ada kemungkinan setiap pegawai di Kabupaten Bangka Selatan masih belum mau mengelola sampah dari rumah khususnya oknum Dinas Lingkungan Hidup itu sendiri. Untuk mendukung capaian neraca Pengelolaan sampah yang tertuang dalam lampiran Jakstrada pada Peraturan Bupati Bangka Selatan nomor 51 tahun 2018 dan mengacu pada Peraturan Presiden nomor 97 tahun 2017 tentang penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dimana target pengurangan sampah sebesar 30 persen dan penanganan sebesar 70 persen pada Tahun 2025. Maka dari itu DLH Bangka Selatan Mulai berbenah dengan menginisiasi beberapa Inovasi yang tergabung di dalam branding Mama Papah yaitu DLH masuk desa (tim DLH masuk desa akan mendampingi, membina serta memasarkan produk desa binaan yang mereplikasi proses pengelolaan sampah sehingga desa tersebut akan mandiri dan setelah mandiri maka tim DLH masuk desa dan berlanjut ke desa lainnya dengan metode pertemuan 1 bulan untuk 1 desa dan 1 minggu 1 x pertemuan) untuk Desa delas cukup 3 x pertemuan sudah bisa mandiri walaupun persentase masih tahap puluhan warga.

Di Kabupaten Bangka Selatan ada 50 desa dan 3 kelurahan dan 8 kecamatan, metode yang diterapkan DLH Bangka Selatan yaitu (1) memulai terlebih dahulu, (2) memberikan contoh, (3) mendampingi dan membina setiap desa minimal 1 desa dalam setiap kecamatan, memasarkan produk mereka serta membantu mereka dalam membuat laporan, brosur, konten, dan mencari pendanaan-pendanaan di luar APBD atau APBN berupa Kompetisi-Kompetisi Bisnis atau pendanaan CSR. Untuk mendukung hal tersebut ada 2 hal yang harus disiapkan oleh pihak DLH yaitu tim (SDM) dan metode (manajemen pengelolaan) yang



dimana siklus pengelolaan sampah harus dimulai pada DLH terlebih dahulu Seperti pengurangan dari sumber, Menabung sampah, sampah organik diolah dengan budidaya Maggot, sampah plastik tak bernilai akan dikelola menjadi Bahan Bangunan berupa Batako, Paving blok yang bekerjasama dengan SMK N 1 Toboali yang telah dipamerkan di acara Babel *Edufair 2021* di kompleks Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan sampah residu akan di masukkan ke dalam Mesin Pirolisis (ini harapan selanjutnya dengan kapasitas mini yang ada di DLH) dengan begitu Ketika siklus sampah habis di tempat maka akan berdampak terhadap sampah terkelola hampir 100 persen.

Pihak DLH telah melakukan Kerjasama dengan SMK N 1 Toboali dalam Pembuatan mesin Pengelolaan sampah, Motor sampah modifikasi serta teknologi sampah menjadi energi sehingga biaya pengelolaan sampah lebih terjangkau dengan produk lokal karya anak Bangka Selatan. Pihak DLH juga melakukan Kerjasama dengan Baznas terkait sedekah sampah dan kedepan pihak DLH akan melakukan Kerjasama dengan seluruh pengepul rongsokan yang diberinama Meraung (Merangkul Pemulung lebih dari 30 pengepul yang ada) bekerjasama dengan komunitas dalam sosialisasi serta menyediakan tong sampah yang cantik dan indah. Untuk Keberlanjutan Sekolah adiwiyata dan pengomposan kami mengeluarkan strategi baru seperti Bos Timah (Buat Kompos Tiap Rumah) dan Alar Keladi (Agenda Lapangan Rutin Kegiatan di Sekolah Adiwiyata).

3. Inovasi Yuk Krio (*Yuk Konsultasi di Rumah Sakit mengenai Informasi Kesehatan Secara Online*)

Dalam rangka mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kecamatan payung pada masa pandemi ini di perlukan suatu pelayanan yang memudahkan masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan yang sesuai dengan protokol kesehatan di masa pandemi covid-19 ini, oleh karena itu Rumah Sakit Pratama Kriopanting menciptakan Inovasi yang bernama Yuk Krio. Kegiatan inovasi Yuk Krio ini untuk memudahkan masyarakat dan lintas sektor mengakses pelayanan yang ada di Rumah Sakit secara terpadu dan terintegrasi. Komunikasi dan koordinasi ini dilakukan secara online. Sebelum ada inovasi ini, jumlah kunjungan pasien tahun 2020 sebanyak 4.533 kunjungan, yang menggunakan inovasi Yuk Krio sebanyak 16 pasien. Jumlah kunjungan pasien tahun 2021 sampai dengan bulan oktober berjumlah 3.628 kunjungan, yang menggunakan inovasi Yuk Krio ada sebanyak 43 kunjungan yang dilakukan tanpa pasien harus datang ke Rumah Sakit. Dari data diatas ada peningkatan penggunaan inovasi Yuk Krio sebanyak 27 kunjungan atau 45,8 persen. Adapun tujuan inovasi ini adalah Untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat agar mudah mengakses pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dari rumah pada masa pandemi. Meningkatkan kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan masyarakat melalui suatu komunikasi dan koordinasi secara online yang baik untuk



mencapai persepsi dan tujuan yang sama dalam masa pandemi *Covid-19* ini; dan dengan adanya inovasi Yuk Krio pasien tidak perlu datang langsung ke Rumah Sakit namun tetap mendapatkan pelayanan yang cepat efektif, efisien dan akuntabel.

Inovasi Yuk Krio (Yuk Konsultasi Di Rumah Sakit Mengenai Informasi Kesehatan Secara Online) selaras dengan katagori kesehatan, yaitu membantu masyarakat mengakses pelayanan dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan secara virtual serta mendapatkan informasi pelayanan kesehatan sedini mungkin terutama dimasa pandemi *covid-19*. Dimana masyarakat tidak harus ke Rumah Sakit Namun bisa mendapatkan pelayanan kesehatan walaupun hanya di rumah saja. Inovasi Yuk Krio tentu sangat berkontribusi dalam capaian nasional *Sustainable Development Goals* (SDG's) yang ketiga, yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Untuk capaian *Sustainable Development Goals* (SDG's) yang ketiga, terdapat 8 sasaran SDG's. Dimana Inovasi Yuk Krio meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan cara melakukan komunikasi atau konsultasi secara online dengan Dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Oleh karena itu inovasi Yuk Krio membantu meningkatkan kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan masyarakat melalui mencapai cakupan kesehatan universal dengan kemudahan akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik. Inovasi Yuk Krio (Yuk Konsultasi Di Rumah Sakit Mengenai Informasi Kesehatan Secara Online) yaitu Melakukan komunikasi atau konsultasi dengan dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis atau tenaga kesehatan lainnya dengan cara menghubungi melalui WhatsApp atau Vidio Call dengan nomor 0822 8953 8638 dan membuat jadwal pertemuan apabila dibutuhkan untuk memastikan tindakan atau pelayanan yang akan dilakukan. Selain itu Yuk Krio berperan dalam pemberian penyuluhan kesehatan berupa media informasi kesehatan yang selalu tampil di status *whatsApp*. Dengan adanya inovasi Yuk Krio dapat membantu masyarakat mendapatkan informasi tentang kesehatan dengan cepat tanpa harus ke rumah sakit. Selain itu keterbatasan waktu dan tenaga medis bukan suatu kendala lagi bagi masyarakat untuk mendapatkan respon singkat terhadap suatu masalah kesehatan, sehingga membantu masyarakat menemukan tanda penyakit lebih dini. Tahapan awal inovasi Yuk Krio melibatkan semua stakeholder di lingkungan Rumah Sakit dan instansi lain. Selanjutnya penguatan SDM melibatkan pengelola inovasi dan dilaksanakan sesuai prosedur inovasi Yuk Krio. Strategi institusional agar inovasi tetap berlanjut berupa Surat Keputusan Direktur nomor : 188.4/020/RSPKP/2021 tentang Penetapan Tim Petugas Promosi Kesehatan dan Pengelolaan Kepuasan Pasien Pada Rumah Sakit Pratama Kriopanting Payung Kabupaten Bangka Selatan serta untuk tenaga medis adalah Surat Perjanjian Kontrak Kerja dari Bupati dan Dinas Kesehatan yang diperpanjang setiap tahunnya.

Strategi sosial berupa dukungan dari pihak Kecamatan, Desa, tim penggerak PKK



Desa dan Puskesmas serta masyarakat luas bisa terus mengupdate informasi kesehatan terkini dan informasi pelayanan yang ada di Rumah Sakit Pratama Kriopanting. Strategi manajerial berupa peningkatan kapasitas tenaga medis dalam mengupdate ilmunya sehingga menjamin informasi dan pelayanan kesehatan yang diberikan kemasyarakat sesuai dengan standar operasional yang berlaku. Evaluasi inovasi Yuk Krio dilakukan secara internal dan eksternal. Evaluasi internal berupa pembahasan dirapat manajemen setiap tiga bulan sekali dimana akan dibahas keberhasilan atau efektifitas inovasi dan hambatan yang mengganggu kelancaran berjalannya inovasi. Evaluasi eksternal berupa kuesioner yang diberikan ke masyarakat (pasien dan/keluarga) untuk mengetahui sejauh mana masyarakat mengakses inovasi Yuk Krio. Kuesioner akan direkap dan akan di bahas di rapat manajemen tiga bulan sekali. Evaluasi inovasi dilakukan setiap tiga bulan sekali di rapat manajemen dengan indikator kinerja yang sudah ditetapkan berupa jadwal pelayanan terbaru, jumlah pesan yang masuk dan jumlah pelayanan yang memanfaatkan inovasi Yuk Krio perbulan.

Hasil evaluasi sebelum diadakan inovasi banyak masyarakat yang belum tahu jadwal pelayanan sehingga tidak mendapatkan pelayanan sesuai yang dibutuhkan, yang berdampak pada kunjungan masyarakat yang ingin berobat berkurang dan di Kotak saran banyak pertanyaan tentang jadwal pelayanan. Hasil evaluasi/output sesudah inovasi dari layanan Yuk Krio berupa jadwal pelayanan terbaru, jadwal vaksinasi serta beberapa informasi kesehatan terkini yang memberikan dampak/outcome yaitu masyarakat sudah tahu jadwal pelayanan sehingga tidak ada lagi masyarakat yang datang ke Rumah Sakit tanpa mendapatkan pelayanan dan masyarakat sudah tahu dengan jadwal vaksin setiap harinya sehingga cakupan vaksinasi meningkat. Tindak lanjut evaluasi bahwa inovasi Yuk Krio memberikan banyak sekali kemudahan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan oleh karena itu harus tetap di jalankan agar terjamin kehidupan yang sehat di masyarakat khususnya di Kecamatan Payung.

Pelaksanaan inovasi di Kabupaten Bangka Selatan dalam gelaran Inovatif Government Award (IGA) dengan Indeks Inovasi Daerah (IID) pada tahun 2023 telah dilaksanakan dengan nilai 45,67 dengan kategori Inovatif, sedangkan Indeks Pengukuran Keuangan Daerah (IPKD) tahun 2023 dengan nilai 82,475 dengan kategori baik, sedangkan untuk Indeks Daya Saing Daerah pada tahun 2022 sebesar 3,18. Mulai tahun 2022 Pengukuran IDSD (Indeks Daya Saing Daerah) dilakukan sendiri oleh BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) dengan menggunakan data sekunder yang didapatkan Kementerian/Lembaga, selain itu perubahan pengukuran terdapat juga pada jumlah indikator yang dihitung dari 97 indikator pada tahun 2021 menjadi 48 indikator di tahun 2022 dengan mengadopsi dari GCI (*Global Competitiveness Index*), Berikut Pembangunan Inovasi Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021-2023

Tabel 2.152

Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021-2023

No	Indikator	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Indeks Inovasi Daerah (IID)	49,68	55,88	45,67
2	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	2,6974	2,65	3,18
3	Indeks Pengukuran Keuangan Daerah (IPKD)	64,8276	83,56	82,475

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Bangka Selatan, 2024

2.4.5. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pada pelaksanaan urusan komunikasi dan informasi saat ini telah memasuki era reformasi artinya masyarakat telah menuntut adanya transparansi dan keterbukaan serta keberpihakan kepada masyarakat khususnya yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan daerah. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah untuk mendukung keterlibatan publik dalam pelaksanaan pembangunan, yang salah satunya adalah fasilitasi informasi publik melalui *website*, media online atau media komunikasi lainnya. Hal ini telah sejalan dengan komitmen Pemerintah terkait dengan pembangunan *e-Government*. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur ketercapaian urusan komunikasi dan informatika adalah melalui indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Indeks SPBE Kabupaten Bangka Selatan tahun 2018-2023 sebagai berikut :

Tabel 2.153
Indeks SPBE Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2018-2023

No	Tahun	Indeks SPBE
1	2018	1,65
2	2019	2,62
3	2020	3,22
4	2021	2,88
5	2022	3,01
6	2023	3,44

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Selatan, 2024

Berdasarkan tabel diatas, indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Kabupaten Bangka Selatan selama 6 (enam) tahun terakhir cenderung meningkat. Pada tahun 2018-2020 terus meningkat dengan masing-masing realisasi pada tahun 2018 yaitu 1,65, tahun 2019 realisasinya 2,62 dan pada tahun 2020 yaitu 3,22. Sementara untuk tahun 2021 terjadi penurunan indeks SPBE 0,34 poin menjadi 2,88 dan kembali naik pada tahun 2022 sebesar 0,13 poin menjadi 3,01 poin. di tahun 2023 terjadi kenaikan kembali sebesar 0,43 poin menjadi 3,44 poin.

Tabel 2.154

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023

No	Nama Instansi	Indeks SPBE	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	3,14	Baik
2	Pemerintah Kabupaten Bangka	2,44	Cukup
3	Pemerintah Kabupaten Belitung	3,11	Baik
4	Pemerintah Kabupaten Bangka Barat	2,61	Baik
5	Pemerintah Kabupaten Tengah	3,72	Sangat Baik
6	Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan	3,44	Baik
7	Pemerintah Kabupaten Belitung Timur	3,56	Sangat Baik
8	Pemerintah Kota Pangkalpinang	2,87	Baik

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Selatan, 2024

Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan untuk tahun 2021 tertinggi di Provinsi Bangka Belitung dengan skala indeks 2,88 dengan predikat baik, dibandingkan dengan tahun sebelumnya memang ada penurunan sebesar sebesar 0,34 poin hal ini dikarenakan adanya perubahan struktur penilaian. Untuk penilaian tahun 2019-2020 menggunakan PermenPANRB No. 5 Tahun 2018 dengan menggunakan penilaian 3 domain, 7 aspek dan 35 indikator, sementara pada tahun 2021 menggunakan PermenPANRB No.59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan menggunakan penilaian 4 domain, 8 aspek dan 47 indikator. Sedangkan untuk tahun 2023 Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan sama dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan skala indeks 3,44 namun pada tahun 2023 ini indeks SPBE yang tertinggi se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah sebesar 3,72 poin.

2.4.6. Indikator Kinerja Statistik

Kebijakan pada urusan statistik diarahkan pada peningkatan ketersediaan data statistik daerah. Ketersediaan data statistik daerah dilakukan melalui kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Data statistik merupakan komponen sekaligus instrumen strategis dalam Pemerintahan, bahkan disebut pula statistik menentukan arah kebijakan pembangunan. Berdasarkan Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 31 mengharuskan perencanaan pembangunan didasarkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data statistik itu bersifat spesifik, terukur, terjangkau, relevan dan ada masa waktunya, sesuai dengan kebutuhan dalam hal penentuan kebijakan Pemerintah Selain itu, statistik juga berguna untuk mengevaluasi dampak kebijakan pembangunan yaitu berupa kinerja dalam waktu yang telah berjalan perlu indikator

kualitatif dan kuantitatif.

Dokumen statistik Kabupaten Bangka Selatan antara lain Buku Kabupaten Bangka Selatan Dalam Angka dan Buku PDRB Kabupaten Bangka Selatan. Berikut adalah capaian indikator kinerja urusan statistik di Kabupaten Bangka Selatan selama kurun waktu 2013-2023 :

Tabel 2.155
Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2013-2023

No.	Tahun	Indikator		
		Ketersediaan Kabupaten Bangka Selatan Dalam Angka	Ketersediaan Buku PDRB Kabupaten Bangka Selatan	Jumlah PD Terintegrasi "Satu Data"
1	2013	Ada	Ada	n/a
2	2014	Ada	Ada	n/a
3	2015	Ada	Ada	n/a
4	2016	Ada	Ada	n/a
5	2017	Ada	Ada	n/a
6	2018	Ada	Ada	29
7	2019	Ada	Ada	29
8	2020	Ada	Ada	28
9	2021	Ada	Ada	28
10	2022	Ada	Ada	31
11	2023	Ada	Ada	32

Sumber : - Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan, 2024
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Selatan, 2024

Selanjutnya kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) merupakan tindaklanjut dari Peraturan Badan Pusat Statistik nomor 3 Tahun 2022 Tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, yang merupakan sarana dalam mendukung Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif dan efisien serta untuk menilai dan mengukur efektivitas penyelenggaraan statistik sektoral. Keluaran dari kegiatan ini berupa Indeks Pembangunan Statistik Sektoral (IPS) yang merupakan tingkat maturitas kegiatan sektoral pada kedua produsen data. Disamping itu hasil IPS juga mencerminkan kedalaman BPS sebagai Pembina statistik sektoral.

Kegiatan EPSS dimulai pada tahun 2022 yang merupakan tahap ujicoba, sedangkan tahun 2023, EPSS secara resmi dilaksanakan untuk pertama kalinya, yang hasilnya menjadi dasar berpijak (*benchmark*) dalam pembinaan statistik sektoral untuk tahun-tahun berikutnya. Berikut Indeks Pembangunan Statistik Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022 dan 2023 :

Tabel 2.156
Indeks Pembangunan Statistik Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022 dan 2023



No	Indikator	Bobot	Tahun	
			2022	2023
1	Prinsip Satu Data Indonesia	28 persen	1,75	1,00
2	Kualitas Data	24 persen	2,41	1,56
3	Proses Bisnis Statistik	19 persen	2,31	1,42
4	Kelembagaan	17 persen	2,26	1,44
5	Statistik Nasional	12 persen	1,89	1,89
Indikator Pembangunan Statistik		100 persen	2,12 (Cukup)	1,40 (Kurang)

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan, 2024

2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

2.5.1. Penjabaran dan Analisis Capaian Indikator Makro Pembangunan



Gambar 2.53
Capaian Indikator Makro Pembangunan Daerah
Kabupaten Bangka Selatan pada Akhir Periode RPJPD Tahun 2005-2022

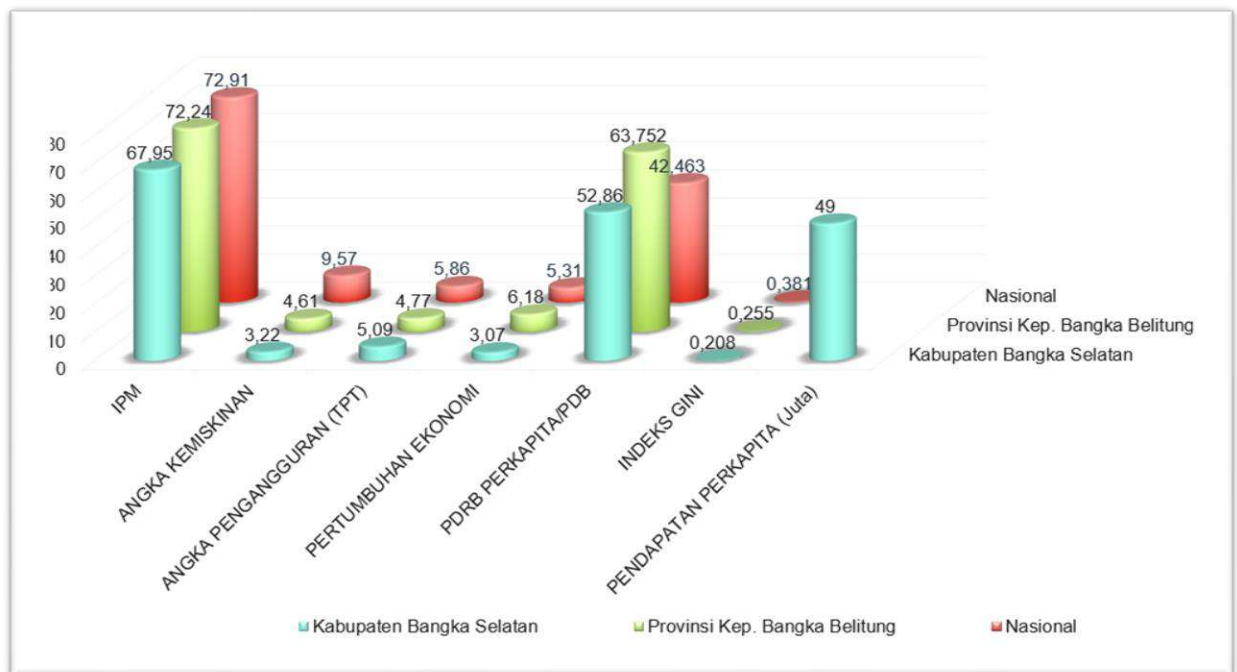
Capaian Kinerja Makro Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bangka Selatan secara umum. Capaian Kinerja Makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah, Pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian Kinerja Makro di Kabupaten Bangka Selatan sampai saat ini (Tahun 2022) diukur dengan menggunakan beberapa indikator kinerja makro, antara lain Indeks



Pembangunan Manusia (IPM), Angka Kemiskinan (Persentase Penduduk Miskin), Angka Pengangguran (Tingkat Pengangguran Terbuka), Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Pendapatan Per Kapita, Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini/*Gini Ratio*) dan PDRB Per Kapita. Untuk data capaian dari masing-masing indikator makro pembangunan Daerah, keseluruhan data bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan merupakan data capaian pada akhir Tahun 2022 yang telah dipublikasi.

Realisasi capaian indikator makro pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Selatan selama periode RPJPD Tahun 2005 sampai dengan saat ini (Tahun 2022) dan perbandingan realisasi capaian indikator makro pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Gambar 2.54
Grafik Capaian Indikator Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional pada Akhir Periode RPJPD Tahun 2005-2022
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan, 2023

Untuk melihat pencapaian dari masing-masing Indikator Kinerja Makro Pembangunan di Kabupaten Bangka Selatan, dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 2.157
Capaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2005-2022

No.	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Awal Periode Perencanaan (2005)	Capaian Pada Tahun Berjalan (2022)	Pertumbuhan / Penurunan (persen)	Keterangan	Rekomendasi
1.	Indeks Pembangunan Manusia	63,02	67,95	7,83	IPM Bangka Selatan perlahan-lahan naik sekitar 4,93 poin pada akhir tahun perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerataan akses pendidikan dengan salah satu strategi yang harus dilakukan untuk meningkatkan angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah adalah dengan mendirikan Perguruan Tinggi di Kabupaten Bangka Selatan; 2. Meningkatkan kualitas hidup dengan pemenuhan dan pemerataan akses kesehatan bagi seluruh masyarakat; 3. Meningkatkan aspek kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kompetensi sehingga meningkatkan daya saing angkatan kerja yang harapannya berpengaruh terhadap semakin baiknya kondisi perekonomian.
2.	Angka Kemiskinan	8,34	3,22	-61,4	Angka kemiskinan terjadi penurunan pada angka sekitar 61,4 persen (turun sekitar 5,12 poin)	Meskipun angka kemiskinan di Kabupaten Bangka Selatan relatif lebih rendah dari Kabupaten/Kota lain di Provinsi Kep. Bangka Belitung, namun Pemkab Bangka Selatan perlu diwaspadai kelompok



No.	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Awal Periode Perencanaan (2005)	Capaian Pada Tahun Berjalan (2022)	Pertumbuhan / Penurunan (persen)	Keterangan	Rekomendasi
						<p>rentan miskin agar tidak memparah tingkat kemiskinan di Bangka Selatan. Adapun beberapa rekomendasi dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bangka Selatan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan intervensi terhadap sektor ekonomi yang memberikan lapangan kerja besar bagi masyarakat dan melakukan upaya untuk menjaga pasar komoditas terbesar; 2. Modernisasi lapangan usaha pertanian yang berfokus menurunkan biaya produksi melalui pemberian bantuan peralatan bagi petani/nelayan, pembangunan infrastruktur pertanian; 3. Menekan inflasi dengan pembangunan sentra produksi pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan dari luar pulau.
3.	Angka Pengangguran	8,10	5,09	-37,16	Angka pengangguran secara perlahan turun pada angka 5,09 atau terjadi penurunan sekitar 37,16 persen (turun sekitar 3,01 poin)	Untuk menurunkan angka pengangguran di Kabupaten Bangka Selatan, pemerintah daerah harus mempersiapkan lapangan kerja yang memadai guna menyerap pertumbuhan angkatan kerja dan



No.	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Awal Periode Perencanaan (2005)	Capaian Pada Tahun Berjalan (2022)	Pertumbuhan / Penurunan (persen)	Keterangan	Rekomendasi
						<p>mengendalikan tingkat pengangguran melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pendidikan untuk memastikan para lulusannya siap bekerja dengan ketrampilan yang dibutuhkan oleh lapangan usaha; 2. Memelihara iklim investasi; 3. Pengembangan sektor pertanian unggulan guna meningkatkan jumlah produksi serta meningkatkan dan menjaga stabilitas harga jual hasil pertanian (salah satunya melalui pembukaan pabrik sawit), mengingat sektor pertanian merupakan penyerap terbesar tenaga kerja; 4. Mengembangkan kawasan industri sebagai bagian dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
4.	Pertumbuhan Ekonomi	5,52	3,07	-44,38	LPE mengalami trend pertumbuhan/penurunan yang fluktuatif. Pada akhir priode perencanaan terjadi penurunan sekitar 44,38 persen dibandingkan awal tahun perencanaan	Pada akhir periode evaluasi RPJPD (2022), LPE Kabupaten Bangka Selatan mengalami trend penurunan yang cukup signifikan. Hal tersebut tidak terlepas dari kondisi perekonomian global pasca pandemi covid 19. Oleh karena itu, dalam



No.	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Awal Periode Perencanaan (2005)	Capaian Pada Tahun Berjalan (2022)	Pertumbuhan / Penurunan (persen)	Keterangan	Rekomendasi
						<p>meningkatkan geliat perekonomian daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan perlu melakukan beberapa upaya antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan iklim investasi; 2. Memperkuat neraca Perdagangan dengan penguatan komoditi lokal; 3. Hilirisasi industri dan meningkatkan produksi sektor unggulan; 4. Transformasi proses perizinan berusaha; 5. Meningkatkan daya saing SDM (tenaga kerja); 6. Pengendalian inflasi.
5.	Pendapatan Per Kapita	n/a	52,86	-	Dengan mempedomani Surat Edaran Nomor 600.2.1/1570/SJ tentang Penyusunan Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 dan arahan Kementerian Dalam Negeri. Indikator ini digantikan dengan indikator PDRB Per Kapita	-
6.	Ketimpangan Pendapatan	0,255	0,208	-7,45	Ketimpangan pendapatan selama priode perencanaan masih terjaga diangka 0,255 sampai 0,236 (terjadi penurunan sekitar 7,45	Salah satu strategi dalam menstabilkan ketimpangan pendapatan di masyarakat adalah dengan penguatan ekonomi lokal



No.	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Awal Periode Perencanaan (2005)	Capaian Pada Tahun Berjalan (2022)	Pertumbuhan / Penurunan (persen)	Keterangan	Rekomendasi
					persen pada akhir tahun perencanaan). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Bangka Selatan cukup stabil/rendah	melalui pengoptimalan potensi sumber daya alam lokal, peningkatan skala usaha petani dan nelayan, peningkatan usaha mikro kecil dan menengah dan pengembangan potensi wisata daerah.
7.	PDRB Per Kapita	24.085.000,00	48.858.000,00	102,85	Secara perlahan PDRB/Kapita menunjukkan trend yang terus meningkat. Jika dibandingkan PDRB/kapita pada tahun awal perencanaan dengan akhir tahun perencanaan terjadi peningkatan diatas 100 persen (sekitar 102,86 persen). Angka ini menunjukkan bahwa PDRB/kapita Bangka Selatan naik sekitar 24,78 Trilyun selama masa priode perencanaan	Struktur PDRB Kabupaten Bangka Selatan masih didominasi oleh jenis lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan serta lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Dalam rangka meningkatkan kondisi perekonomian di Kabupaten Bangka Selatan perlu adanya peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan sebagai salah satu jenis lapangan usaha yang potensial untuk dikembangkan. Disamping meningkatkan kontribusi pada sektor Perdagangan dan jenis lapangan usaha yang berkaitan dengan ekonomi kreatif dan pariwisata.

Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Selatan, 2024



2.5.2. Capaian Standar Pelayanan Minimal

2.5.2.1. Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan

Standar Pelayanan Minimal Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan Pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap peserta didik secara minimal. Untuk melaksanakan SPM Pendidikan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

Berikut pencapaian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2023 :

- 1) Pencapaian SPM Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ditahun 2020 sebanyak 101 persen, kemudian ditahun 2021 sebesar 87,77 persen, selanjutnya di tahun 2022 sebesar 92,93 persen dan di tahun 2023 sebesar 83,08 persen dari orang yang terlayani Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- 2) Pencapaian SPM Pendidikan Dasar ditahun 2020 sebanyak 110,59 persen, kemudian ditahun 2021 sebesar 94,04 persen, selanjutnya di tahun 2022 sebesar 99,27 persen dan untuk tahun 2023 sebesar 94,88 persen penduduk sudah terlayani pendidikan tingkat SD/MI/Sederajat.
- 3) Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Kesetaraan ditahun 2020 sebanyak 12,49 persen, kemudian ditahun 2021 sebesar 7,96 persen, selanjutnya di tahun 2022 sebesar 5,66 persen dan untuk tahun 2023 sebesar 11,55 persen dari penduduk usia 7-18 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di Pendidikan Kesetaraan.

Tabel 2.158
Persentase Capaian SPM Pendidikan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Program Daerah Yang Mendukung	Rumus	Satuan	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD dan SMP)	1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2) Program Pendidikan Anak Usia Dini 3) Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 4) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Jumlah Anak Usia 5-6 Tahun Yang Sudah Tamat Atau Sedang Belajar di PAUD/Jumlah Anak Usia 5-6 Tahun X 100 persen	Persen	101	87,77	92,93	83,08



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Program Daerah Yang Mendukung	Rumus	Satuan	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023
2	Pendidikan Dasar	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD dan SMP)	1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 3) Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 4) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Jumlah Anak Usia 7-12 Tahun Yang Sudah Tamat Atau Sedang Belajar di SD/Jumlah Anak Usia 7-12 Tahun X 100 persen dan Jumlah Anak Usia 13-15 Tahun Yang Sudah Tamat Atau Sedang Belajar di SMP/Jumlah Anak Usia 7-12 Tahun X 100 persen	Persen	110,59	94,04	99,27	94,88
3	Pendidikan Kesetaraan	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD dan SMP)	1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2) Program Pendidikan Non Formal 3) Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 4) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Jumlah Anak Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah Yang Sudah Tamat Atau Sedang Belajar di Pendidikan Kesetaraan/ Jumlah Anak Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah X 100 persen	Persen	12,49	7,96	5,66	11,55

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Selatan, 2024

2.5.2.2. Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan

Standar Pelayanan Minimal Kesehatan merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar. Mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan ditetapkan dalam standar teknis yang terdiri atas :

- standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
- standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan
- petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Pencapaian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Kabupaten Bangka



Selatan Tahun 2020-2022 dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Capaian indikator persentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ditahun 2020 sebanyak 78,05 persen, kemudian ditahun 2021 sebesar 64,44 persen, selanjutnya di tahun 2022 mencapai 82,77 persen dan di tahun 2023 mencapai 80,40 persen ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar.
- 2) Capaian indikator persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan kesehatan ditahun 2020 sebanyak 92,47 persen, kemudian ditahun 2021 sebesar 73,96 persen, selanjutnya di tahun 2022 mencapai 89,71 persen dan di tahun 2023 mencapai 97,47 persen ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar.
- 3) Capaian indikator persentase Bayi Baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan kesehatan ditahun 2020 sebanyak 98,10 persen, kemudian ditahun 2021 sebesar 78,71 persen selanjutnya di tahun 2022 mencapai 91,55 persen dan di tahun 2023 mencapai 100 persen bayi usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar.
- 4) Capaian indikator cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar kesehatan ditahun 2020 sebanyak 72,37 persen, kemudian ditahun 2021 sebesar 55,40 persen, selanjutnya di tahun 2022 mencapai 79,78 persen dan di tahun 2023 mencapai 76,50 persen balita usia 12-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1, 2 dan 3.
- 5) Capaian indikator persentase anak pada Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar kesehatan ditahun 2020 sebanyak 89,68 persen, kemudian ditahun 2021 sebesar 79,19 persen, selanjutnya di tahun 2022 mencapai 73,19 persen dan di tahun 2023 mencapai 92,19 persen anak usia pendidikan dasar di Kabupaten Bangka Selatan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
- 6) Capaian indikator persentase warga negara Usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrinning kesehatan sesuai standar kesehatan ditahun 2020 sebanyak 69,02 persen, kemudian ditahun 2021 sebesar 79,91 persen, selanjutnya di tahun 2022 mencapai 82,57 persen dan di tahun 2023 mencapai 93,84 persen penduduk yang mendapatkan pelayanan skrinning kesehatan sesuai standar.
- 7) Capaian indikator persentase warga negara Usia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrinning kesehatan sesuai standar kesehatan ditahun 2020 sebanyak 57,46 persen, kemudian ditahun 2021 sebesar 74,15 persen, selanjutnya di tahun 2022 mencapai 74,15 persen dan di tahun 2023 mencapai 83,55 persen penduduk mendapatkan skrinning kesehatan sesuai standar minimal 1 kali.
- 8) Capaian indikator persentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar kesehatan ditahun 2020 sebanyak 55,63 persen, kemudian ditahun 2021 sebesar 79,09 persen , selanjutnya di tahun 2022 mencapai 84,03 persen dan di tahun 2023



mencapai 98,72 persen penduduk penderita hipertensi tersebut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar kesehatan.

- 9) Capaian indikator persentase Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar kesehatan ditahun 2020 sebanyak 101,33 persen, kemudian ditahun 2021 sebesar 108,14 persen, selanjutnya di tahun 2022 mencapai 105,87 persen dan di tahun 2023 mencapai 100 persen penduduk dari jumlah tersebut yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar.
- 10) Capaian indikator persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar kesehatan ditahun 2020 sebanyak 101,96 persen, kemudian ditahun 2021 sebesar 100 persen, selanjutnya di tahun 2022 mencapai 100 persen dan di tahun 2023 mencapai 92,29 persen ODGJ yang terealisasi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
- 11) Capaian indikator persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar kesehatan ditahun 2020 sebanyak 153,76 persen, kemudian ditahun 2021 sebesar 49,36 persen, selanjutnya di tahun 2022 mencapai 112,05 persen dan di tahun 2023 mencapai 66,30 persen orang yang dilakukan pemeriksaan penunjang; dan
- 12) Capaian indikator persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar kesehatan ditahun 2020 sebanyak 90,18 persen, kemudian ditahun 2021 sebesar 80,11 persen, selanjutnya di tahun 2022 mencapai 95,72 persen dan di tahun 2023 mencapai 100 persen mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

Tabel 2.159
Persentase Capaian SPM Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Program Daerah Yang Mendukung	Rumus	Satuan	Capaian			
						2020	2021	2022	2023
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 4) Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar / Jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kerja X 100 persen	Persen	78,05	64,44	82,77	88,40
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	5) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 6) Program Perbaikan Gizi Masyarakat 7) Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pengendalian	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar / Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja X 100 persen	Persen	92,47	73,96	89,71	97,47
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi	Persentase bayi baru lahir	Program Pengendalian	Jumlah bayi baru lahir	Persen	98,1	78,71	91,55	100



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Program Daerah Yang Mendukung	Rumus	Satuan	Capaian			
						2020	2021	2022	2023
	Baru lahir	mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Penyakit Menular dan Tidak Menular 8) Program Pembangunan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 9) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar / Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja X 100 persen					
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	10) Program Pembangunan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit, Puskesmas/Puskesmas Pembantu	Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar 1 + Jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2 + Balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 3 / Jumlah Balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja X 100 persen	Persen	72,37	55,4	79,78	76,50
5.	pelayanan Kesehatan Pada usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usiapendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar / Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja X 100 persen	Persen	89,68	79,19	73,19	92,19
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia produktif	Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar / Jumlah orang usia 15-59 tahun di wilayah kerja	Persen	69,02	79,91	82,57	93,84



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Program Daerah Yang Mendukung	Rumus	Satuan	Capaian			
						2020	2021	2022	2023
				X 100 persen					
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun Keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali / Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja X 100 persen	Persen	57,46	74,15	74,15	83,55
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita hipertensi	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar		Jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar / Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerja X 100 persen	Persen	55,63	79,09	84,03	98,72
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita diabetes Melitus	Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		Jumlah penderita diabetes mellitus usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar / Jumlah estimasi penderita diabetes mellitus usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerja X 100 persen	Persen	101,33	108,14	105,87	100
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja Kab/Kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar / Jumlah ODGJ	Persen	101,96	100	100	92,29



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Program Daerah Yang Mendukung	Rumus	Satuan	Capaian			
						2020	2021	2022	2023
				berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja X 100 persen					
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar		Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang / Jumlah orang yang terduga TBC pada wilayah kerja X 100 persen	Persen	153,76	49,36	112,05	66,30
12.	Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar		Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar / Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV pada wilayah kerja X 100 persen	Persen	90,18	80,11	95,72	100

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangka Selatan, 2024

2.5.2.3. Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum

Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Standar Mutu Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten/Kota adalah :

- Setiap rumah memiliki minimal satu akses pengolahan air limbah domestik.
- Setiap rumah tangga mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi.

Capaian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2023 sebagai berikut :

- Capaian indikator pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dilihat dari realisasi persentase rumah berakses air bersih ditahun 2020 sebanyak 72,27 persen, kemudian ditahun 2021 sebesar 88,98 persen, selanjutnya di tahun 2022 mencapai 82,40 persen dan di tahun 2023 mencapai 74,73 persen rumah sudah berakses air minum/air bersih.
- Capaian indikator penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik ditahun 2020



sebanyak 80,12 persen, kemudian ditahun 2021 sebesar 88,86 persen, selanjutnya di tahun 2022 mencapai 89,80 persen dan di tahun 2023 mencapai 78,59 persen rumah yang ada di Kabupaten Bangka Selatan, sebanyak 49.287 rumah sudah terlayani sistem air limbah yang memadai baik dengan tangki septic/MCK/ Komunal/SPAL terpusat.

Tabel 2.160
Persentase Capaian SPM Pekerjaan Umum
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Program Daerah Yang Mendukung	Rumus	Satuan	Capaian			
						2020	2021	2022	2023
1.	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase Rumah Tangga Berakses Air Bersih	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi	Jumlah Rumah Tangga Berakses Air Minum / Jumlah Rumah Tangga X 100 persen	Persen	72,27	88,98	82,40	74,73
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Persentase Penduduk Yang Terlayani Sistem Air Limbah Yang Memadai	Program Penataan Kawasan Permukiman	Jumlah Rumah Yang Dilayani (Tangki Septic/ MCK/ Komunal/ SPAL Terpusat / Jumlah Rumah X 100 persen	Persen	80,12	88,86	89,80	78,59

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Selatan, 2024

2.5.2.4. Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, yang menyebutkan jenis pelayanan dasar pada SPM Perumahan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yaitu :

- Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota;
- Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Tabel 2.161
Persentase Capaian SPM Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Program Daerah Yang Mendukung	Rumus	Satuan	Capaian			
						2020	2021	2022	2023
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana daerah Kabupaten	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Rumah Rusak yang akan di tangani dalam dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi / Jumlah Rumah Tangga Korban Bencana yang memenuhi kriteria X 100 persen	Persen	0	0	0	88,57
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten	Jumlah warganegara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Program Penataan Kawasan Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang terkena relokasi sesuai jumlah rencana fasilitasi dan penyediaan rumah layak huni yang tertangani / Jumlah Rumah tangga yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah yang memenuhi Kriteria X 100 persen	Persen	0	0	0	100

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Selatan, 2024

2.5.2.5. Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Rasa aman dan nyaman sangat dibutuhkan setiap warga negara untuk dapat beraktivitas dengan baik dan lancar setiap hari. Kondisi ini dapat dinikmati jika ketenteraman dan ketertiban suatu wilayah dapat tercipta. Untuk menjamin terciptanya ketenteraman dan ketertiban, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai pedoman bagi Pemerintah daerah untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) diwilayahnya masing-masing sesuai dengan kewenangannya. Standar Teknis Pelayanan Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah ketentuan terkait mutu pelayanan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah



Kabupaten/Kota dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar Layanan Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang berhak diperoleh setiap warga negara Indonesia yang terkena dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Capaian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2022 sebagai berikut :

- 1) Pencapaian indikator persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakkan ditahun 2020 sebanyak 100 persen, kemudian ditahun 2021 sebesar 100 persen, selanjutnya di tahun 2022 mencapai 100 persen dan di tahun 2023 mencapai 77,95 persen pelanggaran ditangani;
- 2) Pencapaian indikator persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana ditahun 2020 sebanyak 95,83 persen, kemudian ditahun 2021 sebesar 96,05 persen, selanjutnya di tahun 2022 mencapai 95,79 persen dan di tahun 2023 mencapai 95,00 persen informasi dapat diselesaikan;
- 3) Pencapaian indikator persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana di Kabupaten Bangka Selatan ditahun 2020 sebanyak 96,43 persen, kemudian ditahun 2021 sebesar 92,76 persen, selanjutnya di tahun 2022 mencapai 92,54 persen dan di tahun 2023 mencapai 84,00 persen layanan terselesaikan;
- 4) Pencapaian indikator persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana ditahun 2020 sebanyak 97,73 persen, kemudian ditahun 2021 sebesar 95,01 persen, selanjutnya di tahun 2022 mencapai 93,51 persen dan di tahun 2023 mencapai 92,00 persen penyelamatan dan evakuasi korban bencana terselesaikan; dan
- 5) Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran di Kabupaten Bangka Selatan ditahun 2020 sebanyak 100 persen, kemudian ditahun 2021 sebesar 100 persen, selanjutnya di tahun 2022 mencapai 100 persen dan di tahun 2023 mencapai 96,67 persen kasus dapat diselesaikan.

Tabel 2.162
Persentase Capaian SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Program Daerah Yang Mendukung	Rumus	Satuan	Capaian			
						2020	2021	2022	2023
1.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	1. Program Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah 2. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Penegakan Tindak Kriminal	Jumlah Pengaduan Yang Ditangani / Jumlah Pengaduan Pelanggaran yang Masuk X 100 persen	Persen	100	100	100	77,95



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Program Daerah Yang Mendukung	Rumus	Satuan	Capaian			
						2020	2021	2022	2023
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Persentase Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	Program Peningkatan Pelayanan Kebakaran dan Penanganan Bencana	Jumlah Penyelesaian Informasi Rawan Bencana / Jumlah pelayanan informasi rawan bencana X 100 persen	Persen	95,83	96,05	95,79	95,00
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Program Peningkatan Pelayanan Kebakaran dan Penanganan Bencana	Jumlah Penyelesaian pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana / Jumlah pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana X 100 persen	Persen	96,43	92,76	92,54	84,00
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Program Peningkatan Pelayanan Kebakaran dan Penanganan Bencana	Jumlah Penyelesaian Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana / Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana X 100 persen	Persen	97,73	95,01	93,51	92,00
5.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Program Peningkatan Pelayanan Kebakaran dan Penanganan Bencana	Jumlah Penyelesaian Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran / Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran X 100 persen	Persen	100	100	100	96,67

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan, 2024

2.5.2.6. Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial

Standar Pelayanan Dasar Bidang Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar. Pencapaian pelaksanaan SPM Urusan Sosial Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2023, sebagai berikut :

- 1) Capaian indikator rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti ditahun 2020 sebanyak 100 persen, kemudian ditahun 2021 sebesar 100 persen, selanjutnya di tahun 2022 mencapai 70 persen dan di tahun 2023 mencapai 96,67 persen penyandang disabilitas terlantar diluar panti yang terpenuhi kebutuhan;
- 2) Capaian indikator anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti ditahun 2020 sebanyak 100 persen, kemudian ditahun 2021 sebesar 100 persen, selanjutnya di



- tahun 2022 mencapai 84 persen dan di tahun 2023 mencapai 91,67 persen anak terlantar diluar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya;
- 3) Capaian indikator warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti, dari jumlah lanjut usia terlantar diluar panti di Kabupaten Bangka Selatan yang membutuhkan rehabilitasi sosial, ditahun 2020 sebanyak 100 persen, kemudian ditahun 2021 sebesar 100 persen, selanjutnya di tahun 2022 mencapai 100 persen dan di tahun 2023 mencapai 92,31 persen orang lanjut usia terlantar diluar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya;
 - 4) Capaian indikator warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti dalam 3 tahun terakhir sebesar 0 persen. Karena tidak ditemukannya warga negara/gelandangan dan pengemis di Kabupaten Bangka Selatan dari Tahun 2020 s.d 2022; sedangkan untuk tahun 2023 sebesar 1,67 persen. dan
 - 5) Capaian indikator warga negara korban bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Daerah ditahun 2020 sebanyak 100 persen, kemudian ditahun 2021 sebesar 100 persen, selanjutnya di tahun 2022 mencapai 100 persen dan di tahun 2023 mencapai 79,30 persen korban bencana alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Tabel 2.163
Persentase Capaian SPM Sosial Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Program Daerah Yang Mendukung	Rumus	Satuan	Capaian			
						2020	2021	2022	2023
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Program Pelayanan Sosial Dan Penanganan PMKS	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti / Jumlah penyandang disabilitas terlantar di daerah Kabupaten yang membutuhkan rehabilitasi dasar di luar panti X 100 persen	Persen	100	100	70	96,67
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Program Pelayanan Sosial Dan Penanganan PMKS	Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti / Jumlah anak terlantar di daerah Kabupaten yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti X 100 persen	Persen	100	100	84	91,67
3.	Rehabilitasi sosial dasar	Persentase Warga Negara lanjut usia	Program Pelayanan	Jumlah lanjut usia terlantar	Persen	100	100	100	92,31



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Program Daerah Yang Mendukung	Rumus	Satuan	Capaian			
						2020	2021	2022	2023
	lanjut usia terlantar diluar panti	terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Sosial Dan Penanganan PMKS	yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti / Jumlah lanjut usia di daerah Kabupaten yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti X 100 persen					
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan Pengemis di luar panti	Persentase Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	Program Pelayanan Sosial Dan Penanganan PMKS	Jumlah gelandangan pengemis terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti / Jumlah gelandangan pengemis di daerah Kabupaten yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti X 100 persen	Persen	0	0	0	1,67
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/Kota	Persentase Warga Negara korban bencana kab/Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Program Pelayanan Sosial Dan Penanganan PMKS	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya / Jumlah korban bencana alam dan sosial di daerah Kabupaten yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana X 100 persen	Persen	100	100	100	79,30

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Selatan, 2024

2.5.3. Evaluasi Capaian Sustainable Development Goals atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGS/TPB)

Pada tanggal 25 September 2015, 193 negara dari Majelis Umum PBB mengadopsi Agenda Pembangunan Pembangunan Berkelanjutan yang akan dicapai pada tahun 2030 ke depan. Program yang diluncurkan meliputi program pembangunan berkelanjutan yang diberi nama (*Sustainable Development Goals (SDGs)*), menggantikan program sebelumnya *Millennium Development Goals (MDGs)* yang selesai pada akhir tahun 2015.



Gambar 2.55
Sustainable Development Goals (SDGs)

Agenda ini mendorong keterlibatan seluruh organisasi dunia untuk terlibat mengatasi entitas permasalahan pembangunan diberbagai negara di dunia. RPJPD Kabupaten Bangka Selatan tahun 2025-2045 sudah menjadikan SDG's/TPB sebagai salah satu referensi pembangunan Kabupaten Bangka Selatan Secara detail, sinkronisasi SDG's dan indikator pembangunan Bangka Selatan tersaji pada tabel berikut :



Tabel 2.164
Capaian SDG's/TPB Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021-2022

NO.	NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE 2021	CAPAIAN 2022
TUJUAN 1. TANPA KEMISKINAN									
1	1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara kurang berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.	1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh Pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	BAPPELIT BANGDA	Persen	31,85	32,83
2	1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara kurang berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.	1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja Pemerintah.	BAPPELITBANG DA	Persen	92,41 Sosial 98,79 Pendidikan 89,63 Kesehatan	83,12 Sosial 98,06 Pendidikan 79,62 Kesehatan
3	1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS	Persen	3,69	3,22
4	1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	DKPPKB	Persen	44,90	44,41
5	1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan	DISNAKERTRANS	Persen	100 (1.444 Orang)	100 (2.072 Orang)



NO.	NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE 2021	CAPAIAN 2022
		Dimanapun	bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.		Sosial Bidang Ketenagakerjaan.				
6	1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	DSPPPA	Persen	0	11,50
7	1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	DSPPPA	Rumah Tangga	2.921	2.466
8	1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	DKPPKB	Persen	0	0
9	1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	DKPPKB	Persen	58,00	64,00



NO.	NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE 2021	CAPAIAN 2022
10	1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	DKPPKB	Persen	76,30	82,30
11	1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	DPUPR	Persen	0,86	0,87
12	1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	DISPERKIM	Persen	88,86	88,86
13	1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	DISDUKCAPIL	Persen	92,49	98,04



NO.	NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE 2021	CAPAIAN 2022
			bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.						
14	1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	DINDIKBUD	Indeks	83,5	83.96
15	1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat	DINDIKBUD	Indeks	58,99	59.33
16	1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	DSPPPA	Persen	0	0
17	1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang,	DSPPPA	Orang	0	0



NO.	NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE 2021	CAPAIAN 2022
		Dimanapun	mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.		dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.				
18	1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	SATPOL PP	Lokasi	0	0
19	1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	DSPPPA	Orang	515	268
20	1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	DSPPPA	Orang	0	0
21	1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	DSPPPA	Lokasi	0	0
22	1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan	1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	SATPOL PP	Indeks	n/a	n/a



NO.	NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE 2021	CAPAIAN 2022
			mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.						
23	1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	SATPOL PP	Rupiah	n/a	n/a
24	1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	SATPOL PP	Dokumen	3	3
TUJUAN 2. TANPA KELAPARAN									
1	2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.1*	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	DPPP	Persen	20,50	32,10
2	2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	DKPPKB	Persen	3,00	2,20
3	2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	DPPP	Persen	11,40	62,26



NO.	NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE 2021	CAPAIAN 2022
4	2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	BPS	Persen	n/a	n/a
5	2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	DKPPKB	Persen	4,50	2,30
6	2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	DKPPKB	Persen	4,70	2,60
7	2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	DKPPKB	Persen	0,60	0,50
8	2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	DKPPKB	Persen	2,95	5,73



NO.	NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE 2021	CAPAIAN 2022
9	2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	DKPPKB	Persen	51,99	53,70
10	2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	DPPP	Persen	76,9	83.1
11	2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	BPS	Persen	n/a	n/a
TUJUAN 3. KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA									
1	3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	DKPPKB	Persen	2,04	1,62
2	3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	DKPPKB	Persen	100	100



NO.	NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE 2021	CAPAIAN 2022
			terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.						
3	3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	DKPPKB	Per 1000 Penduduk	4,06	8,43
4	3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	DKPPKB	Indeks	15	3
5	3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	DKPPKB	Persen	100	80
6	3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	DKPPKB	Persen	0	0
7	3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	DKPPKB	Balita	303	408



NO.	NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE 2021	CAPAIAN 2022
			Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.						
8	3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	DKPPKB	Neonatal	0	1
9	3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	DKPPKB	Bayi	1	1
10	3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	3.2.2.(b)	Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi.	DKPPKB	Persen	100	100
11	3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	DKPPKB	Persen	0	0
12	3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	DKPPKB	Orang	303	408
13	3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	DKPPKB	Kasus	0	0



NO.	NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE 2021	CAPAIAN 2022
14	3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.3.(a)	Jumlah Kabupaten/Kota yang mencapai eliminasi malaria.	DKPPKB	Daerah	1	1
15	3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.4.(a)	Persentase Kecamatan yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	DKPPKB	Persen	100	100
16	3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	DKPPKB	Orang	tidak ada POPM Filariasis Kusta 85 persen	tidak ada POPM Filariasis Kusta 100 persen
17	3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.5.(a)	Jumlah Kecamatan dengan eliminasi Kusta.	DKPPKB	Kecamatan	8	8
18	3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.5.(b)	Jumlah Kecamatan dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	DKPPKB	Kecamatan	belum melakukan survei	belum melakukan survei
19	3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	DKPPKB	Persen	0,99	0,92
20	3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	DKPPKB	Persen	23,82	25,33



NO.	NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE 2021	CAPAIAN 2022
			kesejahteraan.						
21	3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	DKPPKB	Persen	6,92	6,52
22	3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	Polres	kasus	0	2
23	3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.2.(a)	Jumlah Kecamatan yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	DKPPKB	Kecamatan	1	1
24	3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.	3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	POLRES/BNK	Kasus	0,05	0,04
25	3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.	3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	SATPOL PP	Persen	15	10
26	3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi	DKPPKB	Persen	35.441	34.080



NO.	NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE 2021	CAPAIAN 2022
					metode modern.				
27	3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	DKPPKB	Persen	76,30	82,30
28	3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	DKPPKB	Persen	10,39	9,73
29	3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	DKPPKB	Kelahiran	53,70	53,70
30	3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	DKPPKB	Persen	2,34	2,34
31	3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	DKPPKB	Persen	10,39	9,73
32	3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan,	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup	DKPPKB	Persen	n/a	n/a



NO.	NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE 2021	CAPAIAN 2022
		Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.		asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.				
33	3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	DKPPKB	Persen	40,59	42,58
34	3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.	3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	DKPPKB	Persen	0	0
TUJUAN 4. PENDIDIKAN BERKUALITAS									
1	4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	DINDIKBUD	Persen	99	100
2	4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK,	DINDIKBUD	Persen	41,53	43,11



NO.	NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE 2021	CAPAIAN 2022
		dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.		dan PLB yang bersertifikat pendidik.				
3	4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	DINDIKBUD	Persen	99	100
4	4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	DINDIKBUD	Persen	97,85	100
5	4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	DINDIKBUD	Persen	93,33	100
6	4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	DINDIKBUD	Persen	94,03	99,31
7	4	Menjamin Kualitas	Pada tahun 2030, menjamin bahwa	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi	DINDIKBUD	Persen	67,26	91,69



NO.	NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE 2021	CAPAIAN 2022
		Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.		Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat				
8	4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	DINDIKBUD	Rata-Rata	6.71	6.89
9	4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	DINDIKBUD	Persen	87,77	92,22
10	4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	DISKOMINFO	Persen	56,52	73,17
11	4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat ; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi	DINDIKBUD	Persen	83,59	83,96



NO.	NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE 2021	CAPAIAN 2022
					Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.				
12	4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	DINDIKBUD	Persen	7,96	6,62
13	4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	DINDIKBUD	Persen	98,10	98,17
TUJUAN 5 KESETARAAN GENDER									
1	5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	DISKOMINFO	Persen	82,96	94,55
2	5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	DSPPPA	Perda/Perbup	1	1
3	5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk Perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan	DSPPPA	Persen	Fisik = 0,01	Fisik = 0,01



NO.	NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE 2021	CAPAIAN 2022
					terakhir.				
4	5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk Perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	DSPPPA	Persen	0,018	0,020
5	5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk Perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	DSPPPA	Persen	0,040	0,020
6	5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk Perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	DSPPPA	Persen	0,010	0,011
7	5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	DKPPKB	Persen	1,24	1,18
8	5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	DKPPKB	Persen	19	19
9	5	Mencapai Kesetaraan Gender dan	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia	5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan	DKPPKB	Persen	53,70	53,70



NO.	NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE 2021	CAPAIAN 2022
		Memberdayakan Kaum Perempuan	anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.		umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).				
10	5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan Pemerintah daerah.	SETWAN	Persen	0,08	0,08
11	5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	BKPSDMD	Persen	3,70	3,44
12	5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.	5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	DKPPKB	Persen	100	100
13	5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.	5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	DKPPKB	Persen	6,10	6,10
14	5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah	5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia	DKPPKB	Persen	35.441	34.080



NO.	NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE 2021	CAPAIAN 2022
		Perempuan	disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.		Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.				
TUJUAN 6. AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK									
1	6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	DPUPR	Persen	81,41	82,4
2	6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	DPUPR	Prasarana	5 m3/dt	10 m3/dt
3	6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	DPUPR	Persen	15,73	16,48
4	6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	DKPPKB	Persen	100	100
5	6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	DKPPKB	Persen	96,10	98,57



NO.	NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE 2021	CAPAIAN 2022
			perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.						
6	6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(c)	Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	DKPPKB	Desa/Kelurahan	100	100
7	6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(d)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	DKPPKB	Desa/Kelurahan	81,13	81,13
8	6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(e)	Jumlah wilayah yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala Kota, kawasan dan komunal.	DISPERKIM	Wilayah	n/a	n/a
9	6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	DISPERKIM	Persen	n/a	n/a
10	6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi	6.3.1.(a)	Jumlah wilayah yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan	DISPERKIM	Wilayah	n/a	n/a



NO.	NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE 2021	CAPAIAN 2022
			setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.		dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).				
11	6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	DISPERKIM	Persen	n/a	n/a
12	6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.2.(a)	Kualitas air danau.	DLH	Kualitas Air	Memenuhi	Memenuhi
13	6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	DLH	Kualitas Air	60,69 (Baik) Memenuhi	54,76 (Sedang) Memenuhi
14	6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang	6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	DPUPR	Indikator	1	1



NO.	NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE 2021	CAPAIAN 2022
			berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.						
15	6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	DPUPR	RPDAST	2	2
16	6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	DPUPR	Jaringan	5	5
17	6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	DPUPR	Wilayah	0	0
18	6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	DPUPR	Kelembagaan	1	1
TUJUAN 7. ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU									
1	7	Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua	Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.	7.2.1*	Bauran energi terbarukan.	DINAS ESDM PROVINSI	BET	Kewenangan Provinsi	
2	7	Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua	Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.	7.3.1*	Intensitas energi primer.	DINAS ESDM PROVINSI	IEP	Kewenangan Provinsi	
TUJUAN 8. PEKERJAAN YANG LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI									
1	8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDRB per kapita.	BPS	Persen	3,61	3,07



NO.	NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE 2021	CAPAIAN 2022
		Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.						
2	8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	8.1.1.(a)	PDRB per kapita.	BPS	Juta Rupiah	48.868	52.864
3	8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	BPS	Persen	2,46	1,94
4	8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	DISNAKERTRANS	Persen	n/a	n/a
5	8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	DISNAKERTRANS	Persen	23,03	24,5
6	8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi,	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	DISNAKERTRANS	Persen	47,9	39,49



NO.	NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE 2021	CAPAIAN 2022
		Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.						
7	8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	DKUMKMPRIN DAG	Persen	3,33	2,90
8	8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	DISNAKERTRANS	Upah Rata-Rata	Rp. 18.671/Jam	Rp. 18.872/Jam
9	8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	DISNAKERTRANS	Persen	12,23	5,29
10	8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	DISNAKERTRANS	Persen	56,95	50,16
11	8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk	Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	DISNAKERTRANS	Persen	23,57	24,35



NO.	NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE 2021	CAPAIAN 2022
		Semua							
12	8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDRB.	DPKO	Persen	0,56	0,68
13	8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	DPKO	Orang	2	11
14	8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	DPKO	Orang	129.116	130.822
15	8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	DPKO	Juta Rupiah	0,000266	0,001463
16	8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	DPKO	Persen	n/a	n/a
17	8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk	BPS	Kantor dan ATM	n/a	n/a



NO.	NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE 2021	CAPAIAN 2022
		Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.		dewasa				
18	8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	BPS	Km	n/a	n/a
19	8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	DKUMKMPRIN DAG	Persen	3,33	2,90
TUJUAN 9. INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR									
1	9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	DISKOMINFO	Persen	1,14	1,14
2	9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	DISKOMINFO	Persen	n/a	67,65
3	9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	DISKOMINFO	Persen	56,52	73,17
4	9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh,	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan	9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan	DPUPR	Km	n/a	n/a



NO.	NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE 2021	CAPAIAN 2022
		Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.		tol.				
5	9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api.	DPUPR	Km	n/a	n/a
6	9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	DISHUB	Dermaga	1 Dermaga (Sadai)	1 Dermaga (Sadai)
7	9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.	DISHUB	Pelabuhan	1 Pelabuhan (Sadai)	1 Pelabuhan (Sadai)
8	9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan per kapita.	BPS	Persen	5,10	5,49
9	9	Membangun Infrastruktur	Mempromosikan industrialisasi inklusif	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan	BPS	Persen	4,79	7,41



NO.	NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE 2021	CAPAIAN 2022
		yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.		PDB industri manufaktur.				
10	9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	BPS	Persen	28,98	33,62
11	9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	DKUMKMPRIN DAG	Persen	5,10	5,49
12	9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.	9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	DKUMKMPRIN DAG	Persen	n/a	n/a
13	9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.	9.5.1*	Proporsi anggaran riset Pemerintah terhadap PDRB.	BAKUDA	Persen	0,002	0,003
TUJUAN 10. BERKURANGNYA KESENJANGAN									
1	10	Mengurangi Kesenjangan	Pada tahun 2030, secara progresif	10.1.1*	Koefisien Gini.	BPS	Indeks	0,209	0,208



NO.	NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE 2021	CAPAIAN 2022
		Intra- dan Antarnegara	mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40 persen dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.						
2	10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40 persen dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	BAPPELITBANG DA	Persen	2,91	3,07
3	10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40 persen dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	BAPPELITBANG DA	Desa	0	0
4	10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40 persen dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1.(c)	Jumlah Desa tertinggal.	BAPPELITBANG DA	Desa	0	0
5	10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40 persen dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1.(d)	Jumlah Desa mandiri.	BAPPELITBANG DA	Desa	2	3
6	10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40 persen dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	BAPPELITBANG DA	Rata-Rata	n/a	n/a
7	10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk	10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	BAPPELITBANG DA	Persen	n/a	n/a



NO.	NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE 2021	CAPAIAN 2022
			yang berada di bawah 40 persen dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.						
8	10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	BPS	Persen	n/a	n/a
9	10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.	10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.	BPS	Indeks	n/a	n/a
10	10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.	10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	SATPOL PP	Perda/Perbup	80	85
11	10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	DISNAKERTRANS	Persen	100 (1.444 Orang)	100 (2.072 Orang)
TUJUAN 11. KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN									
1	11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah Kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	SATPOL PP	Dokumen	3	3



NO.	NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE 2021	CAPAIAN 2022
			perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.						
2	11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	DISPERKIM	Persen	92,76	93,33
3	11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	11.1.1.(b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	DPUPR	Kawasan	n/a	n/a
4	11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.	11.3.1.(b)	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).	DPUPR	Daerah	n/a	n/a
5	11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.	11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	BAKUDA	Lembaga	0	0
6	11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.	11.4.1.(a)	Jumlah Kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, Kota besar, Kota sedang dan Kota kecil.	DINDIKBUD	Kota Pusaka	0	0
7	11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak	SATPOL PP	Orang	5	10



NO.	NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE 2021	CAPAIAN 2022
			mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.		bencana per 100.000 orang.				
8	11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	SATPOL PP	Indeks	n/a	n/a
9	11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	SATPOL PP	Sistem	30	40
10	11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	DSPPPA	Juta Rupiah	n/a	n/a
11	11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah Kota.	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	DLH	Persen	75,06	75,46
12	11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah Kota.	11.6.1.(b)	Jumlah Kecamatan yang mengembangkan dan menerapkan green waste di	DLH	Kecamatan	0	0



NO.	NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE 2021	CAPAIAN 2022
					kawasan perkotaan				
13	11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.	11.7.1.(a)	Jumlah ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan	DLH	RTH	107,71 Ha	107,71 Ha
TUJUAN 12. KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNGJAWAB									
1	12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	DLH	Timbulan Limbah	0	57,214 Ton
2	12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	DLH	Timbulan Sampah	2.077,38 Ton	4.167,14 Ton
3	12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.	12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	DKUMKMPRIN DAG	Perusahaan	0	0
4	12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	DLH	Produk	1,8 Ton	1,8 Ton
5	12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.	12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	SETDA BAGIAN ORGANISASI	Fasilitas	6	6
TUJUAN 13. PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM BERKELANJUTAN									
1	13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko	SATPOL PP	Dokumen	3	3



NO.	NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE 2021	CAPAIAN 2022
		Iklm dan Dampaknya	dan bencana alam di semua negara.		bencana (PRB) tingkat daerah.				
2	13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklm dan Dampaknya	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	SATPOL PP	Korban	10	15
TUJUAN 14. EKOSISTEM LAUTAN									
1	14	Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera Untuk Pembangunan Berkelanjutan	Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif.	14.2.1 (a)	Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional	DPPP/DKP PROVINSI	PERDA/P ERBUP	Kewenangan Provinsi	
2	14	Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera Untuk Pembangunan Berkelanjutan	Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif.	14.2.1 (b)	Terkelolanya wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan	DPPP/DKP PROVINSI	WPP	Kewenangan Provinsi	
3	14	Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera Untuk Pembangunan Berkelanjutan	Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanen dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya	14.4.1*	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	DPPP/DKP PROVINSI	EKOR	Kewenangan Provinsi	
TUJUAN 15. EKOSISTEM DARAT									
1	15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem	Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	DLH	Persen	37.471,47	37.471,47



NO.	NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE 2021	CAPAIAN 2022
		Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.						
2	15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	DLH	Persen	0,98	0,42
3	15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional.	15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	SETDA BAGIAN HUKUM	Perda/Pe rbup	n/a	n/a
4	15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	DLH	Dokume n	0	0
TUJUAN 16. PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH									
1	16	Menguatkan Masyarakat	Menggalakkan dan menegakkan undang-	16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan	BANKESPOLIN		n/a	n/a



NO.	NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE 2021	CAPAIAN 2022
		yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.		yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	MAS	Perda/Perbup		
2	16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	POLRES	Kasus	1	1
3	16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	POLRES	Kematian	0	0
4	16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	POLRES	Persen	0	6
5	16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat	BANKESPOLIN MAS	Persen	n/a	n/a



NO.	NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE 2021	CAPAIAN 2022
		Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan			tinggalnya.				
6	16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, Perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	DSPPPA	Persen	0	0
7	16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, Perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	DSPPPA	Persen	L = 0,061 P = 0,100	L = 0,020 P = 0,120
8	16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, Perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	DSPPPA	Persen	0	0
9	16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun	Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	DSPPPA	Indeks	n/a	n/a



NO.	NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE 2021	CAPAIAN 2022
		Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan							
10	16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama Pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	BAKUDA	Persen	91,88	94,14
11	16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	BAKUDA	Persen	WTP	WTP
12	16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di semua Tingkatan	Mengembangkan Lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat	16.6.1.(b)	Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	SETDA BAGIAN ORGANISASI	Nilai Sakip	63,98 (Baik)	64,11 (Baik)
13	16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif,	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	DISKOMINFO	Persen	n/a	n/a



NO.	NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE 2021	CAPAIAN 2022
		Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan							
14	16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1.(d)	Persentase instansi Pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota).	SETDA BAGIAN ORGANISASI	Persen	61,19 (Baik)	60,61 (Baik)
15	16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	INSPEKTORAT	Persen	3,37 (Baik) 85,46 (Tinggi)	3,67 (Baik) 82,60 (Tinggi)
16	16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	SETWAN	Persen	0,08	0,08
17	16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	BKPSDMD	Persen	0	0
18	16	Menguatkan Masyarakat	Pada tahun 2030, memberikan identitas	16.9.1*	Proporsi anak umur	DISDUKCAPIL	Persen	98,36	99,59



NO.	NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE 2021	CAPAIAN 2022
		yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.		di bawah 5 tahun yang lahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.				
19	16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40 persen berpendapatan bawah.	DISDUKCAPIL	Persen	39,83	42,95
20	16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	DISDUKCAPIL	Persen	98,36	99,59
21	16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.	16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	DISKOMINFO	Sertifikat PPID	0	0



NO.	NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE 2021	CAPAIAN 2022
TUJUAN 17. KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN									
1	17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1.1*	Total pendapatan Pemerintah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya.	BAKUDA	Persen	1,01	0,94
2	17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB.	BAKUDA	Persen	1,01	0,94
3	17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	BAKUDA	Persen	6,94	6,54
4	17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.	17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Pedesaan.	DISKOMINFO	Persen	n/a	n/a
5	17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara	17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	DISKOMINFO	Persen	1,14	1,14



NO.	NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE 2021	CAPAIAN 2022
			mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.						
6	17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	DISKOMINFO	Persen	56,52	73,17
7	17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.	17.8.1.(a)	Persentase Kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	DISKOMINFO	Persen	n/a	n/a
8	17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	Mendorong dan meningkatkan kerjasama Pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.	17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	SETDA BAGIAN PBJ	Proyek	109	126
9	17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	Mendorong dan meningkatkan kerjasama Pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.	17.17.1.(b)	Jumlah alokasi Pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan Pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	SETDA BAGIAN PBJ	Alokasi	Rp125.307.312.531	Rp131.355.149.067
10	17	Menguatkan Sarana	Pada tahun 2020, meningkatkan	17.18.1.(d)	Persentase	BAPPELITBANG	Persen	68,96	68,96



NO.	NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE 2021	CAPAIAN 2022
		Pelaksanaan dan Mervitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.		indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	DA			
11	17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Mervitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	BPS	Persen	95,58	97,73
12	17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Mervitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	BPS	Persen	90,32	82,86
13	17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas	17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik	BPS	Metadata	2807	2807



NO.	NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE 2021	CAPAIAN 2022
		Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.		dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).				
14	17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	DISDUKCAPIL	Data	n/a	n/a
15	17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	BPS	Persen	96,77	97,14
16	17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	DISKOMINFO	Pengakses	n/a	n/a

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Bangka Selatan, 2023



Dari tabel Tinjauan Status Pencapaian TPB/SDG's di Kabupaten Bangka Selatan ini, dapat dilihat bahwa sebagian besar TPB/SDG's telah memenuhi target, namun ada juga beberapa Tujuan/*Goals* yang belum tercapai, hal ini menjadi tugas besar Pemerintah Daerah agar mampu mencapai target-target yang belum tercapai tersebut. Berikut hal-hal yang bisa di tingkatkan lagi dalam pelaksanaan TPB/SDG's di Kabupaten Bangka Selatan :

1. Pada target tujuan pertama yaitu tanpa Kemiskinan dengan cara meningkatkan kerja bersama dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan lintas daerah terutama untuk daerah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bangka Selatan seperti peningkatan akses di wilayah perbatasan dan Peningkatan validitas, akurasi dan integrasi data kependudukan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial; Data P3KE dan Perlunya inovasi Pemerintah Daerah dalam mengintegrasikan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.
2. Pada target tujuan Kedua yaitu Tanpa Kelaparan, ada beberapa hal yang perlu ditanggulangi (1) konversi lahan pertanian terus berlangsung sementara perluasan/pembukaan lahan pertanian terbatas; (2) degradasi kualitas sumber daya air dan perairan serta meningkatnya persaingan pemanfaatan air untuk penggunaan lain; (3) usaha pertanian pangan didominasi usaha tani skala kecil dengan rata-rata usia petani yang semakin tua (*aging farmer*) dan pendidikan formal yang relatif rendah, yang mengakibatkan akses pada sumber teknologi, informasi, dan pasar juga menjadi rendah; (4) frekuensi dan intensitas kejadian bencana akibat perubahan iklim ekstrim semakin tinggi; (5) proporsi kehilangan hasil dan pemborosan pangan (*food losses and waste*) masih besar; dan (6) rendahnya akses petani terhadap sumber pembiayaan dan kemitraan yang setara antara usaha pertanian skala kecil dan besar masih sangat terbatas.
3. Pada target tujuan Ketiga yaitu Kehidupan Sehat dan Sejahtera, perlunya adanya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, serta kegawatdaruratan termasuk kompetensi sumber daya manusia (SDM), fasilitas yang memadai di dokter keluarga, Puskesmas dan rumah sakit yang telah terakreditasi dengan baik serta peningkatan pendidikan dan promosi kesehatan, termasuk manfaat imunisasi.
4. Pada target tujuan Keempat yaitu Pendidikan Berkualitas, hal-hal yang perlu di perbaiki adalah: (1) Kemampuan peserta didik dalam menganalisis, memprediksi, dan menilai konten, bahasa dan unsur-unsur dalam teks informasional (non-fiksi) dan sastra masih rendah. (2) Pengetahuan bidang studi guru masih sangat terbatas. (3) Aktivasi kognitif dalam proses pembelajaran berupa menciptakan iklim pembelajaran terbuka dengan memberikan instruksi, panduan dan aktivitas yang interaktif pada pembelajaran literasi dan numerasi yang dipraktikkan oleh guru masih bersifat pasif. (4) Upaya peningkatan



kualitas pembelajarannya sporadis hanya untuk sekedar menyelesaikan tugas. Guru menggunakan cara berulang untuk melakukan pembelajaran dan tidak nampak adanya proses reflektif. (5) Guru belum secara intensif mencari referensi pengajaran melalui buku, seminar, diskusi, praktik baik guru lain, dll untuk meningkatkan kualitas pengajaran, sehingga masih perlu ditingkatkan intensitasnya. (6) Proses refleksi untuk peningkatan kualitas yang dilakukan, tidak terbatas ketika terjadi permasalahan, namun belum dilakukan secara rutin dan konsisten.

5. Pada target tujuan Kelima yaitu Kestaraan Gender, hal-hal yang perlu peningkatan adalah: (1) masih adanya nilai budaya/tradisi yang melanggengkan praktik kekerasan; (2) kurangnya pemahaman individu baik laki-laki maupun perempuan, keluarga, masyarakat dan pemangku kepentingan mengenai kekerasan, termasuk Perdagangan orang dan perkawinan anak; (3) belum optimalnya sistem layanan terpadu yang komprehensif dalam pencegahan dan penanganan korban kekerasan; (4) perlunya meningkatkan cakupan dan kualitas data kekerasan; (5) lemahnya kapasitas kelembagaan, perlindungan perempuan di Pusat dan daerah, termasuk pemantauan, evaluasi dan pengawasannya; (6) kurangnya kapasitas aparat penegak hukum dan Pemerintah dalam isu perlindungan perempuan; serta (7) belum optimalnya koordinasi dan kerja sama multi pihak antara Pemerintah (Pusat dan daerah), masyarakat, media massa, dunia usaha dan Lembaga bantuan hukum dalam pencegahan dan penanganan kekerasan.
6. Pada target tujuan Keenam yaitu Air Bersih dan Sanitasi Layak, untuk tujuan ini yang perlu ditingkatkan lagi adalah akses penyediaan air bersih yang masih belum memadai terutama pada jaringan air bersih perpipaan, belum tersedianya cadangan air baku yang sustainable dan dapat diandalkan, kondisi sumber air baku yang tidak terpelihara, akses sanitasi yang cukup tinggi namun kepemilikan jamban yang belum meliputi seluruh masyarakat (Desa/Kelurahan) serta pemeliharaan lingkungan (lahan kritis, DAS dan Danau/Kolong) yang masih belum optimal
7. Pada target tujuan Ketujuh yaitu Energi Bersih dan Terjangkau, berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa “Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi”. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan tidak mempunyai kewenangan dalam penyusunan kebijakan yang terkait dengan sektor energi di wilayahnya. Namun Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dapat secara pro aktif melaksanakan koordinasi dengan berbagai instansi, termasuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk mendorong pembangunan sektor energi di wilayah Kabupaten Bangka Selatan.



8. Pada target tujuan Kedelapan yaitu Pekerjaan Yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi adalah: (1) Mendorong reformasi ekonomi daerah yang mengalami kontraksi akibat pandemi COVID 19. (2) Minimnya peran investasi di sektor agroindustri dan industri hilir pertanian dalam mendorong pertumbuhan Ekonomi. (3) Masih rendahnya akselerasi pembangunan sektor pariwisata daerah sebagai *core bussines* baru dalam perekonomian daerah. (4) Keterkaitan antar sektor perekonomian daerah yang masih rapuh. sehingga berdampak pada kinerja sektor unggulan (sektor basis) yaitu sektor industri pengolahan, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian sebagai sumber pertumbuhan. (5) Sektor UMKM menjadi salah satu sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian akan tetapi belum didukung dengan pembiayaan yang optimal. (6) Masih kurangnya Kualitas Tenaga kerja yang terlatih dan memiliki skill untuk kebutuhan dunia usaha dan ekonomi. (7) Kemudahan Berusaha melalui sistem OSS belum berjalan. (8) Inkonsistensi komitmen bersama dalam penguatan dan kerjasama yang kooperatif antar daerah untuk mengurangi kesenjangan dalam kebijakan perekonomian sehingga mampu menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya tahan terhadap krisis.
9. Pada target tujuan Kesembilan yaitu Industri, Inovasi dan Infrastruktur, hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi adalah: (1) Pembangunan infrastruktur untuk menunjang konektivitas dalam pemerataan pembangunan dan meningkatkan efisiensi ekonomi perlu terus ditingkatkan, yang diperkuat dengan integrasi dari seluruh infrastruktur yang sudah ada. (2) Pembangunan perindustrian memiliki fungsi sebagai mesin pembangunan atau motor penggerak perekonomian. (3) Pertumbuhan industri pengolahan manufaktur perlu ditingkatkan yang didukung oleh produktivitas tenaga kerja, peningkatan investasi, perluasan akses pasar, peningkatan investasi dan pengurangan ketergantungan impor. (4) Peningkatan peran industri kecil perlu diperkuat dengan didukung oleh kemudahan akses pembiayaan (informasi pembiayaan digital), penguasaan teknologi tepat guna dan pasar (ongkos logistik). (5) Peningkatan kerjasama dengan pihak non-Pemerintah perlu diperkuat terkait pendanaan. (6) Peningkatan kapasitas inovasi yang didukung oleh kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai.
10. Pada target tujuan Kesepuluh yaitu Berkurangnya Kesenjangan hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi adalah: (1) Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara diukur melalui Koefisien Gini dan Pertumbuhan Ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum menjadi jaminan bahwa kesenjangan pendapatan akan rendah. (2) Hubungan pertumbuhan ekonomi dengan kesenjangan pendapatan tidak hanya dilihat dari



outcome pada keseimbangan umum suatu perekonomian, namun lebih kepada proses yang mempengaruhi alokasi sumber daya terutama melalui *capital market*, melalui sistem politik dan juga melalui kondisi sosial. (3) masyarakat yang tingkat kesenjangannya tinggi cenderung membuat masyarakat miskin tidak dapat menikmati tingkat pendidikan yang baik, kurang mendapat akses terhadap kredit atau asuransi sehingga tidak dapat memaksimalkan kemampuan potensial produktif yang dimiliki. Untuk menjawab tantangan tersebut, maka strategi utama yang dilakukan lebih ke arah menciptakan stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar dan inklusif berbasis potensi unggulan.

11. Pada target tujuan Kesebelas yaitu Kota dan Pemukiman Berkelanjutan, hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi adalah: (1) Perumahan yang layak dan terjangkau. (2) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah yang dihasilkan dari rumah tangga. (3) Belum memiliki dokumen strategi penanggulangan bencana atau kajian risiko bencana, hal ini menjadi tantangan bagi Instansi Perangkat Daerah yang memegang Program Penanggulangan Bencana dalam hal kebijakan, strategi dan rencana aksi penanggulangan bencana.
12. Pada target tujuan Kedua Belas yaitu Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan, hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi adalah: (1) perusahaan yang belum mengikuti program Proper serta mendorong perusahaan yang mendapat peringkat biru dan merah untuk terus meningkatkan kualitas perusahaannya dan menaikkan peringkat Proper di tahun depan. (2) Pengelolaan dan penanganan sampah di Kabupaten Bangka Selatan belum optimal, mengingat terdapat 5 sumber permasalahan yaitu penambahan penduduk, perubahan pola konsumsi, paradigma dan perilaku masyarakat, tingkat pelayanan sampah yang terbatas serta daya tampung TPA terbatas.
13. Pada target tujuan Ketiga Belas yaitu Perubahan Iklim, hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi adalah: (1) belum optimalnya dukungan masyarakat Kabupaten Bangka Selatan dalam pengurangan risiko bencana. (2) Perilaku masyarakat yang masih belum memperhatikan lingkungan (menjadikan sungai tempat pembuangan sampah, penebangan liar). (3) Meningkatnya kebutuhan lahan baik untuk keperluan pertanian, industri maupun permukiman yang tidak diimbangi dengan pengaturan tata ruang yang berbasis bencana, Pemanasan global, perubahan iklim dan cuaca ekstrem telah mempengaruhi dampak bencana. (4) Kemampuan mitigasi bencana secara umum masih belum memadai, baik mitigasi struktural maupun non struktural. (5) Belum Tersedianya payung hukum Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Pedoman tata kelola penanggulangan bencana mulai dari Pra Bencana, Saat Tanggap Darurat Bencana dan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana. (6) Sarana dan prasarana ataupun



- peralatan penanggulangan bencana yang masih minim. (7) Pengurangan risiko bencana masih mengutamakan paradigma responif belum mencerminkan paradigma preventif.
14. Pada target tujuan Keempat Belas yaitu Ekosistem Laut, sama seperti dengan tujuan ketujuh, tujuan keempat belas ini didasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga semua kebijakan yang berkaitan dengan ekosistem laut hanya menjadi kewenangan Provinsi, namun Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan bisa berkoordinasi untuk meningkatkan lagi: (1) Pemanfaatan wilayah pesisir yang bersinggungan dengan pertambangan laut dimana keberadaan IUP laut yang berdampingan dengan lokasi penangkapan ikan akan menimbulkan konflik dengan nelayan setempat; (2) Pengelolaan perikanan skala kecil perlu pendekatan khusus sebagai konsekuensi dari pemanfaatan wilayah perairan yang multisektor.
 15. Pada target tujuan Kelima Belas yaitu Ekosistem Darat, Kerusakan lingkungan terutama pada ekosistem daratan disebabkan masih terdapatnya pelanggaran hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, seperti penebangan liar, kebakaran hutan dan lahan, penambangan tanpa izin serta penguasaan hutan non prosedural, Sejak Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No 146/MPP/Kep/4/1999 mengenai pencabutan timah sebagai komoditas strategis, kegiatan pertambangan timah cukup masif. Hal ini menjadi tantangan yang cukup serius dalam menjaga kerusakan lingkungan yang pada akhirnya akan berdampak pada kerusakan ekosistem daratan karena kegiatan pertambangan selalu beririsan dengan kerusakan lingkungan. Karena itu perlu di tingkatkan lagi penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan optimalisasi penegakan Perda oleh Aparat Penegak Hukum.
 16. Pada target tujuan Keenam Belas yaitu Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang Tangguh, beberapa hal yang bisa ditingkatkan lagi adalah: (1) Kondisi ekonomi masyarakat yang menurun dalam 3 tahun terakhir merupakan faktor pemicu peningkatan tindak kejahatan kekerasan dengan motif ekonomi bahkan dapat berakibat terjadinya pembunuhan. Selain itu, kondisi ekonomi yang menurun juga harus diwaspadai dapat memicu konflik di masyarakat terutama di wilayah yang merupakan titik pertemuan berbagai kepentingan ekonomi masyarakat seperti wilayah pesisir yang berpotensi terjadinya konflik antara nelayan dengan penambang timah. (2) Ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan Pemerintah Daerah, mengharuskan Pemerintah Daerah terus bertransformasi menjadi lembaga yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan di semua tingkatan. (3) Pemenuhan syarat keterwakilan perempuan minimal 30 persen di lembaga legislatif maupun eksekutif yang

belum mencapai target. (4) Kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan hak dasar yang wajib dimiliki oleh setiap individu. Sementara cakupan penerbitan beberapa dokumen adminduk dan pencatatan sipil masih belum memenuhi target yang ditentukan.

17. Pada target tujuan Ketujuh Belas yaitu Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan, hal-hal yang bisa ditingkatkan adalah dengan memperkuat sarana pelaksanaan dan revitalisasi kemitraan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan sebagai capaian pembangunan berkelanjutan yang membutuhkan perluasan kemitraan global, serta dilengkapi dengan kemitraan multi pihak yang dapat memobilisasi pengetahuan dan keahlian untuk mendukung pencapaian tujuan. target dan capaian kemitraan yang dapat dilakukan antara lain peningkatan kuantitas Kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha dan Swasta serta Perguruan Tinggi.

Sustainable Development Goals atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs/TPB) terdiri dari 4 (empat) Pilar dan 17 Goals/Tujuan untuk Kabupaten Bangka Selatan berjumlah 218 indikator yang terbagi hanya dalam 15 Goals/Tujuan dikarenakan 2 Goals/Tujuan yaitu Energi Bersihkan Terjangkau dan Ekosistem Laut merupakan kewenangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik

2.6.1. Analisis Proyeksi Kependudukan per Lima Tahun dari Tahun 2025-2045

2.6.1.1. Perkembangan Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk merupakan salah satu indikator dalam mengukur peningkatan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu metode untuk mengukur jumlah penduduk adalah dengan Proyeksi penduduk yang merupakan perhitungan ilmiah berdasarkan pada asumsi dari komponen-komponen laju pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan (migrasi). Ketiga komponen tersebut akan menentukan jumlah dan struktur umur penduduk di masa depan. Untuk menentukan masing-masing asumsi diperlukan data yang menggambarkan tren di masa lampau hingga saat ini, faktor-faktor yang mempengaruhi tiap-tiap komponen, dan hubungan antara satu komponen dengan yang lain, termasuk target yang diharapkan dicapai pada masa mendatang. Berikut Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Bangka Selatan dari Tahun 2025-2045.

Tabel 2.165
Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025-2045

Kelompok Umur	Tahun								
	2025			2030			2035		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
0-4	9.212	8.828	18.040	9.047	8.678	17.725	8.785	8.425	17.210
5-9	7.554	7.194	14.748	9.186	8.801	17.987	9.022	8.655	17.677
10-14	8.270	7.912	16.182	7.553	7.177	14.730	9.183	8.784	17.967
15-19	9.057	8.396	17.453	8.250	7.904	16.154	7.536	7.171	14.707
20-24	9.284	8.633	17.917	9.024	8.393	17.417	8.220	7.901	16.121
25-29	9.201	8.701	17.902	9.246	8.628	17.874	8.985	8.391	17.376
30-34	9.120	8.713	17.833	9.137	8.671	17.808	9.180	8.599	17.779
35-39	9.234	8.867	18.101	9.031	8.653	17.684	9.049	8.612	17.661
40-44	8.485	7.945	16.430	9.128	8.791	17.919	8.928	8.586	17.514
45-49	7.574	7.211	14.785	8.337	7.851	16.188	8.974	8.689	17.663
50-54	6.626	6.145	12.771	7.375	7.084	14.459	8.123	7.716	15.839
55-59	5.434	5.030	10.464	6.337	5.976	12.313	7.063	6.902	13.965
60-64	4.193	3.714	7.907	5.047	4.815	9.862	5.897	5.735	11.632
65-69	2.742	2.432	5.174	3.724	3.452	7.176	4.498	4.493	8.991
70-74	1.449	1.397	2.846	2.268	2.138	4.406	3.092	3.063	6.155
75+	1.241	1.320	2.561	1.715	1.904	3.619	2.599	2.902	5.501
Jumlah	108.676	102.438	211.114	114.405	108.916	223.321	119.134	114.624	233.758

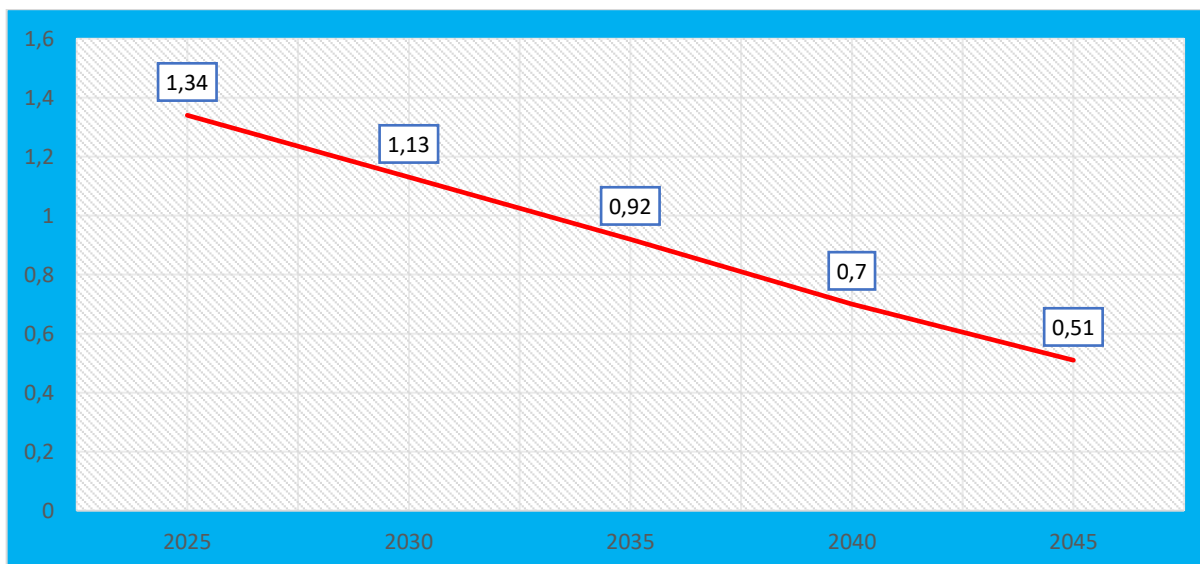
Kelompok Umur	Tahun					
	2040			2045		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
0-4	8.440	8.091	16.531	8.212	7.873	16.085
5-9	8.765	8.401	17.166	8.423	8.069	16.492
10-14	9.020	8.640	17.660	8.762	8.388	17.150
15-19	9.165	8.774	17.939	9.001	8.630	17.631
20-24	7.506	7.168	14.674	9.129	8.775	17.904
25-29	8.189	7.902	16.091	7.478	7.167	14.645
30-34	8.923	8.366	17.289	8.134	7.877	16.011
35-39	9.092	8.545	17.637	8.835	8.313	17.148
40-44	8.949	8.546	17.495	8.990	8.483	17.473



Kelompok Umur	Tahun					
	2040			2045		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
45-49	8.781	8.492	17.273	8.802	8.457	17.259
50-54	8.747	8.547	17.294	8.564	8.359	16.923
55-59	7.788	7.529	15.317	8.395	8.347	16.742
60-64	6.588	6.636	13.224	7.275	7.251	14.526
65-69	5.274	5.374	10.648	5.903	6.233	12.136
70-74	3.756	4.017	7.773	4.417	4.822	9.239
75+	3.733	4.350	8.083	4.864	6.101	10.965
Jumlah	122.716	119.378	242.094	125.184	123.145	248.329

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan, 2023

Dari hasil Proyeksi Penduduk Kabupaten Bangka Selatan diatas dapat kita lihat dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 jumlah total Penduduk Laki-laki selalu lebih banyak dari Perempuan walaupun tidak signifikan, pada tahun 2025 jumlah penduduk Laki-laki sebanyak 108.676 Orang dan perempuan sebanyak 102.438 Orang sedangkan diakhir tahun proyeksi jumlah penduduk Laki-laki sebanyak 125.184 Orang dan 123.145 Orang Perempuan di Tahun 2045.



Gambar 2.56
Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025-2045

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan, 2023

Sedangkan untuk proyeksi Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dari tahun 2025 sampai dengan 2045 Kabupaten Bangka Selatan cenderung menurun. Pada tahun 2025 terjadi kenaikan jumlah penduduk sebanyak 1,34 persen atau sebesar 13.575 orang dari tahun 2020, kemudian pada tahun 2030 Proyeksi Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Bangka Selatan mengalami penurunan dengan angka 1,13 persen atau sebesar 12.207 orang, selanjutnya di tahun 2035 menurun kembali dengan angka 0,92 persen atau sebesar 10.437 orang, selanjutnya di tahun 2040 menurun menjadi 0,70 persen atau sebesar 8.336 orang dan di tahun 2045 kembali menjadi 0,51 persen atau sebanyak 6.235 orang. Bila dihitung rata-rata laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2025 sampai 2045 atau selama 20 tahun Proyeksi Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Bangka Selatan sebesar 0,92 persen atau dalam kategori Laju Pertumbuhan Lambat. Dengan menurunnya angka laju pertumbuhan penduduk, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan telah berhasil melaksanakan program Pemerintah untuk menekan angka pertumbuhan penduduk yang terus meningkat.

2.6.1.2. Distribusi Penduduk

Untuk Proyeksi sebaran Penduduk Kabupaten Bangka Selatan di tahun 2025-2045 yang tersebar di 8 (delapan) wilayah Kecamatan yang terdiri dari 50 (lima puluh) Desa dan 3 (tiga) Kelurahan. Adapun Proyeksi persebaran penduduk di Wilayah Kabupaten Bangka Selatan berdasarkan Kecamatan lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.166
Proyeksi Persebaran Penduduk Per Kecamatan Kabupaten Bangka Selatan 2025-2045

No.	KECAMATAN	TAHUN				
		2025	2030	2035	2040	2045
1	Payung	22.268	23.535	24.598	25.426	26.023
2	Pulau Besar	9.946	10.532	11.043	11.462	11.788
3	Simpang Rimba	25.406	26.892	28.177	29.219	30.015
4	Toboali	82.249	87.020	91.115	94.402	96.877
5	Tukak Sadai	13.622	14.409	15.080	15.615	16.012
6	Airgegas	44.587	47.173	49.393	51.173	52.513
7	Lepar	8.472	8.941	9.323	9.609	9.803
8	Kepulauan Pongok	4.565	4.820	5.029	5.188	5.298
TOTAL		211.114	223.322	233.758	242.094	248.329

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan, 2023

Persebaran penduduk Kabupaten Bangka Selatan dilihat berdasarkan Kecamatan, pada tahun 2025 jumlah penduduk yang paling banyak berada di wilayah Kecamatan Toboali sebagai Ibu Kota Kabupaten Bangka Selatan yaitu sebanyak 82.249 jiwa dengan luas wilayah 1.460,34 km², diikuti Kecamatan Airgegas dengan jumlah penduduk 44.587 jiwa, Kecamatan Simpang Rimba sebanyak 25.406 jiwa, Kecamatan Payung berjumlah 22.268 jiwa, Kecamatan Tukak

Sadai berjumlah 13.622 jiwa, diikuti Kecamatan Pulau Besar sebanyak 9.946 jiwa, Kecamatan Lepar sebanyak 8.472 jiwa dan jumlah penduduk paling sedikit berada di wilayah Kecamatan Kepulauan Pongok dengan jumlah penduduk sebanyak 4.565 jiwa dengan luas wilayah 89,67 km².

Sedangkan pada tahun 2045 jumlah penduduk yang paling banyak berada di wilayah Kecamatan Toboali sebagai Ibu Kota Kabupaten Bangka Selatan yaitu sebanyak 96.877 jiwa, diikuti Kecamatan Aigegas dengan jumlah penduduk 52.513 jiwa, Kecamatan Simpang Rimba sebanyak 30.015 jiwa, Kecamatan Payung berjumlah 26.023 jiwa, Kecamatan Tukak Sadai berjumlah 16.012 jiwa, diikuti Kecamatan Pulau Besar sebanyak 11.788 jiwa, Kecamatan Lepar sebanyak 9.803 jiwa dan jumlah penduduk paling sedikit berada di wilayah Kecamatan Kepulauan Pongok dengan jumlah penduduk sebanyak 5.298 jiwa

2.6.1.3. Bonus Demografi dan Usia Ketergantungan

Jika dilihat dari hasil Proyeksi Jumlah Penduduk, Kabupaten Bangka Selatan mendapatkan Bonus Demografi dengan melimpahnya Sumber Daya Manusia dalam usia produktif yaitu usia dari 15-64 Tahun di dibandingkan dengan usia ketergantungan yaitu usia 0-14 tahun dan 65-75 tahun plus. Tren laju pertumbuhan penduduk selama 20 tahun kedepan akan mengalami perlambatan. Oleh karena itu, komposisi struktur penduduk akan didominasi oleh usia produktif dan terjadi penambahan usia non produktif sehingga piramida penduduk di Kabupaten Bangka Selatan berdasarkan hasil proyeksi penduduk 20 tahun mendatang akan mengarah pada piramida konstruktif (tua) dan Bangka Selatan akan menghadapi bonus demografi dalam 13 tahun yang akan datang. berikut proyeksi perbandingan usia produktif dan usia ketergantungan di Kabupaten Bangka Selatan tahun 2025-2045 :

Tabel 2.167
Proyeksi Perbandingan Usia Produktif dan Usia Ketergantungan
Di Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025-2045

Kelompok Umum	Tahun									
	2025		2030		2035		2040		2045	
	Usia Ketergantungan	Usia Produktif	Usia Ketergantungan	Usia Produktif	Usia Ketergantungan	Usia Produktif	Usia Ketergantungan	Usia Produktif	Usia Ketergantungan	Usia Produktif
Laki-Laki	30.468	78.208	33.493	80.912	37.179	81.955	38.988	83.728	40.581	84.603
Perempuan	29.083	73.355	32.150	76.766	36.322	78.302	38.873	80.505	41.486	81.659
Total	59.551	151.563	65.643	157.678	73.501	160.257	77.861	164.233	82.067	166.262

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan, 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Usia Produktif Penduduk Kabupaten Bangka

Selatan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 sangat tinggi sehingga jumlah penduduk usia yang efektif dan efisien dalam melakukan pekerjaan hingga aktivitas sehari-hari dan banyaknya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dalam membangun Kabupaten Bangka Selatan. Hal ini merupakan Bonus Demografi untuk Kabupaten Bangka Selatan.

Untuk Usia Produktif Penduduk Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 2025 terdapat 78.208 orang Laki-laki dan 73.355 orang perempuan dalam usia produktif, kemudian di tahun 2030 terdapat 80.912 orang Laki-laki dan 76.766 orang perempuan dalam usia produktif, selanjutnya pada tahun 2035 terdapat 81.955 orang Laki-laki dan 78.302 orang perempuan dalam usia produktif, setelah itu pada tahun 2040 terdapat 83.728 orang Laki-laki dan 80.505 orang perempuan dalam usia produktif dan di tahun 2045 terdapat 84.603 orang Laki-laki dan 81.659 orang perempuan dalam usia produktif.

Sedangkan untuk Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 2020 sebesar 39,31 persen. Hal tersebut mengindikasikan beban penduduk usia produktif di Kabupaten Bangka Selatan terhadap penduduk usia non produktif atau pada usia ketergantungan yaitu usia anak-anak (0-14 tahun) dan penduduk usia tua (65-75 tahun plus) masih tergolong tinggi. Jika dilihat dari hasil tabel proyeksi perbandingan usia produktif dan usia ketergantungan di Kabupaten Bangka Selatan tahun 2025-2045, Rasio Ketergantungan Kabupaten Bangka Selatan mengalami penurunan di awal periode RPJPD Kabupaten Bangka Selatan, namun perlahan mulai mengalami kenaikan walaupun masih dibawah Rasio Ketergantungan pada tahun 2020. Berikut Proyeksi Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025-2045 :

Tabel 2.168
Proyeksi Rasio Ketergantungan Penduduk
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025-2045

Tahun	Usia Ketergantungan	Rasio (persen)
2025	59.551	39,31
2030	65.643	41,63
2035	73.501	45,86
2040	77.861	47,41
2045	82.067	49,36

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan, 2023

Pada tahun 2025 usia ketergantungan sebanyak 59.551 orang atau sebesar 39,31 persen, sedangkan di tahun 2030 sebanyak 65.643 orang atau sebesar 41,63 persen, selanjutnya pada tahun 2035 sebanyak 73.501 orang atau sebesar 45,86 persen, kemudian di tahun di tahun 2040

sebanyak 77.861 orang atau sebesar 47,41 persen dan di tahun 2045 sebanyak 82.067 orang atau sebesar 49,36 persen.

2.6.2. Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana per Lima Tahun dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045

2.6.2.1. Analisis Sarana Pelayanan Umum Wilayah

Sarana pelayanan umum berfungsi menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan skala pelayanan yang ditetapkan. Kebutuhan fasilitas sarana pelayanan umum didasarkan pada standar penentuan fasilitas SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan. Perhitungan kebutuhan akan menghasilkan jumlah yang maksimal yang dibutuhkan sesuai dengan jumlah penduduk pendukungnya. Jumlah yang dihasilkan berdasarkan perhitungan standar, sifatnya tidak mengikat dengan pengertian bahwa pengembangan kebutuhan sarana disesuaikan dengan permintaan yang berkembang.

2.6.2.2. Analisis Sarana Perumahan

Berdasarkan UU No 1 Tahun 2011 Pasal 106, penyediaan tanah untuk pembangunan rumah, perumahan, dan kawasan permukiman dapat dilakukan melalui :

1. Pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai negara;
2. Konsolidasi tanah oleh pemilik tanah;
3. Peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah;
4. Pemanfaatan atau pemindah tanganan tanah barang milik negara atau milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar; dan/atau
6. Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebutuhan akan lahan untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dapat diukur berdasarkan pertumbuhan penduduk Kabupaten Bangka Selatan serta faktor lainnya, seperti kebijakan Kota, baik internal maupun eksternal. Tingkat pertumbuhan penduduk merupakan faktor penting yang mempengaruhi kebutuhan akan perumahan, karena penduduk merupakan subjek yang nantinya akan menempati lahan permukiman tersebut. Tingkat pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh beberapa variabel, yaitu :

1. Kebijakan, diperhitungkan apabila terjadi perubahan jumlah penduduk sebagai dampak suatu kebijakan (misal : pemekaran wilayah administratif, kebijakan migrasi, dan lain-lain).
2. Perubahan penduduk natural, dihitung berdasarkan perubahan jumlah penduduk yang lahir dan mati.

3. Migrasi, dihitung berdasarkan jumlah penduduk yang masuk dan keluar Kota.

Proyeksi jumlah kepala keluarga (KK) didasari pada ukuran standar jumlah jiwa dalam rumah tangga di Kabupaten Bangka Selatan, yaitu 5 jiwa pada setiap keluarga. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk dapat diketahui proyeksi kebutuhan rumah dan kebutuhan lahan. Kebutuhan lahan untuk perumahan menggunakan proporsi 1 kavling besar (400 m²), 2 kavling sedang (200 m²) dan 3 kavling kecil (90 m²). Perhitungan tersebut didasari oleh pola pembangunan perumahan Indonesia yang menggunakan asumsi 1:2:3 untuk setiap kavling rumah hunian di Indonesia. Perhitungan kebutuhan lahan perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Bangka Selatan dapat lihat tabel Proyeksi Kebutuhan Lahan Rumah Kabupaten Bangka Selatan per lima tahun sampai dengan tahun 2045.

Berdasarkan hasil analisis proyeksi kebutuhan rumah di Kabupaten Bangka Selatan, kebutuhan rumah yang paling besar berada di Kecamatan Toboali dengan jumlah penduduk terbesar sebanyak 11.625 unit rumah, dimana total kebutuhan penyediaan sarana rumah pada tahun 2045 sebanyak 29.799 unit rumah, sedangkan untuk kebutuhan rumah yang paling rendah berada di Kecamatan Kep. Pongok sebesar 636 unit rumah pada tahun 2045. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel Kebutuhan rumah berikut :

Tabel 2.169
Proyeksi Kebutuhan Rumah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa) 2025	Jumlah KK	Tipe Rumah			mlah
				Besar (Unit)	Sedang (Unit)	Kecil (Unit)	
1	Payung	22,268	4,454	445	891	1,336	2,672
2	Pulau Besar	9,946	1,989	199	398	597	1,193
3	Simpang Rimba	25,406	5,081	508	1,016	1,524	3,049
4	Toboali	82,249	16,450	1,645	3,290	4,935	9,870
5	Tukak Sadai	13,622	2,724	272	545	817	1,635
6	Airgegas	44,587	8,917	892	1,783	2,675	5,350
7	Lepar	8,472	1,694	169	339	508	1,017
8	Kep. Pongok	4,565	913	91	183	274	548
JUMLAH		211,114	42,223	4,222	8,445	12,667	25,334

Sumber : Hasil Analisis, 2024.

Tabel 2.170
Proyeksi Kebutuhan Rumah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2030

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa) 2030	Jumlah KK	Tipe Rumah			Jumlah
				Besar (Unit)	Sedang (Unit)	Kecil (Unit)	
1	Payung	23,535	4,707	471	941	1,412	2,824
2	Pulau Besar	10,532	2,106	211	421	632	1,264
3	Simpang Rimba	26,892	5,378	538	1,076	1,613	3,227
4	Toboali	87,020	17,404	1,740	3,481	5,221	10,442
5	Tukak Sadai	14,409	2,882	288	576	865	1,729



No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa) 2030	Jumlah KK	Tipe Rumah			Jumlah
				Besar (Unit)	Sedang (Unit)	Kecil (Unit)	
6	Airgegas	47,173	9,435	943	1,887	2,830	5,661
7	Lepar	8,941	1,788	179	358	536	1,073
8	Kep. Pongok	4,820	964	96	193	289	578
JUMLAH		223,321	44,664	4,466	8,933	13,399	26,799

Sumber : Hasil Analisis, 2024.

Tabel 2.171
Proyeksi Kebutuhan Rumah
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2035

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa) 2035	Jumlah KK	Tipe Rumah			Jumlah
				Besar (Unit)	Sedang (Unit)	Kecil (Unit)	
1	Payung	24,598	4,920	492	984	1,476	2,952
2	Pulau Besar	11,043	2,209	221	442	663	1,325
3	Simpang Rimba	28,177	5,635	564	1,127	1,691	3,381
4	Toboali	91,115	18,223	1,822	3,645	5,467	10,934
5	Tukak Sadai	15,080	3,016	302	603	905	1,810
6	Airgegas	49,393	9,879	988	1,976	2,964	5,927
7	Lepar	9,323	1,865	186	373	559	1,119
8	Kep. Pongok	5,029	1,006	101	201	302	604
JUMLAH		233,758	46,752	4,675	9,350	14,025	28,051

Sumber : Hasil Analisis, 2024.

Tabel 2.172
Proyeksi Kebutuhan Rumah
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2040

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa) 2040	Jumlah KK	Tipe Rumah			Jumlah
				Besar (Unit)	Sedang (Unit)	Kecil (Unit)	
1	Payung	25,426	5,085	509	1,017	1,526	3,051
2	Pulau Besar	11,462	2,292	229	458	688	1,375
3	Simpang Rimba	29,219	5,844	584	1,169	1,753	3,506
4	Toboali	94,402	18,880	1,888	3,776	5,664	11,328
5	Tukak Sadai	15,615	3,123	312	625	937	1,874
6	Airgegas	51,173	10,235	1,023	2,047	3,070	6,141
7	Lepar	9,609	1,922	192	384	577	1,153
8	Kep. Pongok	5,188	1,038	104	208	311	623
JUMLAH		242,094	48,419	4,842	9,684	14,526	29,051

Sumber : Hasil Analisis, 2024.

Tabel 2.173
Proyeksi Kebutuhan Rumah
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2045

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa) 2045	Jumlah KK	Tipe Rumah			Jumlah
				Besar	Sedang	Kecil	
				(Unit)	(Unit)	(Unit)	
1	Payung	26,023	5,205	520	1,041	1,561	3,123
2	Pulau Besar	11,788	2,358	236	472	707	1,415
3	Simpang Rimba	30,015	6,003	600	1,201	1,801	3,602
4	Toboali	96,877	19,375	1,938	3,875	5,813	11,625
5	Tukak Sadai	16,012	3,202	320	640	961	1,921
6	Airgegas	52,513	10,503	1,050	2,101	3,151	6,302
7	Lepar	9,803	1,961	196	392	588	1,176
8	Kep. Pongok	5,298	1,060	106	212	318	636
JUMLAH		248,329	49,666	4,967	9,933	14,900	29,799

Sumber : Hasil Analisis, 2024.

2.6.2.3. Analisis Sarana Pendidikan

2.6.2.3.1. Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan

Fasilitas pendidikan di Kabupaten Bangka Selatan sudah mampu memenuhi seluruh kebutuhan penduduk, tetapi perlu disesuaikan dengan penambahan penduduk yang semakin meningkat. Adapun perhitungan proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan menurut SNI Nomor 03-1733-2004 :

1. 1 unit SD yang disediakan, diharapkan mampu melayani 1.600 penduduk. Sedangkan luas lahan yang dibutuhkan untuk satu unit SD adalah 2.000 m².
2. 1 unit SMP yang tersedia diharapkan mampu melayani 4.800 penduduk, dengan luas lahan yang dibutuhkan untuk satu unit SMP adalah 9.000 m².
3. 1 unit SMA diharapkan mampu melayani sekitar 4.800 penduduk, dengan luas lahan yang dibutuhkan sebesar 12.500 Ha.

Berikut ini merupakan jumlah kebutuhan fasilitas pendidikan di Kabupaten Bangka Selatan per lima tahun sampai dengan tahun 2045.



Tabel 2.174
Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa) 2025	Jumlah Fasilitas Pendidikan (Unit)					Luas Fasilitas Pendidikan (Ha)					Jumlah Total Kebutuhan Lahan
			TK	SD	SMP	SMA	Perguruan Tinggi	TK	SD	SMP	SMA	Perguruan Tinggi	
			1.000	1.600	4.800	4.800	70.000	0,05	0,20	0,90	1,25	2,00	
1	Payung	22,268	22	14	5	5	0	1.11	2.78	4.18	5.80	0.64	14.51
2	Pulau Besar	9,946	10	6	2	2	0	0.50	1.24	1.86	2.59	0.28	6.48
3	Simpang Rimba	25,406	25	16	5	5	0	1.27	3.18	4.76	6.62	0.73	16.55
4	Toboali	82,249	82	51	17	17	1	4.11	10.28	15.42	21.42	2.35	53.58
5	Tukak Sadai	13,622	14	9	3	3	0	0.68	1.70	2.55	3.55	0.39	8.87
6	Airgegas	44,587	45	28	9	9	1	2.23	5.57	8.36	11.61	1.27	29.05
7	Lepar	8,472	8	5	2	2	0	0.42	1.06	1.59	2.21	0.24	5.52
8	Kep. Pongok	4,565	5	3	1	1	0	0.23	0.57	0.86	1.19	0.13	2.97
JUMLAH		211,114	211	132	44	44	3	10.56	26.39	39.58	54.98	6.03	137.54

Sumber : Hasil Analisis, 2024

Tabel 2.175
Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2030

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa) 2030	Jumlah Fasilitas Pendidikan (Unit)					Luas Fasilitas Pendidikan (Ha)					Jumlah Total Kebutuhan Lahan
			TK	SD	SMP	SMA	Perguruan Tinggi	TK	SD	SMP	SMA	Perguruan Tinggi	
			1.000	1.600	4.800	4.800	70.000	0,05	0,20	0,90	1,25	2,00	
1	Payung	23,535	24	15	5	5	0	1.18	2.94	4.41	6.13	0.67	15.33
2	Pulau Besar	10,532	11	7	2	2	0	0.53	1.32	1.97	2.74	0.30	6.86
3	Simpang Rimba	26,892	27	17	6	6	0	1.34	3.36	5.04	7.00	0.77	17.52
4	Toboali	87,020	87	54	18	18	1	4.35	10.88	16.32	22.66	2.49	56.69
5	Tukak Sadai	14,409	14	9	3	3	0	0.72	1.80	2.70	3.75	0.41	9.39



No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa) 2030	Jumlah Fasilitas Pendidikan (Unit)					Luas Fasilitas Pendidikan (Ha)					Jumlah Total Kebutuhan Lahan
			TK	SD	SMP	SMA	Perguruan Tinggi	TK	SD	SMP	SMA	Perguruan Tinggi	
			1.000	1.600	4.800	4.800	70.000	0,05	0,20	0,90	1,25	2,00	
6	Airgegas	47,173	47	29	10	10	1	2.36	5.90	8.85	12.28	1.35	30.73
7	Lepar	8,941	9	6	2	2	0	0.45	1.12	1.68	2.33	0.26	5.82
8	Kep. Pongok	4,820	5	3	1	1	0	0.24	0.60	0.90	1.26	0.14	3.14
JUMLAH		223,321	223	140	47	47	3	1.17	27.92	41.87	58.16	6.38	145.49

Sumber : Hasil Analisis, 2024

Tabel 2.176
Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2035

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa) 2035	Jumlah Fasilitas Pendidikan (Unit)					Luas Fasilitas Pendidikan (Ha)					Jumlah Total Kebutuhan Lahan
			TK	SD	SMP	SMA	Perguruan Tinggi	TK	SD	SMP	SMA	Perguruan Tinggi	
			1.000	1.600	4.800	4.800	70.000	0,05	0,20	0,90	1,25	2,00	
1	Payung	23,535	24	15	5	5	0	1.18	2.94	4.41	6.13	0.67	15.33
2	Pulau Besar	10,532	11	7	2	2	0	0.53	1.32	1.97	2.74	0.30	6.86
3	Simpang Rimba	26,892	27	17	6	6	0	1.34	3.36	5.04	7.00	0.77	17.52
4	Toboali	87,020	87	54	18	18	1	4.35	0.88	6.32	22.66	2.49	56.69
5	Tukak Sadai	14,409	14	9	3	3	0	0.72	1.80	2.70	3.75	0.41	9.39
6	Airgegas	47,173	47	29	10	10	1	2.36	5.90	8.85	12.28	1.35	30.73
7	Lepar	8,941	9	6	2	2	0	0.45	1.12	1.68	2.33	0.26	5.82
8	Kep. Pongok	4,820	5	3	1	1	0	0.24	0.60	0.90	1.26	0.14	3.14
JUMLAH		223,321	223	140	47	47	3	1.17	7.92	1.87	58.16	6.38	145.49

Sumber : Hasil Analisis, 2024



Tabel 2.177
Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2040

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa) 2040	Jumlah Fasilitas Pendidikan (Unit)					Luas Fasilitas Pendidikan (Ha)					Jumlah Total Kebutuhan Lahan
			TK	SD	SMP	SMA	Perguruan Tinggi	TK	SD	SMP	SMA	Perguruan Tinggi	
			1.000	1.600	4.800	4.800	70.000	0,05	0,20	0,90	1,25	2,00	
1	Payung	25,426	25	16	5	5	0	1.27	3.18	4.77	6.62	0.73	16.56
2	Pulau Besar	11,462	11	7	2	2	0	0.57	1.43	2.15	2.98	0.33	7.47
3	Simpang Rimba	29,219	29	18	6	6	0	1.46	3.65	5.48	7.61	0.83	19.04
4	Toboali	94,402	94	59	20	20	1	4.72	1.80	7.70	24.58	2.70	61.50
5	Tukak Sadai	15,615	16	10	3	3	0	0.78	1.95	2.93	4.07	0.45	10.17
6	Airgegas	51,173	51	32	11	11	1	2.56	6.40	9.59	13.33	1.46	33.34
7	Lepar	9,609	10	6	2	2	0	0.48	1.20	1.80	2.50	0.27	6.26
8	Kep. Pongok	5,188	5	3	1	1	0	0.26	0.65	0.97	1.35	0.15	3.38
JUMLAH		242,094	242	151	50	50	3	2.10	0.26	5.39	63.05	6.92	157.72

Sumber : Hasil Analisis, 2024

Tabel 2.178
Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2045

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa) 2045	Jumlah Fasilitas Pendidikan (Unit)					Luas Fasilitas Pendidikan (Ha)					Jumlah Total Kebutuhan Lahan
			TK	SD	SMP	SMA	Perguruan Tinggi	TK	SD	SMP	SMA	Perguruan Tinggi	
			1.000	1.600	4.800	4.800	70.000	0,05	0,20	0,90	1,25	2,00	
1	Payung	26,023	26	16	5	5	0	1.30	3.25	4.88	6.78	0.74	16.95
2	Pulau Besar	11,788	12	7	2	2	0	0.59	1.47	2.21	3.07	0.34	7.68
3	Simpang Rimba	30,015	30	19	6	6	0	1.50	3.75	5.63	7.82	0.86	19.55
4	Toboali	96,877	97	61	20	20	1	4.84	2.11	8.16	25.23	2.77	63.11



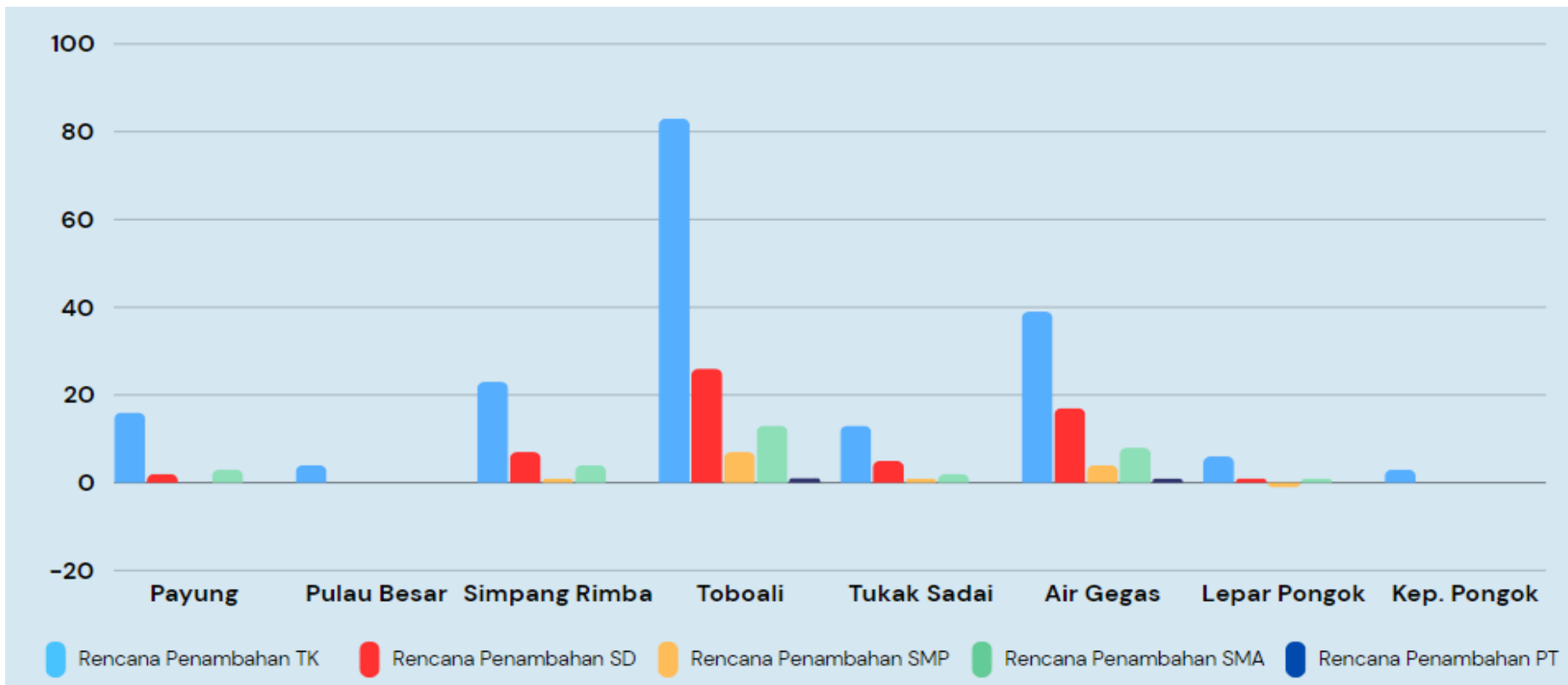
No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa) 2045	Jumlah Fasilitas Pendidikan (Unit)					Luas Fasilitas Pendidikan (Ha)					Jumlah Total Kebutuhan Lahan
			TK 1.000	SD 1.600	SMP 4.800	SMA 4.800	Perguruan Tinggi 70.000	TK 0,05	SD 0,20	SMP 0,90	SMA 1,25	Perguruan Tinggi 2,00	
5	Tukak Sadai	16,012	16	10	3	3	0	0.80	2.00	3.00	4.17	0.46	10.43
6	Airgegas	52,513	53	33	11	11	1	2.63	6.56	9.85	13.68	1.50	34.21
7	Lepar	9,803	10	6	2	2	0	0.49	1.23	1.84	2.55	0.28	6.39
8	Kep. Pongok	5,298	5	3	1	1	0	0.26	0.66	0.99	1.38	0.15	3.45
JUMLAH		248,329	248	155	52	52	4	2.42	1.04	6.56	64.67	7.10	161.78

Sumber : Hasil Analisis, 2024

Tabel 2.179
Analisis Perbandingan Kebutuhan Sarana Pendidikan Kabupaten Bangka Selatan

No	Kecamatan	Eksisting Fasilitas Pendidikan (Unit)					Analisis Fasilitas Pendidikan (Unit)					Rencana Penambahan					Jumlah
		TK	SD	SMP	SMA	PT	TK	SD	SMP	SMA	PT	TK	SD	SMP	SMA	PT	
1	Payung	10	14	5	2	0	26	16	5	5	0	16	2	0	3	0	21
2	Pulau Besar	8	7	2	2	0	12	7	2	2	0	4	0	0	0	0	3
3	Simpang Rimba	7	12	5	2	0	30	19	6	6	0	23	7	1	4	0	33
4	Toboali	14	35	13	7	0	97	61	20	20	1	83	26	7	13	1	126
5	Tukak Sadai	3	5	2	1	0	16	10	3	3	0	13	5	1	2	0	21
6	Airgegas	14	16	7	3	0	53	33	11	11	1	39	17	4	8	1	66
7	Lepar	4	5	3	1	0	10	6	2	2	0	6	1	0	1	0	7
8	Kep. Pongok	2	3	1	1	0	5	3	1	1	0	3	0	0	0	0	3
JUMLAH		62	97	38	19	0	248	155	52	52	4	186	58	15	33	4	280

Sumber : Hasil Analisis, 2024



Gambar 2.57
Grafik Penambahan Kebutuhan Sarana Pendidikan Kabupaten Bangka Selatan
Sumber : Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan hasil analisis hingga akhir tahun perencanaan yaitu tahun 2045 rencana penambahan fasilitas pendidikan di Kabupaten Bangka Selatan membutuhkan 186 unit TK, 58 unit SD, 15 unit SMP, 33 unit SMA/SMK, dan 4 unit perguruan tinggi dengan total luas lahan yang dibutuhkan yaitu 158,78 Ha. Penambahan kebutuhan sarana pendidikan paling banyak dibutuhkan di Kecamatan Toboali dengan total 126 unit.

2.6.2.3.2. Analisis Tingkat Pelayanan

Tingkat pelayanan pendidikan di Kabupaten Bangka Selatan sudah cukup merata diseluruh Kelurahan, namun jumlah sarana yang tersedia belum memenuhi standar Standar tingkat pelayanan fasilitas pendidikan yang digunakan untuk menentukan tingkat pelayanan fasilitas pendidikan di Kabupaten Bangka Selatan adalah sebagai berikut (SNI 03-1733-2004) :

TK	: 1 unit/1250 jiwa	= 0,0008
SD/MI	: 1 unit/1600 jiwa	= 0,000625
SLTP/MTs	: 1 unit/4800 jiwa	= 0,00021
SMU/MA	: 1 unit/4800 jiwa	= 0,00021
Perguruan Tinggi	: 1 unit/70.000 jiwa	= 0,0000143

Sarana yang dinilai memiliki tingkat pelayanan baik, jika memiliki nilai tingkat pelayanan eksisting lebih besar atau sama dengan nilai tingkat pelayanan standar, sedangkan sarana yang dinilai kurang pelayanannya jika nilai pelayanan eksisting lebih kecil dari nilai tingkat pelayanan standar. Nilai pelayanan diperoleh dari hasil bagi antara standar pelayanan dengan jumlah sarana. Tingkat pelayanan fasilitas pendidikan di Kabupaten Bangka Selatan tergolong kurang. Selengkapnya perhitungan tingkat pelayanan fasilitas pendidikan di Kabupaten Bangka Selatan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.180
Tingkat Pelayanan Sarana Pendidikan
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022

No	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Tahun 2022	Standar Pelayanan	Fasilitas Kesehatan (Eksisting)		Fasilitas Kesehatan (Standar)		Kategori
				Jumlah	Tingkat Pelayanan	Jumlah	Tingkat Pelayanan	
1	TK	202.263	0,0008	62	0,0432	200	0,16	Kurang
2	SD		0,000625	97	0,06	125	0,078	Kurang
3	SMP		0,00021	38	0,0078	42	0,0088	Kurang
4	SMA/SMK		0,00021	19	0,00396	42	0,0087	Kurang
5	PT		0,0000143	0	0	3	0,0000408	Kurang

Sumber : Hasil Analisis, 2024



2.6.2.3.3. Analisis Sarana Kesehatan

2.6.2.3.3.1. Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan

Sarana kesehatan di Kabupaten Bangka Selatan belum merata di setiap Desa dan Kelurahan, sehingga untuk semakin meningkatkan mutu pelayanan di bidang kesehatan masyarakat, maka perlu dibangun sarana kesehatan sesuai dengan kebutuhannya. Standar perhitungan kebutuhan berdasar SNI 03-1733-2004 tentang Tata cara perencanaan lingkungan permukiman serta Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 534/KPTS/M/2001 tentang standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, perumahan dan permukiman dan pekerjaan umum, tersebut adalah :

- a. 1 unit Rumah Sakit Umum diharapkan dapat melayani 240.000 penduduk (KepmenPU 534/KPTS/M/2001).
- b. 1 unit Poliklinik ini diharapkan dapat melayani 5.000 penduduk dengan luas lahan yang dibutuhkan 300 m²/unit.
- c. 1 unit Puskesmas/ Balai Pengobatan/ Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) ini diharapkan dapat melayani 120.000 penduduk dengan luas lahan yang dibutuhkan 3.000 m²/unit.
- d. 1 unit Puskesmas Pembantu ini diharapkan dapat melayani 30.000 jiwa dengan luas lahan yang dibutuhkan 1.500 m²/unit.
- e. 1 unit Apotek diharapkan dapat melayani 30.000 jiwa dengan kebutuhan lahan seluas 1.500 m²/unit.

Berikut ini merupakan jumlah kebutuhan fasilitas kesehatan di Kabupaten Bangka Selatan per lima tahun hingga tahun 2045.



Tabel 2.181
Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa) 2025	Jumlah Fasilitas Kesehatan (Unit)							
			Rumah Sakit	Puskesmas	PUSTU	Poliklinik	Posyandu	BKIA/Klinik Bersalin	Tempat Praktek Dokter	Apotek/Rumah Obat
			240.000	120.000	30.000	5.000	1.250	30.000	5.000	30.000
1	Payung	22,268	0	0	1	9	18	1	4	1
2	Pulau Besar	9,946	0	0	0	4	8	0	2	0
3	Simpang Rimba	25,406	0	0	1	10	20	1	5	1
4	Toboali	82,249	0	1	3	33	66	3	16	3
5	Tukak Sadai	13,622	0	0	0	5	11	0	3	0
6	Airgegas	44,587	0	0	1	18	36	1	9	1
7	Lepar	8,472	0	0	0	3	7	0	2	0
8	Kep. Pongok	4,565	0	0	0	2	4	0	1	0
JUMLAH		211,114	1	2	7	84	169	7	42	7

Sumber : Hasil Analisis, 2024

Tabel 2.182
Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2030

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa) 2030	Jumlah Fasilitas Kesehatan (Unit)							
			Rumah Sakit	Puskesmas	PUSTU	Poliklinik	Posyandu	BKIA/Klinik Bersalin	Tempat Praktek Dokter	Apotek/Rumah Obat
			240.000	120.000	30.000	5.000	1.250	30.000	5.000	30.000
1	Payung	23,535	0	0	1	9	19	1	5	1
2	Pulau Besar	10,532	0	0	0	4	8	0	2	0
3	Simpang Rimba	26,892	0	0	1	11	22	1	5	1



No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa) 2030	Jumlah Fasilitas Kesehatan (Unit)							
			Rumah Sakit	Puskesmas	PUSTU	Poliklinik	Posyandu	BKIA/Klinik Bersalin	Tempat Praktek Dokter	Apotek/Rumah Obat
			240.000	120.000	30.000	5.000	1.250	30.000	5.000	30.000
4	Toboali	87,020	0	1	3	35	70	3	17	3
5	Tukak Sadai	14,409	0	0	0	6	12	0	3	0
6	Airgegas	47,173	0	0	2	19	38	2	9	2
7	Lepar	8,941	0	0	0	4	7	0	2	0
8	Kep. Pongok	4,820	0	0	0	2	4	0	1	0
JUMLAH		223,321	1	2	7	89	179	7	45	7

Sumber : Hasil Analisis, 2024

Tabel 2.183
Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2035

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa) 2035	Jumlah Fasilitas Kesehatan (Unit)							
			Rumah Sakit	Puskesmas	PUSTU	Poliklinik	Posyandu	BKIA/Klinik Bersalin	Tempat Praktek Dokter	Apotek/Rumah Obat
			240.000	120.000	30.000	5.000	1.250	30.000	5.000	30.000
1	Payung	24,598	0	0	1	10	20	1	5	1
2	Pulau Besar	11,043	0	0	0	4	9	0	2	0
3	Simpang Rimba	28,177	0	0	1	11	23	1	6	1
4	Toboali	91,115	0	1	3	36	73	3	18	3
5	Tukak Sadai	15,080	0	0	1	6	12	1	3	1
6	Airgegas	49,393	0	0	2	20	40	2	10	2
7	Lepar	9,323	0	0	0	4	7	0	2	0
8	Kep. Pongok	5,029	0	0	0	2	4	0	1	0



No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa) 2035	Jumlah Fasilitas Kesehatan (Unit)							
			Rumah Sakit	Puskesmas	PUSTU	Poliklinik	Posyandu	BKIA/Klinik Bersalin	Tempat Praktek Dokter	Apotek/Rumah Obat
			240.000	120.000	30.000	5.000	1.250	30.000	5.000	30.000
JUMLAH		233,758	1	2	8	94	187	8	47	8

Sumber : Hasil Analisis, 2024

Tabel 2.184
Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2040

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa) 2040	Jumlah Fasilitas Kesehatan (Unit)							
			Rumah Sakit	Puskesmas	PUSTU	Poliklinik	Posyandu	BKIA/Klinik Bersalin	Tempat Praktek Dokter	Apotek/Rumah Obat
			240.000	120.000	30.000	5.000	1.250	30.000	5.000	30.000
1	Payung	25,426	0	0	1	10	20	1	5	1
2	Pulau Besar	11,462	0	0	0	5	9	0	2	0
3	Simpang Rimba	29,219	0	0	1	12	23	1	6	1
4	Toboali	94,402	0	1	3	38	76	3	19	3
5	Tukak Sadai	15,615	0	0	1	6	12	1	3	1
6	Airgegas	51,173	0	0	2	20	41	2	10	2
7	Lepar	9,609	0	0	0	4	8	0	2	0
8	Kep. Pongok	5,188	0	0	0	2	4	0	1	0
JUMLAH		242,094	1	2	8	97	194	8	48	8

Sumber : Hasil Analisis, 2024



Tabel 2.185
Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2045

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa) 2045	Jumlah Fasilitas Kesehatan (Unit)							
			Rumah Sakit	Puskesmas	PUSTU	Poliklinik	Posyandu	BKIA/Klinik Bersalin	Tempat Praktek Dokter	Apotek/Rumah Obat
			240.000	120.000	30.000	5.000	1.250	30.000	5.000	30.000
1	Payung	26,023	0	0	1	5	21	1	5	1
2	Pulau Besar	11,788	0	0	0	2	9	0	2	0
3	Simpang Rimba	30,015	0	0	1	6	24	1	6	1
4	Toboali	96,877	0	1	3	19	78	3	19	3
5	Tukak Sadai	16,012	0	0	1	3	13	1	3	1
6	Airgegas	52,513	0	0	2	11	42	2	11	2
7	Lepar	9,803	0	0	0	2	8	0	2	0
8	Kep. Pongok	5,298	0	0	0	1	4	0	1	0
JUMLAH		248,329	1	2	8	50	199	8	50	8

Sumber : Hasil Analisis, 2024

Tabel 2.186
Rencana Penambahan Kebutuhan Sarana Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan

No	Kecamatan	Sarana Kesehatan (eksisting)					Rencana Penambahan				
		Rumah Sakit	Poliklinik	Puskesmas	PUSTU	Apotek	Rumah Sakit	Poliklinik	Puskesmas	PUSTU	Apotek
1	Payung	1	0	1	5	1	0	5	0	0	0
2	Pulau Besar	0	0	1	4	0	0	2	0	0	0
3	Simpang Rimba	0	1	1	5	1	0	5	0	0	0
4	Toboali	1	2	2	5	4	0	17	0	0	0
5	Tukak Sadai	0	0	1	0	0	0	3	0	1	1



No	Kecamatan	Sarana Kesehatan (eksisting)					Rencana Penambahan				
		Rumah Sakit	Poliklinik	Puskesmas	PUSTU	Apotek	Rumah Sakit	Poliklinik	Puskesmas	PUSTU	Apotek
6	Airgegas	0	1	2	8	2	0	10	0	0	0
7	Lepar	0	0	1	2	0	0	2	0	0	0
8	Kep.Pongok	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
Jumlah		2	4	10	29	8	0	46	0	1	1

Sumber : Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan hasil analisis hingga akhir tahun perencanaan yaitu tahun 2045 rencana penambahan fasilitas kesehatan di Kabupaten Bangka Selatan membutuhkan 46 unit Poliklinik, 1 unit Pustu dan 1 unit Apotek.

2.6.2.3.3.2. Analisis Tingkat Pelayanan

Kondisi kesehatan penduduk merupakan salah satu hal yang menggambarkan kualitas penduduk pada suatu wilayah. Jangkauan layanan sarana kesehatan di Kabupaten Bangka Selatan dirasa dapat mencukupi kebutuhan penduduk mengingat lokasi sarana kesehatan tidak terpusat pada salah satu Kecamatan atau Kelurahan. Sedangkan tingkat pelayanan sarana kesehatan di Kabupaten Bangka Selatan untuk masing-masing jenis sarana kesehatan termasuk dalam kategori yang berbeda-beda (baik dan kurang). Standar untuk mengetahui tingkat pelayanan sarana kesehatan tersebut meliputi :

1. Rumah Sakit Umum : 1 unit/ 240.00 jiwa = 0,000004
2. BKIA/RS.Bersalin : 1 unit/30.000 jiwa = 0,000033
3. Puskesmas/BP : 1 unit/ 120.000 jiwa = 0,0000083
4. Puskesmas Pembantu : 1 Unit/ 30.000 jiwa = 0,000033
5. Praktek Dokter/Poliklinik : 1 unit/ 5.000 jiwa = 0,0002

Selengkapnya tingkat pelayanan yang diberikan fasilitas Kesehatan di Kabupaten Bangka Selatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.187
Tingkat Pelayanan Sarana Kesehatan
di Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022

Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Tahun 2022	Standar Pelayanan	Fasilitas Kesehatan (Eksisting)		Fasilitas Kesehatan (Standar)		Kategori
			Jumlah	Tingkat Pelayanan	Jumlah	Tingkat Pelayanan	
Rumah Sakit	202.263	0,0000042	2	0,0000084	1	0,0000042	Baik
Poliklinik		0,0002	4	0,0008	40	0,008	Kurang
Puskesmas		0,0000083	10	0,000083	2	0,0000166	Baik
Puskesmas Pembantu		0,0000333	29	0,0009657	7	0,0002331	Baik
Apotek		0,0000333	8	0,0002664	7	0,0002331	Baik

Sumber : Hasil Analisis, 2024

2.6.2.3.4. Analisis Sarana Perekonomian

Untuk menentukan kebutuhan sarana Perdagangan dihitung dengan menggunakan standar SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan. Adapun standar luas lahan untuk tiap-tiap Sarana Perdagangan adalah :



1. Warung/kios dengan standar jumlah penduduk pendukung sebesar 250 jiwa/unit dengan luas lahan sebesar 50 m²/unit yaitu lahan diasumsikan menyatu dengan rumah.
2. Toko dengan jumlah penduduk pendukung sebesar 250 jiwa/unit dengan luas lahan diasumsikan sebesar 100 m²/unit.
3. Pasar lingkungan dengan jumlah penduduk pendukung yaitu 30.000 jiwa/unit dengan luas lahan 10.000 m²/unit.



Tabel 2.188
Proyeksi Kebutuhan Sarana Perdagangan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa) 2025	Jumlah Fasilitas Perekonomian (Unit)									Luas Fasilitas Perekonomian (m2)									Jumlah Total Kebutuhan lahan
			Pusat Perbelanjaan (120.000)	Pasar Lingkungannya (30.000)	Pertokoan (3.000)	Warung (120)	Bank (120.000)	Losmen (75.000)	Hotel (120.000)	Rumah Makan (5.000)	Koperasi (6.500)	Pusat Perbelanjaan (36.000)	Pasar Lingkungannya (13.500)	Pertokoan (1.200)	Warung (200)	Bank (1.200)	Losmen (3.000)	Hotel (120.000)	Rumah Makan (2.500)	Koperasi (6.500)	
1	Payung	22,268	0	1	7	89	0	0	0	4	3	6,680	10,020	8,907	17,814	223	891	22,268	11,134	22,268	100,205
2	Pulau Besar	9,946	0	0	3	40	0	0	0	2	2	2,984	4,476	3,978	7,957	99	398	9,946	4,973	9,946	44,756
3	Simpang Rimba	25,406	0	1	8	102	0	0	0	5	4	7,622	11,433	10,162	20,325	254	1,016	25,406	12,703	25,406	114,328
4	Toboali	82,249	1	3	27	329	1	1	1	16	13	24,675	37,012	32,900	65,799	822	3,290	82,249	41,125	82,249	370,121
5	Tukak Sadai	13,622	0	0	5	54	0	0	0	3	2	4,086	6,130	5,449	10,897	136	545	13,622	6,811	13,622	61,297
6	Airgegas	44,587	0	1	15	178	0	1	0	9	7	13,376	20,064	17,835	35,669	446	1,783	44,587	22,293	44,587	200,640
7	Lepar	8,472	0	0	3	34	0	0	0	2	1	2,542	3,812	3,389	6,778	85	339	8,472	4,236	8,472	38,125
8	Kep. Pongok	4,565	0	0	2	18	0	0	0	1	1	1,369	2,054	1,826	3,652	46	183	4,565	2,282	4,565	20,542
JUMLAH		211,114	2	7	70	844	2	3	2	42	32	63,334	95,001	84,446	168,891	2,111	8,445	211,114	105,557	211,114	950,013

Sumber : Hasil Analisis, 2024



Tabel 2.189
Proyeksi Kebutuhan Sarana Perdagangan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2030

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa) 2030	Jumlah Fasilitas Perekonomian (Unit)									Luas Fasilitas Perekonomian (m2)									Jumlah Total Kebutuhan lahan
			Pusat Perbelanjaan (120.000)	Pasar Lingkungan (30.000)	Pertokoan (3.000)	Warung (120)	Bank (120.000)	Losmen (75.000)	Hotel (120.000)	Rumah Makan (5.000)	Koperasi (6.500)	Pusat Perbelanjaan (36.000)	Pasar Lingkungan (13.500)	Pertokoan (1.200)	Warung (200)	Bank (1.200)	Losmen (3.000)	Hotel (120.000)	Rumah Makan (2.500)	Koperasi (6.500)	
1	Payung	23,535	0	1	8	94	0	0	0	5	4	7,060	10,591	9,414	18,828	235	941	23,535	11,767	23,535	105,907
2	Pulau Besar	10,532	0	0	4	42	0	0	0	2	2	3,160	4,739	4,213	8,425	105	421	10,532	5,266	10,532	47,393
3	Simpang Rimba	26,892	0	1	9	108	0	0	0	5	4	8,067	12,101	10,757	21,513	269	1,076	26,892	13,446	26,892	121,012
4	Toboali	87,020	1	3	29	348	1	1	1	17	13	26,106	39,159	34,808	69,616	870	3,481	87,020	43,510	87,020	391,591
5	Tukak Sadai	14,409	0	0	5	58	0	0	0	3	2	4,323	6,484	5,763	11,527	144	576	14,409	7,204	14,409	64,839
6	Airgegas	47,173	0	2	16	189	0	1	0	9	7	14,152	21,228	18,869	37,739	472	1,887	47,173	23,587	47,173	212,280
7	Lepar	8,941	0	0	3	36	0	0	0	2	1	2,682	4,023	3,576	7,153	89	358	8,941	4,470	8,941	40,234
8	Kep. Pongok	4,820	0	0	2	19	0	0	0	1	1	1,446	2,169	1,928	3,856	48	193	4,820	2,410	4,820	21,689
JUMLAH		223,321	2	7	74	893	2	3	2	45	34	66,996	100,494	89,328	178,657	2,233	8,933	223,321	111,661	223,321	1,004,945

Sumber : Hasil Analisis, 2024



Tabel 2.190
Proyeksi Kebutuhan Sarana Perdagangan
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2035

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa) 2035	Jumlah Fasilitas Perekonomian (Unit)									Luas Fasilitas Perekonomian (m2)									Jumlah Total Kebutuhan lahan
			Pusat Perbelanjaan (120.000)	Pasar Lingkungan (30.000)	Pertokoan (3.000)	Warung (120)	Bank (120.000)	Losmen (75.000)	Hotel (120.000)	Rumah Makan (5.000)	Koperasi (6.500)	Pusat Perbelanjaan (36.000)	Pasar Lingkungan (13.500)	Pertokoan (1.200)	Warung (200)	Bank (1.200)	Losmen (3.000)	Hotel (120.000)	Rumah Makan (2.500)	Koperasi (6.500)	
1	Payung	24,598	0	1	8	98	0	0	0	5	4	7,379	11,069	9,839	19,679	246	984	24,598	12,299	24,598	110,692
2	Pulau Besar	11,043	0	0	4	44	0	0	0	2	2	3,313	4,969	4,417	8,834	110	442	11,043	5,521	11,043	49,693
3	Simpang Rimba	28,177	0	1	9	113	0	0	0	6	4	8,453	12,679	11,271	22,541	282	1,127	28,177	14,088	28,177	126,795
4	Toboali	91,115	1	3	30	364	1	1	1	18	14	27,335	41,002	36,446	72,892	911	3,645	91,115	45,558	91,115	410,018
5	Tukak Sadai	15,080	0	1	5	60	0	0	0	3	2	4,524	6,786	6,032	12,064	151	603	15,080	7,540	15,080	67,860
6	Airgegas	49,393	0	2	16	198	0	1	0	10	8	14,818	22,227	19,757	39,514	494	1,976	49,393	24,696	49,393	222,267
7	Lepar	9,323	0	0	3	37	0	0	0	2	1	2,797	4,195	3,729	7,458	93	373	9,323	4,662	9,323	41,954
8	Kep. Pongok	5,029	0	0	2	20	0	0	0	1	1	1,509	2,263	2,012	4,024	50	201	5,029	2,515	5,029	22,632
JUMLAH		233,758	2	8	78	935	2	3	2	47	36	70,127	105,191	93,503	187,006	2,338	9,350	233,758	116,879	233,758	1,051,911

Sumber : Hasil Analisis, 2024



Tabel 2.191
Proyeksi Kebutuhan Sarana Perdagangan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2040

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa) 2040	Jumlah Fasilitas Perekonomian (Unit)									Luas Fasilitas Perekonomian (m2)									Jumlah Total Kebutuhan lahan
			Pusat Perbelanjaan (120.000)	Pasar Lingkungan (30.000)	Pertokoan (3.000)	Warung (120)	Bank (120.000)	Losmen (75.000)	Hotel (120.000)	Rumah Makan (5.000)	Koperasi (6.500)	Pusat Perbelanjaan (36.000)	Pasar Lingkungan (13.500)	Pertokoan (1.200)	Warung (200)	Bank (1.200)	Losmen (3.000)	Hotel (120.000)	Rumah Makan (2.500)	Koperasi (6.500)	
1	Payung	25,426	0	1	8	102	0	0	0	5	4	7,628	11,442	10,170	20,341	254	1,017	25,426	12,713	25,426	114,418
2	Pulau Besar	11,462	0	0	4	46	0	0	0	2	2	3,439	5,158	4,585	9,170	115	458	11,462	5,731	11,462	51,580
3	Simpang Rimba	29,219	0	1	10	117	0	0	0	6	4	8,766	13,148	11,688	23,375	292	1,169	29,219	14,609	29,219	131,485
4	Toboali	94,402	1	3	31	378	1	1	1	19	15	28,321	42,481	37,761	75,521	944	3,776	94,402	47,201	94,402	424,808
5	Tukak Sadai	15,615	0	1	5	62	0	0	0	3	2	4,684	7,027	6,246	12,492	156	625	15,615	7,807	15,615	70,265
6	Airgegas	51,173	0	2	17	205	0	1	0	10	8	15,352	23,028	20,469	40,938	512	2,047	51,173	25,587	51,173	230,279
7	Lepar	9,609	0	0	3	38	0	0	0	2	1	2,883	4,324	3,844	7,687	96	384	9,609	4,805	9,609	43,241
8	Kep. Pongok	5,188	0	0	2	21	0	0	0	1	1	1,556	2,335	2,075	4,151	52	208	5,188	2,594	5,188	23,347
JUMLAH		242,094	2	8	81	968	2	3	2	48	37	72,628	108,942	96,838	193,675	2,421	9,684	242,094	121,047	242,094	1,089,423

Sumber : Hasil Analisis, 2024



Tabel 2.192
Proyeksi Kebutuhan Sarana Perdagangan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2045

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa) 2045	Jumlah Fasilitas Perekonomian (Unit)									Luas Fasilitas Perekonomian (m2)									Jumlah Total Kebutuhan lahan
			Pusat Perbelanjaan (120.000)	Pasar Lingkungan (30.000)	Pertokoan (3.000)	Warung (120)	Bank (120.000)	Losmen (75.000)	Hotel (120.000)	Rumah Makan (5.000)	Koperasi (6.500)	Pusat Perbelanjaan (36.000)	Pasar Lingkungan (13.500)	Pertokoan (1.200)	Warung (200)	Bank (1.200)	Losmen (3.000)	Hotel (120.000)	Rumah Makan (2.500)	Koperasi (6.500)	
1	Payung	26,023	0	1	9	104	0	0	0	5	4	7,807	11,710	10,409	20,818	260	1,041	26,023	13,011	26,023	117,103
2	Pulau Besar	11,788	0	0	4	47	0	0	0	2	2	3,536	5,305	4,715	9,430	118	472	11,788	5,894	11,788	53,045
3	Simpang Rimba	30,015	0	1	10	120	0	0	0	6	5	9,005	13,507	12,006	24,012	300	1,201	30,015	15,008	30,015	135,069
4	Toboali	96,877	1	3	32	388	1	1	1	19	15	29,063	43,594	38,751	77,501	969	3,875	96,877	48,438	96,877	435,945
5	Tukak Sadai	16,012	0	1	5	64	0	0	0	3	2	4,804	7,206	6,405	12,810	160	640	16,012	8,006	16,012	72,055
6	Airgegas	52,513	0	2	18	210	0	1	0	11	8	15,754	23,631	21,005	42,010	525	2,101	52,513	26,256	52,513	236,308
7	Lepar	9,803	0	0	3	39	0	0	0	2	2	2,941	4,411	3,921	7,842	98	392	9,803	4,901	9,803	44,113
8	Kep. Pongok	5,298	0	0	2	21	0	0	0	1	1	1,589	2,384	2,119	4,239	53	212	5,298	2,649	5,298	23,842
JUMLAH		248,329	2	8	83	993	2	3	2	50	38	74,499	111,748	99,332	198,663	2,483	9,933	248,329	124,165	248,329	1,117,481

Sumber : Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan sarana Perdagangan di Kabupaten Bangka Selatan hingga tahun 2045, dibutuhkan sarana Perdagangan yaitu 2 unit pusat perbelanjaan, 8 unit pasar lingkungan, 83 unit pertokoan, 993 unit warung/kios, 2 unit bank, 3 unit losmen, 2 unit hotel 50 unit rumah makan dan 38 unit koperasi. Adapun kebutuhan luasan yang diperukan sebesar 111,78 Ha. Seperti yang disajikan pada tabel diatas.

2.6.2.3.5. Analisis Sarana Peribadatan

Sarana peribadatan yang terdapat di Kabupaten Bangka Selatan sudah merata melayani seluruh penduduk di Kawasan tersebut, terutama bagi pemeluk agama islam yang sudah terlayani dengan adanya sarana berupa Masjid dan Mushola. Untuk mendukung kegiatan keagamaan ini perlu dihitung proyeksi kebutuhan sarana peribadatan dengan berdasarkan SNI-03-1733-2004.

1. 1 Masjid untuk melayani 30.000 orang dengan luas lahan yang dibutuhkan 3.600m²
2. 1 Mushola untuk melayani 2.500 orang dengan luas lahan yang dibutuhkan 100m²
3. Sarana ibadah untuk agama lain menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.

Kebutuhan sarana peribadatan Kabupaten Bangka Selatan dihitung berdasarkan kebutuhan sarana peribadatan skala Kabupaten dengan melihat pada proyeksi penduduk di tahun perencanaan. Hasil analisis perhitungan kebutuhan sarana peribadatan di Kabupaten Bangka Selatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.193
Proyeksi Kebutuhan Sarana Peribadatan
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2045

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa) 2043	Jumlah Fasilitas Peribadatan (Unit)			Luas Fasilitas Peribadatan (m2)			Luas total Kebutuhan Lahan (M2)
			Langgar/ Mushola	Mesjid Lingkungan	Lainnya	Langgar/ Mushola	Mesjid Lingkungan	Lainnya	
			250	2.500	30.000	300	600	1.200	
1	Payung	26,023	103	10	1	30.838	6.168	1.028	38.033
2	Pulau Besar	11,788	46	5	0	13.785	2.757	459	17.001
3	Simpang Rimba	30,015	117	12	1	35.189	7.038	1.173	43.400
4	Toboali	96,877	380	38	3	113.956	22.791	3.799	140.546
5	Tukak Sadai	16,012	63	6	1	18.865	3.773	629	23.266
6	Airgegas	52,513	206	21	2	61.757	12.351	2.059	76.167
7	Lepar	9,803	39	4	0	11.750	2.350	392	14.491
8	Kep. Pongok	5,298	21	2	0	6.317	1.263	211	7.791
JUMLAH		248,329	975	97	8	292.456	58.491	9.749	360.696

Sumber : Hasil Analisis, 2024

2.6.2.3.6. Analisis Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

2.6.2.3.6.1. Prasarana Jaringan Energi

Berdasarkan data jumlah penduduk dan proyeksi penduduk, dapat diketahui proyeksi kebutuhan listrik di Kabupaten Bangka Selatan hingga tahun 2045. Kebutuhan listrik yang akan dianalisis adalah kebutuhan listrik domestik atau perumahan, kebutuhan listrik non domestik



atau fasilitas umum, sarana prasarana dan fasilitas sosial lainnya, kebutuhan listrik untuk penerangan jalan umum, kebutuhan listrik cadangan dan kebutuhan gardu listrik untuk dapat memenuhi semua kebutuhan listrik di Kabupaten Bangka Selatan.

Kebutuhan listrik secara umum terbagi ke dalam tiga kelas dengan asumsi jumlah rumah berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan yaitu asumsi 1:2:3 sesuai dengan tipe rumah mewah, sedang dan sederhana dimana kategori tipe rumah juga disesuaikan kebutuhan kavling dan luas serta karakteristik permukiman di Kabupaten Bangka Selatan. Adapun beberapa ketentuan, kriteria dan kebutuhan yang harus dipenuhi dalam pemenuhan kebutuhan energi listrik di Kabupaten Bangka Selatan yaitu mengacu pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016. Berikut adalah penentuan jumlah minimal daya listrik berdasarkan tipe rumah di Kawasan Perkotaan sebagai berikut :

1. Tipe rumah non permanen (kecil) adalah sebesar 1.200 Watt /rumah
2. Tipe rumah semi permanen (sedang) adalah sebesar 2.200 Watt/rumah
3. Tipe rumah permanen (besar) adalah sebesar 3.500 Watt/rumah

Setelah dilakukan perhitungan berdasarkan jenis dan tipe rumah, total kebutuhan listrik domestik selengkapanya dapat dilihat tabel kebutuhan listrik domestik berikut ini :



Tabel 2.194
Jumlah Kebutuhan Prasarana Energi Kelistrikan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025

No	Kecamatan	Kebutuhan Domestik (Watt)			Kebutuhan Non Domestik (Watt)						Total Kebutuhan Listrik (KWH)
		Perumahan			Pendidikan	Peribadatan	Perdagangan	Perkantoran	Rekreasi	PJU	
		Besar (3.500watt)	Sedang (2.200 watt)	Kecil (1.300 watt)	5 persen	5 persen	125 persen	15 persen	20 persen	10 persen	
1	Payung	1,558,739	1,959,557	1,736,880	262,759	262,759	6,568,970	788,276	1,051,035	525,518	14,714
2	Pulau Besar	696,206	875,230	775,772	117,360	117,360	2,934,010	352,081	469,442	234,721	6,572
3	Simpang Rimba	1,778,432	2,235,743	1,981,681	299,793	299,793	7,494,819	899,378	1,199,171	599,585	16,788
4	Toboali	5,757,430	7,237,912	6,415,422	970,538	970,538	24,263,455	2,911,615	3,882,153	1,941,076	54,350
5	Tukak Sadai	953,507	1,198,695	1,062,480	160,734	160,734	4,018,352	482,202	642,936	321,468	9,001
6	Airgegas	3,121,074	3,923,636	3,477,769	526,124	526,124	13,153,099	1,578,372	2,104,496	1,052,248	29,463
7	Lepar	593,054	745,554	660,832	99,972	99,972	2,499,301	299,916	399,888	199,944	5,598
8	Kep. Pongok	319,538	401,705	356,056	53,865	53,865	1,346,623	161,595	215,460	107,730	3,016
JUMLAH		14,777,980	18,578,032	16,466,892	2,491,145	2,491,145	62,278,630	7,473,436	9,964,581	4,982,290	139,504

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Tabel 2.195
Jumlah Kebutuhan Prasarana Energi Kelistrikan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2030

No	Kecamatan	Kebutuhan Domestik (Watt)			Kebutuhan Non Domestik (Watt)						Total Kebutuhan Listrik (KWH)
		Perumahan			Pendidikan	Peribadatan	Perdagangan	Perkantoran	Rekreasi	PJU	
		Besar (3.500watt)	Sedang (2.200 watt)	Kecil (1.300 watt)	5 persen	5 persen	125 persen	15 persen	20 persen	10 persen	
1	Payung	1,647,439	2,071,066	1,835,718	277,711	277,711	6,942,778	833,133	1,110,844	555,422	15,552
2	Pulau Besar	737,221	926,792	821,474	124,274	124,274	3,106,859	372,823	497,097	248,549	6,959
3	Simpang Rimba	1,882,415	2,366,464	2,097,548	317,321	317,321	7,933,034	951,964	1,269,285	634,643	17,770
4	Toboali	6,091,411	7,657,774	6,787,572	1,026,838	1,026,838	25,670,947	3,080,514	4,107,352	2,053,676	57,503
5	Tukak Sadai	1,008,605	1,267,960	1,123,874	170,022	170,022	4,250,549	510,066	680,088	340,044	9,521
6	Airgegas	3,302,140	4,151,262	3,679,528	556,646	556,646	13,916,162	1,669,939	2,226,586	1,113,293	31,172



No	Kecamatan	Kebutuhan Domestik (Watt)			Kebutuhan Non Domestik (Watt)						Total Kebutuhan Listrik (KWH)
		Perumahan			Pendidikan	Peribadatan	Perdagangan	Perkantoran	Rekreasi	PJU	
		Besar (3.500watt)	Sedang (2.200 watt)	Kecil (1.300 watt)	5 persen	5 persen	125 persen	15 persen	20 persen	10 persen	
7	Lepar	625,860	786,795	697,387	105,502	105,502	2,637,552	316,506	422,008	211,004	5,908
8	Kep. Pongok	337,380	424,134	375,937	56,873	56,873	1,421,814	170,618	227,490	113,745	3,185
JUMLAH		15,632,470	19,652,248	17,419,038	2,635,188	2,635,188	65,879,695	7,905,563	10,540,751	5,270,376	147,571

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Tabel 2.196
Jumlah Kebutuhan Prasarana Energi Kelistrikan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2035

No	Kecamatan	Kebutuhan Domestik (Watt)			Kebutuhan Non Domestik (Watt)						Total Kebutuhan Listrik (KWH)
		Perumahan			Pendidikan	Peribadatan	Perdagangan	Perkantoran	Rekreasi	PJU	
		Besar (3.500watt)	Sedang (2.200 watt)	Kecil (1.300 watt)	5 persen	5 persen	125 persen	15 persen	20 persen	10 persen	
1	Payung	1,721,872	2,164,639	1,918,658	290,258	290,258	7,256,462	870,775	1,161,034	580,517	16,254
2	Pulau Besar	773,007	971,780	861,350	130,307	130,307	3,257,671	390,920	521,227	260,614	7,297
3	Simpang Rimba	1,972,365	2,479,544	2,197,778	332,484	332,484	8,312,108	997,453	1,329,937	664,969	18,619
4	Toboali	6,378,056	8,018,128	7,106,977	1,075,158	1,075,158	26,878,952	3,225,474	4,300,632	2,150,316	60,209
5	Tukak Sadai	1,055,602	1,327,043	1,176,243	177,944	177,944	4,448,610	533,833	711,778	355,889	9,965
6	Airgegas	3,457,490	4,346,559	3,852,631	582,834	582,834	14,570,850	1,748,502	2,331,336	1,165,668	32,639
7	Lepar	652,611	820,425	727,195	110,011	110,011	2,750,287	330,034	440,046	220,023	6,161
8	Kep. Pongok	352,058	442,587	392,293	59,347	59,347	1,483,671	178,041	237,387	118,694	3,323
JUMLAH		16,363,060	20,570,704	18,233,124	2,758,344	2,758,344	68,958,610	8,275,033	11,033,378	5,516,689	154,467

Sumber: Hasil Analisis, 2024



Tabel 2.197
Jumlah Kebutuhan Prasarana Energi Kelistrikan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2040

No	Kecamatan	Kebutuhan Domestik (Watt)			Kebutuhan Non Domestik (Watt)						Total Kebutuhan Listrik (KWH)
		Perumahan			Pendidikan	Peribadatan	Perdagangan	Perkantoran	Rekreasi	PJU	
		Besar (3.500watt)	Sedang (2.200 watt)	Kecil (1.300 watt)	5 persen	5 persen	125 persen	15 persen	20 persen	10 persen	
1	Payung	1,779,837	2,237,509	1,983,247	300,030	300,030	7,500,740	900,089	1,200,118	600,059	16,802
2	Pulau Besar	802,359	1,008,680	894,058	135,255	135,255	3,381,372	405,765	541,020	270,510	7,574
3	Simpang Rimba	2,045,315	2,571,253	2,279,065	344,782	344,782	8,619,541	1,034,345	1,379,127	689,563	19,308
4	Toboali	6,608,118	8,307,348	7,363,331	1,113,940	1,113,940	27,848,497	3,341,820	4,455,760	2,227,880	62,381
5	Tukak Sadai	1,093,015	1,374,077	1,217,932	184,251	184,251	4,606,279	552,754	737,005	368,502	10,318
6	Airgegas	3,582,118	4,503,234	3,991,503	603,843	603,843	15,096,069	1,811,528	2,415,371	1,207,685	33,815
7	Lepar	672,636	845,600	749,509	113,387	113,387	2,834,681	340,162	453,549	226,774	6,350
8	Kep. Pongok	363,181	456,571	404,688	61,222	61,222	1,530,550	183,666	244,888	122,444	3,428
JUMLAH		16,946,580	21,304,272	18,883,332	2,856,709	2,856,709	71,417,730	8,570,128	11,426,837	5,713,418	159,976

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Tabel 2.198
Jumlah Kebutuhan Prasarana Energi Kelistrikan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2045

No	Kecamatan	Kebutuhan Domestik (Watt)			Kebutuhan Non Domestik (Watt)						Total Kebutuhan Listrik (KWH)
		Perumahan			Pendidikan	Peribadatan	Perdagangan	Perkantoran	Rekreasi	PJU	
		Besar (3.500watt)	Sedang (2.200 watt)	Kecil (1.300 watt)	5 persen	5 persen	125 persen	15 persen	20 persen	10 persen	
1	Payung	1,821,600	2,290,011	2,029,782	307,070	307,070	7,676,741	921,209	1,228,279	614,139	17,196
2	Pulau Besar	825,152	1,037,333	919,455	139,097	139,097	3,477,424	417,291	556,388	278,194	7,789
3	Simpang Rimba	2,101,070	2,641,345	2,341,192	354,180	354,180	8,854,509	1,062,541	1,416,721	708,361	19,834
4	Toboali	6,781,364	8,525,143	7,556,377	1,143,144	1,143,144	28,578,606	3,429,433	4,572,577	2,286,288	64,016
5	Tukak Sadai	1,120,860	1,409,081	1,248,958	188,945	188,945	4,723,623	566,835	755,780	377,890	10,581
6	Airgegas	3,675,909	4,621,143	4,096,013	619,653	619,653	15,491,330	1,858,960	2,478,613	1,239,306	34,701



No	Kecamatan	Kebutuhan Domestik (Watt)			Kebutuhan Non Domestik (Watt)						Total Kebutuhan Listrik (KWH)
		Besar (3.500watt)	Sedang (2.200 watt)	Kecil (1.300 watt)	Pendidikan 5 persen	Peribadatan 5 persen	Perdagangan 125 persen	Perkantoran 15 persen	Rekreasi 20 persen	PJU 10 persen	
7	Lepar	686,208	862,661	764,631	115,675	115,675	2,891,875	347,025	462,700	231,350	6,478
8	Kep. Pongok	370,869	466,235	413,254	62,518	62,518	1,562,947	187,554	250,072	125,036	3,501
JUMLAH		17,383,030	21,852,952	19,369,662	2,930,282	2,930,282	73,257,055	8,790,847	11,721,129	5,860,564	164,096

Sumber: Hasil Analisis, 2024

2.6.2.3.6.2. Prasarana Jaringan Telekomunikasi

Seiring dengan perkembangan jaman yang semakin modern, penggunaan sambungan telepon kabel saat ini sudah sangat minim karena tergantikan oleh telepon nirkabel atau telepon seluler. Kendati demikian, masih ada masyarakat yang menggunakan layanan telepon kabel baik digunakan untuk telepon rumah maupun untuk kebutuhan Perdagangan dan jasa, perkantoran maupun Pemerintahan. Dengan demikian, diperlukan proyeksi kebutuhan sambungan telepon, menurut SNI 03-1733-2004 Kebutuhan sambungan telepon adalah 0,13 dari jumlah penduduk (0,13 sambungan telepon rumah per jiwa).

Tabel 2.199
Jumlah Kebutuhan Prasarana Telekomunikasi
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2045

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa) 2045	Jumlah KK	Sarana Sosial Dan Umum	Telepon Umum	Wartel	Warnet	RK 1500 SST/Unit	STO	Total Kebutuhan
				3 persen	3.000	3.000	12.000	1.500	20.000	
1	Payung	26,023	5,205	156	9	9	22	17	1	214
2	Pulau Besar	11,788	2,358	71	4	4	10	8	1	97
3	Simpang Rimba	30,015	6,003	180	10	10	25	20	2	247
4	Toboali	96,877	19,375	581	32	32	81	65	5	796
5	Tukak Sadai	16,012	3,202	96	5	5	13	11	1	132
6	Airgegas	52,513	10,503	315	18	18	44	35	3	431
7	Lepar	9,803	1,961	59	3	3	8	7	0	81
8	Kep.Pongok	5,298	1,060	32	2	2	4	4	0	44
Jumlah		248,329	49,666	1,490	83	83	207	166	12	2040

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Tabel 2.200
Jumlah Kebutuhan Telepon (SST)
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2045

No	Uraian	Jumlah Rumah (Unit)					Kebutuhan Telepon (SST)				
		2025	2030	2035	2040	2045	2025	2028	2035	2040	2045
I	Kebutuhan Domestik										
	Tipe Rumah :										
	Rumah Besar (80 persen)	4,222	4,466	4,675	4,842	4,967	3,378	3,573	3,740	3,874	3,973



No	Uraian	Jumlah Rumah (Unit)					Kebutuhan Telepon (SST)				
		2025	2030	2035	2040	2045	2025	2028	2035	2040	2045
	Rumah Kecil dan Sedang (20 persen)	21,111	22,332	23,376	24,209	24,833	4,222	4,466	4,675	4,842	4,967
	Jml Kebutuhan Domestik						7,600	8,040	8,415	8,715	8,940
II	Kebutuhan Non Domestik										
	Fasilitas Sosial Ekonomi (30 persen)						2,280	2,412	2,525	2,615	2,682
	Telepon Umum (10persen)						760	804	842	872	894
	Jumlah Kebutuhan Non Domestik						3,040	3,216	3,366	3,486	3,576
Jumlah							10,640	11,255	11,781	12,202	12,516

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Rencana pengembangan prasarana telekomunikasi di Kabupaten Bangka Selatan diarahkan untuk memperkuat penyebaran layanan wireless dengan fokus di kawasan pinggiran, Pedesaan dan pulau-pulau kecil, dan bagaimana mewujudkan tersedianya layanan telekomunikasi terestrial untuk menunjang komunikasi dibidang layanan Pemerintahan. Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana telekomunikasi Kabupaten Bangka Selatan berupa :

1. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi berupa rencana pembangunan jaringan tetap, meliputi :
 - a. Rencana peningkatan kapasitas sambungan telepon kabel melalui pembangunan *Optical Distribution Cabinet* (ODC) dengan lokasi meliputi :
 - 1) Kecamatan Toboali
 - 2) Kecamatan Airgegas
 - 3) Kecamatan Tukak Sadai
 - 4) Kecamatan Payung
 - 5) Kecamatan Pulau Besar
 - 6) Kecamatan Simpang Rimba
 - b. Pembangunan Pusat Data untuk jalur ducting pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan telekomunikasi.
 - c. Rencana jaringan serat optik berupa peningkatan dan pemeliharaan yang melewati :
 - 1) Kecamatan Toboali

- 2) Kecamatan Airgegas
 - 3) Kecamatan Tukak Sadai
2. Jaringan Bergerak

Jaringan bergerak di Kabupaten Kabupaten Bangka Selatan meliputi Jaringan Bergerak Selular dan Jaringan Bergerak Satelit. Jaringan Bergerak Seluler berupa menara telekomunikasi bersama yang meliputi setiap Kecamatan di Kabupaten Kabupaten Bangka Selatan, sedangkan Jaringan Bergerak Satelit berupa jaringan satelit V-sat sudah terpasang di lima titik yang dimaksud yakni di Desa Airbara, Desa Simpang Rimba, Desa Tiram, Desa Tanjung Labu dan Desa Pongok. Sehingga perlu adanya penambahan akses jaringan internet di Kabupaten Bangka Selatan agar semakin baik.

2.6.2.3.6.3. Prasarana Jaringan Sumber Daya Air

Di Kabupaten Bangka Selatan terdapat sekitar 230 buah kolong dengan luas keseluruhan 659.8 Ha dan luas tampungan 19.794.000 m³, lokasinya tersebar di masing-masing Kecamatan. Kolong tersebut terbentuk karena sisa pengerukan tambang timah. Kolong merupakan salah satu sumber air baku di Kabupaten Bangka Selatan. Kolong-kolong tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku air minum serta dapat pula dijadikan bahan baku air kemasan, pariwisata, dan pertanian. (Dokumen Pola PSDA Kabupaten Bangka Selatan, 2022). Data bendung di WS Bangka untuk irigasi kewenangan pusat disajikan pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.201
Data Teknis Bendung Kabupaten Bangka Selatan

No	Nama	Luas Baku (ha)	Luas Fungsional	Volume tampungan (juta/m ³)	Debit Inflow 100TH (m ³ /detik)	Debit Outflow (m ³ /detik)
1	Bendung Metukul	3.035	2.290	1,88	208,52	26,40

Sumber : Balai Wilayah Sungai Bangka Belitung, 2022

Ketersediaan air dari infrastruktur terpasang yang ada di Kabupaten Bangka Selatan total 40 liter/detik atau sama dengan 0,004 m³/detik. Secara detail dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.202
Ketersediaan Air Terpasang Kabupaten Bangka Selatan

No	Keterangan	m ³ /dtk)
	Air Baku	0,05
1	Kolong Telek	0,01
2	Kolong Rindik	0,02



No	Keterangan	m3/dtk)
3	Kolong Desa Simpang Rimba	0,01
4	Kolong Airgegas	0,01
Irigasi		7,44
1	Kabupaten Bangka Selatan	7,44

Sumber : Pola PSDA WS Bangka, 2022

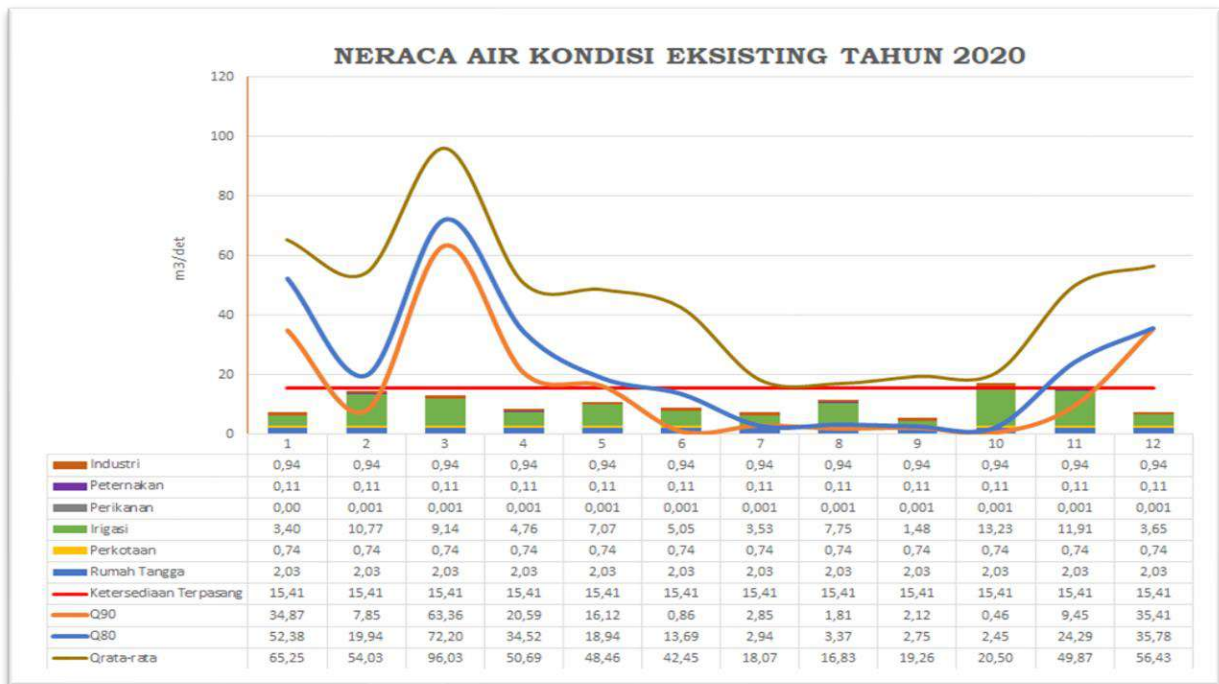
Untuk kebutuhan air irigasi permukaan pada Kabupaten Bangka Selatan yang telah dihitung berdasarkan dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.203
Kebutuhan Air Irigasi (m3/dtk)

No.	Nama D.I.	Luas (Ha)	Bulan											
			Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Kewenangan Pusat														
1	DI. Rias	3100	1,17	3,69	3,13	1,63	2,42	1,73	1,21	2,66	0,51	4,53	4,08	1,13
Kewenangan Provinsi														
1	DI Jeriji	1100	0,41	1,31	1,11	0,58	0,86	0,61	0,43	0,94	0,18	1,61	1,45	0,4
Kewenangan Kabupaten/Kota														
1	DI Tj. Labu	32	0,01	0,04	0,03	0,02	0,02	0,02	0,01	0,03	0,01	0,05	0,04	0,01
2	DI Tj. Labu I	32	0,01	0,04	0,03	0,02	0,02	0,02	0,01	0,03	0,01	0,05	0,04	0,01
3	DI Bikang	100	0,04	0,12	0,1	0,05	0,08	0,06	0,04	0,09	0,02	0,15	0,13	0,04
4	DI Tj. Labu II	50	0,02	0,06	0,05	0,03	0,04	0,03	0,02	0,04	0,01	0,07	0,07	0,02
5	DI Bencah	100	0,04	0,12	0,1	0,05	0,08	0,06	0,04	0,09	0,02	0,15	0,13	0,04
6	DI Pongok	25	0,01	0,03	0,03	0,01	0,02	0,01	0,01	0,02	0	0,04	0,03	0,01
7	DI Sidoarjo	100	0,04	0,12	0,1	0,05	0,08	0,06	0,04	0,09	0,02	0,15	0,13	0,04
8	DI Sebagian	385	0,14	0,46	0,39	0,2	0,3	0,21	0,15	0,33	0,06	0,56	0,51	0,14
9	DI Sukajaya	125	0,05	0,15	0,13	0,07	0,1	0,07	0,05	0,11	0,02	0,18	0,16	0,05

Sumber: Pola PSDA WS Bangka, 2022

Sedangkan untuk neraca air eksisting di WS Bangka dapat dilihat pada Gambar berikut ini :



Gambar 2.58
Neraca Air Eksisting WS Bangka Tahun 2020
 Sumber: Pola PSDA WS Bangka, 2022

Rencana pengembangan Daerah Irigasi di Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah Pusat, Daerah Irigasi (DI) kewenangan Provinsi dan Daerah Irigasi (DI) kewenangan Kabupaten.

Tabel 2.204
Rincian Daerah Irigasi Maupun Daerah Irigasi Rawa yang Berada
Kabupaten Bangka Selatan

No	Nama DIR/DI	Kewenangan	Lokasi	Luas (Ha)
1	D.I.R Batu Betumpang	Pusat	Desa Batu Betumpang	3.000
2	D.I.R Dungun Raya	Pusat	Desa Batu Betumpang	3.423
3	D.I. Rias	Pusat	Desa Rias	3.100
Total Luas Daerah Irigasi (DI) dan Daerah Irigasi Rawa (DIR) Kewenangan Pusat				9.523
4	D.I.R Serdang Pergam	Provinsi	Desa Serdang dan Desa Pergam	1.100
5	D.I.R Kepoh	Provinsi	Desa Kepoh	300
6	D.I.R Gadung	Provinsi	Desa Gadung	274
7	D.I Jeriji	Provinsi	Desa Jeriji	1.100
8	D.I Bikang	Provinsi	Desa Bikang	731



No	Nama DIR/DI	Kewenangan	Lokasi	Luas (Ha)
Total Luas Daerah Irigasi (DI) dan Daerah Irigasi Rawa (DIR) Kewenangan Provinsi				3.505
9	D.I Bencah	Kabupaten	Desa Bencah	225
10	D.I Sidoharjo	Kabupaten	Desa Sidoharjo	525
11	D.I Delas	Kabupaten	Desa Delas	144
12	D.I Sebagian	Kabupaten	Desa Sebagian	500
13	D.I Gudang	Kabupaten	Desa Gudang	198
14	D.I Sukajaya	Kabupaten	Desa Sukajaya	120
15	D.I Bedengung	Kabupaten	Desa Bedengun	300
16	D.I Pangkal Buluh	Kabupaten	Desa Pangkal Buluh	95
17	D.I Malik	Kabupaten	Desa Malik	58
18	D.I Nadung	Kabupaten	Desa Nadung	66
19	D.I Payung	Kabupaten	Desa Payung	270
20	D.I Tanjung Labu	Kabupaten	Desa Tanjung Labu	50
21	D.I Tanjung Labu 1	Kabupaten	Desa Tanjung Labu	33
22	D.I. Tanjung Labu 2	Kabupaten	Desa Tanjung Labu	55
23	D.I Penutuk	Kabupaten	Desa Penutuk	261
24	D.I Pongok	Kabupaten	Desa Pongok	163
25	D.I.R Irat	Kabupaten	Desa Irat	41
26	D.I.R Ranggung	Kabupaten	Desa Ranggung	174
27	D.I.R Tanjung Sangkar	Kabupaten	Desa Tanjung Sangkar	361
Total Luas Daerah Irigasi (DI) dan Daerah Irigasi Rawa (DIR) Kewenangan Kabupaten				3.639
Jumlah Total Luas Daerah Irigasi (DI) dan Daerah Irigasi Rawa (DIR)				16.667

Sumber: Pola PSDA WS Bangka, 2022

Potensi kolong yang bisa dimanfaatkan untuk konservasi sebagaimana disajikan pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.205
Data Potensi Kolong Konservasi Kabupaten Bangka Selatan

No	Nama Kolong	Kecamatan	Luas (ha)	No	Nama Kolong	Kecamatan	Luas (ha)
1	Air Tawas 1	Airgegas	13,37	18	Keposang 8	Toboali	1,18

No	Nama Kolong	Kecamatan	Luas (ha)	No	Nama Kolong	Kecamatan	Luas (ha)
2	Air Tawas 2	Airgegas	8,83	19	Keposang 9	Toboali	0,58
3	Air Bener	Toboali	2,42	20	Keposang 10	Toboali	0,56
4	Air Bakung	Toboali	0,65	21	Keposang 11	Toboali	1,07
5	Upud	Toboali	3,20	22	Keposang 12	Toboali	2,53
6	Pemda 1	Toboali	7,59	23	Keposang 13	Toboali	1,07
7	Pemda 2	Toboali	3,74	24	Keposang 14	Toboali	2,49
8	Pemda 3	Toboali	1,06	25	Sukadamai 1	Toboali	0,39
9	Pemda 4	Toboali	1,28	26	Gadung 1	Toboali	4,37
10	Tambang 9	Toboali	1,25	27	Gadung 2	Toboali	4,39
11	Tambang 9_2	Toboali	-	28	Gadung 3	Toboali	1,85
12	Keposang 1	Toboali	2,12	29	Rias 1	Toboali	0,00
13	Keposang 2	Toboali	1,51	30	Rias 2	Toboali	0,00
14	Keposang 4	Toboali	0,98	31	Rias 3	Toboali	0,00
15	Keposang 5	Toboali	0,60	32	Rias 4	Toboali	0,00
16	Keposang 6	Toboali	1,03	33	Rias 5	Toboali	0,00
17	Keposang 7	Toboali	0,71	34	Sungai Kepoh	Toboali	-

Sumber: Pola PSDA WS Bangka, 2022

Berdasarkan informasi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa, aspek sistem informasi sumber daya air yang teridentifikasi berdasarkan kondisi sumber daya air yang ada di Kabupaten Bangka Selatan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Ketersediaan data klimatologi, data hujan, data AWLR, dan data kualitas air sungai yang belum memadai;
2. Belum optimalnya sebaran pos hidrologi dan pos hidroklimatologi;
3. Keberadaan stasiun pemantau kualitas air sungai permanen yang sangat terbatas khususnya pada sungai-sungai yang melalui daerah perkotaan;
4. Belum memadainya SDM yang menangani SISDA; dan
5. Belum adanya unit SISDA yang mengintegrasikan data sumber daya air dari instansi-instansi terkait.

Adapun aspek pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha mengenai sumber daya air yang teridentifikasi berdasarkan kondisi yang ada di Kabupaten Bangka Selatan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Belum ada masyarakat/komunitas peduli sungai;
2. Masih belum aktifnya P3A nya terbentuk;
3. Lunturnya budaya/tradisi masyarakat setempat dalam menjaga kawasan hutan dan lingkungan;
4. Masih terbatasnya penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan Payment



- Environment Service (PES) untuk konservasi sumber daya air dan lingkungan;
- Keberadaan dan jumlah organisasi pengguna air (P3A, GP3A, IP3A) belum maksimal;
 - Belum terbentuknya Dewan Sumber Daya Air Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - Belum aktifnya komisi irigasi Kabupaten yang telah terbentuk;
 - Belum aktifnya forum komunikasi DAS.

2.6.2.3.6.4. Prasarana Jaringan Lainnya

2.6.2.3.6.4.1. Analisis Penyediaan Air Minum

Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum, sedangkan penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif. Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum di Kabupaten Bangka Selatan berdasarkan Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Bangka Selatan bahwa Penyaluran air bersih di Kabupaten Bangka Selatan dibagi menjadi dua, yaitu SPAM dengan Jaringan Perpipaan (JP) dan SPAM bukan Jaringan Perpipaan (BJP). Untuk SPAM Jaringan Perpipaan, penyelenggaraan dilakukan oleh institusi UPT. PAM Bangka Selatan. Pada Tahun 2022, air bersih yang disalurkan berdasarkan data BPS Kabupaten Bangka Selatan mencapai 838.077 m³, dengan jumlah konsumen sebanyak 3.970 pelanggan. Berbeda dengan SPAM bukan Jaringan Perpipaan yang ada di Kabupaten Bangka Selatan, dimana terdiri dari berbagai jenis antara lain sumur gali, sumur yang dilengkapi oleh pompa tangan, sumur gali yang dilengkapi oleh pompa air listrik, sumber mata air yang sudah terlindungi, sumber air bersih yang berasal dari Penampungan Air Hujan (PAH), serta sumber air bersih yang berasal dari kolong yang dilaksanakan oleh masyarakat. Berikut adalah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan UPT. PAM Bangka Selatan yaitu meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan.

2.6.2.3.6.4.1.1. SPAM Kabupaten Bangka Selatan

2.6.2.3.6.4.1.1.1. SPAM Baher

SPAM Baher terletak di Kelurahan Suka Damai/Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali dibangun pada Tahun 1985-an dan direhab di Tahun 2012 dan 2018 oleh kementerian PUPR.

1. Unit Air Baku

Sumber air baku yang dimanfaatkan saat ini berasal dari air permukaan yang berasal dari Kolong Baher yang terletak di Desa Suka Damai. Perkiraan volume dari Kolong Baher ini mencapai ± 180.000 m³ pada musim penghujan (kedalaman ± 6 m) dan ± 90.000 m³ pada musim kemarau (kedalaman ± 3 m).

2. Intake

Intake SPAM Baher saat ini menggunakan pompa dengan daya 20 L/det dan beroperasi selama 8 (delapan) jam per hari. Sumber energi yang digunakan berasal dari genset dengan penggunaan solar.

3. Transmisi

Sistem transmisi yang dilakukan untuk menyalurkan air baku dari intake ke instalasi pengolahan adalah menggunakan sistem perpompaan dan menggunakan pipa sebesar $\varnothing 8$ " dengan panjang pipa ± 150 m.

4. Unit Produksi

Instalasi SPAM Baher terbuat dari beton dengan kapasitas pengolahan terpasang, sebesar 20 L/detik.

5. Unit Distribusi

Saat ini SPAM Baher Kecamatan Toboali melayani beberapa Kelurahan yaitu Teladan, Toboali Kota, dan Tanjung Ketapang. Jumlah KK terlayani adalah 1.834 KK (jumlah pelanggan gabungan dengan SPAM Rindik) dengan presentase 60 persen Rindik (1.100 KK) dan 40persen Baher (734 KK). Pipa yang di gunakan untuk jaringan distribusi adalah pipa PVC dengan $\varnothing 2$ ".

2.6.2.3.6.4.1.1.2. SPAM Rindik

SPAM Rindik terletak di Desa Rindik Kecamatan Toboali SPAM ini dibangun pada sekitar Tahun 2006.

1. Unit Air Baku

Sumber air baku yang dimanfaatkan berasal dari air permukaan yang berasal dari Kolong Acam yang terletak di Desa Rindik. Perkiraan volume dari Kolong Acam ini mencapai ± 165.000 m³ pada musim penghujan (kedalaman ± 6 m) dan ± 135.000 m³ pada musim kemarau (kedalaman ± 5 m). Pada saat musim kemarau Kolong Acam ini tidak mengalami penurunan muka air yang signifikan seperti halnya Kolong Baher. Hal ini terjadi karena Kolong Acam ini terletak di kaki bukit yang dipenuhi hutan, sehingga kolong acam ini memiliki area resapan yang cukup baik, dan berdampak pada ketabilan ketinggian muka air pada musim kemarau.

2. Intake

Intake SPAM Rindik saat ini menggunakan 1 (satu) pompa dengan daya 20 L/det dan beroperasi selama 6 (enam) jam per hari dan 10 (sepuluh) jam pada musim kemarau. Sumber energi yang digunakan berasal dari genset dengan penggunaan solar.

3. Transmisi

Sistem transmisi yang dilakukan untuk menyalurkan air baku dari intake ke instalasi pengolahan adalah menggunakan sistem perpompaan dan menggunakan pipa sebesar $\varnothing 6$ "

dengan panjang pipa ± 75 m.

4. Unit Produksi

Instalasi SPAM Rindik adalah instalasi pengolahan air minum yang terbuat dari beton dengan kapasitas pengolahan terpasang yakni sebesar 20 liter/detik. Unit pengolahan IPA tersebut bukanlah IPA lengkap, pengolahannya hanya mengandalkan Saringan Pasir Lambat (SPL), mengingat kualitas air dari Kolong Acam cukup bagus.

5. Unit Distribusi

Saat ini Instalasi Sistem Penyediaan Air Minum Rindik Kecamatan Toboali melayani 2 (dua) Kelurahan yaitu Rindik, dan Kepoh. Jumlah KK terlayani adalah 1.834 KK (jumlah pelanggan gabungan dengan SPAM Baher) dengan presentase 60 persen Rindik (1.100 KK) dan 40persen Baher (734 KK). Pipa yang di gunakan untuk jaringan distribusi adalah pipa PVC dengan $\emptyset 2''$.

2.6.2.3.6.4.1.1.3. SPAM Parit 9

SPAM Parit 9 terletak di Desa Gadung Kecamatan Toboali, SPAM ini dibangun pada tahun 2014.

1. Unit Air Baku

Sumber air baku yang dimanfaatkan untuk SPAM Parit 9 berasal dari air permukaan yang berasal dari Kolong Parit 9 yang terletak di Desa Gadung. Perkiraan volume dari Kolong Parit 9 ini mencapai ± 42.000 m³ pada musim penghujan (kedalaman ± 3 m) dan ± 28.000 m³ pada musim kemarau (kedalaman ± 2 m). Pada saat musim kemarau Kolong Parit 9 ini mengalami penurunan muka air ± 1 m.

2. Intake

Intake SPAM IKK Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan ini dibangun pada Tahun 2014. Saat ini menggunakan 2 (dua) pompa dengan daya masing-masing 10 L/det. Sumber energi yang digunakan berasal dari genset dengan penggunaan solar.

3. Transmisi

Sistem transmisi yang dilakukan untuk menyalurkan air baku dari intake ke instalasi pengolahan adalah menggunakan sistem perpompaan dan menggunakan pipa sebesar $\emptyset 8''$ dengan panjang pipa ± 25 m.

4. Unit Produksi

Instalasi Pengolahan Air Minum yang ada di SPAM Parit 9 adalah instalasi pengolahan air minum yang lengkap dengan sebagian unit-unit parbrikasi dengan kapasitas pengolahan sebesar 20 L/detik.

5. Unit Distribusi

Instalasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) IKK Parit 9 Kecamatan direncanakan



melayani Kelurahan Toboali dan Wilayah Perkantoran Kabupaten Bangka Selatan.

Untuk pengembangan di masa mendatang, perlu dikembangkan jaringan air bersih lebih luas untuk melayani kebutuhan masyarakat. Menurut standar minimal atau dasar perhitungan kebutuhan akan air bersih dihitung berdasarkan SNI 19-6728.1-2002 tentang Penyusunan Neraca Sumber Daya Air Spasial dan Buku Panduan Pengembangan Air Minum Dirjen Cipta Karya 2007 :

- Untuk keperluan rumah tangga diasumsikan perorang 120 liter/hari untuk penduduk perkotaan;
- Untuk kegiatan sosial atau komersial diasumsikan 30 persen dari kebutuhan rumah tangga;
- Kehilangan air diasumsikan sebesar 20 persen dari seluruh kebutuhan;
- Hidran Umum diasumsikan 30 liter/orang/hari;
- Faktor pemakaian air pada hari puncak 1,1 liter/orang/hari;
- Faktor jam puncak 1,5 liter/orang/hari.

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh prediksi kebutuhan air bersih/minum Domestik dan Non Domestik di Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023-2043 yang disajikan pada tabel berikut ini :



Tabel 2.206
Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Domestik Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025-2045

INDIKATOR	TAHUN	KECAMATAN								JUMLAH
		Payung	Pulau Besar	Simpang Rimba	Toboali	Tukak Sadai	Airgegas	Lepar	Kep. Pongok	
Proyeksi Penduduk (Jiwa)	2025	22,268	9,946	25,406	82,249	13,622	44,587	8,472	4,565	211,114
	2030	23,535	10,532	26,892	87,02	14,409	47,173	8,941	4,82	223,321
	2035	24,598	11,043	28,177	91,115	15,08	49,393	9,323	5,029	233,758
	2040	25,426	11,462	29,219	94,402	15,615	51,173	9,609	5,188	242,094
	2045	26,023	11,788	30,015	96,877	16,012	52,513	9,803	5,298	248,329
Jumlah Penduduk Yang dilayani (Asumsi 60 persen)	2025	13,361	5,967	15,244	49,349	8,173	26,752	5,083	2,739	126,668
	2030	14,121	6,319	16,135	52,212	8,645	28,304	5,365	2,892	133,993
	2035	14,759	6,626	16,906	54,669	9,048	29,636	5,594	3,018	140,255
	2040	15,256	6,877	17,531	56,641	9,369	30,704	5,765	3,113	145,256
	2045	15,614	7,073	18,009	58,126	9,607	31,508	5,882	3,179	148,997
Sambungan Rumah (Asumsi 70 persen)	2025	15,587	6,962	17,784	57,574	9,535	31,211	5,931	3,195	147,78
	2030	16,474	7,372	18,824	60,914	10,086	33,021	6,259	3,374	156,325
	2035	17,219	7,73	19,724	63,781	10,556	34,575	6,526	3,521	163,631
	2040	17,798	8,024	20,453	66,081	10,93	35,821	6,726	3,632	169,466
	2045	18,216	8,252	21,011	67,814	11,209	36,759	6,862	3,709	173,83
Hidran Umum (Asumsi 30 persen)	2025	6,68	2,984	7,622	24,675	4,086	13,376	2,542	1,369	63,334
	2030	7,06	3,16	8,067	26,106	4,323	14,152	2,682	1,446	66,996
	2035	7,379	3,313	8,453	27,335	4,524	14,818	2,797	1,509	70,127
	2040	7,628	3,439	8,766	28,321	4,684	15,352	2,883	1,556	72,628
	2045	7,807	3,536	9,005	29,063	4,804	15,754	2,941	1,589	74,499
Total Kebutuhan Domestik	2025	22,268	9,946	25,406	82,249	13,622	44,587	8,472	4,565	211,114
	2030	23,535	10,532	26,892	87,02	14,409	47,173	8,941	4,82	223,321
	2035	24,598	11,043	28,177	91,115	15,08	49,393	9,323	5,029	233,758
	2040	25,426	11,462	29,219	94,402	15,615	51,173	9,609	5,188	242,094
	2045	26,023	11,788	30,015	96,877	16,012	52,513	9,803	5,298	248,329
Total Kebutuhan	2025	4,454	1,989	5,081	16,45	2,724	8,917	1,694	913	42,223



INDIKATOR	TAHUN	KECAMATAN								JUMLAH
		Payung	Pulau Besar	Simpang Rimba	Toboali	Tukak Sadai	Airgegas	Lepar	Kep. Pongok	
Non Domestik	2030	4,707	2,106	5,378	17,404	2,882	9,435	1,788	964	44,664
	2035	4,92	2,209	5,635	18,223	3,016	9,879	1,865	1,006	46,752
	2040	5,085	2,292	5,844	18,88	3,123	10,235	1,922	1,038	48,419
	2045	5,205	2,358	6,003	19,375	3,202	10,503	1,961	1,06	49,666
Total Kebutuhan Domestik+Non Domestik	2025	26,721	11,935	30,487	98,699	16,346	53,504	10,167	5,478	253,337
	2030	28,242	12,638	32,27	104,424	17,29	56,608	10,729	5,784	267,985
	2035	29,518	13,252	33,812	109,338	18,096	59,271	11,188	6,035	280,51
	2040	30,511	13,755	35,063	113,282	18,737	61,408	11,531	6,226	290,513
	2045	31,227	14,145	36,018	116,252	19,215	63,016	11,764	6,358	297,995
Kehilangan Air (Lt/Hari)	2025	4,008	1,79	4,573	14,805	2,452	8,026	1,525	822	38,001
	2030	4,236	1,896	4,84	15,664	2,594	8,491	1,609	868	40,198
	2035	4,428	1,988	5,072	16,401	2,714	8,891	1,678	905	42,076
	2040	4,577	2,063	5,259	16,992	2,811	9,211	1,73	934	43,577
	2045	4,684	2,122	5,403	17,438	2,882	9,452	1,765	954	44,699

Sumber: Hasil Analisis, 2024



Tabel 2.207
Total Kebutuhan Debit Air Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025-2045

	Uraian	Satuan	Tahun Proyeksi				
			2025	2030	2035	2040	2045
KABUPATEN BANGKA SELATAN	I. Kebutuhan Domestik						
	1. Jumlah Penduduk	Jiwa	211,114	223,321	233,758	242,094	248,329
	2. Pelayanan sambungan rumah	persen	60	60	60	60	60
	3. Jumlah penduduk yang dilayani	Jiwa	126,668	133,993	140,255	145,256	148,997
	4. Standar kebutuhan air bersih	Liter/orang/hari	120	120	120	120	120
	5. Sambungan rumah (80 persen)	Liter/hari	12,160,166	12,863,290	13,464,461	13,944,614	14,303,750
	6. Hidran umum (30 persen)	Liter/hari	4,560,062	4,823,734	5,049,173	5,229,230	5,363,906
	Total Kebutuhan Domestik	Liter/hari	16,720,229	17,687,023	18,513,634	19,173,845	19,667,657
	II. Kebutuhan non domestic (20 persen) dari kebutuhan domestik	Liter/hari	3,344,046	3,537,405	3,702,727	3,834,769	3,933,531
	III. Total Kebutuhan Domestik dan non domestik	Liter/hari	20,064,275	21,224,428	22,216,360	23,008,614	23,601,188
	IV. Tingkat Kebocoran	persen	15	15	15	15	15
	Debit kebocoran	Liter/hari	3,009,641	3,183,664	3,332,454	3,451,292	3,540,178
	Total kebutuhan debit air	Liter/hari	17,054,633	18,040,764	18,883,906	19,557,322	20,061,010

Sumber: Hasil Analisis, 2024

2.6.2.3.6.5. Air Limbah

Sistem pembuangan limbah cair di Kabupaten Bangka Selatan saat ini berdasarkan dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten Bangka Selatan 2018-2022 masih belum mengenal sewerage sistem. *Sewerage System* adalah sistem pembuangan air limbah di mana semua air kotor di suatu wilayah, baik air bekas cucian, air dari dapur, air dari kamar mandi, maupun air dari kakus disalurkan bersama ke suatu tempat untuk diolah. *Sewerage system* ini bersifat tertutup dan dipisahkan dari sistem pembuangan air hujan (*drainase*). Kondisi saat ini air limbah yang berasal dari air bekas cucian, air dari dapur, air kamar mandi, dan air limpahan dari tangki septik dibuang ke saluran drainase bergabung dengan air hujan mengalir ketempat yang lebih rendah melalui saluran alami dan saluran buatan. Jaringan air limbah rumah tangga mengikuti saluran air Kota yang tersedia. Pengolahan air limbah terjadi secara alami ketika air mengalir.

Pengolahan air limbah domestik hasil dari WC di Kabupaten Bangka Selatan umumnya menggunakan sistem sanitasi setempat (SPALD-Setempat) dengan menggunakan jamban, baik yang dikelola secara individu maupun secara komunal, yang dilengkapi dengan tangki septik atau cubluk. Disamping itu dengan adanya sungai-sungai yang mengalir melalui Kabupaten Bangka Selatan dapat dimanfaatkan sebagai tempat buangan air limbah. Namun untuk menghindari terjadinya pencemaran air sungai maka jenis air limbah yang dapat di buang ke sungai-sungai tersebut berupa air limbah cair, sedangkan penggunaan sistem sanitasi terpusat (SPALD-Terpusat) sampai saat ini belum bisa ada dikarenakan biaya tinggi.

Pembuangan limbah domestik yang berupa air limbah padat di Kabupaten Bangka Selatan dilakukan dengan beberapa cara. Pada daerah permukiman yang terstruktur, penduduk menggunakan tangki septik individual atau tangki septik komunal. Pada permukiman yang tidak terstruktur, sebagian penduduknya menggunakan tangki septik individual maupun cubluk dan masih banyak penduduknya menggunakan aliran sungai dan saluran irigasi sebagai pembuangan air limbah. Air bekas cucian, dapur dan kamar mandi disalurkan langsung kesaluran drainase, kali dan saluran lainnya.

Tabel 2.208
Cakupan Layanan Air Limbah Domestik
Kabupaten Bangka Selatan untuk Klasifikasi Perkotaan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Perkotaan (KK)	Tanpa Akses (KK)		Akses Layak (KK)					
			BABS	Cubluk/Tangki septik individual tidak layak	SPALD Setempat		SPALD Terpusat			
					Skala Individual	Skala Komunal	IPLD Permukiman		IPALD Perkotaan	IPALD Kawasan tertentu
				Berbasis Masyarakat	Berbasis Institusi					
1	Toboali	11.853	125	11.176	0	407	145	0	0	0

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Perkotaan (KK)	Tanpa Akses (KK)		Akses Layak (KK)					
			BABS	Cubluk/Tangki septik individual tidak layak	SPALD Setempat		SPALD Terpusat			
					Skala Individual	Skala Komunal	IPLD Permukiman		IPALD Perkotaan	IPALD Kawasan tertentu
						Berbasis Masyarakat	Berbasis Institusi			
2	Airgegas	1.090	50	990	0	50	0	0	0	0
3	Payung	1.063	199	639	0	100	125	0	0	0
4	Simpang Rimba	440	0	343	0	97	0	0	0	0
5	Lepar	578	216	362	0	0	0	0	0	0
6	Tukak Sadai	496	0	494	0	2	0	0	0	0
7	Pulau Besar	735	0	645	0	89	0	0	0	0
8	Kepulauan Pongok	1.344	59	1.241	0	44	0	0	0	0

Sumber : Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten Bangka Selatan 2018-2022

Tabel 2.209
Cakupan Layanan Air Limbah Domestik
Kabupaten Bangka Selatan untuk Klasifikasi Pedesaan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Perkotaan (KK)	Tanpa Akses (KK)		Akses Layak (KK)					
			BABS	Cubluk/Tangki septik individual tidak layak	SPALD Setempat		SPALD Terpusat			
					Skala Individual	Skala Komunal	IPLD Permukiman		IPALD Perkotaan	IPALD Kawasan tertentu
						Berbasis Masyarakat	Berbasis Institusi			
1	Toboali	6.119	338	5.724	0	454	0	0	0	0
2	Airgegas	8.692	1.263	7.140	0	164	125	0	0	0
3	Payung	3.897	542	2.313	0	1.042	0	0	0	0
4	Simpang Rimba	5.484	914	4.281	0	289	0	0	0	0
5	Lepar	1.579	702	877	0	0	0	0	0	0
6	Tukak Sadai	2.430	328	1.906	0	197	0	0	0	0
7	Pulau Besar	1.530	127	1.202	0	290	25	91	0	0
8	Kepulauan Pongok	328	22	269	0	37	0	0	0	0

Sumber : Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten Bangka Selatan 2018-2022

Keterangan :

- 1) Termasuk dalam kategori "Tanpa akses/BABS" adalah KK yang belum memiliki akses sanitasi air limbah, KK yang melakukan praktik buang air besar langsung di kebun, sungai, laut, sungai, ladang/sawah, dsb, dan KK yang melakukan praktik pembuangan langsung atau direct discharge (memiliki jamban namun buangnya tidak ditampung dan langsung dibuang ke badan air/saluran drainase)
- 2) Cubluk dan tangki septik tidak layak dihitung sebagai akses dasar di wilayah Pedesaan dan dihitung bukan akses di wilayah perkotaan. Tangki septik tidak layak adalah tangki septik individual yang tidak memenuhi standar SNI 03-2398-2002

- 3) SPALD Setempat adalah sistem pengolahan air limbah domestik setempat
- 4) SPALD-S Skala Individual diperuntukkan bagi 1 unit rumah tinggal
- 5) SPALD-S Skala Komunal diperuntukkan bagi dua hingga sepuluh unit rumah tinggal
- 6) IPALD Permukiman: sistem pengolahan air limbah domestik terpusat untuk lingkup permukiman dengan jumlah penduduk terlayani sebanyak 50-20.000 jiwa. Termasuk dalam sistem SPALD-T Permukiman adalah IPAL Komunal, IPAL Kawasan dan MCK Kombinasi.
- 7) IPALD Permukiman Berbasis Masyarakat: bagi IPAL dengan cakupan pelayanan di bawah 150 unit rumah tinggal
- 8) IPALD Permukiman Berbasis Institusi : bagi IPAL dengan cakupan pelayanan di atas 150 unit rumah tinggal
- 9) IPALD Perkotaan: sistem pengolahan air limbah domestik terpusat untuk lingkup perkotaandan/atau regional dengan jumlah penduduk terlayani minimal 20.000 jiwa.
- 10) IPALD Kawasan Tertentu: sistem pengolahan air limbah domestik terpusat yang digunakan pada kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

Tabel 2.210
Cakupan Layanan Air Limbah Domestik
Kabupaten Bangka Selatan untuk Klasifikasi Pedesaan

No	Jenis		Satuan	Jumlah/ Kapasitas	Kondisi		Keterangan
					Berfungsi	Tdk Berfungsi	
1	SPALD-T Permukiman	Berbasis Masyarakat	Unit	30	V	-	-
2		Berbasis Institusi	Unit	-	-	-	Belum Ada
3	SPALD-T Perkotaan		Unit	-	-	-	Belum Ada
4	SPALD-T Kawasan Tertentu		Unit	-	-	-	Belum Ada
Pengelolaan Lumpur Tinja							
1	Truk Tinja		Unit	-	-	-	Belum Ada
2	IPLT...		M ³ /hari	-	-	-	Belum Ada

Sumber : Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten Bangka Selatan 2018-2022

Analisis jaringan air limbah dilakukan dengan cara mengidentifikasi permasalahan air limbah dan kondisi jaringan air limbah eksisting di Kabupaten Bangka Selatan. Jaringan air limbah yang diidentifikasi meliputi sistem pembuangan air limbah setempat (*on-site*) dan/atau terpusat (*off-site*). Analisis kebutuhan air limbah pada masa yang akan datang (proyeksi kebutuhan) dilakukan dengan menggunakan standar perhitungan yang telah ditetapkan, yaitu menggunakan standar dari Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 534/KPTS/M/2001. Analisis dilakukan untuk mengetahui berapa besar kebutuhan air limbah yang diperlukan oleh seluruh penduduk di Kabupaten Bangka Selatan. Faktor utama untuk menganalisis kebutuhan air limbah adalah jumlah penduduk di Kabupaten Bangka Selatan. Analisis yang dilakukan terdiri dari analisis kebutuhan air limbah domestik dan non-domestik, analisis kebutuhan mobil tinja, analisis kebutuhan instalasi pengelolaan lumpur tinja, dan analisis timbulan tinja.

Tabel 2.211
Proyeksi Produksi Air Limbah
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023-2045

INDIKATOR	TAHUN	KECAMATAN								JUMLAH
		Payung	Pulau Besar	Simpang Rimba	Toboali	Tukak Sadai	Airgegas	Lepar	Kep. Pongok	
Proyeksi Penduduk (jiwa)	2025	22,268	9,946	25,406	82,249	13,622	44,587	8,472	4,565	211,114
	2030	23,535	10,532	26,892	87,02	14,409	47,173	8,941	4,82	223,321
	2035	24,598	11,043	28,177	91,115	15,08	49,393	9,323	5,029	233,758
	2040	25,426	11,462	29,219	94,402	15,615	51,173	9,609	5,188	242,094
	2045	26,023	11,788	30,015	96,877	16,012	52,513	9,803	5,298	248,329
Rata-rata Penduduk/RT		4	4	4	4	4	4	4	4	4
Rumah Tangga	2025	4,454	1,989	5,081	16,45	2,724	8,917	1,694	913	42,223
	2030	5,884	2,633	6,723	21,755	3,602	11,793	2,235	1,205	55,83
	2035	6,15	2,761	7,044	22,779	3,77	12,348	2,331	1,257	58,44
	2040	6,357	2,866	7,305	23,6	3,904	12,793	2,402	1,297	60,524
	2045	6,506	2,947	7,504	24,219	4,003	13,128	2,451	1,325	62,082
Penduduk yang terlayani septi tank Asumsi terlayani 85 persen	2025	3,786	1,691	4,319	13,982	2,316	7,58	1,44	776	35,889
	2030	5,001	2,238	5,714	18,492	3,062	10,024	1,9	1,024	47,456
	2035	5,227	2,347	5,988	19,362	3,205	10,496	1,981	1,069	49,674
	2040	5,403	2,436	6,209	20,06	3,318	10,874	2,042	1,103	51,445
	2045	5,53	2,505	6,378	20,586	3,403	11,159	2,083	1,126	52,77
Penduduk yang terlayani MCK Asumsi terlayani 15 persen	2025	668	298	762	2,467	409	1,338	254	137	6,333
	2030	883	395	1,008	3,263	540	1,769	335	181	8,375
	2035	922	414	1,057	3,417	566	1,852	350	189	8,766
	2040	953	430	1,096	3,54	586	1,919	360	195	9,079
	2045	976	442	1,126	3,633	600	1,969	368	199	9,312
Proyeksi kebutuhan septi tank untuk keluarga Unit (1 septi tank = 1 KK)	2025	4,454	1,989	5,081	16,45	2,724	8,917	1,694	913	42,223
	2030	5,884	2,633	6,723	21,755	3,602	11,793	2,235	1,205	55,83
	2035	6,15	2,761	7,044	22,779	3,77	12,348	2,331	1,257	58,44
	2040	6,357	2,866	7,305	23,6	3,904	12,793	2,402	1,297	60,524
	2045	6,506	2,947	7,504	24,219	4,003	13,128	2,451	1,325	62,082
Proyeksi kebutuhan MCK Unit (1 mck = 100 jiwa)	2025	223	99	254	822	136	446	85	46	2,111
	2030	235	105	269	870	144	472	89	48	2,233
	2035	246	110	282	911	151	494	93	50	2,338
	2040	254	115	292	944	156	512	96	52	2,421
	2045	260	118	300	969	160	525	98	53	2,483
Proyeksi lumpur tinja domestik yang di hasilkan lt/hari (30 lt x jmlh pddk)/365 hari	2025	1,83	817	2,088	6,76	1,12	3,665	696	375	17,352
	2030	1,934	866	2,21	7,152	1,184	3,877	735	396	18,355
	2035	2,022	908	2,316	7,489	1,239	4,06	766	413	19,213
	2040	2,09	942	2,402	7,759	1,283	4,206	790	426	19,898
	2045	2,139	969	2,467	7,962	1,316	4,316	806	435	20,411

INDIKATOR	TAHUN	KECAMATAN								JUMLAH
		Payung	Pulau Besar	Simpang Rimba	Toboali	Tukak Sadai	Airgegas	Lepar	Kep. Pongok	
Proyeksi lumpur non tinja lt/hari (20 persen tinja)	2025	366	163	418	1,352	224	733	139	75	3,47
	2030	387	173	442	1,43	237	775	147	79	3,671
	2035	404	182	463	1,498	248	812	153	83	3,843
	2040	418	188	480	1,552	257	841	158	85	3,98
	2045	428	194	493	1,592	263	863	161	87	4,082
Total Jumlah lumpur Lt/hari	2025	2,196	981	2,506	8,112	1,343	4,398	836	450	20,822
	2030	2,321	1,039	2,652	8,583	1,421	4,653	882	475	22,026
	2035	2,426	1,089	2,779	8,987	1,487	4,872	920	496	23,056
	2040	2,508	1,131	2,882	9,311	1,54	5,047	948	512	23,878
	2045	2,567	1,163	2,96	9,555	1,579	5,179	967	523	24,493
Proyeksi kebutuhan mobil tinja unit (Kapasitas 4 m3)	25	1	0	1	2	0	1	0	0	5
	30	1	0	1	2	0	1	0	0	6
	35	1	0	1	2	0	1	0	0	6
	40	1	0	1	2	0	1	0	0	6
Kebutuhan Kapasitas IPLT minimal (50m3/hari)	45	1	0	1	2	0	1	0	0	6
	25	0	0	1	2	0	1	0	0	4
	30	0	0	1	2	0	1	0	0	4
	35	0	0	1	2	0	1	0	0	5
	40	1	0	1	2	0	1	0	0	5
	45	1	0	1	2	0	1	0	0	5

Sumber: Hasil Analisis, 2024

2.6.2.3.6.6. Prasarana Persampahan

Skema pengelolaan persampahan rumah tangga di Kabupaten Bangka Selatan ada beberapa macam. Ada yang dikumpulkan di tong sampah lalu diangkut menggunakan gerobak/motor sampah, kemudian dikumpulkan ke kontainer TPSS dan diangkut menggunakan truk sampah ke TPA. Ada juga yang langsung dibuang ke kebun/lahan kosong/laut/sungai atau kolong.

Masing-masing skema tersebut sebenarnya merupakan suatu gambaran sistem pengelolaan persampahan yang ada di Bangka Selatan. Metode pengumpulan sampah di Kabupaten Bangka Selatan yang terlayani angkutan sampah adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan Sampah Permukiman

Sistem pengumpulan sampah permukiman dibagi menjadi 2 tipe yakni : pertama sampah domestik masyarakat langsung dibuang ke TPS atau kontainer milik Pemkab Bangka Selatan; dan yang kedua masyarakat mengumpulkan sampah di tempat/wadah yang diletakkan di depan rumah kemudian diangkut oleh petugas kebersihan kemudian sampah tersebut diangkut ke TPS atau Kontainer. Alat angkut yang digunakan adalah truk sampah dengan

kapasitas $\pm 4 \text{ m}^3$. Pengangkutan sampah oleh truk sampah pagi hari sekitar Pukul 08.00 WIB dan sore hari sekitar Pukul 15.00 WIB.

Sistem pengangkutan sampah dilakukan secara langsung dari sumber sampah (TPS dan Kontainer) ke TPA (sistem pengosongan kontainer) secara langsung tanpa pemindahan (transfer depo) terlebih dahulu karena daya tampung TPS atau kontainer masih memadai. Sampah-sampah di kawasan permukiman ini tidak terpisah antara sampah organik dan sampah anorganik.

2. Pengumpulan Sampah Pasar

Pewadahan sampah yang digunakan di areal pasar antara lain dibawah meja lapak-lapak oleh pedagang kemudian petugas kebersihan memindahkan sampah tersebut ke keranjang sampah dibagian luar kumpulan lapak kemudian sampah tersebut diangkut oleh mobil dump truck langsung ke TPA. Cara kedua, Petugas kebersihan menyapu dan mengumpulkan sampah-sampah disepertar pasar dan langsung diletakkan dikontainer sampah. Pada hari itu juga kontainer sampah diangkut ke TPA. Kontainer sampah digunakan untuk menampung sampah dari toko-toko lainnya diluar lapak.

3. Pengumpulan Sampah Pertokoan/ Perdagangan/ Jasa

Pengumpulan sampah di area pertokoan/ Perdagangan/jasa ini hampir sama dengan sistem pengangkutan sampah di kawasan permukiman yakni disetiap kios/toko/warung menyediakan tempat sampah sendiri yang kemudian diangkut oleh petugas kebersihan dengan menggunakan dump truck kemudian langsung dibuang ke TPA. Di sepanjang areal Perdagangan ini biasanya terdapat petugas kebersihan yang setiap harinya (pagi dan sore) menyapu disepanjang kawasan ini. Sampah-sampah yang terkumpul kemudian diangkut dengan menggunakan truk sampah. Pada kawasan Perdagangan ini juga masih belum terpilah antara sampah organik dan sampah anorganik.

4. Pengumpulan Sampah Kawasan Perkantoran

Pada kawasan perkantoran, sampah-sampah yang ada pada setiap instansi/kantor dikumpulkan di tong-tong sampah yang ada pada masing-masing instansi yang secara berkala diangkut oleh petugas kebersihan menggunakan dump truck sampah ke TPA. Walaupun pada beberapa dinas/instansi telah terdapat tong sampah yang terpisah antara sampah organik dan anorganik, namun dalam pelaksanaannya sampah-sampah tersebut masih tercampur.

Tabel 2.212
Banyaknya Armada Pengangkutan Sampah dan Kapasitasnya
Menurut Jenis Angkutan Kabupaten Bangka Selatan

NO	JENIS ANGKUTAN	BANYAKNYA (UNIT)	KAPASITAS	KONDISI	KETERANGAN
1.	Truk	-	-		
2.	Dump Truck	7	4 m ³	Baik	
3.	Mobil Pick Up	-	-		
4.	Arm Roll Container	-	-		
5.	Gerobak Sampah	-	-		
6.	Trida (Roda Tiga)	-	-		
7.	Bulldozer	2		Baik & Rusak ringan	
8.	Excavator / backhoe	1		Baik	
9.	Truk Sampah	7		Baik	
TPA/TPA Regional :					
1.	Luas total lahan TPA	1	2,5 ha		Lahan control landfill
2.	Luas sel Landfill	800			
3.	Daya tampung TPA	2 (m ³ /hari)	12.000 m ³		

Sumber : Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten Bangka Selatan 2018-2022

Analisis kebutuhan prasarana sampah digunakan untuk mengetahui kebutuhan prasarana sampah berdasarkan jumlah penduduk dan total timbulan sampah yang dihasilkan dari masing-masing Kelurahan. Asumsi yang digunakan berdasarkan SNI-3242-2008 tentang Tata Cara Pengolahan Sampah di Pemukiman. Prasarana yang dianalisis terdiri dari bak sampah kecil, bak sampah besar dan alat pengangkut sampah berupa amroll, dump truck, pick up dan motor roda tiga. Analisis timbulan sampah dilakukan untuk mengetahui seberapa besar timbulan sampah dari jumlah penduduk Kabupaten Bangka Selatan yang akan diproyeksikan dalam rentang waktu 20 tahun. Asumsi yang digunakan sebagai standar perhitungan persampahan adalah 3 liter untuk volume timbulan sampah yang dihasilkan dari setiap orang per hari dari sumber sampah domestik. Sedangkan untuk sumber sampah non domestik asumsi yang digunakan adalah 0,2 liter/hari. Total timbulan sampah didapatkan dari hasil penjumlahan timbulan sampah domestik dan timbulan sampah non domestik. Berikut tabel total timbulan sampah di Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 2025-2045 :

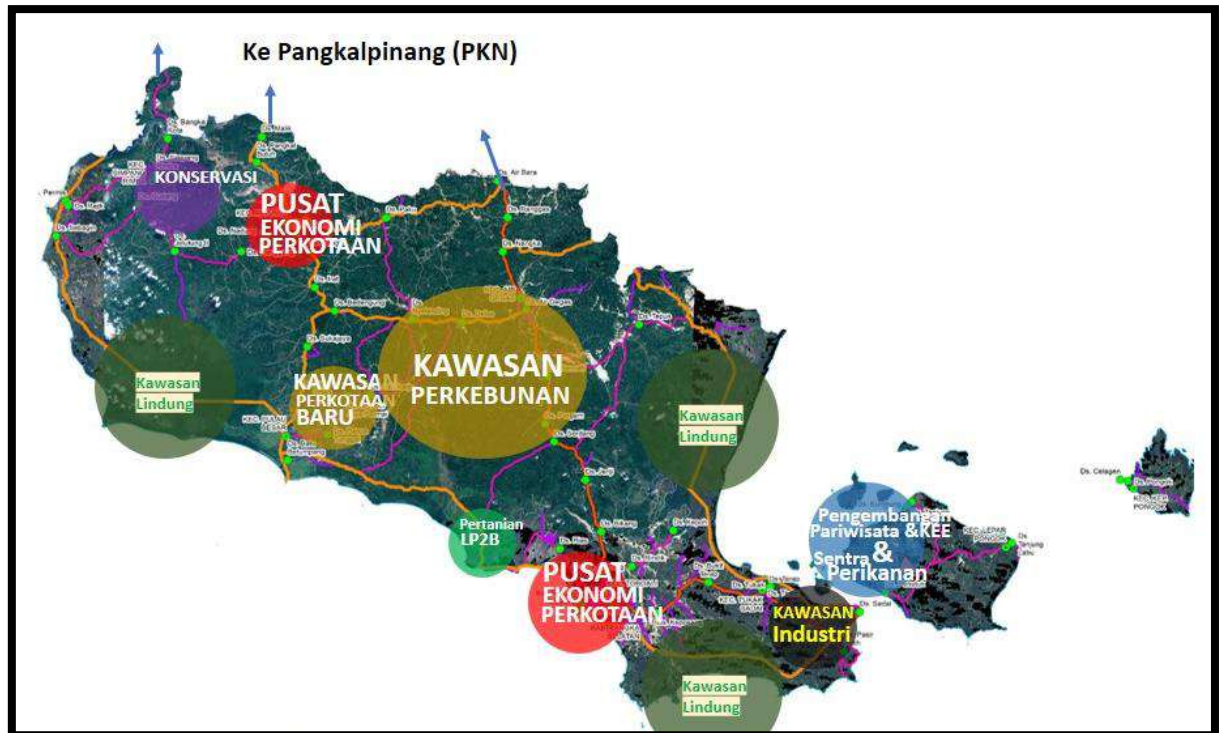
Tabel 2.213
Proyeksi Kebutuhan Prasarana Persampahan Kabupaten Bangka Selatan

INDIKATOR	TAHUN	KECAMATAN								JUMLAH
		Payung	Pulau Besar	Simpang Rimba	Toboali	Tukak Sadai	Airgegas	Lepar	Kep. Pongok	
Proyeksi Penduduk (Jiwa)	2025	22,268	9,946	25,406	82,249	13,622	44,587	8,472	4,565	211,114
	2030	23,535	10,532	26,892	87,02	14,409	47,173	8,941	4,82	223,321
	2035	24,598	11,043	28,177	91,115	15,08	49,393	9,323	5,029	233,758
	2040	25,426	11,462	29,219	94,402	15,615	51,173	9,609	5,188	242,094
	2045	26,023	11,788	30,015	96,877	16,012	52,513	9,803	5,298	248,329
Proyeksi Produksi sampah (0,003 m ³ /orang/hari)	2025	67	30	76	247	41	134	25	14	633
	2030	71	32	81	261	43	142	27	14	670
	2035	74	33	85	273	45	148	28	15	701
	2040	76	34	88	283	47	154	29	16	726
	2045	78	35	90	291	48	158	29	16	745
Proyeksi Kebutuhan Gerobak sampah (2m ³)	2025	33	15	38	123	20	67	13	7	317
	2030	35	16	40	131	22	71	13	7	335
	2035	37	17	42	137	23	74	14	8	351
	2040	38	17	44	142	23	77	14	8	363
	2045	39	18	45	145	24	79	15	8	372
Proyeksi Kebutuhan Bak sampah kecil (6m ³)	2025	11	5	13	41	7	22	4	2	106
	2030	12	5	13	44	7	24	4	2	112
	2035	12	6	14	46	8	25	5	3	117
	2040	13	6	15	47	8	26	5	3	121
	2045	13	6	15	48	8	26	5	3	124
Proyeksi Kebutuhan Bak sampah besar (12m ³)	2025	6	2	6	21	3	11	2	1	53
	2030	6	3	7	22	4	12	2	1	56
	2035	6	3	7	23	4	12	2	1	58
	2040	6	3	7	24	4	13	2	1	61
	2045	7	3	8	24	4	13	2	1	62

Sumber: Hasil Analisis, 2024

2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Wilayah Kabupaten Bangka Selatan memiliki sebaran pusat-pusat pertumbuhan wilayah yang di Rencanakan melalui Regulasi Rencana Pembangunan seperti Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten maupun Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta memiliki Kawasan yang masuk ke dalam Peraturan Presiden nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yaitu Kawasan Industri Sadai serta sebaran pusat-pusat pertumbuhan sektor lainnya yang berada wilayah Kabupaten Bangka Selatan dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2.59
Sebaran Pusat-Pusat Pertumbuhan
Di Wilayah Kabupaten Bangka Selatan

Sumber : Data Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Penyusunan RTRW Kab. Bangka Selatan 2023-2043

2.7.1. Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan

Guna menciptakan perkembangan wilayah Kabupaten Bangka Selatan yang efektif dan efisien, maka perlu direncanakan penetapan hierarki kawasan perkotaan. Hierarki kawasan perkotaan merupakan strata perkotaan dalam sistem perwilayahan yang lebih luas yang menyangkut tingkatan fungsi dan peran kawasan perkotaan dalam melayani wilayah sekitarnya. Hierarki kawasan perkotaan terbentuk karena tingkat kelengkapan, tingkat pelayanan serta tingkat akomodasi sarana dan prasarana wilayah dalam kawasan perkotaan tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut maka arahan pengembangan hierarki kawasan perkotaan, dapat dilakukan dengan berbagai cara berikut ini :

1. Memilih kawasan perkotaan dan meningkatkan peran dan fungsi Kotanya, yang berpotensi berkembang cepat dan didukung oleh sarana dan prasarana wilayah regional yang berupa sistem jaringan jalan dengan kandungan bahan alam yang potensial, untuk menyejajarkan dan meningkatkan kelas hierarki Kota yang masih rendah; dan
2. Memfungsikan pola hierarki kawasan perkotaan sebagai salah satu alternatif pola pengembangan wilayah yang tepat, dengan pedoman efektif dan efisien.

Klasifikasi fungsi hierarki perkotaan di wilayah Kabupaten Bangka Selatan sesuai dengan arahan kebijakan, kondisi eksisting serta paradigma yang berkembang adalah sebagai berikut :



PKW : Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa Kabupaten/Kota

PKL : Pusat Kegiatan Lokal (PKL) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa Kecamatan (sebagai pusat pertumbuhan wilayah pengembangan)

PPK : Pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kecamatan, yang ditentukan berdasarkan antara lain:

- a. merupakan ibuKota Kecamatan;
- b. proyeksi jumlah penduduk;
- c. jenis dan skala fasilitas pelayanan; dan/atau
- d. jumlah dan kualitas sarana dan prasarana.

PPL : Pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antarDesa, yang ditentukan berdasarkan antara lain:

- a. proyeksi jumlah penduduk;
- b. jenis dan skala fasilitas pelayanan eksisting;
- c. jumlah dan kualitas sarana dan prasarana; dan/atau
- d. aksesibilitas masyarakat sekitar terhadap pelayanan dasar.

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Bangka Selatan merupakan kerangka tata ruang wilayah Kabupaten Bangka Selatan yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhirarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten Bangka Selatan terutama jaringan transportasi darat. Pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Bangka Selatan merupakan simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan/atau administrasi masyarakat di wilayah Kabupaten Bangka Selatan, dimana rencana struktur pusat pelayanan di Kabupaten Bangka Selatan adalah sebagai berikut :

1. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

PKW di Kabupaten Bangka Selatan terletak di Kecamatan Toboali. Ibu Kota Kecamatan Toboali diharapkan menjadi pusat pertumbuhan penting di Kabupaten Bangka Selatan.

2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang ada di Kabupaten Bangka Selatan terdiri atas :

a. Kecamatan Payung

Berdasarkan Permen PPN/Bappenas Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 menetapkan Kecamatan Payung merupakan salah satu Kawasan Prioritas Pedesaan Nasional (KPPN) sehingga ditekankan pada peningkatan fasilitas sarana dan prasarana, selain itu Kecamatan Payung merupakan daerah pusat pengembangan sektor perkebunan dan Perdagangan. Kecamatan Payung juga diarahkan untuk melayani beberapa Kecamatan di Kabupaten Bangka Selatan.



- b. Kecamatan Tukak Sadai

Berdasarkan RPJM Nasional Tahun 2020- 2024, mengenai kebijakan pembangunan nasional pada lampiran 1 Narasi Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 menyebutkan bahwa Kawasan Industri (KI) Sadai termasuk kedalam 9 (sembilan) Kawasan Industri (KI) prioritas nasional. Selain itu Kecamatan Tukak Sadai yang beribuKota Kecamatan berada di Sadai terdapat Pelabuhan Sadai yang ditetapkan sebagai Pelabuhan Pengumpul berdasarkan Kepmenhub Nomor KP. 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional, dimana Pelabuhan Sadai akan dikembangkan untuk simpul jaringan transportasi laut nasional.
- c. Kecamatan Pulau Besar

Berdasarkan RPJM Nasional 2014-2019, telah dicanangkan kinerja Program Pembangunan dan Pengembangan Transmigrasi berupa pengembangan kawasan transmigrasi dan Kawasan Perkotaan Baru (KPB) serta Rencana Strategis Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan Tahun 2020-2024 dimana KPB Batu Betumpang Kecamatan Pulau Besar termasuk ke dalam 52 (lima puluh dua) Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional.
3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

PPK merupakan kawasan perkotaan yang memiliki fungsi utama sebagai pusat pemerintahan Kecamatan dan pusat pelayanan sosial ekonomi skala kawasan. PPK di Kabupaten Bangka Selatan, meliputi:

 - a. PPK Airgegas di Kecamatan Airgegas; dan
 - b. PPK Simpang Rimba di Kecamatan Simpang Rimba.
4. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

Sistem Pedesaan di Kabupaten Bangka Selatan berupa Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). PPL merupakan pusat permukiman yang melayani kegiatan skala Desa yang memiliki fungsi utama sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi skala lingkungan. PPL di Kabupaten Bangka Selatan, meliputi:

 - a. PPL Lepar di Kecamatan Lepar; dan
 - b. PPL Kepulauan Pongok di Kecamatan Kepulauan Pongok

2.7.2. Pengembangan Kawasan Strategis

2.7.2.1. Rencana Pengembangan Kawasan Strategis

Kawasan strategis wilayah Kabupaten merupakan bagian wilayah Kabupaten yang diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah Kabupaten di bidang ekonomi, sosial budaya, sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup. Delineasi kawasan strategis Kabupaten berbentuk poligon dan bersifat

indikatif. Kawasan strategis Kabupaten ditetapkan berdasarkan kewenangan pengelolaannya yakni sebagai berikut:

1. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
2. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
3. Kawasan Strategis Kabupaten/Kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.

2.7.2.1.1. Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Kawasan strategis jika dilihat dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangka Selatan yaitu :

1. Kawasan Perkotaan Toboali berada di Kecamatan Toboali;
2. Kawasan Agropolitan berada di Kecamatan Airgegas, Pulau Besar dan Toboali;
3. Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional (KTPN) Batu Betumpang berada di Kecamatan Pulau Besar;

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penetapan Kawasan Transmigrasi Kawasan Batu Betumpang ditetapkan sebagai Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional (KTPN) Batu Betumpang.

Secara geografis KTPN Batu Betumpang berada di sisi barat Kabupaten Bangka Selatan dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Payung
- Sebelah selatan berbatasan dengan Selat Bangka
- Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Simpang Rimba
- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Toboali

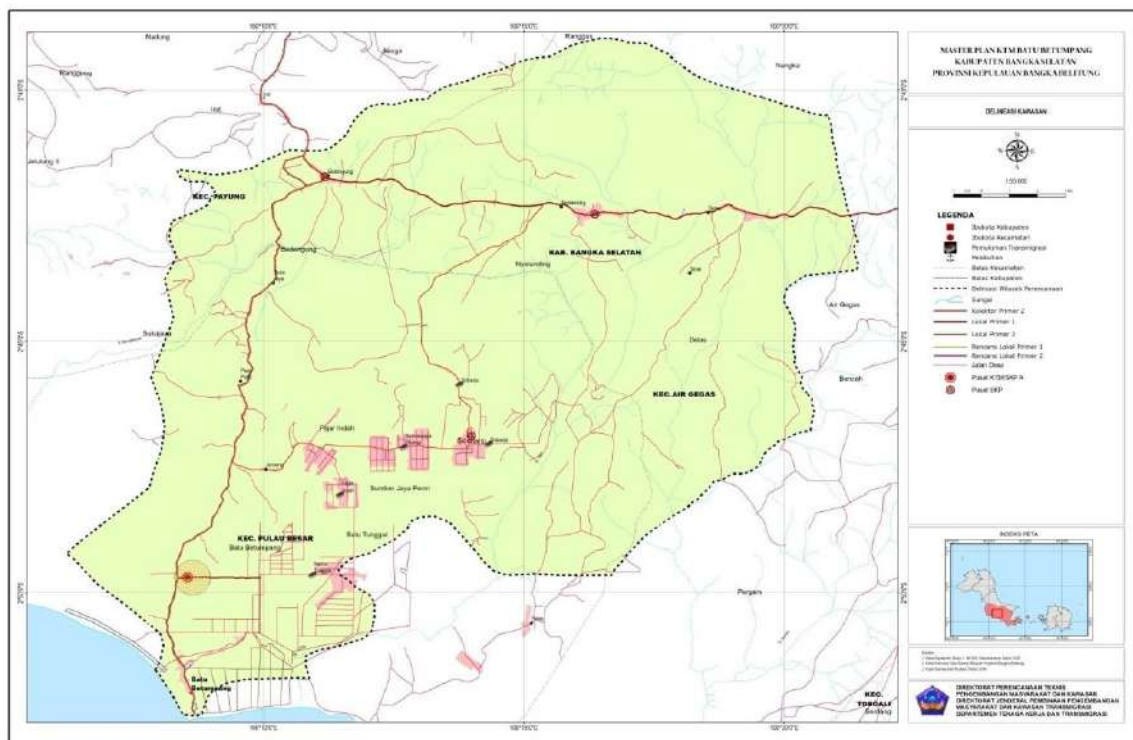
Komposisi dari Kawasan Batu Betumpang di Kecamatan Payung, Pulau Besar dan Airgegas meliputi Desa-Desa eks transmigrasi dan Desa-Desa sekitarnya. Jumlah Desa yang dikategorikan ke dalam Kawasan Terpadu Mandiri Batu Betumpang di Kabupaten Bangka Selatan adalah :



Tabel 2.214
Cakupan Desa dalam Kawasan Batu Betumpang

Desa/Kelurahan		Luas Daerah (km ²)
I. KECAMATAN PULAU BESAR		
1.	Batu Betumpang	94,62
2.	Panca Tunggul	10,00
3.	Fajar Indah	11,000
4.	Sumber Jaya Permai	15,20
5.	Sukajaya	16,50
II. KECAMATAN AIRGEGAS		
1.	Sidoharjo	9,00
2.	Delas	20,14
3.	Nyelending	111,40
III. KECAMATAN PAYUNG		
1.	Bedengung	64,50

Sumber: Dokumen RKT Batu Betumpang, 2017



Gambar 2.60
Gambar Peta KPN Batu Betumpang
Sumber : Masterplan KPN Batu Betumpang

Fungsi Pusat KPN Batu Betumpang didesain untuk membangun sebuah pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan basis pengelolaan sumber daya alam (pertanian, perkebunan) secara berkelanjutan. Efisiensi, fungsionalisme dan keserasian dengan lingkungan setempat menjadi ukuran keberhasilan dalam mendesain pusat kawasan KPN

tersebut. Berdasarkan pengertian dan kriteria Kawasan tersebut maka fungsi dan peran pusat KTPN Batu Betumpang sebagai berikut :

a. Menjadi Simpul Jasa Pengembangan Kegiatan Agroindustri

Untuk menjadi simpul jasa pengembangan kegiatan agroindustri, maka dasar utama yang dipergunakan dalam mendesain Pusat KTPN adalah mampu mengintegrasikan sistem kegiatan hulu-hilir usaha tani. Seperti diketahui bahwa komoditas unggulan di KTPN Batu Betumpang adalah karet, dan padi sawah.

Berdasarkan prioritas pengembangan komoditas unggulan, maka desain pusat KTPN akan menampung kegiatan jasa-jasa pendukung kegiatan agroindustri seperti dari rumah pintar, pelatihan kelompok masyarakat untuk pemuliaan tanaman, jasa perdagangan untuk input produksi (toko koperasi), bank perkreditan dan koperasi primer. Konsep kebutuhan ruang untuk mendukung kegiatan jasa pengembangan dalam rangka mewujudkan simpul kegiatan agroindustri adalah :

Tabel 2.215
Dasar Pertimbangan Rencana Berdasarkan Fungsi Pusat KTPN
Sebagai Simpul Kegiatan Agroindustri

No	Simpul Kegiatan Agroindustri	Sistem Kegiatan
I	Jasa perbankan	- Bank perkreditan
II	Jasa koperasi	Koperasi primer
III	Jasa Pelatihan SDM	Balai Latihan Kerja
IV	Jasa Perdagangan	- Gudang Saprotan
		- Pusat penjualan pupuk
V	Jasa Bongkar Muat	Terminal Agro
VI	Jasa Informasi	Pusat informasi dan promosi bisnis
VII	Pasar	Pasar modern

Sumber : Dokumen RKT Batu Betumpang, 2017

b. Menjadi Simpul Pelayanan Wilayah Sekitarnya

Berdasarkan muatan fungsi/peran tersebut, maka konsep rencana struktur ruang Pusat Kawasan KTPN mengarah kepada pengembangan sistem kegiatan yang berorientasi eksternal dan rencana sistem kegiatan yang bersifat internal (pelayanan kawasan), maka dapat diidentifikasi fungsi sebagai simpul pelayanan bagi wilayah sekitarnya yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

c. Menjadi Simpul Transportasi Antar Kawasan



Menjadi simpul transportasi antar kawasan merupakan desain konsep pengembangan pusat KTPN Batu Betumpang, dengan pertimbangan pengembangan terminal agro dan penumpang serta dengan dikembangkan ruas jalan bulevard pusat KTPN ke jalan nasional arah Toboali ataupun Koba, maka peran pusat KTPN sebagai simpul transportasi akan menjadi lebih penting.

4. Kawasan Industri Sadai berada di Kecamatan Tukak Sadai.

Kawasan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kawasan Peruntukkan Industri merupakan zona pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang, yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri. Tujuan penetapan Kawasan peruntukan industri adalah :

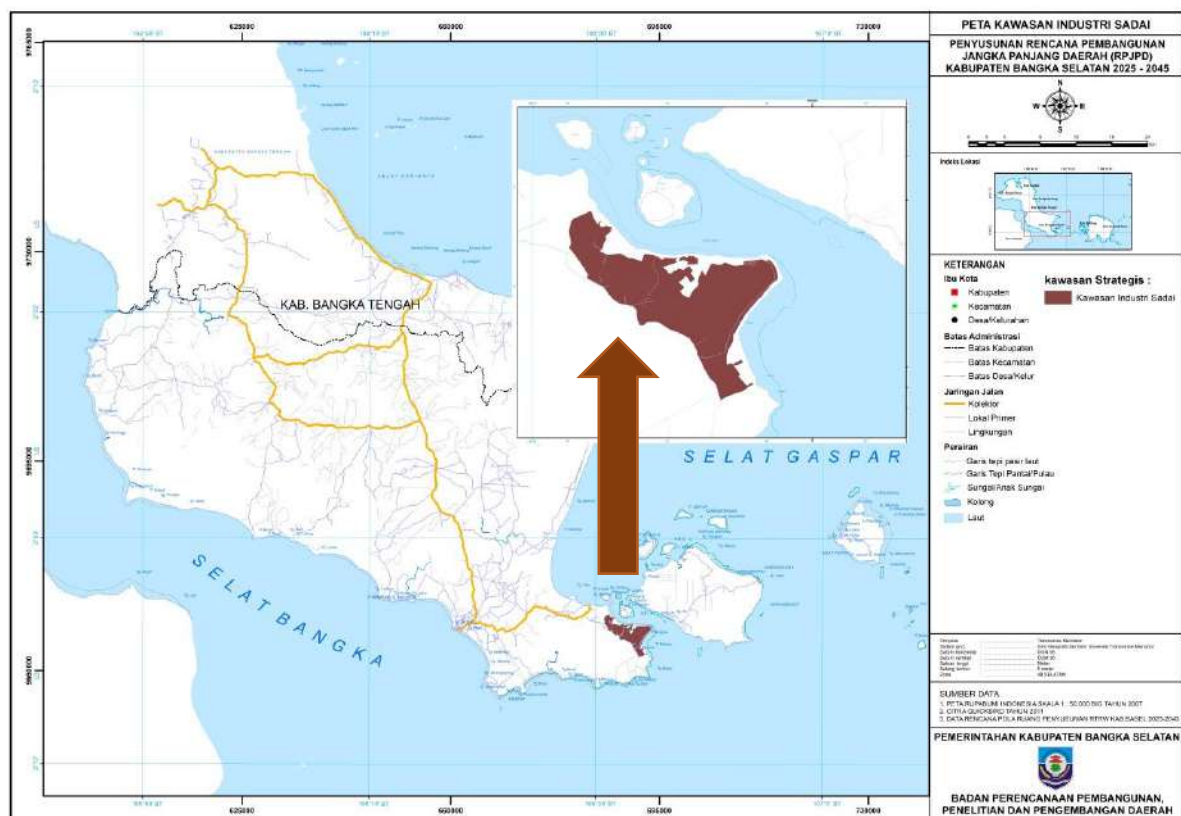
- 1) Mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan industri;
- 2) Meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan; dan
- 3) Meningkatkan daya saing investasi dan daya saing industri serta memberikan kepastian lokasi dalam menyediakan fasilitas bersama.

Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Bangka direncanakan seluas 1.899,82 hektar merupakan Kawasan Industri Sadai (KIS) yang terdapat di Kecamatan Tukak Sadai. Arah rencana kawasan peruntukan industri meliputi:

- a) Penetapan kawasan peruntukan industri;
- b) Peningkatan dan pengembangan infrastruktur pendukung kawasan industri;
- c) Pengembangan kawasan budidaya industri kecil dan menengah;
- d) Mengembangkan sistem pemasaran terpadu dengan pola kerjasama dengan berbagai perusahaan baik dalam skala lokal, regional maupun internasional;
- e) Pembinaan dan pelatihan pelaku industri kecil dan menengah;
- f) Pengelolaan daerah resapan air disekitar wilayah industri, serta menanam jenis vegetasi dengan fungsi penyerapan carbon yang tinggi;
- g) Peningkatan vegetasi pada zona buffer kawasan industri sebagai penyerap karbon;
- h) Optimalisasi lahan pekarangan atau *urban farming* untuk meningkatkan produksi bahan pangan;
- i) Pemasangan alat pemantau kualitas udara disekitar wilayah industri yang menghasilkan gas emisi buang;
- j) Memberikan regulasi yang tegas terkait pembuatan sumur resapan di wilayah peruntukan industri dengan jumlah yang direkomendasikan 1 sumur resapan setiap 100 meter persegi lusan kawasan peruntukan industri;

- k) Menetapkan kebijakan tata ruang dan pengelolaan lahan yang mendukung pelestarian tanah; dan
- l) Penyediaan sebagian lahan di kawasan peruntukan industri untuk dijadikan kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Jenis-jenis Industri yang akan dikembangkan di Kawasan Industri Sadai dan sekitarnya adalah jenis-jenis Industri maritim dan non Industri baik yang bersifat polutif maupun non polutif. Industri tersebut berupa agro dan non agro. Penetapan lokasi Kawasan Industri Sadai dilakukan melalui Surat Keputusan Gubernur Provinsi Bangka Belitung No. 188.4/781/BAPPEDA/2016 tertanggal 05 September 2016, serta termuat dalam Peraturan Presiden nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.



Gambar 2.61
Peta Kawasan Industri Sadai

Sumber : Data Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Penyusunan RTRW Kab. Bangka Selatan 2023-2043

2.7.2.1.2. Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Kawasan strategis jika dilihat dari sudut kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup di Kabupaten Bangka Selatan yaitu :

1. Kawasan Pariwisata;



Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Rencana Induk Destinasi Nasional Bangka Belitung 2023-2044, Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) Bangka Belitung memiliki 517 (lima ratus tujuh belas) DTW yang terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok jenis wisata, yaitu 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) DTW alam, 170 (seratus tujuh puluh) DTW budaya, dan 58 (lima puluh delapan) DTW buatan. Berdasarkan pertimbangan aglomerasi DTW, kedekatan jarak, dan konektivitas antar DTW, dirumuskan penentuan delineasi klusterisasi DTW yang ada ke dalam 20 (dua puluh) kluster destinasi Pariwisata dan 13 (tiga belas) Kawasan Inti Pariwisata (KIP), *Key Tourism Area* (KTA) yang tersebar di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota. Penentuan delineasi dilakukan secara aspiratif dengan menggabungkan beberapa tabel DTW dengan pertimbangan aglomerasi DTW dalam cakupan administrasi wilayah Kabupaten/Kota.



Gambar 2.62
Gambar Peta Daerah Pariwisata Nasional Bangka Belitung
 Sumber : Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2024

Wilayah Kabupaten Bangka Selatan Memiliki KTA Toboali Lepar yang mendapatkan prioritas penanganan pertama di pelaksanaan tahap pertama. Sementara itu, penanganan terakhir berada di KTA Batu Betumpang berdasarkan nilai terendah sebagai bahan pertimbangan utama dalam penentuan prioritas skenario pengembangan. Adapun rincian KTA dan DTW di wilayah bangka selatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.216
KTA dan DTW RIDPN

KTA	Nama DTW	Jenis Wisata	Kecamatan	Kabupaten/Kota
KTA TOBOALI-LEPAR	Pantai Batu Tambun Pongok	Alam	Kepulauan Pongok	Kabupaten Bangka Selatan
	Pulau Pongok	Alam	Kepulauan Pongok	Kabupaten Bangka Selatan
	Pantai Celagen	Alam	Kepulauan Pongok	Kabupaten Bangka Selatan
	Pulau Tinggi	Alam	Lepar	Kabupaten Bangka Selatan
	Pulau Mentengor	Alam	Lepar	Kabupaten Bangka Selatan
	Terumbu Karang Pulau Lepar	Alam	Lepar	Kabupaten Bangka Selatan
	Pantai Tanjung Labu	Alam	Lepar	Kabupaten Bangka Selatan
	Pulau Lepar	Alam	Lepar	Kabupaten Bangka Selatan
	Pantai Lampu	Alam	Lepar	Kabupaten Bangka Selatan
	Batu Sumber Air	Alam	Lepar	Kabupaten Bangka Selatan
	Pantai Belawang	Alam	Lepar	Kabupaten Bangka Selatan
	Pantai Kumbang	Alam	Lepar	Kabupaten Bangka Selatan
	Pantai Tanjung Bugis	Alam	Lepar	Kabupaten Bangka Selatan
	Pantai Pulau Kelapan	Alam	Lepar	Kabupaten Bangka Selatan
	Wisata selam Shipwreck	Alam	Lepar	Kabupaten Bangka Selatan
	Wisata Selam Terumbu Karang Pulau Kelapan	Alam	Lepar	Kabupaten Bangka Selatan
Wisata Selam Batumandi	Alam	Lepar	Kabupaten Bangka Selatan	



KTA	Nama DTW	Jenis Wisata	Kecamatan	Kabupaten/Kota
	Bukit Muntai	Alam	Toboali	Kabupaten Bangka Selatan
	Sungai Little Amazon Desa Jeriji	Alam	Toboali	Kabupaten Bangka Selatan
	Pantai Boom Panjang	Alam	Toboali	Kabupaten Bangka Selatan
	Pantai Nek Aji	Alam	Toboali	Kabupaten Bangka Selatan
	Wisata Alam Batu Belimbing	Alam	Toboali	Kabupaten Bangka Selatan
	Bukit Gadung	Alam	Toboali	Kabupaten Bangka Selatan
	Kawasan Pantai Batu Kodok	Alam	Toboali	Kabupaten Bangka Selatan
	Pantai Batu Ampar	Alam	Toboali	Kabupaten Bangka Selatan
	Pantai Batu Perahu	Alam	Toboali	Kabupaten Bangka Selatan
	Pantai Kapur	Alam	Toboali	Kabupaten Bangka Selatan
	Pantai Kelisut	Alam	Toboali	Kabupaten Bangka Selatan
	Pantai Merbau	Alam	Toboali	Kabupaten Bangka Selatan
	Pantai Tanjung Zibur	Alam	Toboali	Kabupaten Bangka Selatan
	Pantai Tanjung Ketapang	Alam	Toboali	Kabupaten Bangka Selatan
	Pantai Batu Alam	Alam	Toboali	Kabupaten Bangka Selatan
	Wisata Persawahan Desa Rias	Alam	Toboali	Kabupaten Bangka Selatan
	Pantai Labun	Alam	Toboali	Kabupaten Bangka Selatan
	Pantai Tanjung Ru	Alam	Tukak Sadai	Kabupaten Bangka Selatan



KTA	Nama DTW	Jenis Wisata	Kecamatan	Kabupaten/Kota
	Pantai Puding Besar	Alam	Tukak Sadai	Kabupaten Bangka Selatan
	Pantai Balai Benih	Alam	Tukak Sadai	Kabupaten Bangka Selatan
	Pantai Tanjung Besar	Alam	Tukak Sadai	Kabupaten Bangka Selatan
	Pantai Tanjung Kemirai	Alam	Tukak Sadai	Kabupaten Bangka Selatan
	Pantai Tanjung Kerasak	Alam	Tukak Sadai	Kabupaten Bangka Selatan
	Wisata Mangrove Tukak Sadai	Alam	Tukak Sadai	Kabupaten Bangka Selatan
	Peninggalan Sejarah Pergam	Budaya	Airgegas	Kabupaten Bangka Selatan
	Jewel of Muscat asal Oman	Budaya	Kepulauan Pongok	Kabupaten Bangka Selatan
	Kapal Karam: Tek Sing Cargo di Selat Gaspar	Budaya	Kepulauan Pongok	Kabupaten Bangka Selatan
	Kapal Karam: Tang Cargo di Perairan Batu Hitam	Budaya	Kepulauan Pongok	Kabupaten Bangka Selatan
	Situs Keranglucan	Budaya	Kepulauan Pongok	Kabupaten Bangka Selatan
	Desa Penutuk	Budaya	Kepulauan Pongok	Kabupaten Bangka Selatan
	Desa Tanjung Labu	Budaya	Kepulauan Pongok	Kabupaten Bangka Selatan
	Ritual Buang Jung	Budaya	Kepulauan Pongok	Kabupaten Bangka Selatan
	Kehidupan Suku Sekak	Budaya	Kepulauan Pongok	Kabupaten Bangka Selatan
	Benteng Penutuk	Budaya	Kepulauan Pongok	Kabupaten Bangka Selatan
	Ritual Buang Jung	Budaya	Lepar	Kabupaten Bangka Selatan
	Situs Batumandi	Budaya	Lepar	Kabupaten Bangka Selatan



KTA	Nama DTW	Jenis Wisata	Kecamatan	Kabupaten/Kota
	Upacara Adat Kawin Massal	Budaya	Toboali	Kabupaten Bangka Selatan
	Kelekak Keramat Toboali	Budaya	Toboali	Kabupaten Bangka Selatan
	Kelenteng Dewi Sin Mu Tahun 1800	Budaya	Toboali	Kabupaten Bangka Selatan
	Makam Keramat Bahar (Makam Syeikh Said Jamaludin Al Afany)	Budaya	Toboali	Kabupaten Bangka Selatan
	Patung Nanas	Budaya	Toboali	Kabupaten Bangka Selatan
	Benteng Toboali	Budaya	Toboali	Kabupaten Bangka Selatan
	Gedung Nasional Suhaili Toho	Budaya	Toboali	Kabupaten Bangka Selatan
	Gedung Pertemuan Junjung Besaoh	Budaya	Toboali	Kabupaten Bangka Selatan
	Patung Bola	Budaya	Toboali	Kabupaten Bangka Selatan
	Kelenteng Dewa Kuantu	Budaya	Toboali	Kabupaten Bangka Selatan
	Ritual Rebut	Budaya	Toboali	Kabupaten Bangka Selatan
	Desa Tukak	Budaya	Tukak Sadai	Kabupaten Bangka Selatan
	Desa Pasir Putih	Budaya	Tukak Sadai	Kabupaten Bangka Selatan
	Keramba Apung Pulau Tinggi	Buatan	Lepar	Kabupaten Bangka Selatan
	Mercusuar Pulau Dapur	Buatan	Pulau Besar	Kabupaten Bangka Selatan
	Perkebunan Nanas	Buatan	Toboali	Kabupaten Bangka Selatan
	Waterpark Yorla	Buatan	Toboali	Kabupaten Bangka Selatan

KTA	Nama DTW	Jenis Wisata	Kecamatan	Kabupaten/Kota
KTA BATU BETUMPANG	Air Panas Nyelanding	Alam	Airgegas	Kabupaten Bangka Selatan
	Pantai Batu Betumpang	Alam	Pulau Besar	Kabupaten Bangka Selatan
	Desa Nyelanding	Budaya	Airgegas	Kabupaten Bangka Selatan
	Ritual Hikok Helawang	Budaya	Airgegas	Kabupaten Bangka Selatan
	Desa Batu Betumpang	Budaya	Airgegas	Kabupaten Bangka Selatan
	Perkebunan Lada	Buatan	Airgegas	Kabupaten Bangka Selatan
	Mercusuar Willem II	Buatan	Pulau Besar	Kabupaten Bangka Selatan
	Perkebunan Salak	Buatan	Pulau Besar	Kabupaten Bangka Selatan
	Perkebunan Salak Pondoh	Buatan	Pulau Besar	Kabupaten Bangka Selatan
	Mercusuar Lampu	Buatan	Pulau Besar	Kabupaten Bangka Selatan

2. Kawasan Ekosistem Esensial di Kecamatan Lepar dan Kecamatan Kepulauan Pongok.

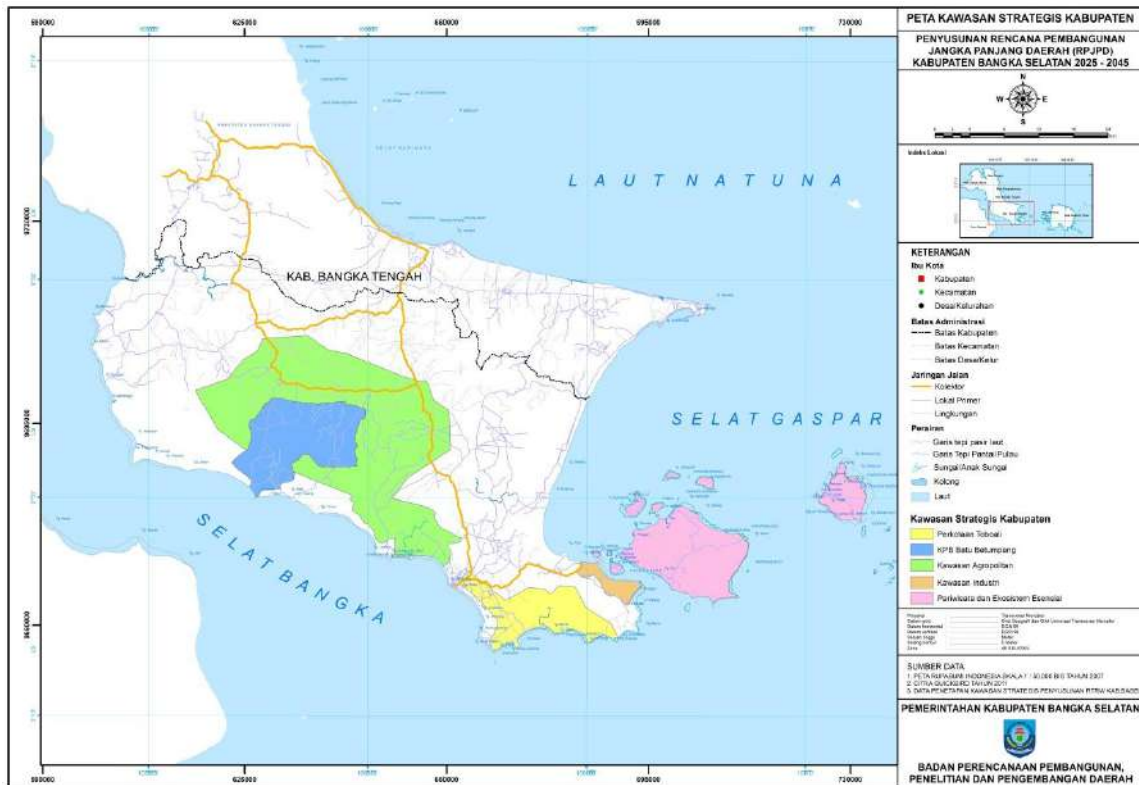
Berikut rencana pengembangan Kawasan Strategis berdasarkan RTRW Kabupaten Bangka Selatan 2023-2043 yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.217
Kawasan Strategis Kabupaten

No.	Nama Kawasan Strategis	Kepentingan
1	Kawasan Perkotaan Toboali	Ekonomi
2	Kawasan Industri Sadai	Ekonomi
3	Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional Batu Betumpang	Ekonomi
4	Kawasan Agropolitan	Ekonomi

No.	Nama Kawasan Strategis	Kepentingan
5	Kawasan Pariwisata	Lingkungan Hidup
6	Kawasan Ekosistem Esensial	Lingkungan Hidup

Sumber : Data Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Penyusunan RTRW Kab. Bangka Selatan 2023-2043



Gambar 2.63
Peta Rencana Kawasan Strategis
 Sumber : Materi Teknis Revisi RTRW Kab. Bangka Selatan 2023-2043

2.7.2.2. Tujuan Pengembangan Kawasan Strategis

Tujuan pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Selatan meliputi :

1. Tujuan pengembangan kawasan perkotaan Toboali di Kecamatan Toboali adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan Toboali sebagai pusat Pemerintahan Kabupaten, pusat pendidikan, dan pusat Perdagangan dan jasa yang didukung dengan fasilitas sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan ekonomi.
2. Tujuan pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Airgegas, Kecamatan Pulau Besar dan Kecamatan Toboali adalah mewujudkan kawasan agropolitan sebagai kawasan industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan yang berwawasan lingkungan.
3. Tujuan pengembangan Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional (KTPN) Batu Betumpang di Kecamatan Pulau Besar adalah mempercepat dan mendorong terwujudnya pusat-pusat pertumbuhan baru.



4. Tujuan pengembangan kawasan industri sadai di Kecamatan Tukak Sadai adalah mewujudkan kawasan industri sadai sebagai kegiatan industri yang berdaya saing dan ramah lingkungan.

Adapun tujuan dari penetapan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup adalah mewujudkan pelestarian kawasan Lepar dan Kepulauan Pongok sebagai kawasan wisata alam dan kawasan konservasi.

2.7.2.3. Arahan Pengembangan Kawasan Strategis

Arahan pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi Kabupaten meliputi :

1. Arahan pengembangan kawasan Perkotaan Toboali meliputi :
 - a. Pengembangan sektor perkantoran, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa dan permukiman;
 - b. penataan lingkungan dan bangunan kawasan Perkotaan Toboali; dan
 - c. pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi.
2. Arahan pengembangan kawasan agropolitan meliputi :
 - a. peningkatan atau penambahan pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung agropolitan; dan
 - b. pengembangan kawasan agropolitan berupa sistem dan mata rantai produksi yaitu sub sistem hulu dan hilir.
3. Arahan pengembangan Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional (KTPN) Batu Betumpang meliputi :
 - a. penataan kawasan KTPN Batu Betumpang;
 - b. pengembangan ekonomi lokal;
 - c. pembangunan infrastruktur untuk mendukung kegiatan kawasan KPB Batu Betumpang; dan
 - d. pembangunan sarana dan prasarana pendukung kawasan KTPN Batu Betumpang yang lebih nyaman.
4. Arahan pengembangan Kawasan Industri Sadai, meliputi:
 - a. pengembangan sektor Perdagangan dan jasa;
 - b. peningkatan kualitas sarana dan prasarana di sekitar Kawasan Industri sadai; dan
 - c. pembangunan sarana dan prasarana pendukung industri.

Sedangkan arahan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yaitu kawasan pariwisata dan ekosistem esensial meliputi :

1. Penataan kawasan pariwisata.
2. Pengembangan kegiatan pariwisata dengan memperhatikan lingkungan hidup.
3. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung pariwisata

2.7.3. Arahan Pengembangan Kawasan Pedesaan

Pembangunan kawasan Pedesaan dilaksanakan dengan prinsip antara lain partisipatif, holistik dan komprehensif, keterpaduan, dan berkesinambungan. Artinya, pembangunan kawasan Pedesaan harus dilaksanakan melalui sinergisme antar berbagai komponen. Selain itu pengembangan kawasan Pedesaan harus memenuhi yang syarat salah satunya adalah memiliki potensi komoditas unggulan yang layak dikembangkan dan atau masalah yang urgen dan layak untuk diselesaikan dalam skala kawasan.

Berdasarkan hasil kajian Rencana Pembangunan Kawasan Pedesaan, kawasan Pedesaan Kabupaten Bangka Selatan adalah kawasan yang berbasis produk unggulan Lada Putih. Dalam dokumen RTRW Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023-2043 dan RPJMN Tahun 2020-2024, kawasan Pedesaan Kabupaten Bangka Selatan merupakan Kawasan Prioritas Pedesaan Nasional (KPPN) Lada Putih. Adapun komoditi penunjangnya yaitu peternakan sapi, wisata bahari, sawit dan karet. Kawasan Pedesaan pengembangan lada putih terletak di dua Kecamatan yaitu Kecamatan Airgegas dan Kecamatan Payung. Fokus pengembangan kawasan lada putih di Kecamatan Airgegas yaitu di Desa Airgegas, Desa Delas, Desa Nyelanding, Desa Air Bara, Desa Ranggung dan Desa Nangka. Sedangkan pengembangan lada putih di Kecamatan Payung difokuskan di Desa Payung, Desa Paku, Desa Bedengung, Desa Irat dan Desa Sengir.

Arahan kebijakan pengembangan Kawasan Pedesaan berbasis Lada Putih di Kabupaten Bangka Selatan yang merupakan jabaran dari visi kawasan Pedesaan di Kabupaten Bangka Selatan yaitu : “Terwujudnya Petani Jaya, Maju dan Mandiri” dengan beberapa Misi diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Mendorong peningkatan SDM petani dan nelayan yang handal

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kapasitas dan kemampuan petani dalam meningkatkan hasil produksi	Menurunnya gangguan tanaman lada terhadap penyakit dan hama	Mendorong upaya-upaya pelatihan dan pendampingan secara berkesinambungan yang tidak hanya melibatkan tenaga penyuluh yang ada, namun ditambah juga tenaga ahli pertanian	Pemberian pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan terkini pengembangan lada Putih Pendampingan terhadap kelompok secara berkala dan membuka kesempatan share learning dari petani yang telah berhasil

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kapasitas petani dan nelayan dalam mengembangkan komoditas penunjang di kawasan	Terbentuknya pusat data dan informasi komoditas lada putih	Menjaring semua pengetahuan, data dan informasi terkait penanaman dan perkembangan lada putih, sebagai acuan dan bahan penelitian dan pengembangan	Pemetaan kembali semua data terkait pengembangan lada putih selama ini
	Terbentuknya kebun percontohan lada putih		Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemanfaatan informasi terkait pengembangan lada putih

2. Mendorong berkembangnya industri pengolahan yang berdaya saing melalui pemanfaatan teknologi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana industri pengolahan	Tersedianya bantuan permodalan bagi unit-unit usaha industri pengolahan	Membangun skema pemberian modal yang dapat bermanfaat dalam menunjang pengembangan industri pengolahan	Pendekatan penguatan kelompok sebagai syarat dalam pemberian modal
			Pembentukan atau pengaktifan lembaga koperasi sebagai wadah penyaluran dan pemanfaatan modal
Meningkatkan Kemampuan masyarakat dalam pengolahan komoditas kawasan	Meningkatnya penerapan teknologi pasca produksi untuk meningkatkan nilai tambah	Memanfaatkan teknologi tepat guna yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan, kapasitas dan kuantitas produksi	Pengadaan peralatan produksi pengolahan yang dapat diaplikasikan dengan mudah oleh masyarakat
			Pengawasan dan pemeliharaan peralatan produksi melalui kelompok dengan target produksi dan pemasaran sebagai target modal pengembangan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			selanjutnya
	Terciptanya produk-produk turunan komoditas lada	Mendorong upaya branding produk dengan kualitas dan kemasan produk yang dapat disesuaikan dengan target pasar baik skala lokal, regional, maupun internasional	Penentuan produk olahan yang menjadi prioritas pengembangan Penyesuaian Desain kemasan dengan perbedaan target pasar dan perbedaan harga jual

3. Meningkatkan produksi pertanian dan perikanan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menjamin ketersediaan sarana prasana produksi yang tangguh	Tersedianya sarana prasarana angkutan dan perhubungan komoditas lada putih	Menjamin kelancaran dan efisiensi distribusi hasil produksi terhadap lokasi pasar dan keterhubungan antara sentra-sentra produksi	Pembangunan jalan baru dan pemeliharaan jalan dalam mendukung kelancaran distribusi komoditas dari sentra-sentra produksi Pembangunan, pemeliharaan, dan peningkatan jembatan penghubung jalur distribusi komoditas
	Tersedianya sarana prasarana penunjang produksi lada putih	Menjamin kelancaran produksi dalam rangka meningkatkan jumlah produksi komoditas melalui bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan	Pemenuhan kebutuhan saprodi dalam skema bantuan langsung cuma-cuma atau pinjaman dengan laporan perkembangan yang diawasi secara berkala
Meningkatkan perlindungan terhadap lahan perkebunan masyarakat	Terbentuknya pemetaan produksi dan luas lahan kawasan pengembangan lada putih	Menambah luas area perkebunan dengan cara memberikan kesempatan masyarakat untuk mengelola lahan milik Desa	Pembuatan regulasi yang mengatur kawasan perkebunan
			Pembuatan peraturan tentang pengelolaan lahan milik Desa
			Penguatan kawasan Pedesaan pengembangan lada putih oleh pemerintah daerah

4. Mendorong kerjasama dalam peningkatan pemasaran

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kerjasama multipihak dalam pemasaran komoditas unggulan kawasan	Terbukanya akses dan fasilitas pasar yang dikelola masyarakat	Mendorong peran BUMDESMA dan pengelola kawasan dalam menjalin kerjasama-kerjasama antar para pihak yang dapat mendukung pemasaran komoditas	Pelengkapan kebutuhan-kebutuhan administrasi terkait kerjasama pemasaran termasuk dalam hal kepastian hukum
			Pelibatan pihak-pihak swasta dengan skema kerjasama pemasaran yang saling menguntungkan
	Penantaan jalur distribusi lada putih	Mengefisiensikan mata rantai pemasaran lada putih	Pengaturan jaringan pemasaran yang menguntungkan bagi petani
			Intervensi harga yang dilakukan oleh Pemda melalui Peraturan Bupati



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Analisis permasalahan dan isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting dokumen RPJPD karena menjadi dasar utama perumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah. Oleh karena itu, penyajian analisis ini menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam pembangunan daerah untuk waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang. Bab ini memuat berbagai isu strategis yang terkait dengan permasalahan pembangunan daerah yang dirinci berdasarkan aspek geografis dan demografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum serta aspek daya saing daerah. Selanjutnya hasil identifikasi permasalahan setiap aspek menjadi salah satu masukan dalam menentukan isu strategis daerah dengan tetap memperhatikan perkembangan isu global, nasional maupun lokal.

3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah yang disajikan adalah permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang relevan atau pada akhirnya dijadikan dasar dalam perumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah. Dengan demikian permasalahan pembangunan daerah disajikan dengan merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang merupakan "*gap expectation*" atau kesenjangan harapan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Capaian kinerja pembangunan di berbagai bidang pada masa sebelumnya telah menghantarkan masyarakat Kabupaten Bangka Selatan ke dalam kondisi kehidupan yang semakin baik. Namun demikian, dalam penyelenggaraan pembangunan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir masih terdapat permasalahan-permasalahan pokok pembangunan yang krusial untuk dijadikan dasar penyusunan rencana jangka panjang di masa datang. Oleh karena itu, identifikasi permasalahan pembangunan harus dilakukan secara holistik dan komprehensif untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu sebagai basis dalam merumuskan isu strategis daerah. Tabel dibawah ini merupakan permasalahan pembangunan Kabupaten Bangka Selatan berdasarkan aspek dan/atau bidang urusan pemerintah daerah.



Tabel 3.1.
Permasalahan Pembangunan Menurut Bidang Urusan di Kabupaten Bangka Selatan

Aspek/Urusan/Fokus Bidang	Permasalahan	Penjelasan
Aspek Geografis dan Demografi		
Kondisi Geografis	Indeks Risiko Bencana Kabupaten Bangka Selatan Tinggi	Kabupaten Bangka Selatan merupakan salah satu Kabupaten dengan risiko bencana tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan data Inarisk BNPB, Indeks Resiko Bencana di Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022 sebesar 176,14 yang merupakan peringkat 2 (dua) tertinggi setelah Kabupaten Bangka Barat dengan indeks risiko bencana 180,40. Adapun potensi bencana di Kabupaten Bangka Selatan yakni: <ul style="list-style-type: none"> - Potensi bencana banjir, - Banjir bandang, - Cuaca ekstrim, - Gelombang ekstrim dan abrasi, - Kekeringan, - Kebakaran hutan dan lahan
Kondisi Demografi	Rasio Ketergantungan Kabupaten Bangka Selatan Tinggi	Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 2020 sebesar 39,31 %. Hal tersebut mengindikasikan beban penduduk usia produktif di Kabupaten Bangka Selatan terhadap penduduk usia non produktif masih tergolong tinggi
	Bonus Demografi	Tren laju pertumbuhan penduduk selama 20 tahun kedepan akan mengalami perlambatan. Oleh karena itu, komposisi struktur penduduk akan didominasi oleh usia produktif dan terjadi penambahan usia non produktif sehingga piramida penduduk di Kabupaten Bangka Selatan berdasarkan hasil proyeksi penduduk 20 tahun mendatang akan mengarah pada piramida konstruktif



Aspek/Urusan/Fokus Bidang	Permasalahan	Penjelasan
		(tua) dan Bangka Selatan akan menghadapi bonus demografi dalam 13 tahun yang akan datang
Aspek Kesejahteraan Masyarakat		
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Perkapita Melambat	Berdasarkan analisis LQ dan <i>Shift Share</i> diketahui bahwa kinerja perekonomian di Kabupaten Bangka Selatan masih didominasi oleh sektor Basis yakni pertanian, perkebunan dan perikanan. Namun demikian, nilai tambah dari lapangan usaha tersebut masih belum menunjukkan perkembangan yang positif dalam kurun waktu 10 terakhir sehingga meskipun tingkat kemiskinan di Kabupaten Bangka Selatan cenderung lebih baik dibandingkan dengan Kabupaten-kabupaten lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung namun belum memberikan kontribusi yang maksimal untuk meningkatkan kondisi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Walaupun Indeks Gini dalam kategori rendah, diperlukan upaya untuk menurunkan ketimpangan. Ketimpangan dipicu oleh nilai tambah sektor pertanian yang rendah, perkembangan sektor industri yang belum menunjukkan perkembangan yang cukup baik sehingga belum mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja dan sektor-sektor lainnya juga belum optimal dalam menyerap tenaga kerja.
	Kemiskinan	
	Tingkat Ketimpangan dan Pemerataan Ekonomi Antar Wilayah di Kabupaten Bangka Selatan	
	Tingkat Pengangguran Terbuka yang Masih Tinggi	



Aspek/Urusan/Fokus Bidang	Permasalahan	Penjelasan
Aspek Kesejahteraan Sosial		
Fokus Kesejahteraan Sosial	Masih Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bangka Selatan	<p>Nilai IPM Kabupaten Bangka Selatan masih masuk kategori sedang. Angka ini masih dibawah angka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sudah mencapai angka 72,24 dan berada di urutan terakhir pada IPM untuk seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adapun masih rendahnya nilai IPM di Kabupaten Bangka Selatan jika dibandingkan dengan Kabupaten lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Faktor Ekonomi - Faktor Budaya (budaya pernikahan dini dan lain-lain) - Belum adanya PT sehingga banyaknya siswa yang melanjutkan sekolah di kabupaten/kota lain - Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan - Belum berkembangnya sektor formal dengan kualifikasi dan syarat tenaga kerja dengan pendidikan tinggi
Aspek Pelayanan Umum		
Pendidikan	Angka Rata-Rata Lama Sekolah yang Masih Rendah	<p>Dapat disebabkan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas internal penduduk yang kurang untuk berpartisipasi dalam Pendidikan - Ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang kurang dan belum merata - Masih Adanya Peserta Didik yang Putus Sekolah



Aspek/Urusan/Fokus Bidang	Permasalahan	Penjelasan
	<p>Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bangka Selatan dibawah HLS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</p>	<p>- Belum optimalnya angka partisipasi murni pendidikan SD dan SMP</p> <p>Angka harapan lama sekolah di Kabupaten Bangka Selatan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Meski demikian, angka harapan lama sekolah di Kabupaten Bangka Selatan masih dibawah Prov Bangka Belitung. Pada tahun 2022, angka harapan lama sekolah di Kabupaten Bangka Selatan yakni 11,43. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 11,43 tahun atau setara dengan SMA. Sehingga masih diperlukan upaya yang lebih maksimal dari Pemerintah Daerah untuk menaikkan nilai angka harapan lama sekolah hingga ke jenjang perguruan tinggi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kondisi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat - Mengendalikan laju inflasi yang efektif sehingga mendukung peningkatan kualitas hidup layak masyarakat serta peningkatan pengeluaran perkapita tidak terdistorsi oleh tingkat inflasi - Menyediakan perguruan tinggi di Kabupaten Bangka Selatan - Menyiapkan sekolah-sekolah vokasi dan kejuruan sesuai dengan karakteristik daerah



Aspek/Urusan/Fokus Bidang	Permasalahan	Penjelasan
Kesehatan	Rendahnya Angka Harapan Hidup	Kabupaten Bangka Selatan selama 10 (tahun) tahun terakhir dari 2013-2022 menempati urutan terakhir pencapaian Usia Harapan Hidup dibandingkan seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Beberapa hal yang menjadi rendahnya angka harapan hidup di Kabupaten Bangka Selatan antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Kematian pada <i>neonatus</i> yang masih tinggi - Kematian yang disebabkan penyakit-penyakit menular - Kematian yang disebabkan penyakit-penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes melitus dan lain sebagainya
	Meningkatnya Angka <i>Infant Mortality Rate</i> (IMR) per 1000 kelahiran hidup	Berdasarkan data, pada tahun 2022 angka kematian bayi meningkat drastis dari 4,04 persen menjadi 6,41 persen dimana angka tertinggi ada pada Kecamatan Toboali yaitu 10 kematian bayi dari 1.077 jumlah kelahiran hidup. Adapun beberapa penyebab masih tingginya angka IMR antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Fenomena tiga terlambat masih terjadi, yakni terlambat pengambilan keputusan untuk dirujuk ke fasyankes yang tepat, terlambat sampai ke tempat rujukan, dan terlambat ditangani dengan tepat. - Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak - Kurangnya cakupan tenaga medis
	Meningkatnya Persentase Balita Gizi Buruk	Dapat disebabkan oleh: <ul style="list-style-type: none"> - Upaya dan pengetahuan tentang pemenuhan gizi yang belum optimal



Aspek/Urusan/Fokus Bidang	Permasalahan	Penjelasan
	Meningkatnya Prevalensi Balita Stunting	<ul style="list-style-type: none"> - Pola asuh balita - Kualitas pelayanan kesehatan yang belum optimal
	Rasio Ketersediaan Dokter Belum Memenuhi Standar Kebutuhan Per Jumlah Penduduk dan Pemerataan Tenaga Medis	Ketersediaan dokter per satuan penduduk di Kabupaten Bangka Selatan belum sesuai dengan standar dari Peraturan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten Kota Peduli Hak Asasi Manusia bahwa satu dokter spesialis idealnya melayani 16.000 penduduk dan satu dokter umum idealnya melayani 2.500 penduduk. Saat ini rasio dokter umum dibandingkan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Bangka Selatan sebesar 1:5.178. Sedangkan rasio tenaga medis Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 2022 sudah memenuhi standar namun masih diperlukannya pemerataan tenaga medis agar tidak ada kesenjangan pelayanan kesehatan.
Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	Infrastruktur Jalan Masih Belum Memadai	Pada tahun 2022 panjang jalan Kabupaten Bangka Selatan dalam Kondisi baik sepanjang 385,929 km dengan persentase 60,88 persen. Adapun panjang jalan dengan kondisi sedang sepanjang 36,718 km atau 5,79 persen, kondisi rusak ringan sepanjang 9,179 km atau 1,44 persen dan rusak berat sepanjang 202,144 km atau 31,89 persen dari total panjang jalan kewenangan Kabupaten
	Cakupan Pelayanan Air Bersih dan Sanitasi Belum Optimal	Cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi di Kabupaten Bangka Selatan masih dibawah target capaian pelayanan nasional. Faktor penyebab utama dalam penyediaan pelayanan air bersih dan sanitasi salah satunya disebabkan masih minimnya pendanaan baik yang bersumber dari APBD maupun APBN. Realisasi persentase rumah berakses air bersih pada tahun 2022 adalah 82, 40 persen dibawah target nasional yang menargetkan 100 persen.



Aspek/Urusan/Fokus Bidang	Permasalahan	Penjelasan
	Masih Rendahnya Ketaatan Terhadap RTRW	Berdasarkan hasil Peninjauan kembali RTRW Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014 - 2034 tingkat penyimpangan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Bangka sebesar 41,72 %. Beberapa penyebab rendahnya ketaatan terhadap dokumen tata ruang dapat dilihat dari indikasi sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Maraknya Alih Fungsi Lahan - Adanya penyimpangan pemanfaatan kawasan lindung (hutan lindung, kawasan sempadan pantai dan lain sebagainya) - Belum optimalnya pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana indikasi dan program pemanfaatan ruang
Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman	Masih Banyaknya Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Bangka Selatan	Persentase jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 2022 yakni diangka 6,67 % atau sekitar 3.975 rumah tidak layak huni yang perlu menjadi perhatian <i>stakeholder</i> terkait untuk ditangani.
	Masih adanya Kawasan Kumuh di Kabupaten Bangka Selatan	Kawasan kumuh yang belum tertangani di Kabupaten Bangka Selatan hingga tahun 2022 adalah seluas 14,39 Ha. Munculnya kawasan kumuh ini disebabkan masih rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur permukiman sehingga perlu mendapatkan prioritas penanganan agar luasan kawasan kumuh ini tidak semakin bertambah.
Sosial	Belum Optimalnya Penanganan PMKS	Hal ini dipengaruhi oleh: <ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan PMKS - Belum optimalnya pendataan administrasi terkait layanan PMKS (belum optimalnya operator data DTKS di tingkat desa setiap triwulan



Aspek/Urusan/Fokus Bidang	Permasalahan	Penjelasan
Pemberdayaan Perempuan	Masih rendahnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG).	<p>- Belum optimalnya koordinasi lintas lembaga atau sektor</p> <p>Capaian IDG Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 2022 50,14 yang merupakan capaian terendah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sedangkan Capaian IPG Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 2022 adalah 84,94 (masih di bawah IPG Provinsi, 89,55). Rendahnya pencapaian ini dipengaruhi oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pemberdayaan perempuan; - Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang; - Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender gender; - Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan.
	Tingginya Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	<p>IKG Kabupaten Bangka Selatan tahun 2022 adalah 0,597. Jika dibandingkan dengan regional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, IKG Kabupaten Bangka Selatan adalah yang tertinggi (IKG Provinsi 0,497). Hal ini menunjukkan masih tingginya ketidakefektifan pembangunan manusia yang disebabkan oleh ketimpangan gender. Hal ini dilihat dari 3 (tiga) dimensi, yakni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensi kesehatan reproduksi; - Dimensi pemberdayaan; dan - Dimensi pasar tenaga kerja.



Aspek/Urusan/Fokus Bidang	Permasalahan	Penjelasan
Perhubungan	Belum optimalnya pelayanan transportasi yang terintegrasi, kinerja jaringan pelayanan angkutan umum, pengawasan dan pengendalian lalu lintas jalan, dan pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya perlengkapan sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas jalan - Belum adanya moda transportasi umum darat yang terintegrasi di dalam kota Toboali - Tingkat kesadaran dari masyarakat dalam berlalu lintas masih rendah
Lingkungan Hidup	Masih Rendahnya Ketaatan terhadap AMDAL/UKL UPL (Dokumen Lingkungan)	Masih rendahnya pengawasan menyebabkan masih terdapat 20 % perusahaan atau badan usaha yang tidak melaksanakan kegiatan usaha mereka sesuai dengan indikator kinerja lingkungan yang telah disepakati sehingga dapat berdampak negatif terhadap lingkungan di Kabupaten Bangka Selatan
	Kerusakan Lingkungan akibat Aktifitas Eksploitasi Sumberdaya Alam	Terjadinya kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Bangka Selatan yang diakibatkan oleh eksploitasi sumberdaya alam yang kurang memperhatikan kaidah-kaidah konservasi serta belum optimalnya penerapan hukum terkait <i>illegal mining</i> dan <i>illegal logging</i>
	Persampahan	Jumlah timbulan sampah terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Hingga saat ini hanya terdapat 1 TPA di Kabupaten Bangka Selatan yang perlu dilakukan analisis lebih lanjut daya tampungnya dalam 20 tahun mendatang. Selain itu, masalah sampah juga menjadi masalah utama pada wilayah-wilayah pesisir seperti pada Kecamatan Lepar dan Kecamatan Kepulauan Pongok



Aspek/Urusan/Fokus Bidang	Permasalahan	Penjelasan
	Alih Fungsi Lahan	Alih fungsi lahan di Kabupaten Bangka Selatan masih tergolong tinggi. Dimana dapat ditemukan banyak kegiatan masyarakat yang dilakukan pada Kawasan lindung (hutan, sempadan pantai, kolong dan lain sebagainya). Tidak hanya itu, ditemukan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan, pertambangan atau perikanan budidaya menjadikan semakin rendahnya daya dukung dan daya tampung lingkungan di Kabupaten Bangka Selatan
Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil	Belum optimalnya pengelolaan data administrasi kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> - Masih kurangnya SDM dalam melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan - Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan kependudukan - Masih minimnya inovasi pelayanan
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Terjadinya Penurunan Angka CPR (<i>Contraceptive Prevalance Rate</i>)	Terjadi penurunan persentase CPR dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir berdampak terhadap semakin tingginya angka TFR (<i>Total Fertility Rate</i>).
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	IPG dan IDG Kabupaten Bangka Selatan masih dibawah Prov. Kep. Bangka Belitung	Masih rendahnya IPG dan IDG di Kabupaten Bangka Selatan disebabkan masih belum optimalnya pemberdayaan perempuan dalam kegiatan pembangunan dan sosial masyarakat.
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masih Sedikitnya Koperasi Aktif	Hingga Tahun 2022, hanya 56,57 % koperasi aktif di Kabupaten Bangka Selatan. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab masih belum maksimalnya perkembangan koperasi di Kabupaten Bangka Selatan: <ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya akses permodalan dan promosi - Masih kurangnya pembinaan terhadap pelaku koperasi
	Pengelolaan UMKM Belum Optimal	Masih Banyaknya Usaha Mikro yang belum terstandarisasi dan tersertifikasi di Kabupaten Bangka Selatan menjadikan sebagian besar usaha mikro yang berjalan tersebut tidak bisa <i>scall up</i> dan



Aspek/Urusan/Fokus Bidang	Permasalahan	Penjelasan
		<i>bankable</i> . Berdasarkan data terdapat 33.750 usaha mikro yang belum memiliki standar dan sertifikasi produk.
	Terbatasnya Akses Permodalan	Masih terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber permodalan menjadi salah satu kendala dalam mengembangkan sektor usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Bangka Selatan
Penanaman Modal	Belum optimalnya realisasi investasi (PMA dan PMDN)	Disebabkan oleh: <ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal - Kurangnya informasi mengenai potensi dan peluang investasi - Perubahan sistem perijinan menjadi OSS dan masih kurangnya kepatuhan melaporkan kegiatan penanaman modal
Ketahanan Pangan	Ketersediaan pangan utama menurun	Disebabkan oleh: <ul style="list-style-type: none"> - Anomali musim - Sistem pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah belum optimal - Kelembagaan pangan dan sistem distribusi pangan belum optimal - Minimnya adopsi teknologi - Penurunan produksi salah satunya disebabkan maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi tambak/perkebunan sawit serta terjadinya penurunan kualitas lingkungan yang berpengaruh terhadap produksi pertanian



Aspek/Urusan/Fokus Bidang	Permasalahan	Penjelasan
Pemberdayaan Masyarakat & Desa	Indeks Desa Membangun Kabupaten Bangka Selatan belum berada di status mandiri	Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Bangka Selatan tahun 2022 berada pada status maju terjadi peningkatan pada tahun sebelumnya yang berada pada status berkembang. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan masih perlu melakukan upaya mendorong peningkatan status IDM pada tahun-tahun selanjutnya sehingga dapat mencapai predikat mandiri.
	Belum Optimalnya Pengelolaan BUMDES	Hingga saat ini pengelolaan BUMDES di Kabupaten Bangka Selatan masih belum optimal. Beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dalam pengembangan BUMDES yakni: <ul style="list-style-type: none"> - Faktor Anggaran - Faktor Sumber Daya Manusia Pengelola - Masih belum adanya peran swasta dalam pengembangan BUMDES - Masih minimnya pembinaan
Pertanian	Alih Fungsi Lahan Pertanian	Masih banyak terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan dan lahan budidaya perikanan di Kabupaten Bangka Selatan.
	Daya Saing Produk Pertanian Masih Rendah	Secara umum daya saing produk unggulan Kabupaten Bangka Selatan, yaitu sektor pertanian dan perikanan secara umum masih rendah. Hal ini disebabkan: <ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya produktivitas, kualitas, nilai tambah maupun skala ekonomi produk unggulan yang masih mengandalkan produk baku - Masih belum adanya transformasi ke sektor hilirisasi. - Masih rendahnya adopsi teknologi pertanian - Masih rendahnya kualitas SDM petani



Aspek/Urusan/Fokus Bidang	Permasalahan	Penjelasan
		<ul style="list-style-type: none"> - Masih rentannya keberlanjutan profesi petani akibat rendahnya minat generasi muda di sektor pertanian
Pariwisata	Belum Optimalnya Pengembangan Sektor Pariwisata	Pengembangan pariwisata di Kabupaten Bangka Selatan masih belum optimal dengan salah satu indikasi belum adanya <i>roadmap</i> pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan (<i>sustainable tourism</i>). Dimana pengelolaan bisnis pariwisata, ekonomi kreatif dan pengembangan potensi budaya lokal masih belum terintegrasi secara komprehensif untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
	Terjadinya Penurunan Angka Wisatawan	Salah satu dampak <i>covid</i> pada sektor pariwisata terlihat dari adanya penurunan angka wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Bangka Selatan. Berdasarkan data diketahui terjadi penurunan jumlah wisatawan sebesar 51 % dalam kurun waktu 5 tahun terakhir
	Masih Rendahnya Kualitas Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas	Kualitas aksesibilitas, atraksi dan amenitas dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Bangka Selatan masih tergolong rendah. Kondisi akses menuju beberapa lokus objek wisata masih terlihat belum memadai. Demikian pula dengan atraksi dan amenitas yang ditawarkan pada suatu objek wisata di Kabupaten Bangka Selatan hingga saat ini belum mampu menarik kunjungan wisatawan terutama memberikan dampak kembali berkunjungnya wisatawan (<i>return rate of tourists</i>) ke Bangka Selatan



Aspek/Urusan/Fokus Bidang	Permasalahan	Penjelasan
	Masih Minimnya Investasi dalam Pengembangan Pariwisata Daerah	Minimnya investasi di sektor pariwisata menjadikan perkembangan sektor ini menjadi terhambat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Kontribusi sektor pariwisata dalam PDRB ADHK Kabupaten Bangka Selatan pada Tahun 2022 masih dibawah 5 %. Untuk itu, perlu dilakukan upaya promosi potensi pariwisata daerah untuk menarik investor sehingga sektor pariwisata sebagai salah satu sektor potensial di Kabupaten Bangka Selatan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Perdagangan	Masih Rendahnya Daya Saing Produk Lokal	Masih banyaknya pelaku usaha mikro yang belum terstandarisasi dan tersertifikasi berdampak pada produk lokal yang belum mampu bersaing pada pasar dalam negeri maupun global. Selain itu, tingginya biaya logistik menjadi penyebab pelaku usaha mikro mengalami kesulitan dalam berkembang
	Masih Kurangnya Pemasaran UMKM	Persoalan pemasaran dan promosi (<i>branding</i>) masih menjadi salah satu kendala terbesar bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam meningkatkan skala bisnisnya. Hingga saat ini masih jarang pelaku UMKM di Kabupaten Bangka Selatan yang menjalankan promosi dan pemasaran dengan memanfaatkan <i>platform</i> dagang elektronik
	Inflasi Daerah	Masalah inflasi merupakan salah satu masalah utama yang berkaitan langsung dengan urusan perdagangan. Dimana terjadinya penurunan daya beli masyarakat serta kesenjangan harga pokok menjadikan perkembangan sektor perdagangan akan semakin melambat.
Kelautan & Perikanan	Rendahnya Kualitas SDM dan Penguasaan Teknologi	Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia pelaku usaha perikanan (nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar) akan berpengaruh



Aspek/Urusan/Fokus Bidang	Permasalahan	Penjelasan
		pada hasil tangkapan, diversifikasi hasil produk perikanan dan pemasaran hasil produk perikanan.
	Keterbatasan Sarana dan Prasarana	Masih adanya keterbatasan sarana maupun prasarana dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Bangka Selatan seperti: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Air blast freezer</i> - Gudang penyimpanan beku, pabrik es; - Kendaraan berpendingin - Keterbatasan sarana dan prasarana yang ada di Pelabuhan
	Semakin Turunnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan untuk Budidaya dan Penangkapan Ikan	Semakin maraknya penambangan di wilayah perairan Kabupaten Bangka Selatan menjadikan semakin menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk budidaya dan penangkapan ikan. Aktivitas penambangan di perairan akan berdampak secara langsung terhadap keberlanjutan ekosistem laut yang secara signifikan berpengaruh terhadap jumlah produksi hasil tangkapan nelayan.
	Konflik Pemanfaatan Lingkungan Perairan	Potensi lingkungan perairan Kabupaten Bangka Selatan tidak hanya dimanfaatkan untuk pengembangan sektor perikanan. Selain itu, terdapat potensi pertambangan di perairan juga menjadikan aktifitas ini semakin marak sehingga terjadi tumpang tindih pemanfaatan zona perikanan dan zona pertambangan.
Perindustrian	Belum Optimalnya Kontribusi Sektor Industri dalam Pertumbuhan Perekonomian Kabupaten Bangka Selatan	<ul style="list-style-type: none"> - Minimnya investasi - Belum optimalnya pengembangan Kawasan Industri Sadai - Belum adanya inovasi dalam pengelolaan SDA - Dampak pandemi - Belum adanya inovasi pemerintah daerah untuk menarik minat investor swasta



Aspek/Urusan/Fokus Bidang	Permasalahan	Penjelasan
	Minimnya Pembinaan dalam Pengembangan IKM	- Keterbatasan SDM

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3.2. Penelaahan Isu Global, Nasional dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Berpengaruh terhadap Kabupaten Bangka Selatan

3.2.1. Isu Global dan Dinamika Internasional

3.2.1.1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) tahun 2015-2030 merupakan komitmen agenda pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, pembangunan tata kelola yang inklusif, serta menjaga kualitas kehidupan ke generasi berikutnya. TPB/SDGs mencakup 17 tujuan yaitu: (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kestaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Dalam Perpres Nomor 59 tahun 2017 diamanatkan bahwa perlu adanya penyesuaian SDGs dengan rencana pembangunan nasional baik pada RPJPN maupun RPJMN. Selain itu, pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Aksi Daerah TPB dalam hal ini telah ditetapkannya RAD TPB/SDGs. Berdasarkan persentase capaian TPB1 pada laporan KLHS RPJPD Kabupaten Bangka Selatan diketahui 49% atau 107 indikator sudah terpenuhi sesuai target pada rencana pembangunan. Sementara terdapat 35% belum terpenuhi, sedangkan untuk beberapa indikator yang belum ada datanya sebesar 16%. Adapun pilar yang paling banyak tidak terpenuhi adalah pilar sosial dengan persentase 47 %.

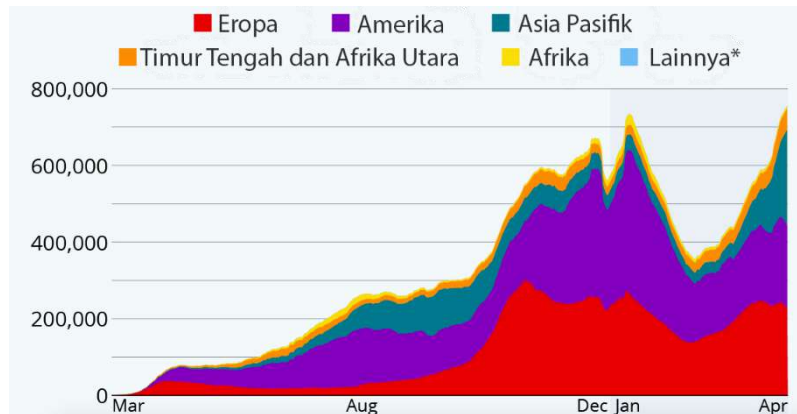
3.2.2. Isu Global Presidensi G 20

Mengutip dari Laporan Akhir Isu Strategis Global G 20 Indonesia Tahun 2022, terdapat beberapa isu global dan dinamika internasional yang berkembang dalam satu dekade terakhir yang digolongkan dalam sektor-sektor sebagai berikut: (1) kesehatan publik; (2) kemiskinan; (3) ketenagakerjaan dan pendidikan; (4) pangan dan malnutrisi; (5) kesetaraan gender; (6) perubahan iklim; serta (7) tata kelola ekonomi global.

1. Kesehatan Publik

Pentingnya sektor Kesehatan publik tidak lepas dari fenomena pandemi COVID-19 yang muncul pada tahun 2019 dan yang masih terus menjadi tantangan global hingga hari ini. Berdasarkan data yang dikeluarkan WHO terdapat 170.426.245 kasus COVID-19 yang terkonfirmasi di seluruh dunia dan 3.548.628 kasus kematian akibat COVID-19 (WHO, 2021). Tren penyebaran COVID-19 di berbagai kawasan dunia cenderung meningkat di pertengahan

tahun 2021. Ada lebih dari 141 juta kasus COVID-19 diseluruh dunia yang telah terkonfirmasi dari awal tahun 2020 hingga pertengahan 2021.



Gambar 3.1

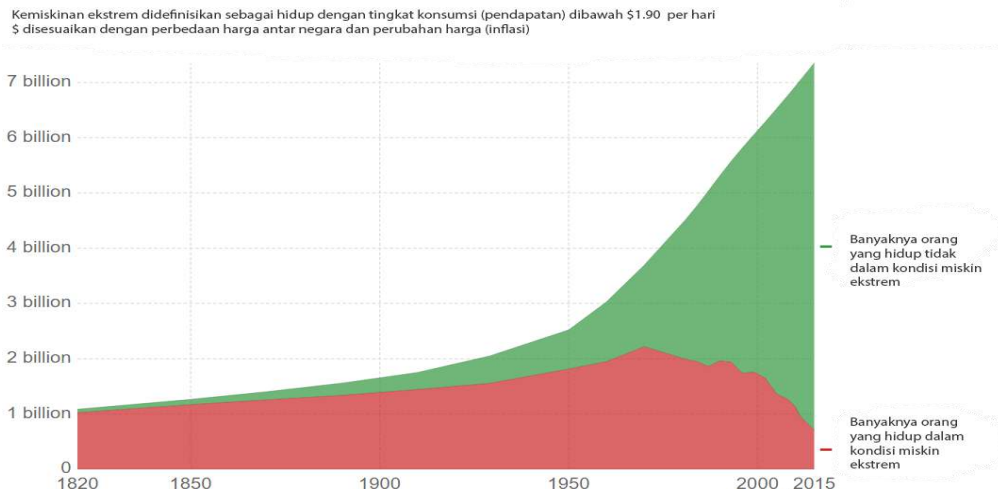
Grafik Tren COVID-19 Global: Tingkat Kasus Positif

Sumber: Statista. 2021. *New COVID-19 cases surge to pandemic high*
[\(https://www.statista.com/chart/22067/daily-new-cases-bworld-region/\)](https://www.statista.com/chart/22067/daily-new-cases-bworld-region/)

Sejauh ini, kita dapat melihat bahwa pandemi COVID-19 yang telah berlangsung selama dua tahun terakhir (2019-2021) telah memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya kesehatan publik sebagai basis ketahanan dan stabilitas, baik terkait aspek ekonomi maupun sosial. Kesehatan menjadi kunci bagi produktivitas manusia dalam berbagai aktivitas kehidupan ekonomi maupun sosial di berbagai level, dari tingkat individu hingga tingkat global. Namun demikian, masalah kesehatan publik di dunia bukan hanya diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Masalah kesehatan publik di banyak negara berkembang umumnya lebih banyak didominasi oleh penyakit akibat faktor lingkungan hidup yang buruk (kolera, demam berdarah, tipes, tuberkulosis) dan faktor gaya hidup (kanker, diabetes dan penyakit jantung).

2. Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan masih menjadi agenda utama pembangunan internasional yang hingga hari ini masih mengalami tantangan berat, terutama dengan kehadiran pandemi global COVID-19. Angka kemiskinan dunia dalam kurun waktu 50 tahun terakhir (1950—2000) cenderung meningkat dengan signifikan – sampai dengan tahun 2015, terlihat angka kemiskinan secara umum sampai mencapai angka 7 miliar jiwa. Namun, angka kemiskinan ekstrem menurun sampai di bawah 1 miliar jiwa (*Our World in Data*, 2018). Adapun angka kemiskinan ekstrem dihitung dari jumlah penduduk yang berpenghasilan di bawah 1,9 Dolar AS per hari.



Gambar 3.2

Grafik Tingkat Kemiskinan Ekstrem di Tingkat Global (1820—2015)

Sumber: *Our World in Data. 2018. World Population Living in Extreme Poverty.*

(<https://ourworldindata.org/grapher/world-population-in-extreme-poverty-absolute>).

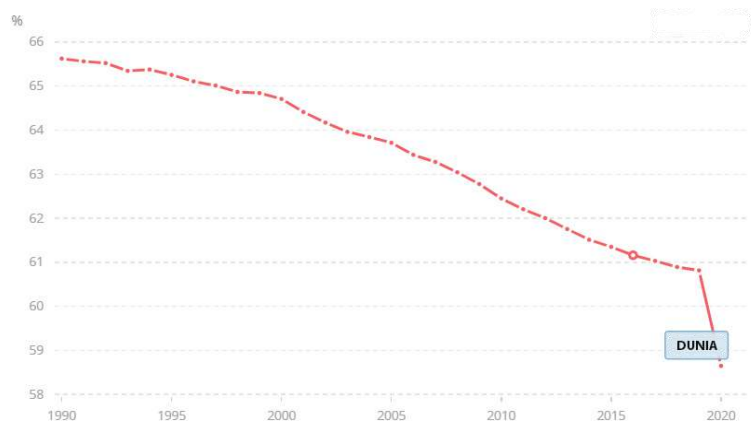
Kemunculan pandemi COVID-19 ikut berdampak peningkatan angka kemiskinan. Secara total, angka kemiskinan ekstrem di tahun 2020 bertambah sebanyak 88 juta–115 juta jiwa dan meningkat sebanyak 150 juta jiwa di tahun 2021. Kemunculan orang-orang miskin baru (*“the new poor”*) lebih berpotensi terjadi di negara-negara yang sudah memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Sejumlah negara yang masuk dalam kategori negara berpendapatan menengah (*middle-income countries*) bahkan menghadapi kenaikan angka kemiskinan hingga 82% (World Bank, 2020). Kemiskinan juga cenderung bertambah di negara-negara berpendapatan menengah, sebagian besar di Asia Selatan dan Asia Timur (United Nations University, 2020). Berdasarkan data World Bank (2020), telah ada sebanyak 9,4% populasi dunia masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem pada tahun 2020 dan 2021. Bukan hanya itu, COVID-19 diperkirakan akan menambah jumlah penduduk dunia yang hidup dalam kemiskinan ekstrem hingga 44 juta pada 2030 (UN, 2020). Apabila COVID-19 tidak ditangani secara efektif dan kerusakan yang ditimbulkan pandemi menjadi makin besar, jumlah kemiskinan ekstrem dunia diprediksikan akan naik hingga 207—251 juta. Hal ini berarti, akan ada 1 miliar penduduk dunia yang hidup dalam kemiskinan ekstrem pada 2030 (UNDP, 2020).

3. Ketenagakerjaan dan Pendidikan

Salah satu masalah lain yang juga berkontribusi pada angka kemiskinan dan melemahnya pertumbuhan ekonomi adalah meningkatnya jumlah pengangguran yang disebabkan oleh pandemi. Pandemi telah mengurangi sekitar 255 juta lapangan pekerjaan di negara-negara berkembang pada 2020 (ILO, 2020). Hilangnya pendapatan penduduk di negara-negara

berkembang akibat pandemi diperkirakan melebihi 220 miliar Dolar AS (UNDP, 2020).

Bahkan sebelum terjadinya pandemi, angka ketenagakerjaan, khususnya bagi pemuda, sudah menunjukkan tren menurun. Selama 1999—2019, populasi pemuda (individu berusia 15—26 tahun) secara global telah meningkat dari 1 miliar menjadi 1,3 miliar, tetapi pada periode yang sama, tingkat partisipasi angkatan kerja global terus mengalami penurunan. Mereka yang terlibat dalam angkatan kerja (mereka yang bekerja atau tidak menganggur) menurun dari 568 juta pada 1999 menjadi 497 juta pada 2019. Secara umum, tingkat partisipasi angkatan kerja terus menurun selama tiga dekade terakhir, khususnya dari 2009—2021 (World Bank, 2021).



Gambar 3.3

Grafik Tren Partisipasi Tenaga Kerja dalam Lapangan Kerja secara Global (1990-2020)

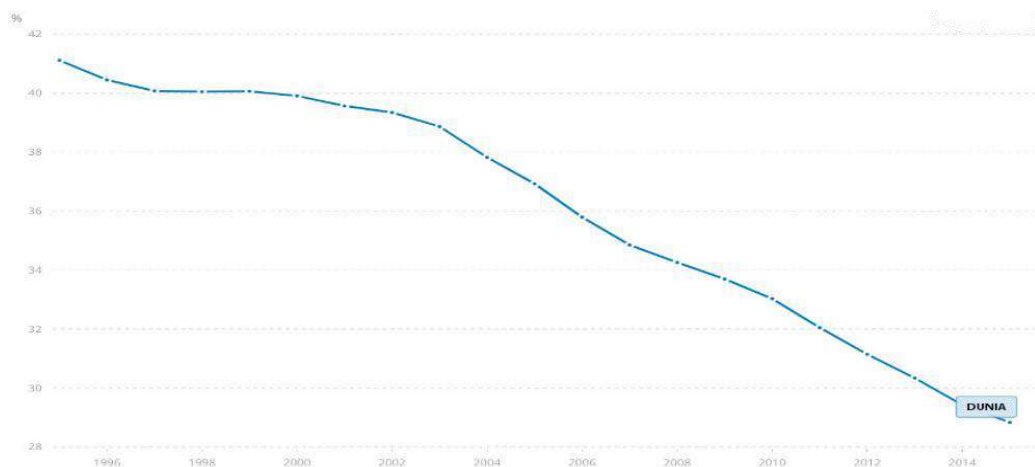
Sumber: World Bank. 2021. *Labour Force Participation Rate*.

(<https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.ZS>)

4. Ketahanan Pangan dan Malnutrisi

World Food Program (WFP) memperkirakan bahwa terdapat 272 juta orang yang sudah atau berisiko berstatus rawan pangan (World Bank, 2021). Berdasarkan data yang dihimpun oleh *Economist Intelligence Unit's 2020 Global Food Security Index* di 113 negara, menunjukkan bahwa ketahanan pangan dunia memburuk. Hal ini disebabkan oleh perubahan iklim dan dampak pandemi yang signifikan. Adapun parameter pengukuran yang digunakan adalah keterjangkauan, ketersediaan, keamanan, sumber daya alam atau ketahanan dan kualitas makanan. Di sisi lain, kondisi ketahanan pangan juga akan berpengaruh terhadap pemenuhan gizi penduduk. Kondisi ketahanan pangan yang buruk (kerawanan pangan) akan menyebabkan penambahan penduduk yang termasuk dalam kategori kurang gizi/malnutrisi. Berdasarkan data global FAO, tercatat ada sebesar 132 juta jiwa manusia yang mengalami kekurangan gizi (FAO, 2020) per tahun 2020.

Permintaan dunia akan pangan sudah terus meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi. Populasi dunia diperkirakan akan tumbuh hampir 10 miliar pada tahun 2050 dan seiring dengan itu, permintaan akan produk pangan dan produk-produk agrikultur juga akan naik. Selain itu, pertumbuhan pendapatan di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah akan mempercepat transisi pola makan menuju konsumsi daging, buah-buahan dan sayuran yang lebih tinggi, menambah tekanan pada sumber daya alam (FAO, 2017). Kurangnya kemampuan mengakses pangan akan berdampak pada terjadinya kelaparan. Isu kelaparan dan malnutrisi dengan ketahanan pangan merupakan isu-isu yang saling tak terpisahkan. Dengan demikian, sektor pertanian harus terus meningkatkan produktivitasnya secara berkelanjutan. Namun, terdapat sejumlah tantangan yang harus diatasi dunia untuk menguatkan sektor pertanian. Tantangan pertama adalah keterbatasan sumber daya manusia di sektor pertanian. Secara global, penyerapan tenaga kerja oleh sektor pertanian terus menurun dari 43% pada 1991 menjadi 26% pada 2019 (World Bank, 2021). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ada semakin sedikit individu yang bekerja di sektor pertanian dan secara khusus merujuk pada krisis regenerasi petani dunia.



Gambar 3.4

Grafik Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Pertanian (1995—2015)

Sumber: *Employment in agriculture (% of total employment) (modeled ILO estimate), World Bank, 2021.*
<https://data.worldbank.org/indicator/SL.AGR.EMPL.ZS?end=2015&start=1995>

5. Perubahan Iklim

Sektor lingkungan hidup pada dasarnya mencakup permasalahan-permasalahan yang sangat variatif dan memiliki *cross-cutting* yang kuat dengan isu-isu pembangunan sosial ekonomi, seperti kesehatan, kemiskinan, pendidikan, transportasi, industri dan lain sebagainya. Namun demikian, konsentrasi pada isu perubahan iklim didasarkan pada berbagai dampak strategis yang bersifat multilevel dan multidimensi. Perubahan iklim mempengaruhi setiap negara di setiap benua, bahkan sampai ke level individu. Hal ini mengganggu ekonomi nasional dan

global serta mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Pola cuaca berubah, permukaan laut naik, dan peristiwa cuaca menjadi lebih ekstrem. Oleh karena itu, diperlukan analisis multidimensional dalam mengkaji potensi-potensi solusinya, selain data faktual yang menunjukkan kecenderungan global yang masih mengkhawatirkan masyarakat dunia.

6. Kesetaraan Gender

Pengurangan kesenjangan gender dalam lapangan kerja telah menunjukkan peningkatan pesat dari tahun 1990 hingga 2009, tetapi kemajuan selanjutnya cenderung lebih lambat. Secara umum, dalam aspek ketenagakerjaan, perempuan masih cenderung lebih tertinggal dibandingkan laki-laki. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan hanya mencapai 48,5% pada 2018, sedangkan laki-laki mencapai angka 75%. Hal ini khususnya berlaku bagi negara berkembang dengan persentase kesenjangan sekitar 30,5 poin persentase pada 2018 (naik 0,5 poin persentase sejak 2009). Tren tersebut diproyeksikan akan berlanjut hingga 2021 (ILO, 2018). Kondisi ketimpangan gender di tingkat global yang bisa dilihat dari aspek ekonomi, sosial (pendidikan) maupun politik.

7. Tata Kelola Ekonomi Global

Sektor ekonomi digital merupakan salah satu sektor lain yang dalam 5 tahun terakhir ini menunjukkan signifikansinya dalam perekonomian global. Diprediksi bahwa tingkat investasi di sektor ekonomi digital akan semakin pulih dari guncangan pandemi dan akan dapat menyusul kembali tren sebelum pandemi (pra- krisis) pada tahun 2022 nanti (UNCTAD, 2020). Sektor penting lain yang harus diperhatikan dalam tata kelola ekonomi global adalah UMKM. Peningkatan produktivitas UMKM penting dilakukan karena UMKM turut berkontribusi signifikan dalam isu ketenagakerjaan melalui perluasan lapangan kerja. Sektor lainnya yang juga perlu mendapat perhatian adalah ekonomi kreatif. Industri kreatif sangat penting untuk agenda pembangunan berkelanjutan karena peran sektor tersebut dalam merangsang inovasi, mengembangkan sektor jasa, mendukung kewirausahaan, berkontribusi pada keragaman budaya, dan mendukung transformasi digital (UNCTAD, 2021).

3.2.3. Isu Strategis dan Tantangan Pembangunan Nasional 20 Tahun Kedepan

Terdapat beberapa isu strategis nasional yang menjadi tantangan Indonesia kedepan dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 yang berkaitan dengan isu global yakni antara lain: (1) Bonus Demografi; (2) Geopolitik dan Geoekonomi; (3) Perkembangan Teknologi; dan (4) Krisis Iklim dan Pembangunan Rendah Karbon.

1. Bonus Demografi

Demografi global sangat berpengaruh dalam perkembangan ekonomi dan sosial serta



memberikan tantangan peningkatan kebutuhan hidup masyarakat dengan ketersediaan sumber daya yang semakin terbatas. Pada tahun 2045, Indonesia akan mengalami bonus demografi dengan potensi angkatan kerja produktif yang tinggi. Berdasarkan kajian BPS (2023), bahwa proyeksi jumlah penduduk tahun 2045 di Kabupaten Bangka Selatan mencapai 248.329 jiwa. Komposisi penduduk angkatan kerja (usia 15-64 tahun) mencapai 66,95 % dari jumlah penduduk dengan rasio ketergantungan sebesar 49,36% pada tahun 2045. Tingginya jumlah penduduk usia muda memberikan tantangan pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan (Bappenas, 2023). Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM, jaminan sosial (kesehatan dan pendidikan), peluang lapangan kerja bagi generasi muda.

2. Geopolitik dan Geoekonomi

Salah satu target pembangunan Indonesia 2045 adalah lepas dari negara *middle income trap* dan menjadi bagian negara maju yang berdaya saing global. Dinamika geopolitik berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi negara dan regional salah satunya dinamika daya tarik investasi dan perdagangan global-nasional-regional. Posisi Kabupaten Bangka Selatan yang berhadapan dengan alur pelayaran internasional (ALKI 1) dalam konteks perekonomian global akan menjadi potensi pendorong berkembangnya sektor perdagangan dan sektor-sektor lainnya. Selain itu, kerja sama antar negara dan institusi global tentunya akan mendorong akselerasi ekonomi negara berkembang dalam hal pendanaan komitmen global. Berbagai potensi tersebut menjadi tantangan bagi perencanaan pembangunan Kabupaten Bangka Selatan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Disamping *Asean Free Trade Area* (AFTA) juga berpengaruh pada dinamika ekonomi dan perdagangan dengan terbukanya pasar bebas di kawasan ASEAN, maka aliran perdagangan barang dan jasa, investasi, dan perpindahan tenaga kerja antar negara ASEAN tak ada lagi hambatannya

3. Perkembangan Teknologi

Disrupsi teknologi merupakan fenomena perkembangan teknologi yang berpengaruh pada perilaku masyarakat, pasar, industri, dan lain sebagainya. Disrupsi teknologi ditandai dengan inovasi-inovasi yang mendorong produktivitas, efektivitas, dan efisiensi sumber daya dan operasional. Perkembangan teknologi memerlukan kesiapan adaptasi masyarakat dalam memanfaatkan teknologi secara optimal dan meminimalkan risiko disrupsi teknologi. Perkembangan teknologi seperti *Internet of Things* (IOT), Kecerdasan Buatan (AI), rekayasa genetik, *nanotechnology*, dan lain sebagainya akan mempengaruhi sektor manufaktur, perkembangan pendidikan-kesehatan, dan berbagai sektor lainnya. Selain itu, teknologi membuka peluang baru pembangunan ekonomi, mendorong inovasi, dan transformasi tata kelola kinerja pelayanan publik (Bappenas, 2023).

4. Krisis Iklim dan Pembangunan Rendah Karbon

Kelangkaan dan persaingan dalam mengakses sumber daya alam (utamanya energi, air, dan pangan) menjadi tantangan dalam memenuhi kebutuhan manusia di masa depan. Kelangkaan ini juga dipengaruhi oleh tiga krisis global (*The Triple Planetary Crisis*) yaitu perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan kehilangan keanekaragaman hayati. Krisis global tersebut menjadi urgensi untuk mengarahkan praktik pembangunan yang berkelanjutan dan sirkular seperti ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon. Pada *Paris Agreement* tahun 2015, Indonesia menyampaikan komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29% dengan kemampuan sendiri dan sebesar 41% dengan dukungan internasional pada 2030. Kajian Bappenas (2019) menunjukkan capaian penurunan emisi GRK Indonesia dapat mencapai 43% di tahun 2030. Capaian baik tersebut perlu konsisten dipertahankan bahkan ditingkatkan dengan langkah-langkah strategis, yaitu: (1) mendorong transisi ke sumber energi terbarukan dan mengurangi penggunaan batu bara; (2) peningkatan efisiensi energi; (3) penegakan penuh moratorium hutan, kelapa sawit, pertambangan, dan lahan gambut; (4) mematuhi komitmen konservasi sumber daya air, perikanan, dan keanekaragaman hayati; serta (5) peningkatan produktivitas lahan.

3.2.4. Isu Strategis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis dalam penyusunan RPJP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat beberapa isu strategis yang menjadi tantangan pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 20 tahun kedepan yakni: (1). Isu Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; (2) Isu Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam; dan (3) Isu Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

1. Isu Bidang Infratraktur dan Kewilayahan

Terdapat beberapa isu yang berkaitan dengan bidang infrastruktur dan kewilayahan antara lain:

- a. Peningkatan Pembangunan dan Kualitas Layanan Aksesibilitas dan Konektivitas
- b. Peningkatan Penyediaan dan Pelayanan Sistem Perkotaan dan Infrastruktur Dasar
- c. Peningkatan infrastruktur pendukung ketahanan pangan yang berkelanjutan
- d. Tata Ruang sebagai Acuan Pembangunan Berkelanjutan
- e. Percepatan Transformasi Digital

2. Isu Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

- a. Meningkatkan Investasi pada Sektor Ekonomi Biru dan Sektor Ekonomi Hijau untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan
- b. Membangun Integrasi dan Konektivitas Ekonomi Guna Menciptakan Sinergi dan Efisiensi



dalam Pembangunan Daerah

- c. Mendorong Aktivitas Ekonomi Berkeberlanjutan dengan Mengontrol Emisi dan Menjaga Keseimbangan Lingkungan
- d. Hilirisasi Sumber Daya Alam yang Optimal untuk Meningkatkan Nilai Ekonomi Komoditas Unggulan
- e. Transformasi Angkatan Kerja melalui Peningkatan Kapasitas dan Keterampilan yang Selaras dengan Kemajuan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi

3. Isu Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

- a. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Berfokus Pada Pendidikan dan Layanan Kesehatan Berkualitas Tinggi, Inklusif, Adil dan Merata
- b. Kesejahteraan Masyarakat Melalui Mitigasi Persoalan Krusial Pada Aspek Kestabilan Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan, Ketentraman, Dan Infrastruktur Dasar
- c. Transformasi Birokrasi dalam Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Responsif pada disrupsi, Efektif, serta Efisien
- d. Penguatan Demokrasi Lokal, Kohesi Sosial dan Pembangunan Kebudayaan.

3.2.5. Isu Strategis Kabupaten Bangka Selatan

Berdasarkan hasil analisis dan identifikasi permasalahan pembangunan di Kabupaten Bangka Selatan serta dengan memperhatikan keterkaitan isu global, nasional dan regional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, isu strategis Kabupaten Bangka Selatan pada 20 tahun yang akan datang terbagi menjadi 5 (lima) aspek yakni: (1) Aspek Sumber Daya Manusia (2) Aspek Ekonomi (3) Aspek Lingkungan Hidup (4) Aspek Sarana Prasarana dan Infrastruktur Wilayah dan (5) Aspek Pemerintahan.

1. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan modal utama dalam mencapai visi “Indonesia Emas 2045”. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk diketahui bahwa pada tahun 2045 penduduk usia produktif di Kabupaten Bangka Selatan akan mendominasi struktur piramida penduduk Kabupaten Bangka Selatan. Besarnya jumlah penduduk usia produktif ini harus didukung oleh pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan dimulai sedini mungkin. Kualitas dan daya saing sumber daya manusia didukung oleh berbagai aspek yang saling terkait, antara lain kesejahteraan sosial, kesehatan masyarakat, dan pendidikan.

Hingga saat ini kualitas sumber daya manusia masih menjadi tantangan yang memerlukan optimalisasi di berbagai aspek. Salah satu indikator untuk mengukur kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Bangka Selatan adalah Indeks Pembangunan Manusia. IPM Kabupaten Bangka Selatan masih berada di bawah kinerja provinsi pada tahun 2022 dan



terendah dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kabupaten Bangka Selatan masih menghadapi permasalahan kualitas sumber daya manusia yang dibuktikan dengan masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah yang masih di angka 11,43 (jenjang SMA). Selain itu, angka harapan hidup di Kabupaten Bangka Selatan juga berada di bawah kinerja provinsi dengan berbagai masalah di bidang Kesehatan lainnya disamping permasalahan perlindungan sosial yang masih perlu mendapatkan perhatian.

a. Pendidikan Berkualitas yang Belum Merata

Pendidikan yang berkualitas disertai dengan partisipasi pendidikan yang optimal akan menjadi modal untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan diharapkan penduduk dapat memiliki kesempatan kerja yang lebih baik. Kualitas pendidikan di Kabupaten Bangka Selatan dapat dilihat dari aspek sarana, prasarana, tenaga pendukung penyelenggaraan pendidikan serta tingkat partisipasi pendidikan yang ada. Rata - rata lama sekolah di Kabupaten Bangka Selatan adalah 6,89 tahun yang berarti penduduk secara rata - rata menempuh pendidikan hanya hingga pendidikan Sekolah Dasar dan bahkan belum mencapai angka wajib belajar 9 tahun. Perlu adanya dorongan rata - rata lama sekolah hingga angka 12 tahun bahkan lebih untuk menempuh pendidikan tinggi. Selain itu dalam aspek ketercukupan sarana dan prasarana juga perlu dilakukan optimalisasi disamping kualitas dari tenaga pendidik dan lingkungan belajar yaitu bangunan sekolah akan turut berpengaruh terhadap kondisi belajar murid dan motivasinya untuk mengikuti atau bahkan melanjutkan belajar. Motivasi dari murid juga harus ditingkatkan untuk melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi, motivasi tersebut bisa didapatkan dari sekolah maupun motivasi langsung dari orang tua.

Pembangunan sektor sumberdaya manusia yang ditunjukkan dengan indikator kinerja nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi isu strategis utama yang menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan pada 20 (dua puluh) tahun kedepan. Sampai tahun 2022, nilai Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten (IPM) Bangka Selatan masih berada pada angka 67,95 (dibawah 70). Angka IPM Kabupaten Bangka Selatan ini masih dibawah angka IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sudah mencapai angka 72,24 (kategori tinggi) dan sekaligus menempatkan nilai IPM Kabupaten Bangka Selatan terendah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Secara kinerja selama 5 (lima) tahun kebelakang sebenarnya kinerja IPM Kabupaten Bangka Selatan telah menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan terbukti rata-rata menunjukkan nilai pertumbuhan rata-rata sekitar 0,85 point sejak tahun 2017 sampai tahun 2022. Namun nilai IPM pada angka 67,95 masih menempatkan Kabupaten Bangka Selatan berada pada kategori sedang. Kebijakan



membangun sektor pendidikan secara berkualitas tidak hanya menjamin seluruh angkatan usia sekolah masyarakat Bangka Selatan untuk mendapatkan pendidikan dan materi pelajaran yang menjadi hak seluruh masyarakat Bangka Selatan, namun inovasi kearah implementasi digitalisasi di sektor pendidikan menjadi hal yang harus diperhatikan dan dilaksanakan mengingat kecepatan dan keterbukaan seluruh akses-akses terkait Pendidikan.

b. Derajat Kesehatan yang Masih Rendah

Salah satu aspek penting yang menunjukkan kualitas masyarakat adalah kondisi kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh derajat kesehatan. Namun, tingkat derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Bangka Selatan masih tergolong rendah. Kabupaten Bangka Selatan selama 10 (tahun) tahun terakhir dari 2013-2022 menempati urutan terakhir pencapaian Usia Harapan Hidup dibandingkan seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Angka usia harapan hidup (UHH) Kabupaten Bangka Selatan sebagai indikator komponen kesehatan yang menentukan nilai IPM sampai tahun 2022 berada pada angka 68,68. Angka ini masih dibawah angka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sudah diatas 70 (72,24) tahun 2022. Kebijakan pemenuhan akses pelayanan kesehatan semesta (UHC) untuk seluruh masyarakat Kabupaten Bangka Selatan yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2022 merupakan kebijakan strategis untuk menjamin pelayanan kesehatan dan sekaligus akan memperbaiki angka usia harapan hidup masyarakat Kabupaten Bangka Selatan. Tentunya kebijakan ini akan tetap dilaksanakan pada perencanaan pada 20 (dua puluh) tahun kedepan. Namun demikian, masih terdapat permasalahan-permasalahan yang mengindikasikan kinerja layanan Kesehatan masih belum optimal.

Salah satu persoalan serius yang dihadapi di sektor kesehatan adalah ketercukupan rasio dokter, tenaga kesehatan dan penduduk Kabupaten Bangka Selatan selama 20 (dua puluh) tahun kedepan menjadi isu strategis Kabupaten Bangka Selatan di sektor kesehatan. Sampai saat ini (tahun 2023), rasio dokter dibanding dengan penduduk Kabupaten Bangka Selatan masih berada pada angka $\geq 1: 3000$ penduduk. Disamping itu juga, ketersediaan sarana prasarana kesehatan seperti rumah sakit baik skala kabupaten maupun lokal (fasilitas kesehatan pertama) menjadi fokus arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bangka Selatan baik dari segi ketersediaan lokasi, ketecukupan sarana prasarana dan keterjangkauan. Dalam beberapa tahun terakhir juga diketahui Angka Kematian Bayi (AKB) atau *Infant Mortality Rate* (IMR) memiliki kecenderungan meningkat. Penyebab kematian bayi disebabkan beberapa faktor seperti faktor lingkungan yang tidak sehat, dan faktor pelayanan kesehatan (kualitas pelayanan antenatal) yang dipengaruhi oleh kehandalan dan

ketelitian bidan dan kepatuhan ibu hamil melakukan pemeriksaan. Sementara itu, Kasus stunting dan balita gizi buruk juga masih ditemukan di Kabupaten Bangka Selatan. Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan, faktor penyebab kasus stunting & balita gizi buruk adalah pola hidup dan pola asuh bayi dalam keluarga.

c. Perlindungan Sosial yang Belum Optimal

Perlindungan sosial merupakan salah satu aspek penting yang menunjukkan keberhasilan dalam pemberdayaan sosial masyarakat. Meskipun berdasarkan data tingkat kemiskinan di Kabupaten Bangka Selatan berada diposisi kedua paling rendah se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan tetapi hingga saat ini, pemberdayaan dan penanganan bagi kelompok fakir miskin masih belum optimal. Tidak hanya itu, peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) seperti Karang Taruna, TKSK, PSM dan lain-lain dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial juga masih kurang. Keterlibatan PSKS sangat diperlukan oleh pemerintah, mengingat bidang kemiskinan merupakan isu dengan dimensi yang luas dan memiliki banyak fokus, tidak hanya dari sisi ekonomi tetapi juga sosial. Oleh karena itu, dalam penanganannya diperlukan kerjasama dan koordinasi antara banyak pihak.

Berdasarkan data capaian realisasi SPM, capaian indikator rehabilitasi sosial penyandang disabilitas terlantar diluar panti pada tahun 2022 mencapai 70 % dan mengalami penurunan dari capaian kinerja tahun sebelumnya. Sedangkan untuk indikator anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti pada tahun 2022 mencapai 84 %. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kinerja pembangunan dibidang perlindungan sosial dalam memuhi kebutuhan dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan koordinasi dan Kerjasama semua stakeholder.

2. Pembangunan dan Pemerataan Ekonomi

Pembangunan dan pemerataan ekonomi menjadi aspek penting dalam kemajuan daerah. Kebijakan-kebijakan strategis pembangunan daerah bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan dengan konsistensi pertumbuhan ekonomi dan penyediaan infrastruktur yang memadai. Dalam pencapaian tujuan besar tersebut berbagai tantangan pembangunan dihadapi oleh Kabupaten Bangka Selatan adalah pertumbuhan ekonomi melambat dan distribusi pendapatan yang belum merata, optimalisasi pengelolaan sumber daya alam lokal, pengembangan sektor unggulan yang belum optimal, minimnya inovasi dan investasi serta tingkat pengangguran yang masih tinggi.

a. Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Pendapatan Belum Merata

Perkembangan perekonomian Kabupaten Bangka Selatan dari tahun 2013-2022 dilihat dari



pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK menunjukkan fluktuatif dan secara umum mengalami perlambatan. Sejak tahun 2013, 2014 dan 2015, PDRB Kabupaten Bangka Selatan mengalami penurunan dan meningkat kembali di tahun 2016 dan 2017. Kondisi perlambatan ini terjadi juga pada tahun 2018-2020 bahkan pada tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka mengalami penurunan yang cukup Signifikan dimana pada tahun 2019 sebesar 2,55 turun menjadi -1,99 pada tahun 2020. Penurunan ini disebabkan oleh lesunya perekonomian sebagai akibat dari memburuknya perekonomian global sehingga terjadi penurunan permintaan beberapa komoditas lokal seperti lada, karet dan kelapa sawit serta melemahnya keadaan perekonomian daerah sebagai efek yang ditimbulkan karena keadaan daerah yang kurang stabil pada masa pandemi covid-19. Kinerja ekonomi Kabupaten Bangka Selatan baru mulai membaik Pada tahun 2021, dimana laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Selatan mencatat angka pertumbuhan di angka 3,61 persen, sedangkan pada tahun 2022 sedikit mengalami penurunan diangka 3,07 persen. Hal ini membuktikan bahwa kondisi ekonomi di Kabupaten Bangka Selatan yang ditopang oleh sektor primer seperti pertanian, perikanan dan pertambangan serta penggalian mulai menunjukkan geliat ekonomi yang positif namun cenderung mengalami perlambatan.

Terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara langsung terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di masyarakat. Meskipun berdasarkan perhitungan indeks gini rasio, angka yang diperoleh menunjukkan tingkat ketimpangan yang rendah namun dalam realitanya masih terlihat kesenjangan pendapatan di masyarakat Kabupaten Bangka Selatan. Terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan rumah tangga membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, aspek ketimpangan distribusi pendapatan rumah tangga ini juga mempunyai implikasi langsung terhadap formulasi kebijakan pembangunan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Ketimpangan pendapatan masyarakat disebabkan masih minimnya nilai tambah dari sektor pertanian, belum optimalnya pengembangan sektor UMKM dalam menyerap tenaga kerja yang lebih banyak di Kabupaten Bangka Selatan dan belum berkembangnya sektor industri. Salah satu permasalahan yang terlihat dari ketimpangan distribusi pendapatan pada masyarakat di Kabupaten Bangka Selatan adalah masih tingginya angka kemiskinan ekstrim jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

b. Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Lokal

Pengelolaan sumber daya alam yang optimal melalui potensi eksisting menjadi kunci pembangunan ekonomi yang inklusif di Kabupaten Bangka Selatan sampai 20 (dua puluh) tahun kedepan. Optimalisasi sumberdaya alam yang ada tidak hanya memfokuskan



terhadap produksi bahan baku primer namun pembangunan di sektor hilirisasi menjadi sesuatu yang harus dilakukan. Hal ini mengingat nilai tambah dan daya saing ekonomi Kabupaten Bangka Selatan yang secara perlahan harus melakukan transformasi ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Tentunya seluruh optimalisasi dimaksud tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pembangunan sektor pariwisata menjadi salah satu sektor primadona Kabupaten Bangka Selatan kedepan dengan memaksimalkan pembangunan dan penyediaan sarana prasarana (amenities) secara massif dan berkelanjutan di daerah-daerah destinasi pariwisata.

c. Pengembangan Sektor Unggulan yang Belum Optimal

Penguatan basis ekonomi kerakyatan yang mendasarkan adalah pada optimalisasi seluruh potensi sektor unggulan yang berkaitan dengan upaya transformasi ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan sektor tersier. Meskipun kontribusi sektor primer dalam hal ini sektor pertanian, perikanan, kehutanan dan kehutanan mendominasi ekonomi Kabupaten Bangka Selatan dengan memberikan share rata-rata diatas 40 persen terhadap PDRB sejak 3 (tiga) tahun terakhir (2020 sebesar 41,75%, 2021 sebesar 40,25 dan 2022 sebesar 40,34) untuk sektor pertanian, perikanan dan kehutanan atau rata-rata diatas 14 persen untuk sektor pertambangan dan penggalian pada tahun (2020 sebesar 14,73% , 2021 sebesar 17,94% dan 2022 sebesar 17,33%), namun belum memberikan dampak ekonomi atau pendapatan masyarakat yang signifikan. Perlu terobosan inovasi kebijakan dalam tranformasi ekonomi dari hanya mengandalkan bahan baku sektor primer perlahan-lahan harus digeser ke sektor sekunder dan tersier melalui optimalisasi hilirisasi produk baku primer dan pariwisata.

Disamping itu, pengembangan sektor unggulan pertanian di Kabupaten Bangka Selatan sangat berkaitan dengan isu mengenai ketahanan sesuai dengan potensi eksisting pertanian pangan Kabupaten Bangka Selatan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai *Location Quotient* (LQ) sektor pertanian pangan yang melebihi 1 dan share yang diberikan terhadap struktur perekonomian Kabupaten Bangka Selatan diatas 40%. Namun keberlanjutan pertanian pangan akan sangat tergantung dari keberadaan lahan pertanian yang stabil dengan terkendalinya fungsi lahan yang harus dipertahankan.

d. Minimnya Invetasi dan Inovasi

Sampai tahun 2022, gairah investasi di Kabupaten Bangka Selatan masih sangat minim. Hal ini terbukti bahwa nilai investasi di Kabupaten Bangka Selatan untuk seluruh sektor usaha khususnya yang dilakukan oleh pihak swasta tidak lebih dari 2 Triliun atau sekitar 1,4 Triliun (sekitar 14 persen) dari kontribusi PDRB Kabupaten Bangka Selatan tahun 2022.



Secara umum, nilai investasi di Kabupaten Bangka Selatan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 sampai tahun 2020, nilai investasi di Kabupaten Bangka Selatan belum mencapai angka 1 Trilyun. Namun demikian pada tahun 2021 sampai tahun 2022, nilai investasi di Kabupaten Bangka Selatan sudah mencapai angka diatas 1 Triliun.

Disamping masih lesunya gairah investasi di Kabupaten Bangka Selatan, hingga saat ini masih belum ada inovasi-inovasi yang dapat memberikan kontribusi secara signifikan dalam meningkatkan daya saing ekonomi. Berbagai studi menunjukkan bahwa inovasi dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kualitas produk, serta membuka peluang baru untuk menciptakan pasar yang lebih luas dan mengurangi biaya produksi. Oleh karena itu, peranan inovasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk mengatasi perlambatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangka Selatan. Meskipun dalam implementasi inovasi juga dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, kebijakan yang tidak mendukung, kurangnya investasi dalam riset dan pengembangan, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya inovasi. Oleh karena itu, untuk meningkatkan daya saing ekonomi melalui inovasi, perlu adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, institusi pendidikan, sektor swasta, dan masyarakat umum. Pemerintah perlu menciptakan kebijakan yang mendukung pengembangan inovasi, meningkatkan akses terhadap sumber daya, serta meningkatkan dukungan untuk riset dan pengembangan.

e. Tingkat Pengangguran yang Masih Tinggi

Dalam periode 10 tahun terakhir tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bangka Selatan terus meningkat. Hal tersebut akan berpengaruh pada kestabilan kondisi sosial masyarakat dimana ancaman terhadap ketertiban dan keamanan umum akan semakin tinggi disamping akan menambah jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bangka Selatan. Tingginya tingkat pengangguran di Kabupaten Bangka Selatan dipengaruhi oleh banyaknya angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Selain itu, rendahnya keterampilan (*skill*) dan jenjang pendidikan turut berdampak secara langsung dalam menyumbang tingginya angka pengangguran di Kabupaten Bangka Selatan. Disamping masih minimnya lapangan kerja yang menyerap tenaga kerja lokal seperti UMKM dan belum adanya jenis lapangan usaha sekunder dan tersier menjadi pemicu meningkatnya angka pengangguran.

3. Peningkatan Kualitas Lingkungan

Peningkatan kualitas lingkungan hidup merupakan hal mendasar dalam perwujudan pembangunan berkelanjutan. Target pembangunan berkelanjutan perlu diinternalisasikan dalam arahan pembangunan di tingkat regional. Penurunan kapasitas lingkungan hidup dan

sumber daya alam berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi. Peningkatan lingkungan hidup menjadi salah satu isu penting dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Bangka Selatan jangka panjang. Manajemen kebencanaan, alih fungsi lahan, perubahan iklim, serta kualitas dan daya dukung lingkungan hidup menjadi isu strategis pembangunan lingkungan di Kabupaten Bangka Selatan.

a. Manajemen Kebencanaan

Wilayah Kabupaten Bangka Selatan memiliki potensi kebencanaan yang tinggi, yaitu bencana banjir, banjir bandang, bencana cuaca ekstrim, banjir bandang, gelombang ekstrim dan abrasi, kekeringan dan bencana kebakaran hutan dan lahan. Frekuensi dan intensitas kejadian bencana seperti banjir, kebakaran, abrasi, dan kekeringan dipengaruhi oleh kerusakan dan pencemaran lingkungan serta dipengaruhi oleh fenomena perubahan iklim. Mitigasi dan adaptasi terhadap bencana menjadi upaya meminimisir potensi kerugian bencana. Tantangan adaptasi dan mitigasi kebencanaan di Kabupaten Bangka Selatan yakni belum optimalnya kapasitas masyarakat dan aparatur pemerintah dalam manajemen kebencanaan, serta masih terbatasnya akses informasi rawan bencana bagi masyarakat.

b. Alih Fungsi Lahan

Fenomena alih fungsi lahan yang terjadi di Kabupaten Bangka Selatan akibat alternatif pemanfaatan sumberdaya alam yang beragam menjadikan isu alih fungsi lahan menjadi isu utama selama 20 (dua puluh) tahun kedepan. Meskipun data menunjukkan data alih fungsi lahan pertanian pangan dari tahun 2007 sampai tahun 2022 tidak melebihi 10 persen, selama dekade tahun perencanaan jangka panjang daerah sampai tahun 2045 isu alih fungsi lahan ini perlu dicermati oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dalam upaya menjamin keberlanjutan ketahanan pangan. Kualitas pola ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan komitmen ketentuan umum pengaturan ruang budidaya menjadi syarat mutlak dalam mempertahankan luasan pertanian pangan berkelanjutan.

c. Perubahan Iklim

Indonesia yang merupakan wilayah agraris menjadikan perubahan iklim sebagai ancaman terbesar karena banyak kegiatan pertanian di sawah sangat tergantung pada hujan dan setiap perubahan curah hujan dapat menimbulkan resiko besar (Ruminta, 2016). Sistem pertanian pada lahan tadah hujan sangat rentan terhadap perubahan iklim, jika teknik budidayanya tidak berubah (Ruminta et al., 2009). Peningkatan suhu dan kelembaban juga dapat mendorong ledakan hama dan penyakit tanaman. Bencana kekeringan dan banjir dapat menurunkan produksi pertanian. Kekeringan dan banjir yang berkepanjangan akibat perubahan iklim dan pengelolaan tata air yang tidak baik sehingga kapasitas air tanah

terlalu rendah atau terlalu tinggi menyebabkan produksi padi turun secara signifikan (Ruminta & Handoko, 2016). Kabupaten Bangka Selatan sebagai lumbung pangan di Provinsi Bangka Belitung perlu mencermati dampak dari fenomena global perubahan iklim yang saat ini sedang terjadi.

d. Kualitas dan Daya Dukung Lingkungan

Berdasarkan hasil analisis DDDT pada KLHS RPJPD Kabupaten Bangka Selatan 2025-2045 diketahui kondisi daya dukung lahan terbangun di Kabupaten Bangka Selatan berada kategori baik. Meskipun demikian, pada perhitungan kinerja jasa ekosistem pengaturan tata air dan banjir terdapat 8,65 % wilayah di Kabupaten Bangka Selatan dalam kategori sangat rendah dan rendah. Hal tersebut mengindikasikan perubahan lahan yang terjadi menyebabkan kemampuan untuk penyerapan air berkurang. Selain itu, kinerja jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana untuk kategori sangat rendah dan rendah sebesar 9,74 % dari total luasan wilayah di Kabupaten Bangka Selatan sehingga perlu mendapatkan perhatian dalam memformulasikan kebijakan pada kawasan-kawasan tersebut agar tipe penggunaan lahan berpengaruh terhadap kemampuan mengurangi tingkat erosi dan limpasan air hujan.

Tantangan lainnya dalam meningkatkan kualitas lingkungan adalah mempertahankan luas lahan konservasi dari tekanan fungsi lahan menjadi terbangun. Kawasan konservasi berperan penting dalam penyangga pembangunan untuk menjaga ketersediaan air, kualitas udara, kerentanan terhadap bencana, dan ketahanan pangan yang dalam arti luas untuk keberlanjutan kehidupan manusia dan lingkungan.

4. Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana dan Infrastruktur Wilayah

Peningkatan kualitas sarana prasarana dan infrastruktur wilayah menjadi isu strategis di Kabupaten Bangka Selatan dalam 20 tahun kedepan. Penyediaan sarana prasarana dan infrastruktur wilayah yang berkualitas untuk kebutuhan dasar perlu dicapai dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa daerah dapat menjalankan fungsi dan perannya dengan maksimal. Infrastruktur yang berkualitas minimal dapat memfasilitasi kehidupan sosial dan lingkungan secara efektif, membantu mendorong ekonomi yang baik, dan mampu bertahan dalam waktu yang lama (CSIS, 2017). Isu peningkatan kualitas sarana prasarana dan infrastruktur wilayah di Kabupaten Bangka Selatan antara lain:

a. Pemerataan Pembangunan Kewilayahan



Pemerataan pembangunan wilayah perlu ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan. Kabupaten Bangka Selatan memiliki karakteristik wilayah yang sangat unik dimana terhadap 2 kecamatan yang berada di pulau yang berbeda yakni Kecamatan Lepar dan Kecamatan Kepulauan Pongok. Selain itu, Kabupaten Bangka Selatan merupakan kabupaten terluas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga pemerataan pembangunan perlu dipastikan agar tidak terjadi kesenjangan sosial dan memastikan pertumbuhan ekonomi secara merata pada setiap wilayah. Dalam mendukung pemerataan ekonomi, pembangunan infrastruktur diarahkan pada konektivitas fisik seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan. Infrastruktur penghubung virtual seperti internet dan telekomunikasi juga harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Tidak hanya itu, infrastruktur lain yang berkaitan dengan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan air bersih ikut menjadi salah satu instrumen mengurangi kesenjangan.

b. Pembangunan Sarana Prasarana dan Infrastruktur yang Berkualitas

Utilitas kawasan permukiman dengan menghadirkan sarana prasarana dan infrastruktur lingkungan yang baik seperti penyediaan sanitasi yang layak termasuk pembangunan sarana prasarana persampahan akan menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dalam menanggapi isu-isu lingkungan global (*climate change*). Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan harus mempertimbangkan akses persampahan berupa keberlanjutan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang tidak hanya berfokus untuk menangani pemberhentian sampah terakhir, tetapi harus mampu memberikan nilai ekonomi dan jasa dari sektor persampahan tersebut. Hal ini akan dilakukan dengan upaya langkah-langkah sistematis, terintegrasi, holistik dan komprehensif dengan melibatkan seluruh *stakeholder* pembangunan sebagai cerminan kolaborasi pembangunan dalam upaya menangani masalah-masalah persampahan dan isu-isu lingkungan. Disamping itu, penyediaan infrastruktur lingkungan lainnya yang menunjang fungsi dan kegiatan perkotaan dan permukiman perlu ditingkatkan seperti penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), kinerja jaringan jalan, dan kinerja drainase perkotaan dan permukiman.

Selain penyediaan sarana dan prasarana serta infrastruktur lingkungan yang berkualitas, dalam rangka mencapai kemandirian pangan di Kabupaten Bangka Selatan perlu dilakukan penyiapan dengan pembangunan sarana prasarana penunjang pertanian yang berkualitas dan berkelanjutan.

c. Peningkatan Kualitas Layanan Aksesibilitas dan Konektivitas Kawasan

Penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur kewilayahan dengan memfokuskan terhadap ketersediaan akses jalan yang menghubungkan konektivitas antar daerah yang

satu dengan daerah yang lainnya dan menuju simpul-simpul pelayanan kegiatan produksi, ekonomi dan sosial menjadi perhatian Kabupaten Bangka Selatan selama dua puluh (20) tahun kedepan. Penyediaan konektivitas tidak hanya difokuskan pada daerah teresterial, namun juga penyediaan dan peningkatan kualitas pelabuhan mutlak harus dilakukan. Kabupaten Bangka Selatan harus mampu menghadirkan infrastruktur kepelabuhanan yang handal sebagai *transitment point* untuk mendukung marketing/pemasaran produk bahan baku maupun industri hilirisasi. Keberadaan pelabuhan Sadai dan Tanjung Gading menjadi pintu masuk ekonomi Kabupaten Bangka Selatan sekaligus juga sebagai gerbang ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini sangat dimungkinkan mengingat produksi sektor primer Kabupaten Bangka Selatan yang didukung dengan kehadiran Kawasan Industri Sadai yang menjadi kawasan prioritas nasional.

d. Pembangunan Infrastruktur Digital

Dalam rangka melakukan percepatan transformasi digital sesuai dengan isu dan perkembangan teknologi dalam menghadapi tantangan global perlu dilakukan penyiapan infrastruktur digital dan memperluas jangkauan internet ke seluruh wilayah di Kabupaten Bangka Selatan. Pembangunan digital infrastruktur adalah pengembangan infrastruktur berbasis teknologi informasi yang bertujuan untuk memberikan kemudahan, meningkatkan efektivitas, dan efisiensi waktu dalam melaksanakan berbagai kegiatan dan ekonomi digital. Adapun implementasinya dari sisi pelayanan publik dapat kita lihat pada berbagai inovasi pelayanan publik berbasis digital. Sedangkan dalam dunia perdagangan, maraknya dunia *e-commerce* menjadi salah satu bukti bahwa digital infrastruktur semakin progresif dan merupakan sudah menjadi kebutuhan saat ini. Sehingga isu pembangunan infrastruktur digital menjadi salah satu isu strategis yang harus diperhatikan dalam pembangunan jangka panjang Kabupaten Bangka Selatan.

e. Optimalisasi Penataan Ruang yang Terpadu

Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan harus dimulai dari proses perencanaan ruang yang efektif. Rencana pengembangan dan pembangunan infrastruktur wilayah harus berdasarkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan sehingga tujuan pembangunan infrastruktur dapat optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah secara berkelanjutan.

5. Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan merupakan aspek yang krusial dalam pembangunan daerah karena berkaitan dengan aspek kontrol dan pengawasan terhadap banyak bidang dalam mencapai tujuan pembangunan. Indeks Reformasi Birokrasi dapat memperlihatkan kinerja



pemerintah dalam mengupayakan terlaksananya tata kelola pemerintahan yang lebih baik lagi.

Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang mengacu nilai-nilai *good governance* dengan mengedepankan *governance* di semua aspek pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik menjadi pintu masuk tata kelola birokrasi, tata kelola pembangunan dan tata kelola pelayanan publik yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Tentunya menjadi sesuatu hal yang mendesak dan tidak bisa dihindari bahwa dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun kedepan dan seterusnya, pelaksanaan dan pengawasan fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik harus dilakukan secara digital. Seiring semangat tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan akan meneruskan penguatan dan pemantapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam seluruh dimensi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Untuk mewujudkan hal tersebut, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia birokrasi dan tingkat pengetahuan masyarakat terhadap penggunaan/penerapan media teknologi informasi menjadi prioritas yang harus dilakukan secara cepat. Hal ini tentunya hanya bisa diwujudkan dengan peningkatan bimbingan teknis untuk aparatur birokrasi dan sosialisasi yang masif kepada masyarakat. Program *Smart City* akan tetap menjadi agenda prioritas pembangunan Kabupaten Bangka Selatan selama 20 (dua puluh) tahun ke depan dan dalam kurun waktu selanjutnya.

Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang mengacu nilai-nilai *good governance* tidak bisa dilepaskan dari aspek peningkatan kompetensi, daya kreasi dan inovasi aparatur pemerintah daerah dalam pemberian pelayanan publik. Guna mempercepat pelayanan, kepastian, transparansi, efektif, efisien dan akuntabel, sistem pelayanan publik harus dilakukan dengan berbasis digitalisasi. Upaya ini bukan hanya merupakan standar operasional prosedur (SOP) tetapi lebih merupakan suatu tuntutan dalam bingkai inovasi yang elegan. Selama kurun waktu periode perencanaan pembangunan jangka menengah sebelumnya dan tahun perencanaan berjalan (2021-2026), Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan sudah berkomitmen untuk menerapkan *One Agency One Innovation* guna mempercepat pelayanan publik dan sasaran pembangunan di seluruh sektor pembangunan. Tentunya *One Agency One Innovation* akan tetap diteruskan untuk menjamin pelayanan publik yang prima.

Peningkatan kompetensi, daya kreasi dan inovasi aparatur pemerintah daerah dalam pemberian pelayanan publik merupakan syarat utama menghadirkan suatu tata kelola pemerintahan yang prima. Dalam 20 (dua puluh) tahun kedepan, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan berkomitmen untuk menyiapkan sumberdaya aparatur yang andal yang memiliki daya kreasi dan inovasi yang tinggi melalui peningkatan kompetensi yang diatur secara bertahap dan profesional.



BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH

Visi dan misi merupakan refleksi dari gambaran cita-cita bersama pemerintah daerah dan masyarakat terkait kondisi yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Sebagaimana hakikatnya pembangunan nasional yang menitikberatkan pada pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya maka visi dan misi pembangunan daerah pun harus menyentuh pada semua aspek untuk mewujudkan hakikat dari pembangunan tersebut. Melalui pendekatan pembangunan transformatif diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pembangunan, mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, peningkatan perekonomian masyarakat dan tentunya peningkatan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah.

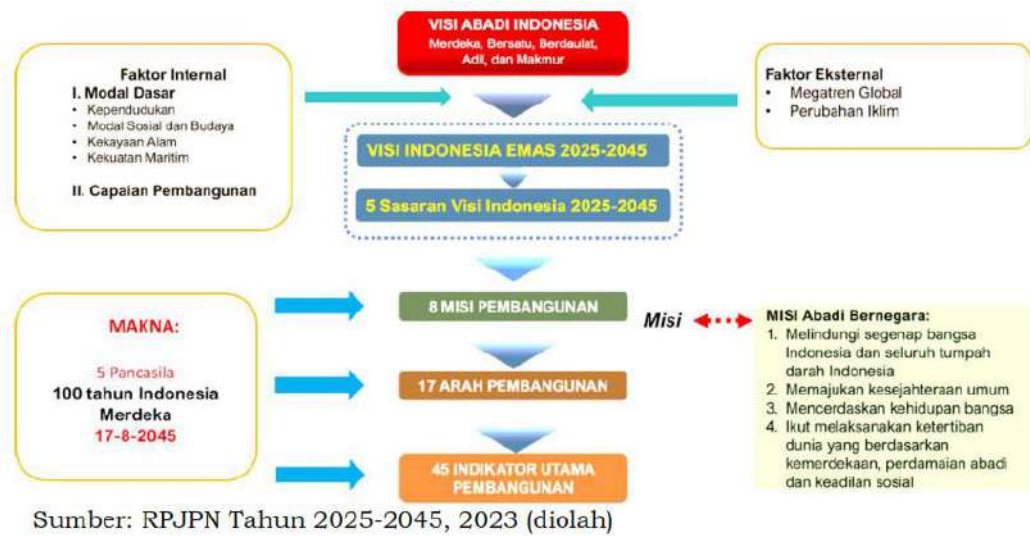
4.1. Visi

4.1.1. Visi Indonesia Emas 2045 dan Babel BERTUAH 2045

Membangun Indonesia Emas 2045 adalah cita-cita besar bangsa Indonesia yang tercermin dalam RPJPN 2025-2045. Sasaran, Misi (Agenda), Arah (tujuan) dan Indikator Pembangunan yang terdiri dari lima sasaran, delapan misi, tujuh belas arah pembangunan dan empat puluh lima indikator utama, secara utuh mencerminkan semangat kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang berlandaskan Pancasila.

Penyusunan RPJPN Tahun 2025-2045 dimulai dengan landasan pemikiran bahwa Visi Abadi Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah acuan Utama dalam setiap pembangunan yaitu Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur. Visi ini dijabarkan menjadi Visi Indonesia Emas 2045 dengan mempertimbangkan modal dasar, *megatrend* global, perubahan iklim, daya dukung dan daya tampung, serta pencapaian pembangunan sebelumnya. Pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 ini diukur dengan lima sasaran visi Indonesia 2025-2045.

Kelima sasaran utama tersebut adalah pendapatan perkapita setara dengan negara maju, kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, daya saing sumber daya manusia meningkat, dan intensitas emisi GRK menurun menuju emisi nol netto (*net zero emission*). Untuk mencapai Indonesia Emas 2045, Indonesia harus mengubah pendekatan pembangunannya. Langkah reformasi saja tidak cukup, tetapi harus dengan transformasi menyeluruh di berbagai bidang pembangunan. Visi Indonesia Emas ini dijabarkan ke dalam 8 (delapan) misi/agenda pembangunan dan 17 (tujuh belas) arah (tujuan) pembangunan yang kemudian diukur dengan 45 indikator Utama keberhasilan pembangunan.



Gambar 4.1
Visi Indonesia Emas 2045

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional dan mengimplementasikan arah transformasi pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta memadukan isu strategis serta potensi dan tantangan yang dihadapi sesuai dengan karakteristik kepulauan ini, maka visi pembangunan jangka panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2025-2045 adalah **“BABEL BERTUAH 2045; BERKELANJUTAN, TRANSFORMATIF, UNGGUL, MAJU, DAN HARMONI”**.

Dimana muatan prinsip tujuan strategis yang ingin direalisasikan oleh segenap pemangku kepentingan entitas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Prinsip yang mana menghendaki terwujudnya nilai-nilai kesejahteraan, kemajuan, kebahagiaan, dan kelestarian bagi seluruh masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2045 mendatang. Artikulasi dari setiap kata dalam kalimat visi di atas diturunkan melalui pemaknaan di bawah ini.

1. Berkelanjutan: norma ini didiseminasikan sebagai strategi pembangunan yang menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
2. Transformatif: adalah profil perubahan, berubah dari keadaan yang sebelumnya menjadi baru dan lebih baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun tata kelola pemerintahan.
3. Unggul: mencerminkan nilai lebih tinggi daripada yang lainnya dalam perwujudan SDM berdaya saing tinggi dengan penguasaan IPTEK dan berlandaskan IMTAQ.
4. Maju: menjadi personifikasi birokrasi yang dapat dipercaya untuk menghasilkan produk kebijakan yang berkualitas dalam menanamkan integritas dan profesional dalam layanan pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan daerah (*good governace and society*).

5. Harmoni: sebagai format keselarasan, keseimbangan dan keserasian dalam keberagaman masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

“BERTUAH” disepakati sebagai akronim pilar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masa depan yang dilimpahi berkah dan rahmat atas kemampuan mengelola dan mengoptimalkan segenap sumber daya dan potensi yang dimiliki melalui proses pembangunan yang terencana, terarah terukur, kolaboratif, serta berorientasi kemajuan dan kesejahteraan untuk semuanya. Tata kelola tersebut dirancang dengan memfokuskan dimensi pembangunan jangka panjang yang bertumpu pada prinsip keberlanjutan, transformasi ekonomi, keunggulan SDM, Kemajuan transformasi birokrasi, serta ketahanan sosial dan budaya yang harmonis.

4.1.2. Visi Bangka Selatan 2045

Visi pembangunan Bangka Selatan 2045 merupakan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai oleh Kabupaten Bangka Selatan berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (gap) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai dalam 20 tahun mendatang. Dalam perumusan visi perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Bangka Selatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor internal (modal dasar dan kelemahan), faktor eksternal (peluang dan tantangan), serta menggambarkan nilai-nilai kunci yang perlu dilaksanakan.



Gambar 4.2
Konsep Perumusan Visi RPJPD Kabupaten Bangka Selatan

Berdasarkan RPJPN Tahun 2025-2045, Wilayah Sumatra termasuk didalamnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diarahkan menjadi mata rantai Utama Bioindustri dan kemaritiman yang berdaya saing, berkelanjutan serta Hub Ekonomi Biru di Kawasan barat Indonesia. Peluang kontribusi ekonomi wilayah Sumatera bersumber dari letak geografis yang dilalui oleh jalur sutra (*silk road*) dan wilayah ALKI 1 sebagai jalur perdagangan internasional yang menghubungkan antara wilayah timur dan barat dunia. Dengan potensi letak geografis yang berdekatan dengan ALKI 1 maka Kabupaten Bangka Selatan memiliki akses strategis dalam memanfaatkan simpul-simpul transportasi sebagai pintu masuk logistik ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Disamping Kabupaten Bangka Selatan juga memiliki kawasan industri dan pelabuhan sadai yang dapat dikembangkan secara optimal sebagai pusat pertumbuhan kawasan ekonomi baru di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tentunya hal tersebut harus ditunjang dengan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang memadai serta kesiapan dalam aspek sumber daya manusia, teknologi dan inovasi dan tentunya transformasi tata kelola yang mendukung iklim investasi.

Perumusan visi pembangunan Kabupaten Bangka Selatan 2045 juga dilakukan dengan mempertimbangkan pada masalah utama atau isu strategis pembangunan. Pada bab sebelumnya telah diuraikan isu strategis pembangunan Kabupaten Bangka Selatan, yaitu: (1) Kualitas dan daya saing SDM; (2) Pembangunan dan pemerataan ekonomi; (3) Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana dan Infrastruktur Wilayah; (4) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; serta (5) Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan. Keterkaitan isu strategis dengan visi Kabupaten Bangka Selatan dapat dilihat gambar dibawah ini.

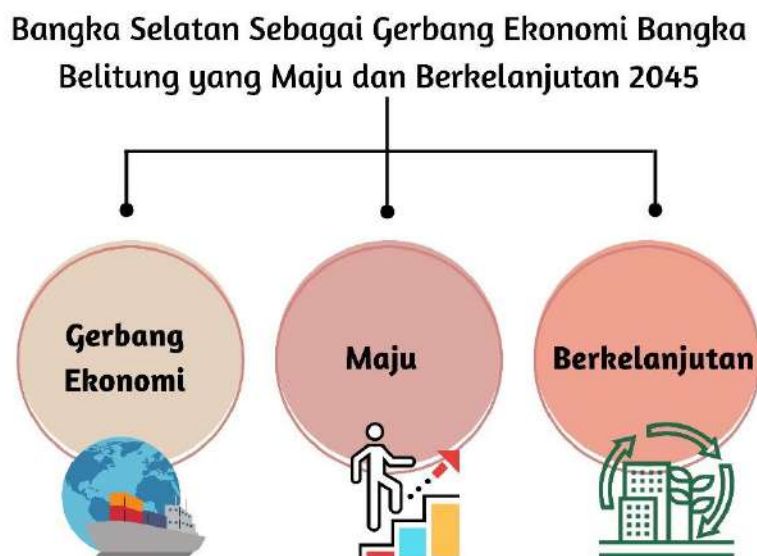


Gambar 4.3
Keterkaitan Isu Strategis dan Visi RPJPD Kabupaten Bangka Selatan

Berdasarkan uraian diatas, maka visi RPJPD Kabupaten Bangka Selatan tahun 2025-2045 adalah:

“BANGKA SELATAN SEBAGAI GERBANG EKONOMI BANGKA BELITUNG YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN 2045”

Rumusan visi tersebut diharapkan mampu mewujudkan tujuan pembangunan jangka Panjang daerah dan masyarakat Bangka Selatan menuju masyarakat yang unggul, berdaya saing dan sejahtera. Visi Kabupaten Bangka Selatan 2045 merupakan keberlanjutan dari visi jangka Panjang Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2005-2025 yakni “TERWUJUDNYA BANGKA SELATAN YANG MAJU DAN SEJAHTERA BERBASIS AGROKULTUR DAN AGROINDUSTRI YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN DIDUKUNG SUMBER DAYA MANUSIA BERKUALITAS DAN PEMERINTAHAN YANG AMANAH”. Dimana pada visi RPJPD Kabupaten Bangka Selatan 2045, perubahan yang mendasar terletak pada tranformasi ekonomi dimana sebelumnya mengandalkan potensi sektor basis akan mengarah ke hilirisasi industri dengan tetap mengoptimalkan keunggulan komparatif dan kompetitif daerah. Adapun pendekatan lingkungan, pembangunan aspek sumber daya manusia, dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan masih menjadi agenda penting pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun kedepan.



Gambar 4.4
Visi RPJPD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2045

Dengan penjelasan kata kunci yang menunjukkan arah pembangunan Kabupaten Bangka Selatan yaitu Gerbang Ekonomi, Maju, dan Berkelanjutan sebagai berikut:

GERBANG EKONOMI

Gerbang Ekonomi merupakan kondisi Kabupaten Bangka Selatan pada Tahun 2045 yang memiliki keuntungan dari letak geografis dan ekonomi dimana perairan laut Bangka Selatan



sebagai pintu masuk perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kondisi tersebut didukung dengan pengembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Sadai sebagai pintu masuk logistik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Peran Kawasan Industri dan Pelabuhan Sadai menjadi sangat vital dalam percepatan pertumbuhan Kawasan. Oleh karena itu, dalam menggerakkan ekonomi wilayah perlu didukung dengan pengembangan infrastruktur pendukung yang menciptakan interkoneksi antarkawasan strategis, dan pengembangan jalur konektivitas antar wilayah dan jalur logistik yang memadai dengan tetap mengedepankan riset, inovasi dan teknologi guna mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang ada di Kabupaten Bangka Selatan.

MAJU

Maju merupakan kondisi Kabupaten Bangka Selatan pada Tahun 2045 yang unggul berorientasi pada mutu dan berlandaskan pertumbuhan, pemerataan ekonomi, sumber daya manusia yang adaptif terhadap IPTEK, kelembagaan pemerintahan yang inovatif dan progresif. Pada periode pembangunan jangka panjang kedepan Kabupaten Bangka Selatan akan menjadi salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki perkembangan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang tinggi. Tentunya hal tersebut ditunjang oleh ketersediaan infrastruktur wilayah yang berkualitas, pemerataan perekonomian masyarakat dengan memanfaatkan potensi sektor unggulan secara optimal untuk menyediakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat serta meningkatkan geliat investasi di daerah. Disamping, potensi lahan pertanian di Kabupaten Bangka Selatan dioptimalkan untuk menuju ketahanan dan kemandirian pangan yang berkelanjutan. Selain maju dalam aspek ekonomi, pembangunan di Kabupaten Bangka Selatan juga maju dalam aspek pembangunan Sumber Daya Manusia, serta maju dalam aspek sosial budaya dan lingkungan. Majunya pembangunan di Kabupaten Bangka Selatan termanifestasi pada kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, tingkat kemiskinan yang rendah, ketimpangan pendapatan masyarakat rendah serta meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat.

BERKELANJUTAN

Kabupaten Bangka Selatan pada Tahun 2045 telah mewujudkan pembangunan **berkelanjutan**, dengan indikasi pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, ketangguhan masyarakat dan infrastruktur terhadap kebencanaan dan krisis iklim dan peningkatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan. Kelestarian sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup dengan tata kelola yang baik, termanifestasi dengan

penerapan perilaku ramah lingkungan seluruh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, pemanfaatan sumber daya alam yang ditujukan untuk kepentingan pertumbuhan dengan memperhatikan batas yang wajar dalam kendali ekosistem atau sistem lingkungan. Selain itu juga, pendekatan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim serta peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang tetap menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Berdasarkan visi jangka Panjang Kabupaten Bangka Selatan diatas, dirumuskan sasaran Visi RPJPD Kabupaten Bangka Selatan 2025-2045 sebagaimana pada Gambar 4.5 dan Tabel 4.1.



Gambar 4.5
Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025-2045

Sasaran pertama, pendapatan per kapita yang utamanya didorong oleh peningkatan kontribusi PDB industri pengolahan sumber daya alam senilai 12,54 % yang berbasis inovasi serta secara inklusif dan berkelanjutan. Lapangan pekerjaan layak yang tercipta akan meningkatkan jumlah penduduk berpendapatan menengah dan meningkatkan PDRB per kapita 104,14 juta.

Sasaran kedua, sejalan dengan peningkatan ekonomi, kesempatan kerja dan pendapatan kelas menengah meningkat, sehingga kemiskinan menuju nol persen pada kisaran 0,02-0,22 persen yang diikuti penurunan secara signifikan jumlah penduduk rentan miskin. Ketimpangan pendapatan antar penduduk semakin menurun dengan rasio gini berkisar 0,201-0,187 dan kontribusi PDRB Kabupaten 14,2 – 15,6 persen serta pertumbuhan ekonomi meningkat ke angka 6,20 % di tahun 2045.

Sasaran ketiga adalah meningkatnya daya saing daerah seiring dengan semakin mantapnya tata kelola birokrasi, pembangunan infrastruktur, stabilnya ekonomi dan semakin berkembangnya riset dan inovasi daerah dengan target indeks daya saing daerah pada tahun



2045 sebesar 4,5 poin. Sasaran keempat adalah meningkatnya sumber daya manusia untuk kesejahteraan masyarakat yang dibentuk berdasarkan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara merata. Ditempuh melalui peningkatan pendidikan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi, inovasi dan kreativitas dan kesehatan yang utamanya diukur melalui peningkatan harapan lama sekolah yang berkaitan dengan peningkatan indeks modal manusia (*human capital index*) menjadi 0,65 pada tahun 2045 dan ditandai juga dengan kenaikan indikator harapan lama sekolah sebesar 12,33-12,35 pada tahun 2045 serta penurunan Angka Kematian Balita menjadi 4,97 ditahun 2045. Sasaran kelima adalah mewujudkan Bangka Selatan menjadi Kabupaten yang maju dan berkomitmen kuat untuk melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan sekaligus ramah lingkungan dalam kerangka ekonomi hijau yang utamanya ditunjukkan oleh Kontribusi Persentase Penurunan Emisi GRK (%) secara kumulatif menjadi 30,56 persen pada tahun 2045.



Tabel 4.1
Penyelarasan Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Bangka Selatan 2025-2045 dengan RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2045

No	RPJPN 2025-2045				RPJPD PROV. KEP. BANGKA BELITUNG 2025-2045				RPJPD KABUPATEN BANGKA SELATAN 2025-2045			
	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pendapatan per kapita setara negara maju	a. GNI Per Kapita (US\$)	5.500	30.300	Peningkatan Pendapatan per kapita	a. PDRB per kapita (Rp Juta)	72,18 - 72,81	392,22- 465,81	Peningkatan Pendapatan per kapita	a. PDRB per kapita (Rp Juta)	55,55- 58,59	104,14
		b. Kontribusi PDB Maritim (%)	7,6	15		b. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	26,49	73,69		b. Persentase Produksi Perikanan (Tangkap & Budidaya) terhadap PDRB*	18,22	19,3
		c. Kontribusi PDB Manufaktur (%)	20,8	28		c. Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	21,48 - 21,59	29,72 - 30,40		c. Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	8,86	12,54
2	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	a. Tingkat Kemiskinan (%)	6,0 - 7,0	0,5 - 0,8	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	a. Tingkat Kemiskinan (%)	2,92 - 3,92	0,00- 0,50	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	a. Tingkat Kemiskinan (%)	2,89	0,02- 0,22
		b. Rasio Gini (indeks)	0,379 - 0,382	0,377 - 0,320		b. Rasio gini (Indeks)	0,239- 0,242	0,210- 0,238		b. Rasio gini (Indeks)	0,209- 0,207	0,201- 0,187
		c. Kontribusi PDRB KTI (%)	21,5 (2022)	28,5		c. Kontribusi PDRB Provinsi (%)	0,49	0,50		c. Kontribusi PDRB Kabupaten/	11,29- 11,51	14,2- 15,6



No	RPJPN 2025-2045				RPJPD PROV. KEP. BANGKA BELITUNG 2025-2045				RPJPD KABUPATEN BANGKA SELATAN 2025-2045			
	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										Kota terhadap Total PDRB Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung(%)		
						d.Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,46 - 5,10	5,12 - 6,23		d.Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,20	6,20
3	Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat	Global Power Index (peringkat)	34 (2023)	15 besar	Kepemimpinan Kepala Daerah di dunia Internasional meningkat	Indeks Daya Saing Daerah	3,30	4,10	Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	3,0	4,5
4	Daya saing sumber daya manusia meningkat	Indeks Modal Manusia (indeks)	0,54 (2022)	0,73	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Indeks Modal Manusia	0,55	0,72	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Indeks Modal Manusia	0,50	0,65
										Angka Kematian Balita*	9,63	4,97
										Harapan Lama Sekolah*	11,91-11,93	12,33-12,35
5	Intensitas emisi GRK menurun menuju <i>net zero emission</i>	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	38,6	93,5	Penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	54,55	89,71	Penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>	Kontribusi Persentase Penurunan Emisi GRK (%)*	22,53	30,56



No	RPJPN 2025-2045				RPJPD PROV. KEP. BANGKA BELITUNG 2025-2045				RPJPD KABUPATEN BANGKA SELATAN 2025-2045			
	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (%)	76,66	82,88		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (%)	74,38	77,81

Sumber: RPJPN Tahun 2025-2045, 2024 (diolah)

*indikator proxy

4.2. Misi

4.2.1. Misi (Agenda) Pembangunan Nasional 2045 dan Misi (Agenda) Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2045

Berdasarkan dari visi yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 ditetapkan 8 (delapan) misi (agenda) pembangunan yang terdiri atas: transformasi sosial; transformasi ekonomi; transformasi tata kelola yang ditopang oleh 2 (dua) agenda landasan transformasi, yaitu: supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia; dan ketahanan sosial budaya dan ekologi yang diimplementasikan secara menyeluruh melalui 3 (tiga) agenda kerangka implementasi transformasi, yaitu: pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan; sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan serta kesinambungan pembangunan.



Sumber: RPJPN Tahun 2025-2045, 2023 (diolah)

Gambar 4.6
Delapan Misi (Agenda) Pembangunan Nasional Tahun 2025-2045

Delapan misi (agenda) pembangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul dan berdaya saing;
2. Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi IPTEK, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi dan keuangan syariah, pertanian, ekonomi biru dan bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan



- koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;
3. Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata Kelola yang berintegritas dan adaptif;
 4. Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar Kawasan;
 5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam;
 6. Pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi dan tata Kelola yang berlandaskan supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia dan ketahanan sosial budaya dan ekologi sesuai dengan karakteristik wilayah.
 7. Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan sebagai pilar pendukung agenda transformasi;
 8. Kestinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045 melalui kaidah pelaksanaan yang efektif dan pembiayaan pembangunan.

Adapun misi BABEL BERTUAH 2045 sesuai dengan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia terkait dengan penyelarasan disesuaikan dengan 8 (delapan) visi RPJPN Tahun 2025-2045 yakni:

1. SDM Unggul dan Berdaya Saing;
2. Ekonomi Hijau Biru Bangka Belitung;
3. Transformasi Tata Kelola;
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Daerah;
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
6. Mewujudkan Pembangunan Kepulauan Bangka Belitung yang Merata dan Berkeadilan
7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan;
8. Mewujudkan Pembangunan yang Berlanjutan.

4.2.2. Misi (Agenda) Pembangunan Kabupaten Bangka Selatan 2045

Sesuai dengan Visi Kabupaten Bangka Selatan 2045 yakni Bangka Selatan Sebagai Gerbang Ekonomi Bangka Belitung yang Maju dan Berkelanjutan diwujudkan melalui 8 (delapan) misi pembangunan jangka panjang daerah yaitu sebagai berikut:

1. Transformasi Sosial Untuk Mewujudkan SDM Yang Unggul Serta Menjamin Keadilan Dan Perlindungan Sosial

Pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan unggul diarahkan pada upaya membangun sumber daya yang profesional, produktif, inovatif, mampu bersaing, dan cepat beradaptasi dengan segala tantangan global. Dalam menghadapi Indonesia Emas 2045 transformasi sumber daya manusia menjadi modal penting dengan peningkatan kualitas bidang pendidikan, kesehatan dan sosial.

2. Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Berbasis Potensi Lokal & Berkelanjutan

Pembangunan perekonomian yang merata dengan mengoptimalkan penguatan ekonomi lokal yang berdaya saing, ramah lingkungan dan nilai tambah yang tinggi dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Disamping itu, didorong dengan inovasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dalam menghasilkan produk komoditas yang berkualitas, akselerasi UMKM, dan ditunjang pengembangan kapasitas SDM yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan adaptif terhadap transformasi digital.

3. Tranformasi Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanan Publik Yang Berintegritas, Responsif, Adaptif & Inovatif

Pelayanan publik yang prima dan akuntabel dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip *good governance* (*consensus oriented, accountable, transparent, responsive, equitable and inclusive, effective and efficient, follows the rule of law, and participatory*).

4. Stabilitas Kewilayahan

Memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan di kabupaten Bangka Selatan, dengan memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat, menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan investor serta menjaga keberlanjutan fiskal yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan menjaga stabilitas sektor keuangan dan anggaran.

5. Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi

Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya ekologi serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam



6. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan

Pembangunan sarana fisik dan infrastruktur yang andal dan merata untuk menunjang kemudahan akses logistik, barang dan jasa sehingga pertumbuhan kantong-kantong perekonomian dapat terdistribusi secara merata pada seluruh wilayah di Kabupaten Bangka Selatan.

7. Mewujudkan Sarana Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Pembangunan wilayah berkelanjutan dengan mengedepankan fungsi daya dukung dan daya tampung lingkungan. Kegiatan pembangunan ekonomi untuk menyejahterakan masyarakat dilakukan secara maksimal dengan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Disamping itu, pengelolaan manajemen kebencanaan yang adaptif dengan meningkatkan kapasitas resiliensi terhadap bencana baik infrastruktur maupun masyarakat yang tanggap terhadap bencana dan krisis lingkungan serta mendukung target global dan nasional dengan gerakan ekonomi hijau.

8. Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan

Kesinambungan pembangunan yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pembiayaan pembangunan

Dalam proses pencapaian misi, dibutuhkan nilai - nilai ideal bagaimana misi tersebut dilaksanakan. Hal utama yang harus diperhatikan adalah kesesuaian dalam mewujudkan transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola yang inovatif ditopang oleh supremasi hukum, stabilitas serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Mewujudkan misi juga harus didampingi dengan nilai proporsional yang berkaitan dengan karakter budaya yang terus dipegang sebagai identitas nasional dengan mengedepankan nilai-nilai keunggulan dan karakter lokal.

Nilai-nilai luhur pancasila seperti **ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial** menjadi landasan kokoh dalam memenuhi agenda pembangunan nasional dan pembangunan di daerah. Kesinambungan nilai-nilai tersebut harus dipastikan selalu terarah pada kepentingan nasional. Berkaitan dengan misi 2045, satu nilai penting yang harus selalu dijunjung tinggi yaitu **Kedaulatan Rakyat**. Nilai ini diusung sebagai tujuan tertinggi di mana segala manfaat, kemakmuran dan keuntungan yang berhasil diraih akan digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Kepentingan rakyat menjadi tujuan utama dan tertinggi dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

Visi dan misi pembangunan jangka Panjang yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya menjadi dasar bagi perumusan arah kebijakan daerah selama 20 (dua puluh) tahun ke depan. Arah kebijakan merupakan rumusan kerangka kerja dalam melaksanakan misi yang menyesuaikan dengan isu strategis. Selanjutnya arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan akan dijabarkan dalam 4 (empat) periodisasi jangka menengah atau 5 (lima) tahunan. Rumusan kerangka kerja dalam mewujudkan misi RPJPD Kabupaten Bangka Selatan pada masing-masing tahapan pembangunan dilaksanakan sejalan dengan pentahapan pada RPJPN Tahun 2025-2045. Dengan mengikuti tahapan ini, arah kebijakan yang dirumuskan dalam melaksanakan misi akan menjadi lebih terarah dan responsif terhadap dinamika yang terus berubah.

5.1 Arah Kebijakan Pembangunan



Gambar 5.1
Periodisasi RPJPD Kabupaten Bangka Selatan 2025-2045

Pentahapan pembangunan dalam jangka panjang dilakukan secara terukur dan konsisten untuk mencapai visi "Bangka Selatan Gerbang Ekonomi Bangka Belitung yang Maju dan Berkelanjutan 2045" dengan tema pembangunan jangka Panjang Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025-2045 yakni "**Simpul Konektivitas Kepulauan, Pengembangan Kawasan Industri, Lumbung Pangan & Agromaritim**".

Tahapan pertama (2025-2029) adalah tahapan fondasi berupa penguatan modal dasar



transformasi. Pada tahap ini pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada pada kisaran 4,43 persen per tahun. Transformasi sosial dititikberatkan pada penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif.

Transformasi ekonomi difokuskan pada upaya lanjutan proses hilirisasi sumber daya alam unggulan yang berpusat di KI Sadai sebagai pusat industri, peningkatan kapasitas riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja, penerapan ekonomi hijau, pemenuhan akses digital di seluruh wilayah Kabupaten Bangka Selatan. Transformasi tata kelola difokuskan pada perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN berbasis merit pada pemerintahan Kabupaten Bangka Selatan, kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan, peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi serta penguatan kapasitas masyarakat sipil. Stabilitas kewilayahan difokuskan pada penguatan stabilitas hukum, politik dan keamanan di daerah, penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat. Stabilitas ekonomi ditekankan untuk menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat Bangka Selatan dan menjaga kepercayaan investor. Selain itu juga mengurangi ketergantungan terhadap sektor ekstraksi pertambangan timah yang hingga kini masih menjadi sektor utama ekonomi yang digeluti sebagian besar masyarakat di Bangka Selatan.

Ketahanan sosial budaya dan ekologi difokuskan pada optimalisasi nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia dan menggerakkan modal sosial masyarakat; peningkatan ketangguhan manusia dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana; penguatan riset, inovasi dan teknologi dalam meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup; pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, akselerasi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan penurunan emisi gas rumah kaca.

Pembangunan wilayah di Bangka Selatan pada tahap ini difokuskan untuk peningkatan pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi utamanya melalui pemanfaatan infrastruktur yang ada; penuntasan pemenuhan pelayanan dasar terutama pada wilayah dengan prioritas tinggi di wilayah Kepulauan (Kecamatan Lepar dan Kecamatan Kepulauan Pongok) dan wilayah Kawasan Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional (KTPN) Batu Betumpang serta memperkuat peran Kecamatan Payung dan Kecamatan Air Gegas sebagai pusat kegiatan wilayah untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah disamping memperkuat peran Kawasan Industri dan Pelabuhan Sadai. Pembiayaan pembangunan dioptimalkan melalui mobilisasi dan optimalisasi pembiayaan pembangunan yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) serta pembiayaan pembangunan non pemerintah.

Pada **tahap kedua (2030-2034)** dengan telah terwujud fondasi yang kuat, Bangka Selatan diharapkan dapat melakukan akselerasi transformasi. Transformasi sosial dititikberatkan



pada penguatan pembangunan manusia yang inklusif dan percepatan pembangunan SDM berkualitas. Transformasi ekonomi difokuskan pada percepatan peningkatan produktivitas secara masif, penguatan dan perluasan pusat pertumbuhan di luar Toboali sebagai ibukota kabupaten dan wilayah KI Sadai sebagai pusat industri serta optimalisasi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru seperti penerapan ekonomi biru, ekonomi hijau dan bioekonomi.

Transformasi digital semakin diperkuat melalui pemanfaatan teknologi digital yang semakin luas di berbagai aspek kehidupan serta penguatan pelaku digital di Bangka Selatan utamanya generasi muda (Gen-Z), penguatan riset dan inovasi digital, serta pengembangan kemampuan sebagai produsen digital. Transformasi tata kelola difokuskan pada terwujudnya kelembagaan yang kolaboratif, SDM ASN Bangka Selatan yang sejahtera, proporsional dan berkompeten serta masyarakat sipil yang partisipatif. Stabilitas kewilayahan difokuskan pada penguatan kapasitas kelembagaan keamanan di daerah, partisipasi masyarakat yang lebih bermakna melalui penciptaan ruang publik yang sehat, ramah anak dan partisipatif, serta terciptanya masyarakat yang cerdas dan berkarakter pancasila.

Ketahanan sosial budaya dan ekologi difokuskan pada penguatan lingkungan penduduk yang memastikan keluarga dapat menjalankan fungsinya serta penyediaan akses partisipasi yang inklusif; akuisisi teknologi berbasis riset dan inovasi untuk mendukung ketahanan pangan, air dan energi; meningkatnya manusia masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana. Pembangunan wilayah difokuskan pada percepatan pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan tata kelola kelembagaan yang terintegrasi. Percepatan peningkatan kualitas pelayanan dasar untuk menyiapkan manusia yang berdaya saing di seluruh wilayah. Dalam pembiayaan pembangunan terjadi optimalisasi sumber pendanaan pemerintah, dan telah berkembang sumber pendanaan non pemerintah baik individu maupun korporasi.

Tahap ketiga (2035-2039) adalah tahapan pembangunan pemantapan capaian pembangunan menuju Bangka Selatan sebagai Gerbang Ekonomi Bangka Belitung. Transformasi sosial yang dititikberatkan pada penguatan daya saing SDM menjadi semakin produktif dan inovatif serta keberlanjutan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Transformasi ekonomi difokuskan pada penguatan transformasi melalui peningkatan daya saing yang tinggi secara nasional dan berkelanjutan serta penguasaan teknologi menengah dan tinggi. Transformasi ditekankan pada terwujudnya kelembagaan yang adaptif, SDM ASN yang kompetitif dan masyarakat sipil yang mandiri. Stabilitas kewilayahan pada tahap ini difokuskan pada kebebasan sipil dan kesetaraan yang terjamin bagi semua warga negara dalam kehidupan dan dalam memperoleh, mengolah dan memanfaatkan sumber daya sosial, politik dan ekonomi; peningkatan jumlah penerimaan pendapatan daerah dan efektivitas belanja daerah serta peningkatan peran sektor keuangan dalam pembiayaan pembangunan.

Ketahanan sosial budaya dan ekologi difokuskan pada terwujudnya manusia, keluarga



dan masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana serta mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan secara inklusif. Selain itu juga pada penerapan ekonomi hijau dan biru yang komprehensif, serta pengurangan pencemaran lingkungan dan penerapan energi bersih, penanganan limbah (padat dan cair) yang terkelola dengan baik. Serta terintegrasinya sistem ketahanan pangan. Pembangunan wilayah pada tahap ini difokuskan pada peningkatan konektivitas yang berkualitas untuk mendorong ekspansi dengan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah. Serta terpenuhinya pemenuhan akses dan kualitas pelayanan dasar secara merata di seluruh wilayah. Pada tahap ini, pembiayaan pembangunan difokuskan pada peningkatan, pemanfaatan, dan perluasan cakupan sektor yang menggunakan sumber dana non pemerintah.

Pada **Tahap keempat (2040-2045)** adalah tahapan terwujudnya Bangka Selatan sebagai Gerbang Ekonomi Bangka Belitung yang Maju dan Berkelanjutan. Transformasi sosial dititikberatkan pada perwujudan masyarakat yang sejahtera, adaptif, berakhlak mulia, berbudaya maju, unggul dan berdaya saing. Transformasi ekonomi difokuskan pada perwujudan masyarakat Bangka Selatan yang berpendapatan tinggi, maju dan merata melalui semakin berkualitasnya SDM dan inovasi yang berdaya saing global. Transformasi tata kelola difokuskan pada tercapainya regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.

Stabilitas kewilayahan terwujud pada masyarakat dan aparat penegak hukum yang patuh hukum dengan berlandaskan hak asasi manusia. Menguatnya pengelolaan fiskal, moneter dan sektor keuangan daerah dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Ketahanan sosial budaya dan ekologi difokuskan pada terwujudnya SDM Bangka Selatan yang Berbudaya, inklusif dan berkelanjutan dengan ditopang oleh ketangguhan manusia, keluarga dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana; memastikan setiap individu dapat hidup berkualitas, berdaya dan mampu berkontribusi dalam pembangunan secara inklusif; lingkungan hidup berkualitas baik, penerapan energi bersih di seluruh sektor, sumberdaya hayati yang dimanfaatkan sebagai sumber pangan dan farmakologi dan penurunan emisi GRK menuju pencapaian *net zero emission*.

Pembangunan wilayah pada tahap ini difokuskan untuk menjaga ketersediaan infrastruktur dan energi yang terintegrasi, berkualitas dan berkelanjutan secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Bangka Selatan dengan dukungan tata kelola kelembagaan yang andal untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pelayanan dasar yang berkualitas. Pembiayaan pembangunan pada tahap ini adalah terwujudnya sinergi pendanaan pemerintah dan non pemerintah yang semakin meningkat.



Tabel 5.1
Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025-2045

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
BANGKA SELATAN SEBAGAI GERBANG EKONOMI BANGKA BELITUNG YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN 2045	1. Transformasi Sosial untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang unggul serta menjamin keadilan dan perlindungan sosial.	Penguatan akses layanan kesehatan dasar yang berkualitas dan merata	Peningkatan upaya kesehatan masyarakat, perluasan upaya promotif dan preventif, peningkatan literasi kesehatan dan pembudayaan perilaku hidup sehat dan penyehatan lingkungan;	Pemerataan pelayanan dan sarana prasarana kesehatan mencakup promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif dengan inovasi pelayanan Kesehatan utamanya di wilayah kepulauan	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas dan Berkeadilan di Kabupaten Bangka Selatan
		<ul style="list-style-type: none"> - Pemerataan akses pendidikan dengan percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan menengah - Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi melalui pendirian sekolah tinggi/universitas/politeknik yang berbasis keunggulan daerah 	Revitalisasi pendidikan nonformal (pendidikan masyarakat) serta penguatan pendidikan sepanjang hayat, pendidikan berbasis komunitas, dan life skills dalam rangka meningkatkan daya saing SDM	Penguatan sistem penjaminan mutu dan tata kelola pendidikan	Penyelenggaraan Pendidikan yang Berkualitas dan Berkeadilan di Kabupaten Bangka Selatan



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		- Pemenuhan layanan kebutuhan dasar masyarakat miskin dan Peningkatan kapasitas kelembagaan antar sektor dalam pengentasan kemiskinan	Pengentasan kemiskinan dan Perlindungan sosial adaptif terintegrasi dalam mewujudkan integrasi program perlindungan sosial dan pembangunan SDM secara menyeluruh di Kabupaten Bangka Selatan	Penguatan sistem jaminan sosial yang efektif dan mencapai cakupan universal di Kabupaten Bangka Selatan	Pemerataan dan pemantapan perlindungan sosial adaptif, integratif dan inklusif bagi masyarakat Bangka Selatan
	2. Transformasi Ekonomi yang Inklusif berbasis Potensi Lokal dan Berkelanjutan	Penguatan Landasan perekonomian domestik berbasis keunggulan di setiap wilayah dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan pemasaran serta hilirisasi SDA	Transformasi perekonomian berbasis keunggulan komparatif sumber daya alam menjadi perekonomian yang berkeunggulan kompetitif	Memperkuat struktur perekonomian berkeunggulan kompetitif penyediaan infrastruktur yang andal berbasis keberlanjutan lingkungan	Bangka Selatan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung
		Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan/atau kawasan strategis industri, pertanian, perikanan dan perkebunan	Peningkatan industri yang berdaya saing dan berkelanjutan dengan tetap mengoptimalkan potensi sektor unggulan (pertanian, perikanan dan perkebunan)	Peningkatan diversifikasi produk dan bernilai tambah untuk berekspansi global	Bangka Selatan Maju sebagai Kawasan Industri yang Berwawasan Lingkungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		Penguatan landasan upaya diversifikasi dalam rangka meningkatkan nilai tambah lapangan usaha ekonomi dan keanekaragaman produksi melalui penguasaan iptek dan inovatif	Penerapan upaya diversifikasi secara optimal dalam rangka meningkatkan nilai tambah lapangan usaha ekonomi dan keanekaragaman produksi melalui penguasaan iptek dan inovatif	Memperkuat nilai tambah lapangan usaha ekonomi dan keanekaragaman produksi melalui penguasaan iptek dan inovatif	Peningkatan nilai tambah lapangan usaha ekonomi dan keanekaragaman produksi
		Penguatan landasan penerapan ekonomi hijau biru	Penerapan ekonomi hijau biru melalui optimalisasi potensi di wilayah teresterial maupun di wilayah estuarin berbasis teknologi yang menjamin kerbelanjutan ekologi dalam upaya mitigasi terhadap dampak perubahan iklim	Penguatan ekonomi hijau biru secara konsisten melalui optimalisasi potensi di wilayah teresterial maupun di wilayah estuarin berbasis teknologi yang menjamin kerbelanjutan ekologi dalam upaya mitigasi terhadap dampak perubahan iklim	Mewujudkan Penerapan ekonomi hijau biru di Kabupaten Bangka Selatan
	3. Transformasi Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik yang berintegritas, responsif, adaptif dan inovatif	Penguatan landasan penyelenggaraan birokrasi yang berintegritas, responsif, adaptif dan inovatif serta menjamin pelayanan publik yang berkualitas melalui penyediaan regulasi dan infrastruktur digital yang memadai	Transformasi penyelenggaraan birokrasi yang kolaboratif dan pelayanan publik berbasis digital	Memperkuat penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan publik yang berintegritas, responsif, adaptif dan inovatif dengan SDM ASN yang kompetitif	Regulasi dan Tata Kelola Pemerintahan Bangka Selatan yang adaptif dan berintegritas dalam mewujudkan <i>intelligent bureaucracy and Smart Region di Kabupaten Bangka Selatan</i>



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	4. Stabilitas Kewilayahan	Penguatan stabilitas hukum, politik dan keamanan di daerah, penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat. Serta menjaga stabilitas daya beli masyarakat Bangka Selatan	Menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang menjunjung tinggi asas partisipatif, kebebasan berpendapat, masyarakat yang memiliki kesadaran hukum serta berperan aktif dalam mengisi ruang pembangunan baik ekonomi, sosial budaya maupun politik	Penguatan jaminan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang menjunjung tinggi asas partisipatif, kebebasan berpendapat, masyarakat yang memiliki kesadaran hukum serta berperan aktif dalam mengisi ruang pembangunan baik ekonomi, sosial budaya maupun politik	Mewujudkan stabilitas masyarakat dan kewilayahan
Memperkokoh human capital dan social capital melalui pengembangan sistem pemberdayaan dan peningkatan kapasitas yang berkeadilan terhadap lembaga swadaya dan jejaring komunitas masyarakat secara terbuka		Menyelenggarakan konsep tatanan kehidupan masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam semua dimensi pembangunan melalui peningkatan kapasitas dan pemberdayaan lembaga dan jejaring komunitas masyarakat secara terbuka	Penguatan tatanan kehidupan masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam semua dimensi pembangunan secara terbuka	Mewujudkan masyarakat madani	



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Penguatan landasan berkehidupan sosial yang bermartabat melalui penghayatan terhadap nilai-nilai etika dan moral berlandaskan nilai-nilai religius yang tinggi, menjunjung tinggi toleransi serta berkebudayaan	Menjamin kehidupan sosial yang bermartabat melalui penghayatan terhadap nilai-nilai etika dan moral berlandaskan nilai-nilai religius yang tinggi, menjunjung tinggi toleransi serta berkebudayaan	Penguatan keberlangsungan berkehidupan sosial yang bermartabat melalui penghayatan terhadap nilai-nilai etika dan moral berlandaskan nilai-nilai religius yang tinggi, menjunjung tinggi toleransi serta berkebudayaan	Terwujudnya Bangka Selatan yang Berbudaya, Harmonis dan Nyaman
Penguatan landasan kehidupan keluarga yang berkualitas, menjamin kesetaraan gender dan kehidupan masyarakat yang berkeadilan		Menjamin kehidupan keluarga yang berkualitas melalui keberpihakan terhadap kesetaraan gender dan kehidupan masyarakat yang berkeadilan	Penguatan keberlangsungan kehidupan keluarga yang berkualitas melalui keberpihakan terhadap kesetaraan gender dan kehidupan masyarakat yang berkeadilan	Terwujudnya Bangka Selatan Inklusif	
Penguatan landasan kondisi lingkungan hidup yang berkualitas melalui pendekatan sosial budaya, ekonomi dan penyediaan sarana prasarana publik berbasis keberlanjutan ekologi		Penyelenggaraan lingkungan kehidupan yang berkualitas melalui pendekatan sosial budaya, ekonomi dan pemenuhan sarana prasarana publik	Penguatan kondisi lingkungan kehidupan yang berkualitas melalui pendekatan sosial budaya, ekonomi dan pemenuhan sarana prasarana	Bangka Selatan Berkelanjutan	



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
			berbasis keberlanjutan ekologi	publik berbasis keberlanjutan ekologi	
		Penguatan landasan ketahanan energi, air dan pangan dengan mengoptimalkan potensi lokal sesuai dengan karakteristik wilayah berbasis keberlanjutan ekologi	Memantapkan ketahanan energi, air dan pangan dengan mengoptimalkan potensi lokal sesuai dengan karakteristik wilayah berbasis keberlanjutan ekologi	Memperkuat ketahanan energi, air dan pangan yang unggul dan berdaya saing berbasis keberlanjutan ekologi	Terwujudnya Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan di Kabupaten Bangka Selatan
		Penguatan landasan upaya resilensi dan mitigasi kebencanaan dan perubahan iklim yang responsif dan adaptif	Memperkokoh resilensi dan upaya mitigasi kebencanaan dan perubahan iklim yang responsif dan adaptif	Penguatan tingkat resilensi dan upaya mitigasi kebencanaan dan perubahan iklim yang responsif dan adaptif	Terwujudnya Bangka Selatan <i>resilience</i> terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
	6. Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Penguatan landasan pembangunan kewilayahan berdasarkan peran, potensi dan karakteristik wilayah secara berkeadilan	Penyediaan infrastruktur dasar kewilayahan berdasarkan peran, potensi dan karakteristik wilayah secara berkeadilan	Peningkatan konektivitas yang berkualitas untuk mendorong ekspansi dengan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah	Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	7. Mewujudkan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Penguatan landasan pembangunan sarana prasarana yang berkualitas berbasis keberlanjutan lingkungan	Penyediaan sarana prasarana yang berkualitas berbasis keberlanjutan lingkungan	Penguatan pembangunan sarana prasarana yang berkualitas berbasis keberlanjutan lingkungan	Terwujudnya sarana prasarana yang andal dan ramah lingkungan di Kabupaten Bangka Selatan
		Peningkatan Akses Rumah Layak Huni dan terjangkau	Perluasan akses rumah layak huni dan terjangkau di Kabupaten Bangka Selatan	Pemantapan akses rumah layak huni dan terjangkau di Kabupaten Bangka Selatan	Terwujudnya hunian layak di Kabupaten Bangka Selatan
		Pengembangan akses layanan air bersih dan sanitasi lingkungan	Percepatan pemerataan dan peningkatan akses air bersih dan sanitasi lingkungan	Pemantapan pemerataan dan peningkatan akses air bersih dan sanitasi lingkungan	Perwujudan pemerataan akses air bersih dan sanitasi di Kabupaten Bangka Selatan
		Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur pelayanan dasar air bersih jaringan perpipaan	Pemerataan akses infrastruktur pelayanan dasar air bersih jaringan perpipaan di Kabupaten Bangka Selatan	Pemantapan akses infrastruktur pelayanan dasar air bersih jaringan perpipaan di Kabupaten Bangka Selatan	Perwujudan sarana dan prasarana berkualitas di Kabupaten Bangka Selatan
	8. Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan	Penguatan landasan prinsip dan penerapan pembangunan yang berkesinambungan dibidang sosial budaya, ekonomi dan lingkungan	Penerapan pembangunan yang berkesinambungan di bidang sosial budaya, ekonomi dan lingkungan	Penguatan pembangunan yang berkesinambungan di bidang sosial budaya, ekonomi dan lingkungan	Terwujudnya Pembangunan Berkesinambungan Kabupaten Bangka Selatan

Sumber: Hasil Analisis, 2024



5.2 Sasaran Pokok Pembangunan

Di masa depan, dunia akan menghadapi perubahan yang jauh lebih cepat daripada perubahan yang pernah ada sebelumnya, terutama dipicu oleh megatren global seperti revolusi teknologi, perubahan demografi, perubahan iklim serta dinamika geopolitik dan geoekonomi. Perubahan ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, budaya, ekonomi serta menuntut adaptasi dan inovasi yang cepat dari individu, masyarakat dan negeri untuk menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang yang muncul. Meskipun memiliki potensi yang besar, pemanfaatan sumber daya alam belum sepenuhnya optimal dan berkelanjutan. Arah kebijakan pembangunan perlu diperkuat dengan transformasi yang menyeluruh di berbagai bidang pembangunan yang meliputi: transformasi sosial, transformasi ekonomi dan transformasi tata Kelola dengan landasan transformasi yakni supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Adapun arah kebijakan dalam kerangka implementasi difokuskan untuk mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan dan mewujudkan kesinambungan pembangunan di Kabupaten Bangka Selatan.

5.2.1 Transformasi Sosial

Transformasi sosial akan menjadi kunci penting dalam menangani perubahan yang terjadi dalam struktur, institusi, nilai norma dan perilaku masyarakat yang antara lain berupa perubahan struktur penduduk, kemajuan teknologi, perubahan iklim, pergeseran geopolitik, pergeseran ekonomi dan kemajuan budaya. Transformasi sosial bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia pada seluruh siklus hidup dan menciptakan masyarakat yang lebih adil, sejahtera dan kohesif. tercapainya tujuan tersebut bertumpu kepada upaya pemenuhan pelayanan dasar dan pengembangan modal manusia dan modal sosial budaya.

Sebagai bentuk dukungan akan tercapainya visi Bangka Selatan sebagai Gerbang Ekonomi Bangka Belitung yang maju dan berkelanjutan 2045, transformasi sosial ditujukan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat yang sejahtera, unggul dan berdaya saing dengan sasaran pokok pembangunan yakni (1) Terwujudnya Layanan Kesehatan untuk Semua (2) Terwujudnya Layanan Pendidikan yang Merata dan Inklusif dan (3) Terwujudnya Perlindungan Sosial yang Adaptif. Adapun ketiga sasaran pokok pembangunan memuat 3 (tiga) arah pembangunan antara lain: (1) Kesehatan untuk semua (2) Pendidikan dasar yang merata (3) Perlindungan Sosial yang Adaptif.



Gambar 5.2
Tahapan Transformasi Sosial

5.2.1.1 Kesehatan untuk Semua

Pembangunan kesehatan bertujuan agar setiap penduduk dapat hidup sehat, mencakup semua penduduk, pada seluruh siklus hidup, di seluruh wilayah dan bagi seluruh kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Pelayanan kesehatan yang terjangkau dan terjangkau bagi setiap penduduk mutlak diperlukan oleh Kabupaten Bangka Selatan. Pembangunan Kesehatan yang dilakukan perlu untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun organisasi non pemerintah, pelaku usaha maupun masyarakat dengan memperhatikan dinamika sosial, budaya, politik, ekonomi, pendidikan, perdagangan, industri, pangan dan lingkungan.

Kebijakan pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan upaya kesehatan dan memperkuat sistem Kesehatan. Kebijakan untuk meningkatkan upaya kesehatan ditekankan pada:

- 1) Peningkatan upaya kesehatan masyarakat, perluasan upaya *promotif* dan *preventif*, peningkatan literasi kesehatan dan pembudayaan perilaku hidup sehat dan penyehatan lingkungan;
- 2) Pengendalian produksi, konsumsi dan peredaran produk yang memberikan dampak negatif terhadap masyarakat;
- 3) Penanggulangan permasalahan gizi makro dan gizi mikro, percepatan penuntasan permasalahan *stunting* dan kelebihan gizi;
- 4) Penguatan pelayanan kesehatan ibu, anak dan lanjut usia, kesehatan mental, kesehatan kerja, kesehatan tradisional, pengendalian penyakit tidak menular dan eliminasi penyakit menular terutama *tuberculosis* serta penuntasan penyakit tropis seperti malaria dan demam berdarah



- dengue;
- 5) Pengembangan kebijakan keluarga berencana secara komprehensif;
 - 6) Perluasan investasi pelayanan kesehatan primer yang komprehensif sampai tingkat dasar termasuk kelembagaan kader kesehatan yang didukung komitmen politik, kepemimpinan, pembiayaan dan tata kelola serta kolaborasi *intersektoral*, pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat termasuk swasta;
 - 7) Pemerataan pelayanan dan sarana prasarana kesehatan mencakup promotif, *preventif*, *kuratif*, *rehabilitatif* dan *paliatif* dengan inovasi pelayanan Kesehatan utamanya di wilayah kepulauan;
 - 8) Pemenuhan kualitas pelayanan kesehatan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dengan peningkatan pusat layanan kesehatan yang memadai dan peningkatan fasilitas yang ada menuju Rumah Sakit Umum Daerah Pratama di Kecamatan Tukak Sadai, Kecamatan Simpang Rimba dan Kecamatan Air Gegas; dan
 - 9) Pemenuhan dan perluasan cakupan jaminan kesehatan yang berkelanjutan

Kebijakan untuk meningkatkan upaya kesehatan tersebut ditekankan pada pencapaian beberapa indikator berikut : (1) Usia Harapan Hidup (UHH) yang ditargetkan mencapai usia 78.52 tahun; (2) Angka Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran hidup) yang ditargetkan 0-5 kasus; (3) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita yang ditargetkan 0-4%; (4) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus *tuberculosis (treatment coverage)* dengan target 90 %; (5) Penanganan Jenis Penyakit yang prioritas daerah dengan target 90 %; dan (6) Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional dengan target 98 %.

5.2.1.2 Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pendidikan berperan sentral dalam peningkatan kualitas hidup manusia serta mewujudkan kehidupan masyarakat dan bangsa yang bermartabat. Taraf pendidikan penduduk yang meningkat mampu menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing. Untuk mencapai sasaran pembangunan 2045, kebijakan pendidikan diarahkan pada pendidikan yang inklusif dan adaptif serta peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan dengan tuntutan global berbasis prinsip pendidikan sepanjang hayat (*long life learning*) yang mencakup:

1. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran;
2. Penguatan pembelajaran berbasis digital;
3. Pemerataan akses pendidikan dengan percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan menengah);
4. Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi melalui pendirian sekolah tinggi/universitas/politeknik yang berbasis keunggulan daerah;
5. Penguatan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
6. Revitalisasi pendidikan nonformal (pendidikan masyarakat) serta penguatan pendidikan



- sepanjang hayat, pendidikan berbasis komunitas, dan *life skills*;
7. Penguatan sistem penjaminan mutu dan tata kelola pendidikan;
 8. Peningkatan produktivitas, daya saing dan kemampuan kerja; dan
 9. Peningkatan kualitas dan efisiensi pembiayaan pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran.

Untuk menjaga kesinambungan, keberlanjutan, serta ketercapaian kebijakan menuju transformasi sosial yang holistik dalam bidang pendidikan diperlukan indikator utama sebagai berikut; (i) Skor literasi membaca dan numerasi (SD sederajat dan SMP sederajat) (ii) rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun; (iii) harapan lama sekolah; (iv) proporsi penduduk berusia 15 tahun yang berkualifikasi pendidikan tinggi; dan (v) persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi.

5.2.1.3 Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial yang adaptif ditujukan untuk percepatan pengentasan kemiskinan memperluas perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk sesuai kerentanan yang dijalankan dengan prinsip berkeadilan dan inklusif. Untuk menjaga kesinambungan, keberlanjutan, serta ketercapaian kebijakan menuju transformasi sosial yang holistik diperlukan indikator utama; (i) tingkat kemiskinan; Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan (iii) persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal.

Kebijakan ini dilaksanakan melalui: (i) pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi dalam mewujudkan integrasi program perlindungan sosial dan pembangunan SDM secara menyeluruh; (ii) penguatan sistem jaminan sosial yang efektif dan mencapai cakupan universal; (iii) pengembangan bantuan sosial yang lebih adaptif terhadap bencana dan perubahan iklim; (iv) integrasi penentuan target, manfaat dan pelaksanaan bantuan sosial, jaminan sosial dan pemberdayaan masyarakat; (v) peningkatan lingkungan yang inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas perempuan dan penduduk rentan lainnya; (vi) peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayati (vii) peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja (viii) inovasi pembiayaan untuk memperkuat dan memperluas cakupan integrasi perlindungan sosial yang berkesinambungan utamanya pengembangan *social impact bonds*, *social impact investment* dan optimalisasi dana jaminan sosial; serta (ix) penguatan tata kelola dan kelembagaan data untuk penentuan target penerima manfaat.

Untuk menjaga kesinambungan, keberlanjutan, serta ketercapaian kebijakan menuju transformasi sosial yang holistik diperlukan indikator utama pengukur keberhasilan sebagaimana dalam Tabel 5.2.

Tabel 5.2
Indikator Capaian Transformasi Sosial RPJPD Kabupaten Bangka Selatan 2025-2045

Arah (Tujuan) Pembangunan	Indikator	Baseline 2025	Sasaran 2045
Kesehatan untuk Semua	1. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	71,51	78,52
	2. Kesehatan Ibu dan Anak:		
	a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) *Absolut	8	5
	b. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	18	4
	3. Penanganan Tuberkulosis:		
	a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)*	90	90
	b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)*	90	90
	4. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	96	98
Pendidikan Berkualitas yang Merata	5. Hasil pembelajaran		
	a. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*:		
	i) Literasi Membaca		
	- Literasi Membaca SD/Sederajat	75,30	85,50
	- Literasi Membaca SMP/Sederajat	68,84	80,64
	ii) Numerasi		
	- Numerasi SD/Sederajat	64,32	75,12
	- Numerasi SMP/Sederajat	61,39	74,99
	b. Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	6,95	7,57-8,19
	c. Harapan Lama Sekolah (tahun)	11,91-11,93	12,33-12,35
6. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)*	3,36	4,97	
7. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang	8,55	27,83	



Arah (Tujuan) Pembangunan	Indikator	Baseline 2025	Sasaran 2045
	Keahlian Menengah Tinggi (%)		
Perlindungan sosial yang adaptif	8. Tingkat Kemiskinan (%)	2,89	0,02-0,22
	9. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	37,2	91,16
	10. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	7	30

Sumber: Hasil Analisis, 2024

5.2.2 Transformasi Ekonomi

Pembangunan ekonomi selama dua puluh tahun ke depan akan menghadapi perubahan besar yang menuntut dilakukannya transformasi ekonomi. Transformasi ekonomi juga akan menjadi kunci agar kita dapat keluar dari jebakan *middle income trap*. Pelaksanaan transformasi ekonomi akan membuat daerah dan masyarakat beradaptasi dengan perubahan tersebut dan perekonomian menjadi lebih efisien dan produktif, sehingga memperkuat sektor-sektor ekonomi yang potensial untuk tumbuh dan berkembang.

Transformasi ekonomi secara bertahap akan mengubah struktur ekonomi dari yang berbasis pada komoditas bernilai tambah rendah menjadi berbasis pada industri yang bernilai tambah tinggi didukung oleh teknologi dan inovasi sehingga lebih produktif, efisien dan berdaya saing tinggi. Untuk mencapai pertumbuhan tinggi yang inklusif dan berkelanjutan, transformasi ekonomi difokuskan pada peningkatan produktivitas dan inovasi di sektor-sektor produktif prioritas. Perekonomian akan beralih dari berbasis keunggulan komparatif menuju keunggulan kompetitif, dari kegiatan ekonomi ekstraksi menuju kepada kegiatan ekonomi bernilai tambah, serta mengubah ekonomi berbasis buruh murah dan keterampilan rendah menjadi mengandalkan pengetahuan, inovasi dan keterampilan tinggi.

Untuk memastikan keberlangsungan pertumbuhan ekonomi yang tinggi lintas generasi, diterapkan konsep ekonomi hijau. Sementara itu, transformasi digital harus dipercepat di seluruh wilayah secara merata dan diurus utamakan dalam berbagai sektor ekonomi yang disertai dengan penguatan talenta digital. Pertumbuhan ekonomi harus terintegrasi secara domestik dan terhubung secara internasional. Hal tersebut dicapai melalui penyebaran pembangunan ekonomi dengan pembangunan pusat pertumbuhan baru di berbagai wilayah yang didukung oleh peningkatan kualitas SDM serta pengembangan infrastruktur berkualitas, terintegrasi dan memiliki dukungan konektivitas yang baik. Dalam sasaran pokok dimensi transformasi ekonomi terdapat dua belas arah pembangunan sebagaimana berikut:



Gambar 5.3
Tahapan Transformasi Ekonomi

5.2.2.1 Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

Iptek dan inovasi menjadi pendorong untuk tidak hanya menjaga, melainkan juga mempercepat keberlanjutan produktivitas sektor-sektor ekonomi dan memperkuat struktur ekonomi dalam jangka Panjang. Industri pengolahan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing global. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, arah kebijakan pengembangan industri pengolahan mencakup: (i) hilirisasi industri prioritas hingga produk akhir yang berbasis sumber daya alam tambang, *critical mineral*, serta sumber daya alam agro dan maritim berdasarkan komoditas unggulan wilayah; (ii) penguatan industri dasar prioritas; (iii) pengembangan industri berbasis teknologi menengah dan tinggi prioritas yang dapat mendorong penguasaan teknologi dan peningkatan produktivitas; (iv) pengembangan industri barang konsumsi berkelanjutan prioritas; (v) pengembangan industri berbasis inovasi dan riset terutama mendorong ekonomi biru dan bioekonomi sebagai sumber baru pertumbuhan ekonomi; dan (vi) peningkatan investasi dan ekspansi industri prioritas yang padat karya terampil serta berorientasi ekspor.

Peningkatan produktivitas sektor pertanian dan kesejahteraan petani/nelayan menjadi salah satu kunci transformasi ekonomi di Bangka Selatan yang potensi di kedua sektor ini cukup besar. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, kebijakan jangka panjang untuk peningkatan produktivitas sektor pertanian diarahkan melalui; (i) modernisasi dan digitalisasi pertanian, kehutanan dan perikanan, terutama modernisasi perbenihan/perbibitan varietas baru bernilai tambah tinggi dan adaptif, sistem perbenihan berbasis masyarakat pengelolaan kemurnian benih/bibit; (ii) peremajaan perkebunan rakyat secara intensif, progresif dan berkelanjutan; (iii)



pengembangan Kawasan sentra produksi pangan (*food cluster*) sebagai salah satu sumber ekonomi baru dari daerah; (iv) adopsi pertanian presisi, digitasi pertanian, dan teknologi pertanian regeneratif; (v) penerapan standar dan ketelusuran terhadap proses dan produk pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan; serta (vi) efisiensi dan integrasi antara infrastruktur on-farm dengan distribusi komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan.

Peningkatan kesejahteraan petani/nelayan dilaksanakan melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Kebijakan jangka panjang kesejahteraan petani/nelayan diarahkan melalui: (i) perluasan kelembagaan ekonomi petani/nelayan yang berbadan hukum dan sinergis dengan Lembaga pembiayaan dan badan usaha lainnya; (ii) regenerasi petani/nelayan dan penguatan vokasi pertanian; serta (iii) perluasan akses dan literasi keuangan inklusif dan produktif bagi petani/nelayan.

Untuk mengoptimalkan potensi sektor sumber daya pesisir dan laut di Bangka Selatan, Pembangunan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan secara berkelanjutan di Kabupaten Bangka Selatan yang memiliki sumber daya dan potensi yang cukup tinggi. Beberapa arah kebijakan antara lain, (i) penguatan ekosistem pendukung termasuk sinkronisasi kebijakan hulu dan hilir, tata Kelola dan kelembagaan, regulasi pengelolaan sumber daya kelautan serta pembiayaan biru yang berkelanjutan sebagai instrumen pendanaan inovatif; (ii) peningkatan nilai tambah pada sektor-sektor existing/tradisional (perikanan, industri, perdagangan, pariwisata) dan mendorong pengembangan pada sektor-sektor baru (energi terbarukan, bioteknologi dan bioekonomi, penelitian dan Pendidikan, manajemen lingkungan SDA); (iii) penguatan riset, inovasi dan SDM terampil untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi ekonomi biru; (iv) peningkatan Kesehatan, ketahanan, dan produktivitas sumber daya kemaritiman termasuk dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; (v) peningkatan dan pemerataan penghidupan dan kesejahteraan masyarakat dalam ekonomi biru; (vi) optimalisasi pemanfaatan alur laut (ALKI) sebagai jalur logistik, transportasi dan perdagangan; dan (vii) optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.

Bangka Selatan juga perlu untuk melakukan pengembangan pariwisata sebagai destinasi unggulan yang berkelanjutan dan bernilai tambah yang tinggi yang didukung dengan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut; (i) integrasi konektivitas; (ii) Peningkatan inovasi dan skala pemanfaatan sumber daya alam, budaya, kreativitas dan prestasi olahraga dalam diversifikasi daya tarik pariwisata yang disesuaikan dengan preferensi wisatawan; (iii) penguatan integrasi dan daya saing *trade, tourism and investment*; (iv) peningkatan SDM dan UMKM pariwisata berdaya saing global; (v) penguatan rantai pasok industri pariwisata yang adaptif, inklusif dan berkelanjutan dengan dukungan penerapan *blue, green and circular economy*, digitalisasi dan



kemajuan teknologi; serta (vi) penguatan promosi pariwisata yang terintegrasi dengan promosi ekonomi dan investasi.

Ekonomi kreatif sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru menjadi barometer ekonomi kreatif global dengan mengangkat nilai-nilai unggul budaya, seni dan kearifan masyarakat, serta kreativitas talenta Bangka Selatan ke tingkat nasional dan global. Sasaran pengembangan sektor ini akan diwujudkan melalui: (i) penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual yang didukung talenta, infrastruktur dan pembiayaan; (ii) peningkatan produk bernilai tambah tinggi berbasis seni dan budaya; (iii) peningkatan daya saing industri konten; (iv) penumbuhan startup kreatif dan digital; dan (iv) pengembangan hub ekonomi kreatif serta kluster ekonomi kreatif dan digital.

UMKM dan koperasi di Bangka Selatan diharapkan menjadi penopang ekonomi produktivitas tinggi, berdaya saing global, inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan pengembangan UMKM dan koperasi diarahkan melalui: (i) perluasan jaringan pasar domestik dan global serta penguatan kontribusi rantai nilai industri termasuk melalui kemitraan dan pengawasannya; (ii) akselerasi digitalisasi dan penggunaan teknologi pada pelaku UMKM; (iii) peningkatan kapasitas tenaga kerja dan penciptaan wirausaha berorientasi pertumbuhan yang inklusif; (iv) penguatan resiliensi dan kemampuan adaptasi usaha; (v) perluasan akses dan pengembangan inovasi dalam pembiayaan usaha, seperti penggunaan teknologi digital, pengembangan produk pembiayaan inovatif, serta alternatif penilaian dan penjaminan kredit; (vi) formalisasi usaha untuk meningkatkan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja layak melalui pemberian insentif dan perluasan akses pasar; (vii) digitalisasi layanan pengembangan usaha dan proses formalisasi usaha; (viii) penguatan model bisnis, regulasi dan kelembagaan koperasi; (ix) regenerasi dan penguatan sumber daya manusia koperasi; (x) pengembangan dan penguatan yang diprioritaskan pada UMKM dan koperasi produksi untuk dapat menciptakan nilai tambah dan meningkatkan produktivitas.

Tenaga kerja perlu dibentuk menjadi tenaga kerja berkeahlian yang tangguh, adaptif, inovatif, kompeten dan mampu menguasai pasar kerja lokal dan global. Kebijakan penguatan SDM secara inklusif dan ditempuh dari sisi permintaan dan penawaran, disertai oleh fasilitasi mobilitas pekerja. Dari sisi permintaan, dilakukan dengan penciptaan lapangan kerja di sektor-sektor produktif termasuk lapangan kerja hijau, biru dan digital. Dari sisi penawaran, keahlian Angkatan kerja utamanya disiapkan dengan pemantapan penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan dan *dual-system*, penguatan iklim ketenagakerjaan yang mendukung pasar kerja fleksibel, *responsive gender* dan inklusif. Selain itu diperlukan penyediaan informasi pasar kerja yang mutakhir, kredibel, mudah akses dan penguatan keterampilan digital untuk penguasaan seluruh keahlian.



5.2.2.2 Penerapan Ekonomi Hijau

Penerapan ekonomi hijau dalam transformasi ekonomi ditujukan agar pertumbuhan ekonomi yang tinggi sejalan dengan meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan agar berkelanjutan. Penerapan ekonomi hijau juga dapat menjadi sumber pertumbuhan baru melalui peningkatan peluang kerja, investasi hijau dan pengembangan produk-produk hijau. Arah kebijakan penerapan ekonomi hijau berlandaskan pada pembangunan rendah karbon yang meliputi: (i) peningkatan efisiensi energi dan percepatan transisi energi menuju pemanfaatan energi baru terbarukan; (ii) transisi energi secara berkeadilan dengan menyiapkan keahlian dan kesempatan kerja baru; (iii) pengembangan transportasi ramah lingkungan; (iv) penerapan ekonomi sirkular; (v) pengelolaan hutan lestari dan lahan pertanian serta produk-produk turunannya secara berkelanjutan; serta (vi) penerapan prinsip ekonomi hijau di setiap sektor.

5.2.2.3 Transformasi Digital

Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok; (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).

5.2.2.4 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Integrasi ekonomi domestik dan global akan mendorong peningkatan produktivitas dalam negeri, kebijakan terkait hal ini difokuskan pada: (i) penguatan integrasi konektivitas dengan intra dan antar Kawasan pertumbuhan ekonomi; (ii) penciptaan pusat-pusat pertumbuhan baru yang efisien dan penguatan daya saing pusat pertumbuhan di Bangka Selatan yaitu Kawasan Industri Sadai (KI Sadai) dan Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional (KTPN) Batu Betumpang; (iii) penguatan kuantitas dan kualitas infrastruktur konektivitas yang mendorong penguatan keterkaitan nilai tambah antar wilayah secara lebih terintegrasi; dan (iv) peningkatan keterkaitan ekonomi antar pusat-pusat pertumbuhan serta mendorong partisipasi daerah dalam rantai pasok global.

5.2.2.5 Perkotaan dan Perdesaaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Untuk mewujudkan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi diperlukan kebijakan sebagai berikut : (i) penguatan konektivitas intra dan antar pusat pertumbuhan yang

dibangun dengan meningkatkan keterkaitan infrastruktur transportasi dan konektivitas digital; (ii) menerapkan pembangunan kota yang inklusif dan berkelanjutan yang layak huni, berbudaya, hijau dan berketahanan serta maju dan menyejahterakan; serta (iii) pengembangan kelembagaan dan regulasi perkotaan yang kolaboratif dan inovatif antar pemangku kepentingan.

Untuk menjaga kesinambungan, keberlanjutan, serta ketercapaian kebijakan menuju peningkatan produktivitas ekonomi diperlukan indikator utama keberhasilan sebagaimana dalam Tabel 5.2.

Tabel 5.3
Indikator Capaian Transformasi Ekonomi RPJPD Kabupaten Bangka Selatan 2025-2045

Arah (Tujuan) Pembangunan	Indikator	Baseline 2025	Sasaran 2045
Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	11. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	8,86	12,54
	12. Pengembangan Pariwisata		
	a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,88	5,03
	b. Jumlah kunjungan tamu di hotel bintang dan non bintang (Ribu/Orang)	2,25	14,75
	13. Peningkatan Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki sertifikat HAKI (Orang) (Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif)	69	269
	14. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD		
	a. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten (%)	73,43	81,39
	b. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten (%)	99,75	99,88
	c. Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	6,61	11,70
	d. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,30	2,20
	e. <i>Return on Aset (ROA) BUMD (%)</i> *	0,00	1,10
	15. a. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,35	2,87
	b. Porsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	48	90



Arah (Tujuan) Pembangunan	Indikator	Baseline 2025	Sasaran 2045
	16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	46,97	60,42
	17. Indeks Kapabilitas Inovasi	1,72	5
Penerapan Ekonomi Hijau	18. Indeks Ekonomi Hijau Daerah (<i>Green Economy Index</i>)	59,48	85,34
Transformasi Digital	19. Persentase penduduk yang mengakses internet	81,47	100
Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	20. Koefisien Variasi Harga Antar wilayah Tingkat Kabupaten (menggunakan IPH)	6,8	5,35
	21. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	27,31	30,96
	22. Net Ekspor (%)	2,50	23,06
Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	23. Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan		
	a. Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Kabupaten terhadap total PDRB Kabupaten di Provinsi (%)	11,87	15,6
	b. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	16,02	100
	c. Persentase Desa Mandiri (%)	24	100

Sumber: Hasil Analisis, 2024

5.2.3 Transformasi Tata Kelola

Henk Addink (2017) menjelaskan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, terhubung dengan tiga pilar yang menjadi kunci dari pembentukan sebuah negara modern, yakni *rule of law*, *democracy*, dan *good governance*. Dimana ketiga pilar tersebut menjadi landasan dalam mewujudkan transformasi tata kelola yang efektif dan akuntabel sehingga dapat menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Transformasi tata kelola bertujuan untuk menciptakan lingkungan kelembagaan yang memungkinkan tercapainya regulasi dan tata Kelola yang berintegritas dan adaptif. Adapun sasaran pokok pembangunan dimensi transformasi tata Kelola adalah Terwujudnya Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif.



Gambar 5.4
Tahapan Transformasi Tata Kelola

5.2.3.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Dalam mewujudkan regulasi yang adaptif dan taat asas di Kabupaten Bangka Selatan, arah kebijakan difokuskan pada (i) penyederhanaan regulasi dan peningkatan kualitas regulasi; (ii) peningkatan kualitas kelembagaan regulasi dan tata kelola pembentukan regulasi berbasis teknologi informasi; (iii) peningkatan aksesibilitas dan inklusivitas pelayanan publik terpadu melalui pengembangan portal dan/atau *platform* pelayanan publik daerah; (iv) transformasi layanan pemerintahan berbasis digital; (v) pengarusutamaan nilai transparansi pemerintah di seluruh sektor pembangunan; (vi) Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital; (vii) pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, *reward*, dan *punishment*, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja; (viii) penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat; serta (ix) Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah Kabupaten Bangka Selatan, menuju penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Bangka Selatan yang profesional dan bebas korupsi.

Adapun indikator utama dalam mengukur keberhasilan sasaran dan ketercapaian kebijakan menuju tata Kelola yang berintegritas dan adaptif sebagaimana pada Tabel 5.3.

Tabel 5.4
Indikator Capaian Transformasi Tata Kelola RPJPD Kabupaten Bangka Selatan 2025-2045

Arah (Tujuan) Pembangunan	Indikator	Baseline 2025	Sasaran 2045
Regulasi dan Tata Kelola yang berintegritas dan adaptif	24. Indeks Reformasi Hukum	50	70-80
	25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,79	5
	26. Indeks Pelayanan Publik	4,04	4,51-5
	27. Indeks Integritas Nasional	72	78-100

Sumber: Hasil Analisis, 2024

5.2.4 Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan

Untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045 dan terwujudnya Bangka Selatan sebagai Gerbang Ekonomi Bangka Belitung yang Maju dan Berkelanjutan 2045, arah kebijakan supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan meliputi: (i) hukum berkeadilan, keamanan nasional tangguh dan demokrasi substansial, dan (ii) stabilitas ekonomi makro.

5.2.4.1 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh dan Demokrasi Substansial

Sistem tata kelola hukum merupakan suatu hal yang *urgent* untuk diperhatikan dalam mewujudkan hukum berkeadilan. Hal tersebut didukung dengan komitmen pengelolaan hukum sesuai dengan yang telah diatur oleh undang-undang. Dalam mendukung tercapainya kebijakan nasional dalam aspek pengelolaan dan pelaksanaan hukum berkeadilan, pemerintah Kabupaten Bangka Selatan merumuskan beberapa arah kebijakan yang antara lain: (i) penguatan pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya melalui transformasi birokrasi; (ii) mendukung optimalisasi penerapan dan penegakan hukum yang modern, efisien dan terpadu; (iii) berperan serta dalam meningkatkan stabilitas nasional dan kesadaran hukum masyarakat.

Keamanan nasional sebagaimana dalam RPJPN 2025-2045 diarahkan menuju keselamatan bangsa, kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Nusantara Indonesia yang aman, damai, serta aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Untuk mencapai sasaran tersebut, diperlukan beberapa arah kebijakan diantaranya: (i) transformasi kelembagaan keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi yang terintegrasi berdasarkan payung hukum tunggal disertai pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaannya; (ii) transformasi tata Kelola kelembagaan serta penguatan kapasitas dan kapabilitas Lembaga penegak hukum; (iii) transformasi keamanan dalam negeri dengan pendekatan yang berbasis modal sosial dan kearifan lokal serta berperan serta dalam menghadapi kompleksitas ancaman seperti perubahan iklim dan bencana; (iv) reformasi sistem keamanan dan ketertiban masyarakat



yang adaptif, kolaboratif dan sinergi antara Lembaga keamanan dan penegak hukum, masyarakat yang partisipatif dan industri jasa keamanan nasional; (v) transformasi tata kelola dan strategi pencegahan, rehabilitasi dan pemberantasan narkoba dengan keseimbangan pendekatan berbasis psiko-sosiologis.

Pembangunan demokrasi diarahkan pada terwujudnya demokrasi substansial yang mengemban amanat rakyat (RPJPN 2025-2045). Arah kebijakan yang dapat dilaksanakan pemerintah daerah antara lain: (i) peningkatan kualitas kesetaraan dan kebebasan dalam masyarakat; (ii) pengarusutamaan internalisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; (iii) penguatan inklusivitas dan pencegahan pemanfaatan politik identitas; (iv) penguatan komunikasi publik yang merata, adil, berdaulat dan akuntabel untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat; serta (v) peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

5.2.4.2 Stabilitas Ekonomi Makro

Stabilitas ekonomi makro diarahkan untuk mewujudkan kesinambungan fiskal serta stabilitas sektor keuangan dalam mendukung kebijakan pro-stabilitas, pro-pertumbuhan dan pro-pemerataan. Untuk mewujudkan hal tersebut beberapa arah kebijakan yang dilaksanakan antara lain: (i) peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah; (ii) penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb); (iii) peningkatan kualitas belanja daerah; (iv) optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD); serta (v) peningkatan sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.

Selain arah kebijakan diatas, beberapa fokus pembangunan daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi makro yakni:

1. Meningkatkan prioritas pada sektor kontribusi terbesar dalam PDRB dengan program dan kegiatan pembangunan setelah urusan wajib pelayanan dasar diprioritaskan pada urusan pertanian, kehutanan dan perikanan sebagai jenis lapangan usaha dengan kontribusi tertinggi pada PDRB Kabupaten Bangka Selatan;
2. Menurunkan angka kemiskinan daerah;
3. Mewujudkan iklim investasi yang sehat;
4. Meningkatkan infrastruktur pendukung ekonomi lokal;
5. Menciptakan lapangan pekerjaan untuk menurunkan angka pengangguran;
6. Penguatan pengendalian inflasi daerah; serta
7. Pemberian subsidi.

Dalam rangka pencapaian supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan beberapa indikator pengukur sebagaimana terdapat dalam Tabel 5.4

Tabel 5.5
Indikator Capaian Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan RPJPD
Kabupaten Bangka Selatan 2025-2045

Arah (Tujuan) Pembangunan	Indikator	Baseline 2025	Sasaran 2045
Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	28. Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	73,86	100
	29. Persentase Angka Kriminalitas	8,67	7,37
	30. Indeks Demokrasi Indonesia	sedang	tinggi
Stabilitas Ekonomi Makro	31. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,5	1,5
	32. Tingkat Inflasi (%)	2,85	2,75
	33. Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan		
	a. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) *	3,64	3,71
	b. Total Kredit/PDRB (%)	3,61	6,15
	34. Inklusi Keuangan (%)		
	a. Persentase Penduduk yang memiliki rekening tabungan baik atas nama sendiri ataupun bersama (%) 5 tahun ke atas	22,23	43,57
	b. Persentase Penduduk yang memiliki rekening tabungan baik atas nama sendiri ataupun bersama (%) usia produktif (15-64 tahun)	29,48	50,82
Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	35. Indeks Daya Saing Daerah	3,18	4,5
	36. Persentase Potensi Konflik Terselesaikan (%)	84,75	100

Sumber: Hasil Analisis, 2024

5.2.5 Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Ketahanan sosial budaya dan ekologi adalah kemampuan penyintasan masyarakat dalam menghadapi keterbatasan lingkungan agar dapat pulih apabila terjadi gangguan. Dalam rencana pembangunan jangka panjang isu terkait keterbatasan lingkungan alam dan sosial di Kabupaten Bangka Selatan dapat dikelola dengan kemajuan teknologi, namun potensi gangguan tetap perlu diperhitungkan agar perikehidupan dan kesejahteraan masyarakat tetap terjamin. Oleh karena itu, landasan ketahanan sosial budaya dan ekologi menjadi landasan yang sangat penting dalam mewujudkan transformasi ekonomi, sosial dan tata kelola.

Sebagai landasan terwujudnya Indonesia Emas 2045 dan Bangka Selatan Gerbang Ekonomi Bangka Belitung yang Maju dan Berkelanjutan 2045, ketahanan sosial budaya dan

ekologi dapat tercapai melalui kebijakan yang diarahkan pada terwujudnya: (i) beragama maslahat dan berkebudayaan maju; (ii) keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif; (iii) lingkungan hidup berkualitas; (iv) berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan; serta (v) resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim.



Gambar 5.5
Tahapan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

5.2.5.1 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Penguatan peran agama sebagai landasan spiritual, etika, moral dan modal dasar pembangunan harus menjadi perhatian penting dalam mewujudkan visi dan misi perencanaan pembangunan jangka panjang nasional maupun daerah. Agama harus dijadikan sebagai landasan spiritual dan moral untuk membangun masyarakat dan bangsa yang berkeadaban. Disamping itu juga menjadi sumber inspirasi dalam membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat yang majemuk dan dalam kerangka transformasi Indonesia 2045, agama dapat menjadi motor penggerak transformasi ekonomi, sosial, dan tata kelola.

Dalam mewujudkan nilai-nilai beragama maslahat, dapat dilakukan melalui: (i) peningkatan internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat; (ii) pembangunan kehidupan beragama yang inklusif, rukun, dan toleran yang berorientasi penguatan moderasi beragama; (iii) pengembangan dana sosial keagamaan dan filantropi, pemberdayaan umat beragama, dan peningkatan produktivitas; (iv) peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama secara merata, dan (v) jaminan pemenuhan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter, memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat serta memantapkan peran daerah dalam



peradaban bangsa dan negara, melalui: (i) penguatan dan pemantapan ideologi Pancasila sebagai karakter dan identitas bangsa; (ii) perlindungan dan pengembangan praktik kebudayaan daerah; (iii) peningkatan budaya literasi, kreativitas, dan inovasi; (iv) pemberdayaan masyarakat hukum adat termasuk yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; (v) pengembangan dan pemanfaatan kearifan lokal untuk mendorong kesejahteraan masyarakat.

5.2.5.2 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Peningkatan ketangguhan individu, keluarga, dan masyarakat untuk memastikan terbentuknya sumber daya manusia berkualitas sebagai motor penggerak pembangunan dengan arah kebijakan: (i) peningkatan ketahanan keluarga; (ii) pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, perlindungan dari kekerasan; (iii) pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, kemandirian, kemampuan dalam mengambil keputusan, serta peningkatan partisipasi di bidang pembangunan; (iv) penyediaan lingkungan pendukung bagi individu sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya.

Penguatan pengarusutamaan gender (PUG) dan inklusi sosial dengan arah kebijakan: (i) penguatan tata kelola penyelenggaraan PUG dan inklusi sosial dalam proses pembangunan secara komprehensif; (ii) peningkatan kepemimpinan perempuan, pemberdayaan perempuan di ekonomi, dan penjaminan akses layanan dasar yang inklusif; dan (iii) penguatan lingkungan strategis untuk pelaksanaan PUG dan inklusi sosial yang efektif dan berkelanjutan.

5.2.5.3 Lingkungan Hidup Berkualitas

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas hidup, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan arah kebijakan: (i) pengendalian pencemaran serta kerusakan lingkungan untuk meningkatkan kualitas hidup; (ii) peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan melalui penguatan pembangunan infrastruktur untuk mencegah dan meminimalisir kerusakan alam dan pencemaran lingkungan; (iii) pengelolaan lahan secara berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat berkelanjutan (*sustainable society*); (iv) pengembangan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan sebagai modal dasar pembangunan.

5.2.5.4 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

Penyediaan energi nasional masih didominasi oleh energi fosil yang di subsidi, sementara energi terbarukan yang low carbon belum banyak dimanfaatkan. Sekitar 95% sumber energi Indonesia masih berasal dari minyak bumi, gas dan batu bara. Untuk itu, dalam rangka mendukung kebijakan nasional terkait diversifikasi dan konservasi energi untuk meningkatkan ketahanan pasokan energi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan beberapa arah kebijakan



ketahanan energi dalam perencanaan jangka panjang pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dapat diwujudkan melalui: (i) perluasan akses, kapasitas, dan jangkauan pelayanan infrastruktur energi terutama listrik; (ii) peningkatan riset, inovasi dan eksplorasi potensi dan cadangan baru energi.

Kebijakan pengelolaan sumber daya air dilakukan dalam upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air sesuai dengan Jaknas SDA. Untuk mewujudkan ketahanan air nasional maupun daerah terdiri dari kebijakan yang berkaitan dengan konservasi sumber daya air dan kebijakan dalam pemanfaatan sumber daya air. Arah kebijakan konservasi sumber daya air melalui: (i) peningkatan kualitas sungai (DAS) dengan rehabilitasi hutan dan lahan serta perlindungan Kawasan sempadan sungai dan kolong; (ii) pengelolaan lahan basah secara berkelanjutan (mangrove dan gambut); (iii) penguatan pengelolaan wilayah sungai secara terpadu. Sedangkan arah kebijakan dalam aspek pemanfaatan sumber daya air yakni:

1. Peningkatan akses terhadap air minum yang aman, merata, terjangkau, dan yang terlayani 100% (seratus persen);
2. Peningkatan mutu air sesuai Baku Mutu Air yang ditetapkan;
3. Peningkatan efisiensi penggunaan air di semua sektor;
4. Jaminan keberlanjutan pasokan air;
5. Penerapan prinsip Pengelolaan Sumber Daya Air terpadu;
6. Modernisasi sistem irigasi untuk mendorong efisiensi penggunaan sumber daya air;
7. Perlindungan dan pemulihan ekosistem terkait sumber daya air; dan
8. Pengurangan risiko kerugian akibat bencana terkait air

Kebijakan pangan yang tangguh diperlukan untuk mengimbangi perilaku produksi yang rentan terhadap perubahan iklim. Pemerintah daerah harus melakukan intervensi dengan menerapkan kebijakan ketahanan pangan yang sesuai dengan karakteristik daerah dengan memperhatikan kondisi komoditi pangan, lahan produksi petani yang terbatas, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pertanian, dan manajemen pengelolaan hasil pertanian. Untuk itu, arah kebijakannya adalah pengembangan penganekaragaman pangan dan pengembangan pangan fungsional secara tersistem dari hulu ke hilir secara dinamis dan berkelanjutan. Untuk mendukung hal ini berbagai regulasi terkait perlu disempurnakan dan dikembangkan. Investasi perlu diarahkan secara proporsional, baik di sektor ekonomi maupun sosial dengan mempertimbangkan daya ungkit kebijakan dan program lainnya seperti peningkatan kesempatan usaha dan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan, serta peningkatan penyediaan dan ekspor pangan. Pembangunan ketahanan dan kemandirian pangan membutuhkan pendekatan teknologi, ekonomi, sosial (termasuk budaya), dan lingkungan secara sinergis. Perlu penegakan hukum yang



tegas agar pembangunan berkelanjutan di bidang pangan, pertanian, dan industri bisa diupayakan. Perlu dikembangkan secara berkesinambungan teknologi benih dan budidaya tanaman, ikan, dan ternak yang hemat input dan tinggi output dengan minimal residu. Selain itu juga perlu teknologi peningkatan kualitas atau mutu produk mengikuti kaidah keamanan pangan dan selera konsumen. Di samping itu, dari sisi non teknologi, perlu dikembangkan rekayasa sosial, promosi, dan pembentukan persepsi masyarakat yang lebih baik terhadap pangan lokal.

5.2.5.5 Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Dalam mewujudkan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim, arah kebijakan yang dilakukan yakni melalui: (i) Peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi risiko bencana melalui mitigasi dan penanggulangan bencana; (ii) Pengembangan sistem peringatan dini kebencanaan; (iii) memperkuat fungsi konservasi hutan mangrove; (iv) penerapan teknologi sistem peringatan dini yang andal dan terintegrasi serta (v) pengoptimalan kapasitas masyarakat dan daerah terhadap bencana dan krisis iklim.

Sedangkan dalam Penerapan jalur pembangunan yang rendah karbon dilaksanakan melalui arah kebijakan yang mencakup: (i) peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan, penghambatan laju deforestasi, restorasi gambut dan mangrove; (ii) penerapan efisiensi energi secara luas dan peningkatan penggunaan EBT; (iii) pengelolaan limbah yang ramah lingkungan; (iv) pembangunan yang rendah karbon; (v) penerapan kebijakan yang mendorong perubahan perilaku aktivitas hidup yang rendah karbon dan berkelanjutan.

Dalam rangka pencapaian ketahanan sosial budaya dan ekologi yang terdiri dari lima arah (tujuan) pembangunan beberapa indikator yang disusun sesuai dengan penyesuaian terhadap RPJPN 2025-2045 yakni sebagai berikut:

Tabel 5.6
Indikator Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
RPJPD Kabupaten Bangka Selatan 2025-2045

Arah (Tujuan) Pembangunan	Indikator	Baseline 2025	Sasaran 2045
Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	37. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)		
	- Persentase benda, bangunan, struktur dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi (%)	18,84	76,81
	- Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi (%)	26,53	100
	38. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	80	90



Arah (Tujuan) Pembangunan	Indikator	Baseline 2025	Sasaran 2045
Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	39. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	64,65	70,06
	40. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,579	0,250
Lingkungan Hidup Berkualitas	41. Indeks Kualitas Tutupan Lahan	62,92	64,28
	42. Kualitas Lingkungan Hidup		
	a. Indeks kualitas lingkungan hidup	74,38	77,81
	b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	4,24	50
	c. Pengelolaan Sampah		
	- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	72,05	84
	- Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)*	38	100
Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	43. Ketahanan energi, air, dan pangan		
	a. Ketahanan Energi		
	- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	902,83	2.399,56
	b. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	12,16	3
	c. Ketahanan Air		
	- Kapasitas Air Baku (m ³ /detik)*	0,6	1,13
	- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Bersih Perpipaan (%)	32,04	100
Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	44. a. Indeks Resiko Bencana	177,31	156,71
	b. Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,36	0,66
	45. Kontribusi Persentase Penurunan Emisi GRK (%)		
	a. Kumulatif	22,53	30,56
	b. Tahunan	51,31	59,08

Sumber: Hasil Analisis, 2024



Tabel 5.7
Perumusan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025-2045

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
					Baseline 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1	Transformasi Sosial untuk Mewujudkan SDM yang Unggul serta Menjamin Keadilan dan Perlindungan Sosial	Kesehatan untuk Semua	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan ✓ Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung Kesehatan ✓ Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun) 2. Kesehatan Ibu dan Anak: <ol style="list-style-type: none"> a Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) b Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) 3. Penanganan Tuberkulosis: <ol style="list-style-type: none"> a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)* b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)* 4. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%) 	71,51	78,52	Terwujudnya Layanan Kesehatan untuk Semua
		Pendidikan yang Merata dan Inklusif	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) ✓ Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah ✓ Penyelenggaraan pendidikan yang 	<ol style="list-style-type: none"> 5. Hasil pembelajaran <ol style="list-style-type: none"> a Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*: <ol style="list-style-type: none"> i) Literasi Membaca <ul style="list-style-type: none"> - Literasi Membaca SD/Sederajat - Literasi Membaca SMP/Sederajat ii) Numerasi <ul style="list-style-type: none"> - Numerasi SD/Sederajat - Numerasi SMP/Sederajat 	75,30	85,50	
					68,84	80,64	
					64,32	75,12	
					61,39	74,99	



No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
					Baseline 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
			berkualitas dan berkeadilan. ✓ Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi. ✓ Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah. ✓ Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics). ✓ Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI)	b Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun) c Harapan Lama Sekolah (tahun) 6. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)* 7. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	6,95 11,91-11,93 3,36 8,55	7,57-8,19 12,33-12,35 4,97 27,83	



No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
					Baseline 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
		Perlindungan Sosial yang Adaptif	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan terutama pada Daerah Afirmasi 3TP. ✓ Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling. ✓ Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi. ✓ Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga. ✓ Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah ✓ Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami urban decay dalam suatu kawasan perkotaan. 	8. Tingkat Kemiskinan (%) 9. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%) 10. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	2,89 37,2 7	0,02-0,22 91,16 30	Terwujudnya Perlindungan Sosial yang Adaptif



No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
					Baseline 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
2	Transformasi Ekonomi yang Inklusif Berbasis Potensi Lokal & Berkelanjutan	IPTEK, Inovasi dan Peroduktivitas Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya). ✓ Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global. ✓ Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis. ✓ Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan 	11. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) 12. Pengembangan Pariwisata a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)* b. Jumlah kunjungan tamu di hotel bintang dan non bintang (Ribuan Orang)* 13. Peningkatan Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki Sertifikat HAKI (Orang) (Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif) 14. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD a. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten (%) b. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten (%) c. Rasio Kewirausahaan Daerah (%) d. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%) e. <i>Return on Aset</i> (ROA) BUMD (%)* 15. a. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) b. Porsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%) 16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) 17. Indeks Kapabilitas Inovasi	8,86 2,88 2,25 69 73,43 99,75 6,61 0,3 0,00 4,35 48 46,97 1,72	12,54 5,03 14,75 269 81,39 99,88 11,7 2,2 1,10 2,87 90 60,42 5	Meningkatnya Penguasaan IPTEK, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi



No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
					Baseline 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
			jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform. ✓ Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian. ✓ Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian. ✓ Pengembangan closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian ✓ Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak.				



No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
					Baseline 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
			<ul style="list-style-type: none"> ✓ Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkeretaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/stockyard yang modern terintegrasi). ✓ Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenities, ancillary services, aktivitas, available packages) pada Daerah Tujuan Wisata di Bangka Selatan. ✓ Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif. ✓ Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media 				



No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
					Baseline 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
			<p>dan dunia usaha/asosiasi usaha.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif. ✓ Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha. ✓ Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis. ✓ Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi. ✓ Peningkatan produktivitas BUMD. ✓ Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam 				



No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
					Baseline 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
			mendukung pembangunan ekonomi lokal. ✓ Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global.				
		Penerapan Ekonomi Hijau	✓ Penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon. ✓ Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah. ✓ Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif. ✓ Modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan. ✓ Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis,	18. Indeks Ekonomi Hijau Daerah (<i>Green Economy Index</i>)	59,48	85,34	Terwujudnya Penerapan Ekonomi Hijau



No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
					Baseline 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
			khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya. ✓ Penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon. ✓ Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi. Bahan baku hilirisasi disediakan oleh daerah khususnya bidang pertanian, perikanan, dan peternakan. ✓ Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya). ✓ Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.				



No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
					Baseline 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
			<ul style="list-style-type: none"> ✓ Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global. ✓ Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis. 				
		Transformasi Digital	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) ✓ Peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas ✓ Peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital 	19. Persentase penduduk yang mengakses internet (%)	81,47	100	Terwujudnya Transformasi Digital
		Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha. 	20. Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Kabupaten (IPH) 21. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) 22. Net Ekspor (%)	6,8 27,31 2,50	5,35 30,96 23,06	Meningkatnya Integrasi Ekonomi Domestik dan Global



No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
					Baseline 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
			<ul style="list-style-type: none"> ✓ Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional seperti IMT-GT maupun kerja sama internasional lainnya. ✓ Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkeretaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/stockyard yang modern terintegrasi). 				
		Perkotaan dan Pedesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkeretaapian, bandar udara, Kawasan pergudangan/stockyard yang modern terintegrasi). ✓ Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang 	23. Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan <ul style="list-style-type: none"> a. Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Kabupaten terhadap total PDRB Kabupaten di Provinsi (%) b. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%) c. Persentase Desa Mandiri (%) 	11,87 16,02 24	15,6 100 100	Terwujudnya Perkotaan dan Pedesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi



No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
					Baseline 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
			<p>andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama green/low-carbon electricity; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.</p> <p>✓ Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas</p>				



No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
					Baseline 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
			<p>wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb).</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan. ✓ Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green & grey infrastructure) pada kawasan perkotaan. ✓ Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan. ✓ Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan. ✓ Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan. ✓ City beautification dalam rangka membangun citra, 				



No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
					Baseline 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
			karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan. ✓ Pengembangan multi-infrastructure backbone & maritime backbone, yang menginterkoneksi antar kawasan strategis ✓ Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa. ✓ Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya.				
3	Transformasi Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik yang Berintegritas, Responsif, Adaptif & Inovatif	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	✓ Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat. ✓ Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah. ✓ Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital.	24. Indeks Reformasi Hukum 25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 26. Indeks Pelayanan Publik 27. Indeks Integritas Nasional (Anti Korupsi)	50 3,79 4,04 72	70-80 5 4,51-5 78-100	Terwujudnya Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif



No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
					Baseline 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
			<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja. ✓ Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah Kep. Bangka Belitung, menuju penyelenggaraan pemerintah daerah Kep. Bangka Belitung yang profesional dan bebas korupsi. 				
4	Stabilitas Kewilayahan	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas 	28. Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM 29. Persentase Angka Kriminalitas 30. Indeks Demokrasi Indonesia	73,86 8,67 sedang	100 7,37 tinggi	Terwujudnya Hukum Berkeadilan, Keamanan



No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
					Baseline 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
		Stabilitas Ekonomi Makro		31. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) 32. Tingkat Inflasi (%) 33. Pendalaman /Intermediasi Sektor Keuangan a. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) * b. Total Kredit/PDRB (%) 34. Inklusi Keuangan (%) a. Persentase Penduduk yang memiliki rekening tabungan baik atas nama sendiri ataupun bersama (%) 5 tahun ke atas b. Persentase Penduduk yang memiliki rekening tabungan baik atas nama sendiri ataupun bersama (%) usia produktif (15-64 tahun)	0,5	1,5	Meningkatnya Stabilitas Ekonomi Makro
		Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	✓ Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi kriminalitas tingkat	35. Indeks Daya Saing Daerah 36. Persentase Potensi Konflik Terselesaikan	3,18 84,75	4,5 100	Terwujudnya Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan
5	Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	✓ Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam kehidupan masyarakat, dengan beraskan kepada Pancasila ✓ Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan	37. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) - Persentase benda, bangunan, struktur dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi (%) - Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi (%)	18,84 26,53	76,81 100	Terwujudnya Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju



No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
					Baseline 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
				38. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	80	90	
		Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal. ✓ Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang. ✓ Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan. ✓ Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan. 	39. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga 40. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	64,65 0,579	70,06 0,25	Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif



No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
					Baseline 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
		Lingkungan Hidup Berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lansekap ekologis. ✓ Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami. 	41. Indeks Kualitas Tutupan Lahan 42. Kualitas Lingkungan Hidup <ul style="list-style-type: none"> a. Indeks kualitas lingkungan hidup b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%) c. Pengelolaan Sampah <ul style="list-style-type: none"> - Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) - Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)* 	62,92	64,28	Terwujudnya Lingkungan Hidup Berkualitas
		Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi. ✓ Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iii) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan 	43. Ketahanan energi, air, dan pangan <ul style="list-style-type: none"> a. Ketahanan Energi <ul style="list-style-type: none"> - Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)* b. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%) c. Ketahanan Air <ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas Air Baku (m³/detik)* - Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Bersih Perpipaan (%) 	902,83	2.399,56	
					12,16	3	
					0,6	1,13	
					32,04	100	



No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
					Baseline 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
			peralihan menjadi pembangkit terbarukan; pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi				



No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
					Baseline 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
			tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan ✓ Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan.				
		Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	✓ Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green & grey infrastructure) pada kawasan perkotaan. ✓ Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi Masyarakat akan potensi bahaya, serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi. ✓ Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air. ✓ Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel	44. a. Indeks Resiko Bencana b. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 45. Kontribusi Persentase Penurunan Emisi GRK (%) a. Kumulatif b. Tahunan	177,31 0,36 22,53 51,31	156,71 0,66 30,56 59,08	Meningkatnya Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim



No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
					Baseline 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
			dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada Kawasan perkotaan. ✓ Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan				

Sumber: Hasil Analisis, 2024



Tabel 5.8
Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Bangka Selatan 2025-2045

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target		Keterangan
				Baseline 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Layanan Kesehatan untuk Semua	Kesehatan untuk Semua	1. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun) 2. Kesehatan Ibu dan Anak: a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) b. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) 3. Penanganan Tuberkulosis: a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)* b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)* 4. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	71,51 8 18 90 90 96	78,52 5 4 90 90 98	
2	Terwujudnya Layanan Pendidikan yang Merata dan Inklusif	Pendidikan yang Merata dan Inklusif	5. Hasil pembelajaran a. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*: i) Literasi Membaca - Literasi Membaca SD/Sederajat - Literasi Membaca SMP/Sederajat ii) Numerasi - Numerasi SD/Sederajat - Numerasi SMP/Sederajat b. Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun) c. Harapan Lama Sekolah (tahun)	75,30 68,84 64,32 61,39 6,95 11,91-11,93	85,50 80,64 75,12 74,99 7,57-8,19 12,33-12,35	



No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target		Keterangan
				Baseline 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			6. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)* 7. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	3,36 8,55	4,97 27,83	
3	Terwujudnya Perlindungan Sosial yang Adaptif.	Perlindungan Sosial yang Adaptif	8. Tingkat Kemiskinan (%) 9. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%) 10. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	2,89 37,2 7	0,02-0,22 91,16 30	
4	Meningkatnya Penguasaan IPTEK, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi	4. IPTEK, Inovasi dan Peroduktivitas Ekonomi	11. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) 12. Pengembangan Pariwisata a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)* b. Jumlah kunjungan tamu di hotel bintang dan non bintang (Ribu Orang)* 13. Peningkatan Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki Sertifikat HAKI (Orang) (Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif) 14. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD a. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten (%) b. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten (%) c. Rasio Kewirausahaan Daerah (%) d. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%) e. Return on Aset (ROA) BUMD (%)* 15. a. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) b. Porsi Penciptaan Lapangan kerja Formal (%)	8,86 2,88 2,25 69 73,43 99,75 6,61 0,3 0,00 4,35 48	12,54 5,03 14,75 269 81,39 99,88 11,7 2,2 1,10 2,87 90	



No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target		Keterangan
				Baseline 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	46,97	60,42	
			17. Indeks Kapabilitas Inovasi	1,72	5	
5	Terwujudnya Penerapan Ekonomi Hijau	5. Penerapan Ekonomi Hijau	18. Indeks Ekonomi Hijau Daerah (<i>Green Economy Index</i>)	59,48	85,34	
6	Terwujudnya Transformasi Digital	6. Transformasi Digital	19. Persentase penduduk yang mengakses internet (%)	81,47	100	
7	Meningkatnya Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	20. Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Kabupaten (IPH)	6,8	5,35	
			21. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	27,31	30,96	
			22. Net Ekspor (%)	2,50	23,06	
8	Terwujudnya Perkotaan dan Pedesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	8. Perkotaan dan Pedesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	23. Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan			
			a. Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Kabupaten terhadap total PDRB Kabupaten di Provinsi (%)	11,87	15,6	
			b. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	16,02	100	
			c. Persentase Desa Mandiri (%)	24	100	
9	Terwujudnya Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	9. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	24. Indeks Reformasi Hukum	50	70-80	
			25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,79	5	
			26. Indeks Pelayanan Publik	4,04	4,51-5	
			27. Indeks Integritas Nasional (Anti Korupsi)	72	78-100	
10	Terwujudnya Hukum Berkeadilan,	10. Hukum Berkeadilan, Keamanan	28. Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	73,86	100	
			29. Persentase Angka Kriminalitas	8,67	7,37	



No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target		Keterangan
				Baseline 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	30. Indeks Demokrasi Indonesia	sedang	tinggi	
11	Meningkatnya Stabilitas Ekonomi Makro	11. Stabilitas Ekonomi Makro	31. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) 32. Tingkat Inflasi (%) 33. Pendalaman /Intermediasi Sektor Keuangan a. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) b. Total Kredit/PDRB (%) 34. Inklusi Keuangan (%) a. Persentase Penduduk yang memiliki rekening tabungan baik atas nama sendiri ataupun bersama (%) 5 tahun ke atas b. Persentase Penduduk yang memiliki rekening tabungan baik atas nama sendiri ataupun bersama (%) usia produktif (15-64 tahun)	0,5 2,85 3,64 3,61 22,23 29,48	1,5 2,75 3,71 6,15 43,57 50,82	
12	Terwujudnya Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan	12. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan	35. Indeks Daya Saing Daerah 36. Persentase Potensi Konflik terselesaikan	3,18 84,75	4,5 100	
13	Terwujudnya Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	37. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) - Persentase benda, bangunan, struktur dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi (%) - Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi (%)	18,84 26,53	76,81 100	



No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target		Keterangan
				Baseline 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			38. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	80	90	
14	Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	39. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga 40. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	64,65 0,579	70,06 0,25	
15	Terwujudnya Lingkungan Hidup Berkualitas	15. Lingkungan Hidup Berkualitas	41. Indeks Kualitas Tutupan Lahan 42. Kualitas Lingkungan Hidup a. Indeks kualitas lingkungan hidup b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%) c. Pengelolaan Sampah - Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) - Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)*	62,92 74,38 4,24 72,05 38	64,28 77,81 50 84 75	
16	Terwujudnya Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	43. Ketahanan energi, air, dan pangan a. Ketahanan Energi - Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)* b. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%) c. Ketahanan Air - Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	902,83 12,16 0,6	2.399,56 3 1,13	



No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target		Keterangan
				Baseline 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Bersih Perpipaan (%)	32,04	100	
17	Meningkatnya Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	17. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	44. a. Indeks Resiko Bencana b. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 45. Kontribusi Persentase Penurunan Emisi GRK (%) a. Kumulatif b. Tahunan	177,31 0,36 22,53 51,31	156,71 0,66 30,56 59,08	

Sumber: Hasil Analisis, 2024



BAB VI

PENUTUP

6.1 Pelaksanaan

Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025-2045 merupakan pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan selama 20 tahun kedepan. Dokumen ini disusun dengan merujuk pada RPJPN Tahun 2025-2045, dan RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2045, serta partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan. RPJPD juga merupakan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan (*stake holders*) untuk terlibat secara partisipatif, aktif, sinergis, terpadu, dan koordinatif sesuai tugas pokok, peran dan fungsi untuk mewujudkan pembangunan yang seimbang dan berkelanjutan serta tumbuh di semua bidang.

Bagi pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, dokumen ini merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah selama periode tersebut. Bagi masyarakat dan pemangku kepentingan, dokumen ini menjadi pedoman dan rujukan dalam menyatukan gerakan dalam rangka membangun Kabupaten Bangka Selatan.

Keberhasilan pencapaian pembangunan dapat dicapai apabila didukung dengan (a) Komitmen kepemimpinan daerah; (b) Konsistensi; (c) Kerja keras dan kesungguhan segenap aparat pemerintah; (d) Pelaksanaan Good Governance; (e) Keberpihakan kepada rakyat; (f) Partisipasi masyarakat dan dunia usaha serta; (g) Kedisiplinan, ketertiban masyarakat, dan kehidupan bermasyarakat.

Disusunnya RPJPD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025-2045 diharapkan agar arah kebijakan, sasaran pokok, dan target pembangunan jangka Panjang dapat diturunkan ke dalam RPJMD serta dioperasionalkan dalam RKPD. Untuk merealisasikan RPJPD Kabupaten Bangka Selatan 2025-2045 digunakan 5 (lima) prinsip Utama yaitu:

- a. Prinsip perencanaan kegiatan mengacu kepada prinsip perencanaan yang cerdas (*SMART Planning*), yaitu program terpilih harus diyakini argumentatif dan memiliki Kekhususan (*Specific*), Terukur (*Measurable*), Ketercapaian (*Achievable*), Ketersediaan sumber daya (*Resources Availability*), dan Waktu (*Time*);
- b. Prinsip administrasi perencanaan, yaitu menggunakan *Shewhart Cycle* yang dikenal dengan siklus PDCA dengan tahapan: Rencanakan (*Plan*), Kerjakan pada yang telah direncanakan (*Do*), Periksa atau monitor pelaksanaan (*Check*), dan Aksi tindak lanjut (*Action*).



- c. Prinsip pelaksanaan program menggunakan prinsip akuntabilitas (*accountability*) yang memiliki 3 (tiga) aspek, yaitu:
 - 1) Taat dan sesuai aturan (*Compliance with Regulation*)
 - 2) Sesuai dengan norma profesionalisme (*Adherence with Norm Professionalism*); dan
 - 3) Berorientasi pada hasil yang berkualitas (*Quality Result Driven*)
- d. Prinsip dukungan kebijakan keuangan mengikuti kebutuhan program prioritas (*Money Follow Program*);
- e. Prinsip pengendalian untuk sukses pelaksanaan perencanaan pembangunan dengan memerankan:
 - 1) *Desk* monitoring dan evaluasi implementasi program untuk pengendalian kualitas implementasi kegiatan dan ketaatan waktu serta output: dan
 - 2) *Desk* akuntabilitas untuk kepentingan pendampingan (*counseling partner*) dan pengendalian terhadap aturan dan disiplin anggaran (efisien, ekonomis, efektif dan ketaatan terhadap ketentuan).

Setiap perangkat daerah dapat merumuskan berbagai dokumen perencanaan sektoral yang dapat mengacu pada RPJPD ini. Dokumen RPJPD ini dapat menjadi acuan penyalarsan terhadap dokumen perencanaan spasial yang termuat dalam dokumen RTRW beserta turunannya.

Pada pelaksanaannya juga diperlukan monitoring yang harus dilakukan secara rutin dan berkala. Selain itu, evaluasi dan perubahan dapat dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun untuk mengetahui pencapaian target pembangunan dan melakukan penyesuaian dengan dinamika yang terjadi. Pelaksanaan semua kebijakan dalam RPJPD ini harus melibatkan semua stakeholder di Kabupaten Bangka Selatan.

6.2 Pembiayaan

RPJPD Kabupaten Bangka Selatan diharapkan dapat dilaksanakan dengan dukungan sumber pembiayaan yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu, sumber pembiayaan pembangunan yang dapat digunakan, antara lain: bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Bangka Selatan. Selain itu, dimungkinkan untuk pembiayaan pembangunan dilakukan dengan menggunakan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan seperti sumber pembiayaan alternatif (KPBU dan lain sebagainya).

Keberhasilan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025-2045 sangat tergantung pada komitmen penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan seluruh stakeholder lainnya guna mewujudkan Bangka Selatan Sebagai Gerbang Ekonomi Bangka Belitung yang Maju dan Berdaya Saing 2045.



6.3 Proses Pelaksanaan Manajemen Risiko

Dalam implementasi setiap visi, misi, tujuan dan sasaran pokok pada RPJPD Kabupaten Bangka Selatan ada beberapa hal yang dapat menghambat ketercapaian keberhasilan RPJPD. Keberlangsungan dan keberhasilan rencana pembangunan dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya adalah setiap elemen dapat membangun *framework* manajemen risiko, mengidentifikasi, mengantisipasi dan mengelola ketidakpastian yang akan terjadi di masa depan.

Manajemen risiko merupakan proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi. Tujuan dari manajemen risiko adalah mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah dan mengidentifikasi, menganalisa dan mengedalikan risiko serta memantau aktivitas pengendalian risiko di lingkungan pemerintah daerah.

Dalam melakukan manajemen risiko, bukan hanya identifikasi risiko dan penilaian risiko. Namun setelah dilakukan identifikasi dan penilaian risiko dilakukan mitigasi risiko yaitu langkah untuk melakukan pencegahan terhadap risiko yang telah diidentifikasi, hal ini dilakukan untuk mengurangi *impact* atau *probability* atau mungkin juga untuk mencegah agar risiko tidak terjadi. Dalam melakukan mitigasi risiko terdapat beberapa cara salah satunya adalah penentuan strategi penanganan yang terdiri dari 4 (empat), yaitu menerima risiko, transfer risiko, mengurangi risiko, dan menghindari risiko.

Manajemen risiko di Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan dilaksanakan sebelum penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045, yang penyusunannya mengikuti 5 (lima) unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan pengendalian intern.

Dengan penyusunan dan penetapan RPJPD, diharapkan visi "***Bangka Selatan Sebagai Gerbang Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Maju dan Berkelanjutan 2045***" dapat diwujudkan secara bersama-sama oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, masyarakat, dan pemangku kepentingan.

BUPATI BANGKA SELATAN

ttd

RIZA HERDAVID



Lampiran I

NO	Indikator	Keterangan	Proksi	Sumber Data	2025	2029	2034	2039	2045
SASARAN VISI									
1	Peningkatan Pendapatan per Kapita								
a	PDRB per kapita (Rp Juta)	Tersedia		BPS	55,55-58,59	67,7	79,09	90,48	104,14
b	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	Menggunakan Proksi	Persentase Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya terhadap PDRB	DPPP	18,22	18,44	18,71	18,98	19,30
c	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	Tersedia		BPS	8,86	9,60	10,52	11,44	12,54
2	Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan								
a	Tingkat Kemiskinan (%)	Tersedia		BPS	2,89	2,36	1,69	1,02	0,02-0,22
b	Rasio Gini	Tersedia		BPS	0,209-0,207	0,207-0,205	0,205-0,203	0,203-0,201	0,201-0,187
c	Kontribusi PDRB Kabupaten (%)	Tersedia	kontribusi PDRB Kabupaten/Kota terhadap total PDRB Kabkot di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	BPS	11,29-11,51	12,05-12,32	12,72-12,99	13,39-13,66	14,20-15,60
d	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Tersedia		BPS	3,87-5,00	4,17-5,30	4,41-5,54	4,75-5,88	5,07-6,20
3	Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat								
	Global Power Indeks (d disesuaikan/diganti)	Menggunakan Proksi	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	BRIN	3,18	3,30	3,68	4,05	4,50
4	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia								
	Indeks Modal Manusia	Menggunakan Proksi	Target dibawah Provinsi	BPS	0,50	0,53	0,57	0,61	0,65
		Tersedia	Angka Kematian Balita	DKPPKB	9,63	8,70	7,54	6,37	4,97
		Tersedia	Harapan Lama Sekolah	BPS	11,91-11,93	11,99-12,01	12,10-12,12	12,21-12,23	12,33-12,35
5	Penurunan Emisi GRK menuju Net Zero Emission								
a	Kontribusi Persentase Penurunan Emisi GRK (%)	Tersedia		DLH	22,53	24,57	26,38	28,33	30,56
b	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (%)	Tersedia		DLH	74,38	75,07	75,92	76,78	77,81



Lampiran II

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan		Sumber Data	Target					Keterangan		
						Baseline 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045			
SASARAN MISI													
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11		
1	I. Terwujudnya Kesehatan untuk Semua	I. Kesehatan untuk Semua	I	1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	BPS	71,51	72,91	74,66	76,42	78,52	peningkatan UHH linear dengan peningkatan SDM dan penurunan tingkat kemiskinan	
				2	Kesehatan Ibu dan Anak								
					a	Angka Kematian Ibu (Jiwa per 100.000 kelahiran hidup)	DKPPKB	8	7	6	5	5	menurun lebih cepat di tahap 3-4 dengan semakin mapannya fasilitas kesehatan
					b	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	DKPPKB	18,00	15,20	11,70	8,20	4,00	menurun lebih cepat setelah tahap 2 dengan semakin mapannya fasilitas kesehatan dan menguatnya ketahanan pangan. Penurunan stunting dimulai dari ibu hamil, dan membutuhkan time span 5 tahun untuk terasa
				3	Penanganan Tuberkulosis								
					a	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	DKPPKB	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	meningkat lebih cepat di tahap 3-4 dengan semakin mapannya infrastruktur kesehatan. Disamping sudah baiknya keberhasilan TBC di Toboali
					b	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	DKPPKB	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	meningkat lebih cepat di tahap 3-4 dengan semakin mapannya infrastruktur kesehatan. Disamping sudah baiknya keberhasilan TBC di Toboali



Lampiran II

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan				Sumber Data	Target					Keterangan			
								Baseline 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045				
			4	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)		DSPPPA	96,00	97,00	97,00	98,00	98,00	peningkatan target selaras dengan target daerah untuk meningkatkan kepesertaan JKN				
	II. Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata	II. Pendidikan Berkualitas yang Merata	II	5	Hasil pembelajaran	a	Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk	i	Literasi Membaca SD/Sederajat	Dindikbud	75,30	77,34	79,89	82,44	85,50	peningkatan selaras dengan target daerah seiring dengan peningkatan fasilitas pendidika, perkembangan program literasi intensif di setiap Kecamatan
ii								Numerasi SD/Sederajat	Dindikbud	64,32	66,48	69,18	71,88	75,12	Dalam jangka panjang, diharapkan terjadi peningkatan yang lebih substansial, dengan asumsi adanya perubahan signifikan dalam faktor-faktor sosial ekonomi dan peningkatan kesadaran akan pentingnya literasi numerasi.	
iii								Literasi Membaca SMP/Sederajat	Dindikbud	68,84	71,20	74,15	77,10	80,64	peningkatan selaras dengan target daerah seiring dengan peningkatan fasilitas pendidika, perkembangan program literasi intensif di setiap Kecamatan	
iv								Numerasi SMP/Sederajat	Dindikbud	61,39	64,11	67,51	70,91	74,99	Dalam jangka panjang, diharapkan terjadi peningkatan yang lebih substansial, dengan asumsi adanya perubahan signifikan dalam faktor-faktor sosial ekonomi dan peningkatan	



Lampiran II

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan			Sumber Data	Target					Keterangan	
							Baseline 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045		
												kesadaran akan pentingnya literasi numerasi.	
					b	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	BPS	6,95	7,07	7,23	7,38	7,57-8,19	akhir 2029 masih beberapa yang selesai SMK. Tapi tahap ke-2 harus banyak lulusan vokasi karena mendukung pemanfaatan industri pengolahan yang sudah mulai beroperasi di 2035
					c	Harapan Lama Sekolah (tahun)	BPS	11,91-11,93	11,99-12,01	12,10-12,12	12,21-12,23	12,33-12,35	diselaraskan dengan harapan lama sekolah
			6			Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	BPS	3,36	3,68	4,08	4,49	4,97	peningkatan pencapaian selaras dengan berkembangnya aksesibilitas pendidikan tinggi, kualitas pendidikan dan partisipasi masyarakat dalam memperoleh pendidikan
			7			Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	BPS	8,55	11,87	17,4	22,24	27,83	Peningkatan target capaian selaras dengan peningkatan kualitas pendidikan, akses informasi pasar kerja dan peningkatan lapangan kerja
	III. Terselenggaranya Perlindungan sosial yang adaptif	III. Perlindungan sosial yang adaptif	III	8		Tingkat Kemiskinan (%)	BPS	2,89	2,36	1,69	1,02	0,02-0,22	target penurunan tingkat kemiskinan dikuatkan pada beberapa faktor strategis pendukung



Lampiran II

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan		Sumber Data	Target					Keterangan	
						Baseline 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045		
											seperti peningkatan kualitas keterampilan SDM serta pemerataan akses terhadap layanan kesehatan dan infrastruktur dasar yang memadai pada tahun 2045	
				9	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten (%)	Disnakertrans	37,20	47,99	61,48	74,97	91,16	peningkatan capaian program sosialisasi jaminan sosial ketenagakerjaan yang didukung oleh efektifitas sistem pelayanan dan intensif bagi para perusahaan
				10	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	BPS	7,00	11,6	17,35	23,10	30,00	peningkatan capaian selaras dengan kebijakan afirmatif dalam menyediakan pelatihan vokasional yang inklusif. Peningkatan partisipasi penyandang disabilitas di sektor formal
2	IV. Meningkatkan tingkat Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	IV. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	IV	11	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	BPS	8,86	9,60	10,52	11,44	12,54	progres peningkatan target capaian diiringi dengan jumlah Investasi di bidang teknologi, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan kebijakan yang mendukung iklim usaha yang kondusif.
				12	Pengembangan Pariwisata a Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	BPS	2,88	3,31	3,85	4,39	5,03	peningkatan terjadi linear dengan kenaikan umkm dan sektor pariwisata



Lampiran II

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan		Sumber Data	Target					Keterangan		
						Baseline 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045			
				b	Jumlah Kunjungan Tamu di Hotel Berbintang dan non bintang (Ribuan Orang)	Disparpora	2,25	4,75	7,88	11,00	14,75	peningkatan target capaian linear dengan Kemudahan akses permodalan, pelatihan kewirausahaan, dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan UMKM.	
			13		Peningkatan Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki sertifikat HAKI (Orang) (Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif)	Disparpora	69	109	159	209	269	peningkatan target capaian linear dengan Kemudahan akses permodalan, pelatihan kewirausahaan, dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan UMKM.	
			14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD	a	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada level Kabupaten (%)	DKUMKMPP	73,43	75,02	77,01	79,00	81,39	peningkatan target capaian linear dengan Kemudahan akses permodalan, pelatihan kewirausahaan, dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan UMKM.
					b	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten (%)	DKUMKMPP	99,75	99,78	99,81	99,84	99,88	peningkatan target capaian linear dengan Kemudahan akses permodalan, pelatihan kewirausahaan, dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan UMKM.
					c	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	DKUMKMPP	6,61	7,63	8,90	10,17	11,70	percepatan pencapaian target didukung dengan pendidikan kewirausahaan, inkubator bisnis, dan



Lampiran II

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan			Sumber Data	Target					Keterangan	
							Baseline 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045		
												akses terhadap jaringan mentor dan investor.	
					d	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	DKUMKMPP	0,30	0,68	1,16	1,63	2,20	target peningkatan capaian selaras dengan penguatan kelembagaan koperasi, peningkatan akses pasar, dan pengembangan produk unggulan.
					e	Return on Asset (ROA) BUMD (%)	BUMD	0,00	0,22	0,50	0,77	1,10	penjenjangan capaian terhadap Tata kelola perusahaan yang baik, profesionalisme manajemen, dan inovasi dalam pengelolaan aset.
			15	Penciptaan Lapangan Kerja Yang Baik	a	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	BPS	4,35	4,05	3,68	3,31	2,87	penurunan angka pengangguran terbuka linear dengan peningkatan kualitas, keterampilan sumber daya manusia dan ekonomi daerah .
					b	Porsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	Disnakertrans	48,00	58,00	68,00	78,00	90,00	penurunan angka pengangguran terbuka linear dengan peningkatan kualitas, keterampilan sumber daya manusia dan ekonomi daerah .
			16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)			BPS	46,97	49,66	53,02	56,39	60,42	terciptanya kolaborasi dengan sektor swasta untuk menciptakan lebih banyak peluang kerja bagi perempuan dan linear dengan



Lampiran II

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan		Sumber Data	Target					Keterangan	
						Baseline 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045		
											peningkatan keikutsertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	
				17	Indeks Kapabilitas Inovasi	BRIN	1,72	2	3	4	5	Peningkatan kualitas infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan bisnis yang kondusif dengan dikuung partisipasi masyarakat dalam mengembangkan inovasi produk dan layanan daerah
	V. Terwujudnya Ekonomi Hijau	V. Penerapan Ekonomi Hijau	V	18	Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Green Economy Index)	DPPP, DLH; Dindikbud	59,48	64,65	71,11	77,58	85,34	peningkatan tidak begitu signifikan di periode awal karena masih dalam tahap meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ekonomi hijau dan pada periode selanjutnya sudah cukup signifikan kenaikan indeksnya karena sudah didukung oleh regulasi dan kerjasama dari pihak pemerintah, swasta dan masyarakat terkait
	VI. Terwujudnya Transformasi Digital	VI. Transformasi Digital	VI	19	Persentase Penduduk Yang Mengakses Internet (%)	BPS	81,47	85,18	89,81	94,44	100	percepatan transformasi digital linear dengan peningkatan akses, penggunaan teknologi, dan inovasi layanan publik, dengan dukungan investasi



Lampiran II

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan		Sumber Data	Target					Keterangan	
						Baseline 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045		
											infrastruktur, program literasi digital, dan kolaborasi multi-pihak.	
	VII. Terwujudnya Integrasi Ekonomi Daerah, Regional, dan Global	VII. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	VII	20	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Kabupaten	DKUMKMPP	6,8	6,51	6,15	5,79	5,35	penurunan disparitas dalam mencapai efisiensi distribusi barang dan jasa, serta penguatan konektivitas antar wilayah melalui Peningkatan infrastruktur transportasi dan logistik, penguatan regulasi pasar, serta harmonisasi kebijakan perdagangan antar daerah.
				21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	BPS	27,31	28,04	28,95	29,86	30,96	peningkatan capaian yang didukung oleh iklim investasi yang kondusif, stabilitas politik dan keamanan, kemudahan berusaha, serta insentif fiskal dan non-fiskal.
				22	NET Ekspor (%)	BPS	2,50	6,61	11,75	16,89	23,06	capaian target eksporbarang dan jasa selaras dengan Peningkatan kualitas produk, inovasi, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta fasilitasi daerah dalam perdagangan dan promosi ekspor.



Lampiran II

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan			Sumber Data	Target					Keterangan		
							Baseline 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045			
	VIII. Terwujudnya Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	VIII. Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	VIII	23	Kota dan Desa Maju, Inklusif dan Berkelanjutan	a	Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Kabupaten terhadap total PDRB Kabupaten di Provinsi (%)	BPS	11,87	12,62	13,55	14,48	15,60	percepatan pencapaian target dengan pengembangan sektor jasa dan industri, peningkatan kualitas sumber daya manusia diiringi investasi infrastruktur perkotaan
						b	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	DPUPR	16,02	37,02	58,01	79,01	100	pencapaian target capaian dengan reformasi kebijakan dalam penyediaan rumah subsidi, revitalisasi permukiman kumuh, pengembangan infrastruktur perumahan, dan kebijakan yang mendukung akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
						c	Persentase Desa Mandiri (%)	DPMD	24,00	56,00	96,00	100	100	Peningkatan akses terhadap layanan dasar (pendidikan, kesehatan, infrastruktur), pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, pengembangan potensi desa (pariwisata, pertanian, kerajinan), dan penguatan kelembagaan desa.
3	IX. Terwujudnya Regulasi dan Tata Kelola yang berintegras dan adaptif	IX. Regulasi dan Tata Kelola yang berintegras dan adaptif	IX	24	Indeks Reformasi Hukum		Sekretariat Daerah	50	54	59	64	70-80	Meningkat lebih cepat di tahap 3-4 dengan semakin efektif dan efisien, serta implementasi	



Lampiran II

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Sumber Data	Target					Keterangan		
					Baseline 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045			
										kebijakan yang lebih baik.		
			25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Diskominfo	3,79	4,14	4,49	4,84	5	Peningkatan tahap 1 berfokus pada membangun infrastruktur dasar dan kapabilitas teknologi yang diperlukan, tahap selanjutnya meningkat dengan stabil	
			26	Indeks Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah	4,04	4,13	4,25	4,37	4,51-5	Meningkat lebih cepat di tahap 2 mencerminkan perbaikan sistem dan prosedur pelayanan, tahap selanjutnya meningkat dengan stabil	
			27	Indeks Integritas Nasional	KPK RI, Inspektorat	72,00	73,20	74,70	76,20	78-100	Meningkat lebih cepat di tahap 3-4 menunjukkan penyempurnaan dan stabilisasi sistem anti korupsi, memastikan semua aspek berjalan optimal, tahap selanjutnya meningkat dengan stabil	
4	X. Terwujudnya Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah Tangguh, dan Demokrasi Substansial	X. Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah Tangguh, dan Demokrasi Substansial	X	28	Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM (%)	Sekretariat Daerah	73,86	92,64	100	100	100	Peningkatan perlahan dan lebih cepat pada tahap 3-4 menunjukkan penyempurnaan dan stabilisasi sistem hukum
				29	Persentase Angka Kriminalitas (%)	Kepolisian Resor	8,67	8,28	7,89	7,61	7,37	Peningkatan sistem keamanan yang lebih canggih dan penguatan kerjasama



Lampiran II

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan		Sumber Data	Target					Keterangan		
						Baseline 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045			
											masyarakat dengan pihak kepolisian.		
			30	Indeks Demokrasi Indonesia	BPS	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Peningkatan perlahan dan lebih cepat pada tahap 4 menunjukkan penyempurnaan dan stabilisasi sistem demokrasi		
	XI. Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Makro	XI. Stabilitas Ekonomi Makro	XI	31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	Bakuda	0,50	0,70	0,95	1,20	1,50	Peningkatan pada tahap 4 menunjukkan percepatan dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah dengan penerapan kebijakan pajak yang lebih progresif.	
32				Tingkat Inflasi (%)	BPS	2,85	2,83	2,81	2,78	2,75	Peningkatan bertahap memungkinkan perencanaan yang baik dan mengurangi gejala ekonomi yang tidak diinginkan.		
33				Pendalaman/ Intermediasi Sektor Keuangan	a	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	OJK	3,64	3,65	3,67	3,69	3,71	Peningkatan bertahap menunjukkan optimalisasi dan percepatan dalam menarik investasi dan dana pihak ketiga dengan memperbaiki regulasi dan lingkungan bisnis.
					b	Total Kredit/PDRB (%)	OJK	3,61	4,11	4,75	5,38	6,15	Peningkatan yang lebih cepat dengan penerapan kebijakan yang mendukung pengembangan sektor-sektor ekonomi kritis dan



Lampiran II

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan			Sumber Data	Target					Keterangan	
							Baseline 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045		
												akses terhadap kredit bagi usaha kecil dan menengah.	
			34	Inklusi Keuangan (%)	a	Persentase Penduduk yang Memiliki Rekening Tabungan baik atas nama Sendiri ataupun Bersama (%) 5 tahun keatas	BPS	22,23	26,50	31,83	37,17	43,57	Peningkatan akses ke berbagai layanan dan produk yang disediakan oleh lembaga keuangan
					b	Persentase Penduduk yang Memiliki Rekening Tabungan baik atas nama Sendiri ataupun Bersama (%) usia produktif (15-64 tahun)	BPS	29,48	33,75	39,08	44,42	50,82	Peningkatan akses ke berbagai layanan dan produk yang disediakan oleh lembaga keuangan
	XII. Meningkatnya Peran Kepala Daerah Dalam Menciptakan Inovasi dan Daya Saing Daerah	XII. Peran Kepala Daerah Dalam Menciptakan Inovasi dan Daya Saing Daerah	XII	35		Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	BRIN	3,18	3,30	3,68	4,05	4,50	Peningkatan bertahap membantu mengurangi kesenjangan ekonomi secara berkelanjutan.
				36		Persentase Potensi konflik yang terselesaikan (%)	Banquesbangpol	84,75	87,80	91,61	95,43	100	Peningkatan yang lebih cepat dengan diversifikasi sumber pendapatan dan pengembangan potensi ekonomi lokal.
			37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	a	Persentase benda, bangunan, struktur dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi (%)	Dindikbud	18,84	30,43	44,93	59,42	76,81	Peningkatan secara bertahap menunjukkan pembangunan kebudayaan yang optimal
					b	Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi (%)	Dindikbud	26,53	42,86	63,27	83,67	100	Peningkatan secara bertahap menunjukkan pembangunan kebudayaan yang optimal



Lampiran II

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Sumber Data	Target					Keterangan	
					Baseline 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045		
			38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Bangkesbangpol	80,00	82,00	84,50	87,00	90,00	Peningkatan signifikan pada tahap 4 mencerminkan kemajuan signifikan dalam hubungan antar umat beragama, yang berdampak positif pada stabilitas sosial dan pembangunan ekonomi
XIV. Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas di Masyarakat, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	XIV. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	XIV	39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	DKPPKB	64,65	65,73	67,08	68,44	70,06	Peningkatan mencerminkan kemajuan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan keluarga yang mencakup peningkatan kesejahteraan ekonomi, kesehatan, pendidikan, hubungan keluarga, dan dukungan sosial.
			40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	BPS	0,579	0,513	0,431	0,349	0,250	Penurunan ketimpangan gender menunjukkan pengurangan ketimpangan gender disegala bidang, peningkatan akses dan pemberdayaan perempuan
XV. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	XV. Lingkungan Hidup Berkualitas	XV	41	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	DLH	62,92	63,19	63,53	63,87	64,28	Peningkatan kualitas tutupan lahan secara bertahap dan berkelanjutan didukung oleh penguatan kebijakan perlindungan lingkungan dan pengembangan lahan yang ramah lingkungan



Lampiran II

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan			Sumber Data	Target					Keterangan		
							Baseline 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045			
			42	Kualitas Lingkungan Hidup	a	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	DLH	74,38	75,07	75,92	76,78	77,81	Peningkatan IKLH mencerminkan perbaikan signifikan dalam kondisi lingkungan, yang berdampak positif pada kualitas hidup, stabilitas ekosistem, dan pembangunan berkelanjutan.	
					b	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	DPUPR	4,24	15,68	27,12	38,56	50,00	Peningkatan bertahap mencerminkan upaya yang lebih besar dalam memperluas infrastruktur sanitasi dan meningkatkan akses ke layanan sanitasi yang aman	
					c	Pengelolaan Sampah	i	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	DLH	72,05	74,44	77,43	80,41	84,00
					ii	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	DLH	38,00	53,50	69,00	84,50	100	Peningkatan target yang signifikan menggambarkan investasi yang kuat dalam infrastruktur pengelolaan sampah, pendidikan masyarakat, dan penegakan kebijakan yang ketat.	
	XVI. Terwujudnya Ketahanan Energi, Air, dan Pangan	XVI. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	XVI	43	Ketahanan energi, air dan pangan	a	Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	BPS	902,83	1.202,18	1.576,36	1.950,54	2.399,56	Peningkatan lebih cepat terdapat pada tahap 4 menunjukkan adanya peningkatan dalam infrastruktur listrik dan



Lampiran II

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan			Sumber Data	Target					Keterangan				
							Baseline 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045					
												peningkatan standar hidup masyarakat				
						b	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	DPPP	12,16	10,33	8,04	5,75	3,00	Penurunan prevalensi mencerminkan peningkatan keamanan pangan, gizi yang lebih baik, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.		
						c	Ketahanan Air	i	Kapasitas Air Baku (m3/detik)	DPUPR	0,60	0,73	0,87	1,00	1,13	Peningkatan secara stabil dengan meningkatkan kapasitas air secara bertahap dan berkelanjutan, mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
								ii	Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Bersih Perpipaan (%)	DPUPR	32,04	49,03	66,02	83,01	100	Peningkatan ini mencerminkan perbaikan signifikan dalam layanan air minum, yang berdampak positif pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat perkotaan.
	XVII. Meningkatnya Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	XVII. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	XVII	44	Penanganan Bencana	a	Indeks Risiko Bencana (IRB)	BNPB	177,31	173,19	168,04	162,89	156,71	Peninkatan secara stabil merupakan langkah menuju keberlanjutan dan kesiapsiagaan yang optimal dalam menghadapi bencana di akhir tahap perencanaan		



Lampiran II

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan			Sumber Data	Target					Keterangan	
							Baseline 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045		
					b	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	BNPB	0,36	0,42	0,49	0,57	0,66	Peningkatan secara stabil merupakan langkah menuju keberlanjutan dan kesiapsiagaan yang optimal dalam menghadapi bencana di akhir tahap perencanaan
			45	Kontribusi Persentase Penurunan Emisi GRK (%)	a	Kumulatif	DLH	22,53	24,57	26,38	28,33	30,56	Peningkatan kesadaran dan tindakan terhadap perubahan iklim
					b	Tahunan	DLH	51,31	53,2	55,45	57,17	59,08	